

TRADING LOGISTIC INTEGRATION





SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, isi Laporan ini berasal dari analisis internal serta sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Beberapa bagian dari Laporan ini memuat data dan informasi tentang pandangan ke depan, yang bersifat *forward-looking statement*, seperti target, harapan, perkiraan, estimasi, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha PPI di masa mendatang.

Sebelum dimuat di dalam Laporan, perseroan telah mempertimbangkan kepastian data dan informasi yang bersifat *forward-looking statement* dengan matang. Meski demikian, PPI tidak dapat menjamin data dan informasi tersebut benar dan akurat serta dapat terpenuhi seluruhnya. Para pembaca perlu memahami bahwa PPI menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja operasional dan kondisi usaha yang akan datang.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PPI", adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia secara umum, yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan dibuat dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, Laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi PPI www.ptppi.co.id

This report is a form of transparency and accountability of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in presenting material data and information regarding the performance and corporate governance to stakeholders. In general, the contents of this Report are derived from internal analysis as well as reliable documents and sources. Several parts of this Report contain forward-looking data and information, such as targets, expectations, approximations, estimations, prospects, or projections of PPI's operational performance and business conditions in the future.

Before being included in the Report, the company has carefully considered the certainty of data and information that are forward-looking statements. However, PPI cannot guarantee that the data and information are true and accurate and can be fully fulfilled. Readers need to understand that PPI faces various risks and uncertainties caused by various factors, such as changes in the economic, social and political situation in Indonesia. This, of course, may affect operational performance and future business conditions.

This Annual Report contains the word "PPI", sometimes the word "we" is used on the basis of convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in general, which is defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which carries out its main business activities in the domestic and international trading business sector. The mentions of the currency units such as "Rupiah", "Rp" or IDR, refer to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Rupiah.

The report is made in two languages, namely Indonesian and English. Apart from the printed edition, the similar report can be accessed through PPI's official website www.ptppi.co.id

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

ABOUT THE ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan tema “*Trading Logistic Integration*”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis perseroan sepanjang tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis PPI.

Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PPI dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi PPI kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang PPI, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Welcome to the 2021 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia with the theme “*Trading Logistic Integration*”. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on facts and the company’s business developments throughout 2021 and the future of PPI’s business sustainability.

The 2021 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is a source of comprehensive documentation containing information on PPI’s performance in a year. The information contains complete documentation describing the profile of the company; operational, marketing, and financial performance; information on the duties, roles, and structural functions of the company’s organization that applies the concept of best practices and principles of corporate governance.

The main objective of preparing this Annual Report is to increase the disclosure of PPI’s information to the relevant authorities as well as to become an annual book that helps build a sense of pride and solidarity among employees. In addition, this Annual Report also aims to build the understanding and trust of shareholders and other stakeholders about PPI through the provision of appropriate, balanced, and relevant information.

TRADING LOGISTIC INTEGRATION





TEMA LAPORAN TAHUNAN 2021

THEME OF THE 2021 ANNUAL REPORT

PPI sebagai *member of ID Food* dibawah PT RNI (Persero) sebagai Induk *Holding* dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A, mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam pelaksanaan kegiatan *supply chain end to end* dari hulu ke hilir menjadi lebih efisien, melalui peran sebagai *sales agent* dan *off-taker* pangan, *gateway* ekspor dan *key account holder* untuk kegiatan *trading* dari *member holding* pangan, dan memiliki posisi yang baik di pasar dengan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri perdagangan dan logistik terdigitalisasi di Indonesia yang semakin kompetitif.

Dengan adanya penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhandha Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada 2 Desember 2021 dan PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan BGR ke dalam PPI pada 15 September 2021, sehingga kegiatan usaha PPI berubah menjadi bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan, dan logistik. Hal ini sebagai upaya dalam menjawab tantangan pada sektor pangan di Indonesia dengan membangun infrastruktur sumber daya yang optimal, mendorong investasi dan penetrasi bisnis trading dan logistik, melakukan integrasi bisnis di sepanjang *value chain* ekosistem pangan nasional, serta meningkatkan keunggulan kompetitif dalam menjalankan fungsi ekspor *gateway*.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengusung tema Laporan Tahunan 2021 yaitu **“Trading Logistic Integration”** merupakan penguatan kemampuan yang dimiliki PPI agar tetap dapat tumbuh berkelanjutan dan senantiasa berkomitmen penuh untuk senantiasa memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta terus berupaya menjadi yang terbaik.

PPI as a member of ID Food under PT RNI (Persero) as the Parent Holding and the Government of the Republic of Indonesia as Series A Shareholder, supports the government programs to realize food sovereignty in the implementation of end-to-end supply chain activities from upstream to downstream to be more efficient, through role as sales agent and food off-taker, export gateway and key account holder for trading activities of food holding members, and has a good position in the market by increasing the growth capacity of the increasingly competitive digitalized trade and logistics industry in Indonesia.

With the signing of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Reksa into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia on December 2, 2021 and PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of BGR into PPI on September 15, 2021, PPI's business activities have turned into a domestic and international trading business, warehousing, and logistics. This is an effort to respond to challenges in the food sector in Indonesia by building optimal resource infrastructure, encouraging investment and penetration of trading and logistics businesses, conducting business integration along the value chain of the national food ecosystem, and increasing competitive advantage in carrying out the export gateway function.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia carries the theme **“Trading Logistics Integration”** for its 2021 Annual Report to strengthen PPI's capabilities so that it can continue to grow sustainably and is always fully committed to always providing added value to shareholders and stakeholders, as well as to continuously striving to be the best.

KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY



2019

Memperluas Usaha Mengoptimalkan Pertumbuhan
Expanding Business Optimizing Growth



2020

**GROWING & CARING
WITH SOCIETY**

KEUNGGULAN PERUSAHAAN COMPANY EXCELLENCE

1

Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peranan besar di sektor perdagangan nasional

As a State-Owned Enterprise (BUMN) which plays a major role in the national trade sector

2

Sebagai Agen Pembangunan pemerintah, PPI tidak hanya mementingkan profit semata, akan tetapi juga berfokus pada pemberian manfaat bagi sesama

As a government Development Agency, PPI's is not only concerned with profit, but also focuses on providing benefits for others.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

- 1 **Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab**
Disclaimer and Limitation of Liability
- 2 **Tentang Laporan Tahunan**
About The Annual Report
- 3 **Tema Laporan Tahunan 2021**
Theme of The 2021 Annual Report
- 4 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity
- 5 **Keunggulan Perusahaan**
Company Excellence
- 8 **Performa 2021**
2021 Performance
- 12 **Ikhtisar Kinerja Saham**
Share Performance Overview
- Aksi Korporasi Saham**
Corporate Action
- 14 **Perhargaan dan Sertifikasi Tahun 2021**
Awards and Certifications in 2021
- 15 **Kerjasama PPI Dengan Mitra**
PPI Cooperation with Business Partner
- 16 **Peristiwa Penting Tahun 2021**
Performance Highlights in 2021
- 79 **Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi**
Employee Demography and Competency Development
- 88 **Komposisi Pemegang Saham**
Shareholder Composition
- 89 **Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali**
Information on Majority and Controlling Shareholders
- Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama**
List of Subsidiaries and Joint Ventures
- 93 **Struktur Grup Perusahaan**
Company Group Structure
- Kronologis Pencatatan Saham**
Share Listing Chronology
- 94 **Kronologis Penerbitan Efek Lainnya**
Other Securities Issuance Chronology
- Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan**
Supporting Professional Institutions of The Company
- 96 **Informasi Situs Web Perusahaan**
Information on The Company's Website
- 98 **Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2021**
Competency Development of The Board Of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit in 2021

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 2

- 18 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of The Board of Commissioners
- 22 **Laporan Direksi**
Report of The Board of Directors

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE 3

- 30 **Identitas Perusahaan**
Corporate Identity
- 31 **Riwayat Singkat**
Brief History
- 34 **Jejak Langkah**
Milestones
- 36 **Identitas dan Logo Perusahaan**
Corporate Identity and Logo
- Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan**
Corporate Vision, Mission, and Cultural Values
- 40 **Sasaran dan Strategi Perusahaan**
Company Target and Strategy
- 5 Prioritas Strategi BUMN**
5 SOE Priority Strategies
- 41 **Maksud dan Tujuan Perseroan**
Company Purpose and Objectives
- Bidang Usaha, Produk, dan Layanan**
Line of Business, Products, and Services
- 43 **Produk dan Komoditi Perdagangan**
PPI Trade Products and Commodities
- 61 **Peta Jaringan Perdagangan PPI dan Saluran Distribusi**
PPI Trade Network Map and Distribution Channels
- 65 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure
- 67 **Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri**
Industrial Association Membership
- 68 **Profil Direksi**
Profile of The Board of Directors
- 74 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of The Board of Commissioners

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 4

- 108 **Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional**
Overview of Global and National Macroeconomics
- 110 **Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha**
Overview Of Operations Per Business Segment
- 117 **Kinerja Anak Perusahaan Tahun 2021**
Subsidiaries Performance In 2021
- 118 **Tinjauan Keuangan**
Financial Overview
- 124 **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**
Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income
- 126 **Laporan Arus Kas**
Statements Cash Flow
- 128 **Rasio Keuangan**
Financial Ratio
- 129 **Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang**
Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility
- 130 **Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Struktur Modal**
Capital Structure and Capital Structure Management Policy
- 131 **Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal**
Material Commitment for Capital Goods Investment
- Investasi Barang Modal Tahun 2021**
Investment of Capital Goods in 2021
- 133 **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021, Serta Proyeksi Tahun 2022**
Comparison Between Target and Realization In 2021, and Projections for 2022
- 135 **Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Material Information and Facts After The Accountant's Report Date
- 136 **Prospek Usaha**
Business Prospect
- 138 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspect
- 139 **Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen (ESOP/MSOP)**
Employee or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)



- 140 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
- 141 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Public Offering Funds
- 142 Transaksi Material Yang Mengandung Benturan dan/atau Pihak Afiliasi
Material Transactions with Conflict and/or Affiliates
- 143 Nama Pihak Berelasi Yang Melakukan Transaksi, Sifat Hubungan Berelasi dan Tujuan Transaksi
Related Parties Conducting The Transaction, Nature of The Related Relationship and Purpose of The Transaction
- 146 Pengaruh Perubahan Regulasi Pemerintah Terhadap PPI
Impact of Amendments to Government Regulation on PPI
- 148 Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2021
Changes in Financial Accounting Standard In 2021
- 149 Indikator Kinerja Utama PPI
PPI Key Performance Indicators
- 152 Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity



- 156 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 167 Teknologi Informasi
Information Technology

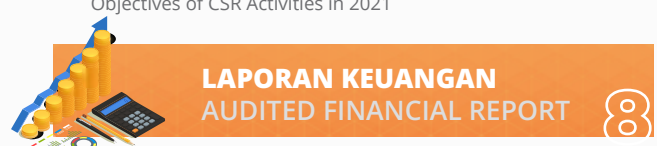


- 172 Pernyataan Komitmen Penerapan GCG
Statement of GCG Implementation Commitment
- 173 Landasan Penerapan GCG
Legal Basis of GCG Implementation
Prinsip-Prinsip GCG Dan Implementasinya
GCG Principles and Their Implementation
- 175 Maksud Dan Tujuan Penerapan GCG
GCG Implementation Purpose and Objective
Roadmap GCG PPI
PPI GCG Roadmap
- 177 Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2021
Efforts to Improve The Quality of GCG Implementation in 2021
Penilaian GCG Oleh Pihak Eksternal
GCG Assessment by External Party
- 181 Rencana Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2022
GCG Quality Improvement Plan in 2022
Struktur dan Mekanisme GCG
GCG Structure and Mechanism
- 183 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 188 Direksi
Board of Directors
- 211 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 223 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 235 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors

- 237 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors
- 239 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors
- 243 Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali
Disclosure of Affiliation of The Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders
- 244 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu
Information About Direct and Indirect Majority and Controlling Shareholders
Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of The Board of Commissioners
- 262 Organ Pendukung Di Bawah Direksi
Supporting Organs Under The Board of Directors
- 281 Akuntan Publik
Public Accountant
- 286 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 290 Akses Data dan Informasi Perusahaan
Access to Company Data and Information
- 291 Perkara Penting Tahun 2021
Legal Cases in 2021
Sanksi Administratif
Administrative Sanctions
- 292 Pedoman Etika Perusahaan
Corporate Ethics Guidelines
- 296 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Corporate Ethics Guidelines
- 302 Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
Anti-Corruption and Gratuity Control Policy
- 304 Kebijakan *Kickbacks* dan Anti-Penyuapan
Kickbacks and Anti-Bribery Policy
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
Provision of Funds for Social and Political Activities
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
Management of State Officials Wealth Reports
- 306 Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency of Bad Governance Practices
- 307 Kebijakan Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Perusahaan
Policy on Company Information Classification and Management
- 308 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Governance
- 309 Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Commitment to Fulfilling The Rights of Creditors
Kebijakan Seleksi Pemasok
Supplier Selection Policy



- 312 Komitmen Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)
Commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation
Realisasi Biaya CSR 2021
CSR Cost Realization In 2021
- 313 Tujuan Kegiatan CSR 2021
Objectives of CSR Activities in 2021



- 315 Laporan Keuangan
Audited Financial Report

PERFORMA 2021

2021 PERFORMANCE

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Overview

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan | Statement of Financial Position Overview

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	Pertumbuhan/ Penurunan (2021 - 2020) Increase/ Decrease (2021 - 2020)	%
Aset Lancar Current Assets	823.271	922.092	885.678	436.171	961.865	(98.821)	(10,72)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.587.751	3.266.699	3.194.812	2.864.888	2.237.948	321.052	9,83
Jumlah Aset Total Assets	4.411.022	4.188.791	4.080.491	3.301.059	3.199.814	222.231	5,31
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	616.102	515.484	526.616	143.978	274.036	100.618	19,52
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.007.482	990.254	962.023	1.007.780	889.321	17.228	1,74
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.623.584	1.505.739	1.488.639	1.151.759	1.163.357	117.845	7,83
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.787.437	2.683.052	2.591.851	2.149.301	2.036.456	104.385	3,89

Ikhtisar Laba (Rugi) | Profit (Loss) Overview

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	Pertumbuhan/ Penurunan (2021 - 2020) Increase/ Decrease (2021 - 2020)	%
Pendapatan Usaha Revenues	1.938.824	3.972.598	2.047.951	1.496.513	1.299.764	(2.033.774)	(51,20)
Beban Usaha Operating Expense	(2.067.670)	(3.804.021)	(208.769)	(173.177)	(145.992)	1.736.351	(45,65)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(128.846)	168.575	15.670	5.543	(922)	(297.421)	(176,43)
Pendapatan (Beban) Non - Usaha - Bersih Non-Operating In- come (Expenses) - Net	(49.094)	(14.326)	(165.150)	139.708	(192)	(34.768)	242,69

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	Pertumbuhan/ Penurunan (2021 – 2020) Increase/ Decrease (2021 – 2020)	%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(177.940)	154.249	(149.480)	145.250	(1.115)	(332.189)	(215,36)
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak Total Income (Expense) Tax	32.645	(45.480)	50.398	(34.784)	4.124	78.125	(171,78)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Income (Loss) for Current Year	(145.295)	108.769	(99.082)	110.466	2.854	(254.064)	(233,58)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss) for Current Year	246.656	(13.129)	(10.786)	2.493	(567)	259.785	(1978,71)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for Current Year	101.361	95.639	(109.868)	112.959	2.287	5.722	5,98

Ikhtisar Laporan Arus Kas | Statement of Cash Flow Overview

Keterangan Description	2021	2020	2019	2018	2017
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi Net cash flow from (for) operating activities	(74.448)	377.516	(6.467)	(71.088)	32.518
Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi Net cash flow from investing activities	(96.461)	(107.775)	39.734	38.168	(74.521)
Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan Net cash flow from financing activities	113.719	(135.470)	(61.596)	4.022	(90.937)

Rasio Keuangan | Financial Ratio

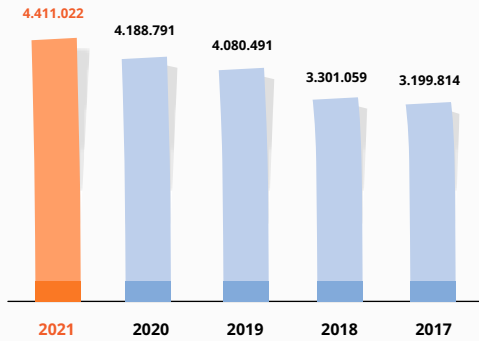
Keterangan Description	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)					
Rasio Kas Cash Ratio	28,1	44,9	35,69	57,6	61,54
Rasio Cepat Quick Ratio	87	110,4	90,82	110,5	105,82
Rasio Lancar Current Ratio	133,6	178,9	189,93	302,94	350,95
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Perputaran Total Aktiva (kali) Total Asset Turnover (times)	45,09	96,08	63,42	46,04	39,04
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	14	10,5	23,43	43,28	42,49
Perputaran Piutang (kali) Receivable Turnover (times)	5,7	11,8	16,22	18,58	34,08
Perputaran Hutang (kali) Account Payable Turnover (times)	12,39	12,95	13,27	17,26	11,47
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)					
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	36,81	35,95	35,41	34,89	36,36
Rasio Utang terhadap Modal Debt to Capital Ratio	58,2	56,1	54,81	53,59	57,13
Rasio Rentabilitas (%) Profitability Ratio (%)					
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	13,7	13	10,96	11,94	11,16
<i>EBITDA Margin</i>	(4,2)	5,1	1,56	1,57	1,83
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	(7,49)	2,74	(4,84)	7,38	0,22
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	(5,3)	4,8	(104,73)	0,54	0,54
Tingkat Pengembalian Modal Return on Capital	(6,9)	4,05	(4,86)	5,14	0,14



Grafik Ikhtisar Keuangan | Chart of Financial Overview

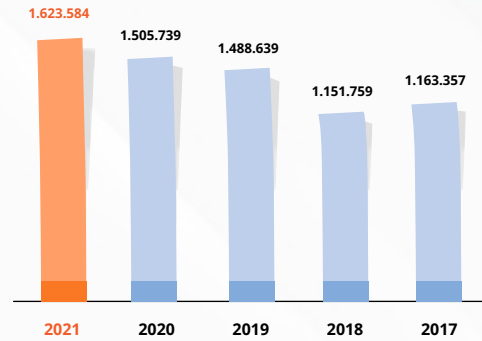
Total Aset | Total Assets

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



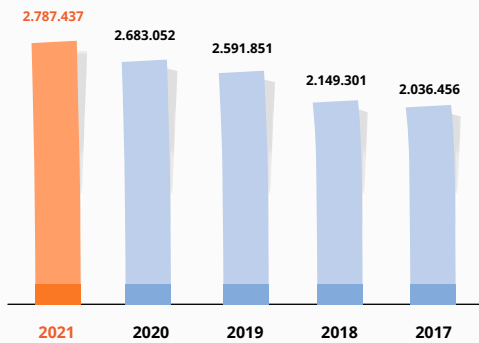
Total Liabilitas | Total Liabilities

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



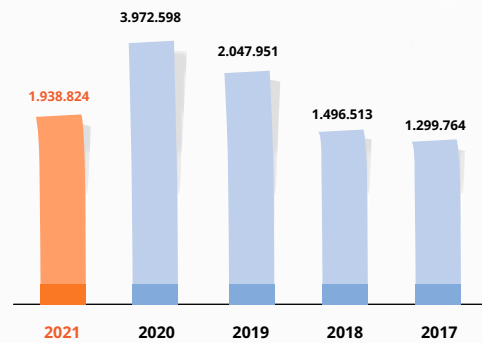
Total Ekuitas | Total Equity

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



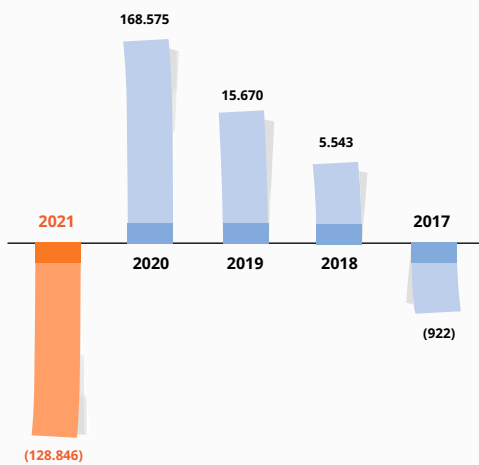
Pendapatan Usaha | Revenues

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



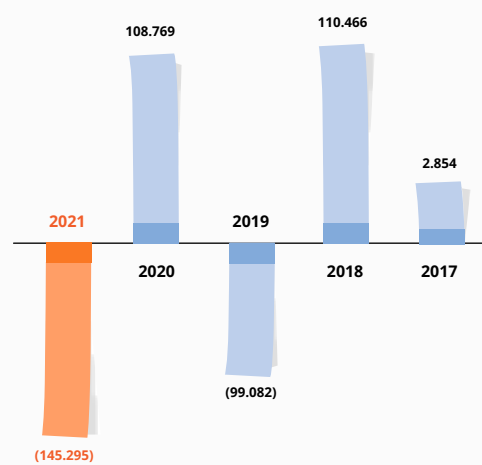
Laba (Rugi) Usaha | Operating Profit (Loss)

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan | Net Profit (Loss) for the Period

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah



IKHTISAR KINERJA SAHAM

SHARE PERFORMANCE OVERVIEW

Informasi Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga akhir 2021, PPI belum pernah melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Saham Perdana di bursa efek manapun. Dengan begitu, PPI tidak menyajikan informasi mengenai ikhtisar kinerja saham di dalam Laporan Tahunan 2021.

Dividen Saham

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan saat ini, PPI belum pernah melakukan pembagian Dividen Saham kepada Pemegang Saham. Penentuan jenis dan besaran dividen yang dibagikan selalu mengacu pada hasil keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Informasi tentang Pendanaan berupa Obligasi, Sukuk, Obligasi Konversi, maupun Efek Lainnya

Hingga akhir 2021, PPI belum pernah menerbitkan efek-efek berupa obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

AKSI KORPORASI SAHAM

CORPORATE ACTION

Pada tanggal 2 Desember 2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor S-922/MBU/12/2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021, PPI melakukan aksi korporasi berupa merger PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) dan PT Bhandha Ghara Rekza (BGR).

Merger tersebut ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza melebur ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 2 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Akta No. 5 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) dan PT Bhandha Ghara Rekza (BGR), dengan rincian sebagai berikut:

Information on Stock Trading and Public Ownership

As of the end of 2021, PPI never carried out a corporate action in the form of an Initial Public Offering on any stock exchange. Therefore, PPI does not present information regarding the overview of share performance in the 2021 Annual Report.

Share Dividend

Since it was first established, PPI has never distributed Share Dividends to Shareholders. Determination of the type and amount of dividends to be distributed always refers to the results of the resolution of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS).

Information on Funding in the form of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Securities

As of the end of 2021, PPI never issued securities in the form of bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Thus, there is no information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and ratings of bonds/sukuk.

On December 2, 2021, based on Ministerial Decree No. S-922/MBU/12/2021 and Government Regulation No. 97/2021, PPI took a corporate action in the form of a merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) and PT Bhandha Ghara Rekza (BGR).

The merger was marked by the signing of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Rekza into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. This is as stated in Deed No. 3 dated December 2, 2021 regarding Amendments to the Articles of Association and Deed No. 5 dated December 2, 2021 regarding the Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) and PT Bhandha Ghara Rekza (BGR), with the following details:



- Menerima penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) ke dalam perseroan.
- Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut konsep Akta Penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) ke dalam PPI, kecuali terkait dengan nilai kekayaan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) yang dialihkan ke dalam PPI adalah sebesar Rp786.545.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) atau sebagai 786.545 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang merupakan nilai definitif kekayaan yang dialihkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Perusahaan PPI (Persero) PT Bhandha Ghara Rekza yang Digabung Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- Berkenaan penggabungan dengan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, PPI mendapatkan saham baru sebanyak 786.545 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PPI semula sebesar Rp156.200.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp942.745.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya telah diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Menyetujui peningkatan Modal Dasar perseroan semula sebesar Rp575.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.175.877.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 1.175.877 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Accepted the merger of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) into the Company.
- Approved the Merger Plan and the concept of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) into PPI, except in relation to the asset value of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) which was transferred to PPI amounting to Rp786,545,000,000 (seven hundred and eighty-six billion five hundred and forty five million Rupiah) or 786,545 (seven hundred and eighty six thousand five hundred and forty five) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah) which is the definitive value of the assets transferred in accordance with Decree of the Minister of Finance Number 460/KMK.06/2021 concerning Determination of the Value of PT Bhandha Ghara Rekza which is Merged into the Share Capital of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- With regard to the merger with the value of assets as referred to in letter b above, PPI obtained new shares of 786,545 (seven hundred and eighty six thousand five hundred and forty five) shares each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah), so that the total issued and fully paid-up capital in PPI was originally Rp156.200.000.000,00 (one hundred and fifty six billion two hundred million Rupiah) to Rp942.7450.000.000 (nine hundred and forty two billion seven hundred and forty five million Rupiah) which has been fully subscribed by the Republic of Indonesia.
- Approved an increase in the Company's original Authorized Capital of Rp575,000,000,000.00 (five hundred and seventy-five billion Rupiah) divided into 575,000 (five hundred and seventy---five thousand) shares, each share with a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah) to Rp1,175,877,000,000.00 (one trillion one hundred and seventy five billion eight hundred and seventy-seven million Rupiah) divided into 1,175,877 (one million one hundred and seventy five thousand eight hundred and seventy seven) shares, each of which has a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah).

Dengan disahkan *merger* antara kedua Perusahaan tersebut, maka PPI menjadi *surviving entity* .

With the legalization of the merger between the two companies, PPI becomes the surviving entity.

PERHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021

AWARDS AND CERTIFICATIONS IN 2021

Penghargaan di Tahun 2021 | Awards in 2021

26 Oktober 2021 | October 26, 2021

Keterbukaan Informasi Publik kriteria "Menuju Informatif" kategori BUMN

Public Information Disclosure on the criteria of "Towards Informative" for the SOE category



Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2021 | Valid Certification in 2021

12 Agustus 2020 sampai dengan 11 Agustus 2023
August 12, 2020 until August 11, 2023

Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *Anti-Bribery Management System*
Certificate ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Dikeluarkan Oleh | Issued by :
Sucofindo International Certification Services





KERJASAMA PPI DENGAN MITRA

PPI COOPERATION WITH BUSINESS PARTNER

Sepanjang tahun 2021, PPI menjalin kerjasama kemitraan baik dengan sesama BUMN, Anak Perusahaan BUMN maupun mitra usaha lain yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Berikut adalah kerjasama yang telah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses penandatanganan, antara lain:

Throughout 2021, PPI established partnerships with other SOEs, SOE Subsidiaries and other business partners in the country and overseas. The following are agreements that have been signed or are in the process of being signed:

Kerjasama Antar – BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Cooperation with Other State-Owned Enterprises and SOE Subsidiaries Overview

No.	Nama Mitra Usaha Business Partner	Jenis Kerjasama Type of Cooperation	Produk/Jasa Product/Service
1	PT Pertamina Retail	Kerjasama operasi Joint operation	SPBU Gas Station
2	PIHC – PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Pupuk Fertilizer
3	PT Indofarma Tbk	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Produk Obat Generik Generic Drug Product
4	PT Bio Farma	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Vaksin Serum, Diagnostik Kit & Alat Kesehatan Serum Vaccines, Diagnostic Kit & Medical Devices
5	PT Petrokimia Gresik	Kerjasama Kedistributoran Pupuk Fertilizer Distributorship cooperation	Pemenuhan Obat-Obat Generik Fulfillment of Generic Drugs

Kerjasama BUMN dengan Mitra Usaha Lain (Swasta)

Cooperation of SOEs with Other Business Partners (Private)

No.	Nama Mitra Usaha Business Partner	Jenis Kerjasama Type of Cooperation	Produk/Jasa Product/Service
1	PT Inti Everspring Indonesia	Produksi Production	Pestisida Pesticide
2	PT Widatra Bhakti	Distributor Distributor	Famasi Pharmacy
3	PT Satoria Pharma	Distributor Distributor	Famasi Pharmacy
4	Borochemie International Pte Ltd	Pemasok Supplier	Bahan Kimia Berbahaya Hazardous Chemicals
5	Unilever	Distributor Distributor	Produk Konsumsi Consumption Product

PERISTIWA PENTING TAHUN 2021

PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2021



September 2021 | September 2021

PPI mengadakan Program Panen Rezeki Dharmabrand di 8 cabang sebagai langkah aktivasi produk Dharmabrand.

PPI held Panen Rezeki Dharmabrand Program in 8 branches as a measure to activate Dharmabrand products

Oktober 2021 | October 2021

Pembelian 100% saham PT Trisari Veem (TSV) oleh PPI dan usulan penggantian nama PT TSV menjadi PT BGR Logistik Indonesia.
Purchase of 100% shares in PT Trisari Veem (TSV) by PPI and proposal to change the name of PT TSV to PT BGR Logistik Indonesia.



Mei – Desember 2021 | May – December 2021

PPI lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Imbal Dagang dengan Meksiko, Rusia, Australia, Jerman, Belanda, Mesir.

PPI signed a Memorandum of Understanding for Mutual Trade Cooperation with Mexico, Russia, Australia, Germany, the Netherlands, Egypt.

September – Desember 2021 | September - December 2021

PPI lakukan pelepasan ekspor kopi ke Mesir sebanyak 600 ton.
PPI exported 600 tons of coffee to Egypt.



Desember 2021 | December 2021

Penandatanganan Akta Penggabungan PT BGR ke dalam PT PPI.
Signing of the Deed of Merger of PT BGR into PT PPI.

Desember 2021 | December 2021

PPI mengadakan *Townhall Meeting* perdana menuju Integrasi Trading Logistik Terdigitalisasi.

PPI held its first *Townhall Meeting* towards Digitalized Logistics Trading Integration.



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

2



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Herman Heru Suprobo
Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Honorable Stakeholders,

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, PT PPI mampu meningkatkan performa sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan tantangan. Pada kesempatan ini, atas nama Dewan Komisaris, dengan bangga kami sampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja perseroan untuk tahun buku 2021.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dampak dari pandemi COVID-19, sedikit banyak tentu mempengaruhi pencapaian kinerja PPI. Pada 2021, Direksi telah menentukan strategi khususnya untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka mengembalikan / memulihkan ekonomi nasional sekaligus mensukseskan terwujudnya transformasi *Holding Pangan*.

Sepanjang 2021, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam

We would like to thank God Almighty for His blessings and grace that PT PPI was able to improve performance throughout 2021 which was full of challenges. On this occasion, on behalf of the Board of Commissioners, we are proud to present the supervisory report of the Board of Commissioners on the Company's performance for the fiscal year 2021.

Performance Assessment of the Board of Directors

The COVID-19 pandemic has affected the achievement of PPI's performance. In 2021, the Board of Directors determined a specific strategy to support the Government Program in order to restore the national economy while at the same time realizing the Food Holding transformation.

The Board of Commissioners assesses that throughout 2021 the Board of Directors carried out their duties and



mengelola perseroan dengan baik. Serangkaian strategi disiapkan dan dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari perolehan kinerja keuangan dan operasional perseroan.

Kinerja Direksi dievaluasi berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam RKAP, tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan serta amanat Pemegang Saham.

Pandangan atas Prospek Usaha

Seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang diproyeksikan meningkat, Dewan Komisaris percaya bahwa rencana kerja yang sudah disusun Direksi ke depan akan membawa prospek usaha yang baik.

Adanya penggabungan PT BGR ke dalam PT PPI merupakan sinergi yang dinilai sangat berpotensi menghasilkan manfaat jangka Panjang bagi masyarakat. Sesuai dengan Visi BUMN *Holding Pangan* yaitu menjadi perusahaan produksi pangan terbaik nasional pada tahun 2024 dan pengekspor teratas makanan premium. BUMN *Holding Pangan* juga memiliki misi menjadikan Indonesia swasembada pangan, membuat masyarakat mengkonsumsi pangan berkualitas tinggi dan memperluas kemampuan negara untuk menghasilkan makanan berkualitas dalam skala besar untuk Indonesia dan dunia.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi pedoman PPI dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Adanya peningkatan persaingan dalam dunia bisnis menuntut PPI untuk melakukan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Perangkat GCG telah dienkapi dan diinternalisasikan kepada seluruh insan PPI. Dalam penerapannya, Dewan Komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan pada kegiatan bisnis perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Dewan Komisaris juga mengawasi jalannya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk komitmen PPI terhadap pembangunan yang

responsibilities in managing the Company quite well. A series of strategies were well prepared and implemented. This can be seen from the Company's financial and operational performance.

The performance of the Board of Directors is evaluated based on the performance targets listed in the RKAP, duties and responsibilities contained in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders.

Views on Business Prospect

Along with the optimism of Indonesia's economic growth in 2022 which is projected to increase, the Board of Commissioners believes that the work plan that has been prepared by the Board of Directors will bring good business prospects in the future.

The merger of PT BGR into PT PPI is a synergy that is considered to have the potential to generate long-term benefits for the community. This is In line with the Vision of SOE Food Holding, which is to become the best national food production company by 2024 and the top exporter of premium food. SOE Food Holding also has a mission to make Indonesia self-sufficient in food, make people consume high quality food and expand the country's ability to produce quality food on a large scale, both for Indonesia and the world.

Views on Good Corporate Governance Implementation

The implementation of good corporate governance is a necessity that guides PPI in carrying out its business activities. The increasing competition in the business world requires that PPI carry out business management that is not only pursuing profit but also management that is full of trust, transparency and accountability.

GCG organs have been completed and internalized to all employees of PPI. In practice, the Board of Commissioners functions to supervise the Company's business activities in accordance with GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

The Board of Commissioners also supervises the implementation of the ECSR program as a form of the by providing economic, social, environmental and legal

berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

Sepanjang 2021, praktik tata Kelola perusahaan yang dijalankan perseroan dinilai melalui *assessment* yang dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK-16/S.MBU tanggal 6 Juni 2012, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Miliki Negara.

Self assessment dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 28 Januari 2021. Mencapai skor 87,338 dari 100. Kategori predikat Sangat Baik.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan kronologis sebagai berikut:

benefits as well as governance with principles that are more integrated, focused, impactful and accountable and are part of the Company's business approach.

The implementation of the SOE ECSR Program is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000 in the program implementation, with the hope that the implementation of the SOE ECSR Program is more measurable, impactful and sustainable.

Throughout 2021, the Company's corporate governance practices were assessed through an assessment based on assessment methods and procedures in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs number SK-16/S.MBU dated June 6, 2012, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The self-assessment was carried out for 30 days from January 28, 2021. Achieved a score of 87,338 out of 100. The category of predicate was Very Good

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

As of December 31, 2021, there were changes in the composition of the Board of Commissioners with the following chronology:

Nama Dewan Komisaris Sebelumnya Former Board of Commissioners	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Didi Sumedi	Komisaris Utama President Commissioner	23 November 2020 – 19 Maret 2021 / November 23, 2020 – March 19, 2021
Hamli	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 – 19 Maret 2021 / April 2, 2020 – March 19, 2021
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 – 19 Maret 2021 / April 2, 2020 – March 19, 2021
Panel Barus	Komisaris / Commissioner	6 Juli 2020 – 2 Desember 2021 / July 6, 2020 – December 2, 2021
Edy Cahyono	Komisaris / Commissioner	13 September 2019 – 2 Desember 2021 / September 13, 2019 – December 2, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 19 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris PPI berubah menjadi:

In accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on March 19, 2021, the composition of the members of the Board of Commissioners of PPI changed to the following composition:

Nama Dewan Komisaris Saat Ini Current Board of Commissioners	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	19 Maret 2021 / March 19, 2021
Hamli	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 / April 2, 2020
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 / April 2, 2020
Panel Barus	Komisaris / Commissioner	6 Juli 2020 / July 6, 2020

Selanjutnya, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Dewan Komisaris sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 2 Desember 2021, susunan anggota Dewan Komisaris berubah menjadi:

Subsequently, PPI changed the composition of the Board of Commissioners again in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on December 2, 2021. The composition of The members of The Board of Commissioners changed to the following composition:

Nama Dewan Komisaris Saat Ini Current Board of Commissioners	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	19 Maret 2021 / March 19, 2021
Hamli	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 / April 2, 2020
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris / Commissioner	2 Desember 2021 December 2, 2021
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris / Commissioner	2 April 2020 / April 2, 2020

Apresiasi

Dewan Komisaris menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi atas kepemimpinan dan kebijaksanaannya dalam menentukan strategi bisnis perseroan. Ucapan terima kasih juga diberikan sebesar-besarnya kepada manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga PPI dapat meningkatkan kinerjanya di tahun ini. Serta kepada Pemangku Kepentingan, pelanggan, segenap mitra bisnis, dan seluruh pihak terkait atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PPI sepanjang tahun ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Appreciation

The Board of Commissioners would like to express our deepest appreciation to the Board of Directors for their leadership and wisdom in determining the Company's business strategy. We are also grateful to the management and all employees for their dedication and hard work so that PPI could improve its performance this year. In addition, we would like to thank the Stakeholders, customers, all business partners, and all related parties for the support and trust given to the all related parties for the support and trust given to PPI throughout this year. May God always bestow His blessings on us all.

Jakarta, 2022

Herman Heru Suprobo

Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nina Sulistyowati

Direktur Utama
President Director

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Honorable Stakeholders,

Guna mencapai visi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk Menjadi Perusahaan Dagang Terpercaya dan Terkemuka serta Mempunyai Akses Sumber dan Jaringan Pemasaran di Dalam dan Luar Negeri, perseroan senantiasa berpegang pada tema dari Holding Pangan pada 2021 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020 – 2024.

Pada 2021, PT PPI (Persero) berada pada Fase Penguatan sebagai bagian dari langkah perusahaan dalam jangka Panjang untuk menjadi *"Flagship Trading Company of Indonesia"* yang mendukung 5 formulasi prioritas Kementerian BUMN dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

In order to achieve the vision of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia to become a Trusted and Leading Trading Company and to Have Access to Domestic and Foreign Marketing Sources and Networks, the Company has always adhered to the theme of Food Holding in 2021 and the Company's Long Term Plan for 2020 – 2024.

In 2021, PT PPI (Persero) was in the Strengthening Phase as part of the Company's long-term steps to become the *"Flagship Trading Company of Indonesia"* which supports 5 priority formulations of the Ministry of SOEs in supporting the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) which aims to realize an Indonesian society that is independent, advanced, just, and prosperous by accelerating development in various fields by emphasizing the establishment of a solid economic structure based on competitive advantages in various regions supported by qualified and competitive human capital.



Terkait hal tersebut, PPI telah menyusun berbagai rencana kerja serta merealisasikannya, guna terwujudnya target PPI. Capaian-capaian tersebut terdiri atas aspek operasional dan aspek finansial, yang keduanya dikontrol secara ketat melalui *Key Performance Indicator* (KPI).

Pada kesempatan ini, saya mewakili Direksi akan menyampaikan hasil kinerja PT PPI untuk tahun buku 2021, yang meliputi segi finansial dan operasional, prospek usaha pada masa mendatang, penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kinerja PPI Tahun 2021

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang memiliki kompetensi perdagangan dan jaringan yang luas baik di dalam dan luar negeri, PPI memiliki peran yang krusial di proses perdagangan yakni sebagai pihak yang mempertemukan pasokan dan permintaan.

Pada Tahun 2021, PPI akan fokus pada bisnis perdagangan produk-produk yang memiliki kontribusi laba lebih besar dan tidak melakukan akselerasi bisnis yang terlalu signifikan melalui program kerja yang bertitik tolak dari 3 (tiga) pilar utama yaitu:

- a. Pendalaman pangsa pasar terhadap produk-produk Pangan eksisting, yaitu produk Pupuk dan Pestisida, produk konsumsi dan bahan pokok serta produk-produk Non-Pangan meliputi produk Bahan Kimia Berbahaya dan produk Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Melakukan integrasi, konsolidasi Proses Bisnis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
- c. Melakukan transformasi aspek Keuangan serta Sumber Daya Manusia berdasarkan *core value* AKHLAK.

Kinerja PPI tercatat terus membaik sampai menutup tahun 2021. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi penurunan pada kinerja finansial. Hal itu terlihat dari menurunnya laba (rugi) bersih perusahaan dimana sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai -126,02% dari target RKAP.

Pada tahun 2021, PPI berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 1.938 miliar yang memenuhi 83,05% target RKAP dengan perolehan rugi bersih sebesar Rp. 145.295 miliar yang mencapai -126,02% target. meskipun dengan

In this regard, PPI has prepared various work plans and realized them to achieve PPI's targets. These achievements consist of operational aspects and financial aspects, both of which are tightly controlled through Key Performance Indicators (KPI).

On this occasion, on behalf of the Board of Directors, I would like to present the results of PT PPI's performance for the fiscal year 2021, which includes financial and operational aspects, future business prospects, implementation of good corporate governance, and implementation of social and environmental responsibility.

PPI's Performance in 2021'

As a company engaged in trading with trade competence and extensive network both in the country and abroad, PPI has a crucial role in the trade process, namely as a party that brings together supply and demand.

In 2021, PPI focused on the trading business of products with a greater profit contribution and did not accelerate business too significantly through a work program starting from 3 (three) main pillars, namely:

- a. Deepening market share for existing Food products, namely Fertilizer and Pesticide products, consumer products and staples as well as Non-Food products including Hazardous Chemicals products and Pharmaceutical products as well as Medical Devices;
- b. Carrying out integration, consolidation of Business Processes by utilizing Information Technology;
- c. Transforming Finance and Human Capital aspects based on the core value of AKHLAK.

The performance of PPI was recorded to keep improving until the end of 2021. When compared to the same period in the previous year, there was a decline in financial performance. This can be seen from the decline in the Company's net profit (loss) where as of December 31, 2021, it reached -126.02% of the RKAP target.

In 2021, PPI managed to record revenue of Rp1,938 billion achieving 83.05% of the RKAP target with a net loss of Rp145.295 billion reaching -126.02% of the target. Despite the net loss earned, PPI's total equity increased

rugi bersih yang diperoleh, namun total ekuitas PPI meningkat dari Rp. 104,38 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 2.787 miliar atau memenuhi 122,91% dari target RKAP. Dengan demikian, total asset PPI meningkat dari Rp. 4.188 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 4.411 miliar atau memenuhi 129,95% dari target RKAP.

Tahun 2021 juga mencatatkan sejarah baru dalam jejak langkah PPI. Adanya penggabungan PT BGR ke dalam PPI merupakan tindakan korporasi yang berpotensi menciptakan sinergi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Visi BUMN *Holding* Pangan yaitu menjadi perusahaan produksi pangan terbaik nasional pada tahun 2024 dan pengekspor teratas makanan premium.

Prospek Usaha PPI

Prospek perekonomian nasional pada tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. PPI secara optimis dapat memegang peranan penting dalam menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia dan menggerakkan roda perdagangan nasional dimasa pandemi atau di masa yang akan datang.

PPI akan melakukan peningkatan bisnis perdagangan ke tingkat internasional melalui inovasi pembukaan *Representative Office* (RO) di Australia. Jumlah RO di tingkat internasional tercatat 6 kantor perwakilan di mancanegara yaitu di wilayah Mesir, Taiwan, Tiongkok, Dubai, Singapura, dan Australia. PPI akan terus melakukan ekspor produk berkualitas global sebagai *strategic initiative* PPI.

Selain tingkat Internasional, PPI juga memperkuat perdagangan di tingkat pedesaan, seperti pengembangan toko grosir desa di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam pengelolaannya, Toko Grosir Desa akan membantu mengurangi rantai distribusi yang akan mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa.

PPI terus bertransformasi sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan umum dan khususnya program produk secara komersial dan terukur. Dengan meningkatkan kepiawaian dalam bertransaksi antarlintas negara dan menjalin kemitraan dengan memberikan layanan terintegrasi yang sejalan dengan *High Level Roadmap* yang dilakukan mulai tahun 2022.

from Rp104.38 billion in 2020 to Rp2,787 billion or achieving 122.91% of the RKAP target. Thus, PPI's total assets increased from Rp4,188 billion in 2020 to Rp4.411 billion or achieving 129.95% of the RKAP target.

PPI also recorded a new milestone in 2021. The merger of PT BGR into PPI is a corporate action that has the potential to create synergies. This is carried out to realize the Vision of SOE Food Holding, which is to become the best national food production company by 2024 and the top exporter of premium food.

PPI's Business Prospects

The outlook for the national economy in 2022 is estimated to improve in line with the projected global economic recovery and the impact of fiscal support on accelerating economic recovery, including support for controlling the pandemic. PPI is optimistic that it can play an important role in regenerating the Indonesian economy and driving the wheels of national trade during the pandemic or in the future.

PPI will expand its trading business to an international level through the innovation of opening a Representative Office (RO) in Australia. It is recorded that there are 6 representative offices abroad, namely in Egypt, Taiwan, China, Dubai, Singapore, and Australia. PPI will continue to export quality products globally as PPI's strategic initiative.

In addition to the international level, PPI also strengthens trade at the rural level, such as the development of village wholesale stores in West Java and Central Java. In its management, the Village Wholesale Stores will help reduce the distribution chain which will realize the availability and affordability of food for rural communities.

PPI continues to transform into a company that carries out general trading and trading in particular product programs in a commercial and measurable manner. This is conducted by increasing expertise in cross-border transactions and forging partnerships by providing integrated services that are in line with the High Level Roadmap which will begin to be carried out in 2022.



Adanya penggabungan PPI dan BGR Logistics juga turut meningkatkan efisiensi logistik pangan di Indonesia, mengurangi *food loss* pada rantai produsen, meningkatkan penetrasi bisnis *trading* dan logistik hingga peningkatan pada keterjangkauan pembelian produksi nelayan dan petani hingga ke daerah pelosok di Indonesia dengan mengutamakan mutu dan kualitas produk pangan.

Penerapan Pratik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Direksi meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan jika PPI dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Internalisasi kelima prinsip GCG juga dilakukan seiring dengan sosialisasi budaya AKHLAK kepada setiap lapisan organisasi. Melalui penerapan nilai dasar AKHLAK secara menyeluruh dan konsisten, ke depannya PPI diharapkan bisa lebih kuat menjalankan bisnis dan berperan untuk kemajuan bangsa serta negara.

PPI yang merupakan bagian dari BUMN Klaster Pangan juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu antara lain melalui peningkatan pendapatan dan tata kelola perusahaan bagi Pemerintah, ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dan mengurangi pemborosan bagi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi logistik dan mencapai biaya layanan yang lebih rendah.

Pada 2021, PPI senantiasa menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang meliputi Program Kemitraan dan Program Sosial Lingkungan. Jumlah mitra binaan PPI pada tahun 2021 adalah sebanyak 231 mitra yang bergerak di berbagai bidang UMKM seperti industri pakaian, makanan ringan, warung, pengolahan kayu, dan industri lainnya. Penyaluran Program Pendanaan UMK tercatat sebesar Rp384,5 juta yang disalurkan ke 13 mitra.

Untuk program Sosial Lingkungan, jumlah penyaluran dana pada tahun 2021 sebesar Rp1.572 juta dengan peruntukan penyaluran untuk memenuhi sasaran TPB No 2 (Tanpa Kelaparan), TPB No 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB No 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB No 5 (Kesetaraan Gender), TPB No 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak), TPB No 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB No 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan) dan TPB 15 (Ekosistem Daratan)

The merger of PPI and BGR Logistics also increases the efficiency of food logistics in Indonesia, reduces food loss in the producer chain, increases the penetration of trading and logistics businesses to increase the affordability of purchasing fisherman and farmer production to remote areas in Indonesia by prioritizing the quality of food products.

Implementation of Good Corporate Governance Practices

The Board of Directors believes that the achievement of good performance can be maintained in a sustainable manner if PPI can implement GCG principles consistently. The internalization of the five principles of GCG is also carried out in line with the socialization of the AKHLAK culture to every part of the organization. Through the thorough and consistent implementation of the basic values of AKHLAK, in the future PPI is expected to be stronger in running business and playing a role in the advancement process of the nation and state.

PPI, which is part of the SOE Food Cluster, also aims to provide benefits to stakeholders, namely by increasing revenue and corporate governance for the Government, providing quality food ingredients and reducing waste for the community, as well as increasing logistics efficiency and achieving lower service costs.

In 2021, PPI continued to carry out social and environmental responsibility programs (TJSL) which include the Partnership Program and the Environmental Social Program. The number of PPI fostered partners in 2021 was 231 partners engaged in various MSME fields such as the clothing industry, snacks, stalls, wood processing, and other industries. The distribution of the MSE Funding Program was recorded at Rp384.5 million which was distributed to 13 partners.

For the Social and Environmental program, the total distribution of funds in 2021 was Rp1,572 million with the allocation of distribution to meet the targets of SDG No. 2 (No Hunger), SDG No. 3 (Healthy and Prosperous Life), SDG No. 4 (Quality Education), SDG No. 5 (Gender Equality), SDG No 6 (Clean Water & Proper Sanitation), SDG No 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG No 11 (Sustainable Cities and Settlements) and SDG 15 (Land Ecosystems)

Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat perubahan komposisi Direksi, dengan kronologis sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2021

As of December 31, 2021, there were changes in the composition of the Board of Directors, with the following chronology:

Nama Direksi Sebelumnya Former Board of Directors	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Fasika Khaerul Zaman	Direktur Utama President Director	2 April 2020 – 18 Maret 2021 / April 2, 2020 – March 18, 2021
Prasetyo Indroharto	Direktur Teknik dan Pengembangan Director of Engineering and Development	17 Oktober 2019 – 18 Maret 2021 / October 17, 2019 – March 18, 2021
Anton Mart Irianto	Direktur Operasi Director of Operations	11 Desember 2017 – 18 Maret 2021 / December 11, 2017 – March 18, 2021
Eko Budianto	Direktur Komersial Director of Commercial	2 April 2020 – 18 Maret 2021 / April 2, 2020 – March 18, 2021
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Finance, Human Capital and General Affairs	15 Juni 2020 – 1 Juli 2021 / June 15, 2020 – July 1, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Maret 2021, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

In accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on March 18, 2021, the composition of the members of the Board of Directors changed to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama / President Director	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan / Director of Commercial and Development	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum / Director of Finance, Human Capital and General Affairs	15 Juni 2020 / June 15, 2020
Eko Budianto	Direktur Operasi / Director of Operations	18 Maret 2021 / March 18, 2021

Selanjutnya, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Direksi sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 1 Juli 2021 yang diselenggarakan melalui *Virtual Meeting*, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Subsequently, PPI changed the composition of the Board of Directors again in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on July 1, 2021 which was held through a Virtual Meeting. The composition of the members of the Board of Directors changed to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama / President Director	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan / Director of Commercial & Development	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum / Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs	1 Juli 2021 / July 1, 2021
Eko Budianto	Direktur Operasi / Director of Operations	18 Maret 2021 / March 18, 2021

Menutup akhir tahun buku 2021, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Direksi sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 3 Desember 2021, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Towards the end of 2021, PPI changed the composition of the Board of Directors again according to the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on December 3, 2021. The composition of the members of the Board of Directors changed to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama / President Director	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan / Director of Commercial & Development	18 Maret 2021 / March 18, 2021
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum / Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs	1 Juli 2021 / July 1, 2021
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi / Director of Operations	3 Desember 2021 / December 3, 2021

Apresiasi

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan PPI dalam meningkatkan kinerja di tengah kondisi pemulihan ekonomi ini adalah berkat kepercayaan penuh dari para pemangku kepentingan. Apresiasi yang tulus juga kami berikan kepada seluruh karyawan PPI atas kerja keras serta dedikasi yang tinggi sepanjang 2021. Kami percaya sinergi yang selama ini telah terbangun akan terus terjalin, serta ditingkatkan, pada tahun-tahun ke depan sehingga tujuan kita bersama untuk Menjadi Perusahaan Dagang Terpercaya dan Terkemuka serta Mempunyai Akses Sumber dan Jaringan Pemasaran di Dalam dan Luar Negeri dapat terwujud.

Jakarta, 2022

Nina Sulistyowati

Direktur Utama
President Director

Appreciation

We are fully aware that the success of PPI in improving performance amidst this economic recovery is due to the trust of stakeholders. We also extend our sincere appreciation to all employees of PPI for their hard work and high dedication throughout 2021. We believe the synergy that has been built so far will continue to be established and improved in the years to come so that our common goal is to become a Trusted and Leading Trading Company as well as to Have Access to Domestic and Foreign Sources and Marketing Networks.



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

3



IDENTITAS PERSEROAN

CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan | Company Name
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Nama Panggilan | Company Acronym
PPI

Tanggal Pendirian | Date of Establishment
19 Juni 2003 | June 19, 2003

Kegiatan Usaha | Line of Business
Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional
Domestic and international trade

Ruang Lingkup Usaha | Scope of Business
Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang.
Export, import, inter-island activities, local trade, distribution, representation and agency, retail, and procurement of goods.

Badan Hukum | Legal Entity
Perseroan Terbatas | Limited Liability Company

Dasar Hukum Pendirian | Legal Basis of Establishment

- Akta Pendirian 03 04 tanggal 9 Juni 2003 | Deed of Establishment 03 04 dated June 9, 2003
- Akta 33 Anggaran Dasar tahun 2008 | Deed 33 of the Articles of Association 2008
- Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0086086 tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016
Decree No. AHUAH. 01.03-0086086 of 2016 dated October 4, 2016
- Akta 09 Perubahan Saham tahun 2017 | Deed 09 of the Changes in Shares 2017

Modal Dasar | Authorized Capital
Rp1.175.877.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
Rp1,175,877,000,000 (one trillion one hundred and seventy-five billion eight hundred and seventy-seven million rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Issued and Fully Paid-Up Capital
Rp 156.200.000.000 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta rupiah)
Rp 156,200,000,000 (one hundred and fifty six billion two hundred million rupiah)

Komposisi Pemegang Saham Per 31 Desember 2021
Shareholder Composition As of December 31, 2021

Seluruh saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (100%) yang Pemegang Saham nya diwakili oleh Kementerian BUMN RI.

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia (100%) whose shareholders are represented by the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia.

Jumlah SDM per 31 Desember 2021 | Number of HR as of December 31, 2021
1.437 orang | 1.437 persons

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
Syailendra
Email: syailendra@ptppi.co.id
Telp.: 085888213867

Noverita Anggraeny
Email: noverita_anggraeny@ptppi.co.id
Telp.: 08161335347
Menjabat sejak 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan No: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021
Has served since December 14, 2021 based on Decree No: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021

Alamat Kantor Pusat | Head Office Address
Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp.: (021) 3862141 - Fax.: (021) 3862143

Jaringan Kantor | Office Network

- Kantor Pusat PT PPI (Persero) di Jakarta Pusat
Head Office of PT PPI (Persero) in Jakarta Pusat
- Kantor Cabang PT PPI (Persero) 32 Unit
32 units of Branch Offices of PT PPI (Persero)
- Toko Grosir Desa 70 Unit |
70 Units of Village Grocery Store
- Graha Ekspor di Kantor Pusat
Graha Ekspor at the Head Office
- Representative Office* di Tiongkok, Taiwan, dan Mesir | *Representative Office* in China, Taiwan, and Egypt

Situs Web | Website
www.ptppi.co.id

Surat Elektronik | Email
ppi.info@ptppi.co.id

Media Sosial | Social Media

- @PPIPersero
- @PPIPersero
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



RIWAYAT SINGKAT

BRIEF HISTORY

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau Indonesia Trading Company (ITC) didirikan pada 19 Juni 2003 melalui aksi merger dari 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero). Aksi merger ketiga BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta PP No. 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga yang mana rancangan penggabungannya telah disepakati di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing perusahaan pada 4 Februari 2003. Keputusan tersebut juga telah dikukuhkan dengan Akta Notaris Betsail Untajana, S.H. No. 4 tanggal 9 Juni 2003.

Lebih lanjut, penggabungan 3 (tiga) perusahaan atas nama PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero), dan PT Cipta Niaga disahkan melalui Akta Risalah RUPSLB yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No. 3 tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain mengesahkan perubahan nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), perubahan Anggaran Dasar serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-14008HT.04-TH.2003 tanggal 19 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 75 Tambahan Nomor 8784 tanggal 19 Juni 2003.

Tahun 2021 menjadi salah satu momentum bersejarah bagi PPI dimana PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai anggota BUMN *Holding Pangan* resmi bergerak pada bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan dan logistik, dengan ditandatanganinya PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT BGR Logistik Indonesia ke dalam PPI pada 15 September 2021 dan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhandha Ghara Rekza ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada tanggal 2 Desember 2021.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia or Indonesia Trading Company (ITC) was established on June 19, 2003 through the merger of 3 (three) State-Owned Enterprises (SOE), namely PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) and PT Cipta Niaga (Persero). The merger of the three SOEs was carried out in accordance with the provisions of Law no. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation No. 27 of 1998 Article 34 concerning Merger, Consolidation and Acquisition of Limited Liability Companies and Government Regulation No. 22 of 2003 dated March 31, 2003 regarding Company Merger of PT. Pantja Niaga and PT. Dharma Niaga into PT Cipta Niaga in which the merger plan was agreed upon in the Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) of each company on February 4, 2003. This resolution was also confirmed by the Notary Deed of Betsail Untajana, S.H. No. 4 dated June 9, 2003.

Furthermore, the merger of 3 (three) companies on behalf of PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero), and PT Cipta Niaga was ratified through the Deed of Minutes of the EGMS drawn up before Notary Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No. 3 dated June 9, 2003 which among others approved the change of name to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), amendment to the Articles of Association as well as increase in authorized capital, issued capital and paid-up capital. The amendments to the Articles of Association have been approved by the Minister of Justice and Human Rights through Decree No. C-14008HT.04-TH.2003 dated June 19, 2003 and announced in State Gazette Number 75 Supplement Number 8784 dated June 19, 2003.

The year 2021 became one of the historic moments for PPI where PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) as a member of the SOE Food Holding was officially engaged in the domestic, international, warehousing and logistics trading business, with the signing of PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of PT BGR Logistik Indonesia into PPI on September 15, 2021 and the Deed of Merger of the Company (Persero) PT Bhandha Ghara Rekza into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia on December 2, 2021.

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, Anggaran Dasar PPI kembali mengalami perubahan sehubungan dengan penggabungan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PPI dilakukan dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dibuat di hadapan notaris Aulia Taufani, S.H. No. 02 tanggal 7 Januari 2022. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0001565. AH.01.02.TAHUN 2022. Dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut juga ditetapkan pengalihan status PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan meyakini bahwa dengan mengedepankan *end state trading logistic* paska bergabungnya PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), PPI mampu hadir sebagai agregator, *off taker* dan *logistic* di ekosistem rantai pasok pangan dengan inovasi model bisnis yang terdigitalisasi, efisiensi dirantai pasok dan pangan *go global* melalui tahapan inisiatif strategis dengan memperbaiki fundamental (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) dan seterusnya.

Berbekal pengalaman lebih dari 18 tahun menjalankan kegiatan usaha di bidang yang digeluti, PPI berhasil menorehkan kiprahnya sebagai BUMN yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Hal ini ditandai dengan hingga akhir 2021, PPI tercatat memiliki sebanyak 32 kantor cabang dan lebih dari 12.000 kios / *outlet* yang tersebar di wilayah Indonesia, serta memiliki *Representative Office* (Luar Negeri), Toko Grosir Desa (Dalam Negeri) dan Mitra Penjualan.

Seiring berjalannya waktu, PPI telah berhasil mempertahankan eksistensinya dan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mendorong daya saing produk hingga di level regional dan internasional, serta mendistribusikan dukungan nyata dalam membantu kemajuan perekonomian nasional. Pada tahun 2021, PPI kembali berhasil menunjukkan kredibilitas serta citra dan reputasi positifnya melalui raihan sejumlah penghargaan bergengsi atas kinerja positif yang berhasil ditorehkan baik di tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional.

Until this Annual Report is published, PPI's Articles of Association have been amended again in connection with the merger. The latest amendments to PPI's Articles of Association were made with the deed of the Statement of Shareholder Resolution of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), made before notary Aulia Taufani, S.H. No. 02 dated January 7, 2022. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree Number AHU-0001565. AH.01.02.TAHUN 2022. The amendment to the Articles of Association also stipulates that the status of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) will be changed to a Limited Liability Company which is fully subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Company believes that by prioritizing end state trading logistics after the merger of PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), PPI is able to be present as an aggregator, off taker and logistic in the food supply chain ecosystem with innovative digitalized business models, supply chain efficiency and food going global through strategic initiatives by improving fundamentals (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) and so on.

With more than 18 years of experience in carrying out business activities in the field in which they are involved, PPI has succeeded in making its mark as an SOE engaged in domestic trade and international trade. This is marked by the fact that until the end of 2021, PPI is recorded as having 32 branch offices and more than 12,000 kiosks/outlets spread across Indonesia, as well as having Representative Offices (Overseas), Village Grocery Stores (Domestic) and Sales Partners.

Over time, PPI has managed to maintain its existence and make an extraordinary contribution in encouraging product competitiveness to regional and international levels, as well as distributing real support in helping the progress of the national economy. In 2021, PPI succeeded in demonstrating its credibility as well as its positive image and reputation through the achievement of a number of prestigious awards for its positive performance at the local, regional, national and international levels.



PPI optimis dengan berbagai keberhasilan yang diraih mampu menjadi cambuk dan memberikan stimulus bagi insan PPI untuk lebih meningkatkan kinerjanya, baik sebagai personal maupun secara korporasi.

Informasi Perubahan Nama

Hingga akhir 2021, PPI tidak pernah melakukan perubahan nama.

PPI is optimistic that the various successes it has achieved will always encourage and stimulate PPI personnel to further improve their performance, both personally and corporately.

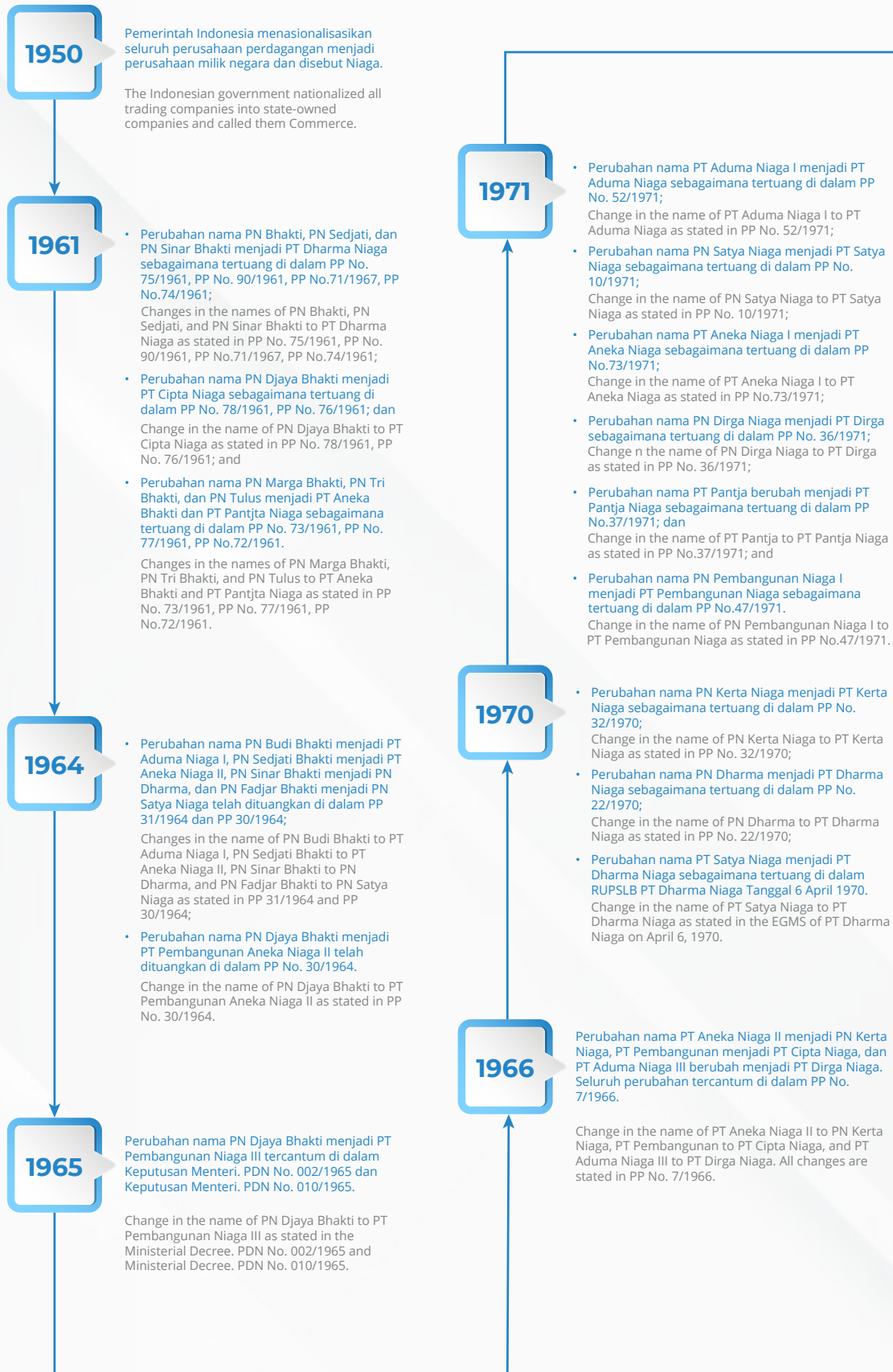
Information on Name Change

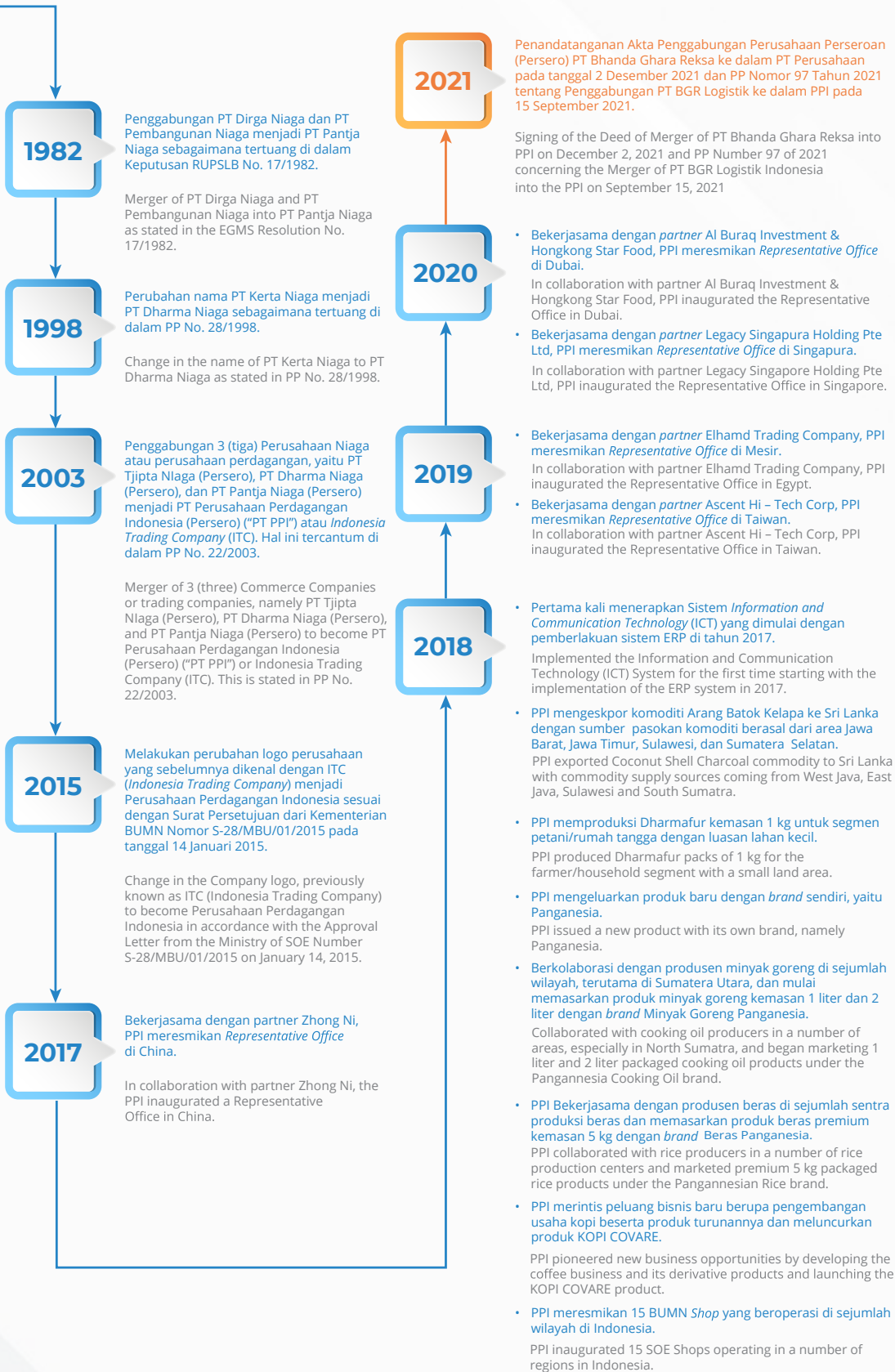
Until the end of 2021, PPI has never changed its name.



JEJAK LANGKAH

MILESTONES





IDENTITAS DAN LOGO PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY AND LOGO



Penjelasan Logo

- Simbol "P" pada logo menunjukkan PPI merupakan perusahaan perdagangan terpercaya di Indonesia.
- Warna Orange melambangkan dinamis dan bijaksana.
- Warna Biru melambangkan percaya diri, kemandirian, teknologi, dan tanggung jawab.

Logo Explanation

- The "P" symbol in the logo indicates that PPI is a trusted trading company in Indonesia.
- Orange color symbolizes dynamism and wisdom.
- Blue color symbolizes confidence, independence, technology, and responsibility.

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE VISION, MISSION, AND CULTURAL VALUES

PENETAPAN VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2021 telah meninjau dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya PPI yang digunakan sampai dengan saat ini masih selaras dengan potensi dan perkembangan bisnis PPI.

Perubahan terakhir atas Visi & Misi PPI dilakukan pada tahun 2018 dan telah disetujui perubahannya oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Direksi No. 100/DU/SKD/PPI/VI/2018.

VISION AND MISSION DETERMINATION BY KEY MANAGEMENT

The Board of Commissioners and the Board of Directors who served during the fiscal year 2021 have reviewed and agreed that PPI's Vision, Mission & Cultural Values used in the present are still in line with the Company's business potential and development.

The last amendment to PPI's Vision & Mission was carried out in 2018 and the amendment was approved by the Shareholders through the Decree of the Board of Directors No. 100/DU/SKD/PPI/VI/2018.



VISI VISION

Menjadi perusahaan dagang terpercaya dan terkemuka serta mempunyai akses sumber dan jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri

To be a trusted and leading trading company and have access to sources & marketing networks within the country and abroad

MISI MISSION

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus yang menangani beraneka ragam produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;
 2. Melaksanakan transaksi perdagangan lokal maupun lintas negara;
 3. Melakukan produksi barang-barang yang mendukung perdagangan;
 4. Menjalinkan kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan dan sistem Teknologi Informasi yang handal;
 5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui produktivitas.
1. Conducting general and special trade that handles a variety of products from upstream to downstream in a commercial and measurable manner;
 2. Carrying out local and cross-border trade transactions;
 3. Producing goods that support trade;
 4. Establishing partnerships with integrated services by utilizing reliable Information Technology networks and systems;
 5. Improving employee welfare through productivity.

FILOSOFI PERUSAHAAN CORPORATE PHILOSOPHY

“Meningkatkan nilai perusahaan melalui kemanfaatan bagi masyarakat.”
“Increasing the company value through benefits to society.”

CORE VALUES – AKHLAK CORE VALUES – AKHLAK

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) melakukan perubahan nilai-nilai perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan anak perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

AMANAH

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

KOMPETEN

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

HARMONIS

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

LOYAL

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding Guidelines for Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) has changed the Company's values into AKHLAK.

AKHLAK is the Core Values developed by the Ministry of SOEs in the context of the welfare of the community, with general goals for the benefit of the nation and state, and has specific goals for each SOE and its subsidiaries. The description of these values is as follows:

TRUSTWORTHY

Trustworthy means adhering the trust given, with the expected behavior as follows:

- Fulfilling promises and commitments
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions taken
- Adhering to moral and ethical values

COMPETENT

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behaviors:

- Improving self-competence to respond to dynamic challenges
- Helping others learn
- Completing tasks of the highest quality.

HARMONIOUS

Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behaviors:

- Respecting everyone regardless of background
- Helping others
- Building a conducive work environment.

LOYAL

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:



- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

KOLABORATIF

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

FILOSOFI PERDAGANGAN TRADE PHILOSOPHY

Komersial

Sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan tujuan stabilisasi harga.

Terukur

Setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur termasuk dalam menetapkan margin keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap *stakeholder*.

- Maintaining the reputation of other employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal
- Obeying the leaders as long as it is not against the law and ethics.

ADAPTIVE

Adaptive means continuing to innovate and being enthusiastic in moving or facing change, with the expected behaviors as follows:

- Adapting to be better quickly
- Continuously improving following technological developments
- Acting proactively

COLLABORATIVE

Collaborative means building a synergistic collaboration with the expected behaviors as follows:

- Providing opportunities for various parties to contribute
- Being open to work together to generate added value
- Mobilizing the use of various resources for common goals

Commercial

As a Limited Liability Company, it aims to carry out trading activities where the profits are prioritized for business growth and price stabilization purposes.

Measurable

Every PPI trading policy and strategy is implemented sequentially, including setting profit margins to provide benefits to each stakeholder.

SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

COMPANY TARGET AND STRATEGY

SASARAN PERUSAHAAN

1. Produk Unggulan dan Keunggulan Operasional
2. Pengembangan Sistem Informasi dari Hulu ke Hilir
3. Kemampuan Rantai Pasokan
4. Saluran Penjualan
5. Penerapan *Human Capital Management System* (HCMS)
6. Penguatan Tata Kelola Perusahaan

STRATEGI PERUSAHAAN

1. Meningkatkan Laba yang Tinggi Dengan Menjaga Arus Kas dan Neraca Keuangan yang Sehat
2. Meningkatkan Inovasi Produk dan Mengoptimalkan Operasional melalui Pengembangan Teknologi yang Terintegrasi
3. Pengembangan Bisnis dan Produk melalui penguatan rantai pasok dan saluran penjualan
4. Penguatan Struktur dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Implementasi Tata Kelola Perusahaan.

COMPANY TARGET

1. Key Product and Operation Excellence
2. Development of Information Systems from Upstream to Downstream
3. Supply Chain Capability
4. Sales Channel
5. Implementation of Human Capital Management System (HCMS)
6. To strengthen Corporate Governance

COMPANY STRATEGY

1. Increasing High Profit by maintaining Cash Flow and Healthy Balance Sheet
2. Improving Product Innovation and Optimizing Operations through Integrated Technology Development
3. Developing Business and Product by Strengthening Supply Chain and Sales Channel
4. Strengthening the Structure and Competence of Human Capital (HC)
5. Implementing Corporate Governance.

5 PRIORITAS STRATEGI BUMN

5 SOE PRIORITY STRATEGIES

PPI dalam mencanangkan rencana Strategis Korporasi yang akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan sebagai BUMN yang profesional, mandiri, unggul dan berdaya saing, serta berkontribusi maksimal pada internalisasi 5 (lima) Strategi Prioritas BUMN, antara lain:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.
2. Inovasi Model Bisnis
Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan *stakeholders*, dan fokus pada *core business*.
3. Kepemimpinan Teknologi
Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas *digital* seperti *data management*, *advanced management*, *big data*, *artificial intelligence*, dan lain-lain.
4. Peningkatan Investasi
Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

PPI has launched a Corporate Strategic plan which will serve as a guideline in achieving its goals as a professional, independent, superior and competitive SOE, as well as contributing maximally to the internalization of 5 (five) SOE Priority Strategies, including:

1. Economic and Social Value for Indonesia
Increasing economic value and social impact, especially in the fields of food security, energy, and health.
2. Business Model Innovation
Restructuring the business model by developing ecosystem, collaboration, developing stakeholder need, and focusing on core business.
3. Technology Leadership
Leading globally in strategic technology and institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, and others.
4. Investment Increase
Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem.



5. Pengembangan Talenta

Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

5. Talent Development

Educating and training the workforce, developing quality human capital for Indonesia, professionalizing governance and HC selection system.

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN COMPANY PURPOSE AND OBJECTIVES

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar PPI, adapun maksud dan tujuan pendirian PPI adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PPI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PPI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

As stated in article 3 of PPI's Articles of Association, the purpose and objective of establishing PPI is to conduct business in the trade sector in general, as well as to optimize the utilization of PPI's resources to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/ pursue profits in order to increase the value of PPI by implementing the principles of a Limited Liability Company.

BIDANG USAHA, PRODUK, DAN LAYANAN LINE OF BUSINESS, PRODUCTS, AND SERVICES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI, maka dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI menjalankan kegiatan usaha utama dan pendukung sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Hasil pertanian serta produk turunannya berikut alat-alat pertanian;
- Hasil kehutanan serta produk turunannya berikut alat-alat eksploitasi hutan;
- Hasil perkebunan serta produk turunannya berikut alat-alat perkebunan;
- Bahan-bahan untuk konstruksi;
- Alat-alat untuk konstruksi;
- Alat-alat kesehatan dan laboratorium.

Kegiatan Usaha Pendukung:

Produksi Barang-Barang yang Mendukung Perdagangan. Selain menjalankan kegiatan usaha utama, perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi pergudangan, perkantoran, pertokoan, pemanfaatan lahan, transportasi, properti, dan pariwisata, serta

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

As stated in PPI's Articles of Association, in order to achieve the above purpose and objectives, PPI carries out the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

International & Domestic Trade

- Agricultural products and their derivatives including agricultural equipment;
- Forestry products and their derivative products as well as forest exploitation equipment;
- Plantation products and their derivative products as well as plantation equipment;
- Materials for construction;
- Construction equipment;
- Medical and laboratory equipment.

Supporting Business Activities:

Production of Goods that Support Trade. In addition to carrying out its main business activities, the Company can also carry out business activities to optimize the utilization of resources which include warehousing, offices, shops, land use, transportation, property, and tourism, as well as carrying out government assignments in accordance

melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

KEGIATAN USAHA DIJALANKAN DI TAHUN 2021

Melalui eskalasi paradigma perusahaan dalam era baru industri perdagangan global, PPI secara berkelanjutan menciptakan ekosistem bisnis secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari sumber pasokan (hulu), proses nilai tambah (produksi dan pengolahan), dan secara agresif membuka jaringan distribusi (hilir) baik pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan *market share*.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PPI Nomor 3 Tahun 2021, perseroan menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Untuk mencapai hal tersebut, PPI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI
- Perikanan
- Pertambangan Batu Bara dan Lignit
- Industri Makanan
- Industri Minuman
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- *Treatment* Air Limbah
- Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
- Konstruksi Bangunan Sipil
- Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- Penyediaan Akomodasi
- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
- Aktivitas Jasa Informasi
- *Real Estate*
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya.

with the principles of corporate management and laws and regulations.

BUSINESS ACTIVITIES IN 2021

Through the escalation of the Company's paradigm in the new era of the global trade industry, PPI continuously creates a comprehensive business ecosystem by taking into account common interests starting from the source of supply (upstream), value added processes (production and processing), and aggressively opening distribution network (downstream) in both domestic and foreign markets to increase market share.

Based on the Deed of Amendment to PPI's Articles of Association Number 3 of 2021, the Company operates in the fields of Agriculture, Fisheries, Processing Industry, and Wholesale Trade. To achieve this, PPI carries out the following business activities:

- Crop Farming, Livestock, Hunting and Related Activities
- Fishery
- Coal and Lignite Mining
- Food industry
- Beverage Industry
- Industry of Chemicals and Chemical Products
- Wastewater Treatment
- Collection, Treatment and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities
- Waste and Other Waste Remediation and Management Activities
- Civil Building Construction
- Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles
- Wholesale Trade, Non-Motorized Vehicle
- Warehousing and Transport Support Activities
- Provision of Accommodation
- Programming Activities, Computer Consulting, and Related Activities
- Information Services Activities
- Real Estate
- Head Office Activities and Management Consulting
- Lease and Lease Without Option
- Office Administration Activities, Office Support Activities, and Other Business Support Activities.



INFORMASI PENGUNGKAPAN BIDANG USAHA DI DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

DISCLOSURE INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2021

Information about the above business activities has also been disclosed in the Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the fiscal year ending December 31, 2021.

PRODUK DAN KOMODITI PERDAGANGAN

PPI TRADE PRODUCTS AND COMMODITIES

Produk | Products

PPI memiliki konsep dalam pengembangan produk dan komoditi yang diperdagangkan dengan menggunakan prinsip integrasi vertikal, di mana perusahaan bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta produsen-produsen bahan kimia, pestisida dan obat-obatan yang kemudian dilakukan proses nilai tambah untuk menghasilkan produk akhir berkualitas dan siap dipasarkan melalui saluran distribusi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, aktivitas logistik dan pergudangan sebagai portofolio anak perusahaan perseroan, menjadikan *supply chain* ekosistem pangan lebih efektif dan efisien.

PESTISIDA

Komitmen untuk menjadi sahabat petani Indonesia, perseroan terus berinovasi mengembangkan sebuah solusi yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Menjawab hal tersebut, perseroan memiliki produk unggulan pestisida yang terbagi menjadi insektisida dan herbisida yaitu Dharmabrand terdiri dari Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, dan Dharmafur 3G yang merupakan golongan insektisida, serta Dharmapara 276SL, dan Dharmara 480SL sebagai golongan herbisida.

PPI has a concept in developing traded products and commodities using the principle of vertical integration, in which the Company cooperates with farmers, ranchers, fishermen, and MSMEs as well as producers of chemicals, pesticides and medicines. Then adding value processes are carried out to produce quality final products which are ready to be marketed through distribution channels within the country and overseas.

In addition, logistics and warehousing activities as a portfolio of the Company's subsidiaries make the food ecosystem supply chain more effective and efficient.

PESTICIDE

Committed to collaborating with Indonesian farmers, the Company continuously innovates to develop a solution needed by farmers to increase agricultural production. Responding to this, the Company has superior pesticide products which are divided into insecticides and herbicides, namely Dharmabrand consisting of Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, and Dharmafur 3G which are insecticides, as well as Dharmapara 276SL, and Dharmara 480SL as herbicides.

Jenis Pestisida | Types of Pesticides

**DHARMASIP 50EC**

Insektisida piretroid berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan berwarna kuning muda pucat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kedelai.

Pyrethroid insecticide with active ingredient Cypermethrin 50 g/l which functions as a contact and gastric poison, in the form of a pale light yellow concentrate that can be emulsified to control pests on chili, onion, cabbage, tomato, and soybean plants.

DHARMASAN 600EC

Insektisida organofosfat berbahan aktif fentoat 600 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning pucat yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai merah, kapas, kedelai, lada, tebu, dan tembakau.

Organophosphate insecticide with active ingredient fentoate 600 g/l which functions as a contact poison in the form of a pale yellow concentrate that can form an emulsion in water to control pests on shallots, red chilies, cotton, soybeans, pepper, sugarcane, and tobacco.

DHARMABAS 500EC

Insektisida karbamat berbahan aktif BPMC 500 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh.

Carbamate insecticide with active ingredient BPMC 500 g/l which functions as a contact poison in the form of a yellow concentrate that can be emulsified in water to control pests on rice, shallots, red chili, sugarcane, cocoa, and tea plants.

DHARMAFUR 3G

Insektisida karbamat berbahan aktif karbofuran 3% berbentuk granul yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang sistemik berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman kedelai, bawang merah, dan cabai.

Carbamate insecticide with active ingredients 3% carbofuran in the form of granules that functions as systemic contact and stomach poison in purple granular form to control pests on soybeans, shallots, and chilies.

DHARMAPARA 276SL

Herbisida terbatas berbahan aktif parakuat diklorida 247 g/l bekerja sebagai racun kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman kelapa sawit (TBM).

Limited herbicide with the active ingredient paraquat dichloride 247 g/l which functions as a post-growth contact poison, in the form of a blue-green solution in water, to control common weeds in oil palm plantations (TBM).

DHARMARA 480SL

Herbisida sistemik purna tumbuh berbahan aktif isopropil amina glifosat 480 g/l setara dengan Glifosat 356 g/l, yang berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan dan tidak selektif terhadap tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) sasaran pada pertanaman kelapa sawit (TBM).

Post-emergence systemic herbicide with the active ingredient isopropyl amine glyphosate 480 g/l equivalent to Glyphosate 356 g/l, which is in the form of a yellowish aqueous solution and is not selective against targeted cultivated plants (weeds) in oil palm plantations (TBM).

PUPUK

PPI sebagai distributor pupuk subsidi dan non subsidi bekerja sama dengan pabrikan pupuk BUMN dan swasta diantaranya PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Tetap Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco dan PT Wilmar untuk menyalurkan kebutuhan pupuk bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. PPI menyediakan kebutuhan pupuk untuk agen, kios dan *end-user* yang tersebar di setiap kantor cabang seluruh Indonesia.

FERTILIZER

PPI as a distributor of subsidized and nonsubsidized fertilizers cooperates with state-owned and private fertilizer manufacturers including PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Fixed Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco and PT Wilmar to distribute fertilizer for agricultural businesses which include Food Crops Farmers, Livestock and People's Plantations. PPI provides fertilizer for agents, kiosks and end-users spread across every branch office throughout Indonesia.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
<p>Pupuk KCL KCL Fertilizer</p>	<p>Pupuk KCL atau yang sering disebut sebagai MOP (<i>Muriate of Potash</i>) merupakan salah satu jenis pupuk tunggal yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu mengandung 60% K₂O sebagai Kalium klorida. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, Pupuk KCL dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah.</p> <p>KCL fertilizer or often referred to as MOP (<i>Muriate of Potash</i>) is a single type of fertilizer that has a high concentration containing 60% K₂O as Potassium chloride. This is a fertilizer containing potassium which is very suitable for all types of plants that are tolerant to chloride or soils with low chloride. In addition, KCL fertilizer can be applied to all types of soil.</p>
<p>Pupuk NPK NPK Fertilizer</p>	<p>Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur hara Nitrogen (N), Fosfat (P) dan Kalium (K). Pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang mengandung setidaknya 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu N, P, dan K serta 2 unsur hara mikro. Setiap jenis pupuk atau merk memiliki presentase atau komposisi kandungan yang berbeda-beda, yang ditandai dengan angka seperti NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 atau NPK 12-12-12. Angka-angka tersebut adalah presentase kandungan unsur hara makro yang ada di dalamnya, sedangkan kandungan unsur hara mikro sangat sedikit sehingga umumnya tidak ditulis pada kemasan.</p> <p>NPK fertilizer is a type of fertilizer which contains nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium (K) nutrients. NPK compound fertilizer is fertilizer that contains at least 5 nutrients consisting of 3 macro nutrients, namely N, P, and K and 2 micro nutrients. Each type of fertilizer or brand has a different percentage or composition of content, which is indicated by numbers such as NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 or NPK 12-12-12. These numbers are the percentage of macro nutrients in it, while the content of micro nutrients is very small so they are generally not written on the packaging.</p>
<p>Pupuk Urea Urea Fertilizer</p>	<p>Pupuk Urea merupakan zat yang membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea dibuat secara kimiawi dengan kandungan kadar nitrogen yang cukup tinggi. Pupuk Urea membuat daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun (klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis. Pupuk Urea juga mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein di dalam tanaman, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman usaha perkebunan, tanaman di sekitar peternakan dan juga tanaman di sekeliling usaha perikanan.</p> <p>Urea fertilizer is a substance that helps plant growth. Urea fertilizer is made chemically with fairly high nitrogen. Urea fertilizer makes plant leaves greener, lusher, and fresher. Nitrogen also helps plants to have a lot of green leaf substance (chlorophyll). In the presence of abundant leaf green matter, plants will carry out photosynthesis more easily. Urea fertilizer also accelerates plant growth, increases protein content in plants, can be used for all types of plants, including for food crops, horticultural crops, plantation crops, plants around livestock and also plants around fishing businesses.</p>

Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
<p>Pupuk ZA ZA Fertilizer</p>	<p>Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen bagi tanaman. Pupuk ZA mudah menyerap air, karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah, pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Pupuk ZA memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain; memperbaiki rasa dan warna hasil panen; tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan); kandungan nitrogennya hanya separuhnya dari pupuk urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanah-tanah yang miskin unsur ini, maka Pupuk ZA merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara belerang.</p> <p>ZA fertilizer is an artificial chemical fertilizer designed to provide additional nitrogen nutrients to plants. ZA fertilizer easily absorbs water because the sulfate ion is very easily soluble in water while the ammonium ion is weaker. This fertilizer has the potential to lower the pH of the soil affected by its application. ZA fertilizer improves quality and increases production and nutritional value of crop yields and animal feed due to increased levels of protein, starch, rice, sugar, fat, vitamins, and others; improve the taste and color of crops; plants are healthier and more resistant to environmental disturbances (pests, diseases, drought); Its nitrogen content is only half that of urea fertilizer, so it is usually given as a source of sulfur nutrient supply in soils that are poor in this element, so ZA fertilizer is the best choice to meet the needs of sulfur nutrients.</p>

BAHAN BERBAHAYA

PPI sebagai importir dan distributor bahan kimia berbahaya di Indonesia melalui harmonisasi *supply and demand* yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok bahan kimia berbahaya. PPI memiliki produk prioritas Bahan Kimia Berbahaya, yaitu:

HAZARDOUS CHEMICALS

As an importer and distributor of hazardous chemicals in Indonesia through harmonization of supply and demand supported by information and communication technology systems for the supply chain of hazardous chemicals, PPI has priority products for Hazardous Chemicals, namely:




Jenis Bahan Berbahaya Types of Hazardous Chemicals	Keterangan Description
<p>Borax Pentahydrate</p>	<p>Borax Pentahydrate adalah padatan yang berbentuk kristal berfungsi sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas buah dan mempercepat pertumbuhan; sebagai <i>fluxing agent</i> untuk efisiensi pada ruang pembakaran pada industri kaca dan keramik; dan sebagai pengawet dalam industri kayu dan pengolahan kertas.</p> <p>Borax Pentahydrate is a crystalline solid that functions as a fertilizer to improve fruit quality and accelerate growth; as a fluxing agent for efficiency in combustion chambers in the glass and ceramics industry; and as a preservative in the wood and paper processing industries.</p>
<p>Sodium Cyanide</p>	<p>Sodium Cyanide adalah senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air, berfungsi sebagai bahan pembantu ekstraksi emas, perak, dan tembaga, serta sebagai bahan pengikat dalam proses pelapisan logam.</p> <p>Sodium Cyanide is a white solid compound that is soluble in water, and serves as an auxiliary material for the extraction of gold, silver, and copper, as well as a binder in metal plating processes.</p>



Jenis Bahan Berbahaya Types of Hazardous Chemicals	Keterangan Description
MDEA	<p>MDEA adalah cairan kuning jernih yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemurnian gas Carbon Dioxide (CO₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) dalam industri pengolahan gas bumi.</p> <p>MDEA is a clear yellow liquid that functions as an ingredient used for the purification of Carbon Dioxide (CO₂) and Hydrogen Sulfide (H₂S) gases in the natural gas processing industry.</p>
TEA	<p>TEA adalah senyawa kimia organik kental dengan bau amonia yang berfungsi sebagai zat pengemulsi dalam industri consumer goods, pewarna tekstil, dan bahan pelapis anti korosi dan anti karat untuk industri besi dan baja.</p> <p>TEA is an organic chemical compound, thick with ammonia odor, which functions as an emulsifier in the consumer goods industry, textile dyes, and anti-corrosion and anti-rust coating materials for the iron and steel industry.</p>
Potassium Chlorate	<p>Potassium Chlorate adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin dan oksigen yang berbentuk kristal putih, berfungsi sebagai bahan oksidator dalam industri kembang api, korek api, peledak dan antiseptik.</p> <p>Potassium Chlorate is a compound containing potassium, chlorine and oxygen in the form of white crystals, which functions as an oxidizing agent in the fireworks, matches, explosives and antiseptic industries.</p>

BAHAN BANGUNAN

CONSTRUCTION MATERIALS

Produk Products	Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
	Semen Cement	<p>PPI mendistribusikan semen Portland Jenis I, semen jenis ini adalah semen hidrolis yang proses pembuatannya mencampurkan beberapa unsur di antaranya terak, gypsum, dan bahan anorganik, yang apabila diberi air akan membentuk pasta semen dan kemudian menjadi kaku dan keras. Jenis semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen ini di antaranya untuk konstruksi bangunan rumah pemukiman, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, landasan pacu pesawat terbang, dan lain-lain. Karakteristiknya cocok digunakan di lokasi pembangunan kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat rendah.</p> <p>Semen yang didistribusikan oleh PPI merupakan sinergi dengan hasil produk Semen Indonesia Grup (SIG) untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua PPI menghadirkan semen dengan harga yang lebih terjangkau khususnya daerah Pegunungan Tengah Papua.</p> <p>PPI distributes Portland cement Type I. This type of cement is hydraulic cement with manufacturing process mixing several elements including slag, gypsum, and inorganic materials, which when given water will form a cement paste and then become stiff and hard. This type of cement is used for general building construction which does not require special requirements for heat hydration and initial compressive strength. The uses of this cement include the construction of residential houses, high-rise buildings, roads, bridges, airplane runways, and others. Its characteristics are suitable for use in construction sites that are far from the coast and have low sulfate levels.</p> <p>The cement distributed by PPI is a synergy with the products of the Semen Indonesia Group (SIG) for the Indonesian regions. For the Papua region, PPI provides cement at a more affordable price, especially in the Central Highlands of Papua.</p>

Produk Products	Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
	<p>Aspal Asphalt</p>	<p>Aspal merupakan salah satu bahan bangunan yang acapkali digunakan dalam sebuah proyek konstruksi jalan atau sirkulasi, yang fungsi utamanya sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain seperti bitumen dan mineral. Aspal akan mengikat batuan dan komponen lain agar tidak terlepas dari permukaan jalan.</p> <p>Aspal yang didistribusikan PPI adalah jenis asphalt 60/70 yang difokuskan untuk aplikasi konstruksi jalan. Ada dua jenis aspal yang didistribusikan yaitu aspal Pertamina dan aspal Iran. Aspal Pertamina didistribusikan PPI Cabang Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram, dan Ambon yang meliputi Timika dan Manokwari. Sedangkan aspal Iran didistribusikan Cabang Palu dan Ambon.</p> <p>Asphalt is one of the building materials that is often used in road construction or circulation projects with the main function as a binder and soil surface coating which is used by mixing it with other compounds such as bitumen and minerals. Asphalt will bind rocks and other components so that they are not separated from the road surface.</p> <p>Asphalt distributed by PPI is asphalt 60/70 which is focused on road construction applications. There are two types of asphalt distributed, namely Pertamina asphalt and Iranian asphalt. Pertamina's asphalt is distributed by the PPI Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram and Ambon branches which include Timika and Manokwari. Meanwhile, the Iranian asphalt is distributed by the Palu and Ambon branches.</p>



TRANSAMIN

Transamin adalah obat anti pendarahan berbahan baku Asam Traneksamat pertama di Indonesia. PPI merupakan pemegang lisensi dari Daiichi-Sankyo untuk mendistribusikan produk Transamin.

Transamin merupakan pilihan yang terbukti aman dan efektif menangani pendarahan dengan menghambat aktivitas dari *activator* plasminogen dan plasmin, mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet dan aktivitas faktor koagulasi serta mencegah kerapuhan dinding pembuluh darah. Transamin memiliki 4 jenis yakni Transamin Kapsul 250 mg, Transamin Tablet 500 mg, Transamin Injeksi 250 mg, dan Transamin Injeksi 500 mg.

Transamin is the first anti-bleeding drug made from Tranexamic Acid in Indonesia. PPI is the licensee of Daiichi-Sankyo to distribute Transamin products.

Transamin is a proven safe and effective option to treat bleeding by inhibiting the activity of plasminogen and plasmin activator, preventing fibrin degradation, increasing platelet aggregation and activity of coagulation factors and preventing fragility of blood vessel walls. Transamin has 4 types, namely Transamin Capsules 250 mg, Transamin Tablets 500 mg, Transamin Injection 250 mg, and Transamin Injection 500 mg.



FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

PPI sebagai Pedagang Besar Farmasi dengan izin dan sertifikat distribusi oleh Kementerian Kesehatan yang tersebar di 32 Kantor Cabang bekerja sama dalam mendistribusikan produk farmasi dan alat kesehatan dari PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, dan PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribusi merupakan proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat setelah proses pembuatannya. Dalam proses pendistribusiannya, PPI menjamin kualitas produk mulai dari pengadaan, penyimpanan, peraturan dan registrasi produk hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) perlu diterapkan pada fasilitas distribusi termasuk apotek agar mutu obat dapat terjaga sampai obat dikonsumsi oleh pasien.

PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES

PPI as a Pharmaceutical Wholesaler with a license and distribution certificate by the Ministry of Health spread across 32 Branch Offices cooperates in distributing pharmaceutical products and medical devices from PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, and PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribution is an important process in maintaining the efficacy, safety, and quality of a drug after the manufacturing process. In the distribution process, PPI guarantees product quality starting from procurement, storage, regulation and product registration until it reaches consumers in accordance with the Good Drug Distribution Method (CDOB) which needs to be applied to distribution facilities including pharmacies so that drug quality can be maintained until the drug is consumed by the patients.



COVARE

Hadir dengan koneksi antara secangkir kopi dan petani yang berkomitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik. Covare menjadi sebuah pilihan tepat untuk kenikmatan secangkir kopi. Melalui pendampingan proses panen, pengelolaan pasca panen, pembelian *green bean*, hingga pemasaran, Covare hadir untuk memenuhi kebutuhan kopi masyarakat.

Coming with a connection between a cup of coffee and farmers who are committed to producing the best quality, Covare is the right choice for the enjoyment of a cup of coffee. With the assistance in the harvest process, post-harvest management, purchasing green beans, and marketing, Covare is present to meet the coffee needs of the community.

Covare tersedia dalam bentuk *roasted coffee* dan *drip coffee* dengan lima varian yaitu, Papua Wamena, Sumatera Toba, Aceh Gayo, Sumatera Mandailing, dan Papua Blend.

Covare is available in the form of *roasted coffee* and *drip coffee* with five variants, namely, Papua Wamena, Sumatera Toba, Aceh Gayo, Sumatera Mandailing, and Papua Blend.



GULA

PPI adalah distributor gula kristal putih (GKP) dan telah menerima penugasan pemerintah untuk pengadaan GKP dalam memenuhi kebutuhan GKP dalam negeri dan sebagai stabilisator harga GKP di Indonesia. Gula merupakan salah satu bahan pokok yang memberikan rasa manis pada setiap hidangan sebagai pelengkap rasa makanan, kadar ICUMSA GKP yang disalurkan oleh PPI berkisar antara 81 IU - 200 IU sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

SUGAR

PPI is a distributor of white crystal sugar (GKP) and has received a government assignment to procure GKP to meet domestic GKP needs and as a stabilizer for GKP prices in Indonesia. Sugar is one of the staple ingredients that gives a sweet taste to every dish as a complement to the taste of food. The ICUMSA GKP levels distributed by the PPI range from 81 IU - 200 IU according to the Indonesian National Standard (SNI).



KOPI

PPI merupakan salah satu eksportir komoditas kopi. Kopi adalah jenis minuman hasil seduhan biji tanaman kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kopi dapat diproses menjadi minuman dan produk-produk dengan segudang manfaat untuk kesehatan, terdapat dua jenis varietas kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta. Adapun perbedaan antara Kopi

COFFEE

PPI is one of the exporters of coffee commodities. Coffee is a type of beverage that is brewed from the coffee plant. Indonesia is one of the largest coffee producers in the world. This plant that grows in the tropics is a leading commodity in Indonesia. Coffee can be processed into beverages and products with a myriad of health benefits. There are two types of coffee varieties that are popular in Indonesia, namely Arabica and Robusta coffee. The differences between Robusta Coffee and Arabica Coffee



Robusta dan Kopi Arabica diklasifikasikan berdasarkan tempat hidup, aroma dan cita rasa, proses menanam, perawatan dan ukuran biji kopi.

Kopi Arabika tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat dengan bentuk biji kopi yang lonjong. Adapun Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900, idealnya 400-800 meter dari permukaan laut. Rasa Kopi Robusta cenderung lebih pahit dan kasar dengan ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan Arabika dengan bentuk bulat.

Berikut ini adalah jenis-jenis kopi yang tumbuh di Indonesia:

- **Kopi Aceh**, yang tersebar di sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera merupakan penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia, dengan kualitas yang baik dengan cita rasa unik, keunikan kopi ini berasal dari karakteristik aroma dan rasa kopinya yang khas. Perkebunan Kopi Aceh berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl.
- **Kopi Sumatera**, merupakan salah satu varietas kopi yang memiliki tekstur halus dan cita rasa paling berat dan kompleks di antara beragam kopi lainnya. Ketinggian pertumbuhan Kopi Sumatera berada pada 800 - 1500 mdpl.
- **Kopi Sulawesi**, mempunyai karakter rasa unik dengan aroma yang kuat dan rasa yang sedikit gurih, biji buah yang tebal serta keasaman yang rendah. Petumbuhan kopi ini berada di ketinggian 1500 - 1900 mdpl.
- **Kopi Jawa**, memiliki ukuran biji yang lebih kecil, dengan kandungan kafein yang rendah, serta rasa dan aroma yang nikmat. Kopi Jawa memiliki karakteristik aroma tipis rempah dengan kekentalan dan keasaman medium dan rasa yang seimbang, dengan ketinggian tanaman 1000 - 1500 mdpl.
- **Kopi Papua**, terkenal memiliki rasa yang seimbang dan lembut, dengan rasa asam dan aroma yang khas bernuansa coklat dan floral yang harum. Kopi ini terletak disepanjang lembah yang mengelilingi Kota Wamena pada ketinggian 1200 - 1600 mdpl yang merupakan tanah vulkanik dengan suhu mencapai 15°C saat malam hari.

are classified based on where they grow, the aroma and taste, the growing process, the treatment and size of coffee beans.

Arabica coffee grows well at an altitude of 1000 - 2000 meters above sea level, has a slightly sour taste and a color that is not too thick with an oval shape of coffee beans. The Robusta coffee grows well at an altitude of 0-900, ideally 400-800 meters above sea level. The taste of Robusta coffee tends to be more bitter and coarse with a smaller bean size than Arabica with a round shape.

The following are the types of coffee that grow in Indonesia:

- **Aceh coffee**, spread along the Bukit Barisan on the island of Sumatra, is the best producer of arabica coffee in Indonesia, with good quality and a unique taste. The uniqueness of this coffee comes from the characteristic aroma and taste of the coffee. Aceh Coffee Plantations are located at an altitude of 1000 to 1200 meters above sea level.
- **Sumatran coffee** is one of the coffee varieties that has the smoothest texture and the heaviest and most complex taste among various other coffees. Sumatran coffee plants are located at 800 - 1500 meters above sea level.
- **Sulawesi coffee** has a unique taste with a strong aroma and slightly savory taste, thick fruit seeds and low acidity. This coffee plant is located at an altitude of 1500 - 1900 meters above sea level.
- **Javanese coffee** has a smaller bean size, with low caffeine as well as a delicious taste and aroma. Javanese coffee has a thin aroma of spices with medium viscosity and acidity and a balanced taste, with a plant height of 1000 - 1500 meters above sea level.
- **Papuan coffee** is known to have a balanced and soft taste, with a sour taste and a distinctive aroma of fragrant chocolate and floral nuances. This coffee is located along the valley that surrounds Wamena City at an altitude of 1200 - 1600 meters above sea level which is on the volcanic soil with temperatures reaching 15°C at night.



BERAS

PPI melakukan perdagangan komoditas beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dan luar negeri. Beras adalah hasil olahan dari tanaman pertanian padi, merupakan komoditas pangan yang dijadikan makanan pokok bagi bangsa Asia. Beras diklasifikasikan berdasarkan jenisnya menjadi beras putih, beras ketan dan beras merah. Beras memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, berbagai vitamin dan serat, adapun kandungan gizi ini berbeda-beda berdasarkan jenis berasnya.

REMPAH-REMPAH

Indonesia sebagai negara tropis dianugerahi tanah subur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dengan berbagai manfaat, salah satunya rempah-rempah. PPI memiliki komoditi andalan ekspor yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan bagian tumbuhan yang beraroma dan berasa kuat yang digunakan sebagai produk obat tradisional, produk kecantikan, farmasi, bumbu masakan, parfum, sabun, dan lain-lain.

RICE

PPI trades in rice commodities to meet domestic and foreign rice needs. Rice is a processed product of the rice agricultural plant, which is a food commodity that is used as a staple food for the Asian countries. Rice is classified by types into white rice, glutinous rice and brown rice. Rice has nutritional content consisting of carbohydrates, protein, fat, water, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, various vitamins and fiber, while the nutritional content varies based on the type of rice.

HERBS AND SPICES

As a tropical country, Indonesia is blessed with fertile soil overgrown with various kinds of plants with various benefits, one of which are herbs and spices. PPI has a mainstay of export commodities, namely herbs and spices. They are parts of plants that have a strong aroma and taste that are used as traditional medicinal products, beauty products, pharmaceuticals, cooking spices, perfumes, soaps, and others.



Jenis Rempah-Rempah | Types of Herbs and Spices



Pala | Nutmeg

Tanaman pala memiliki daun elips yang ramping, buah seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri. Berasal dari: Ternate, Banda, Siau, Manado, dan Halmahera, tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 500-700 meter, di atas permukaan laut.

Nutmeg plant has slender elliptical leaves, fruit like lemon, yellow in color, and has a distinctive aroma because it contains essential oils. It comes from Ternate, Banda, Siau, Manado, and Halmahera, it grows well in areas that have an altitude of 500-700 meters, above sea level.



**Kapulaga
Cardamom**

Kapulaga dinominasikan sebagai salah satu rempah-rempah termahal di dunia setelah kunyit dan vanila. Berasal dari: Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Kapulaga dapat tumbuh pada ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh secara optimal dari 300 hingga 500 m di atas permukaan laut.

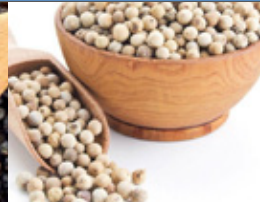
Cardamom is nominated as one of the most expensive spices in the world after turmeric and vanilla. It grows in West Java and South Sumatra. Cardamom can grow at an altitude of 200-1000 meters above sea level and can grow optimally from 300 to 500 meters above sea level.



**Lada Hitam
Black Pepper**

Lada hitam adalah buah mentah dari tanaman Piper ningrum yang telah dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, lada hitam telah dikonsumsi turun-temurun untuk mengobati gejala gangguan pencernaan maupun kondisi lainnya, termasuk: perut kembung, sakit perut, anoreksia, ulkus peptikum, nyeri perut, kram, diare, sembelit, bronkitis dan kanker.

Black pepper is the unripe fruit of the Piper ningrum plant that has been dried. Apart from being used as a cooking spice, black pepper has been consumed for generations to treat symptoms of indigestion and other conditions, including: flatulence, stomach pain, anorexia, peptic ulcer, stomach pain, cramps, diarrhea, constipation, bronchitis and cancer.



**Lada Putih
White Pepper**

Lada putih adalah rempah-rempah bercita rasa pedas dan mempunyai warna putih. Lada putih biasa dijual dalam bentuk butiran mentah atau sudah ditumbuk, yang didapatkan dari tanaman lada atau piper albi linn dan memberikan efek hangat dan pedas ketika dikonsumsi. Lada putih menjadi primadona dalam berbagai masakan dan menjadi *item* wajib di dapur.

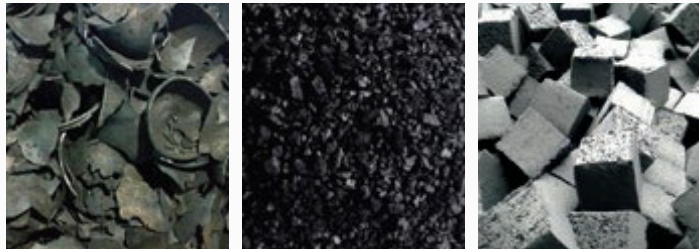
White pepper is a spice that has a spicy taste and has a white color. White pepper is usually sold in the form of raw or ground granules, which is obtained from the pepper plant or piper albi linn and gives a warm and spicy effect when consumed. White pepper is excellent in various dishes and is a mandatory ingredient in the kitchen.



Cengkeh | Clove

Cengkeh adalah kuncup bunga *aromatic* dari pohon di keluarga Myrtaceae, *Syzygium aromaticum*. Mereka adalah asli Kepulauan Maluku (dari Maluku) di Indonesia, dan umumnya digunakan sebagai rempah-rempah. Cengkeh tersedia sepanjang tahun karena musim panen yang berbeda di berbagai negara.

Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family of Myrtaceae, *Syzygium aromaticum*. They are native to the Maluku Islands (from the Maluku) in Indonesia, and are commonly used as a spice. Cloves are available all year round due to different harvest seasons in different countries.



KELAPA DAN TURUNANNYA

Indonesia adalah penghasil nomor satu kelapa di dunia. Kelapa memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, buah hingga daun. Kelapa yang dihasilkan menjadi salah satu komoditi ekspor PPI. Kelapa disebut-sebut sebagai 'tanaman kehidupan' atau *the tree of life* karena semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan dengan beragam kegunaan yang berbeda-beda. Di Indonesia, kelapa menjadi komoditas penting yang menjadi kekayaan negeri. Kelapa memiliki berbagai diversifikasi produk, di antaranya:

1. Arang Kelapa

Arang Kelapa digunakan sebagai bahan bakar yang lebih murah, efisien dan lebih stabil dalam proses pembakaran panas yang digunakan untuk memasak dan kegiatan lainnya. Tidak hanya itu, arang dapat diolah menjadi produk kecantikan dan kosmetik, sebagai penjernih air, penghilang bau dan pelembab ruangan.

2. Minyak Kelapa

Minyak kelapa terbuat dari daging kelapa segar yang diekstraksi, yang digunakan untuk keperluan memasak dan untuk kesehatan. Minyak kelapa bermanfaat sebagai antioksidan, memiliki kandungan probiotik untuk melawan bakteri jahat di dalam saluran pencernaan.

3. Santan Kelapa

Santan kelapa berasal dari parutan daging kelapa tua yang diperas dan disaring berupa cairan berwarna putih susu yang memiliki beragam manfaat seperti mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain-lain.

4. Sabut Kelapa

Sabut kelapa adalah serat alami yang diekstrak dari sabut kulit kelapa yang sering digunakan

COCONUT AND ITS DERIVATIVES

Indonesia is the number one producer of coconut in the world. Coconut has economic value that can be utilized from roots, stems, fruits to leaves. The Coconuts produced has become one of PPI's export commodities. Coconut is called the 'plant of life' or the tree of life because all parts of the coconut can be used for a variety of different uses. In Indonesia, coconut is an important commodity that becomes the wealth of the country. Coconut has a variety of product diversification, including:

1. Coconut Charcoal

Coconut Charcoal is used as a fuel that is cheaper, more efficient and more stable in the hot combustion process used for cooking and other activities. In addition, charcoal can be processed into beauty and cosmetic products, as a water purifier, deodorizer and room humidifier.

2. Coconut Oil

Coconut oil is made from fresh extracted coconut flesh, which is used for cooking and for health purposes. Coconut oil is useful as an antioxidant, containing probiotics to fight bad bacteria in the digestive tract.

3. Coconut Milk

Coconut milk comes from grated old coconut meat which is squeezed and filtered in the form of milky white liquid which has various benefits such as preventing anemia, maintaining heart health, increasing immunity, and others.

4. Coconut Coir

Coconut coir is a natural fiber extracted from coconut husk which is often used as household



sebagai peralatan rumah tangga berupa sofa, jok mobil, matras, media tanam, dan lain-lain.

appliances in the form of sofas, car seats, mattresses, planting media, and others.

5. Gula Kelapa

Gula kelapa adalah gula yang dibuat dari bahan nira kelapa, memiliki kekhasan aroma, mineral dan rasa yang baik untuk kesehatan dan rendah kalori.

5. Coconut Sugar

Coconut sugar is sugar made from coconut sap, which has a distinctive aroma, minerals and taste that are good for health and low in calories.



MINYAK KELAPA SAWIT DAN TURUNANNYA

CRUDE PALM OIL AND ITS DERIVATIVES

Minyak kelapa sawit atau crude palm oil adalah salah satu komoditi ekspor PPI. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, industri farmasi, dan dapat digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel.

Crude palm oil is one of PPI's export commodities. Crude palm oil is one of the most consumed and produced oils in the world. Crude palm oil is used as raw material for cooking oil, margarine, soap, cosmetics, steel industry, wire, radio, pharmaceutical industry, and can be used as a source of biofuel or biodiesel.



KAKAO

PPI memiliki komoditi ekspor yaitu biji kakao. Biji kakao atau biji coklat adalah biji buah pohon kakao (*Theobroma cacao*) yang telah melalui proses fermentasi dan pengeringan dan siap diolah. Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan bubuk kakao (coklat), bubuk kakao digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kue,

COCOA

PPI has an export commodity, namely cocoa beans. Cocoa beans are the fruit seeds of the cocoa tree (*Theobroma cacao*) that have gone through a fermentation and drying process and are ready to be processed. Cocoa beans are the basic ingredient for making cocoa powder (chocolate). Cocoa powder is used as an ingredient in

es krim, makanan ringan, susu, dan lain-lain. Dalam bahasa keseharian masyarakat kita menyebutnya coklat. Karakter rasa coklat adalah gurih, dengan aroma yang khas sehingga disukai banyak orang.

cakes, ice cream, snacks, milk, and others. We usually call it chocolate. The character of the chocolate taste is savory, with a distinctive aroma that is liked by many people.



TEH

PPI memiliki komoditi ekspor teh. Teh adalah jenis minuman yang dihasilkan oleh daun tanaman teh. Teh menjadi salah satu andalan komoditas ekspor di Indonesia dan menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi dunia. Wilayah Indonesia yang memproduksi teh adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Teh memiliki beragam rasa, warna, aroma dan jenis yang bervariasi, di antaranya:

1. **White Tea** merupakan teh yang berasal dari daun the termuda yang masih menggulung di bagian pucuk daun pohon teh. Teh putih memiliki antioksidan paling tinggi dibanding jenis teh lainnya. Teh putih memiliki cita rasa yang ringan, sangat segar dan lembut.
2. **Black Tea** merupakan jenis teh yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, teh hitam disebut juga teh merah karena warnanya yang terkadang kemerahan. Teh hitam didapat dari proses oksidasi yang tinggi sehingga menghasilkan kafein yang lebih banyak, dan memiliki cita rasa yang cenderung lebih kuat, asam dan agak pahit.
3. **Green Tea** dikenal sebagai teh khas Jepang karena lebih mudah ditemukan. Teh Hijau tidak mengalami proses oksidasi, kandungan kafeinnya lebih rendah dari teh hitam dan lebih tinggi dari teh putih, memiliki rasa yang ringan dan rasa pahit yang cukup kuat.

TEA

PPI has tea export commodities. Tea is a type of beverage produced by the leaves of the tea plant. Tea is one of the mainstays of export commodities in Indonesia and is the most consumed beverage in the world. The regions in Indonesia that produce tea are West Java, Central Java and North Sumatra. Tea has a variety of different flavors, colors, aromas and types, including:

1. **White Tea** is tea that comes from the youngest tea leaves that are still rolled up at the top of the tea tree. White tea has the highest antioxidants than other types of tea. White tea has a mild taste, which is very fresh and soft.
2. **Black Tea** is the type of tea most consumed by Indonesian citizens. Black tea is also called red tea because the color is sometimes reddish. Black tea is obtained from a high oxidation process so that it produces more caffeine, and has a taste that tends to be stronger, sour and slightly bitter.
3. **Green Tea** is known as a typical Japanese tea because it is easier to find. Green tea does not undergo an oxidation process. The caffeine content is lower than black tea and higher than white tea. It has a mild and strong bitter taste.



ROTAN

PPI sebagai *trader* produk *furniture* dan kerajinan Indonesia melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan material rotan alami dengan berbagai jenis desain kursi dan meja rotan beragam sesuai fungsinya. Industri kerajinan ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan pengrajin yang terampil dan kreatif dalam menyesuaikan permintaan pasar dalam dan luar negeri.

Rotan merupakan salah satu komoditas hasil hutan nonkayu unggulan Indonesia. Dari 600 spesies rotan dunia, sekitar 350 spesiesnya berada di Indonesia dan 80% populasi rotan dunia tumbuh di hutan Indonesia. Rotan memiliki karakteristik, jenis, dan dapat dianyam dalam berbagai bentuk. Rotan dijadikan bahan baku mebel karena kekuatan rotan dari sifat fisik dan mekaniknya yang baik. Sifat fisik rotan merupakan sifat khas yang dimiliki oleh suatu jenis rotan secara alamiah. Dengan semakin berkembangnya zaman, ide-ide dan kreativitas pun berkembang. Hal ini berdampak dalam desain kursi dan meja berbahan rotan sebagai bahan pembuatan *furniture*.

RATTAN

As a trader of Indonesian furniture and handicraft products, PPI conducts domestic and foreign trade with natural rattan materials with various types of rattan chair and table designs according to their functions. This handicraft industry is spread throughout Indonesia with skilled and creative craftsmen in adjusting to domestic and foreign market demands.

Rattan is one of Indonesia's leading non-timber forest product commodities. Of the 600 species of rattan in the world, around 350 species are found in Indonesia and 80% of the world's rattan population grows in Indonesian forests. Rattan has characteristics, types, and can be woven in various forms. Rattan is used as a raw material for furniture because of the strength of rattan, derived from its good physical and mechanical properties. The physical properties of rattan are the unique characteristics possessed by a type of rattan naturally. Throughout the times, ideas and creativity have been developed. This has an impact on the design of chairs and tables with rattan as the material.



GARAM

Indonesia memiliki potensi produksi sumber daya laut yang besar berupa garam. Garam menjadi salah satu bumbu utama yang menambah cita rasa masakan dan

SALT

Indonesia has a large potential for the production of marine resources in the form of salt. Salt is one of the main spices that adds to the taste of food and is a basic

menjadi kebutuhan pokok serta sebagai bahan baku berbagai macam kebutuhan industri. PPI memiliki komoditas garam konsumsi dengan kandungan NaCl 87% yang telah diperkaya dengan yodium.

Tubuh manusia membutuhkan garam dalam jumlah yang cukup agar bisa bekerja optimal, berikut ini manfaat konsumsi garam bagi tubuh:

- Membantu kinerja tiroid yang mengontrol metabolisme seluruh tubuh.
- Menjaga tingkat hidrasi dan keseimbangan elektrolit agar setiap organ berfungsi dengan baik.
- Menjaga kestabilan tekanan darah.

Kementerian Kesehatan menyarankan batas aman konsumsi garam perhari bagi orang dewasa dengan kondisi fisik sehat adalah 1 sendok teh garam, setara 5 gram garam, atau 2.000 miligram natrium. Untuk itu, pastikan konsumsi garam atau natrium setiap hari tidak melebihi batas aman.

need as well as a raw material for various industrial needs. PPI has commodity salt consumption with a NaCl content of 87% which has been enriched with iodine.

The human body needs salt in sufficient quantities in order to work optimally. Here are the benefits of consuming salt for the body:

- Helping thyroid function which controls metabolism throughout the body.
- Maintaining hydration levels and electrolyte balance for each organ to function properly.
- Maintaining stable blood pressure.

For adults with a healthy physical condition, the Ministry of Health recommends a safe limit of salt consumption per day, namely 1 teaspoon of salt, or equivalent to 5 grams of salt, or 2,000 milligrams of sodium. Thus, make sure the consumption of salt or sodium every day does not exceed the safe limit.



IKAN

Perikanan adalah salah satu sektor andalan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. PPI sebagai *offtaker* produk perikanan dari BUMN *Holding Pangan*, menyediakan produk -produk ikan segar dan ikan beku untuk pasar dalam dan luar negeri.

FISH

Fisheries are one of the mainstay sectors in Indonesia, both capture fisheries and aquaculture. PPI as fishery product *offtaker* from SOE Food Holding, provides fresh and frozen fish products for domestic and foreign markets.



WARUNG PANGAN

Aplikasi Warung Pangan adalah aplikasi *mobile* yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN, dan dikembangkan oleh PPI yang bekerjasama dengan BUMN *Holding* Pangan, UMKM, serta jaringan *supplier* lainnya untuk membeli dan menjual produk pangan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik kepada masyarakat luas. Warung Pangan hadir sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan.

Warung Pangan hadir dengan berbagai fitur, meliputi:

1. WP Asik
2. WP *Fund*
3. WP *Entrepreneur*
4. Mitra *Get Mitra*
5. Mitra *Prioritas*
6. Bayar *Nanti*

The Warung Pangan application is a mobile application initiated by the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Ministry of SOEs, and developed by PPI in collaboration with SOE Food Holding, MSMEs, and other supplier networks to buy and sell food products at competitive prices and of the best quality to the wider community. Warung Pangan is present as a solution to empower millions of sellers and consumers to participate in building the future of commerce.

Warung Pangan comes with various features, including:

1. WP Asik
2. WP *Fund*
3. WP *Entrepreneur*
4. Mitra *Get Mitra*
5. Mitra *Prioritas*
6. Bayar *Nanti*

WASTE INTEGRATED SOLUTION



PPI menyediakan layanan pengelolaan terpadu limbah berbahaya B3 yang meliputi, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah Non-B3.

- Pengelolaan Limbah B3
Memberikan solusi terpadu penanganan limbah B3 yang terkoneksi dengan Sistem Manifest Elektronik (*FestTronik*) KLHK yang menghubungkan

PPI provides integrated hazardous waste management services which include collection, transportation, utilization, and management of Non-Hazardous waste.

- Hazardous Waste Management
It provides an integrated solution for handling hazardous waste that is connected to the KLHK Electronic Manifest System (*Fest Tronik*)

antara penghasil limbah, pengangkut limbah, dan pengelola akhir limbah yang termonitor dan terintegrasi langsung dengan sistem KLHK.

- Pengelolaan Limbah Non B3
Menjawab tantangan dari limbah Non B3 yang dihasilkan dari limbah industri dan rumah tangga melalui aplikasi *online* lapak limbah (ALITA – Angkutan Limbah Logistik Industri dan Rumah Tangga).

Berikut ini berbagai jenis limbah yang telah dikelola secara terpadu :

1. *Electronic* dan *electric waste* (pembangkit listrik, distribusi listrik, rumah tangga hingga industri).
2. *Fly ash* dan *bottom ash* dari pembangkit listrik atau pabrik pupuk.
3. Daur ulang minyak goreng bekas menjadi Bio Diesel 50.
4. Pengolahan oli Bekasi dan limbah rumah sakit yang bekerjasama dengan mitra terpercaya.

connecting waste producers, waste transporters, and final waste managers which is monitored and integrated directly with the KLHK system.

- Non Hazardous Waste Management
It responds to the challenges of Non-Hazardous waste generated from industrial and household waste through the online application for waste stalls (ALITA – Transport for Industrial and Household Logistics Waste).

The following are various types of waste that have been managed in an integrated manner:

1. Electronic and electric waste (power generation, electricity distribution, household to industry).
2. Fly ash and bottom ash from power plants or fertilizer factories.
3. Recycling used cooking oil into Bio Diesel 50.
4. Bekasi oil processing and hospital waste in collaboration with trusted partners.

UNIT PENGANTONGAN PUPUK FERTILIZER PACKING UNIT



Unit Pengantongan Pupuk (UPP) adalah salah satu rangkaian kegiatan distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan *end-user*, yang bertugas untuk melakukan *finishing* proses pupuk yang telah diproduksi. PPI melalui portofolio anak perusahaan PT BGR Logistik Indonesia, menyediakan Unit Pengantongan Pupuk di beberapa area di Indonesia yang menggunakan *controlling* gudang secara terintegrasi untuk gudang lokal dengan *Warehouse Management System* (WMS) dan *trucking* melalui *Fleet Management System* (FMS).

The Fertilizer Packing Unit (UPP) is one of a series of fertilizer distribution activities from the producer to the end-user, which is tasked with finishing the fertilizer process that has been produced. PPI, through its subsidiary portfolio, PT BGR Logistik Indonesia, provides Fertilizer Packing Units in several areas in Indonesia that use integrated warehouse control for local warehouses with the Warehouse Management System (WMS) and trucking through the Fleet Management System (FMS).



PETA JARINGAN PERDAGANGAN PPI DAN SALURAN DISTRIBUSI

PPI TRADE NETWORK MAP AND DISTRIBUTION CHANNELS

Seluruh jaringan usaha berupa kantor-kantor cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Hal ini terus dikembangkan perseroan untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan, meningkatkan layanan sekaligus menangkap potensi industri pasar yang masih sangat besar di Indonesia.

The entire business network in the form of branch offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia spread across major cities in Indonesia. This is continuously developed by the Company to support trading business activities, improve services as well as capture the potential of the market industry which is still very large in Indonesia.



- 32 Cabang di seluruh Indonesia
- 70 Toko Grosir Desa
- 3 *Stockpoint*
- Negara-negara partner ekspor
- 2 *Cafe Covare*
- 12.000 Pelanggan
- Para pemasok dalam dan luar negeri
- 60.000 Warung Pangan

- 32 Branches throughout Indonesia
- 70 Village Grocery Stores
- 3 Stockpoints
- Export partner countries
- 2 Covare Cafes
- 12,000 Costumers
- Domestic and foreign suppliers
- 60,000 Food Stalls



Kantor Pusat | Head Office

Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp. | Phone: (021) 3862141
Fax.: (021) 3862143

6 Kantor Perwakilan | 6 Representative Offices

- Cina | China
- Mesir | Egypt
- Taiwan | Taiwan
- Singapura | Singapore
- Australia | Australia
- Dubai | Dubai

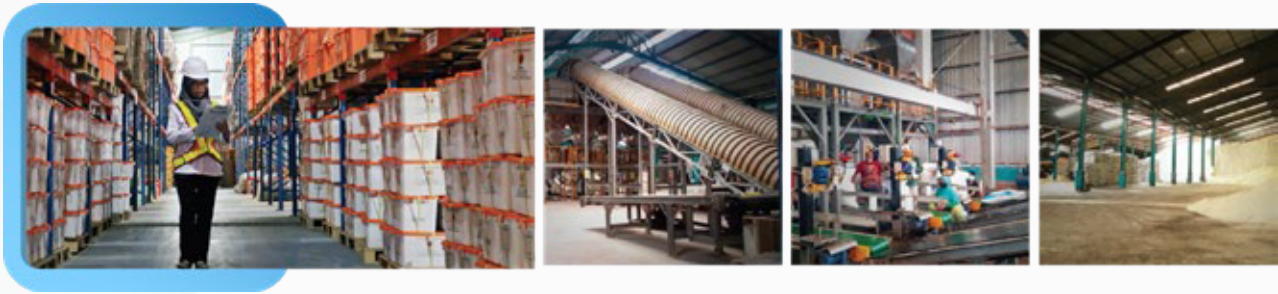
Kantor Cabang | Branch Office

No.	Nama Cabang Name	Alamat Cabang Address
1	Banda Aceh	Jl.Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 181. Banda Aceh, 23126. Telp. (0651) 22231. 22093. 23080 Fax. 33150
2	Medan	Jl. Badur No.3 Sumatera Utara. 20151,Telp. (061) 4530933, 4156833, Fax. 4156722
3	Pekanbaru	Jl. Nuri No.19 Sukajadi. Riau 26124,Telp. (0761) 25105. 22590, Fax. 853823
4	Padang	Jl. Jend.Sudirman 37. Sumatera Barat 25215. Telp (0751) 23491. 22686,Fax. 23490
5	Palembang	Jl. Kap.A.Rivai No. 41, Sumatera Selatan 30134,Telp. (0711) 351164, 313348. Fax. 312963
6	Pangkal Pinang	Jl. Hamidah No. 38. Taman Sari, Bangka Belitung 33121, Telp. (0717) 432557,Fax. 432779
7	Jambi	Jl. Pangeran Hidayat No.30C Pal V Kata Baru,36128.Telp. (0741) 43246, Fax. 40269
8	Bengkulu	Jl. A. Yani No.28. Bengkulu 38116. Telp.(0736) 21024. Fax.22130
9	Bandung	Jl. Jawa No.12, Babakan Ciamis, Bandung 40117,Telp. (022) 4203696, 4204024, Fax. 4204027
10	Cirebon	Jl. Kebumen no. 1 Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kata Cirebon,Jawa Barat 45111 Telp. (0231) 201153, 209765. Fax. 207368
11	Semarang	Jl. Letjend. Suprpto No.30Jawa Tengah 50137,Telp. (024) 3546161,3545481, Fax. 3511482



No.	Nama Cabang Name	Alamat Cabang Address
12	Purwokerto	Jl. Jend Sudirman No.347, Purwokerto 53116,Telp. (0281) 626935,636583. Fax. 626935, 636583
13	Yogyakarta	Kompleks EMPLS. PT.KAI Lempuyangan. Yogyakarta 55212. Telp. (0274) 547533,Fax. 586640
14	Surakarta	Jl. Letjend . Sutoyo No.52. Jawa Tengah 57136. Telp. (0271) 852323. 852755. Fax. 852755
15	Madiun	Jl. DR Sutomo No.33,Jawa Timur 63116,Telp. (0351) 452057, 454470, Fax. 495530
16	Malang	Jl. Ahmad Yani Utara No.2,Jawa Timur 65126,Telp. (0341) 485995, Fax. 491864
17	Surabaya	Jl. Rajawali No.54. Jawa Timur 60176. Telp. (031) 3520041.3520262.Fax. 3520233
18	Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 117, Denpasar-Bali. 80235,Telp. (0361) 222315,224104. Fax. 224104
19	Mataram	Jl. T G H Saleh Hambali no 88 Bengkel Labuapi,Lombok Barat NTB 83361. Telp/Fax. (0370) 631288
20	Kupang	Jl.Kakatua No.24 Bonipoi. Nusa Tenggara Timur 85221. Telp.(0380) 833617. 833294 ,Fax. 833294
21	Makassar	Jl. Bali No.9 Kelurahan Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar 90173. Telp.(0411) 3635421. Fax. 3635361
22	Pare-Pare	Jl. Atletik No. 50 Kel. Kampung Baru. Kec.Baeukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan kode Post 91111 telp (0421) 25205, Fax. 25224
23	Ambon	Jl. Dr. Apituley 21/31,Maluku 97112.Telp. (0911) 344670, Fax.343897
24	Banjarmasin	Jl.R. Soeprapto No.53, Kalimantan Selatan 70114, Telp.(0511) 3352095, 3354102, Fax.3352442, 3354157
25	Balikpapan	Jl. Gajah Mada No. 22.Kalimantan Timur 76113,Telp. (0542) 410564, 424493 , Fax. 422280
26	Bandar Lampung	Jl. Jend. Sudirman No 22,Lampung. 35118,Telp. (0721) 266555, 266959, Fax. 266702
27	Pontianak	Jl. Kapten Marsan No. 3.Kalimantan Barat.78117.Telp. (0561) 732119. 734254,Fax. 734512
28	Kendari	Jl. Budi Utomo RT.08 RW.03 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kata Kendari Sulawesi Tenggara 93117,Telp. (0401) 3122425. Fax.3122425
29	Gorontalo	Jl.Cendrawasih No. 12,Gorontalo.96118.Telp. (0435) 821443 . 821042. Fax. 829944
30	Manado	Jl. Garuda no 16 Kel. Mahakeret Barat Kec. Wenang Manado,Telp. (0431) 862066, 862366. Fax. 863221
31	Palu	Jl. Sungai Wera No. 4 Kel. Ujuna Kec.Palu Barat . Kade Pos 94222,Telp. (0451) 8204242. Fax. 424497
32	Jakarta	Jalan Malaka No.7-9 DICE Jakarta, 11230,Telp.(021) 6927519, 6928030,Fax. 6911162

Unit Pelayanan Publik (UPP) | Public Service Unit (UPP)



No.	Nama UPP Name	Alamat Cabang Address
1	UPP Medan	Jalan Titi Pahlawan Rengas Pulau, Medan Marelan, Medan • Luas Lahan Land Area: ± 24 Ha
2	UPP Bandar Lampung	Jalan Dock Yard, Kota Dumai, Riau • Luas Gudang Warehouse Area: ± 75x20m2 • Kapasitas Gudang Warehouse Capacity: ± 4000
3	UPP Dumai (Gedung Patra) PT Pertamina Patra Niaga	Jalan Soekarno Hatta KM 11 Srengsem Panjang, Bandar Lampung • Luas Lahan Land Area: ± 3,4 Ha
4	UPP Dumai (Gedung Perwira)	Jalan Raya Dumai Duri KM 12 Bagan Besar, Dumai • Luas Gudang Warehouse Area : ± 69x75m ² • Kapasitas Gudang Warehouse Capacity: ±18000
5	UPP Dumai (Gudang Siwitek)	Jalan Raya Dumai Duri KM 11, Dumai • Luas Gudang Warehouse Area: 23x75m ² • Kapasitas Gudang Warehouse Capacity: ±10000 - 12000

Covare Café



Covare Café & Workspace Jakarta

Jl. Abdul Muis No.8, RT.11/RW.8, Petojo Sel.,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.



Covare Café Semarang

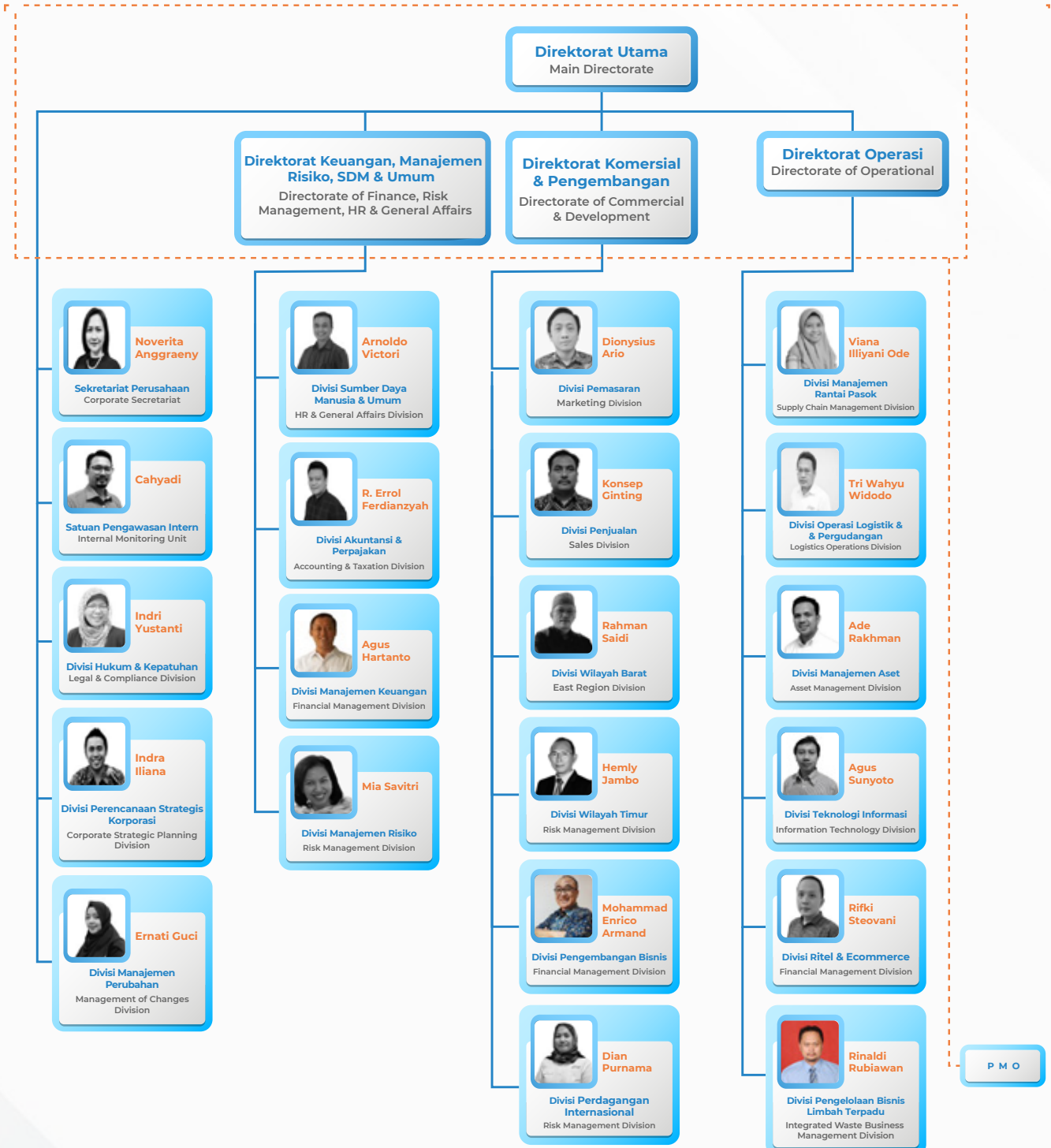
Jl. Letjen Suprpto No.30, Old Town, Tj. Mas,
Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174.



STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Nomor: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, susunan organisasi PPI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 concerning Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the organizational structure of PPI is as follows:



P M O

Nama Name	Jabatan Position
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner
Hamli	Komisaris Commissioner
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner

Nama Name	Jabatan Position
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI

INDUSTRIAL ASSOCIATION MEMBERSHIP

Nama Asosiasi Association	Status	Lingkup Asosiasi Scope of Association
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce	Anggota Biasa Regular Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Mechanical and Electrical Technics Enterprises Association	Anggota Member	Provinsi Province
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Indonesian Supplier and Distributor Association	Anggota Member	Provinsi Province



PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS



NINA SULISTYOWATI*

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan : Maret 2021 – Sekarang | March 2021 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 57 tahun, domisili di Bekasi,
Personal Indonesia
Information Indonesian citizen, 57 years old, domiciled in Bekasi, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Padjajaran, Bandung (1988)
- Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2009)
- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Padjadjaran University, Bandung (1988)
- Master of Management from the Faculty of Economics at Gadjah Mada University (2009)

Riwayat Karier | Professional Experience

- VP *Strategic Planning & Business Development* Dit. Marketing PT Pertamina (Persero) (Januari 2011 – April 2017)
- Pj. Direktur Utama PT Pertamina Lubricants (10 – 12 April 2017)
- Direktur *Marketing & IT* PT Garuda Indonesia (selanjutnya nomenklatur disesuaikan menjadi Direktur Niaga Domestik) (April 2017 – September 2018)
- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Januari 2019 – Juni 2020)
- VP *Strategic Planning & Business Development* Dit. Marketing of PT Pertamina (Persero) (January 2011 – April 2017)
- Acting President Director of PT Pertamina Lubricants (April 10 – 12, 2017)
- Director of Marketing & IT of PT Garuda Indonesia (hereinafter the nomenclature was adjusted to become Director of Domestic Commerce) (April 2017 – September 2018)
- President Director of PT Pertamina Patra Niaga (January 2019 – June 2020)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.
She does not have any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.
She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 18 Maret 2021 | *Appointed according to the GMS on March 18, 2021



WIEN IRWANTO*

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum
Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs

Periode Jabatan : Juli 2021 – Sekarang | July 2021 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 49 tahun, domisili di DKI Jakarta, Indonesia
Personal Information Indonesian citizen, 49 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan (1996)
- Magister Ekonomi – Jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2009)
- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Parahyangan Catholic University (1996)
- Master of Economics – Department of Islamic Economics of the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2009)

Riwayat Karier | Professional Experience

- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Portfolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2009)
- Kepala Sub-Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2009)
- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Transaksi Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2012)
- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI (2015-2016)
- Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II, Kementerian BUMN RI (2016-2019)
- Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019)
- Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, Kementerian BUMN RI (2019)
- Kepala Cabang DAPENBUN PTPN XII (2019)
- Direktur Komersil PTPN XII (2019-2020)
- Komisaris PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021)
- Head of Sub-Directorate of Government Securities Portfolio Management, Directorate of Government Securities, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009)
- Head of Sub-Directorate of Financial Analysis and Government Securities Market, Directorate of Government Securities, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009)
- Head of Sub-Directorate of Transaction Management, Directorate of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012)
- Head of Sub-Directorate of State Sharia Securities Transaction Management Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2015-2016)
- Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services & Consultants II, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia (2016-2019)
- Commissioner of PT Mandiri Sekuritas (2019)
- Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I, Ministry of SOEs (2019)
- Head of PTPN XII DAPENBUN Branch (2019)
- Commercial Director of PTPN XII (2019-2020)
- Commissioner of PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.
He does not have any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.
He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 1 Juli 2021 | *Appointed according to the GMS on July 1, 2021



ANDRY TANUDJAJA*

Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development

Periode Jabatan : Maret 2021 – Sekarang | March 2021 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 50 tahun, domisili di DKI
Personal Jakarta, Indonesia
Information Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

D3 Pariwisata | Diploma in Tourism

Riwayat Karier | Professional Experience

- Vice President PT Recapital, Jakarta (2003 – 2005)
- Vice President MF Global Pte Ltd, Singapura (2005 – 2008)
- Direktur Utama & Pemilik PT Finenz Indonesia, Jakarta (2009 – 2017)
- Direktur Utama & Pemilik PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010 – 2017)
- Vice President of PT Recapital, Jakarta (2003 – 2005)
- Vice President of MF Global Pte Ltd, Singapura (2005 – 2008)
- President Director & Owner of PT Finenz Indonesia, Jakarta (2009 – 2017)
- President Director & Owner of PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010 – 2017)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

- Komisaris PT Finenz Indonesia, Jakarta (2017 – sekarang)
- Komisaris PT Dhanadipa Karya Adhika (2019 – sekarang)
- Commissioner of PT Finenz Indonesia, Jakarta (2017 – present)
- Commissioner of PT Dhanadipa Karya Adhika (2019 – present)

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 18 Maret 2021 | *Appointed according to the GMS on March 18, 2021



TRI WAHYUNDO HARIYATNO*

Direktur Operasi
Director of Operations

Periode Jabatan : Desember 2021 – Sekarang | December 2021 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 49 tahun, domisili di DKI Jakarta, Indonesia
Personal Information Indonesian citizen, 49 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan |
Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 april 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-381/MBU/12/2021 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational
Background

Sarjana Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2007)
Bachelor of Financial Management from the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2007)

Riwayat Karier | Professional
Experience

- *General Manager* Pemasaran PT Trans Pacific Jaya (2013 – 2014)
- *Deputy Director* Teknik dan Operasi PT Trans Pacific Jaya (2014-2016)
- *General Manager* Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi BGR (2016 – 2019)
- *Vice President Supply Chain* dan WIS BGR (2019)
- Direksi Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi (2019-2021)
- General Manager of Marketing of PT Trans Pacific Jaya (2013 – 2014)
- Deputy Director of Engineering and Operations of PT Trans Pacific Jaya (2014-2016)
- General Manager of Business Development and Information Technology of BGR (2016 – 2019)
- Vice President of Supply Chain and WIS of BGR (2019)
- Director of Business Development and Information Technology (2019-2021)

Organisasi/Asosiasi yang Diikuti |
Organization/Association

- Anggota - ICIO-Community Chief Information Officer Indonesia (2021)
- Anggota - ISACA (Internal System Auditor and Control Association) (2017 – 2021)
- Anggota - Asosiasi Logistik Indonesia (2008)
- Member - ICIO-Community Chief Information Officer Indonesia (2021)
- Member - ISACA (Internal System Auditor and Control Association) (2017 – 2021)
- Member - Asosiasi Logistik Indonesia (2008)

Rangkap Jabatan | Concurrent
Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain
He does not have any concurrent positions in other companies

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 3 Desember 2021 | *Appointed according to the GMS on December 3, 2021

Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat perubahan komposisi Direksi, dengan kronologis sebagai berikut:

Nama Direksi Sebelumnya Former Board of Directors	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Fasika Khaerul Zaman	Direktur Utama President Director	2 April 2020 – 18 Maret 2021 April 2, 2020 – March 18, 2021
Prasetyo Indroharto	Direktur Teknik dan Pengembangan Director of Engineering and Development	17 Oktober 2019 – 18 Maret 2021 October 17, 2019 – March 18, 2021
Anton Mart Irianto	Direktur Perdagangan Dalam Negeri Director of Domestic Trade	11 Desember 2017 – 18 Maret 2021 December 11, 2017 – March 18, 2021
Eko Budianto	Direktur Komersial Director of Commercial	2 April 2020 – 18 Maret 2021 April 2, 2020 – March 18, 2021
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Finance, Human Capital and General Affairs	15 Juni 2020 – 1 Juli 2021 June 15, 2020 – July 1, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 18 Maret 2021, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2021

As of December 31, 2021, there were changes in the composition of the Board of Directors, with the following chronology:

In accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on March 18, 2021, the composition of the members of the Board of Directors changed to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	18 Maret 2021 March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	18 Maret 2021 March 18, 2021
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Finance, Human Capital and General Affairs	15 Juni 2020 June 15, 2020
Eko Budianto	Direktur Operasi Director of Operations	18 Maret 2021 March 18, 2021

Selanjutnya, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Direksi sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 1 Juli 2021 yang diselenggarakan melalui *Virtual Meeting*, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Subsequently, PPI changed the composition of the Board of Directors again in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on July 1, 2021 which was held through a Virtual Meeting. The composition of the members of the Board of Directors changed to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	18 Maret 2021 March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	18 Maret 2021 March 18, 2021
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs	1 Juli 2021 July 1, 2021
Eko Budianto	Direktur Operasi Director of Operations	18 Maret 2021 March 18, 2021

Menutup akhir tahun buku 2021, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Direksi sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 3 Desember 2021, susunan anggota Direksi berubah menjadi:

Closing the fiscal year 2021, PPI again changed the composition of the Board of Directors according to the resolution of the General Meeting of Shareholders of PPI on December 3, 2021. The composition of the members of the Board of Directors changes to the following composition:

Nama Direksi saat ini Current Board of Directors	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	18 Maret 2021 March 18, 2021
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	18 Maret 2021 March 18, 2021
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs	1 Juli 2021 July 1, 2021
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	3 Desember 2021 December 3, 2021

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



HERMAN HERU SUPROBO*

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan : November 2020 – Sekarang | November 2020 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 62 tahun, domisili di Tangerang Selatan, Indonesia
Personal Information Indonesian citizen, 62 years old, domiciled in South Tangerang, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number SK-93/MBU/03/2021 dated March 19, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Hukum – Universitas Atmajaya, Jakarta (1984)
- Magister Notaris, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998)
- Bachelor of Law – Universitas Atmajaya, Jakarta (1984)
- Master Notary, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1998)

Riwayat Karier | Professional Experience

- *Legal Consultant*, Jakarta (1984)
- *Advocate & Legal Consultant*, Jakarta (1984 – 1995)
- Direktur - PT Ganesha Husti Arta (1988 – 1994)
- Direktur - PT Prabawa Mandala Shinta (1988 – 1994)
- Direktur - PT Equator Group (1996 – 1998)
- Komisaris – PT Bintang Matahari (1999 – 2006)
- Penasehat – Samudra Energy (2012)
- Direktur Utama *Power Plan* – PT Kirana Berau Jakarta (2012 – 2013)
- Direktur – PT Manira Mitra Jakarta (2012-2013)
- Direktur Pertambangan, Nikel, Mineral & Emas – PT Swarnadwipa Nusanta (2006-2016)
- Komisaris Utama – PT Guthrie Pecconina (2017 – 2020)
- Spesialis Hubungan Pemerintah – Perkebunan Minamas (April 2017 – April 2020)
- Komisaris Independent – PT Gapura Angkasa (Juni 2020 – 2021)
- Staf Khusus, Kementerian Perdagangan (2014- sekarang)
- Legal Consultant, Jakarta (1984)
- Advocate & Legal Consultant, Jakarta (1984 – 1995)
- Director - PT Ganesha Husti Arta (1988 – 1994)
- Director - PT Prabawa Mandala Shinta (1988 – 1994)
- Director - PT Equator Group (1996 – 1998)
- Commissioner – PT Bintang Matahari (1999 – 2006)
- Advisor – Samudra Energy (2012)
- President Director of Power Plan – PT Kirana Berau Jakarta (2012 – 2013)
- Director – PT Manira Mitra Jakarta (2012-2013)
- Director of Mining, Nickel, Minerals & Gold – PT Swarnadwipa Nusanta (2006-2016)
- President Commissioner – PT Guthrie Pecconina (2017 – 2020)
- Government Relations Specialist – Perkebunan Minamas (April 2017 – April 2020)
- Independent Commissioner – PT Gapura Angkasa (Juni 2020 – 2021)
- Expert Staff, Ministry of Trade (2014- present)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Staf Khusus, Kementerian Perdagangan (2014- sekarang)
Expert Staff, Ministry of Trade (2014- present)



Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.
He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 19 Maret 2021 | *Appointed according to the GMS on March 19, 2021



HAMLI

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan : April 2020 – Sekarang | April 2020 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 52 tahun, domisili di DKI Jakarta, Indonesia
Personal Information : Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan |
Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational
Background

- Sarjana Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1987)
- Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999)
- Bachelor of Engineering, majoring in Chemical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1987)
- Master of Economics from the University of Indonesia (1999)

Riwayat Karier | Professional
Experience

- Letnan Satu Polisi (1 Mei 1989)
- Perwira Unit Balistik Metalurgi Forensik, Bareskrim Polri (1989-1995)
- Perwira Unit Bahan Peledak Forensik, Bareskrim Polri (1995-1999)
- Kepala Sub-Bagian Program dan Anggaran, Bareskrim Polri (1999-2001)
- Kepala Sub-Bidang Senjata Api dan Bahan Peledak, Bareskrim Polri (2001-2003)
- Kepala Bagian Perencanaan Puslabfor, Bareskrim Polri (2003-2005)
- Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Bareskrim Polri (2005-2009)
- Analis Utama, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2009-2010)
- Kepala Bidang Fisika Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2010)
- Kepala Bagian Operasi - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2010-2014)
- Analis Kebijakan Bidang Penindakan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2014-2015)
- Kepala Bidang Pencegahan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2015-2017).
- First Lieutenant Police (May 1, 1989)
- Forensic Metallurgical Ballistics Unit Officer, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (1989-1995)
- Forensic Explosives Unit Officer, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (1995-1999)
- Head of Program and Budget Sub-Section, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (1999-2001)
- Head of Sub-Division of Firearms and Explosives, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (2001-2003)
- Head of the Planning Division of the Forensic Laboratory, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (2003-2005)

- Deputy Head of the Denpasar Branch of the Forensic Laboratory, Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (2005-2009)
- Principal Analyst, Center for Forensic Laboratory of the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (2009-2010)
- Head of Forensic Physics Division, Center for Forensic Laboratory of the Criminal Investigation Agency of the National Police (2010)
- Head of Operations - Detachment 88 Anti-Terror, Indonesian National Police (2010-2014)
- Policy Analyst for Enforcement - Detachment 88 Anti-Terror, Indonesian National Police (2014-2015)
- Head of Prevention - Detachment 88 Anti-Terror, Indonesian National Police (2015-2017).

Rangkap Jabatan | Concurrent
Position

- Direktur Pencegahan BNPT (2017 - sekarang)
- Dosen/Pengajar (2010 - sekarang).
- Director of BNPT Prevention (2017 - present)
- Lecturer/Teacher (2010 - present).

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.
He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

**SETIAWAN WANGSAATMAJA***

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan : 2 Desember 2021 – Sekarang | December 2, 2021 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 58 tahun, domisili di DKI
Personal : Jakarta, Indonesia
Information : Indonesian citizen, 58 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan |
Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational
Background

- Sarjana Teknik Lingkungan ITB (1989)
- Magister Sanitary Engineering IHE DELFT (1994)
- Magister Environmental Engineering Asian Institute of Technology (1997)
- Doktor Teknik Lingkungan ITB (2004)
- Bachelor of Environmental Engineering, ITB (1989)
- Master of Sanitary Engineering, IHE DELFT (1994)
- Master of Environmental Engineering, Asian Institute of Technology (1997)
- Doctor of Environmental Engineering, ITB (2004)

Riwayat Karier | Professional
Experience

- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2008-2013)
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013 – 2020)
- Sekretaris Daerah - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2020 – Sekarang)
- Head of the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) - West Java Government (2008-2013)
- Deputy for Apparatus Human Resources – Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2013 – 2020)
- Regional Secretary - Regional Government of West Java (2020 – Present)

Rangkap Jabatan | Concurrent
Position

Sekretaris Daerah Jawa Barat (2020 – sekarang)
Regional Secretary of West Java (2020 – present)

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.
He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

*Diangkat sesuai RUPS tanggal 3 Desember 2021 | *Appointed according to the GMS on December 3, 2021



MUHAMMAD KAPITRA AMPERA

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan : April 2020 – Sekarang | April 2020 – Present
Term of Office

Data Pribadi : Warga Negara Indonesia, 55 tahun, domisili di DKI
Personal Jakarta, Indonesia
Information Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan | Educational Background

- Sarjana Hukum – Jurusan Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991)
- Magister Hukum – Jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2005)
- Doktor Hukum – Jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2016).
- Bachelor of Law – Majoring in Criminal Law from Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991)
- Master of Law – Department of Constitutional Law from Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2005)
- Doctor of Law – Department of Constitutional Law from Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2016).

Riwayat Karier | Professional Experience

Beliau merupakan seorang ahli hukum yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki Firma Hukum bernama M. Kapitra Ampera & Associates. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Harian Himpunan Advokad Pengacara Indonesia (HAPI).

He is a legal expert who works as a lawyer and owns a Law Firm named M. Kapitra Ampera & Associates. Currently he also serves as the Chief Executor of Association of Indonesian Lawyers Advocates (HAPI).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

- Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) (Oktober 2018-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (Oktober 2018-April 2020)
- Expert Staff to the Head of the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) (October 2018-present)
- Independent Commissioner of PT Bank Syariah Mandiri (October 2018-April 2020)

Hubungan Afiliasi | Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan kronologis sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris Sebelumnya Former Board of Commissioners	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office
Didi Sumedi	Komisaris Utama President Commissioner	23 November 2020 – 19 Maret 2021 November 23, 2020 – March 19, 2021
Hamli	Komisaris Commissioner	2 April 2020 – 19 Maret 2021 April 2, 2020 – March 19, 2021
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	2 April 2020 – 19 Maret 2021 April 2, 2020 – March 19, 2021
Panel Barus	Komisaris Commissioner	6 Juli 2020 – 2 Desember 2021 July 6, 2020 – December 2, 2021
Edy Cahyono	Komisaris Commissioner	13 September 2019 – 2 Desember 2021 September 13, 2019 – December 2, 2021

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 19 Maret 2021, susunan anggota Dewan Komisaris PPI berubah menjadi:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners in 2021

As of December 31, 2021, there were changes in the composition of the Board of Commissioners, with the following chronology:

In accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI on March 19, 2021, the composition of the members of the Board of Commissioners of PPI changed to the following composition:

Nama Dewan Komisaris saat ini Current Board of Commissioners	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	19 Maret 2021 March 19, 2021
Hamli	Komisaris Commissioner	2 April 2020 April 2, 2020
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	2 April 2020 April 2, 2020
Panel Barus	Komisaris Commissioner	6 Juli 2020 July 6, 2020

Selanjutnya, PPI kembali melakukan pergantian komposisi Dewan Komisaris sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 3 Desember 2021, susunan anggota Dewan Komisaris berubah menjadi:

Subsequently, PPI changed the composition of the Board of Commissioners again in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders of PPI dated December 3, 2021. The composition of the members of the Board of Commissioners changed to the following composition:

Nama Dewan Komisaris saat ini Current Board of Commissioners	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	19 Maret 2021 March 19, 2021
Hamli	Komisaris Commissioner	2 April 2020 April 2, 2020
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	2 Desember 2021 December 2, 2021
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	2 April 2020 April 2, 2020

Perubahan susunan perseroan dalam rangka penyegaran organisasi dan bisnis perusahaan.

Changes in the composition of the Company in order to refresh the Company's organization and business.



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan PPI tercatat sebanyak 1.437 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 499 orang.

As of December 31, 2021, the number of employees of PPI was recorded at 1.437 people, increasing from the previous year of 499 people.

Uraian lengkap mengenai demografi karyawan PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

The description of PPI's employee demography for the last 3 (three) years is presented in the following tables:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin | Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	970	32,50	307	61,52	400	63,90
Perempuan Female	467	67,50	192	38,48	226	36,10
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan | Employee Composition by Position Function

Fungsi Jabatan Position Function	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Komersial Commercial	861	59,92	272	54,51	347	55,43
Non - Komersial Non-Commercial	576	40,08	227	45,49	279	44,57
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan | Employee Composition by Position

Level Organisasi/Jabatan Organizational Level / Position	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Kepala Divisi Head of Division	68	4,73	-	-	2	0,32
Kepala Cabang Head of Branch	32	2,23	-	-	-	-
Spesialis Utama Senior Specialist	6	0,42	-	0	7	1,12
Manager Manager	135	9,39	70	14,00	90	14,38
Spesialis Madya Middle Specialist	20	1,39	1	0,20	2	0,32
Kepala Gudang Head of Warehouse	305	21,22	28	5,60	29	4,63

Level Organisasi/Jabatan Organizational Level / Position	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Asisten Manager Assistant Manager	153	10,65	55	11,00	47	7,51
Officer	568	39,53	-	-	-	-
Salesman	78	5,43	81	16,20	109	17,41
Apoteker Pharmacist	32	2,23	30	6,00	30	4,79
Kasir Cashier	40	2,78	27	5,40	31	4,95
Management Trainee	0	0,00	19	3,80	20	3,19
Tenaga Dasar Basic Staff	0	0,00	0	0,00	3	0,48
Supir Driver	0	0,00	0	0,00	4	0,64
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

* Pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur untuk jabatan *Senior Manager* telah diganti menjadi Kepala Divisi, *General Manager* menjadi 32 orang, Asisten *Senior Manager* menjadi *Manager*.

* In 2021, there were changes in the nomenclature, namely the position of Senior Manager which was changed to Division Head, General Manager to 32 people, Assistant Senior Manager to Manager.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan | Employee Composition by Employment Status

Status Karyawan Employment Status	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Tetap Permanent	1371	95,40	428	85,77	448	71,57
Tidak Tetap Non-Permanent	66	4,60	71	14,23	178	28,43
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Employee Composition by Educational Attainment

Tingkat Pendidikan Educational Attainment	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<SMA < High School	541	37,65	110	22,04	144	23,00
Diploma-1 Diploma	2	0,14	-	-	-	-
Diploma-3 Diploma	158	11,00	48	9,62	61	9,74
Strata-1 Bachelor's Degree	674	46,90	321	64,33	386	61,66
Strata-2 Master's Degree	61	4,24	29	5,81	35	5,59
Strata-3 Doctorate	1	0,07	-	-	-	-
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang) | Employee Composition by Age (person)

Usia Age	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<25 tahun years old	34	2,37	10	2,00%	197	31,47%
25 - 36 tahun years old	699	48,64	230	46,09%	181	28,91%
37 - 45 tahun years old	348	24,22	102	20,44%	56	8,95%
46 - 50 tahun years old	185	12,87	64	12,83%	76	12,14%
51 - 55 tahun years old	169	11,76	92	18,44%	116	18,53%
>55 tahun years old	2	0,14	1	0,20%	-	0,00%
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja | Employee Composition by Term of Office

Masa Kerja Term of Office	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<5 tahun years old	230	16,01	371	74,35	462	73,80
5-10 tahun years old	868	60,40	86	17,23	100	15,97
>10-15 tahun years old	173	12,04	42	8,42	64	10,22
>15-25 tahun years old	40	2,78	-	-	-	-
>25 tahun years old	126	8,77	-	-	-	-
Jumlah Total	1.437	100,00	499	100,00	626	100,00

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PPI memberikan perhatian penuh terhadap program pengembangan kompetensi karyawan untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas sehingga diharapkan dapat mendukung daya saing perseroan di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Untuk itu, PPI menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang diselenggarakan setiap tahun dimana subjek pelatihan dan peserta yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan kebutuhan pengembangan organisasi. Dengan adanya program dan kegiatan pelatihan tersebut diharapkan seluruh karyawan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai bidang profesi masing-masing, serta terpacu untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PPI pays full attention to employee competency development programs to ensure the availability of competent and knowledgeable human capital which is expected to support the Company's competitiveness in the midst of increasingly fierce industrial competition.

To that end, PPI provides training programs and HC competency development which are held annually where the training subjects and participants involved are tailored to the needs of each individual and the needs of organizational development. With these training programs and activities, all employees are expected to be more motivated to improve their qualifications according to their respective professional fields, and be motivated to improve their abilities, expertise and knowledge so that they have a positive impact on the Company's performance.

Jenis program pengembangan SDM yang dilaksanakan PPI di tahun ini mengacu pada Program Kerja Divisi SDM Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Sasaran Tahun 2021 yaitu 4 (empat), meliputi:

- PPI Academy.
- Asesor internal Perusahaan yang tersertifikasi.
- Pelatihan berkesinambungan untuk talenta BOD-2.
- Pelatihan terkait *forecasting, market research, dan supply chain*

Hingga akhir 2021, sebanyak 1.437 karyawan PKWTT, PKWT, OS, maupun magang telah mengikuti kegiatan *In-House Training* dan pelatihan eksternal. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut telah menghabiskan total jam pelatihan sebesar 9.330 jam.

The HC development program implemented by PPI Company this year refers to the 2021 HC Division Work Program which had been aligned with the 2020 Targets, namely:

- PPI Academy.
- Certified internal assessors of the Company.
- Continuous training for BOD-2 talents.
- Training related to forecasting, market research, and supply chain

Until the end of 2021, 1.437 PKWTT, PKWT, OS, and internship employees had participated in In-House Training and external training activities. All of these training activities spent a total of 9,330 hours of training hours.

Keterangan Description	Durasi (Jam) Duration (Hours)			Jumlah Peserta (Orang) Total Participants (People)		
	Manajemen Management	Staf Staff	Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Total
<i>In-House Training & Pelatihan Eksternal</i> In-House Training & External Training	246	278	524	335	188	524

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

PPI juga telah merealisasikan biaya investasi sebesar Rp333.569.683,68 untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Nominal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan program pelatihan memaksimalkan narasumber dari internal Perusahaan.

Secara rinci, program kompetensi karyawan yang dilakukan PPI pada tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PPI also realized investment costs of Rp333,569,683.68 to conduct employee training and development program. This nominal has decreased compared to 2020 due to the training program maximizing the Company's internal resource persons.

The details of the employee compensation program carried out by PPI in 2021 are as follows:

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
13 Januari 2021 / January 13, 2021	<i>Coaching Leadership</i>	<i>Coaching Leadership</i>	<i>In-House Training</i>
18 Januari 2021 / January 18, 2021	<i>Induction & Orientation</i>	Mengetahui: <ul style="list-style-type: none"> Profil & Sejarah Perusahaan Visi, Misi, Filosofi, Tata Nilai & Budaya Struktur Organisasi Bidang Usaha GCG & PKBL Kepegawaian HRIS Knowing: <ul style="list-style-type: none"> Company Profile & History Vision, Mission, Philosophy, Values & Culture 	<i>In-House Training</i>



Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
		<ul style="list-style-type: none"> Organizational structure Business fields GCG & PKBL Staffing HRIS 	
29 Januari 2021 / January 29, 2021	Warehouse Management	<p>Mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian persediaan dengan Kartu Stock Prosedur Penerimaan Barang Prosedur Pengeluaran Barang Pengelolaan Operasional Gudang <p>Knowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inventory control with Stock Card Goods Receipt Procedure Goods Release Procedure Warehouse Operational Management 	In-House Training
30 Januari 2021 / January 30, 2021	Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK dalam Kacamata UU Cipta Kerja / Industrial Relations Disputes and Layoffs in the View of the Job Creation Law	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui jenis-jenis perselisihan hubungan industrial Memahami tata cara penyelesaian perselisihan Memahami hak-hak pekerja apabila di PHK Knowing the types of industrial relations disputes Understanding dispute resolution procedures Understanding workers' rights when laid off 	Pelatihan Eksternal / External Training
11 Februari 2021 / February 11, 2021	Webinar Kata Milenial Chapter 3: Remote Working / Millennial Webinar Chapter 3: Remote Working	<p>Knowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> How is remote working How to face the work culture suiting? Remote working process and procedure Key practice to implement remote working The positif impact Risk mitigation 	Pelatihan Eksternal / External Training
17 Februari 2021 / February 17, 2021	Sistem Refinitiv Eikon / Eikon Refinitiv System	Aplikasi Refinitif Eikon / Eikon Refinitif Application	In-House Training
18 Februari 2021 / February 18, 2021	Webinar Kata Milenial Chapter 4 / Millennial Webinar Chapter 4	<p>Mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apa itu disrupsi Karakteristik disrupsi Apa yang perusahaan lakukan untuk menghadapi disrupsi? Strategi perusahaan dalam menghadapi disrupsi Digital talent <p>Knowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> What is disruption Disruption characteristics What are companies doing to deal with disruption? Company strategy in dealing with disruption Digital talent 	Pelatihan Eksternal / External Training
3-4 Maret 2021 / March 3-4, 2021	Workshop PHK dan Pesangon Serta Pengesahan PP dan PKB Melalui Sistem Aplikasi Elektronik e-PP dan e-PKB dalam UU Cipta Kerja / Workshop on layoffs and severance pay and the Ratification of PP and PKB through the e-PP and e-PKB Electronic Application System in the Job Creation Law	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui jenis-jenis perselisihan hubungan industrial Memahami tata cara penyelesaian perselisihan Memahami hak-hak pekerja apabila di PHK Memahami teknik perundingan dalam hubungan industrial pada UU Cipta Kerja Menangani permasalahan PHK di tingkat PPHI dalam UU Cipta Kerja Knowing the types of industrial relations disputes Understanding dispute resolution procedures Understanding the rights of workers when laid off Understanding negotiation techniques in industrial relations in the Job Creation Law Handling the issue of layoffs at the PPHI level in the Job Creation Law 	Pelatihan Eksternal / External Training
10 Maret 2021 / March 10, 2021	Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan WP Pribadi / Procedure for Submission of Annual Tax Return for Personal WP	<p>Mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> SPT PPH OP LHKPN SPH Tax Amnesty 	In-House Training

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
		Knowing: <ul style="list-style-type: none"> • SPT PPH OP • LHKPN • SPH Tax Amnesty 	
15-19 Maret 2021 / March 15-19, 2021	Penilaian Kapabilitas SPI Korporasi / BUMN/D (Internal Audit Capability Model)	Mengembangkan kapabilitas karyawan, peningkatan mandiri SPI, korporasi penilaian KPA. Setiap level beserta aplikasi penilaiannya. / Developing employee capabilities, self-improvement of SPI, KPA assessment corporations. Each level and its assessment application.	Pelatihan Eksternal / External Training
31 Maret-1 April 2021 / March 31- 1, 2021	Mekanisme dan Prosedur Perdagangan Internasional yang Efektif dan Dokumentasi Ekspor Impor / Effective International Trade Mechanisms and Procedures and Export Import Documentation	Mengetahui: <ul style="list-style-type: none"> • Hukum komersial dan risiko • Pembayaran International <i>Letter of Credit</i> • Transportasi Ekspor Impor • Dokumen <i>Shipping</i> • Dokumen komersial • <i>System</i> & Prosedur Kepabeanan • <i>Sales Contract</i> dan Pembayaran Internasional • Pengantar Kepabeanan, Ketentuan Kepabeanan Indonesia Knowing: <ul style="list-style-type: none"> • Commercial law and risk • Payment of international Letter of Credit • Import Export Transport • Shipping Documents • Commercial documents • Customs System & Procedure • Sales Contracts and International Payments • Introduction to Customs, Indonesian Customs Provisions 	<i>In-House Training</i>
7 April 2021 / April 7, 2021	Kesiapan PTSP dalam Asesmen INDI 4.0 / PTSP Readiness in the INDI 4.0 Assessment	Meningkatkan pengetahuan dalam penerapan industri 4.0 untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi sebagai dasar perumusan strategi dan evaluasi efektivitas operasional PT PPI Increasing knowledge in the application of industry 4.0 to find out the challenges that will be encountered as a basis for formulating strategies and evaluating operational effectiveness of PT PPI	Pelatihan Eksternal / External Training
8 April 2021 / April 18, 2021	<i>Rethinking the Competition</i>	Guna mencermati perubahan situasi pemasaran setelah pandemi dan mencari peluang baru Observing the changing marketing situation after the pandemic and looking for new opportunities	Pelatihan Eksternal / External Training
21-23 April 2021 / April 21-21, 2021	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor KP-KUBUMN - Pelatihan Interpretasi / Digital Public Training on KPKU-SOE Interpretation and Assessor - Interpretation Training	Mengetahui: <ul style="list-style-type: none"> • Upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan (BUMN) • Panduan kriteria penilaian untuk semua sektor usaha BUMN • Meningkatkan budaya perusahaan berbasis kinerja ekselen • Upaya meningkatkan keunggulan daya saing tingkat dunia • Upaya perbaikan kinerja perusahaan (BUMN) Knowing: <ul style="list-style-type: none"> • Efforts to improve company performance (SOE) • Guidance on assessment criteria for all SOE business sectors • Promote an excellent performance-based corporate culture • Efforts to increase global competitive advantage • Efforts to improve company performance (SOE) 	Pelatihan Eksternal / External Training
09 Agustus 2021 / August 9, 2021	<i>PPIjar - Customer Relationship Management</i>	Mengetahui: <ul style="list-style-type: none"> • Arti dan peran strategis Pelanggan bagi Perusahaan • <i>CRM Essentials</i> • <i>CRM & Business Leverage</i> • <i>CRM & Business Sustainability</i> • <i>CRM Strategic Enabler</i> 	<i>In-House Training</i>

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
		<ul style="list-style-type: none"> • CRM <i>Wisdom</i> Knowing: <ul style="list-style-type: none"> • The strategic meaning and role of the Customer for the Company • CRM Essentials • CRM & Business Leverage 	
20 Agustus 2021 / August 20, 2021	<i>PPIjar - Risk Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar Risiko dan Manajemen Risiko • Sumber dan Jenis Risiko Bisnis • Regulasi terkait Manajemen Risiko • Proses Manajemen Risiko • Implementasi Manajemen Risiko • <i>Risk Management Wisdom</i> • Basic Concepts of Risk and Risk Management • Sources and Types of Business Risk • Regulations related to Risk Management • Risk Management Process • Implementation of Risk Management • Risk Management Wisdom 	<i>In-House Training</i>
21 Agustus - 31 Oktober 2021 / August 21 - October 31, 2021	Certified Professional Management Accountant Review - Pelatihan tanpa Sertifikasi / Certified Professional Management Accountant Review – Training without Certification	Mengukur kompetensi bidang akuntansi manajemen dan bidang lain yang terkait seperti manajemen keuangan, pengendalian internal, dan manajemen informasi. Sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas bisnis perusahaan Measuring competence in management accounting and other related fields such as financial management, internal control, and information management. Therefore, it can provide added value in the decision-making process related to the company's business activities	Pelatihan Eksternal / External Training
27 Agustus 2021 / August 27, 2021	Strategi Penyusunan Transfer Pricing Document / Transfer Pricing Document Preparation Strategy	Dapat menyusun laporan terkait aktivitas transaksi bisnis perusahaan induk dengan anak perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan / Being able to compile reports related to the parent company's business transaction activities with subsidiaries based on tax regulations	Pelatihan Eksternal / External Training
27 Agustus 2021 / August 27, 2021	<i>Employee Engagement Through Coaching</i>	Mengetahui: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan kerja yang <i>engaged</i> berperan besar bagi pengembangan • Apa itu <i>employee engagement</i> • Tingkatan <i>employee engagement</i> • Gaya Kepemimpinan • <i>Boss vs Coach</i> • Prinsip <i>Coaching, Mentoring</i>, memberikan <i>Feedback</i> • Teknik <i>Coaching, Mentoring</i>, memberikan <i>Feedback</i> • <i>Employee Engagement</i> melalui <i>Coaching</i> • Proses <i>Coaching</i> yang efektif melalui <i>platform online</i> Knowing: <ul style="list-style-type: none"> • An engaged work environment plays a major role in development • What is employee engagement? • Level of employee engagement • Leadership Style • Boss vs Coach • Principles of Coaching, Mentoring, providing Feedback • Coaching techniques, Mentoring, providing Feedback • Employee Engagement through Coaching • Effective coaching process through online platform 	<i>In-House Training</i>
3 September 2021 / September 3, 2021	<i>PPIjar - Legal for Non Legal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar kontrak • Dasar hukum kontrak • Syarat dan asas kontrak • Anatomi kontrak • Penyusunan kontrak • Basic concept of contract • Legal basis of contract • Contract terms and principles • Contract anatomy • Contract preparation 	<i>In-House Training</i>

Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
4 September 2021 / September 4, 2021	<i>Sharing Session Vol. 1 - Group Development Program (GDP)</i>	<i>Transforming Organization Facing VUCA & the Practices of Directorship</i>	<i>In-House Training</i>
15-16 September 2021 / September 15-16, 2021	PPIjar - Pasar Lelang Komoditas Terintegrasi Sistem Resi Gudang / PPIjar - Integrated Commodity Auction Market Warehouse Receipt System	Pasar Lelang Komoditas Terintegrasi Sistem Resi Gudang / Integrated Commodity Auction Market Warehouse Receipt System	<i>In-House Training</i>
18 September 2021 / September 18, 2021	<i>Sharing Session Vol. 2 - Group Development Program (GDP)</i>	<i>Visionary & Transformational Leadership</i>	<i>In-House Training</i>
15 Oktober 2021 / October 15, 2021	<i>PPIjar - Data-Driven Performance Management Processes</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tujuh kunci perubahan paradigma dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif Manajemen kinerja individu <i>Performance management best practices</i> Penetapan sasaran manajemen kinerja <i>Performance tracking</i> dan penilaian manajemen kinerja Pengembangan berkelanjutan dari manajemen kinerja Konsekuensi manajemen kinerja Seven keys to a paradigm shift in developing an effective performance management system Individual performance management Performance management best practices Setting performance management goals Performance tracking and performance management assessment Continuous development of performance management Consequences of performance management 	<i>In-House Training</i>
21 Oktober 2021 / October 21, 2021	<i>PPIjar - Defensive Driving Course</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tujuh kunci perubahan paradigma dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif Manajemen kinerja individu <i>Performance management best practices</i> Penetapan sasaran manajemen kinerja <i>Performance tracking</i> dan penilaian manajemen kinerja Pengembangan berkelanjutan dari manajemen kinerja Konsekuensi manajemen kinerja Seven keys to a paradigm shift in developing an effective performance management system Individual performance management Performance management best practices Setting performance management goals Performance tracking and performance management assessment Continuous development of performance management Consequences of performance management 	<i>In-House Training</i>
25-26 Oktober 2021 / October 25-26, 2021	<i>Integrated Risk Based Internal Auditing</i>	Standar IIA mensyaratkan praktik <i>Risk-Based Internal Audit (RBIA)</i> / IIA standards require the practice of Risk-Based Internal Audit (RBIA)	Pelatihan Eksternal / External Training
03-05 November 2021 / November 3 - 5, 2021	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor Bisnis Ekselen - Pelatihan Asesor KPKU / Digital Public Training Excellent Business Interpretation and Assessor - KPKU Assessor Training	<ul style="list-style-type: none"> Mampu melaksanakan asesmen perusahaan (BUMN) terkait: Teknik asesmen dalam menganalisis kinerja perusahaan dalam dimensi proses dan hasil Mendiagnosa proses kinerja perusahaan dan memberikan penilaian. Memberikan respon atas dokumen Bisnis Ekselen dari perusahaan dalam bentuk kekuatan (<i>strength</i>) dan peluang perbaikan (OFI) hasil asesmen 	Pelatihan Eksternal / External Training



Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
		<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis hasil inovasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan • Being able to carry out Company (SOE) assessments related to: • Assessment techniques in analyzing the company's performance in the processes and results • Diagnosing the company's process performance and providing an assessment. • Responding to the company's excellent business documents in the form of strengths and opportunities for improvement (OFI) as a result of the assessment • Analyzing the results of improvement innovations as an effort to improve company performance 	
19 November 2021 / November 19, 2021	<i>PPIjar - Marketing Intelligence</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup <i>market intelligence</i> • Kegunaan <i>market intelligence</i> • Bentuk informasi dan sumber-sumber <i>market intelligence</i> • Proses <i>market intelligence</i> • Analisa dan evaluasi <i>market intelligence</i> • Scope of market intelligence • Use of market intelligence • Forms of information and sources of market intelligence • Market intelligence process • Market intelligence analysis and evaluation 	<i>In-House Training</i>
22 - 23 Desember 2021 / December 22-23, 2021	Sistem Manajemen Pengembangan SDM / HC Development Management System	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sistem manajemen pelatihan dan pengembangan • Mendapatkan rekomendasi tentang pembuatan kebijakan dan pemecahan masalah atas implementasi sistem manajemen pelatihan dan pengembangan • Gaining knowledge and skills of training and development management systems • Obtaining recommendations on policy making and problem solving on the implementation of the training and development management system 	Pelatihan Eksternal / External Training

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Kepemilikan saham perseroan adalah 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Dengan demikian di dalam Laporan Tahunan 2021 ini PPI tidak menyajikan informasi mengenai:

1. Pemegang saham berdasarkan klasifikasi institusional;
2. Pemegang saham sampai tingkat individu;
3. Pemegang saham pengendali;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih;
5. Kepemilikan saham oleh Direksi & Dewan Komisaris; dan
6. Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar.

Berikut adalah uraian struktur kepemilikan saham PPI per 31 Desember 2021:

The Company's share ownership is 100% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs. The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (DPS) which is managed by the Corporate Secretary. Therefore, in this 2021 Annual Report PPI does not present information regarding:

1. Shareholders by institutional classification;
2. Shareholders up to the individual level;
3. The controlling shareholder;
4. Shareholders with ownership of 5% or more;
5. Share ownership by the Board of Directors & Board of Commissioners; and
6. List of 20 Largest Shareholders.

The following is a description of PPI's share ownership structure as of December 31, 2021:

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Shares
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	942.745	1.000.000	Rp942.745.000.000

Hingga akhir tahun 2021, PPI tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

Until the end of 2021, PPI has not issued shares to be owned by the public, and has not traded its shares on any stock exchange.

Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci

Hingga 31 Desember 2021, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham PPI.

Information on Share Ownership by Key Management

As of December 31, 2021, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors have owned PPI's shares.

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	2021	2020
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Herman Heru Suprobo (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Nihil	Nihil
Hamli (Komisaris) (Commissioner)	Nihil	Nihil
Setiawan Wangsaatmaja (Komisaris) (Commissioner)	Nihil	Nihil
Muhammad Kapitra Ampera (Komisaris) (Commissioner)	Nihil	Nihil

Direksi | Board of Directors

Nina Sulistyowati (Direktur Utama) (President Director)	Nihil	Nihil
Andry Tanudjaja (Direktur Komersial & Pengembangan) (Director of Commercial & Development)	Nihil	Nihil
Wien Irwanto (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum) (Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs)	Nihil	Nihil
Tri Wahyundo Hariyatno (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Nihil	Nihil

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI INFORMATION ON MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

No.	Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	942.745	100,00%

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA LIST OF SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

Hingga akhir tahun 2021, PPI tercatat memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Until the end of 2021, PPI has 2 (two) Subsidiaries, namely PT PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem). The details are as follows:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)

Tahun Pendirian Year of Establishment	1986
Dasar Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H. No.33 tanggal 18 September 1986 Deed of Notary Syamsul Hadi, S.H. No.33 dated September 18, 1986
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	18 September 1986 September 18, 1986
Domisili Domicile	Palembang
Bidang Usaha Line of Business	Manufaktur dan Perdagangan Manufacture and Trade
Kepemilikan Saham oleh perseroan (%) Share Ownership by the Company (%)	99,90%
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	9.479.759.127
Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Talang Kramat No.25 Kenten Talang Kelapa, Musi Banyuasin, PO.Box. 130 Palembang 30001 Sumatera Selatan, Indonesia Phone: (0711) 810573/810233 Fax: (0711) 810473

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) pertama kali didirikan dengan nama PT Dharma Niaga Putera Steel berdasarkan Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H. No. 33 tanggal 18 September 1986. Selanjutnya, akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan termasuk di antaranya terkait perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PT PPI Industri sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 13 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang.

Berdasarkan akta perubahan terakhir No. 30 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang, telah disetujui perubahan mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT PPI Industri. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHU-AH.01.03-0371005 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PPI Industri adalah salah satu entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PPI Industri tanggal 23 Maret 2022 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Wien Irwanto

Struktur Permodalan PPI Industri

Modal dasar PPI Industri adalah sebesar Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 800 saham prioritas dan 200 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Kinerja PPI Industri

Ikhtisar kinerja PPI Industri selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (“PPI Industri”) was first established under the name PT Dharma Niaga Putera Steel based on the Notary Deed of Syamsul Hadi, S.H. No. 33 dated September 18, 1986. Subsequently, the deed of establishment was amended several times, including the change in the name of PT Dharma Niaga Putera Steel to PT PPI Industri as stated in the Deed No. 13 dated August 25, 2009 made before Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notary in Palembang.

Based on the latest amendment deed No. 30 dated August 27, 2020 made before Kurnia Ariyani, S.H., Notary in Tangerang, the amendments to the Circular Resolution of the Shareholders of PT PPI Industri have been approved. The amendments to the Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights in a decree number AHU-AH.01.03-0371005 of 2020 dated August 27, 2020.

PPI Industri is one of the company's subsidiaries that carries out business activities in the general industrial sector in the manufacture of zinc and other building materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trad of zinc production.

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PPI Industri's Shareholders' Meeting dated March 23, 2022, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Direksi | Board of Directors

Aswardi

PPI Industri Capital Structure

The authorized capital of PPI Industri is Rp1,000,000,000 which is divided into 800 priority shares and 200 ordinary shares, each with a par value of Rp1,000,000 per share.

PPI Industri's Performance

The summary of PPI Industry's performance throughout 2021 is as follows:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Keterangan Description	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues	68.682	12.082	-
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	6.065	1.181	(401)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	4.568	968	(446)

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")

Tahun Pendirian Year of Establishment	1963
Dasar Pendirian Legal Basis of Establishment	Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S,H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Based on the Deed of Notary Kurnia Ariani, S,H No.20 dated October 13, 2021.
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	19 November 1963 November 19, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Utara
Bidang Usaha Line of Business	Manufaktur dan Perdagangan Manufacture and Trade
Kepemilikan Saham oleh perseroan (%) Share Ownership by the Company (%)	99,90%
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	Rp131.159.531.470
Status	Beroperasi Operating
Alamat Address	Jl. Kalibesar Timur No. 5 - 7 Jakarta 11110 - Indonesia Telp: (021) 691 6666 Fax: (021) 690 3162 Email: info@bgrlogistics.id

PT BGR Logistik Indonesia (BLI)

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) didirikan Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S,H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/OXI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No 22 tanggal 13 Oktober 2021 di Tangerang, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI).

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem) was established Based on the deed of notary Kurnia Ariani, S,H No.20 dated October 13, 2021. The entity increased its ownership in PT TSV by purchasing 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk of 1,000 shares with a value of Rp1,000,000 per share so that the ownership in PT Tri Sari Veem becomes 99.9%. The shares have been valued at market prices based on valuation calculations carried out by the Public Appraisal Service Office of Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/OXI/20 dated November 30, 2020.

Based on the latest amendment deed by Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated October 13, 2021 in Tangerang, PT Trisari Veem changed its name to PT BGR Logistik Indonesia (BLI).

Berbagai layanan ditawarkan BLI seperti: *Freight Forwarding, Depo Container, EMKL/PPJK, dan Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Container*, dan ke depan yaitu *shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

Dalam 5 tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi *integrated digital logistics provider* bagi induk usaha/PPI.

Saat ini BLI mempunyai dua kantor cabang yaitu cabang Belawan & cabang Surabaya, 20 Divisi Regional; 2 UPP dan 2 Depo Yard yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan tersebut didukung dengan sistem penunjang yang akan bermanfaat kepada para pengguna jasa BLI, seperti:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BGR Logistik Indonesia tanggal 13 Desember 2021 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Eddi Santosa	Budi Susanto
Mochamad Aswin	Energy
Andry Tanudjaja	Syailendra

Struktur Permodalan BLI

BUMN

Kinerja BLI

Ikhtisar kinerja BLI selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Various services are offered by BLI such as: *Freight Forwarding, Depo Container, EMKL/PPJK, and Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Container*, and to in the future, namely *shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

In the next 5 years, BLI is projected to become an *integrated digital logistics provider* for the parent company/PPI.

Currently BLI has two branch offices namely Belawan branch & Surabaya branch, 20 Regional Divisions; 2 UPP and 2 Depo Yard spread throughout Indonesia.

These services are supported by a supporting system that will benefit BLI service users, such as:

- *Warehouse Integrated Application (WINA);*
- *Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);*
- *Depot Management and Agency (DENADA).*

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PT BGR Logistik Indonesia Shareholders' Meeting dated December 13, 2021, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

BLI Capital Structure

SOE

BLI's Performance

The summary of BLI's performance throughout 2021 is as follows:



Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

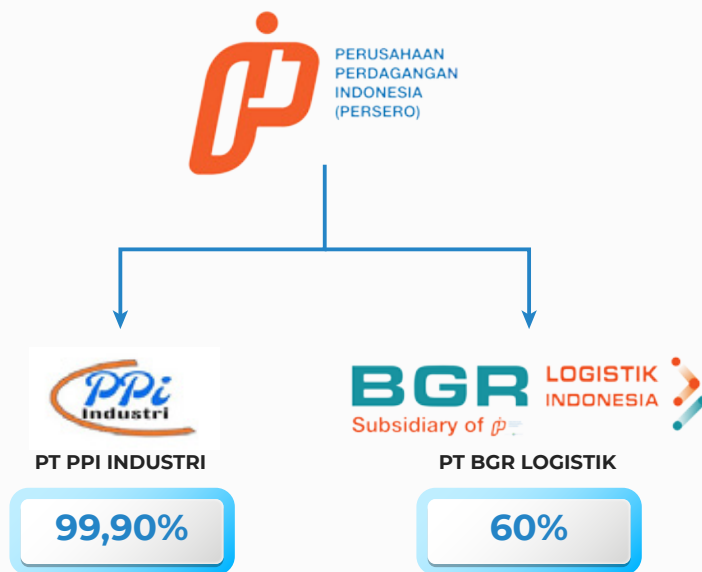
Keterangan Description	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues	58.399.544.206	45.955.377.345	25.613.412.136
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	3.700.277.655	6.261.025.268	1.446.645.597
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	2.823.376.343	4.808.056.514	1.215.081.680

VENTURA BERSAMA | JOINT VENTURE

Hingga akhir 2021, PPI tidak memiliki anak usaha dan atau penyertaan saham pada ventura bersama.

Until the end of 2021, PPI has no subsidiaries and/or equity participation in joint ventures.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN COMPANY GROUP STRUCTURE



KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM SHARE LISTING CHRONOLOGY

Hingga akhir tahun 2021, PPI belum pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Oleh sebab itu, informasi terkait kronologi pencatatan saham tidak relevan untuk ditampilkan dalam Laporan Tahunan 2021.

Until the end of 2021, PPI did not list its shares on any stock exchange. Therefore, information related to the chronology of share listing is irrelevant to be presented in the 2021 Annual Report.

KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA

OTHER SECURITIES ISSUANCE CHRONOLOGY

Hingga 31 Desember 2021, PPI tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Until December 31, 2021, PPI did not issue other securities in any form other than those described in the Chronology of Issuance and Listing of Shares above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities issuance, corporate actions, changes in the number of securities, the name of the stock exchange where other securities are listed, and the rating of securities.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS OF THE COMPANY

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang Tahun 2021 | List of Supporting Institutions and Professions in 2021

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis & Bentuk Jasa Services	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee	Tugas & Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Kantor Akuntan Publik I Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (UOB Plaza Building, 42 nd Floor Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta Pusat 10230)	<ul style="list-style-type: none"> Audit atas Laporan Keuangan PPI Audit Kepatuhan (PSA 62) Audit Kinerja Audit KPI Audit atas Laporan Keuangan PKBL Auditing PPI's Financial Statements Auditing Compliance (PSA 62) Auditing Performance Auditing KPI Auditing Financial Statements of Partnerships and Community Development Program (PKBL) 	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021	Rp 458.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Entitas Anak Perusahaan Tahun Buku 2021 Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern Melakukan jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI Melakukan jasa <i>review</i> atas pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Melakukan audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2021. Auditing the Consolidated Financial Statements of PT PPI and its Subsidiaries for the Fiscal Year 2021 Conducting audits on compliance with laws and regulations and internal control systems Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI Reviewing services on the achievement of Key Performance Indicators (KPI) Auditing financial statements of PKBL for the Fiscal Year 2021.



Nama dan Alamat Name and Address	Jenis & Bentuk Jasa Services	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee	Tugas & Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
<p>Notaris Notary</p> <p>1. Kurnia Ariyani, S.H. Jl. Raden Saleh No. 36E Karang Tengah – Tangerang</p> <p>2. Diana Idola Hotmarito, S.H., M.Kn Ruko Sentra Niaga Kalimas Blok A No. 08C Jl. K.H. Noer Ali – Kabupaten Bekasi 17510</p> <p>3. Tris Nur Patriani, S.H., M.Kn Jl. Kenanga A 96 Perum Cileungsi Indah – Bogor 16820</p> <p>4. Edy Priyono, S.H. Sentra Salemba Mas Jl. Salemba Raya – Jakarta 10430</p> <p>5. Aulia Taufani Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 – Jakarta Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perubahan Jajaran Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Pembuatan Akta Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Melakukan Legalisir Dokumen Perusahaan Amendments to the Company's Articles of Association Changes in the Composition of the Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners Preparing Deed of Amendment to the Resolution of the General Meeting of Shareholders Legalizing Company Documents 	<p>Apabila diperlukan If required</p>	<p>Rp10.000.000 - Rp20.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perubahan anggaran dasar, jajaran pemegang saham, Direksi dan Komisaris Melakukan pendaftaran AHU <i>online</i> di Kemenhumham RI Legalisir akta. Making amendments to the articles of association, the composition of the shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners Registering AHU online at the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia Legalizing deeds.
<p>Konsultan Hukum Law Consultant</p> <p>1. Hendrayanto & Partners Graha PPI Jl Abdul Muis No. 8, Jakpus, Lantai 4</p> <p>2. Law Office Suhandono & Partners Ruko Perkantoran Selmis Jalan Asem Baris Raya No. 52 Blok II Lantai 2 Tebet, Jakarta Selatan</p> <p>3. ARAKATA Lawfirm Grand Wijaya Centre Blok H-32 Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan</p> <p>4. Sahat Ambarita & Partners Komplek Simprug Diporis Blok E.5 No.17 A, Poris Gaga Baru, Batu Ceper- Kota Tangerang</p>		<p>Apabila diperlukan If required</p>	<p>Rp10.000.000 - Rp20.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan hukum dan memberikan pendapat hukum Melakukan pendampingan hukum dan memberikan pendapat hukum. Menyusun kajian yang berkaitan dengan SDM Memberikan pendapat hukum dan saran hukum terkait legalitas perdagangan dan regulasi tentang perizinan ekspor kratom. Providing legal assistance and providing legal opinions Providing legal assistance and providing legal opinions. Preparing studies related to HC Providing legal opinion and legal advice regarding trade legality and regulations on kratom export licensing.

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis & Bentuk Jasa Services	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee	Tugas & Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
5. Karna Partnership Deutsche Bank Building Lt 14 Jl. Imam Bonjol No. 80 Menteng Jakarta Pusat		11-10-2021 s/d 28-02-2022	Rp 264.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait merger PPI BGR. • Review Rancangan Penggabungan Perusahaan (RPP) dan Akte Perubahan atas Penggabungan PT PPI (Persero) dengan PT BGR (Persero); • Kajian hukum dan regulasi terkait tenaga kerja Kajian hukum dan regulasi terkait perubahan status dari Pegawai PPI (Eks BGR) menjadi Pegawai TSV • Kajian hukum dan regulasi terkait kewajiban-kewajiban BGR ke pihak supplier dan buyer begitupun sebaliknya. • Kajian Hukum dan regulasi terkait perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta izin izin usaha TSV (TSV berubah nama menjadi BGR Digital Logistik). • Review Jenis Perizinan/Bidang Usaha Yang Tidak Dapat Disatukan Dengan Bidang Usaha Yang Lain (Single Purpose). • Rancangan Peraturan Pemerintah terkait merger PPI BGR. • Review Rancangan Penggabungan Perusahaan (RPP) dan Akte Perubahan atas Penggabungan PT PPI (Persero) dengan PT BGR (Persero); • Kajian hukum dan regulasi terkait tenaga kerja Kajian hukum dan regulasi terkait perubahan status dari Pegawai PPI (Eks BGR) menjadi Pegawai TSV • Kajian hukum dan regulasi terkait kewajiban-kewajiban BGR ke pihak supplier dan buyer begitupun sebaliknya. • Kajian Hukum dan regulasi terkait perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta izin izin usaha TSV (TSV berubah nama menjadi BGR Digital Logistik). • Review Jenis Perizinan/Bidang Usaha Yang Tidak Dapat Disatukan Dengan Bidang Usaha Yang Lain (Single Purpose).

INFORMASI SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

PPI memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak, yaitu <https://www.ptppi.co.id>

Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai PPI kepada para Pemangku Kepentingan eksternal.

Pada prinsipnya, pengungkapan seluruh informasi umum perusahaan pada situs web memperhatikan 4 (empat) hal utama yang wajib diungkapkan, antara lain:

PPI has an official website that can be used by all parties, namely <https://www.ptppi.co.id>

All information presented on the web page is displayed in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The use of this website is optimized as an effective communication medium to convey information about PPI to external stakeholders.

In principle, the disclosure of all general information of the company on the website takes into account 4 (four) main things that must be disclosed, including:

1. Informasi umum perseroan;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan

PPI berkomitmen akan terus mengoptimalkan penggunaan situs web perusahaan sebagai media yang paling efektif dan efisien untuk mempromosikan produk dan/atau layanan yang disediakan perseroan, serta untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/berita/informasi penting lainnya kepada para pemangku kepentingan.

Pengelola Situs Web PPI

Pengelolaan dan pemutakhiran situs web PPI dilakukan secara profesional sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/DU/SKD/POB/PPI/ IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pengelolaan *Website* PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan dan *Senior Manager* Divisi Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan situs web perseroan. Perseroan juga membentuk Tim Admin Portal BUMN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/ SKD/PPI/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Admin Portal BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Pemenuhan Informasi Pada Situs Web PPI

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa situs web PPI telah menyajikan informasi sebagai berikut:

1. General information of the Company;
2. Information for investors;
3. Information on corporate governance; and
4. Information on corporate social responsibility

PPI is committed to continuously optimizing the use of the the Company's website as the most effective and efficient medium to promote the products and/ or services provided by the Company, as well as to communicate matters relating to policies/news/other important information to stakeholders.

Manager of PPI's Website

The management and updating of PPI's website is carried out in a professional manner as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 13/ DU/SK-D/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018 concerning Standard Operating Procedures (POB) for Website Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Based on the Decree, the Board of Directors appointed the Corporate Secretary and Senior Manager of the Information Technology Division as the person in charge of managing the Company's website. The Company also established the SOE Portal Admin Team which was stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 28/DU/SKD/PPI/III/2017 dated March 16, 2017 regarding Establishment of the SOE Portal Admin Team for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Fulfillment of Information on PPI's website

Shortly, it can be concluded that PPI's website has provided the following information:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholder to the Individual End Owner	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	-	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	-	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TAHUN 2021

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT IN 2021

Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Kerja Audit Internal PPI telah mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan / pelatihan / seminar / lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan, antara lain:

Throughout 2021, the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and PPI's Internal Audit Unit participated in a number of educational / training / seminar / workshop activities aimed at improving the competence and capability of each individual in order to achieve the vision, mission, and the objectives of the company. The programs participated are as follows:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2021 | Education and/or Training of the Board of Directors in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial dan Pengembangan Director of Commercial and Development	<ul style="list-style-type: none"> Arahan strategis KBUMN Pengembangan Karakter Unggul untuk Pemimpin yang ber-AKHLAK <i>Formulating Impactful Value Creation Strategy</i> <i>Finance for Senior Executive: "Maximizing Shareholder's Value"</i> <i>Ensuring Business Sustainability through GCG and Corporate Law & Compliance</i> <i>Managing Harmonious Relationship with Stakeholders</i> <i>Driving Innovation through Digital Transformation</i> <i>Leader's Role in Human Capital Management</i> <i>BUMN Executive Onboarding Simulation</i> <p>Wawasan Kebangsaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Strategic directions from the Ministry of SOEs Superior Character Development for Leaders with NATURE Formulating Impactful Value Creation Strategy Finance for Senior Executives: "Maximizing Shareholder's Value" Ensuring Business Sustainability through GCG and Corporate Law & Compliance Managing Harmonious Relation with Stakeholders Driving Innovation through Digital Transformation Leader's Role in Human Capital Management SOE Executive Onboarding Simulation <p>National Insight</p>	BUMN Leadership & Management Institute	<i>Virtual</i> , 1 Oktober 2021 Virtual, October 1, 2020



Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2021 | Education and/or Training of the Board of Commissioners in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Panel Barus	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin Efektif & Transformasional Berbasis AKHLAK • Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Keunggulan Indonesia • Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas • Pemahaman Bisnis • Keuangan & Manajemen Risiko Eksekusi Strategik • Effective & Transformational Leading based on AKHLAK • Insight on the Nationality and Identity of Indonesia's Excellence • Roles & Responsibilities of the Board of Commissioners/ Supervisors • Business Understanding • Finance & Risk Management Strategic Execution 	BUMN Leadership & Management Institute	Virtual , 1 Oktober 2021 Virtual, October 1, 2020
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Wawasan Kebangsaan dan Jatidiri Keunggulan Indonesia • Peran & Tanggung Jawab Komisaris • Pemahaman Bisnis • Keuangan & Manajemen Risiko • Simulasi Praktek Komisaris Profesional • Pemimpin Efektif & Transformasional Berbasis AKHLAK • Insight on Nationality and Identity of Indonesia's Excellence • Roles & Responsibilities of the Board of Commissioners • Business Understanding • Finance & Risk Management • Professional Commissioner Practice Simulation • Effective & Transformational Leader based on AKHLAK 	BUMN Leadership & Management Institute dan FHCI	Virtual , 1 Oktober 2021 Virtual, October 1, 2020

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretariat Perusahaan Tahun 2021 | Education and/or Training of the Corporate Secretariat Division in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>	<ul style="list-style-type: none"> SPT PPH OP LHKPN SPH <i>Tax Amnesty</i> 	Divisi SDM dan Umum Human Capital and General Affair Division	<i>Virtual</i> , 10 Maret 2021 <i>Virtual</i> , March 10, 2021
Nabila	<i>PJS Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> Latar Belakang Penerapan KPKU BUMN 2020-G 	Forum Ekselen BUMN	<i>Virtual</i> , 21-23 April 2021 <i>Virtual</i> , April 21-23, 2021
Ira Berlianty Aziz	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memahami Konsep Kinerja Ekselen Dokumen KPKU-BUMN Menyusun Dokumen & Profil Organisasi Dokumen Kesisteman – Kategori 1 & 2 Kategori 3, 4, & 5 – Kategori 6 & 7 KPI Perspektif KPKU Integrasi Model KPKU 2020-G Lanjutan Integrasi Model KPKU 2020-G Background on the Implementation of the KPKU BUMN 2020-G Understanding the Concept of Excellent Performance KPKU-BUMN Documents Preparing Documents & Organizational Profile Systematic Documents – Categories 1 & 2 Categories 3, 4 & 5 – Categories 6 & 7 KPKU Perspective KPI KPKU 2020-G Model Integration Advanced KPKU 2020-G Model Integration 		
Ira Berlianty Aziz	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> Arti dan peran strategis Pelanggan bagi Perusahaan 	Departemen SDM & Umum HC and General Affairs Department	<i>Virtual</i> , 09 Agustus 2021 <i>Virtual</i> , August 9, 2021
Syaileandra	<i>Vice President</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM Essentials</i> 		
Nabila	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM & Business Leverage</i> <i>CRM & Business Sustainability</i> <i>CRM Strategic Enabler</i> <i>CRM Wisdom</i> 		
Ansella Wipa Tustianasari	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM Wisdom</i> 		
Lita Setiawati	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Strategic meaning and role of the Customer for the Company 		
Fadli Rosyad	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM Essentials</i> 		
Aditya Mahapradnya	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM & Business Leverage</i> <i>CRM & Business Sustainability</i> <i>CRM Strategic Enabler</i> 		
Ferra Vasquela	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>CRM Wisdom</i> 		
Natya Kartika Respati	<i>Officer</i>			
Niken Rachmadyanti	<i>Officer</i>			
Nora Adelinda Siregar	<i>Officer</i>			
Fitra Anisa	<i>Personal Assistant</i>			
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>			

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Syailendra	<i>Vice President</i>	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan kerja yang <i>engaged</i> berperan besar bagi pengembangan Apa itu <i>employee engagement</i> Tingkatan <i>employee engagement</i> Gaya Kepemimpinan <i>Boss vs Coach</i> Prinsip memberikan umpan balik melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> Teknik memberikan umpan baik melalui <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> <i>Employee Engagement</i> melalui <i>Coaching</i> Proses <i>Coaching</i> yang efektif melalui <i>platform online</i> An engaged work environment plays a major role in development What is employee engagement Level of employee engagement Leadership Style Boss vs Coach Principles of providing feedback through coaching and mentoring Techniques for providing good feedback through Coaching and Mentoring Employee Engagement through Coaching Effective coaching process through online platform 	Departemen SDM & Umum HC & General Affairs Department	<i>Virtual</i> , 27 Agustus 2021 <i>Virtual</i> , August 27, 2021
Ira Berlianty Aziz	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Dasar Risiko dan Manajemen Risiko Sumber dan Jenis Risiko Bisnis Regulasi terkait Manajemen Risiko Proses Manajemen Risiko Implementasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Wisdom</i> Risk and Risk Management Basic Concepts Sources and Types of Business Risk Regulations related to Risk Management Risk Management Process Implementation of Risk Management Risk Management Wisdom 	Departemen SDM & Umum HC & General Affairs Department	<i>Virtual</i> , 20 Agustus 2021 <i>Virtual</i> , August 20, 2021
Syailendra	<i>Vice President</i>			
Nabila	<i>Manager</i>			
Ansella Wipa Tustianasari	<i>Officer</i>			
Lita Setiawati	<i>Officer</i>			
Fadli Rosyad	<i>Officer</i>			
Aditya Mahapradnya	<i>Officer</i>			
Ferra Vasquela	<i>Officer</i>			
Prio Pamulat	<i>Asisten Manager Assistant Manager</i>			
Dara Mawarny	<i>Officer</i>			
Niken Rachmadiyahanti	<i>Officer</i>			
Nora Adelinda Siregar	<i>Officer</i>			
Fitra Anisa	<i>Personal Assistant</i>			
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>			

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Ira Berlianty Aziz	Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar kontrak • Dasar hukum kontrak • Syarat dan azas kontrak • Anatomi kontrak • Penyusunan kontrak 	Departemen SDM & Umum HC and General Affairs Department	Virtual, 3 September 2021 Virtual, September 3, 2021
Nabila	Manager			
Ansella Wipa Tustianasari	Officer			
Lita Setiawati	Officer			
Fadli Rosyad	Officer			
Aditya Mahapradnya	Officer			
Ferra Vasquela	Officer			
Natya Kartika Respati	Officer			
Niken Rachmadiyahanti	Officer			
Fitra Anisa	Personal Assistant			
Nora Adelinda Siregar	Officer			
Syailendra	Vice President	Transforming Organization Facing VUCA & the Practices of Dorectorship	Rajawali Nusantara Indonesia	Virtual, 4 September 2021 Virtual, September 4, 2021
Ira Berlianty Aziz	Manager			
Nabila	Manager			
Ira Berlianty Aziz	Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar kontrak • Dasar hukum kontrak • Syarat dan azas kontrak • Anatomi kontrak • Penyusunan kontrak 	Departemen SDM & Umum HC and General Affairs Department	Virtual, 3 September 2021 Virtual, September 3, 2021
Nabila	Manager			
Ansella Wipa Tustianasari	Officer			
Lita Setiawati	Officer			
Fadli Rosyad	Officer			
Aditya Mahapradnya	Officer			
Ferra Vasquela	Officer			
Natya Kartika Respati	Officer			
Niken Rachmadiyahanti	Officer			
Fitra Anisa	Personal Assistant			
Nora Adelinda Siregar	Officer			
Dara Mawarny	Officer	Pasar Lelang Komoditas Terintegrasi Sistem Resi Gudang Commodity Auction Market with Integrated Warehouse Receipt System	Departemen SDM & Umum HC and General Affairs Department	Virtual, 15-16 September 2021 Virtual, September 15-16, 2021
Fitra Anisa	Personal Assistant			
Syailendra	Vice President	Visionary & Transformational Leadership	Rajawali Nusantara Indonesia	Virtual, 18 September 2021 Virtual, September 18, 2021
Ira Berlianty Aziz	Manager			
Nabila	Manager			



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Syailendra	<i>Vice President</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tujuh kunci perubahan paradigma dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif Manajemen kinerja individu Performance management <i>best practices</i> Penetapan sasaran manajemen kinerja <i>Performance tracking</i> dan penilaian manajemen kinerja Pengembangan berkelanjutan dari manajemen kinerja Konsekuensi manajemen kinerja Seven keys to a paradigm shift in developing an effective performance management system Individual performance management Performance management best practices Setting performance management goals Performance tracking and performance management assessment Continuous development of performance management Consequences of performance management 	Departemen SDM & Umum HC & Gneral Affairs Department	<i>Virtual</i> , 15 Oktober 2021 <i>Virtual</i> , October 15, 2021
Ira Berlianty Aziz	<i>Manager</i>			
Nabila	<i>Manager</i>			
Lita Setiawati	<i>Officer</i>			
Fadli Rosyad	<i>Officer</i>			
Aditya Mahapradnya	<i>Officer</i>			
Ferra Vasquela	<i>Officer</i>			
Natya Kartika Respati	<i>Officer</i>			
Niken Rachmadiyahanti	<i>Officer</i>			
Fitra Anisa	<i>Personal Assistant</i>			
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>			
Dara Mawarny	<i>Officer</i>			
Nora Adelinda Siregar	<i>Officer</i>			
Lita Setiawati	<i>Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku Pengemudi yang Buruk Bahaya, Risiko dan Pengendaliannya Distraksi pada Pengemudi Persiapan Sebelum Berkendara & <i>Maintanance</i> Tindakan Antisipatif Ketika Berkendara Bad Driver Behavior Hazards, Risks and Their Control Driver's Distraction Preparation Before Driving & Maintenance Anticipatory Measures When Driving 	Departemen SDM & Umum HC & Gneral Affairs Department	<i>Virtual</i> , 21 Oktober 2021 <i>Virtual</i> , October 21, 2021
Fadli Rosyad	<i>Officer</i>			
Ferra Vasquela	<i>Officer</i>			
Natya Kartika Respati	<i>Officer</i>			
Niken Rachmadiyahanti	<i>Officer</i>			
Fitra Anisa	<i>Personal Assistant</i>			
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>			
Dara Mawarny	<i>Officer</i>			
Ira Berlianty Aziz	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ruang lingkup <i>market intelligence</i>. Kegunaan <i>market intelligence</i>. Bentuk informasi dan sumber-sumber <i>market intelligence</i>. Proses <i>market intelligence</i>. Analisa dan evaluasi <i>market intelligence</i>. Scope of market intelligence. Use of market intelligence. Forms of information and sources of market intelligence. Market intelligence processes. Analysis and evaluation of market intelligence. 	Departemen SDM & Umum HC & Gneral Affairs Department	<i>Virtual</i> , 19 November 2021 <i>Virtual</i> , November 19, 2021
Nabila	<i>Manager</i>			
Fadli Rosyad	<i>Officer</i>			
Ferra Vasquela	<i>Officer</i>			
Natya Kartika Respati	<i>Officer</i>			
Fitra Anisa	<i>Personal Assistant</i>			
Allia Nur Rahma	<i>Personal Assistant</i>			
Nora Adelinda Siregar	<i>Officer</i>			
Niken Rachmadiyahanti	<i>Officer</i>			

Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pegawai Intern (SPI) Perusahaan Tahun 2021 | Education and/or Training of the the Internal Audit Unit (IAU) in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Cahyadi	<i>Vice President</i>	Kapabilitas SPI Korporasi Berbasis Internal Audit <i>Capability Model</i> (IACM) Corporate Internal Audit Capability Based on Internal Audit Capability Model (IACM)	BPKP	Virtual, 12 Maret 2021 Virtual, March 12, 2021
Delfiyandri	<i>Senior Officer</i>			
Daeng Achmad Ardiansyah	<i>Manager</i>	Ujian <i>Certified Internal Auditor</i> Certified Internal Auditor Assessment	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Person Vue Test Center UI, 9 September 2021 Person Vue Test Center UI, September 9, 2021
Faradina Ayudhia Pratiwi	<i>Officer</i>	Proses audit berbasis resiko pemahaman & implementasi teknik pengujian risiko dalam audit internal implementasi teknik penulisan laporan hasil audit Risk-based audit process understanding & implementation of risk testing techniques in internal audit implementation of audit report writing techniques	Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education	13 Oktober 2021 October 13, 2021
David Nicholson	<i>Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> SPT PPH OP LHKPN SPH <i>Tax Amnesty</i> 	Divisi SDM dan Umum Human Capital and General Affair Division	Virtual, 10 Maret 2021 Virtual, March 10, 2021
Carmat Anzaswara	Fungsional Madya Associate	<ul style="list-style-type: none"> Arti dan peran strategis Pelanggan bagi Perusahaan CRM <i>Essentials</i> CRM & <i>Business Leverage</i> CRM & <i>Business Sustainability</i> CRM <i>Strategic Enabler</i> CRM <i>Wisdom</i> Strategic meaning and role of the Customer for the Company CRM Essentials CRM & Business Leverage CRM & Business Sustainability CRM Strategic Enabler CRM Wisdom 	Divisi SDM dan Umum Human Capital and General Affair Division	Virtual, 09 Agustus 2021 Virtual, August 9, 2021
David Nicholson	<i>Manager</i>			
Dimas Adi Oetama Sahupala	Asisten <i>Manager</i> Assistant Manager			
Carmat Anzaswara	Fungsional Madya Associate	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Dasar Risiko dan Manajemen Risiko Sumber dan Jenis Risiko Bisnis Regulasi terkait Manajemen Risiko Proses Manajemen Risiko Implementasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Wisdom</i> Risk and Risk Management Basic Concepts Sources and Types of Business Risk Regulations related to Risk Management Risk Management Process Implementation of Risk Management Risk Management Wisdom 	Divisi SDM dan Umum Human Capital and General Affair Division	Virtual, 20 Agustus 2021 Virtual, August 20, 2021
David Nicholson	<i>Manager</i>			
Dimas Adi Oetama Sahupala	Asisten <i>Manager</i> Assistant Manager			



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Date of Implementation
Dimas Adi Oetama Sahupala	Asisten Manager Assistant Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuh kunci perubahan paradigma dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif • Manajemen kinerja individu • <i>Performance management best practices</i> • Penetapan sasaran manajemen kinerja • <i>Performance tracking</i> dan penilaian • Seven keys to a paradigm shift in developing an effective performance management system • Individual performance management • Performance management best practices • Setting performance management goals • Performance tracking and assessment 	Departemen SDM & Umum HC & General Affairs Department	Virtual, 15 Oktober 2021 Virtual, October 15, 2021
Dimas Adi Oetama Sahupala	Asisten Manager Assistant Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku Pengemudi yang Buruk • Bahaya, Risiko dan Pengendaliannya • Distraksi pada Pengemudi • Persiapan Sebelum Berkendara & <i>Maintenance</i> • Tindakan Antisipatif Ketika Berkendara • Bad Driver Behavior • Hazards, Risks and Their Control • Driver's Distraction • Preparation Before Driving & Maintenance • Anticipatory Measures When Driving 	Departemen SDM & Umum HC & General Affairs Department	Virtual, 21 Oktober 2021 Virtual, October 21, 2021



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS

4



TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

OVERVIEW OF GLOBAL AND NATIONAL MACROECONOMICS

Pada tahun 2021, perekonomian global melanjutkan pemulihan dan perbaikan, pada saat yang sama juga menghadapi terjadinya disrupsi rantai pasokan global serta gelombang baru COVID-19. Varian baru yang muncul masih menjadi risiko terbesar di tengah ketimpangan distribusi vaksin global. Akses vaksin dan dukungan kebijakan yang lebih preventif menjadi pendorong utama mengatasi kesenjangan tersebut.

Penyebaran varian Delta yang cepat dan ancaman varian baru (Omicron) meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa cepat pandemi dapat diatasi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi tantangan multidimensi mulai dari penurunan pertumbuhan lapangan kerja, kenaikan inflasi, kerawanan pangan, hingga ruang gerak yang terbatas.

Kendati demikian, menurut perkiraan IMF, ekonomi global pada tahun 2021 tercatat tumbuh 5,9%. Pertumbuhan ekonomi global berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan usaha secara bertahap. Berbagai indikator ekonomi hingga akhir tahun 2021, menunjukkan pemulihan yang terus berlangsung, di tengah indikator waktu transportasi (*PMI Suppliers' Delivery Times Index*) barang global yang masih tertahan.

Output ekonomi di beberapa negara maju melebihi proyeksi jangka menengah sebelum terjadinya pandemi, bahkan Amerika Serikat mulai menjalankan kebijakan antisipasi lebih lanjut yang mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan protensi ekonomi di tengah pandemi. Sebaliknya, kekurangan pasokan dan produksi vaksin di negara berkembang karena peluncuran vaksin yang lebih lambat, sedikit mengurangi percepatan laju ekonomi dibanding negara maju.

Memasuki awal tahun 2021, terdapat optimisme dari para pelaku pasar atas pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang didorong oleh program vaksinasi secara masif. Meski sempat mengalami penurunan ekonomi pada pertengahan tahun akibat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertumbuhan ekonomi domestik menunjukkan perbaikan pada akhir triwulan IV 2021 sejalan dengan meningkatnya mobilitas

In 2021, the global economy was recovering and improving while at the same time facing global supply chain disruptions and a new wave of COVID-19. New variants that emerged were still the biggest risk amid uneven global vaccine distribution. Vaccine access and more preventive policy support were the main drivers of overcoming this gap.

The rapid deployment of Delta variants and the threat of new variant (Omicron) increased uncertainty in handling the pandemic quickly. Policy choices were becoming more difficult, facing multidimensional challenges ranging from declining employment growth, rising inflation, food insecurity, to limited space for movement.

However, according to IMF estimates, the global economy in 2021 was recorded to grow by 5.9%. Global economic growth was more balanced, not only relying on the economic recovery of the United States (US) and China, but also accompanied by economic recovery in Europe, Japan and India. These developments were driven by the acceleration of vaccination rates, policy stimulus, and the gradual recovery of business activities. Various economic indicators until the end of 2021 showed an ongoing recovery, amidst the stagnant PMI Suppliers' Delivery Times Index of global goods.

Economic output in several developed countries exceeded medium-term projections before the pandemic, even the United States began to carry out further anticipatory policies that included measures to increase economic potential in the midst of a pandemic. On the other hand, the shortage of vaccine supply and production in developing countries due to slower vaccine launches slightly reduced the economic acceleration compared to developed countries.

Entering the beginning of 2021, there was optimism from market players for domestic economic growth driven by a massive vaccination program. Despite experiencing an economic downturn in the middle of the year due to the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), domestic economic growth showed improvement at the end of the fourth quarter of 2021 in line with increased mobility after the handling measures



pasca langkah-langkah penanganan yang ditempuh Pemerintah dalam pengendalian COVID-19 varian Delta.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca pengendalian COVID-19. Ekonomi domestik tumbuh 3,69% pada tahun 2021 dari sebelumnya terkontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik, dengan Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik dengan inflasi yang terjaga pada level 1,87% mendukung stabilitas perekonomian. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan meluncurkan berbagai kebijakan seperti melonggarkan likuiditas perbankan dan kebijakan moneter yang akomodatif. Upaya-upaya tersebut dirasa cukup berhasil menjaga kestabilan perekonomian Indonesia yang terlihat pada nilai tukar Rupiah yang relatif stabil selama tahun 2021.

Konsumsi swasta, belanja Pemerintah dan nilai investasi diperkirakan terus meningkat, di tengah tetap terjaganya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja Lapangan Usaha utama, antara lain Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan yang tetap baik. Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut.

Sampai dengan Desember 2021 sejumlah kebijakan dan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sudah mulai menunjukkan hasil. Hal ini terlihat pada mobilitas dan konsumsi masyarakat yang sudah mulai meningkat, indikator pemulihan ekonomi juga sudah mulai menunjukkan perbaikan seperti pada transaksi perdagangan pada industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain kinerja konsumsi swasta, investasi dan konsumsi pemerintah juga mulai meningkat dan diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2022. Atas hal tersebut maka BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2022 akan tumbuh menjadi di kisaran 4,7-5,5%.

taken by the Government in controlling the Delta variant of COVID-19.

Indonesia's economic growth was improving in line with increased mobility after COVID-19 control. The domestic economy grew by 3.69% in 2021 from the previous contraction of 2.07% in 2020. Indonesia's Balance of Payments remained good, with Indonesia's Balance of Payments remaining good with inflation maintained at the level of 1.87% supporting economic stability. In the midst of global financial market uncertainty, the government together with Bank Indonesia continued to strive to restore the national economy by launching various policies such as loosening banking liquidity and accommodative monetary policy. These efforts are considered quite successful in maintaining the stability of the Indonesian economy as seen in the relatively stable Rupiah exchange rate during 2021.

Private consumption, government spending and investment value are forecasted to continue to rise, amid maintained export performance. Economic growth was also supported by the performance of the main business fields, including the manufacturing, trading and mining industries which remained good. A number of indicators until December 2021 showed a continuing recovery process.

Until December 2021, a number of policies and stimulus issued by the government in dealing with the COVID-19 pandemic and economic recovery began to show good results. This can be seen in the mobility and consumption of the people which began to increase, indicators of economic recovery which began to show improvement, such as in trade transactions in the processing, trading and mining industries which showed an increase compared to the previous year. Furthermore, the performance of private consumption, investment and government consumption also began to increase and is expected to continue in 2022. Hence, BI estimates that domestic economic growth in 2022 will grow to be in the range of 4.7-5.5%.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

Segmen usaha PPI dikelompokkan berdasarkan:

- Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)
- Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)
- Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain).

PPI's business segments are categorized based on:

- Local (Domestic Trade)
- Import & Export (International Trade)
- Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business).

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Kinerja PPI berdasarkan lini usaha Perdagangan Dalam Negeri dilihat berdasarkan pencapaian jumlah penjualan komoditas di pasar lokal atau dalam negeri sepanjang tahun 2021. Pada lini Perdagangan Dalam Negeri, perseoran menjual komoditas berupa pupuk dan pestisida, produk farmasi dan alat kesehatan, produk konsumsi dan bahan pangan, bahan bangunan serta produk dan alat pertanian.

Pada tahun 2021, kinerja perdagangan dalam negeri mengalami kontraksi seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi COVID-19. Berikut ini adalah kinerja perseoran berdasarkan lini Perdagangan Dalam Negeri sepanjang tahun 2021:

DOMESTIC TRADE

PPI's performance based on the Domestic Trade business line is assessed based on the achievement of total commodity sales in the local or domestic market throughout 2021. In the Domestic Trade, the Company sells commodities in the form of fertilizers and pesticides, pharmaceutical products and medical devices, consumer products and food ingredients, building materials and agricultural products and equipment.

In 2021, domestic trade performance contracted in line with the weakening of people's purchasing power during the COVID-19 pandemic. The following is the Company's performance in the Domestic Trade throughout 2021:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

No.	Komoditi Commodity	2020			2021			% Capaian Realisasi Terhadap % Achievement						
		Realisasi Realization			RKAP			Realisasi Realization			RKAP Revisi 2021 RKAP 2021 Revision		Realisasi 2020 Realization	
		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit
I. PERDAGANGAN DALAM NEGERI DOMESTIC TRADE														
A.	Pupuk dan Pestisida Fertilizer and Pesticide	591.256	36.001		907.205	79.056	9%	585.110	38.234	7%	64%	48%	1%	6%
	1. Pupuk Fertilizer	525.617	19.991		685.340	27.177	4%	522.610	22.624	4%	76%	83%	-1%	13%
	A. Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	385.518	13.912		438.602	19.178	4%	394.725	12.885	3%	90%	67%	2%	-7%
	B. Pupuk Non - Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	140.099	6.079		246.738	7.999	3%	127.884	9.738	8%	52%	122%	-9%	60%
	2. Pestisida Pesticide	65.639	16.010		221.865	51.879	23%	62.501	15.611	25%	28%	30%	-5%	-2%
B.	Produk Suplement Supplementary Product	53.926	5.526		86.402	8.480	10%	68.867	7.610	11%	80%	90%	28%	38%
C.	Produk Konsumsi dan Bahan Pokok Consumer Product and Staple	170.279	13.345		192.926	11.687	6%	124.093	5.930	5%	64%	51%	-27%	-56%
D.	Bahan Bangunan Construction Material	12.168	1.136		17.519	832	5%	10.592	292	3%	60%	35%	-13%	-74%
E.	Produk Pertanian Agricultural Product	1.608	87		2.703	203	8%	967	61	6%	36%	30%	-40%	-29%
	TOTAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TOTAL DOMESTIC TRADE	829.237	56.094		1.206.755	100.258	8%	789.629	52.128	7%	65%	52%	-5%	-7%



Pada saat ini setidaknya 75% dari penjualan komoditas pada kelompok Perdagangan Dalam Negeri didominasi oleh penjualan Pupuk dan Pestisida dengan nilai penjualan mencapai Rp907,21 miliar, sementara 25% sisanya sebesar Rp299,55 miliar dikontribusikan oleh perdagangan Produk Konsumsi dan Bahan Pokok, Suplemen, Bahan Bangunan, serta Produk dan Alat Pertanian.

Saat ini, perseroan telah bersinergi dengan Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi yang tersebar di 24 wilayah di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan infrastruktur gudang yang dimiliki oleh PPI di sejumlah wilayah. Selain menjalin kerja sama dalam hal penyaluran pupuk subsidi, perseroan juga berperan sebagai distributor utama pupuk non-subsidi PT Petrokimia Gresik.

Produk lainnya yang dinilai memiliki potensi luar biasa besar yang dimiliki oleh perseroan, yakni produk pestisida dengan merek dagang Dharma. Keberadaan produk Dharmabrand dengan banyak varian telah dikenal oleh petani dan memiliki *customer loyalty* cukup tinggi.

Adapun hal lain yang juga menjadi fokus PPI dalam hal pengembangan adalah produk farmasi dan alat kesehatan. Pada lini produk tersebut, PPI memiliki produk Transamin yang sudah sejak lama diperdagangkan di pasar industri kesehatan. Sedangkan untuk produk farmasi, PPI telah menjalin kerja sama dengan prinsipal farmasi, diantaranya makloon.

Sementara untuk produk-produk konsumsi dan bahan pokok, PPI ditunjuk sebagai distributor utama. Kegiatan distribusi bahan pokok didukung oleh jaringan cabang yang besar dimana aktivitas perdagangan pada lini produk ini didominasi oleh beras, tepung terigu, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, PPI juga telah mengembangkan merek dagang Panganesia dengan produk beras dan minyak goreng.

Total penjualan komoditas Perdagangan Dalam Negeri memberikan sumbangsih penjualan 41% terhadap total penjualan keseluruhan dengan nilai sebesar Rp789,6 miliar (terrealisasi 65% dari target), sedangkan laba kotor dibukukan mencapai Rp52,12 miliar (terrealisasi 52% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020, terlihat bahwa omset penjualan yang didapat dari segmen Perdagangan Dalam Negeri pada tahun ini menurun 5% dan laba kotor menurun sebesar 7%.

Currently, at least 75% of commodity sales in the Domestic Trade group are dominated by sales of Fertilizers and Pesticides with sales value reaching Rp907.21 billion, while the remaining 25% or Rp299.55 billion is contributed by trade in Consumer Products and Staples, Supplements, Construction Materials, and Agricultural Products and Equipment.

Currently, PPI has synergized with Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) in distributing subsidized fertilizers spread across 24 regions in Indonesia. This is supported by the availability of warehouse infrastructure owned by PPI in a number of areas. In addition to establishing cooperation in the distribution of subsidized fertilizers, the Company also acts as the main distributor of non-subsidized fertilizers for PT Petrokimia Gresik.

Another product that is considered to have enormous potential owned by the Company is pesticide product with the Dharma trademark. The existence of Dharmabrand products with many variants has been recognized by farmers and has quite high customer loyalty.

Other things that are also the focus of PPI in terms of development are pharmaceutical products and medical devices. In these product lines, PPI has Transamin products which have long been traded in the health industry market. As for pharmaceutical products, PPI has established cooperation with pharmaceutical principals, including Makloon.

Meanwhile, for consumer products and staple goods, PPI was appointed as the main distributor. The distribution of staples is supported by a large branch network where trading activities in this product line are dominated by rice, wheat flour and other staples. In addition, PPI has also developed the Panganesia trademark with rice and cooking oil products.

Total sales of Domestic Trade commodities contributed 41% of total sales with a value of Rp789.6 billion (65% of the target), while gross profit was recorded at Rp52.12 billion (52% of the target). When compared with the achievements in 2020, it can be seen that the sales turnover obtained from the Domestic Trade segment this year decreased by 5% and gross profit decreased by 7%.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kinerja PPI berdasarkan lini Perdagangan Internasional dinilai berdasarkan realisasi penjualan komoditas produk ekspor di pasar internasional atau luar negeri, serta jumlah penjualan komoditas produk impor di pasar dalam negeri sepanjang 2021.

Pada lini Perdagangan Internasional, PPI menjual komoditas produk impor yang diperoleh dari kegiatan impor berupa Bahan kimia Berbahaya (B2), produk pertanian, dan produk ekspor serta perdagangan lainnya. Selain itu, melalui lini usaha ini PPI juga menjual komoditas dari dalam negeri berupa kopi, teh, produk hortikultura dan produk ekspor lainnya ke pasar internasional atau pasar luar negeri.

Berdasarkan kontribusi omset penjualan, maka Perdagangan Internasional menempati pareto pendapatan tertinggi dibandingkan segmen operasi lainnya. Berikut ini adalah kinerja PPI berdasarkan lini Perdagangan Internasional sepanjang tahun 2021:

INTERNATIONAL TRADE

PPI's performance in International Trade is assessed based on the realization of sales of export commodities in international or foreign markets, as well as the number of sales of imported product commodities in the domestic market throughout 2021.

In the International Trade line, PPI sells imported product commodities obtained from import activities in the form of Hazardous Chemicals (B2), agricultural products, and export products as well as other trades. In addition, through this line of business, PPI also sells domestic commodities in the form of coffee, tea, horticultural products and other export products to international markets or overseas markets.

Based on the contribution of sales turnover, International Trade occupies the highest Pareto revenue compared to other operating segments. The following is PPI's performance in the International Trade throughout 2021:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

No.	Komoditi Commodity	2020			2021			% Capaian Realisasi Terhadap % Achievement						
		Realisasi Realization			RKAP Revisi Revised RKAP			Realisasi Realization			RKAP Revisi Revised RKAP		Realisasi 2020 Realization	
		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	%	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit
II. PERDAGANGAN INTERNASIONAL INTERNATIONAL TRADE														
1.	Produk Impor Imported Product	1.928.202	155.717	8%	759.574	96.396	13%	501.698	68.950	14%	66%	72%	-74%	-56%
	A. Bahan Kimia Berbahaya (B2) Hazardous Chemicals (B2)	258.443	34.097	13%	692.049	90.175	13%	337.484	56.398	17%	49%	63%	31%	65%
	B. Produk Pertanian Agricultural Product	1.669.759	121.619	7%	67.525	6.221	9%	162.567	10.905	7%	241%	175%	-90%	-91%
	C. Produk Industri Industrial Product	0	0	0%	0	0	0%	1.647	1.647	100%	0%	0%	0%	0%
2.	Produk Ekspor Export Product	1.816	190	10%	25.019	744	3%	6.402	226	4%	26%	30%	252%	19%
3.	Perdagangan Internasional Lainnya Other International Trade	0	0	0%	150.000	2.700	2%	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	TOTAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL TOTAL INTERNATIONAL TRADE	1.930.019	155.906	8%	934.594	99.841	11%	508.100	69.176	14%	54%	69%	-74%	-56%



Selama tahun 2021, segmen Perdagangan Internasional membukukan total penjualan sebesar Rp508,10 miliar (terrealisasi 54% dari target RKAP 2021) atau menyumbang 26% kontribusi terhadap total penjualan PPI. Sementara itu, laba kotor dibukukan mencapai Rp69,17 miliar (terrealisasi 69% dari target RKAP 2021) atau berkontribusi 26% terhadap total perolehan laba kotor PPI.

Sebanyak 32% dari total penjualan Perdagangan Internasional berasal dari penjualan produk pertanian yang membukukan penjualan sebesar Rp162,56 miliar. Sementara 68% sisanya berasal dari penjualan komoditi Bahan Kimia Berbahaya dengan angka penjualan sebesar Rp337,48 miliar dan industri sebesar Rp1,6 miliar

Pada tahun 2021, penjualan ekspor tercatat sebesar Rp6,4 miliar berasal dari ekspor komoditi kopi, kelapa dan turunannya serta ikan. Rendahnya realisasi ekspor tahun 2021 dikarenakan negara-negara tujuan ekspor lebih memprioritaskan impor alat kesehatan khususnya terkait alat kesehatan pandemi COVID-19 serta banyaknya negara yang menerapkan kebijakan *lockdown*.

Secara menyeluruh, kinerja penjualan pada segmen komoditas Perdagangan Internasional mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 74% dibandingkan tahun sebelumnya, sama halnya dengan laba kotor membukukan penurunan sebesar 56%.

Selain karena terdampak efek pandemi COVID-19, kontribusi penjualan dan laba kotor Perdagangan Internasional tahun 2021 dibanding targetnya maupun dibanding pencapaian tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh:

- Kinerja produk bahan kimia sangat bergantung pada terbitnya Surat Persetujuan Impor (SPI)
- *Shortage* produk bahan kimia dan keterlambatan pengiriman produk Bahan Kimia (ketersediaan vessel dan ketidaksesuaian *export license* dari *supplier*);
- Implikasi dari Permendag 47 Tahun 2019, dimana PPI tidak lagi menjadi satu-satunya importir B2 menyebabkan tidak tercapainya target penjualan serta menurunnya laba kotor penjualan produk bahan kimia (pasar penjualan bahan kimia menjadi terbatas, margin menjadi mengecil);
- Adanya *import restriction* di negara tujuan terhadap beberapa komoditi Indonesia sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekspor yang menyebabkan masih kecilnya angka realisasi ekspor hingga tahun 2021;
- Tidak terlaksananya realisasi transaksi program imbal dagang.

During 2021, the International Trade segment recorded total sales of Rp508.10 billion (54% of the 2021 RKAP target) or contributed 26% of the contribution to PPI's total sales. Meanwhile, gross profit was recorded at Rp69.17 billion (69% of the 2021 RKAP target) or contributed 26% to PPI's total gross profit.

A total of 32% of total international trade sales came from sales of agricultural products which recorded sales of Rp162.56 billion. Meanwhile, the remaining 68% came from sales of Hazardous Chemicals commodities with recorded sales of Rp337.48 billion and industry of Rp1.6 billion.

In 2021, export sales were recorded at Rp6.4 billion, which were obtained from exports of coffee, coconut and their derivatives as well as fish. The low realization of exports in 2021 was because export destination countries prioritized the import of medical devices, especially related to the COVID-19 pandemic medical equipment and many countries implemented lockdown policies.

Overall, sales performance in the International Trade commodity segment experienced a sharp decline of up to 74% compared to the previous year, as well as gross profit which recorded a decline of 56%.

Apart from being affected by the COVID-19 pandemic, the contribution of sales and gross profit of International Trade in 2021 compared to the target and compared to the achievements in 2020, was strongly influenced by:

- The performance of chemical products was highly dependent on the issuance of Import Approval Letters (SPI)
- Shortage of chemical products and delays in delivery of chemical products (vessel availability and non-conformance of export licenses from suppliers);
- Implications of Minister of Trade Regulation 47 of 2019, where PPI is no longer the only B2 importer causing sales targets not to be achieved and a decrease in gross profit from chemical product sales (chemical sales market was limited, margins were shrinking)
- The existence of import restrictions in destination countries for several Indonesian commodities, resulting in delays in export activities causing the export realization rate to remain low until 2021;
- No realization of counter-trade program transactions.

BISNIS LAIN

Selain Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional, PPI memiliki potensi bisnis lain yang sifatnya sebagai pelengkap *core* bisnis yang sudah ada. Bisnis lainnya yang saat ini telah memberikan tambahan kontribusi pendapatan yaitu:

- Pendapatan Properti berbentuk persewaan aset serta pendapatan bagi hasil dari kerjasama optimalisasi tanah dan bangunan dengan pihak mitra bisnis;
- Pendapatan non-properti, khususnya pendapatan dari hasil pengoperasian 1 (satu) unit SPBU;
- Pengembangan bisnis Covare, *livebird*, dan *retail* (Toko Grosir Desa + Warung Pangan);
- *Waste Integrated Solution*;
- Kegiatan logistik dan pergudangan (ex-BGR)

Berikut ini adalah kinerja PPI berdasarkan lini bisnis lain sepanjang tahun 2021:

OTHER BUSINESS

In addition to Domestic Trade and International Trade, PT PPI has other business potentials that are complementary to the existing core business. Other businesses that have contributed additional revenue are:

- Property income in the form of asset rental and revenue sharing from cooperation in optimizing land and buildings with business partners;
- Non-property income, especially income from the operation of 1 (one) gas station unit;
- Covare, *livebird*, and retail business development (Village Wholesale Store + Food Stall);
- Waste Integrated Solutions;
- Logistics and warehousing activities (ex-BGR)

The following is PPI's performance in other lines of business throughout 2021:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

No.	Komoditi Commodity	2020			2021			% Capaian Realisasi Terhadap % Achievement						
		Realisasi Realization		%	RKAP Revisi Revised RKAP		%	Realisasi Realization		%	RKAP Revisi Revised RKAP		Realisasi 2020 Realization	
		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit		
III. BISNIS LAIN OTHER BUSINESS														
1.	Properti Property	15.792	15.574	99%	25.133	24.922	99%	20.243	20.047	99%	81%	80%	28%	29%
2.	Non Properti Non-Property	42.062	1.432	3%	42.266	2.033	5%	26.152	210	1%	62%	10%	-38%	-85%
3.	Produk Pengem- bangan Develop- ment Product	1.109.534	274.547	25%	1.313.421	273.164	21%	573.400	117.643	21%	44%	43%	-48%	-57%
	A. Covare	522	267	51%	0	0		0	0	0%	0%	0%	-100%	-100%
	B. BUMN Shop	502	-88	-18%	132.594	714	1%	7.720	-1.178	-15%	6%	-165%	1437%	1233%
	C. Lainnya Others	1.108.509	274.368	25%	1.180.827	272.450	23%	565.680	118.822	21%	48%	44%	-49%	-57%
	TOTAL BISNIS LAIN TOTAL OTHER BUSINESS	1.167.388	291.553	25%	1.380.820	300.119	22%	619.794	137.900	22%	45%	46%	-47%	-53%



Sepanjang tahun 2021, segmen Bisnis Lain menyumbang 32% terhadap total penjualan PPI, yakni sebesar Rp619,8 miliar (terrealisasi 45% dari target RKAP 2021). Sedangkan laba kotor pada segmen Bisnis Lain berkontribusi sebesar 52% dari total capaian laba kotor konsolidasi, yakni sebesar Rp137,90 miliar (terrealisasi 46% dari target RKAP 2021).

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2020, maka pendapatan dan laba kotor yang diperoleh dari segmen Bisnis Lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 47% dan 53%.

Berikut ini adalah beberapa proyek bisnis pada kategori Produk Pengembangan baik yang bersifat lanjutan ataupun proyek baru selama periode tahun 2021, antara lain:

1) Kopi Covare

Sejak tahun 2018, PPI bersinergi dengan BUMN lain dalam rangka mengembangkan perkebunan kopi masyarakat Papua. Sinergi ini dibangun untuk meningkatkan pendapatan para petani kopi serta memperluas pasar eksisting produk kopi perseroan.

Sejauh ini, Kopi Covare memiliki 5 (lima) varian produk yaitu Aceh Gayo, Sumatera Mandailing, Sumatera Toba, Papua Wamena dan Papua Blend.

Pada 28 Februari 2020 Badan POM telah menerbitkan izin edar untuk varian Aceh Gayo (bubuk), Papua Wamena (bubuk dan *roasted beans*), Papua Blend (bubuk), Sumatera Mandailing (bubuk) dan Sumatera Toba (*roasted beans* dan *drip*). Selanjutnya, pada 9 Maret 2020, telah terbit izin edar untuk varian Aceh Gayo (*roasted beans* dan *drip*), Sumatera Toba (bubuk), Papua Blend (*roasted beans* dan *drip*), Sumatera Mandailing (*roasted beans* dan *drip*), Papua Wamena (*drip*).

Pengembangan produk kopi tidak hanya dilakukan dalam bentuk kemasan, akan tetapi juga melalui pengembangan lokasi Café Covaré yang cukup tinggi peminat sampai saat ini, terutama di Café Covare Graha PPI dan Café Covare di Kota Lama, Semarang.

2) BUMN Shop

Pada bulan November 2018, perseroan bersama HIMBARA (Himpunan Bank Negara) merintis program BUMN Shop yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Program BUMN Shop bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga relatif wajar. BUMN Shop adalah sinergi usaha berbentuk outlet

Throughout 2021, the Other Business segment contributed 32% to PPI's total sales, amounting to Rp619.8 billion (45% of the 2021 RKAP target). Meanwhile, gross profit in the Other Business segment contributed 52% of the total consolidated gross profit, which was Rp137.90 billion (46% of the 2021 RKAP target).

Compared with the achievement of performance in 2020, the revenue and gross profit obtained from the Other Business segment decreased by 47% and 53%, respectively.

The following are several business projects in the Product Development category, both ongoing and new projects during the 2021 period, including:

1) Covare Coffee

Since 2018, PPI has synergized with other SOEs to develop coffee plantations for the Papuan community. This synergy was built to increase the income of coffee farmers and expand the existing market for the Company's coffee products.

So far, Covare Coffee has 5 (five) product variants, namely Aceh Gayo, Sumatra Mandailing, Sumatra Toba, Papua Wamena and Papua Blend.

On February 28, 2020, the POM Agency issued distribution permits for the Aceh Gayo (powder), Papua Wamena (powder and roasted beans), Papua Blend (powder), Sumatra Mandailing (powder) and Sumatra Toba (roasted beans and drip) variants. Furthermore, on March 9, 2020, distribution permits were issued for the Aceh Gayo variants (roasted beans and drip), Sumatra Toba (powder), Papua Blend (roasted beans and drip), Sumatra Mandailing (roasted beans and drip), Papua Wamena (drip).

The development of coffee products is not only carried out in the form of packaging, but also through the development of the Café Covaré location which is quite high in demand, especially at Café Covare Graha PPI and Café Covare in Kota Lama, Semarang.

2) BUMN Shop

In November 2018, the Company together with HIMBARA (State Bank Association) pioneered the BUMN Shop program spread across a number of regions in Indonesia. The BUMN Shop program aims to provide easy access to rural communities in meeting their daily needs at relatively reasonable prices. BUMN Shop is a business synergy in the form of a sales outlet owned and managed

penjualan yang dimiliki dan dikelola oleh BUMDes yang menyediakan 3 (tiga) jenis layanan, yaitu retail (produk konsumsi), Pertashop (bahan bakar) dan *wifi corner* (sambungan Internet).

Selama tahun 2021, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk memberdayakan BUMDES yang telah terlaksana sebanyak 70 *outlet*, adapun untuk kedepannya dengan di akuisisinya bisnis warung pangan (WP) ke dalam PPI, akan di lakukan integrasi di dalam proses bisnis TGD-WP mengingat adanya irisan di dalam proses bisnis dan potensi pengembangan yang bisa di lakukan.

3) *Livebird*

Berdasarkan surat penugasan Kementerian BUMN S-300/ MBU/05/2020, PPI ditugaskan untuk melaksanakan penyerapan *Livebird* dari peternak mandiri dan penyaluran hasil potong. Pada tahun 2021, PPI melalui Divisi Pengembangan Bisnis telah melakukan trial project dengan sumber *supply* peternak mandiri yang berada di Subang, Jawa Barat dan selanjutnya dilakukan proses pemotongan dengan hasil karkas, boneless dada, boneless paha, sampingan (kerongkongan, kulit ayam, tulang paha, sayap utuh, minyak ayam, kepala, kaki, ati ampela, tembolok dan usus bersih) di Rumah Potong Hewan wilayah Cikarang, Jawa Barat.

Proses penjualan dilakukan ke distributor dan industri olahan ayam melalui *offline selling* di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Sampai dengan Desember 2021, PPI telah melakukan offtake penyerapan sebanyak 44.384 ekor atau setara dengan 105.481 kg daging ayam (*livebird*). Secara menyeluruh, realisasi kinerja segmen Bisnis Lain sepanjang tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu:

- Sejumlah calon penyewa/*tenant* membatalkan rencana untuk membuka kantor di beberapa properti potensial yang dimiliki PT PPI;
- Mundurnya sejumlah calon mitra yang sudah menandatangani MoU dalam kerja sama Pengembangan Aset; dan
- Menurunnya penjualan dari *outlet* BUMN *Shop*, karena menurunnya daya beli masyarakat.

by BUMDes providing 3 (three) types of services, namely retail (consumer products), Pertashop (fuel) and *wifi corner* (Internet connection).

Throughout 2021, the development of underdeveloped areas and transmigration to empower BUMDES was carried out for 70 outlets. As for the future with the acquisition of the food stall business (WP) into the PPI, integration will be carried out in the TGD-WP business process given the wedge in the business processes and development potential that can be done.

3) *Livebird*

Based on the assignment letter from the Ministry of SOEs S-300/MBU/05/2020, PPI was assigned to carry out the absorption of *Livebird* from independent breeders and distribution of cut products. In 2021, PPI through the Business Development Division conducted a trial project with a source of supply for independent breeders located in Subang, West Java and then the cutting process was carried out with the results of carcass, breast boneless, thigh boneless, side (esophagus, chicken skin, thigh bone, whole wings, chicken oil, head, legs, liver gizzard, crop and intestines clean) at the Slaughterhouse in Cikarang, West Java.

The sales process is carried out to distributors and the chicken processed industry through offline selling in the Jakarta and West Java areas.

As of December 2021, PPI had conducted offtake absorption of 44,384 tails or equivalent to 105,481 kg of chicken meat (*livebird*). Overall, the realization of the performance of the Other Business segment throughout 2021 was strongly influenced by the following factors, namely:

- A number of prospective tenants canceled plans to open offices in several potential properties owned by PT PPI;
- The withdrawal of a number of potential partners who have signed the MoU in Asset Development cooperation; and
- Decreased sales from BUMN *Shop* outlets, due to the decline in people's purchasing power.



KINERJA ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2021

SUBSIDIARIES PERFORMANCE IN 2021

Per 31 Desember 2021, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak usaha yakni, PT PPI Industri (dahulu PT Dharma Niaga Putera Steel) dan PT BGR Logistik Indonesia (dahulu PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

Kegiatan usaha PT PPI Industri adalah perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

Dalam perjalanannya, dikarenakan terkendala permodalan dan peralatan produksi yang sudah rusak, serta sebagai salah satu implementasi strategi *refocussing* bisnis PPI, maka pada saat ini perseroan telah mengaktifkan kembali PT PPI Industri sebagai distributor bahan kimia.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan pengurusan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan beban angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan barang-barang sampai dengan diterima oleh pemilik.

Sepanjang tahun 2021, PT BGR Logistik Indonesia telah menjalankan kegiatan usahanya dengan uraian kinerja sebagai berikut:

As of December 31, 2021, PPI has 2 (two) subsidiaries, namely, PT PPI Industri (formerly PT Dharma Niaga Putera Steel) and PT BGR Logistik Indonesia (formerly PT Tri Sari Veem).

PT PPI Industri

PT PPI Industri's business activities are general industry in the manufacture of zinc and other construction materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trading of zinc production.

In its journey, due to capital constraints and damaged production equipment, as well as one of the implementations of PPI's business refocussing strategy, at this time the Company has reactivated PT PPI Industri as a chemical distributor.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia was established to run a business in the field of transportation management services (*freight forwarding*) which includes receiving, storing, sorting, packing, marking, measuring, weighing document processing, issuing transportation documents, calculating transportation loads, insurance claims for delivery of goods, as well as settlement of invoices for goods until they are received by the owner.

Throughout 2021, PT BGR Logistik Indonesia carried out its business activities with the following performance description:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

No.	Keterangan Description	2020		2021		% Capaian Realisasi Terhadap % Achievement					
		Realisasi Realization		Revisi Revised RKAP		Realisasi Realization		RKAP		Realisasi Realization	
		Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit	Penjualan Sales	Laba Kotor Gross Profit
Entitas Anak Subsidiaries Entity											
1	PT. Tri Sari Veem/PT BGR Logistik Indonesia	45.955	12.482	117.593	32.549	21.302	7.050	18%	22%	-54%	-44%
2.	PT. PPI Industri	0	0	37.886	2.792	0	0	0%	0%	0%	0%
	TOTAL ENTITAS ANAK TOTAL SUBSIDIARIES ENTITY	45.955	12.482	155.479	35.341	21.302	7.050	14%	20%	-54%	-44%

PT BGR Logistik Indonesia berhasil membukukan penjualan sebesar Rp21,30 miliar di tahun 2021, mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, PT BGR Logistik Indonesia berhasil mencatatkan perolehan laba kotor sebesar Rp7,05 miliar, menurun 44% dari pencapaian laba kotor tahun 2020.

PT BGR Logistik Indonesia managed to record sales of Rp21.30 billion in 2021, decreasing from the previous year's realization. On the other hand, PT BGR Logistik Indonesia managed to record a gross profit of Rp7.05 billion, decreasing 44% from the gross profit achievement in 2020.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

ASET

Per 31 Desember 2021, posisi aset PPI dibukukan sebesar Rp4,41 triliun, mengalami kenaikan tipis 5,31 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,18 triliun. Pertumbuhan tersebut selaras dengan meningkatnya jumlah aset tidak lancar sepanjang tahun ini.

Uraian perkembangan aset PPI selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

ASSETS

As of December 31, 2021, PPI's asset position was recorded at Rp4.41 trillion, a slight increase of 5.31% from the previous year of Rp4.18 trillion. This growth was in line with the increasing number of non-current assets throughout this year.

The description of the development of PPI's assets during 2021 is presented in the table below:

Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain | Stated in Full Rupiah, unless Otherwise Stated

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	173.058.934.548	230.249.772.006	-57.190.837.458	-24,84%
Deposito Berjangka Time Deposits	21.828.113.040	1.400.000.000	20.428.113.040	1459,15%
Piutang Usaha – Bersih Trade Receivables – Net	341.339.677.431	337.607.690.728	3.731.986.703	1,11%
Piutang Lain-lain – Bersih Other Receivables – Net	62.737.954.385	59.749.207.980	2.988.746.405	5,00%
Persediaan Inventories	74.515.950.367	114.683.551.270	-40.167.600.903	-35,02%
Uang Muka Advances	53.030.974.710	27.127.680.140	25.903.294.570	95,49%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	30.668.162.431	54.197.098.431	-23.528.936.000	-43,41%
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	36.341.700.162	31.605.563.857	4.736.136.305	14,99%
Biaya Operasi dalam Proses Operating Cost in Process	29.749.940.504	65.471.661.830	-35.721.721.326	-54,56%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	823.271.407.578	922.092.226.242	-98.820.818.664	-10,72%
Investasi pada entitas Asosiasi Investment in Associates	10.422.281.574	10.623.917.699	-201.636.125	-1,90%

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Tetap Fixed Assets	2.124.488.087.146	2.369.500.473.540	-245.012.386.394	-10,34%
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	19.523.768.601	10.921.190.888	8.602.577.713	78,77%
Properti Investasi Investment Properties	935.866.893.505	341.738.620.240	594.128.273.265	173,85%
Aset Hak Guna Right of Use Assets	477.325.453	693.235.656	-215.910.203	-31,15%
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	287.000.000	287.000.000	0	0,00%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	37.473.684.259	57.130.540.987	-19.656.856.728	-34,41%
Aset lain-lain Other Assets	459.212.433.427	475.804.376.388	-16.591.942.961	-3,49%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	3.587.751.473.965	3.266.699.355.398	321.052.118.567	9,83%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	4.411.022.881.543	4.188.791.581.640	222.231.299.903	5,31%

ASET LANCAR

Pada akhir 2021, posisi aset lancar PPI adalah sebesar Rp823,27 miliar, turun 10,72% dari tahun sebelumnya senilai Rp922,09 miliar seiring dengan penurunan bisnis perusahaan pada tahun 2021.

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas PPI pada akhir 2021 adalah sebesar Rp173,05 miliar, mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 24,84% dari tahun 2020 sebesar Rp230,24 miliar.

Deposito Berjangka

Deposito Berjangka mengalami kenaikan 1459,15% dari sebesar Rp1,4 miliar pada 2020 menjadi Rp21,82 miliar.

Piutang Usaha - Bersih

Piutang usaha (bersih) tercatat sebesar Rp341,33 miliar pada akhir 2021, tumbuh 1,11% dari tahun sebelumnya senilai Rp337,60 miliar.

Piutang Lain-lain - Bersih

Sementara itu, piutang lain-lain (bersih) mengalami kenaikan 5,00% dari Rp59,74 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp62,73 miliar.

Persediaan

Posisi persediaan per 31 Desember 2021 dibukukan sebesar Rp74,51 miliar, menurun 35,02% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp114,68 miliar.

CURRENT ASSETS

At the end of 2021, PPI's current assets were recorded at Rp823.27 billion, decreasing by 10.72% from the previous year of Rp922.09 billion, in line with the decline in the Company's business in 2021.

Cash and Cash Equivalents

PPI's cash and cash equivalents at the end of 2021 were recorded at Rp173.05 billion, significantly decreasing up to 24.84% from the position in 2020 of Rp230.24 billion.

Time Deposits

Time Deposits increased by 1459.15% from Rp1.4 billion in 2020 to Rp21.82 billion.

Trade Receivables - Net

Trade receivables (net) were recorded at Rp341.33 billion at the end of 2021, increasing 1.11% from the previous year of Rp337.60 billion.

Other Receivables - Net

Meanwhile, other receivables (net) increased 5.00% from Rp59.74 billion in 2020 to Rp62.73 billion.

Inventories

The inventory position as of December 31, 2021 was recorded at Rp74.51 billion, decreasing 35.02% from the previous year of Rp114.68 billion.

Uang Muka

Uang muka dicatatkan sebesar Rp53,30 miliar, naik 95,49% dari posisi 2020 senilai Rp27,12 miliar.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibukukan sebesar Rp36,34 miliar atau tumbuh 14,99% dari tahun 2020 sebesar Rp31,60 miliar.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah aset tidak lancar mengalami peningkatan tipis 9,83% dari sebesar Rp3,26 triliun pada 2020 menjadi Rp3,58 triliun di akhir 2020.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Posisi investasi pada entitas asosiasi pada akhir 2021 dibukukan sebesar Rp10,42 miliar, turun tipis 1,90% dari tahun 2020 senilai Rp10,62 miliar.

Properti Investasi

Properti investasi tercatat sejumlah Rp935,86 miliar pada akhir 2021, meningkat 173,85% dari sebesar Rp341,73 miliar di tahun 2020. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan perubahan nilai wajar pada tanah.

Aset Hak Guna

Pada tahun 2021, PPI mencatatkan aset hak guna sebesar Rp477,32 juta. Menurun 31,15% dari sebesar Rp693,23 miliar di tahun 2020.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Sementara itu, aset keuangan tidak lancar lainnya Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp287.000.000 dan Rp287.000.000 merupakan deposito dijaminan Bank BNI

Aset Lain-Lain

Posisi aset lain-lain pada akhir 2021 tercatat sebesar Rp459,21 miliar, turun 3,59% dari tahun 2020 sebesar Rp475,80 miliar. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada aset tetap yang tidak dapat dimanfaatkan dan merupakan reklasifikasi aset tetap yang tidak di gunakan dalam kegiatan usaha.

Advances

Advances were recorded at Rp53.30 billion, increasing 95.49% from the 2020 position of Rp27.12 billion.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses were recorded at Rp36.34 billion, increasing by 14.99% from the position in 2020 of Rp31.60 billion.

NON-CURRENT ASSETS

Total non-current assets experienced a slight increase of 9.83% from Rp3.26 trillion in 2020 to Rp3.58 trillion at the end of 2020.

Investment in Associates

The investment position in associates at the end of 2021 was recorded at Rp10.42 billion, slightly decreasing 1.90% from 2020 amounting to Rp10.62 billion.

Investment Properties

Investment properties were recorded at Rp935.86 billion at the end of 2021, increasing 173.85% from Rp341.73 billion in 2020. This increase was driven by an increase in changes in the fair value of land.

Right of Use Assets

In 2021, PPI recorded right of use assets amounting to Rp477.32 million, decreasing 31.15% from Rp693,23 billion in 2020.

Other Non-Current Financial Assets

Meanwhile, for other non-current financial assets, the balance as of December 31, 2021 and December 31, 2020 amounted to Rp287,000,000 and Rp287,000,000, respectively, which was a time deposit guaranteed by Bank BNI.

Other Assets

The position of other assets at the end of 2021 was recorded at Rp459.21 billion, decreasing 3.59% from 2020 of Rp475.80 billion. This occurred due to a decrease in fixed assets that could not be utilized and was a reclassification of fixed assets that were not used in business activities.

LIABILITAS

Liabilitas PPI dibukukan meningkat 7,83% dari sebesar Rp1,51 triliun pada 2020, menjadi Rp1,62 triliun pada akhir ini. Kenaikan tersebut selaras dengan peningkatan liabilitas jangka pendek sepanjang 2021.

Uraian perkembangan liabilitas PPI selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LIABILITIES

PPI's liabilities increased by 7.83% from Rp1.51 trillion in 2020 to Rp1.62 trillion at the end of the year. The increase was in line with the increase in current liabilities throughout 2021.

The description of the development of PPI's liabilities in 2021 is presented in the following table:

Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain | Stated in Full Rupiah, unless Otherwise Stated

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Utang Usaha Trade Payables	209.946.581.814	237.952.882.008	-28.006.300.194	-11,77%
Utang Pajak Tax Payables	16.458.421.151	13.561.093.597	2.897.327.554	21,36%
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	57.877.800.922	13.368.656.846	44.509.144.076	332,94%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	65.287.499	1.362.494.285	-1.297.206.786	-95,21%
Beban Akrua Accrued Expenses	59.444.566.924	130.294.548.558	-70.849.981.634	-54,38%
Pendapatan Diterima Dimuka Contract Liability	102.807.301.152	78.072.319.559	24.734.981.593	31,68%
Utang Bank - Jangka Pendek Bank Loan - Current Portion	143.366.049.385	22.850.409.618	120.515.639.767	527,41%
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Non-current liabilities maturing within one year	26.136.879.641	18.022.248.548	8.114.631.093	45,03%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	616.102.888.488	515.484.653.019	100.618.235.469	19,52%
Utang Jangka Panjang Non-Current Debt	925.217.534.310	938.090.459.727	-12.872.925.417	-1,37%
Utang Sewa Rent Debt	1.274.143.419	2.014.831.587	-740.688.168	-36,76%
Liabilitas Imbalan pasca Kerja Post-Employment Benefit Obligation	80.990.668.555	50.149.435.007	30.841.233.548	61,50%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.007.482.346.284	990.254.726.321	17.227.619.963	1,74%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	1.623.585.234.772	1.505.739.379.340	117.845.855.432	7,83%

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 dibukukan sebesar Rp616,10 miliar, meningkat 19,52% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp515,48 miliar. Kenaikan tersebut dikontribusikan oleh adanya utang bank jangka pendek.

CURRENT LIABILITIES

The position of current liabilities as of December 31, 2021 was recorded at Rp616.10 billion, increasing 19.52% from the previous year of Rp515.48 billion. The increase was contributed by short-term bank loans.

Utang Usaha

Nilai utang usaha mengalami penurunan tajam 11,77% dari sebesar Rp237,95 miliar pada 2020 menjadi Rp209,94 miliar.

Utang Bank - Jangka Pendek

Pada akhir 2021, nilai utang bank-jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 527,41% dari sebesar Rp22,85 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp143,36 miliar.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

PPI mencatatkan posisi liabilitas keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp26,13 miliar, naik 45,03% dari tahun 2020 sebesar Rp18,02 miliar.

Beban Akrua

Beban akrual mengalami penurunan 54,38% dari Rp130,29 miliar pada 2020 menjadi Rp59,44 miliar di akhir 2021.

Pendapatan Diterima Dimuka

PPI membukukan pertumbuhan pendapatan diterima dimuka sebesar 31,68% dari Rp78,07 miliar pada 2020 menjadi Rp102,80 miliar. Hal tersebut dikarenakan oleh peningkatan pada yang muka penjualan produk.

Liabilitas Sewa

Nilai liabilitas sewa mengalami penurunan 95,21% dari Rp1,36 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp65,28 juta.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp1,01 triliun, naik 1,74% dari posisi 2020 sebesar Rp990,25 miliar dikarenakan adanya kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja.

Rekening Dana Investasi (RDI) Eks BPPN Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021, posisi Rekening Dana Investasi (RDI) Eks BPPN jangka panjang tercatat sebesar Rp925,21 miliar, turun 1,37% dari posisi 2020 sebesar Rp938,09 miliar.

Kewajiban Sewa Tidak Lancar

Sementara itu, kewajiban sewa tidak lancar tercatat sebesar Rp1,27 miliar, turun 36,76% dari Rp2,01 miliar pada 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena masa manfaat sewa hak milik diatas 1 tahun dialihkan menjadi capital list.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan paska kerja dibukukan sebesar Rp80,99 miliar pada akhir 2021, naik 61,50% dari tahun 2020

Trade Payables

The trade payables experienced a sharp decline of 11.77% from Rp237.95 billion in 2020 to Rp209.94 billion.

Bank Loans – Current Portion

At the end of 2021, the value of short-term bank loans increased by 527.41% from Rp22.85 billion in 2020 to Rp143.36 billion.

Other Current Financial Liabilities

PPI recorded the position of other short-term financial liabilities of Rp26.13 billion, increasing 45.03% from 2020 of Rp18.02 billion.

Accrued Expenses

Accrued expenses decreased by 54.38% from Rp130.29 billion in 2020 to Rp59.44 billion at the end of 2021.

Contract Liability

PPI recorded an increase in contract liability of 31.68% from Rp78.07 billion in 2020 to Rp102.80 billion. This was due to an increase in advance sales of products.

Lease Liabilities

The lease liabilities decreased by 95.21% from Rp1.36 billion in 2020 to Rp65.28 million.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-Current liabilities were recorded at Rp1.01 trillion, increasing 1.74% from the 2020 position of Rp990.25 billion due to an increase in post-employment benefits obligation.

Long-Term Investment Fund Account (RDI) of IBRA

As of December 31, 2021, the position of the long-term Investment Fund Account (RDI) of IBRA was recorded at Rp925.21 billion, decreasing 1.37% from the 2020 position of Rp938.09 billion.

Non-Current Lease Liabilities

Meanwhile, non-current lease liabilities were recorded at Rp1.27 billion, decreasing 36.76% from Rp2.01 billion in 2020. The decrease was due to the fact that the useful life of the lease of more than 1 year was transferred to the capital list.

Post-employment Benefits Obligation

The post-employment benefit obligation was recorded at Rp80.99 billion at the end of 2021, increasing 61.50%



senilai Rp50,14 miliar, sebagai implikasi dari formulasi baru terkait penggajian dan menggunakan dasar UU No. 13 tahun 2003.

from Rp50.14 billion in 2020, as an implication of the new formulation related to payroll and based on Law no. 13 of 2003.

EKUITAS

EQUITY

Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain | Stated in Full Rupiah, unless Otherwise Stated

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Modal Saham Share Capital	942.745.000.000	942.745.000.000	0	0,00%
Selisih Entitas Pengendali Controlling Entity Difference	-231.042.410.552	-114.116.097.080	-116.926.313.472	102,46%
Cadangan Umum Gneral Reserves	111.890.435.294	111.890.435.294	0	0,00%
Cadangan Khusus Specific Reserves	1.531.912.169	1.531.912.169	0	0,00%
Saldo Laba Retained Earnings	1.962.307.061.200	1.735.670.579.848	226.636.481.352	13,06%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Equity Attributable to the Owners of the Company	2.787.431.998.111	2.677.721.830.231	109.710.167.880	4,10%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	5.648.660	5.330.372.069	-5.324.723.409	-99,89%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	2.787.437.646.771	2.683.052.202.300	104.385.444.471	3,89%

Posisi ekuitas pada akhir 2021 adalah sebesar Rp2,78 triliun, tumbuh tipis 3,89% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,68 triliun. Pertumbuhan tersebut dikontribusikan oleh penambahan saldo Laba tahun 2021 sebesar Rp226,63 miliar.

The equity position at the end of 2021 was Rp2.78 trillion, slightly increasing 3.89% from the previous year of Rp2.68 trillion. This increase was contributed by the addition of the 2021 Profit balance of Rp226.63 billion.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain | Stated in Full Rupiah, unless Otherwise Stated

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Usaha Revenues	1.938.824.894.813	3.972.598.307.022	-2.033.773.412.209	-51,20%
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	-1.672.571.418.839	-3.456.562.931.608	1.783.991.512.769	-51,61%
Laba Bruto Gross Profit	266.253.475.974	516.035.375.414	-249.781.899.440	-48,40%
Beban Penjualan dan Distribusi Selling and Distribution Expenses	-16.206.222.672	-16.750.358.826	544.136.154	-3,25%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-378.893.388.556	-330.709.029.287	-48.184.359.269	14,57%
Beban Usaha Operating Expenses	-395.099.611.228	-347.459.388.113	-47.640.223.115	13,71%
LABA USAHA OPERATING PROFIT	-128.846.135.254	168.575.987.301	-297.422.122.555	-176,43%
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Income	8.744.130.692	7.469.635.677	1.274.495.015	17,06%
Beban Non-Usaha Non-Operating Expenses	-57.838.742.589	-21.795.822.752	-36.042.919.837	165,37%
Beban Non-Usaha-bersih Non-Operating Expenses - Net	-49.094.611.897	-14.326.187.075	-34.768.424.822	242,69%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX	-177.940.747.151	154.249.800.226	-332.190.547.377	-215,36%
Pajak Kini Current Tax	-2.029.918.715	-18.725.588.570	16.695.669.855	-89,16%
SKPLB Tahun 2017 SKPLB 2017	-15.237.375.000	-15.114.396.716	-122.978.284	0,81%
Pajak Tangguhan Deferred Tax	49.913.036.113	-11.640.533.214	61.553.569.327	-528,79%
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak Total Tax Income (Expenses)	32.645.742.398	-45.480.518.500	78.126.260.898	-171,78%
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN NET INCOME (LOSS) FOR CURRENT YEAR	-145.295.004.753	108.769.281.726	-254.064.286.479	-233,58%
Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Loss for Current Year	246.656.892.801	-13.129.844.329	259.786.737.130	-1978,60%
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT YEAR	101.361.888.048	95.639.437.397	5.722.450.651	5,98%
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada: Net Income Attributable to				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	-145.290.435.842	106.620.453.676	-251.910.889.518	-236,27%

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	-4.568.911	2.148.828.050	-2.153.396.961	-100,21%
TOTAL	-145.295.004.753	108.769.281.726	-254.064.286.479	-233,58%
Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Company	101.366.456.959	93.736.345.298	7.630.111.661	8,14%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	-4.568.911	1.903.092.099	-1.907.661.010	-100,24%
TOTAL	101.361.888.048	95.639.437.397	5.722.450.651	5,98%

Pendapatan Usaha

PPI membukukan angka pendapatan usaha sebesar Rp1,94 triliun sepanjang tahun ini, menurun 51,20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,97 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penjualan perdagangan internasional.

Beban Pokok Penjualan

Selaras dengan penurunan pendapatan tahun 2021, maka beban pokok penjualan juga menurun 51,61% dari sebesar Rp3,45 triliun pada 2020 menjadi Rp1,67 triliun di tahun ini.

Laba Bruto

Laba bruto dibukukan mencapai Rp266,25 miliar, turun 48,40% dari tahun 2020 sebesar Rp516,03 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan pada komoditas perdagangan luar negeri.

Beban Usaha

Sepanjang 2021, PPI mencatatkan beban usaha sebesar Rp395,09 miliar, meningkat 13,71% dari realisasi beban tahun 2020 sebesar Rp347,45 miliar. Penurunan ini terjadi karena penibgkatan pada beban umum dan administrasi.

Beban Non-Usaha

Sementara itu, pendapatan/(beban) non-usaha tercatat sebesar Rp57,83 miliar, meningkat tajam 165,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp21,79 miliar.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Meski berada di masa-masa sulit selama pandemi COVID-19, PPI tetap mampu membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp145,29 miliar, menurun 233,58% dibandingkan tahun sebelumnya.

Revenues

PPI recorded operating revenues of Rp1.94 trillion this year, decreasing 51.20% from the previous year of Rp3.97 trillion. The decline was due to the decline in international trade sales.

Cost of Revenues

In line with the decline in revenues in 2021, the cost of revenues also decreased by 51.61% from Rp3.45 trillion in 2020 to Rp1.67 trillion this year.

Gross Profit

Gross profit was recorded at Rp266.25 billion, decreasing 48.40% from the figure in 2020 of Rp516.03 billion. The decline was driven by a decline in foreign trade commodities.

Operating Expenses

Throughout 2021, PPI recorded operating expenses of Rp395.09 billion, increasing 13.71% from the realization of expenses in 2020 of Rp347.45 billion. This decrease was due to an increase in general and administrative expenses.

Non-Operating Expenses

Meanwhile, non-operating income/(expenses) was recorded at Rp57.83 billion, sharply increasing 165.37% from the previous year of Rp21.79 billion.

Net Income (Loss) for Current Year

Despite being in difficult times during the COVID-19 pandemic, PPI was still able to record a net loss for the year of Rp145.29 billion, decreasing 233.58% from the previous year with a net income of Rp108.76 billion

dengan perolehan laba bersih sebesar Rp108,76 miliar. penurunan laba bersih tahun 2021 didorong oleh menurunnya penjualan komoditas perdagangan luar negeri.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Demikian halnya, penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan juga dilaporkan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan hingga 5,98% dari tahun sebelumnya mencatatkan laba bersih sebesar Rp95,63 miliar menjadi Rp101,36 miliar di akhir 2021.

The decline in net income in 2021 was driven by the decline in sales of foreign trade commodities.

Comprehensive Income (Loss) for Current Year

Likewise, comprehensive income (loss) for the current year was also recorded to have experienced a significant increase of up to 5.98% from the previous year, recording a net profit of Rp95.63 billion to Rp101.36 billion at the end of 2021.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS CASH FLOW

Per 31 Desember 2021, posisi saldo kas dan setara kas PPI dibukukan mencapai Rp173,05 miliar, menurun hingga 24,84% dari posisi akhir kas dan setara kas tahun 2020 sebesar Rp230,24 miliar. Penurunan tersebut ditopang oleh menurunnya pendapatan PPI di tahun 2021 sebesar 51,20%.

As of December 31, 2021, PPI's cash and cash equivalents balance was recorded at Rp173.05 billion, decreasing 24.84% from the final position of cash and cash equivalents in 2020 of Rp230.24 billion. The decline was due to the decline in PPI's revenues in 2021 by 51.20%.

Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain | Stated in Full Rupiah, unless Otherwise Stated

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan kas dari: Cash Receipts from:				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from costumers	1.901.014.936.498	4.051.071.211.522	-2.150.056.275.024	-53,07%
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payments to suppliers and employees	-1.948.737.248.791	-3.629.711.252.160	1.680.974.003.369	-46,31%
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya Cash payments for operating expenses and others	-18.249.677.474	-965.600.194	-17.284.077.280	1789,98%
Pembayaran pajak Tax Payment	-8.476.775.066	-42.877.445.750	34.400.670.684	-80,23%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	-74.448.764.833	377.516.913.418	-451.965.678.251	-119,72%
Pembelian Aset Tetap Acquisition of Property, Plant and Equipment	-59.869.002.949	-101.431.161.842	41.562.158.893	-40,98%
Penarikan (penempatan) Deposito Withdrawal (Placement) of Deposits	-20.428.113.040	16.167.199.050	-36.595.312.090	-226,36%
Penambahan aset lain-lain Addition of other assets	-2.516.049.786	-15.440.177.520	12.924.127.734	-83,70%
Penambahan aset tidak berwujud Addition of intangible assets	-13.648.357.331	-7.071.583.481	-6.576.773.850	93,00%
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	-59.869.002.949	-101.431.161.842	41.562.158.893	-40,98%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used in Investing Activities	-96.461.523.106	-107.775.723.793	11.314.200.687	-10,50%

Deskripsi Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used in Investing Activities	-96.461.523.106	-107.775.723.793	11.314.200.687	-10,50%
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek Short-term Loan Receipt (Payment)	120.515.639.767	-144.610.914.330	265.126.554.097	183,34%
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka panjang Long-term Loan Receipt (Payment)	-4.758.294.332	9.523.190.063	-14.281.484.395	-149,97%
Penerimaan Dividen Dividend Receipt	0	-100.000.000	100.000.000	-100,00%
Pembayaran utang sewa pembiayaan Finance lease debt payment	-2.037.894.954	-283.019.936	-1.754.875.018	620,05%
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow Used in Financing Activities	113.719.450.481	-135.470.744.203	249.190.194.684	183,94%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	-57.190.837.458	134.270.445.422	-191.461.282.880	-142,59%
Kas dan Setara Kas – Saldo Awal Cash and Cash Equivalents – Beginning	230.249.772.006	95.979.326.584	134.270.445.422	139,90%
Kas dan Setara Kas – Saldo Akhir Cash and Cash Equivalents – Ending Balance	173.058.934.548	230.249.772.006	-57.190.837.458	-24,84%

Arus Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi

Pada akhir 2021, PPI membukukan kas bersih dari aktivitas operasi minus sebesar Rp74,48 miliar, mengalami penurunan besar dari tahun sebelumnya dengan realisasi penggunaan kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp371,55 miliar. Hal ini terjadi karena perseroan mencatat kenaikan pembayaran kepada pemasok lebih besar dari pada jumlah penjualan.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan PPI untuk melakukan kegiatan investasi pada akhir 2021 tercatat minus sebesar Rp96,46 miliar, turun 10,50% dari tahun sebelumnya minus senilai Rp107,77 miliar. Hal ini dikontribusikan oleh penurunan realisasi *Capital Expenditure*.

Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

PPI menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp113,72 miliar selama tahun 2021, meningkat 183,94% dari realisasi 2020 minus sebesar Rp135,47 miliar. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan pinjaman jangka pendek.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities

At the end of 2021, PPI recorded net cash from operating activities of minus Rp74.48 billion, sharply decreasing from the previous year with the realization of net cash used in operating activities of Rp371.55 billion. This occurred because the Company recorded an increase in payments to suppliers that was greater than the total sales.

Net Cash Flow Used in Investing Activities

The net cash used by PPI to carry out investing activities at the end of 2021 was recorded at minus Rp96.46 billion, decreasing 10.50% from the previous year of minus Rp107.77 billion. This was due to a decrease in the realization of *Capital Expenditure*.

Net Cash Flow Used in Financing Activities

PPI used net cash for financing activities of Rp113.72 billion during 2021, increasing 183.94% from the 2020 realization of minus Rp135.47 billion. This was due to the receipt of short-term loans.

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

PPI menghitung rasio-rasio keuangan dasar berikut ini untuk mengukur tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan. Berikut ini adalah perbandingan rasio keuangan konsolidasian PPI untuk posisi yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, antara lain sebagai berikut:

PPI calculates the following basic financial ratios to measure the level of soundness and performance of the Company. The following is a comparison of PPI's consolidated financial ratios for the positions ended December 31, 2021 and December 31, 2020:

Keterangan Description	2021	2020
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio		
Rasio Kas Cash Ratio	28,09%	44,67%
Rasio Cepat Quick Ratio	97,22%	122,02%
Rasio Lancar Current Ratio	133,63%	178,88%
<i>Net Working Capital to Sales</i>	9,36	9,77
Rasio Aktivitas Activity Ratio		
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	14,03	10,54
Perputaran Piutang Accounts Receivable Turnover	5,71	18,54
Periode Umur Piutang Receivable Age Period	64,26	31,02
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio		
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	36,81%	35,95%
Rasio Utang terhadap Modal Debt to Capital Ratio	38,34%	35,82%
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	-7,81%	12,89%
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio		
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	13,73%	12,99%
Margin EBITDA EBITDA Margin	-6,58%	4,92%
<i>BOPO/Operating Ratio</i>	106,65%	95,76%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	-7,49%	2,74%
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	-3,36%	5,32%
Tingkat Pengembalian Modal Return on Capital	-5,21%	4,05%

Rasio Likuiditas

Sepanjang tahun 2021, rasio likuiditas PPI menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Rasio Aktivitas

Sepanjang tahun 2021, rasio aktivitas PPI menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan kas dan pendapatan cenderung lebih baik apabila dibandingkan tahun 2020.

Liquidity Ratio

Throughout 2021, PPI's liquidity ratio showed that the Company was able to meet its obligations or pay its short-term debts better than in 2020.

Activity Ratio

Throughout 2021, PPI's activity ratio showed that the effectiveness of the Company in utilizing its assets to generate cash and income tended to be better than in 2020.



Rasio Solvabilitas

Sepanjang tahun 2021, rasio solvabilitas PPI menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya bila dibandingkan tahun 2020.

Rasio Rentabilitas

Sepanjang tahun 2021, rasio rentabilitas PPI menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba bila dibandingkan tahun 2020.

Solvency Ratio

Throughout 2021, PPI's solvency ratio showed that the Company was able to meet its long-term debt obligations better than in 2020.

Profitability Ratio

Throughout 2021, PPI's profitability ratio showed that the Company had a better ability to generate profits when compared to 2020.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PPI senantiasa melakukan evaluasi dan menganalisa tingkat kesehatan keuangannya secara berkala untuk menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang akan jatuh tempo. Keandalan PPI dalam membayar utang-utangnya setidaknya tercermin dari hasil perhitungan rasio likuiditas berikut ini:

Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debt

PPI always evaluates and analyzes the level of financial soundness on a regular basis to maintain its ability to meet long-term and short-term obligations that will mature. PPI's reliability in paying its debts is at least reflected in the results of the following calculation of the liquidity ratio:

Keterangan Description	2021	2020
Rasio Kas Cash Ratio	28,09%	44,67%
Rasio Cepat Quick Ratio	97,22%	122,02%
Rasio Lancar Current Ratio	133,63%	178,88%

Melalui tabel diatas terlihat bahwa likuiditas PPI cukup terjaga dengan baik pada tahun 2021. Rasio kas dan rasio cepat menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara rasio lancar mengalami sedikit penurunan. Namun demikian, rasio lancar dengan nilai >100% tetap menandakan bahwa PPI memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajibannya dikarenakan nilai perbandingan aktivasnya masih lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki.

From the table above, it can be seen that PPI's liquidity was quite well maintained in 2021. The cash ratio and quick ratio showed an increase when compared to the previous year, while the current ratio decreased slightly. However, the current ratio with a value of >100% still indicates that PPI has a good ability to pay off its obligations because the comparison value of its assets is still greater than its liabilities.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Selain menjaga rasio likuiditasnya, PPI juga mengoptimalkan kemampuannya dalam mengumpulkan piutang. Sepanjang tahun 2021, tingkat kolektibilitas piutang PPI tercatat sebesar 5,71 hari.

Accounts Receivable Collectibility

In addition to maintaining its liquidity ratio, PPI also optimizes its ability to collect receivables. Throughout 2021, the collectibility of PPI's receivables was recorded at 5.71 days.

Berikut ini adalah tabel perbandingan tingkat kolektibilitas piutang dan perputaran piutang PPI dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir:

The following is a table comparing the collectibility level of PPI's receivables and receivables turnover in the last 2 (two) years:

Keterangan Description	2021	2020
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	14,03	10,54
Perputaran Piutang Accounts Receivable Turnover	5,71	18,54
Periode Umur Piutang Receivable Age Period	64,26	31,02

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *collection period* PPI semakin besar di tahun 2021, yakni tercatat sebesar 14,03 hari, lebih lama 4 hari dibandingkan tingkat kolektibilitas piutang tahun 2020. Angka *collection period* yang lebih kecil tersebut mencerminkan kemampuan PPI dalam mengumpulkan piutang pada rentang periode yang lebih cepat.

Based on the table above, it can be seen that PPI's collection period was getting longer in 2021, which was recorded at 14.03 days, 4 days longer than the collectibility rate of receivables in 2020. The smaller collection period figure reflects PPI's ability to collect receivables in a shorter period of time.

Sementara itu, angka perputaran piutang dibukukan lebih besar pada tahun ini, yaitu sebesar 5,71 kali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PPI semakin efisien dalam menagihkan piutang tertagihnya.

Meanwhile, the receivables turnover rate was recorded higher this year, which was 5.71 times. This condition shows that PPI is more efficient in collecting its collectible receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal PPI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kebijakan struktur modal PPI bersifat fleksibel serta senantiasa memperhatikan faktor makro ekonomi baik global maupun nasional dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. PPI menilai kebijakan struktur modal yang solid sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PPI.

Management Policy on Capital Structure

The management of PPI's capital structure is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and the Articles of Association. PPI's capital structure policy is flexible and always takes into account macro economic factors, both global and national as well as the risk characteristics of the underlying assets. PPI considers a solid capital structure policy is very important in supporting the sustainability of PPI's operations.

Dalam rangka menjaga fundamental struktur modal yang ada, PPI dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengelola pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menjual aset untuk mengurangi utang. PPI memonitor kualitas permodalannya melalui rasio *debt-to-equity* agar nilai utangnya tidak melebihi aset yang dimiliki.

In order to maintain the fundamentals of the existing capital structure, PPI may adjust the amount of dividends paid to shareholders, manage returns on capital to shareholders, or sell assets to reduce debt. PPI monitors the quality of its capital through the debt-to-equity ratio so that the debt value does not exceed the assets owned.

Struktur Permodalan

Berikut ini adalah komposisi struktur modal PPI selama 2 (dua) tahun terakhir:

Capital Structure

The following is the composition of PPI's capital structure for the last 2 (two) years:

Struktur Modal Capital Structure	2021	Kontribusi Contribution	2020	Kontribusi Contribution
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.623.585.234.772	36,81%	1.505.739.379.340	35,95%
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.787.437.646.771	63,19%	2.683.052.202.300	64,05%
Jumlah Aset Total Assets	4.411.022.881.543	100,00%	4.188.791.581.640	100,00%

Struktur modal PPI sepanjang tahun 2021 terdiri atas Liabilitas sebesar Rp1,62 triliun atau 35,95% dari total modal dan Ekuitas sebesar Rp2,78 triliun atau sebesar 64,05% dari total modal. PPI tidak memiliki liabilitas lain terkait dengan permodalan karena PPI bukan merupakan entitas yang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan permodalan.

PPI's capital structure throughout 2021 consisted of Liabilities of Rp1.62 trillion or 35.95% of the total capital and Equity of Rp2.78 trillion or 64.05% of the total capital. The Company has no other liabilities related to capital because PPI is not an entity that is required by the Government to fulfill capital requirements.

Kesesuaian Pengungkapan dengan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi mengenai struktur modal PPI pada sub-bahasan ini sudah sesuai dengan Laporan Keuangan PPI Tahun Buku 31 Desember 2021.

Disclosure Compliance with Financial Statements

The disclosure of information regarding PPI's capital structure in this sub-discussion is in accordance with PPI's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Sepanjang tahun 2021, PPI tidak mencatat adanya ikatan material untuk investasi barang modal.

Throughout 2021, PPI did not record any material commitments for capital goods investment.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2021 INVESTMENT OF CAPITAL GOODS IN 2021

Sepanjang tahun 2021, PPI melakukan 2 (dua) jenis investasi, yakni Investasi Rutin dan Investasi Non-Rutin. Anggaran Investasi Rutin dan Investasi Non-Rutin terserap sebesar Rp39,05 miliar pada tahun ini atau terealisasi 18,47% dari anggaran RKAP Tahun 2021 sebesar Rp211,43 miliar.

Throughout 2021, PPI made 2 (two) types of investments, namely Regular Investment and Non-Regular Investment. The budget for Regular Investment and Non-Regular Investment was absorbed by Rp39.05 billion this year or 18.47% realized from the 2021 RKAP budget of Rp211.43 billion.

Tujuan Investasi

Belanja modal tahun 2021 diarahkan untuk pengembangan usaha dan disesuaikan dengan kondisi keuangan PPI menurut skala prioritas yang telah ditetapkan.

Investment Purpose

Capital expenditure in 2021 was directed to business development and adjusted to PPI's financial condition according to the priority scale that had been set.

Sumber Pendanaan

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal tahun 2021 berasal dari pendanaan kas internal yang sudah dianggarkan di dalam RKAP Tahun 2021. Denominasi mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

Investasi Rutin

Pada tabel berikut ini dapat terlihat realisasi belanja modal yang dilakukan PPI sepanjang tahun 2021 dibandingkan dengan target RKAP 2021 dan realisasi belanja modal tahun 2020, yaitu:

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2020		2021		% Capaian Realisasi 2021 Terhadap % Achievement	
	Realisasi Realization	RKAP	Realisasi Realization	RKAP	Realisasi Realization	
INVESTASI RUTIN REGULAR INVESTMENT						
Peralatan dan Perabot Kantor Office Equipment and Furniture	538	0	3.998	0,00%	643,12%	
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Building Maintenance/Repair	1.639	8.600	17.937	208,57%	994,39%	
Peremajaan Kendaraan Operasional Operational Vehicle Upgrade	2.168	1.650	3.260	197,58%	50,37%	
TOTAL INVESTASI RUTIN TOTAL REGULAR INVESTMENT	4.345	10.250	25.196	245,81%	479,88%	

Pengeluaran Investasi Rutin tahun 2021 dilakukan dalam bentuk pengadaan peralatan dan perabot kantor, pemeliharaan/ perbaikan gedung dan peremajaan kendaraan operasional dengan nilai mencapai Rp25,19 miliar atau terealisasi 245,81% dari dana yang dianggarkan di dalam RKAP Tahun 2021 sebesar Rp10,25 miliar.

Sementara jika dibandingkan dengan realisasi belanja investasi tahun 2020, maka investasi barang modal tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 479,88% dari belanja modal tahun 2020

Investasi Non-Rutin

Sementara itu, penyerapan anggaran Investasi Non-Rutin tahun 2021 tercatat sangat rendah karena terjadi perlambatan aktivitas bisnis efek pandemi COVID-19 serta karena diterapkannya perubahan arah kebijakan bisnis dari yang semula ingin mengembangkan processing unit (hulunisasi) menjadi *refocusing* terhadap pada bisnis perdagangan murni.

Pada tahun 2021, anggaran Investasi Non-Rutin dipangkas signifikan hingga 93,11% dari RKA dengan uraian sebagai berikut:

Sources of Funds

The source of funds used for capital expenditure in 2021 was obtained from internal cash funding that had been budgeted in the 2021 RKAP. The currency denomination used was Rupiah.

Regular Investment

The following table presents the realization of capital expenditure carried out by PPI throughout 2021 compared to the 2021 RKAP target and the realization of capital expenditure in 2020:

Routine Investment Expenditures in 2021 were carried out in the form of procurement of office equipment and furniture, building maintenance/repair and rejuvenation of operational vehicles with a value of Rp25.19 billion or 245.81% of the budgeted funds in the 2021 RKAP of Rp 10.25 billion.

Meanwhile, when compared to the realization of investment expenditure in 2020, investment in capital goods in 2021 increased by 479.88% from capital expenditure in 2020.

Non-Regular Investment

Meanwhile, absorption of the non-regular investment budget in 2021 was recorded to be very low due to a slowdown in business activity due to the COVID-19 pandemic and due to the implementation of a change in business policy direction from initially wanting to develop processing units to refocusing on the pure trading business.

In 2021, the non-regular investment budget was cut significantly to 93.11% of the RKA with the following description:

Uraian Description	2020		2021		% Capaian Realisasi 2021 Terhadap % Achievement	
	Realisasi Realization	RKAP	Realisasi Realization	RKAP	Realisasi Realization	
INVESTASI NON RUTIN NON-REGULAR INVESTMENT						
Sertifikasi Aset Asset Certification	4.909	6.271	1.804	28,77%	-63,25%	
Perbaikan dan Renovasi Aset Asset Repair and Renovation	550	94.648	979	1,03%	78,00%	
Mesin dan Instalasi Machinery and Installation						
Perizinan Licensing		910	478	52,53%	0%	
Project Pengembangan Development Project	280	6.000	9.390	156,50%	3253,57%	
Peralatan Kantor dan IT Office and IT Equipment		3.198		0,00%	0%	
Pembangunan Sistem Informasi Bisnis Business Information System Development	3.968	8.270	1.206	14,58%	-69,61%	
Tanah Land		2.750		0%	0%	
Inventaris Inventory		18.930		0%	0%	
Armada Fleet		10.167		0%	0%	
Aset <i>Intangible</i> Intangible Assets		5.648		0%	0%	
Aset Lain-lain Other Assets		44.387		0%	0%	
TOTAL INVESTASI NON RUTIN TOTAL NON-REGULAR INVESTMENT	9.707	201.179	13.858	6,89%	42,76%	

Realisasi pengeluaran Investasi Non-Rutin hingga akhir 2021 tercatat sebesar Rp13,85 miliar atau tercapai 6,89% dari anggaran RKAP 2021. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan signifikan hingga 42,76% jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp9,71 miliar. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 PPI melakukan sertifikasi atas aset-aset yang dimiliki dengan nilai cukup signifikan.

The realization of non-regular investment expenditures until the end of 2021 was recorded at Rp13.85 billion or 6.89% of the 2021 RKAP budget. This value showed a significant increase of up to 42.76% compared to the realization of investment in 2020 of Rp9.71 billion. This was because in 2021 PPI certified its assets with a significant value.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021, SERTA PROYEKSI TAHUN 2022

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2021, AND PROJECTIONS FOR 2022

Setiap tahun, PPI menyusun komitmen rencana kerja dan anggaran yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu, PPI menjadikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas operasional di sepanjang tahun ini. Penyusunan proyeksi tersebut senantiasa mempertimbangkan analisa faktor

Every year, PPI prepares a commitment to work plans and budgets that are mutually agreed upon by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Thus, PPI made the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) the basis for the implementation of all operational activities throughout the year. The preparation of these projections always takes into account the analysis of

internal dan faktor eksternal, serta mengamati peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap lini usaha PPI.

Target Keuangan

Secara ringkas, berikut ini dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi RKAP Tahun 2021, serta proyeksi tahun 2022 mendatang.

PPI menyadari bahwa target-target RKAP Tahun 2021 tidak dapat terealisasi sepenuhnya sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membawa dampak cukup masif bagi kehidupan sehari-hari dan proses bisnis.

internal factors and external factors, as well the opportunities and challenges that may affect PPI's lines of business.

Financial Target

The following table is a summary of the comparison between the target and realization of the 2021 RKAP, as well as the projections for 2022.

PPI realizes that the 2021 RKAP targets could not be fully realized due to the COVID-19 pandemic which had a massive impact on daily life and business processes.

Keterangan Description	2021		2022
	Target RKAP Tahun 2021 2021 RKAP Target	Realisasi Realization	Proyeksi Projection
Total Aset Total Assets	3.394.270	4.411.023	4.348.543
Total Ekuitas Total Equity	2.267.865	2.787.438	2.625.947
Pendapatan Usaha Revenues	2.334.397	1.938.825	2.986.469
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Income (Loss) for Current Year	115.296	-145.295	68.038

Per 31 Desember 2021, posisi aset PPI tercatat sebesar Rp4,41 triliun atau terealisasi 129,96% di atas prediksi yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2021. Posisi tersebut menunjukkan adanya kenaikan 5,31% dibandingkan total aset tahun 2020. Sementara itu nilai ekuitas pada akhir 2021 dibukukan sebesar Rp2,78 triliun. Pada tahun 2022 mendatang, PPI menargetkan posisi aset dan ekuitas akan tercatat sebesar Rp4,35 triliun dan Rp2,63 triliun.

Hingga akhir 2021, realisasi pendapatan usaha tercatat sebesar Rp1,94 triliun atau tercapai 83,03% dari target RKAP tahun 2021. Pencapaian tersebut lebih rendah 51,20% dibandingkan realisasi pendapatan usaha tahun 2020. Pada tahun 2022, pendapatan usaha diproyeksikan menjadi sebesar Rp2,99 triliun.

Sementara itu laba bersih dibukukan minus sebesar Rp145,29 miliar atau terealisasi minus 126,02% dari target RKAP Tahun 2021. Capaian laba bersih pada tahun ini lebih rendah 233,58% dibandingkan realisasi tahun 2020 yang saat itu mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp108,76 miliar. Perseroan menargetkan realisasi laba bersih pada tahun 2022 mendatang akan sebesar Rp68,04 miliar.

As of December 31, 2021, PPI's asset position was recorded at Rp4.41 trillion or realized 129.96% above the projection set in the 2021 RKAP. This position showed an increase of 5.31% compared to total assets in 2020. Meanwhile, the equity at the end of 2021 was recorded at Rp2.78 trillion. In 2022, PPI targets the position of assets and equity to be recorded at Rp4.35 trillion and Rp2.63 trillion.

Until the end of 2021, the realization of revenues was recorded at Rp1.94 trillion or 83.03% of the 2021 RKAP target. This achievement was 51.20% lower than the realization of revenues in 2020. In 2022, the revenues are projected to be Rp2.99 trillion.

Meanwhile, net income was recorded at minus Rp145.29 billion or minus 126.02% realized from the 2021 RKAP target. This year's net income achievement was 233.58% lower than the realization in 2020 which was recorded at Rp108.76 billion. The company targets the realization of net income in 2022 to reach Rp68.04 billion.



Seluruh proyeksi dan target-target keuangan yang telah disusun manajemen untuk tahun 2022 mendatang sudah mempertimbangkan prospek ekonomi dan asumsi makro tahun 2022 yang cukup optimistis seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5%, tingkat inflasi 3,0%, dan nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS.

Namun demikian, PPI tetap akan berhati-hati dalam mengelola aktivitas operasi ke depan terutama mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, PPI tetap merancang upaya mitigasi risiko secara menyeluruh serta akan berfokus pada implementasi inisiatif strategis yang berfokus pada keberlangsungan usaha di masa depan.

Target Non-Keuangan

Pada tahun 2022 mendatang, PPI menargetkan akan mengelola sebanyak 500 karyawan dengan target total biaya pegawai sebesar Rp156,91 miliar. Kemudian pada aspek pemasaran, peningkatan penjualan dilakukan melalui e-katalog untuk komoditi Dharmabrand, serta berencana akan melakukan peluncuran produk herbisida baru di 6 titik *Representative Office* (RO).

All financial projections and targets that have been prepared by management for 2022 have taken into account the economic prospects and macro assumptions for 2022 which are quite optimistic, such as economic growth of 5.0-5.5%, inflation rate of 3.0%, and rupiah exchange rate of Rp14.350 per US dollar.

However, PPI will continue to be careful in managing future operating activities, especially considering the impact caused by the COVID-19 pandemic which is prolonged and cannot be predicted when it will end. Therefore, PPI continues to design overall risk mitigation efforts and will focus on implementing strategic initiatives focusing on business continuity in the future.

Non-Financial Target

In 2022, PPI targets to manage 500 employees with a target of total employee costs of Rp156.91 billion. In the marketing aspect, sales increase is carried out through e-catalogs for Dharmabrand commodities, and new herbicide products at 6 Representative Office (RO) points are planned to be launched.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Sepanjang tahun 2021, PPI tidak mencatat adanya informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Throughout 2021, PPI did not record any material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

Prospek Ekonomi

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan pada triwulan III 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022, didukung oleh satu kondisi prasyarat, yaitu sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, serta 5 (lima) respons kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan dan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Penguatan sinergi dan inovasi tersebut didukung oleh percepatan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, serta transformasi bauran kebijakan Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya menuju Indonesia Maju.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 diprakirakan meningkat dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), kecuali Tiongkok, secara umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di AEs. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Lebih lanjut, pandemi menimbulkan 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi agar proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga.

Economic Prospect

The global economic recovery in 2021 continued despite being uneven with continued financial market uncertainty. The process of national economic recovery also continued with maintained stability although it was delayed in the third quarter of 2021 in line with the spread of the Delta variant. Close policy synergy and economic performance in 2021 are the basis for further awakening and optimism for a better Indonesian economic recovery in 2022, supported by one prerequisite condition, namely policy synergy for acceleration of vaccination and handling of Covid-19 by opening priority economic sectors, as well as 5 (five) policy responses as necessary conditions. In line with this, Bank Indonesia's policy in 2022 will synergize and become part of the direction of national economic policy to accelerate recovery and maintain economic stability. The reinforcement of synergy and innovation is supported by the acceleration of structural reforms in both the real sector and the acceleration of the national digital economy and finance, as well as the transformation of Bank Indonesia's policy, to strengthen efforts towards an Advanced Indonesia.

The global economic recovery in 2021 still continued, despite being uneven, with continued financial market uncertainty. World economic growth in 2021 was predicted to accelerate with economic recovery in the Advanced Economies (AEs), particularly the US, which was supported by accelerated vaccinations and very large policy stimulus. Meanwhile, economic growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), except for China, generally continued to improve, but not as fast as the recovery process in AEs. Global financial market uncertainty continued in line with emerging risks, including the increased spread of the Delta variant of the Covid-19, market anticipation for the Fed's tapering policy, as well as concerns over inflationary pressures that will last longer due to supply chain disruptions and energy constraints. Furthermore, the pandemic raises 7 (seven) important things that need to be watched out and anticipated so that the global economic recovery process from the impact of the Covid-19 pandemic continues, with macroeconomic and financial system stability that have improved and remain maintained.



Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh oleh berlanjutnya pandemi COVID-19. Merebaknya COVID-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja ekonomi diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2021 didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan dalam kisaran 3,2-4,0%. Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik.

Prospek Perdagangan Komoditas dan Distribusi

Strategi yang akan diterapkan PPI untuk meningkatkan komoditi andalan yaitu melalui :

1. Peningkatan pendapatan komoditi Bahan Kimia melalui penambahan 1 Distributor Terdaftar Bahan Kimia, mengambil alternatif sumber supply untuk kepastian pasokan, *maintain* percepatan atas Surat Persetujuan Impor, serta melakukan kerjasama dengan Industri Pertambangan. Disamping itu untuk meningkatkan pendapatan komoditi bahan kimia berbahaya dengan melakukan perbaikan serta standarisasi untuk infrastruktur DC Bahan Berbahaya di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Adapun pengembangan pasar non Bahan Berbahaya dilakukan penetrasi pasar ke segmen hotel, industri air minum, kolam renang, pabrik olahan makanan dan minuman serta industri rokok.
2. Komoditi Pestisida khususnya produk-produk Dharmabrand, akan dilakukan pemenuhan kebutuhan *spot walker* di seluruh cabang PT PPI, sentralisasi pengadaan, pengembangan produk dengan bahan aktif yang di-*upgrade*, dan juga melakukan promosi dalam penetrasi pasar Dharmabrand.

The process of national economic recovery continued with maintained stability. The domestic economic recovery process in 2021 was still affected by the COVID-19 pandemic. The spread of the Delta variant of COVID-19 in the third quarter of 2021 hampered the process of Indonesia's economic recovery. Economic performance was predicted to improve in the fourth quarter of 2021, supported by continued mobility in line with the acceleration of vaccination and the easing of the spread of Covid-19, the opening of wider economic sectors, continued policy stimulus, and export performance that remained strong. With these developments, economic growth in 2021 was predicted in the range of 3.2-4.0%. Meanwhile, external stability was maintained as reflected in the increase in Indonesia's Balance of Payments (BOP) surplus in 2021, supported by the current account surplus and the capital and financial account. In line with BOP performance, the Rupiah exchange rate was under control, supported by Bank Indonesia's stabilization policy. Inflation was recorded low in the midst of increasing domestic demand, maintained exchange rate stability, and the consistency of Bank Indonesia's policies in guiding inflation expectations. The stability of the financial system remains good with the intermediary function improving. The Indonesian economy is predicted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand, with maintained external stability, controlled inflation, and sound financial system stability.

Prospects of Commodity Trading and Distribution

The strategy implemented by PPI to increase the mainstay commodity is as follows:

1. Increasing revenue for Chemicals commodity by adding 1 Registered Distributor of Chemicals, taking alternative sources of supply to ensure supply, maintaining acceleration of Import Approval Letters, and cooperating with the Mining Industry. In addition, to increase revenue for hazardous chemical commodities, it is carried out by making improvements and standardization for Hazardous Materials DC infrastructure in Jakarta, Medan, and Surabaya. The development of the non-hazardous material market is carried out by market penetration into the hotel segment, drinking water industry, swimming pools, food and beverage processing factories and the cigarette industry.
2. For Pesticide Commodities, especially Dharmabrand products, fulfillment for the need for spot walkers in all PT PPI branches, procurement centralization, product development with upgraded active ingredients, and promotions in Dharmabrand market penetration will be carried out.

3. Strategi peningkatan pendapatan Bahan Pokok Klaster Pangan dilakukan dengan melakukan sinergi yang didukung oleh persiapan *Key Account Holder* Klaster Pangan untuk memperkuat engagement dan modelling bisnis PPI dalam Klaster Pangan, sementara untuk Bahan Pokok Non Klaster Pangan dilakukan dengan importasi beras ketan, beras khusus, dan hortikultura.
4. Pada kategori Properti, selain pendapatan yang diperoleh dari penyewaan aset jangka pendek, PPI akan menerapkan kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan optimalisasi aset di cabang - cabang.
5. Optimalisasi peranan BGRLI sebagai penyedia jasa logistik di klaster pangan dan penguatan *engagement* BGRLI terhadap pareto pelanggan eksisting.

3. The strategy to increase revenue for Food Cluster Staples is carried out by synergizing which is supported by the preparation of Food Cluster Key Account Holders to strengthen PPI business engagement and modeling in the Food Cluster, while for Non-Food Cluster Staples, it is carried out by importing glutinous rice, special rice, and horticulture.
4. In the Property category, in addition to income derived from short-term asset rental, PPI will implement a decentralization policy to increase asset optimization in branches.
5. Optimizing the role of BGRLI as a logistics service provider in food clusters and strengthening BGRLI's engagement with existing Pareto customers.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh perubahan dan tantangan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, PPI telah melakukan penyesuaian terhadap inisiatif strategis dan program kerja yang dijalankan di tahun ini agar tetap selaras dengan dinamika bisnis dan faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar kendali.

Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun 2021, PPI menerapkan strategi pemasaran yang telah mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, antara lain:

- Proses Merger dan Akuisisi BGR
- Penguatan Sistem *Market Analytics*
- Menambah Kerjasama Kedistributoran dengan Perusahaan pensuplai
- Penguatan *Downline* Pelanggan Industri
- Optimalisasi Penjualan Berbasis *E-commerce*
- Penambahan Wilayah Jaringan Penjualan Pupuk hingga 10% dari total jaringan sebelumnya
- Pengembangan Produk, Produksi dan Metode Promosi Penjualan Produk Pestisida

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Kebijakan dividen PPI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2021 was a year full of changes and challenges along with the COVID-19 pandemic. Facing this situation full of uncertainty, PPI has made adjustments to the strategic initiatives and work programs carried out this year in order to stay in line with business dynamics and external factors that are out of control.

Marketing Strategy

Throughout 2021, PPI implemented a marketing strategy that took into account the conditions of the COVID-19 pandemic, including:

- BGR Merger and Acquisition Process
- Strengthening Market Analytics System
- Adding Distributorship Cooperation with supplying companies
- Strengthening Industrial Customer Downlines
- Optimizing E-commerce Based Sales
- Adding Fertilizer Sales Network Area up to 10% of the previous total network
- Developing Product, Production and Sales Promotion Methods of Pesticide Products

DIVIDEND POLICY

Dividend Distribution Policy

PPI's dividend policy is in accordance with the prevailing laws and regulations, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in which



dimana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku agar cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada penerapannya, pembagian dividen ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan nominal yang dibayarkan senantiasa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain namun tidak terbatas pada tingkat kesehatan perusahaan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja, dan pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan lain.

Pembagian Dividen Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, PPI tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

the Company is required to set aside a certain amount of net income of each fiscal year so that the reserve reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital.

In practice, the distribution of dividends is determined based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) with the nominal paid always taking into account several things, including but not limited to the Company's soundness level, capital adequacy level, funding needs for operational activities, working capital, and business development, without prejudice to the rights of the GMS to decide otherwise.

Dividend Distribution in the Last 5 (five) Years

Since 2017 to 2021, PPI did not distribute dividends to Shareholders.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Hingga akhir 2021, PPI tidak memiliki program kepemilikan saham, baik bagi karyawan maupun manajemen. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* di dalam Laporan Tahunan 2021.

Until the end of 2021, PPI does not have a share ownership program, either for employees or management. Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, time period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price in the 2021 Annual Report.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Pada tanggal 2 Desember 2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor S-922/MBU/12/2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021, perseroan melakukan merger PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) dan PT Bhandha Ghara Rekza (BGR).

Merger tersebut ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza melebur ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 2 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Akta No. 5 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) dan PT Bhandha Ghara Rekza (BGR), dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) ke dalam perseroan.
- Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut konsep Akta Penggabungan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) ke dalam perseroan, kecuali terkait dengan nilai kekayaan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) yang dialihkan ke dalam perseroan adalah sebesar Rp786.545.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) atau sebagai 786.545 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang merupakan nilai definitif kekayaan yang ---dialihkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhandha Ghara Rekza yang Digabung Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- Berkenaan penggabungan dengan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perseroan mendapatkan saham baru sebanyak 786.545 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu ---lima ratus empat puluh lima) lembar saham --masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah),

On December 2, 2021, based on Ministerial Decree No. S-922/MBU/12/2021 and Government Regulation No. 97/2021, the Company merged PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) and PT Bhandha Ghara Rekza (BGR).

The merger was marked by the signing of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Rekza merging into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. This is stated in Deed No. 3 dated December 2, 2021 regarding Amendments to the Articles of Association and Deed No. 5 dated December 2, 2021 regarding Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI) and PT Bhandha Ghara Rekza (BGR), with the following details:

- Received the merger of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) into the Company.
- Approved the Merger Plan and the concept of the Deed of Merger of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) into the Company, except in relation to the assets value of PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) which was transferred to the Company amounting to Rp786,545,000,000 (seven hundred and eighty-six billion five hundred and forty five million Rupiah) or as 786,545 (seven hundred and eighty six thousand five hundred and forty five) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah) which is the definitive value of the assets transferred in accordance with Decree of the Minister of Finance Number 460/KMK.06/2021 concerning the Determination of the Value of the Company's Assets (Persero) PT Bhandha Ghara Rekza which is Merged into the Share Capital of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia .
- With regard to the merger with the value of assets as referred to in letter b above, the Company obtained new shares of 786,545 (seven hundred eighty six thousand --- five hundred forty five) shares -- each with a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah), so that the total issued and fully paid-up capital in the



sehingga keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan semula sebesar Rp156.200.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp942.745.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya telah diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar PPI semula sebesar Rp575.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.175.877.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 1.175.877 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Dengan disahkan merger antara kedua Perusahaan tersebut, maka PPI menjadi *surviving entity*.

Company was originally Rp. 156.200.000.000,00 (one hundred fifty six billion two hundred million Rupiah) to Rp942,745,000,000.00 (nine hundred and forty-two billion seven hundred and forty-five million Rupiah) which has been fully subscribed by the Republic of Indonesia.

- Approved an increase in PPI's original Authorized Capital of Rp575,000,000,000.00 (five hundred and seventy-five billion Rupiah) divided into 575,000 (five hundred seventy-five thousand) shares, each share with a nominal value of Rp1,000,000,00 (one million Rupiah) to Rp1,175,877,000,000.00 (one trillion one hundred seventy five billion eight hundred seventy-seven million Rupiah) divided into 1,175,877 (one million one hundred seventy five thousand eight hundred seventy seven) shares, each of which has a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah).

With the legalization of the merger between the two companies, PPI becomes the surviving entity.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN DAN/ATAU PIHAK AFILIASI

MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT AND/OR AFFILIATES

Sepanjang tahun 2021, PPI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana telah diklasifikasikan di dalam PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain sebagai berikut:

- 1) Seseorang atau anggota terdekat dari pihak keluarga dianggap berelasi terhadap entitas laporan keuangan jika orang tersebut:
 - Memiliki kendali atau kendali sebagian terhadap entitas laporan;
 - Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas laporan; dan
 - Seorang anggota dari manajemen kunci entitas laporan atau laporan induk perseroan.
- 2) Sebuah entitas berelasi terhadap entitas laporan jika terdapat kondisi sebagai berikut:

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Entitas yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).

- Satu Entitas adalah entitas asosiasi atau ventura sebagian dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura sebagian yang merupakan anggota suatu Entitas, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- Kedua entitas adalah ventura sebagian dari pihak ketiga yang sama;
- Suatu entitas adalah ventura sebagian dari pihak ketiga adalah sebuah entitas lain adalah perseroan dari pihak ketiga;
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan sebagian oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a;
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil Perusahaan kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).

Throughout 2021, PPI entered into transactions with related parties as classified in PSAK No. 7: "Related Party Disclosures", as follows:

- 1) A person or the closest member of the family is considered related to the financial statement entity if that person:
 - Has control or partial control over the reporting entity;
 - Has significant influence on the reporting entity; and
 - A member of the key management of the Company's reporting or parent reporting entity.
- 2) An entity is related to the reporting entity if the following conditions occur:

The entity and the reporting entity are members of the same Entity (meaning that the parent, subsidiary, subsequent entity is related to another entity).

- One Entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or venture of a member of an Entity, of which the other Entity is a member);
- Both entities are partial ventures of the same third party;
- An entity which is a partial venture of a third party is another entity which is a company of a third party;
- The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits from one of the reporting Entities or other Entities related to the reporting entity. If the reporting Entity is the Entity that organizes the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting Entity;
- Entities fully controlled or partly controlled by the person identified in letter a;
- The person identified in letter a (i) has significant influence over the Entity or key personnel of the Entity (or the parent of the Entity).



NAMA PIHAK BERELASI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN BERELASI DAN TUJUAN TRANSAKSI

RELATED PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION, NATURE OF THE RELATED RELATIONSHIP AND PURPOSE OF THE TRANSACTION

Berikut ini adalah tabel yang menginformasikan nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan:

The following table provides the names of the parties conducting the transactions, the nature of the relationship and the nature of the transactions carried out:

Nama Pihak Berelasi Related Party	Sifat Hubungan Relasi Nature of Relationships	Jenis Transaksi Types of Transactions
Pemerintah RI The Government of the Republic of Indonesia	Hubungan Sebagai Pemegang Saham As Shareholder	Liabilitas Dana Pinjaman Rekening Dana Investasi Loan Fund Investment Fund
BUMN Lainnya Other SOEs	Kepemilikan dan atau Keengurusan Ownership and or Management	Bisnis, Rekening Giro dan Deposito, Asuransi, BPJS Business, Current Accounts and Deposits, Insurance, BPJS
Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Manajemen Kunci Perusahaan Company Key Management	Kompensasi Hubungan Pemberian Jasa Compensation for Service Delivery

Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. PPI menganggap bahwa seluruh transaksi yang dilakukan tersebut masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Fairness of Transaction

Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties. PPI considers all transactions carried out are still within reasonable limits in accordance with PSAK Number 7 (2010 Revision) concerning Disclosure of Related Parties.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti sudah disajikan pada tabel di atas, tujuan dilakukannya transaksi antara PPI dengan pihak-pihak berelasi yakni karena sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara perusahaan dan pihak-pihak berelasi.

Transaction Purpose

As presented in the table above, the purpose of conducting transactions between PPI and related parties is because it is in line with the needs of the company's operations and business development, as well as the principle of mutual need between company and related parties.

Realisasi Saldo dan Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi | Realization of Balances and Related Party Transactions

Saldo Pihak Berelasi Related Party Balance	2021 (Rp - Juta) (Rp - Million)	2020 (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase Percent- age
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	173.058.934.548	230.249.772.006	31,64%	39,69%	-57.190.837.458	-24,84%
Deposito Dijaminkan Guaranteed Deposits	21.828.113.040	1.400.000.000	3,99%	0,24%	20.428.113.040	1459,15%
Piutang Usaha Trade Receivable	341.339.677.431	337.607.690.728	62,41%	58,19%	3.731.986.703	1,11%
Investasi nilai wajar melalui penghasilan kom- prehensif lain Fair value investment through other comprehensive income	10.422.281.574	10.623.917.699	1,91%	1,83%	-201.636.125	-1,90%
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets	287.000.000	287.000.000	0,05%	0,05%	0	0,00%
Total Aset dari Pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	546.936.006.593	580.168.380.433	100,00%	100,00%	-33.232.373.840	-5,73%
Total Aset Total Assets	546.936.006.593	580.168.380.433	100,00%	100,00%	-33.232.373.840	-5,73%

Saldo aset PPI dari pihak berelasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp33,23 miliar atau setara penurunan 5,73%. Hal tersebut dikontribusikan dari penurunan transaksi Kas dan Setara Kas sebesar Rp57,19 miliar atau menurun 24,84% sehingga tercatat sebesar Rp173,05 miliar dari tahun sebelumnya senilai Rp230,24 miliar.

Komposisi saldo Kas dan Setara Kas dari pihak berelasi juga mengalami peningkatan dari 1,11% pada 2020 menjadi Rp341,33 miliar pada tahun 2021. Sedangkan, komposisi aset lainnya menunjukkan penurunan transaksi sebagaimana dapat dilihat pada deskripsi tabel di atas.

Secara keseluruhan kontribusi total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset PPI per 31 Desember 2021 menunjukkan peningkatan dari sebelumnya menyumbang porsi kontribusi sebesar 58,19% menjadi 62,41% di tahun 2021.

The balance of PPI's assets from related parties in 2021 decreased by Rp33.23 billion or equivalent to a decrease of 5.73%. This was due to a decrease in Cash and Cash Equivalent transactions of Rp57.19 billion, or a decrease of 24.84%, so that it was recorded at Rp173.05 billion, decreasing from the previous year's value of Rp230.24 billion.

The composition of Cash and Cash Equivalent balances from related parties also increased from 1.11% in 2020 to Rp341.33 billion in 2021. Meanwhile, the composition of other assets showed a decrease in transactions as can be seen in the description of the table above.

Overall, the contribution of total assets from related parties to PPI's total assets as of December 31, 2021 showed an increase from the previous contribution portion of 58.19% to 62.41% in 2021.

Saldo Pihak Berelasi Related Party Balance	2021 (Rp - Juta) (Rp - Million)	2020 (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase Percentage
Utang Usaha Trade Payable	209.946.581.814	237.952.882.008	18,08%	19,93%	-28.006.300.194	-11,77%
Pinjaman Bank Bank Loan			0,00%	0,00%	0	
Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Portion of liabilities that will mature in one year	26.136.879.641	18.022.248.548	2,25%	1,51%	8.114.631.093	45,03%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	925.217.534.310	938.090.459.727	79,67%	78,56%	-12.872.925.417	-1,37%
Total liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities of Relat- ed Parties	1.161.300.995.765	1.194.065.590.283	100,00%	100,00%	-32.764.594.518	-2,74%
Total Liabilitas Total Liabilities	1.161.300.995.765	1.194.065.590.283	100,00%	100,00%	-32.764.594.518	-2,74%

Saldo liabilitas PPI dari pihak berelasi pada tahun 2021 mencatatkan penurunan Rp32,76 miliar atau 2,74% yang bersumber dari penurunan utang usaha sebesar Rp28,00 miliar atau 11,77%, yakni dari sejumlah Rp237,95 miliar pada 2020 menjadi Rp209,94 miliar di tahun ini. Di sisi lain, PPI tmencatatakan nihil pada saldo Pinjaman Bank dari pihak berelasi di tahun ini.

The balance of PPI's liabilities from related parties in 2021 recorded a decrease of Rp32.76 billion or 2.74% which came from a decrease in trade payables of Rp28.00 billion or 11.77%, from Rp237.95 billion in 2020 to Rp209.94 billion this year. On the other hand, PPI recorded nil in the balance of bank loans from related parties this year.

Komposisi saldo utang usaha dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas menurun dari 19,93% pada tahun 2020 menjadi 18,08% di tahun 2021. Sementara itu, terdapat penurunan komposisi pada bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas jangka panjang masing-masing menjadi sebesar 2,25% dan 79,67% dari sebelumnya masing-masing tercatat 1,51% dan 78,56%.

The composition of the balance of trade payables from related parties to total liabilities decreased from 19.93% in 2020 to 18.08% in 2021. Meanwhile, there was a decrease in the composition of liabilities that will mature in one year and non-current liabilities by 2.25% and 79.67%, respectively, from the previous year of 1.51% and 78.56%, respectively.

Saldo Pihak Berelasi Related Party Balance	2021 (Rp - Juta) (Rp - Million)	2020 (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal (Rp - Juta) (Rp - Million)	Persentase Percentage
Penjualan Pihak Berelasi Related Party Sales	468.745.708.114	835.039.028.457	24,18%	21,02%	-366.293.320.343	-43,87%
Total Penjualan Total Sales	1.938.824.894.814	3.972.598.307.022	100,00%	100,00%	-2.033.773.412.208	-51,20%

Transaksi penjualan dengan pihak berelasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp366,29 miliar atau 43,87%. Komposisi transaksi pendapatan dengan pihak berelasi dari jumlah pendapatan usaha juga meningkat dari 21,02% pada 2020 menjadi 24,18% di tahun 2021.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme *review* PPI terhadap transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit eksternal yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

PPI senantiasa mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Sales transactions with related parties in 2021 decreased by Rp366.29 billion or 43.87%. The composition of revenue transactions with related parties from total revenues also increased from 21.02% in 2020 to 24.18% in 2021.

Company Policy Related to Transaction Review Mechanism

PPI's review mechanism for transactions with related parties is carried out through an external audit process that has been carried out by a Public Accountant and published, where this mechanism is contained in PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures".

Fulfillment of Related Rules and Conditions

PPI always complies with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia through the disclosure of PSAK 7 regarding "Related Party Disclosures" in the Company's 2021 Financial Statements audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners.

PENGARUH PERUBAHAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN

IMPACT OF AMENDMENTS TO GOVERNMENT REGULATION ON THE COMPANY

1. Adanya Permendag 47 tahun 2019 membatasi penjualan PPI hanya ke DT-B2; pengajuan SPI Bahan Kimia hanya dapat dilakukan minimal per tiga bulan dan prosesnya membutuhkan waktu lama, kurangnya *market research*, kekurangan stok barang, dan kendala untuk mendapatkan *vessel*;
2. Pembatasan Kawasan Rendah Emisi (LEZ) di Daerah Kota Tua mengakibatkan Mobilitas Angkutan Umum terganggu dan tidak melintasi SPBU Kp. Bandan.
3. Berdasarkan Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. S-922/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
1. The Minister of Trade Regulation No. 47 of 2019 has limited PPI sales to only DT-B2; Submission of SPI for Chemicals can only be done at least every three months and the process takes a long time, lack of market research, lack of stock of goods, and obstacles to getting vessels;
2. Restrictions on Low Emissions Areas (LEZ) in the Kota Tua area has resulted in disrupted public transport mobility and not crossed the Kp. Bandan gas station
3. Based on the Letter of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. S-922/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 regarding Approval for the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), and the Deed of Statement of Shareholders' Resolution on the Amendment to the Articles of Association of PT PPI (Persero)

Perseroan (Persero) PT PPI disingkat PT PPI (Persero) Nomor 2 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001565.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 8 Januari 2022 telah ditetapkan struktur permodalan PT PPI sebagai berikut:

Number 2 dated January 7, 2022 made before Notary Aulia Taufani, S.H. which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0001565.AH.01.02. On January 8, 2022, the capital structure of PT PPI was determined as follows:

Susunan Pemodal PT PPI Tahun 2022 Capital Structure of PT PPI in 2022

Uraian Description	Jumlah Saham (lembar) Nature of Relationships	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Types of Transactions	%
Modal Dasar Authorized Capital	1.175.877	1.175.877.000.000	
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1 lembar saham Seri A Dwiwarna 1 share of Series A Dwiwarna	1.000.000	100%
	942.744 lembar saham Seri B 942.744 shares of Series B	942.744.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and paid-up capital	942.745	942.745.000.000	100%

4. Implikasi dari aktivitas merger PPI & BGR (Akta No.27 Tanggal 13 Desember 2021 Nomor: AHU-AH.01.03.0485975 Tahun 2021):
 - a) *Parenting strategy* (tata kelola induk & anak perusahaan);
 - b) *Onboarding* bisnis Warung Pangan;
 - c) *Onboarding* bisnis *Waste Integrated Solution*;
 - d) Total Karyawan PPI sebanyak 530 orang & BGR LI 1.004 orang (Desember 2021)
5. Rasionalisasi aset duplikasi PPI dan ex.BGR;
 - e) Biaya Pesangon dan Padini mencapai Rp 25 Miliar untuk 85 orang sehingga masuk dalam Prognosa 2021.

4. Implications of the PPI & BGR merger activity (Deed No. 27 dated December 13, 2021 Number: AHU-AH.01.03.0485975 of 2021) are as follows:
 - a) Parenting strategy (management of parent & subsidiary);
 - b) Food stall business onboarding;
 - c) Waste Integrated Solution business onboarding;
 - d) Total PPI employees are 530 people & BGR LI 1,004 people (December 2021)
5. Rationalization of PPI and ex.BGR duplicate assets;
 - e) Severance pay and Padini costs reach Rp25 billion for 85 people so that they are included in the 2021 Prognosis.

PERUBAHAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN TAHUN 2021

CHANGES IN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD IN 2021

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Entitas dan Entitas Anak (*Group*) telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tahun 2021 yang dianggap relevan, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi *Group* dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 73 "Sewa"

b. Standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

Standar-standar dibawah ini harus diterapkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

Saat ini PPI sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar amendemen dan penyesuaian tersebut serta pengaruhnya pada laporan Keuangan Entitas.

a. Standards that are effective in the current year

The Entity and Subsidiaries (*Group*) applied the following accounting standards in 2021 that were considered relevant, but did not cause significant changes to the *Group's* accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the financial statements for the current year:

- Annual Adjustment of PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendments to PSAK 73 "Leases"

b. Standards that have been published but not implemented yet

The following standards must be implemented on or after January 1, 2022 and January 1, 2023.

- Amendment to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts"
- Annual Adjustment of PSAK 71 "Financial Instruments"
- Annual Adjustment of PSAK 73 "Leases"
- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK 16 "Fixed Assets"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to PSAK 46 "Income Tax"

Currently, PPI is evaluating and has not determined the impact of the implementation of the standard amendments and adjustments and their impact on the Entity's Financial Statements.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSEROAN COMPANY'S KEY PERFORMANCE INDICATORS

Indikator Utama Perusahaan (*Key Performance Indicators*/"KPI") Konsolidasian per 31 Desember 2021 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, dimana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN

PPI's Consolidated Key Performance Indicators ("KPI") as of December 31, 2021 is reflected in the Company's KPI assessment matrix, where the perspective, indicators and weighting have been determined in accordance with SOE Ministerial Regulation No. S-08/S. MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessment of Superior Performance for SOEs.

No	Indikator Perspektif KPKU KPKU Perspective Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Polaritas Polarity	Skor Score			KPI
						Realisasi Realization	% Capaian % Achieve- ment	Skor Score	
A	Nilai Ekonomi & Sosial Ekonomi Untuk Indonesia Economic & Socio-Eco - nomic Value for Indonesia								
Financial									
1	EBITDA	8	Rp Miliar Rp Billion	218,3	Maximize	(72,04)	(33,00)	-	
2	CFO	8	Rp Miliar Rp Billion	212,0	Maximize	(74,45)	(35,12)	-	
3	<i>Interest Bearing To EBITDA</i>	7	Kali Time	1,9	Minimize	(2,22)	(116,84)	-	
4	<i>Nett Income</i>	7	Rp Miliar Rp Billion	194,1	Maximize	101,36	52,23	3,66	
Sub Jumlah Sub-Total		30						3,66	
Operasional & Sosial Operations & Social									
5	<i>Stockpoint Terstandarisasi Standardized Stockpoint</i>	2	Jumlah Total	25,0	Maximize	30,00	110,00	2,20	
6	<i>Penambahan Toko Grosir Desa Addition of Village Grocery Store</i>	3	Jumlah Toko Total Stores	70,0	Maximize	70,00	110,00	3,30	
7	<i>Efisiensi Biaya Produksi Production Cost Efficiency</i>	2	%	-2%	Maximize	-18,59	92,938	-	
8	<i>Akuisisi Warung Pangan Food Stall Acquisition</i>	5	Mitra Partners	60.000	Maximize	66,185	110,00	5,50	
Sub Jumlah Sub-Total		12				30,00	110,00	11,00	
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innova- tion								

No	Indikator Perspektif KPKU KPKU Perspective Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Polaritas Polarity	Skor Score			KPI
						Realisasi Realization	% Capaian % Achieve- ment	Skor Score	
9	Konsolidasi Holding BUMN Pangan Melalui Tahapan <i>Legal Merger dan Inbreng</i> Consolidation of SOE Food Holdings Through Legal Merger and Inbreng Stages	10	Waktu Time	April 2021 atau September 2021 April 2021 or September 2021	Minimize	Nov-21 No- vember 2021	100,00	10,00	
10	Penambahan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya Addition of Registered Distributor of Hazardous Materials	5	Jumlah Total	5	Maximize	7	110,00	5,50	
11	Pengembangan <i>Food Kios</i> Untuk Mendukung Warung Pangan Development of Food Kiosks to Support Food Stalls	4	Waktu Time	Desember 2021 December 2021	Minimize	Sep-21 Sep- tember 2021	110,00	4,40	
12	<i>Offtake Project Demonstration Farm</i> Dadahup Kalimantan Tengah	3	Waktu Time	Desember 2021 December 2021	Minimize	Desember 2021 De- cember 2021	100,00	3,00	
Sub Jumlah Sub-Total		22						22,90	
C Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership									
13	Inkubasi <i>System IT BGR & PPI</i> yang mendukung bisnis perdagangan BGR & PPI IT System Incubation that supports trading business	5	Waktu Time	Desember 2021 Decem- ber 2021	Minimize	Nov-21 No- vember 2021	110,00	5,50	
14	Pengembangan Aplikasi <i>Sales Force</i> Sales Force Application Development	2	Waktu Time	Desember 2021 Decem- ber 2021	Minimize	Desember 2021 De- cember 2021	100,00	2,00	
15	<i>Project milestone completion</i> atas implementasi IT <i>masterplan</i> : Implementasi sistem Monalisa untuk penguatan asset klaster pangan Project milestone completion for the implementation of the IT master plan: Implementation of the Monalisa system for strengthening food cluster assets	3	Waktu Time	Desember 2021 Decem- ber 2021	Minimize	Desember 2021 De- cember 2021	100,00	3,00	
16	<i>Project milestone completion</i> atas digitalisasi <i>core business</i> BUMN Klaster Pangan : Implementasi sistem pemetaan <i>supply demand</i> untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan bisnis Cluster Pangan dari hulu hingga hilir. Project milestone completion for digitizing the core business of SOE Food Cluster: Implementation of supply demand mapping system to integrate all Food Cluster business activities from upstream to downstream.	2	Waktu Time	Desember 2021 Decem- ber 2021	Minimize	Desember 2021 De- cember 2021	100,00	2,00	

No	Indikator Perspektif KPKU KPKU Perspective Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Polaritas Polarity	Skor Score			KPI
						Realisasi Realization	% Capaian % Achieve- ment	Skor Score	
Sub Jumlah Sub-Total		12						12,50	
D Peningkatan Investasi Investment Increase									
17	Pelaksanaan kerja sama 2(dua) titik aset dengan skema B.O.T Implementation of the cooperation of 2 (two) asset points with the B.O.T . scheme	3	Waktu Time	Desem- ber 2021 De- cember 2021	Minimize	Proposal	20,00	0,60	
18	Pelaksanaan optimalisasi 3 (tiga) titik aset1 Opti- mization of 3 (three) asset points	2	3	Titik Point	Maximize	Proposal	50,00	1,00	
19	<i>Project milestone comple- tion</i> atas implementasi kerjasama akuisisi dengan mitra strategis untuk pengelolaan <i>cold storage</i> di Kelapa Gading Project milestone completion for the implementation of acquisition cooperation with strategic partners for cold storage management in Kelapa Gading	2	Waktu Time	Desem- ber 2021 De- cember 2021	Minimize	Kontrak Kerjasama Collaboration Agreement	75,00	1,50	
20	<i>Project Milestone Comple- tion</i> atas implementasi kerjasama akuisisi dengan mitra strategis untuk pengelolaan <i>cold storage</i> di DKI Project Milestone Completion for the imple- mentation of acquisition cooperation with strategic partners for cold storage management in Jakarta	2	Waktu Time	Desem- ber 2021 De- cember 2021	Minimize	Desember 2021 De- cember 2021	100,00	2,00	
Sub Jumlah Sub-Total		9						5,10	
E Pengembangan Talenta Talent Development									
21	% Milenial <i>Top Talent</i>	7	%	5	Maximize	60,87	100,00	7,0	
22	% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> % Fe- male in Nominated Talent	8	%	10	Maximize	28,57	110,00	8,80	
Sub Jumlah Sub-Total		15						15,80	
TOTAL		100						70,96	

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 (lima) perspektif KPI di atas, kinerja PPI Tahun 2021 setara dengan total skor sebesar **"70,96"** dari target 100.

Based on the results of the assessment of the 5 (five) KPI perspectives above, the performance of the PPI in 2021 was equivalent to a total score of **"70.96"** out of a target of 100.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Pada tahun 2021, Indonesia masih mengalami perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan terutama disebabkan oleh penyebaran pandemi virus COVID-19 yang membawa dampak kerugian multidimensi yang cukup berat, seperti terkoreksinya pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi PPI yang tidak menguntungkan.

Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara sebagian besar bergantung pada efektivitas kebijakan dan respon yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyebaran virus COVID-19. Efektivitas kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan dan peristiwa berada di luar kendali PPI.

In 2021, Indonesia was still experiencing a global economic slowdown and the negative impact on financial markets which were mainly due to the spread of the COVID-19 virus pandemic which resulted in quite heavy multidimensional losses, such as corrected economic growth, a decline in capital markets, increased credit risk, depreciation of foreign exchange rates and business operations interruption, which may continue and result in unprofitable finances and operations of PPI.

Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy largely depends on the effectiveness of policies and responses given by the Government of the Republic of Indonesia in eradicating the spread of the COVID-19 virus. The effectiveness of the policy as referred to is actions and events that are beyond the control of PPI.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Manajemen telah melakukan serangkaian analisa yang komprehensif terkait keberlangsungan usaha menghadapi disrupsi di situasi Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini serta belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir. Sosialisasi pematapan menuju integrasi trading logistik yang terdigitalisasi menjadi langkah perseroan yang merupakan rangkaian dari babak baru PPI usai merger dengan PT BGR (Persero) yang dilakukan pada 2 Desember 2021 dengan bergabungnya BGR ke PPI. Proses merger diawali dengan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 15 September 2021 perihal penggabungan BGR ke dalam PPI, sampai pada disahkannya Akta Notaris tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT PPI (Persero).

Usai penggabungan merger dengan BGR, PPI akan bertransformasi untuk menghasilkan produk berkualitas melalui sinergi Klaster Pangan, Tak hanya itu, inklusivitas

Management has carried out a series of comprehensive analyzes related to business continuity in facing disruption amidst the Covid-19 Pandemic and the end of this situation is still hard to predict. Socialization of stabilization towards the integration of digitalized logistics trading is a measure for the Company which is a series of a new chapter of PPI after the merger with PT BGR (Persero) which was carried out on December 2, 2021. The merger process began with Government Regulation No. 97 of 2021 which was issued on September 15, 2021 regarding the merger of BGR into PPI. It was then ratified with the Notary Deed concerning Receipt of Notification of the Merger of PT PPI (Persero).

After the merger with BGR, PPI will transform to produce quality products through the synergy of the Food Cluster, the inclusiveness of farmers, fishermen,



petani, nelayan, peternak dan UMKM untuk memberikan kontribusi besar untuk pemerintah, baik berupa pajak maupun dividen.

Merger ini juga merupakan babak baru *New PPI* dengan peran *end state* sebagai agregator *agri-food* dan logistik terdigitalisasi terbesar di Indonesia dalam ekosistem rantai pasok pangan menuju proses *holding* BUMN pangan. Dengan begitu, ada peningkatan peringkat indeks daya saing logistik Indonesia, dalam hal ini PPI diharapkan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung perseroan untuk terus berkontribusi untuk mendistribusikan produk-produk strategis dan komoditas pertanian lainnya, dari daerah surplus ke *user/pengguna* juga berperan dalam penyelesaian permasalahan logistik terkait ekspor komoditas pertanian.

PPI juga memaksimalkan kinerja karyawan untuk senantiasa melakukan improvement kinerja untuk selalu adaptif dan kreatif untuk menjawab tantangan bisnis trading logistik. PPI akan memberikan nilai tambah yaitu meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, meningkatkan kapabilitas operasional, pendanaan, serta SDM dan menjadi *end-to-end service provider* di bidang trading dan logistik.

Lebih lanjut, PPI juga fokus untuk melakukan penguatan pada aspek teknologi informasi dan penataan jalur distribusi untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Mempertimbangkan lini bisnis usaha yang berjalan saat ini, PPI akan terus melakukan *refocussing* terhadap kegiatan bisnis yang relatif tidak mengalami kontraksi akibat COVID-19, seperti sarana produk pertanian melalui produk pupuk dan pestisida, serta akan memanfaatkan jaringan bisnisnya dalam mengembangkan bisnis farmasi seiring dengan meningkatnya peluang bisnis produk tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Sementara itu, PPI menilai bisnis komoditi pangan memiliki potensi yang cukup baik di masa mendatang terutama dengan bergabungnya PPI di dalam *Holding* Pangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan jaminan pasokan produk-produk pangan terutama bahan pokok. Kepastian pasokan menjadi faktor kunci untuk memenuhi permintaan pasar Indonesia yang begitu besar dan tersebar di seluruh wilayah.

breeders and MSMEs to make major contributions to the government, both in the form of taxes and dividends.

This merger is also a new chapter for *New PPI* with the role of the end state as the largest *agri-food* and logistics aggregator in Indonesia in the food supply chain ecosystem towards the SOE food holding process. That way, there is an increase in the ranking of Indonesia's logistics competitiveness index. In this case the PPI is expected to be able to take advantage of the various opportunities that exist.

The Indonesian government also strongly supports the Company to continue to contribute to the distribution of strategic products and other agricultural commodities, from surplus areas to users who also play a role in solving logistical problems related to the export of agricultural commodities.

PPI also maximizes employee performance to always make performance improvements to always be adaptive and creative to answer the challenges of the logistics trading business. PPI will provide added value by increasing revenue, reducing costs, increasing operational capabilities, funding, and human capital as well as becoming an *end-to-end service provider* in the trading and logistics sector.

Furthermore, PPI also focuses on strengthening the information technology aspect and structuring distribution channels to ensure business continuity. Considering the current line of business, PPI will continue to refocus on business activities that have not experienced a contraction due to COVID-19, such as agricultural product facilities through fertilizer and pesticide products, and will utilize its business network in developing the pharmaceutical business in line with increasing business opportunities of the product as a result of the COVID-19 pandemic.

Meanwhile, PPI assesses that the food commodity business has quite good potential in the future, especially with PPI joining in *Food Holding*. It is expected to increase the guarantee of supply of food products, especially staples. The certainty of supply is a key factor to meet the demand for the Indonesian market which is so large and spread throughout the country.



FUNGSI PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT FUNCTION

5



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Di tengah kondisi dan tantangan bisnis yang semakin bergejolak, Sumber Daya Manusia ("SDM") yang tangguh memegang peranan kunci guna mewujudkan visi dan misi PPI. Setiap SDM yang dimiliki oleh PPI merupakan aset berharga yang secara berkelanjutan perlu ditingkatkan dalam hal kompetensi dan sikap kerja, kompetitif serta profesionalismenya. Hal tersebut dilakukan melalui program pengembangan kompetensi PPI yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan penerapan seluruh nilai-nilai hakiki PPI (integritas, budaya disiplin, kekuatan suatu kelincahan, kerja sama tim, dan perbaikan berkesinambungan) dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut sangat penting untuk memperkuat kesiapan PPI dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap permasalahan dan tantangan yang mungkin akan muncul. Selain itu, PPI juga terus melakukan integrasi fungsi karyawan dengan strategi bisnis PPI, sehingga PPI dapat mencapai target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu faktor penggerak utama dan sentral dalam sebuah perusahaan, PPI sangat memahami pentingnya memotivasi SDM guna akselerasi kinerja terbaiknya. Untuk itu, PPI melakukan serangkaian program pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang intensif dan sistematis guna mendukung kinerjanya serta menerapkan sistem pengembangan karier yang lebih terstruktur.

PPI berkomitmen untuk terus melakukan pengelolaan SDM yang sejalan dengan visi dan misi PPI. Sehingga, diharapkan PPI akan siap menghadapi era globalisasi dan mampu mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Kebijakan mengenai pengelolaan SDM PPI mengacu pada kebijakan terkait pengelolaan SDM PPI, baik dari regulator maupun produk PPI, yang diadopsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUTK);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

In the midst of increasingly volatile business condition-sand challenges, strong Human Capital ("HC") plays a key role in realizing PPI's vision and mission. Every HC owned by PPI is a valuable asset that needs to be continuously improved in terms of competence and work attitude, competitiveness and professionalism. This is carried out through PPI's competency development program which is carried out based on needs analysis and the application of all PPI's essential values (integrity, disciplined culture, strength of agility, teamwork, and continuous improvement) in daily activities. This is very important to strengthen the Company's readiness to overcome and resolve any problems and challenges that may arise. In addition, PPI continues to integrate employee functions with PPI's business strategy, so PPI can achieve the business targets set by the shareholders and stakeholders.

As one of the main and central driving factors in a company, PPI really understands the importance of motivating HC to accelerate their best performance. To that end, PPI carries out a series of intensive and systematic HC capacity and competency development programs to support its performance and implements a more structured career development system.

PPI is committed to continuously managing HC in line with PPI's vision and mission. Thus, PPI is expected be ready to face the era of globalization and be able to realize the Company's vision and mission.

HC MANAGEMENT POLICY

The policy regarding the management of PPI's HC refers to the policies related to the management of PPI's HC, both from the regulator and PPI's products, as follows:

1. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUTK);
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest



- Pemutusan Hubungan Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Periode 2021-2023;
 - Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 tentang Penerimaan Pegawai;
 - Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
 - Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 tentang Penilaian Kinerja Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
 - Time, and Termination of Employment;
 - Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 concerning Wages;
 - Collective Labor Agreement (PKB) between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and the Labor Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) for the period of 2021-2023;
 - Resolution of the Board of Directors of the Company (Persero) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 concerning Employee Recruitment;
 - Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Education and Training of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
 - Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 concerning Employee Performance Assessment of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);

Kebijakan pengelolaan SDM menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerapan *reward and punishment* sampai dengan program pensiun.

Sepanjang tahun 2021, PPI menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan SDM. Dengan adanya *shifting* pada gaya bekerja tersebut, PPI melalui "Divisi SDM dan Umum" berkomitmen akan terus melakukan kajian dan merumuskan kebijakan organisasi yang relevan agar dapat mengakomodir disrupsi yang sedang terjadi sehingga roda bisnis PPI tetap dapat berjalan dengan baik di tahun-tahun mendatang.

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Divisi SDM dan Umum bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan strategi terkait pengelolaan dan pengembangan SDM, serta melaksanakan program SDM untuk mencapai tujuan PPI.

STRUKTUR PENGELOLAAN SDM

Divisi SDM dan Umum adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan SDM dan eksekusi seluruh program dan kegiatan SDM di PPI. Hal ini tercantum di dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/DU/SKD/PPI/XI/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Perubahan, Penetapan Nomenklatur, Stuktur

HC management policies serve as guidelines for implementing HC planning activities, recruitment, competency development, performance appraisal, application of rewards and punishments to retirement programs.

Throughout 2021, PPI implemented the *Work From Home* (WFH) and *Work From Office* (WFO) Systems. This is certainly a challenge ifor HC management. With this shift in work style, PPI through the "Human Capital and General Affair Division" is committed to continuing to study and formulate relevant organizational policies in order to accommodate the current disruption so PPI's business wheels can continue to run well in the years to come.

SCOPE AND RESPONSIBILITY

The Human Capital and General Affair Division is tasked and responsible for developing plans and strategies related to HC management and development, as well as implementing HC programs to achieve PPI's goals.

HC MANAGEMENT STRUCTURE

The Human Capital and General Affair Division is a work unit that is responsible for the management of HC and the execution of all HC programs and activities in the Company. This is stated in the Decree of the Board of Directors No. 23/DU/SKD/PPI/XI/2019 dated November 14, 2019 regarding Changes, Determination of Nomen-

Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi).

Divisi SDM dan Umum sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan kompetensi SDM PPI secara keseluruhan. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum. Divisi ini berperan sebagai pelaku keseluruhan pengelolaan perencanaan, perencanaan kebijakan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

Per 31 Desember 2021, jumlah personil Divisi SDM dan Umum sebanyak 26 orang.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola SDM di PPI:



TATA KELOLA SDM

Perencanaan SDM

PPI memandang bahwa implementasi perencanaan SDM yang tepat dapat menghasilkan bibit-bibit pegawai unggul yang bertalenta dan profesional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis PPI dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis PPI di masa mendatang, sehingga PPI harus memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, PPI melakukan koordinasi dengan Departemen Divisi SDM dan Umum.

clature, Organizational Structure and Main Functions (Tupoksi).

Human Capital and General Affair Division as the party in charge and responsible for managing the competence of PPI's HC as a whole. Structurally, this division reports directly to the Director of Finance, Human Capital and General Affairs. This division acts as the overall actor in the management of planning, policy planning, and human capital development to achieve the Company's goals and objectives.

As of December 31, 2021, the number of personnel in the Division of HC & General Affairs is 26 people.

The following is the organizational structure of HC management in PPI:

HC GOVERNANCE

HC Planning

PPI considers that the implementation of proper HC planning can produce superior employees who are talented and professional. This is an inseparable part of PPI's business strategy in realizing the vision, mission, and annual targets, as well as to support PPI's business continuity in the future, so PPI must ensure the availability of workers according to business needs.

In preparing the planning for employee needs in accordance with applicable regulations, PPI coordinates with the Division of HC & General Affairs. The results of the



Hasil perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

Pengelolaan SDM

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selalu menilai kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja dengan melakukan analisa kebutuhan jumlah maupun keahlian tenaga kerja selama 5 tahun ke depan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisa kebutuhan SDM adalah anggaran kebutuhan SDM, strategi dan perkembangan PPI sesuai business plan, jumlah tenaga kerja yang pensiun, jenis pekerjaan dan ketersediaan finansial.

Dalam melakukan evaluasi, selalu memperhatikan kebutuhan kapasitas tenaga kerja menggunakan pendekatan jumlah karyawan dibandingkan dengan target penjualan sesuai RKAP maupun RJP yang terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Dalam menilai kebutuhan ini tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan level jabatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, fungsi jabatan, status karyawan dan masa kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan formasi jabatan yang ada.

Rekrutmen Karyawan

Selaras dengan perkembangan bisnis PPI dan kebutuhan organisasi, PPI merekrut SDM yang berkualitas, berintegritas tinggi, serta mampu beradaptasi pada perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul.

Sistem rekrutmen PPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan. PPI juga melihat kompetensi dan keahlian dari calon karyawan dalam proses seleksi kerja. PPI meyakini filosofi equal *opportunity* dan *diversity* oleh karena itu PPI selalu membuka kesempatan bagi karyawan dari berbagai macam latar belakang untuk dapat bergabung bersama kami. Lebih lanjut, program rekrutmen yang dilaksanakan secara komprehensif, di mana setiap kandidat akan melalui proses evaluasi yang ketat, meliputi latar belakang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, media sosial, dan kondisi kesehatan. Proses seleksi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat.

Proses perencanaan SDM dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berapa banyak jumlah karyawan

HC planning are in the form of a list of employees' needs which becomes a reference for the implementation of employee recruitment and facilitates the process of placing employees more precisely.

HC Management

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia always assesses the need for the capability and capacity of the workforce by analyzing the needs for the number and expertise of the workforce for the next 5 years.

The factors considered in the HC needs analysis include the HC needs budget, PPI's strategy and development according to the business plan, the number of retired workers, the type of work and financial availability.

In conducting evaluations, the capacity needs of the workforce is always observed using the number of employees approach compared to sales targets according to the RKAP and RJP consisting of permanent and non-permanent employees.

In assessing this need, the workforce is grouped based on the level of position, education, age, gender, job function, employee status and terns of service. To meet the short-term employee needs, it is important to adjust to the needs of the organization and the existing position formation.

Employee Recruitment

In line with PPI's business development and organizational needs, PPI recruits qualified human capital, has high integrity, and is able to adapt to changes and has superior competence.

PPI's recruitment system always upholds the principles of openness, fairness, and equality. PPI also looks at the competence and expertise of prospective employees in the job selection process. PPI believes in the philosophy of equal opportunity and diversity, therefore PPI always opens opportunities for employees from various backgrounds to join PPI. Furthermore, a comprehensive recruitment program, where each candidate will go through a rigorous evaluation process, includes background, educational history, employment history, social media, and health conditions. The selection process is also carried out according to the quantity and competency needs of the candidate.

The HC planning process is carried out to find out and identify how many new employees are needed by the

baru yang dibutuhkan perseroan dan kriteria apa saja yang diperlukan untuk mengisi posisi vacant agar pelaksanaan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang perseroan dapat berjalan optimal. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hal ini, Divisi SDM dan Umum bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait sehingga pemetaan kebutuhan karyawan dapat tercermin dengan baik.

Dalam menjalankan strategi pemenuhan karyawan, PPI berfokus pada penjangkaran SDM yang bersumber dari internal terlebih dahulu baik melalui jalur promosi maupun mutasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Di samping itu, perseroan juga membuka proses rekrutmen eksternal melalui jalur fresh graduate dan jalur profesional (*pro-hire*). Pada akhirnya, keputusan penerimaan/penolakan kandidat karyawan senantiasa dilandaskan pada hasil evaluasi menyeluruh dari masing-masing calon kandidat karyawan yang sudah disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi posisi *vacant*.

Tahapan selanjutnya, PPI akan membekali kandidat karyawan terpilih dengan program pengenalan (*induction program*) untuk memberikan pemahaman dasar kepada mereka mengenai siklus bisnis perusahaan, nilai-nilai budaya dan tata kelola perusahaan, peluang pengembangan karier serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan di PPI.

Sepanjang tahun 2021, PPI telah merekrut sebanyak 55 karyawan baru yang terdiri dari 21 orang dari jalur *pro-hire* dan 34 orang dari jalur reguler. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan organisasi perusahaan di masa pandemi COVID-19.

Kebijakan Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

PPI berkeyakinan bahwa program pengembangan karier karyawan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dihindari di dalam proses pengelolaan SDM agar regenerasi organisasi tetap terjaga. Oleh sebab itu, PPI telah menerapkan sebuah sistem manajemen pengembangan karier berjenjang (*tier system*) sebagai salah satu upaya retensi yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan berkualitas menempati berbagai posisi strategis di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan mengacu pada Sistem BSC (*Balance Score Card*) untuk setiap tingkatan, mulai dari KPI korporat hingga KPI individu. Selanjutnya hasil penilaian KPI tersebut digunakan oleh

Company and what criteria are needed to fill vacant positions so that the implementation of the Company's short-term and long-term business strategies can run optimally. To get a complete picture of this, the Human Capital and General Affair Division cooperates with related work units so that the mapping of employee needs can be properly reflected.

In carrying out the employee fulfillment strategy, PPI focuses on recruiting internally sourced HC, either through promotion or transfer in accordance with established policies by considering the quality and competence of the position required. In addition, the Company also opens an external recruitment process through the fresh graduate and professional (*pro-hire*) channels. In the end, the decision to accept/reject employee candidates is always based on the results of a thorough evaluation of each prospective employee that has been adjusted to the criteria needed to fill vacant positions.

In the next stage, PPI will provide selected employee candidates with an induction program to provide them with a basic understanding of the Company's business cycle, cultural values and corporate governance, career development opportunities as well as their duties and responsibilities as employees in PPI.

Throughout 2021, PPI recruited 55 new employees consisting of 21 people from the *pro-hire* line and 34 people from the regular line. This amount has been adjusted to the needs of the company's organizational development during the COVID-19 pandemic.

Performance Assessment and Career Development Policy

PPI believes that employee career development programs are one of the important things that cannot be avoided in the HC management process to maintain organizational regeneration. Therefore, PPI has implemented a tiered career development management system as one of the retention efforts aimed at preparing quality employees to occupy various strategic positions in the future.

Employee performance assessment is carried out by referring to the BSC (*Balance Score Card*) System for each level, from corporate KPIs to individual KPIs. Furthermore, the results of the KPI assessment are used by



manajemen sebagai dasar dalam memberikan *reward* and *punishment* dan juga digunakan sebagai bahan penilaian dalam menentukan jenjang karier karyawan (*carrier planning*) mengacu pada kompetensi serta bakat yang dimiliki karyawan sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perseroan.

PPI membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan agar mereka termotivasi untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu di PPI sebagai bagian dari pengembangan karier masing-masing.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan meyakini ketersediaan SDM yang andal dan berkompotensi sangat dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan usaha jangka panjang. Oleh sebab itu, perseroan menaruh perhatian besar terhadap program pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan berkesinambungan.

Program pelatihan karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan pelatihan dan program sertifikasi karyawan. Semua model pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara internal (*in-house training*) maupun eksternal. Pelatihan internal berarti pelatihan tersebut dilakukan di dalam lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya, program pengembangan kompetensi karyawan dapat diikuti oleh semua karyawan. Kendati demikian, manajemen tetap memperhatikan analisis kebutuhan program pelatihan atau pengembangan potensi SDM masing-masing karyawan (*training need analysis*) untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syaratlah yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Setelah sesi pelatihan berakhir, manajemen akan mengevaluasi para peserta untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan jenjang karier dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Dengan adanya program pengembangan kompetensi karyawan, perseroan optimis dapat membentuk generasi karyawan yang memiliki kinerja yang lebih efektif dengan semangat kompetitif, dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi dengan tempat kerja.

Uraian lebih lanjut mengenai daftar kegiatan pengembangan dan pelatihan karyawan selama tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

management as a basis for providing rewards and punishments and are also used as assessment material in determining employee career paths (*carrier planning*) referring to the competencies and talents of employees so as to create quality human capital that is in accordance with the needs of the Company.

PPI opens equal opportunities to every employee so that they are motivated to continue to develop their potential to occupy a certain position in the Company as part of their respective career development.

Employee Training and Development

PPI believes that the availability of reliable and competent human capital is necessary to support long-term business continuity. Therefore, PPI pays great attention to a comprehensive and sustainable HC competency development program.

Employee training programs can be carried out in various ways, such as training activities and employee certification programs. All of these training models can be implemented internally (*in-house training*) or externally. Internal training means that the training is carried out within the Company.

In principle, employee competency development programs can be participated by all employees. Nevertheless, management still pays attention to the analysis of the needs of the training program or the development of the potential of each employee's human capital (*training need analysis*) to ensure that every employee who meets the requirements is prioritized to participate in the training held. After the training session ends, management will evaluate the participants to measure the effectiveness of the training implementation. The results of the evaluation will later be used as a basis for management to determine career paths and the level of employee training needs.

With the employee competency development program, the Company is optimistic that it can form a generation of employees who have more effective performance with a competitive spirit, and have higher loyalty to the workplace.

The list of employee development and training activities during 2021 is presented in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

Pengangkatan Karyawan Tetap, Promosi, Mutasi dan Demosi

Pada prinsipnya perusahaan menyelenggarakan pengangkatan pegawai tetap, promosi, rotasi, mutasi dan demosi berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pengangkatan pegawai tetap dan promosi dilakukan melalui pertimbangan bahwa karyawan tersebut digolongkan sebagai talent terbaik perseroan.

Namun, untuk promosi itu sendiri dilakukan dengan memberikan peran, tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai antar-cabang atau wilayah kegiatan, didalamnya termasuk rotasi. Namun, rotasi itu sendiri lebih memfokuskan pemindahan tugas dan tanggung jawab antar fungsi dan/atau unit kerja dalam satu Direktorat dan/atau antar Direktorat. Di sisi lain, demosi itu sendiri merupakan bentuk pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah dengan disertai penurunan *grade*.

Berikut merupakan detail pegawai demosi, mutasi, rotasi, promosi serta pengangkatan karyawan tetap pada tahun 2021:

Permanent Employee Appointment, Promotion, Transfer and Demotion

In principle, the company organizes permanent employee appointments, promotions, rotations, transfers and demotions based on the principles of Good Corporate Governance. The appointment of permanent employees and promotions is carried out based on the consideration that these employees are classified as the best talents of the Company.

However, the promotion itself is carried out by giving higher roles, duties and responsibilities. While mutation is the transfer of employees between branches or areas of activity, including rotation. However, the rotation itself focuses more on the transfer of duties and responsibilities between functions and/or work units within one Directorate and/or between Directorates. On the other hand, the demotion itself is a form of transferring employees to a lower position accompanied by a decrease in grade.

The following are details of employee demotion, transfer, rotation, promotion and appointment of permanent employees in 2021:

Data Rotasi dan/atau Mutasi Tahun 2021 | Data Rotasi dan/atau Mutasi Tahun 2021

Kategori Category	2021
Demosi Demosi	0
Mutasi Mutasi	130
Pengangkatan Karyawan Tetap Pengangkatan Karyawan Tetap	47
Rotasi Rotasi	20
Promosi Promosi	53
Total	250

Turnover Karyawan

Sepanjang tahun 2021, PPI melaksanakan proses rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan sumber daya di beberapa posisi serta adanya perputaran karyawan yang disebabkan masuknya masa pensiun, mengundurkan diri maupun penambahan personal dalam rangka menciptakan komposisi pegawai yang proposional.

Hingga akhir 2021, terdapat penambahan/pengurangan karyawan sebagai berikut:

Employee Turnover

Throughout 2021, PPI carried out a recruitment process as a follow-up to the fulfillment of resources in several positions as well as employee turnover due to the entry of retirement, resignation and personal additions to create a proportional employee composition.

Until the end of 2021, the additional / removal of employees is as follows:

Alasan Keluar Reason	2021	2020	2019
Pensiun Normal Normal Retirement	28	43	22
Pensiun Dini Early retirement	5	1	5
Habis kontrak End of the contract	30	85	17
Meninggal Passed Away	2	1	0
Mengundurkan diri Resign	10	14	13
Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Violation	0	0	1
Jumlah Total	75	144	58

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Sebagai wujud komitmen PPI dalam memperlakukan karyawan sebagai aset penting bag perseroan, maka seluruh jajaran manajemen senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja Perseroan.

Selain itu, perseroan juga telah menetapkan seperangkat kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, antara lain:

Employee Remuneration and Welfare

As a manifestation of PPI's commitment to treating employees as important assets for the Company, all levels of management always comply with the laws and regulations governing the workforce, especially in terms of the provisions of the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) applicable in their respective regions.-each work unit of the Company.

In addition, the Company has also established a set of compensation programs for employee welfare and facilities to improve the welfare and productivity of each employee, including:

Uraian Description	Tetap Permanent	Tidak Tetap Contract
Perawatan Pengobatan Perawatan Pengobatan	✓	✓
Akomodasi & Transportasi Akomodasi & Transportasi	✓	✓
Kematian & Perhelatan Kematian & Perhelatan	✓	✓
Transport Lokal Transport Lokal	✓	✓
Pensiun/Pesangon Pensiun/Pesangon	✓	✓
Cuti Tahunan Cuti Tahunan	✓	✓
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	✓	✓
THR THR	✓	✓

Reward dan Punishment

PPI memiliki sistem *reward* dan *punishment* yang diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran PPI. Perseroan memberikan *reward*, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. Insentif performansi adalah

Reward and Punishment

PPI has a reward and punishment system which is clearly regulated in the Collective Labor Agreement (PKB).

The implementation of Reward and Punishment aims to improve the performance of each employee. Rewards are given to motivate employees in achieving optimal performance targets so as to support the achievement of the Company's targets. PPI provides both financial and non-financial rewards, which are adjusted to the ability of the Company. Performance incentives are a form of

salah satu bentuk reward yang diberikan perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI). Selain itu, perseroan juga memberikan apresiasi bagi pekerja berkinerja istimewa berupa setiap 3 Bulan mendapatkan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) dimana penilaian tersebut dapat berdampak kepada besaran pemberian tunjangan kinerja.

Punishment diterapkan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari. Perseroan memberikan *punishment* sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku meliputi teguran, surat peringatan dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Sepanjang tahun 2021, perseroan telah memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan nominal uang kepada karyawan yang memiliki masa kerja 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 Tahun sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atas pengabdian dan dharma bakti karyawan pada perusahaan.

Program Persiapan Masa Pensiun

Persiapan Masa Pensiun tahun 2022 belum dilakukan dikarenakan tidak terdapat di RKAP. Pelatihan Masa Persiapan Pensiun adalah bentuk *reward* perusahaan atas dedikasi para karyawan melalui pembekalan pada aspek psikologis, kesehatan, keuangan, wirausaha dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan Persiapan Masa Pensiun tidak hanya sebatas *virtual class*, namun juga dilengkapi dengan kunjungan *virtual*.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

PPI memiliki SDM dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, perseroan menerapkan prinsip nondiskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM serta memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karier tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Hubungan Industrial

PPI berupaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Untuk melaksanakan hubungan tersebut, PPI membentuk Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai wadah untuk

reward given by the Company to employees based on the results of the Monthly Performance Assessment and achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets. In addition, the Company also gives appreciation for special performing employees in the form of every 3 months getting Key Performance Indicator (KPI) Assessments where this assessment may have an impact on the amount of performance allowances.

Punishment is applied to prevent all forms of violations committed by employees so that things that hinder or interfere with the smooth running of work activities can be avoided. The Company provides punishment according to the level and type of applicable sanctions. The types of sanctions that apply include warnings, warning letters and other sanctions that are adjusted to the level of violation.

Throughout 2021, the Company gave awards in the form of a Charter of Appreciation and money to employees with 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 years of service as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB) for their dedication at the company.

Retirement Preparation Program

Preparation for the 2022 Retirement Period has not been carried out because it is not contained in the RKAP. Retirement Preparation Period Training is a form of company reward for the dedication of employees through briefing on psychological aspects, health, finance, entrepreneurship and so on. The implementation of the Retirement Preparation Training is not only limited to virtual classes, but is also equipped with virtual visits.

Gender Equality and Employment Opportunities

PPI has human resources from various backgrounds. Therefore, the Company applies strict and consistent principles of non-discrimination in HC management and has policies for acceptance, performance appraisal, remuneration and career development regardless of ethnicity, religion, race, class, gender and physical condition.

Industrial Relations

The Company strives to create a conducive, open, positive and progressive working climate in order to create harmonious, dynamic, and fair industrial relations. To carry out this relationship, the Company formed the Labor Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) as a forum for association in expressing its



berserikat dalam menyampaikan aspirasinya. Serikat Pekerja PPI memosisikan dirinya sebagai mitra dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Secara umum kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan SDM (hubungan industrial) di Perseroan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perseroan melakukan sosialisasi dan melaksanakan program penggajian (remunerasi) serta memberikan fasilitas lainnya di luar remunerasi yang bertujuan untuk mendukung tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pengelolaan SDM di Masa Pandemi COVID-19

Penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Manajemen Perusahaan yaitu :

- Optimalisasi jam kerja dengan pola WFH/WFO dengan waktu kerja.
- Membatasi interaksi langsung dengan rekan kerja (*physical distancing*).
- Minimalisasi tamu yang datang dan optimalisasi persyaratan kunjungan tamu ke kantor.
- Maksimalkan rapat internal maupun eksternal dengan fasilitas daring.
- Wajib mengenakan masker apabila keluar rumah, termasuk saat bekerja di kantor.
- Melakukan pelaporan kondisi kesehatan pegawai maupun keluarga pegawai kepada Tim *Task Force The New Normal* apabila mengalami gejala COVID-19.
- Kooperatif dan jujur dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim *Task Force The New Normal* dalam hal *tracing* penyebaran COVID-19.

REALISASI PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2021

Berikut ini merupakan realisasi program kerja SDM PPI tahun 2021, antara lain:

- Berdasarkan Rancangan Penggabungan Perusahaan PT PPI (persero) dengan PT BGR (Persero) tanggal 24 september 2021 dan akta penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) nomor 5 tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H, notaris di Jakarta Selatan maka telah dilakukan: Peralihan status pegawai ex PT BGR menjadi pegawai PT PPI, adanya penugasan pegawai ke anak perusahaan PT PPI yaitu PT BLI, adanya penempatan pegawai ex PT BGR di pegawai PT PPI.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2022

Tantangan tahun 2022 akan semakin kompleks,

aspirations. The Labor Union of PPI positions itself as a partner in the implementation of industrial relations.

In general, HC management and implementation activities (industrial relations) in the Company are carried out in accordance with the provisions agreed in the Collective Labor Agreement (PKB). The Company conducts socialization and implements a payroll program (remuneration) and provides other facilities outside of remuneration aimed at supporting the level of welfare of employees and their families in accordance with established policies.

HC Management during the COVID-19 Pandemic

The implementation of health protocols that have been determined by the Company's Management, namely:

- Optimizing working hours with WFH/WFO pattern with working time.
- Limiting direct interaction with co-workers (physical distancing).
- Minimizing guest arrivals and optimizing guest visit requirements to the office.
- Maximizing internal and external meetings with online facilities.
- It is mandatory to wear a mask when leaving the house, including when working in the office.
- Reporting the health condition of employees and their families to The New Normal Task Force Team if they have COVID-19 symptoms.
- Being cooperative and honest in conveying the information needed by The New Normal Task Force Team in terms of tracing the spread of COVID-19.

REALIZATION OF HC WORK PROGRAM IN 2021

The following is the realization of the Company's HC work program in 2021, including:

- Based on the Company Merger Plan PT PPI (Persero) with PT BGR (Persero) dated September 24, 2021 and the deed of merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) with PT Bhandha Ghara Rekza (Persero) number 5 dated December 2, 2021 drawn up before Aulia Taufani S.H. , a notary in South Jakarta, the following have been carried out: The status transfer of former employees of PT BGR to PT PPI employees, the assignment of employees to a PT PPI subsidiary, namely PT BLI, the placement of former employees of PT BGR in PT PPI.

HC DEVELOPMENT FOCUS PLAN IN 2022

The challenges in 2022 will be increasingly complex, espe-

terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan telah memukul berbagai aktivitas ekonomi, baik dari sisi *supply* maupun *demand* dalam kegiatan usaha perseroan. Ke depan, PPI telah menyusun rencana dan strategi fokus dalam pengembangan SDM diantaranya :

- Pengembangan kapabilitas organisasi melalui PPI Academy dalam bentuk PPI *Development Program* (talenta BOD-3 hingga talenta BOD); PPI Pembelajar (PPIJAR); seminar / *training* / *workshop* / sertifikasi; pengembangan talenta milenial; *blueprint knowledge management*
- Survei *employee engagement*
- Evaluasi KPI Individu yang Objektif, Terukur dan Terintegrasi melalui HRIS
- Meningkatkan Kedisiplinan Karyawan melalui kebijakan dan prosedur yang berlaku di SDM (MySiska)

cially in the midst of the ongoing COVID-19 pandemic which has hit various economic activities, both in terms of supply and demand in the Company's business activities. Going forward, PPI has prepared plans and strategies to focus on HC development including:

- Development of organizational capabilities through the PPI Academy in the form of the PPI Development Program (BOD-3 talents to BOD talents); PPI Learners (PPIJAR); seminar / training / workshop / certification; millennial talent development; knowledge management blueprint
- Employee engagement survey
- Objective, Measurable and Integrated Individual KPI Evaluation through HRIS
- Improvement of Employee Discipline through policies and procedures that apply in HC (MySiska)





TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berperan penting untuk meningkatkan daya saing PPI. Untuk itu, PPI terus berupaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi guna membawa perseoran mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan di industri, di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, PPI memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dengan efektif.

PPI memiliki tata kelola Teknologi Informasi yang menjadi dasar acuan Teknologi Informasi dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan Teknologi Informasi telah sesuai dengan pencapaian tujuan PPI. Tata kelola Teknologi Informasi terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan Teknologi Informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya Teknologi Informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait Teknologi Informasi.

Secara garis besar, pengelolaan sistem Teknologi Informasi PPI mengacu pada:

1. Per-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Per-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Per-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
3. Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Kelola Teknologi Informasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 16/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018, dengan pengaturan lebih rinci tercantum dalam dokumen PPI No. Dokumen F-II/POB/PPI/IX/2018. POB Tata Kelola Teknologi Informasi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan mengenai tata kelola dan mekanisme tata kelola Teknologi Informasi PPI.

Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Teknologi Informasi sehingga dapat menunjang perkembangan Teknologi Informasi di dalam perusahaan. Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal,

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND GOVERNANCE

Optimizing the use of Information Technology (IT) plays a significant role in increasing the competitiveness of PPI. To that end, PPI continuously strives to utilize Information Technology to assist the Company in achieving accelerated business growth as well as accommodating changes in the industry, where PPI runs its business activities. In addition, PPI utilizes Information Technology to provide the best service and effectively minimize business operational risks.

PPI has Information Technology governance which is the basis of reference in the management and development of corporate Information Technology. The reference aims to ensure that the implementation of Information Technology is in accordance with the achievement of PPI's objectives. Information Technology governance consists of a policy structure and a set of processes that are useful for optimizing Information Technology benefits and opportunities, controlling the use of Information Technology resources, and managing Information Technology-related risks.

In general, the management of PPI's Information Technology system refers to:

1. Per-02/MBU/02/2018 concerning Information Technology Governance Principles of the Ministry of State-Owned Enterprises.
2. Per-03/MBU/02/2018 concerning Amendments to Per-02/MBU/02/2018 concerning Information Technology Governance Principles of the Ministry of State-Owned Enterprises.
3. Standard Operating Procedures (SOP) for Information Technology Governance established based on the Decree of the Board of Directors Number: 16/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018, with more detailed arrangements listed in PPI's document No. Document F-II/POB/PPI/IX/2018. The Information Technology Governance SOP regulates matters relating to the provisions/regulations regarding PPI's Information Technology governance and governance mechanisms.

The dynamic development of the Information Technology world must be accompanied by an increase in the quality and competence of Information Technology HR so that it can support the development of Information Technology within the Company. Thus, PPI is committed to continuing to provide internal

khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki. Selain itu, perseoran juga menjadikan *self learning and information seeking* sebagai kompetensi dasar bagi SDM Teknologi Informasi.

RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Divisi Teknologi Informasi (“Divisi TI”) bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan strategi penerapan sistem informasi guna mencapai tujuan PPI dalam jangka Panjang, serta memberikan arahan terkait perumusan rencana, kebijakan, implementasi sistem informasi jangka panjang dan inovasi terhadap pengelolaan sistem informasi PPI.

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (2020 – 2024)

Penyelarasan strategi bisnis dan Teknologi Informasi menjadi penting untuk menjamin bahwa penentuan proyek-proyek Teknologi Informasi dan skala prioritasnya telah disusun dengan mengacu pada strategi dan kebutuhan bisnis PPI. Inisiatif strategis dan Kebijakan Teknologi Informasi juga diterapkan secara fleksibel sehingga diharapkan dapat mengikuti perubahan dan proses transformasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Implementasi program dan kegiatan Teknologi Informasi PPI berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Teknologi Informasi 2020-2024 yang disusun terintegrasi. Dalam pelaksanaan *roadmap* program 5 tahunan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah menetapkan target utama yang diharapkan dapat terlaksana setiap tahunnya.

Dengan adanya dokumen rencana strategis tersebut, pengembangan Teknologi Informasi di PPI berjalan lebih terarah dan lebih berperan dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan bisnis serta terlibat di dalam transformasi proses bisnis PPI secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah *roadmap* pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

and external training, especially technical training that is in accordance with the Company's needs with the aim of improving the competence of its human resources. In addition, the Company also makes self-learning and information seeking a basic competency for Information Technology HR.

SCOPE AND RESPONSIBILITY

The Information Technology Division (“TI Division”) is in charge and responsible for developing plans and strategies for implementing information system to achieve PPI's long-term goals, as well as providing direction related to the formulation of plans and policies, implementation of long-term information system and innovations in the management of the PPI's information system.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP (2020 – 2024)

Alignment of business and Information Technology strategies is important to ensure that the determination of Information Technology projects and their priority scales have been prepared with reference to PPI's strategy and business needs. Strategic initiatives and Information Technology Policies are also applied flexibly so that they are expected to follow changes and transformation processes that may occur in the future.

The implementation of the Company's Information Technology programs and activities refers to the 2020-2024 Strategic Plan (Renstra) which is prepared in an integrated manner. In implementing the 5-year program roadmap, the Information Technology Division has set the main targets that are expected to be implemented every year.

With the strategic plan document, the development of Information Technology in PPI is more focused and plays a more significant role in supporting and developing business activities as well as being involved in the transformation of PPI's business processes in a sustainable manner.

The following is a roadmap for the implementation of Information Technology activities in the last 5 (five) years:

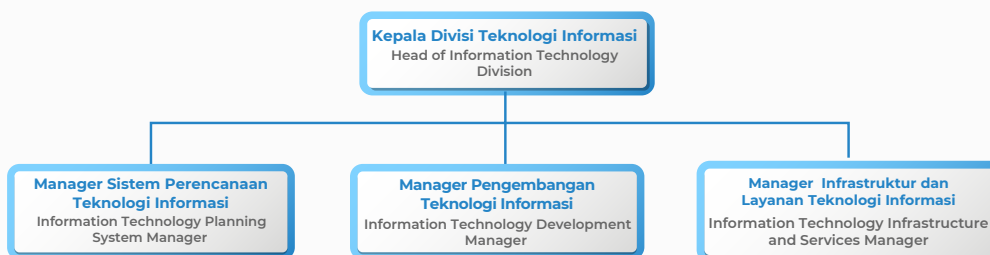


PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 23/DU/SKD/PPI/ XI/2019 perihal Perubahan, Penetapan Nomenklatur, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan bahwa Divisi Teknologi Informasi adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi PPI.

Divisi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi. Per 31 Desember 2021, jumlah personil Divisi Teknologi Informasi adalah sebanyak 12 orang.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi di perseroan:



PARTY RESPONSIBLE FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Referring to the Decree of the Board of Directors No. 23/DU/SKD/PPI/XI/2019 regarding Changes and Determination of Nomenclature, Organizational Structure and Main Duties and Functions, it is determined that the Information Technology Division is the work unit responsible for the preparation and implementation of PPI's Information Technology development program.

The Information Technology Division is led by a Head of Division who reports directly to the Director of Operations. As of December 31, 2021, the number of personnel in the Information Technology Division is 12 people.

The following is the organizational structure of Information Technology management in the Company:

INVESTASI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, Divisi Teknologi Informasi telah merealisasikan sejumlah investasi yang bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional Teknologi Informasi, di antaranya:

1. Implementasi *Pilot Project Sales Force*
2. Penguatan dan peremajaan Information Technology T-Infrastruktur

REALISASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021

Di era globalisasi dan revolusi industri, teknologi memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing yang kuat dalam kegiatan bisnis PPI. PPI terus mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan melakukan pemenuhan kebutuhan bisnis, pada saat yang sama tetap memperhatikan keamanan, keandalan, dan kapabilitas internal Teknologi Informasi PPI. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan bisnis yang lebih cepat, terpercaya dan dapat memberikan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

PPI mengimplementasikan realisasi program pengembangan Teknologi Informasi yang mengacu pada kebijakan internal yang berlaku. Sejalan dengan *corporate plan*, pengembangan Teknologi Informasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis PPI.

Adapun realisasi program Teknologi Informasi di lingkungan perseroan sepanjang tahun 2021, antara lain:

- Optimalisasi dan *Refreshing* ERP
- Aplikasi Digitalisasi Surat
- *Piloting Sales Force*

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2022

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ditahun 2022 akan fokus kepada

- Pengembangan Optimalisasi ERP
- Tata Kelola Teknologi Informasi meliputi Information Technology *Master Plan* dan Information Technology *Maturity*
- Kesiapan INDI 4.0
- Implementasi lanjutan *Sales Force*
- Pengembangan aplikasi: Warung Pangan, MySiska, *Property*, Elmira
- Pengembangan aplikasi pendukung ERP : Arlita-B2 dan *Virtual Account*
- Penguatan Information Technology infrastruktur, jaringan dan keamanan.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2021, the IT Division has realized a number of investments aimed at supporting IT operational activities, including:

1. Pilot Implementation of Sales Force Project
2. Strengthening and rejuvenating IT-Infrastructure

INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAM REALIZATION IN 2021

In the era of globalization and industrial revolution, technology has a central role to increase strong competitiveness in PPI's business activities. PPI continues to implement Information Technology by fulfilling business needs, while paying attention to the security, reliability, and internal capabilities of PPI's Information Technology. This effort is expected to optimize business development that is faster, more reliable and able to provide services to all stakeholders.

PPI implements the realization of an Information Technology development program that refers to the applicable internal policies. In line with the corporate plan, IT development is also carried out on an ongoing basis to support PPI's business operations.

The realization of Information Technology programs in the Company's environment throughout 2021 include:

- ERP Optimization and Refreshing
- Letter Digitization Application
- Sales Force Piloting

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN FOR 2022

The Information Technology Development Plan in 2022 will focus on:

- ERP Optimization Development
- Information Technology Governance including Information Technology Master Plan and Information Technology Maturity
- INDI 4.0 readiness
- Continued implementation of Sales Force
- Application development: Warung Pangan, MySiska, Property, Elmira
- Development of ERP supporting applications: Arlita-B2 and Virtual Account
- Reinforcement of Information Technology infrastructure, network and security.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

6

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



“PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berkomitmen penuh untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan di seluruh tahapan kegiatan operasional untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan agar dapat terus memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan.”

“PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is fully committed to implementing corporate governance best practices at all stages of its operational activities to ensure sustainable performance to continue to benefit stakeholders.”

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN GCG

STATEMENT OF GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

Sebagai BUMN Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) senantiasa menjadi landasan bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Penerapan GCG secara konsisten dilakukan oleh seluruh elemen PPI dengan penuh kesadaran sebagai sebuah budaya kerja yang kuat untuk menghadirkan iklim bekerja yang profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bagi PPI, implementasi GCG tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, akan tetapi lebih dalam daripada itu yakni merupakan praktik sukarela yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemauan tanpa paksaan oleh seluruh organ PPI demi terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan terbaik para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan pemangku kepentingan lainnya (karyawan, regulator, mitra kerja, dan lain-lain).

Penerapan GCG pada jangka panjang diyakini dapat memberikan return ekonomi yang maksimal bagi PPI dan Pemegang Saham, serta dapat mendukung terbentuknya citra dan reputasi positif di mata para Pemangku Kepentingan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha

Untuk itu, PPI selalu berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya dari waktu ke waktu. seluruh insan PPI menyatakan kesungguhan dan komitmen kuat untuk selalu mengedepankan standar etika tertinggi dalam membangun relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut setidaknya tercantum dalam Pakta Integritas yang setiap awal tahun wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

As an SOE, the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) principles has always been the foundation for the Company in carrying out daily business activities. The implementation of GCG is consistently carried out by all elements of PPI with full awareness as a strong work culture to present a professional, accountable and responsible work climate. For PPI, the GCG implementation is not only a form of compliance with applicable laws and regulations, but deeper than that, namely a voluntary practice carried out with full awareness and willingness without coercion by all PPI organs in order to create sustainable added value for the benefit of the shareholders, society in general, and other stakeholders (employees, regulators, partners, and others).

The GCG implementation in the long term is viewed to be able to provide maximum economic returns for PPI and Shareholders, and to be able to support the formation of a positive image and reputation in the eyes of the Stakeholders. Thus, it can be concluded that the GCG implementation is one of the determining factors for business continuity.

For this reason, PPI always strives to improve the quality of its GCG implementation from time to time. All of PPI's personnel express their seriousness and strong commitment to always prioritizing the highest ethical standards in building relationships with various internal and external parties. This commitment is at least stated in the Integrity Pact which must be signed at the beginning of each year by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees.



LANDASAN PENERAPAN GCG

LEGAL BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

Penerapan GCG di lingkungan PPI berpedoman pada sejumlah regulasi normatif, baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007.
2. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

The GCG implementation within PPI refers to a number of normative regulations, both developed by national and international institutions, including the following:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies dated August 16, 2007.
2. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs).
3. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.
4. Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

PRINSIP-PRINSIP GCG DAN IMPLEMENTASINYA

GCG PRINCIPLES AND THEIR IMPLEMENTATION

Penerapan GCG pada lingkup PPI mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan GCG dalam ruang lingkup PPI, antara lain:

The GCG implementation in the scope of PPI refers to the 5 (five) basic principles issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in order to improve the quality of GCG implementation within the scope of PPI, including:

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi di lingkup PPI Implementation within PPI
1	Transparansi Transparency	<p>Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs <i>web</i>: www.ptppi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www.ptppi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.

No.	Prinsip GCG Prinsip GCG	Penjelasan Description	Implementasi di lingkup PPI Implementation within PPI
2	Akuntabilitas Accountability	<p>Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas terhadap seluruh organ PPI.</p> <p>Establishing a clear division of roles, functions and implementation of responsibilities for all PPI Organs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam <i>Board Manual</i> PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh Organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.
3	Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Menjamin kesesuaian antara kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ensuring conformity between day-to-day business operations and applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial PPI (<i>corporate social responsibility</i>); dan • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan. • Complying with the provisions of PPI's Articles of Association and applicable laws and regulations; • Carrying out tax obligations properly and on time; • Carrying out PPI social responsibility activities; and • Carrying out information disclosure obligations in accordance with the aet regulations.
4	Independensi Independency	<p>Pengelolaan PPI dilakukan secara mandiri dan profesional serta terbebas dari segala bentuk tindakan benturan kepentingan dan/atau pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>The management of PPI is carried out independently and professionally and free from any form of conflict of interest and/or influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara Organ PPI; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan perseroan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengambilan keputusan. • Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among PPI's Organs; • Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company; • The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees always avoid conflicts of interest in decision-making process.



No.	Prinsip GCG Prinsip GCG	Penjelasan Description	Implementasi di lingkup PPI Implementation within PPI
5	Kesetaraan Fairness	<p>PPI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.</p> <p>PPI upholds the principles of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business operations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Pemangku Kepentingan berhak memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlakuan yang setara; Membuka kesempatan yang sama dan setara kepada setiap karyawan untuk berkarier dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. All Stakeholders are entitled to receive benefits and equal treatment; Opening equal and fair opportunities for every employee to have a career and carry out their duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GCG

GCG IMPLEMENTATION PURPOSE AND OBJECTIVE

Sebagai entitas BUMN mandiri yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PPI bertujuan untuk:

1. Memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik.
2. Melaksanakan pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja PPI menuju *well governed company*.
3. Memberikan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perusahaan dan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja PPI.

As an independent SOE entity that works professionally and responsibly, the implementation of GCG principles in PPI aims to:

1. Give reassurance to all stakeholders that the Company is managed and controlled to protect the interests of stakeholders in line with the laws and regulations and good governance.
2. Implement compliance with regulations but also as a necessity in improving PPI's performance towards a well-governed company.
3. Provide a reference in determining the Company's policies and targets and a significant contribution to the achievement of PPI's performance.

ROADMAP GCG PPI

COMPANY GCG ROADMAP

PPI menerapkan praktik-praktik bisnis korporasi sehat tercermin melalui penyusunan peta jalan (*roadmap*) GCG yang dirancang secara terstruktur dan komprehensif. Manajemen menggunakan *roadmap* tersebut sebagai referensi utama untuk melakukan sejumlah perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap praktik dan regulasi tata kelola di PPI agar dapat berjalan lebih baik lagi di kemudian hari.

PPI implements sound corporate business practices as reflected in the preparation of a GCG roadmap that is designed in a structured and comprehensive manner. The management uses the roadmap as the main reference to make a number of improvements and quality improvements to governance practices and regulations in PPI so they can run even better in the future.



Sesuai dengan *roadmap* di atas, dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai PPI pada tahun 2022 mendatang adalah:

1. Meningkatkan kinerja PPI t terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perseroan serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan *corporate value*, melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Tercapainya *stakeholder satisfaction* akibat peningkatan *corporate value* dan dividen perseroan.
5. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ PPI.
6. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan PPI kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
7. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan demikian, target PPI untuk menjadi perusahaan aggregator pangan dan logistik yang berbasis digital terbesar di Indonesia dapat tercapai.

In accordance with the roadmap above, it can be seen that the objectives to be achieved by the Company in 2022 are as follows:

1. Increasing the Company's performance by creating a better decision-making process, increasing the Company's operational efficiency and increasing services to stakeholders.
2. Increasing corporate value, by improving financial performance and minimizing the risk of investment decisions containing conflicts of interest.
3. Increasing investor confidence.
4. Achievement of stakeholder satisfaction due to the increase in corporate value and dividends of the Company.
5. Directing and controlling the working relations of the Company's organs.
6. Increasing the accountability of PPI's management to the Shareholders while still taking into account the interests of the stakeholders.
7. Encouraging and supporting business development, management of company resources and risk management more effectively so as to increase company value.

Thus, PPI's target to become the largest digital-based food and logistics aggregator company in Indonesia can be achieved.



UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG TAHUN 2021

EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION IN 2021

Sepanjang tahun 2021, PPI telah melakukan sejumlah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, antara lain melalui:

- Pemutakhiran *Board Manual* pada tanggal 28 Oktober 2021
- Pemutakhiran Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko pada tanggal 26 Maret 2021
- Pengesahan Kebijakan terkait Anak Perusahaan
- Menyusun Laporan Tahunan
- Sosialisasi Anti Gratifikasi & *Whistleblowing System* (WBS) tanggal 11 Mei 2021

Throughout 2021, PPI made a number of efforts aimed at improving the quality of GCG implementation, including by:

- Board Manual update on October 28, 2021
- Update on the Charter of the Audit Committee and the Risk Management Committee on March 26, 2021
- Approval of Policies related to Subsidiaries
- Prepare Annual Report
- Socialization of Anti-Gratification & Whistleblowing System (WBS) on 11 May 2021

PENILAIAN GCG OLEH PIHAK EKSTERNAL

GCG ASSESSMENT BY EXTERNAL PARTY

Sebagai entitas BUMN, PPI memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan tersebut, PPI memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen. Penilaian GCG dilakukan sebagai salah satu upaya PPI untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga PPI dapat mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan aspek perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dasar Pelaksanaan

Penilaian GCG PPI sebagai entitas BUMN mengacu pada sejumlah regulasi normatif, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
2. Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha

As an SOE entity, PPI has an obligation to implement mandated in the Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning GCG Implementation of GCG Practices in SOEs. In accordance with the provisions stipulated in the regulation, PPI has an obligation to carry out measurements of the implementation of GCG on a regular basis, at least once every 2 years by an independent assessor. The GCG assessment is carried out as one of PPI's efforts to improve the quality of GCG implementation so that PPI can determine the level of adequacy of implementation and aspects of improvement that need to be followed up by management.

Legal Basis of the Implementation

PPI's GCG assessment as an SOE entity refers to a number of normative regulations, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
2. Decree of the Minister of State/Head of the Agency for Investment and Development of State-Owned

Milik Negara nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep- 117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002; dan

3. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Kriteria yang Digunakan

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PPI mengacu pada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Hasil Penilaian GCG Tahun Buku 2021

Enterprises number KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 dated May 31, 2000 concerning Development of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (SOE), which was updated by Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number Kep- 117/M-MBU/2002, dated August 1, 2002; and

3. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Criteria Used

The method of measuring GCG implementation within PPI refers to the parameters developed by the Ministry of SOEs in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

GCG Assessment Results for Fiscal Year 2021

Prinsip Principle	Penjelasan Description
Periode Pelaksanaan Penilaian Assessment Period	<p>Periode penerapan GCG di perseroan yang dinilai dalam pelaksanaan <i>assessment</i> GCG ini adalah periode tahun 2021 serta tahun sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Proses penilaian dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>The period of GCG implementation in the Company which is assessed in the implementation of this GCG assessment is the period of 2021 and the year before and after as long as it is related as the basis for making conclusions or assessments. The assessment process is carried out for 30 (thirty) days.</p>
Pihak yang Melakukan Penilaian Assessor	<i>Self Assessment</i>
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	<p>Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011</p>
Kriteria yang Digunakan Criteria Used	<p>Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara..</p> <p>Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.</p>

Aspek Pengujian Assessment Aspect		Bobot Weight	Skor Score	% Pencapaian % Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7	6.924	98.91
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9	8.740	97.11
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35	33.593	95.98
IV	Direksi Board of Directors	35	31.695	90.56
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	6.386	70.96
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	0	0
Total Skor Total Score		100	87.338	87.34
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Classification			Sangat baik Very Good	

Aspek penilaian pada tabel di atas meliputi 43 indikator penilaian dan 153 parameter pengujian. Pada tahun 2021, perseroan memperoleh skor 87,388 dari total bobot sebesar 100, mengalami peningkatan dari hasil penilaian tahun 2020 sebesar 85,18. Berdasarkan hasil penilaian GCG di atas, PPI menerima sejumlah rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti pada masing-masing kriteria dengan ringkasan sebagai berikut:

The assessment aspect in the table above includes 43 assessment indicators and 153 test parameters. In 2021, the Company obtained a score of 87.388 out of a total weight of 100, which was an increase from the results of the 2020 assessment of 85.18. Based on the results of the GCG assessment above, PPI received a number of recommendations for improvement to be followed up on each criterion with a summary as follows:

Aspek Pengujian GCG GCG Assessment Aspect	Jumlah Area Perbaikan Total Improvement Area	Status Tindak Lanjut Follow Up Status
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance		
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	1	80%
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	6	75%
Direksi Board of Directors	13	75%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	3	80%

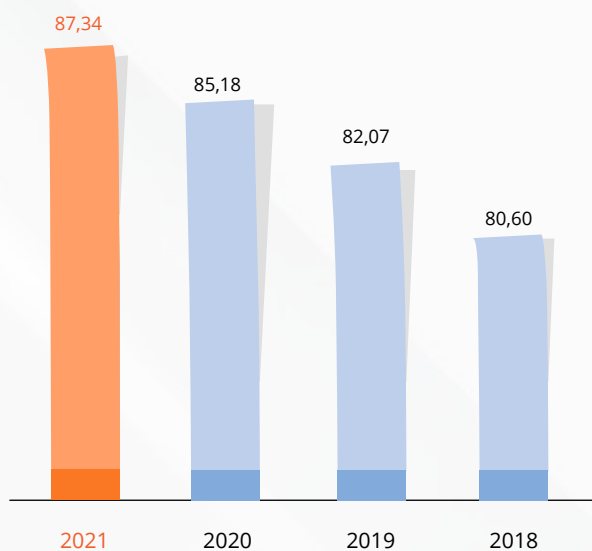
Skor GCG perseroan Tahun 2016, 2018, 2020, dan 2021

Berikut ini adalah skor penilaian GCG PPI selama 4 (empat) tahun terakhir:

The Company's GCG Scores for 2016, 2018, 2020, and 2021

The following is PPI's GCG assessment score for the last 4 (four) years:

Tahun Year	Skor Penilaian GCG GCG Assessment Score	Parameter	Pelaksana Assessor
2021	87,34	SK-16/S.MBU/2012	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2020	85,18	SK-16/S.MBU/2012	PT Citra Solusi Manajemen
2018	82,07	SK-16/S.MBU/2012	PT Citra Solusi Manajemen
2016	80,60	SK-16/S.MBU/2012	Penilai Independen: Andry Maulidi S.si., MM





RENCANA PENINGKATAN KUALITAS GCG TAHUN 2022

GCG QUALITY IMPROVEMENT PLAN IN 2022

Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh pihak penilai akan ditindaklanjuti oleh PPI dalam bentuk rencana aksi perbaikan yang melibatkan para pihak berkepentingan. Oleh karena itu, PPI telah merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk mendorong kualitas penerapan GCG PPI, antara lain:

1. Membentuk Divisi Manajemen Perubahan
2. Memperbarui *Soft Structure* GCG
3. Melakukan perbaikan pada area *Improvement* GCG
4. *Assessment* Indi 4.0
5. Pengukuran *Risk Maturity Index*

All recommendations given by the assessor will be followed up by PPI in the form of a corrective action plan involving interested parties. Therefore, PPI has formulated corrective measures aimed at encouraging the quality of PPI's GCG implementation, including:

1. Establishing a Change Management Division
2. Updating GCG Soft Structure
3. Making improvements to the GCG Improvement area
4. Carrying out Indi Assessment 4.0
5. Measuring Risk Maturity Index

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Infrastruktur GCG

Berpedoman pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseorangan Terbatas (UU PT), organ-organ utama PPI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Mengacu pada Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organ memiliki peranan penting di dalam struktur dan mekanisme GCG serta menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan PPI.

Selain keberadaan organ utama di atas, PPI juga memiliki sejumlah organ pendukung di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

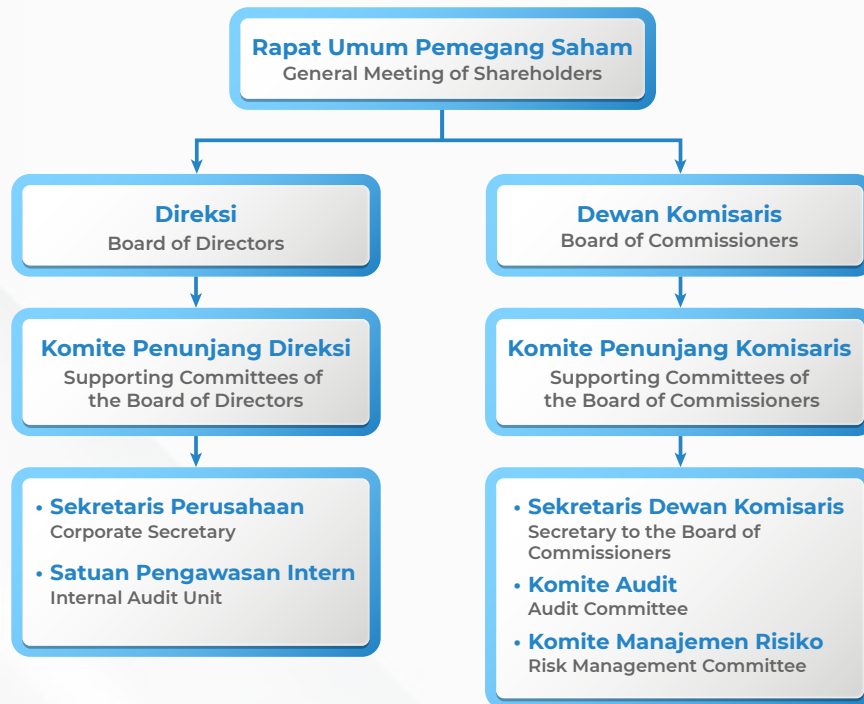
1. Organ pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Manajemen Risiko
2. Organ pendukung Direksi:
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawasan Intern

GCG Infrastructure

Referring to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the main organs of PPI consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Based on PPI's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, each organ has an important role in the structure and mechanism of GCG and carries out their respective functions, duties, and responsibilities for the benefit of PPI.

In addition to the main organs above, PPI also has a number of supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Supporting organs of the Board of Commissioners:
 - a. Secretary to the Board of Commissioners
 - b. Audit Committee
 - c. Risk Management Committee
2. Supporting organs of the Board of Directors:
 - a. Corporate Secretary
 - b. Internal Control Unit



Soft Structure GCG

Penerapan GCG PPI didukung oleh eksistensi kebijakan/ pedoman internal yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan. Hingga akhir 2021, PPI telah menyusun dan mengesahkan sejumlah *Governance Soft Structure*, antara lain:

1. Anggaran Dasar PPI
2. *Code of Conduct*
3. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
4. Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah
5. Kebijakan Anti-Penyuapan
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
7. Piagam Dewan Komisaris
8. Piagam Direksi

Soft Structure GCG

PPI's GCG is supported by internal policies/ guidelines that are in line with the principles of corporate governance. Until the end of 2021, PPI compiled and ratified a number of Governance Soft Structures, including:

1. PPI's Articles of Association
2. Code of Conduct
3. Whistleblowing System Policy
4. Gift Acceptance and Giving Policy
5. Anti-Bribery Policy
6. Gratification Control Guidelines
7. Board of Commissioners Charter
8. Board of Directors Charter



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi PPI yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai batasan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPI. RUPS diselenggarakan setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Pada prinsipnya, RUPS berfungsi sebagai media formal bagi pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya dalam mengemukakan pendapat, memutuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan, dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kinerja PPI.

Mengacu pada pasal 20 Anggaran Dasar, PPI menjalankan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of PPI that has rights and authorities that are not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the limits specified in the laws and regulations and PPIs Articles of Association. GMS is held annually as a form of accountability to shareholders. In principle, the GMS functions as a formal medium for shareholders to exercise their rights in expressing opinions, deciding various strategic policies related to the management of the Company, and obtaining information related to PPI's performance.

Referring to article 20 of the Articles of Association, PPI conducts 2 (two) types of GMS, namely:

RUPS Tahunan Annual GMS	RUPS Lainnya Other GMS
<p>Wajib diselenggarakan setiap tahun sebagai perwujudan tanggung jawab kepada para pemegang saham yang bertujuan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan perseroan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.</p> <p>It is mandatory to be held annually as an embodiment of responsibility to the shareholders which aims to discuss the annual report and annual calculations of the Company and is carried out no later than 6 (six) months after the fiscal year.</p>	<p>Yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.</p> <p>It can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine things that are not carried out at the Annual GMS.</p>

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar, RUPS Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, meliputi:

- a) RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan.
- b) RUPS tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham suatu perusahaan. Per 31 Desember 2021, seluruh saham perseroan (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03 tanggal 9 Juni 2003 dibuat dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., Notaris di Tangerang.

Hak-Hak Pemegang Saham

Berikut ini adalah hak-hak pemegang saham yang harus dan wajib dilindungi oleh PPI, antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;

Furthermore, based on the provisions of article 21 of the Articles of Association, the Annual GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, includes:

- a) GMS regarding the approval of the annual report.
- b) Annual GMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget.

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of a company. As of December 31, 2021, all of the Company's shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia as stated in the Deed No. 03 dated June 9, 2003 made before Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., Notary in Tangerang.

Shareholder Rights

The following are the rights of shareholders that must be protected by PPI, including:

1. Attending the GMS and voting in accordance with the classification and number of shares owned;

2. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
 3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;
 5. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perusahaan dilikuidasi;
 6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);
 7. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perusahaan; dan
 8. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
2. Receiving distribution of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares owned;
 3. Obtaining material information about the Company in a timely and regular manner;
 4. Granting power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them in the GMS;
 5. Receiving proportionally the remainder of the liquidation calculation if the Company is liquidated;
 6. Filing a lawsuit to the District Court against a member of the Board of Directors whose mistake or negligence has caused a loss to the Company (Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights);
 7. Viewing the Register of Shareholders and the Special Register during the Company's office hours; and
 8. Holding a GMS in the event that the Board of Directors fails to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Perlakuan yang Setara Bagi Pemegang Saham

Pemegang saham perseroan adalah kepemilikan tunggal yakni dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun tidak memiliki struktur kepemilikan saham hingga pemilik individu, PPI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pemegang saham sebagai bentuk kesadaran penuh atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Kewenangan RUPS

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun yang menjadi area kewenangan RUPS, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
3. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

Equal Treatment for Shareholders

The Company's shareholders are sole proprietorship which is owned by the Government of the Republic of Indonesia. Although it does not have a share ownership structure to individual owners, PPI still upholds the principles of equality and justice for shareholders as a form of full awareness of the implementation of GCG principles.

GMS Authority

Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the GMS is a Company Organ that has authority that cannot be given to either Board of Commissioners or Board of Directors. The areas of authority of the GMS include:

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Providing decisions needed to protect the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
3. Giving approval to the Annual Report including ratifying the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;



4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

4. Making decisions through an open, fair and accountable process; and
5. Implementing Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

PPI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu:

1. RUPS Pengesahan RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris pada tanggal 30 Januari.
2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2021.

Berikut ini adalah uraian agenda rapat dan hasil keputusan RUPS tahun 2021:

2021 GMS Implementation

PPI has held 2 (two) GMS, namely:

- 1) The GMS Ratification of the RKAP was submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners on January 30.
- 2) GMS Approval of the Annual Report for the Fiscal Year 2020 was submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners on June 30, 2021.

The following is a description of the meeting agenda and the results of the 2021 GMS resolutions:

Tanggal dan Tempat Date and Place	Keputusan Resolution
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 GMS Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021	
Lokasi Place: Video Conference melalui Aplikasi Zoom Meeting Video Conference via Zoom Application	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021. 2) Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. 3) Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. 4) Menyetujui Indikator Aspek Operasional Tahun 2021 untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021.
Tanggal Date: 30 Januari 2021 January 31, 2021	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approved the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 and the Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) for 2021. 2) Established Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021 as set out in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders. 3) Established Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2021 as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders. 4) Approved the 2021 Operational Aspect Indicators for the Measurement of the Company's Soundness Level in 2021.

Tanggal dan Tempat | Date and Place

Keputusan | Resolution

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 | GMS Ratification of the 2020 Annual Report

Lokasi: | Place:

Video Conference melalui Aplikasi Zoom Meeting
Video Conference via Zoom Application

Tanggal: | Date:

30 Juni 2021 | June 30, 2021

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2020
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.
 - 1) Approved the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2020, as well as granted full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and The Company's Board of Commissioners for the management and supervisory actions that had been carried out during the Fiscal Year 2020.
 - 2) Approved the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year 2020 and Ratified Financial Statements of PKBL for the Fiscal Year 2020, as well as granted full settlement and release of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision of the Partnership and Community Development Program that had been carried out during the Fiscal Year 2020.
 - 3) Determined the use of the Company's Consolidated Net Income for the Fiscal Year 2020.
 - 4) Determined the Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2021, as well as tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance in the Fiscal Year 2020.
 - 5) Appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2021 and the Financial Statements for the Micro and Small Business (UMK) Funding Program for the Financial Year 2021.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Pada tahun 2020, PPI menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS dan seluruh hasil keputusannya telah dilaksanakan di tahun 2020. Adapun agenda rapat dan hasil keputusan RUPS tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2020 GMS Implementation

In 2020, PPI held 2 (two) GMS and all of the resolutions were carried out in 2020. The agenda for the meeting and the resolutions of the 2020 GMS are as follows:

Tanggal dan Tempat Date and Place	Keputusan Resolution	Status Pelaksanaan Implementation Status
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 GMS Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2020		
Lokasi Location: Kementerian BUMN Tanggal: Date: 24 Januari 2020 January 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. 2) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2020. 3) Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators/ "KPI"</i>) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 4) Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators/ "KPI"</i>) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 5) Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. <ol style="list-style-type: none"> 1) Approved the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2020 2) Approved the Work Plan and Budget for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL). 3) Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicators/"KPI") of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders in 2020. 4) Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicators/"KPI") between the Board of Commissioners and the Shareholders in 2020. 5) Established Operational Aspect Indicators for Measurement of Company's Soundness Level in 2020. 	Telah direalisasikan di tahun 2020 Were realized in 2020
RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 GMS Ratification of the 2020 Annual Report		
Lokasi Location: Gedung Waskita Rajawali Tower Ruang Rapat Lantai UG Jl. M.T. Haryono, Kav. 12 Jakarta Tanggal: Date: 29 Juni 2020 June 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui Laporan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumago, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam laporan tersebut; 2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumago, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam laporan tersebut; 3) Menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan diputuskan secara tersendiri; 4) a. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumago untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKNL) untuk Tahun Buku 2020; b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut 	Telah direalisasikan di tahun 2020 Were realized in 2020

Tanggal dan Tempat Date and Place	Keputusan Resolution	Status Pelaksanaan Implementation Status
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approved the 2019 Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2019 which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumago, as well as provided full settlement and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that had been carried out in the fiscal year ended December 31, 2019 as long as the action was not a criminal act and reflected in the report; 2) Approved and ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2019 including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumago, as well as provided settlement and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2019, as long as the action was not a criminal act and reflected in the report; 3) Determined the salary/honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020 as well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019, to be decided separately; 4) a. Reassigned the Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumago to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and Report on Partnership and Community Development Program (PKNL) for Fiscal Year 2020; b. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the audit fee and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm. 	

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ utama GCG yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseoran sesuai dengan maksud, tujuan, dan demi kepentingan terbaik PPI, serta bertugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga wajib menjalankan keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan PPI sehingga visi, misi dan sasaran yang telah digariskan di dalam Anggaran Dasar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi wajib mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Masing-masing anggota Direksi memikul tugas dan tanggung jawab secara kolegal, akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan melakukan pengambilan keputusan sesuai

The Board of Directors is the main GCG organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company in accordance with the aims, objectives and best interests of PPI, and is tasked with representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, the Board of Directors is also required to carry out the decisions that have been taken at the General Meeting of Shareholders (GMS), and is responsible for the implementation and management of PPI so the vision, mission and targets outlined in the Articles of Association can be properly realized.

In carrying out its duties and obligations, the Board of Directors is required to fully devote all of its energy, thoughts, attention and dedication by taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. Each member of the Board of Directors assumes duties and responsibilities collegially, but they are still allowed to carry out their duties and make decisions in accordance with their respective duties and authorities. In principle,



dengan pembagian tugas dan kewenangannya. Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Dasar Hukum

Keberadaan organ Direksi di dalam struktur GCG PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku berikut ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- 2) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
- 4) Anggaran Dasar PT PPI (Persero);
- 5) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
- 6) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
- 8) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
- 9) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi wajib bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan independen dengan mengindahkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana diatur dalam *Board Manual* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: dirubah menjadi:35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Board Manual PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

the implementation of tasks carried out by each member of the Board of Directors remains a shared responsibility.

Legal Basis

The existence of the Board of Directors within PPI's GCG structure is in accordance with the following applicable laws and regulations, including:

- 1) Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
- 2) Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- 3) Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
- 4) Articles of Association of PT PPI (Persero);
- 5) Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Reports of SOE Companies;
- 6) Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
- 7) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
- 8) Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
- 9) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

Board of Directors' Board Manual

All members of the Board of Directors are required to act and carry out their duties and responsibilities in a professional, accountable and independent manner by heeding the Guidelines and Work Rules of the Board of Directors as regulated in the Board Manual which has been stipulated based on the Decree of the Board of Directors Number: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 dated October 28, 2021 regarding the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Pada prinsipnya, *Board Manual* mengatur tentang tata laksana kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perseroan.

Adapun isi *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Direksi
2. Persyaratan Direksi
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan Direksi
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
12. Rapat Direksi
13. Organ Pendukung Direksi
14. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
15. Pertanggungjawaban Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegiel telah diamanatkan di dalam *Board Manual* dan Pasal 11 Anggaran Dasar PPI, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
4. Mencerahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
5. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan

In principle, the *Board Manual* regulates effective work management between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistent manner, as well as becomes reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and the Company's mission.

The *Board Manual* as guidelines and work procedures for the Board of Directors regulates the following matters:

1. Functions of the Board of Directors
2. Requirements for the Board of Directors
3. Composition and Membership
4. Term of office
5. Orientation and Competency Development Program
6. Independence of the Board of Directors
7. Ethics of the Board of Directors
8. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Meetings of the Board of Directors
11. Delegation of Authority Among Members of the Board of Directors
12. Meetings of the Board of Directors
13. Supporting Organs of the Board of Directors
14. Relations with Subsidiaries and Affiliates
15. Responsibilities of the Board of Directors

Duties and Responsibilities

The description of the duties and responsibilities of the Board of Directors collegially has been mandated in the *Board Manual* and Article 11 of PPI's Articles of Association, including the following:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and GMS resolutions.
2. Striving for and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives as well as its business activities.
3. Preparing the Company's Long Term Plan.
4. Devoting full energy, thoughts, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.
5. Complying with the Company's Articles of



peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

Association and laws and regulations and implementing the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.

- Preparing the organizational structure of the Company along with details and duties.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing anggota Direksi diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara individu dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

Separation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors is mandated to carry out his duties and responsibilities individually by taking into account the background experience and competencies of each member of the Board of Directors, including the following:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama President Director	Melaksanakan koordinasi tugas anggota-anggota Direksi lainnya dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satuan Pengawas Intern, Legal, Sekretaris Perusahaan, <i>Strategic Planning, Business Development</i> dan staf ahli/penasihat Perusahaan. Coordinating the duties of other members of the Board of Directors and being responsible for the activities of the Internal Audit Unit, Legal, Corporate Secretary, Strategic Planning, Business Development and expert staff/advisors of the Company.
Wien Irwanto*	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management and General Affairs	Menangani akuntansi dan perpajakan, <i>restructuring, pengendalian keuangan, SDM dan General Affairs</i> Handling accounting and taxation, restructuring, financial control, HR and general affairs
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Menangani bidang IT, Produksi, Pengembangan Bisnis dan Manajemen Aset, mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling the IT, Production, Business Development and Asset Management, developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Tri Wahyundo Hariyatno*	Direktur Operasi Director of Operations	Melakukan pengendalian operasional PPI. Carrying out operational control of PPI.

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021

Hak dan Kewenangan

Berikut ini adalah hak dan kewenangan Direksi PPI, antara lain:

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada

Rights and Authorities

The following are the rights and authorities of PPI's Board of Directors:

- Establishing the Company's management policy.
- Regulating the transfer of authorities of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company inside and outside the Court.
- Regulating the transfer of authorities of the

seorang atau beberapa orang pekerja PPI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan.
8. Melakukan aktivitas di luar Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempergunakan saran profesional.
11. Menerima gaji berikut tunjangan/fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
12. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
13. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Periode menjabat Direksi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota

Board of Directors to one or several employees of PPI, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court.

4. Regulating the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations.
5. Appointing and dismissing Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
6. Appointing and dismissing the Corporate Secretary.
7. Giving reward and punishment to the Company's employees based on the Company's employment regulations.
8. Carrying out activities outside the Company that are not directly related to the interests of the Company, such as teaching activities, being the management of business associations and the like, only using a reasonable time and with the knowledge of the President Director or other Directors.
9. Obtaining leave in accordance with applicable regulations.
10. Using professional advice.
11. Receiving salary and other allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS.
12. If the Company achieves a profit level, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their work performance, the amount of which is determined by the GMS.
13. Taking all other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS resolutions.

Composition and Term of Office of the Board of Directors

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years from the date determined by the GMS appointing them and ends at the close of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, but without prejudice to the right of the GMS to be able to dismiss the member of the Board of Directors at any time before the end of their term of office. . Members of the Board of Directors



Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

whose term of office has ended may be reappointed according to the resolution of the GMS for the next 1 (one) term of office.

Jumlah dan komposisi Direksi PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah mempertimbangkan kebutuhan dan skala bisnis PPI demi terealisasinya visi, misi, dan rencana strategis PPI.

The number and composition of PPI's Board of Directors are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and have taken into account the needs and business scale of PPI for the realization of PPI's vision, mission and strategic plans.

Sepanjang tahun 2021, komposisi, dan masa jabatan Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

Throughout 2021, the composition and term of office of the Board of Directors underwent several changes in chronological order as follows:

1 Januari 2021 – 18 Maret 2021 | January 1, 2021 – March 18, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Fasika Khaerul Zaman	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-101/ MBU/04/2020 dated April 2, 2020	2 April 2020 – 18 Maret 2021 April 2, 2020 - March 2021
Prasetyo Indroharto	Direktur Teknik dan Pengembangan Director of Engineering and Development	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-220/ MBU/10/2019 pada tanggal 17 Oktober 2019. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-220/ MBU/10/2019 dated October 17, 2019.	17 Oktober 2019 – 18 Maret 2021 October 17, 2019 – March 18, 2021
Anton Mart Irianto	Direktur Operasi Director of Operations	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-220/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-220/MBU/10/2019 dated October 17, 2019.	17 Oktober 2019 – 18 Maret 2021 October 17, 2019 – March 18, 2021
Eko Budianto	Direktur Komersial Director of Commercial	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-101/ MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	2 April 2020 – 18 Maret 2021 April 2, 2020 – March 18, 2020
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Finance, Human Resource, and General Affairs	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK – 204/ MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK – 204/ MBU/06/2020 dated June 15, 2020.	15 Juni 2020 – 1 Juli 2021 June 15, 2020 – July 1, 2021

18 Maret 2021 – 1 Juli 2021 | March 18, 2021 – July 1, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 92/ MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Maret 2021 – sekarang March 18, 2021 – present
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial and Development	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-92/ MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Maret 2021 – sekarang March 18, 2021 – present
Kindy Rinaldy Syahrir	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Finance, Human Resource, and General Affairs	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK – 204/ MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK – 204/ MBU/06/2020 dated June 15, 2020.	15 Juni 2020 – 1 Juli 2021 June 15, 2020 – July 1, 2021
Eko Budianto	Direktur Komersial Director of Commercial	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-101/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-101/ MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	18 Maret 2021 – 3 Desember 2021 March 18, 2021 – December 3, 2021



1 Juli 2021 – 3 Desember 2021 | July 1, 2021 - December 3, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 92/ MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Maret 2021 – sekarang March 18, 2021 - present
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-92/ MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. / Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	18 Maret 2021 – sekarang March 18, 2021 - present
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management, HR, and General Affairs	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/ MBU/07/2021 concerning Dismissal, Change of	1 Juli 2021 – sekarang July 1, 2021 – present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 april 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-381/MBU/12/2021 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	3 Desember 2021 – sekarang December 3, 2021 – present

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan orang perseorangan sebagai anggota Direksi sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI. Kriteria Direksi PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit; atau
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Criteria for Members of the Board of Directors

All members of the Board of Directors have complied with the provisions of an individual as a member of the Board of Directors as stated in PPI's Articles of Association. The criteria for the Board of Directors of PPI include:

1. Capable of carrying out legal actions.
2. Within 5 (five) years prior to the appointment has never:
 - a. Been declared bankrupt; or
 - b. Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board who is found guilty of causing Company or Public Company to be declared bankrupt; or
 - c. Been sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector.
3. Has a commitment to complying with the laws and regulations;
4. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Company; and
5. Meets other requirements as stipulated in Laws and Regulations concerning Limited Liability Company, capital market regulations and other applicable laws.



Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi PPI mengacu pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 13 hingga ayat 22.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Merujuk pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 34, anggota Direksi PPI diperbolehkan untuk memangku jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi wajib menjaga profesionalisme dan independensinya agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa demi kepentingan terbaik PPI. Berpedoman pada *Board Manual* PPI, Direksi hendaknya menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka anggota Direksi PPI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

Mechanism of Appointment, Dismissal and Resignation of the Board of Directors

The procedure for the appointment, dismissal, and resignation of PPI's Board of Directors refers to Article 10 of PPI's Articles of Association paragraphs 13 to 22.

Policy for Concurrent Positions of the Board of Directors

Referring to Article 10 of PPI's Articles of Association paragraph 34, members of PPI's Board of Directors are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/ institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, administrators and/ or candidates/legislative members and/ or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;
5. Other positions that may cause a conflict of interest.

Disclosure of concurrent positions of all members of PPI's Board of Directors has been presented in the Company Profile Chapter, the Board of Directors Profile sub-chapter, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Directors

The Board of Directors is required to maintain professionalism and independence so that all strategic actions and decisions taken are always in the best interest of PPI. Referring PPI's Board Manual, the Board of Directors should avoid activities that may trigger a conflict of interest either now or in the future. To prevent conflicts of interest, members of PPI's Board of Directors may not hold other positions as:

1. Member of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/ institutions;

4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
5. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Independensi Direksi

Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar masing-masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/ atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Direksi yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Direksi berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya. Dalam rangka menjaga independensi Direksi, maka PPI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- 2) Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 3) Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- 4) Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya.
- 5) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Setiap Anggota Direksi juga membuat Daftar Khusus yang di dalamnya dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/ members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates; and
5. Other positions that may cause a conflict of interest

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by the Company, namely regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors from holding concurrent positions in accordance with applicable laws and regulations to avoid potential conflicts of interest.

Independence of the Board of Directors

The independence of the Board of Directors is one of the important factors that must be maintained so that each member of the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently or free from pressure, influence and/or conflicts of interest with other parties. This sincerity is stated in the independence statement of the Board of Directors which is updated regularly. Members of the Board of Directors are obliged to report if there is a change in status that affects their independence. In order to maintain the independence of the Board of Directors, PPI stipulates the following provisions:

- 1) Apart from the Board of Directors, any other party is prohibited from doing or interfering in the management of the Company.
- 2) The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflict of interest and free from any pressure from any party.
- 3) Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that may interfere with their independence in managing the Company.
- 4) Each member of the Board of Directors is required to make a statement letter free of conflict of interest and report any changes in status that affect their independence.
- 5) All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions which are prohibited by applicable laws and regulations.
- 6) Each Member of the Board of Directors also makes a Special Register in which information is recorded regarding the share ownership of Members of the Board of Directors and their families in the Company and in other companies in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

Hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi di dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Direksi tahun 2021.

Until the end of 2021, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Directors in the decision-making process as stated on the independence statement of the Board of Directors for 2021.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi | Declaration of Independence of the Board of Directors

Aspek Independensi Aspect of Independency	Nina Sulistyowati	Wien Irwanto	Andry Tanudjaja	Tri Wahyundo Hariyatno
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓	✓

Rapat Direksi

Rapat Direksi PPI wajib diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai salah satu mekanisme formal bagi sesama anggota Direksi untuk berdiskusi, merencanakan, dan memantau penerapan strategi dan kebijakan PPI.

Kebijakan Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun dalam hal Direktur Utama berhalangan menghadiri rapat maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Meeting of the Board of Directors

Meetings of PPI's Board of Directors must be held regularly at least once every month. Meeting of the Board of Directors serves as a formal mechanism for members of the Board of Directors to discuss, plan, and monitor the implementation of PPI's strategies and policies.

Meeting Policy of the Board of Directors

Meetings of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more Members of the Board of Directors, at the written request of one or more Members of the Board of Commissioners, or at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

Meetings of the Board of Directors are chaired by the President Director, but in the event that the President Director is unable to attend the meeting, one of the Directors appointed by the President Director shall chair the meeting of the Board of Directors. If the President Director does not make an appointment, then one of the Directors who has served the longest in office as a Member of the Board of Directors shall chair the Meeting of the Board of Directors. In the event that the longest serving Director as a member of the Board of Directors is more than 1 (one) person, then the longest serving

Kebijakan panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Pengambilan keputusan di dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat.

Selain melalui rapat Direksi, Direksi juga dapat mengambil keputusan strategis melalui keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Direksi.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2021, rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 45 kali dengan uraian sebagai berikut:

Director and the oldest in age shall act as chairperson of the meeting.

The policy for calling for a meeting of the Board of Directors is submitted in writing to each member of the Board of Directors within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter period if in an urgent situation without taking into account the date of the summons and the date of the meeting.

Decision making at the Board of Directors meeting is based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by majority vote mechanism. If the number of consenting and dissenting votes is balanced, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting.

Apart from meeting the Board of Directors, the Board of Directors can also make strategic decisions through circular resolution. Decisions taken in this way have the same value as decisions taken legally at the Meeting of Board of Directors.

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2021, Meetings of Board of Directors were held 45 times with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama President Director	45	33	73,33%
Wien Irwanto*	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs	45	21	46,67%
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	45	33	73,33%
Tri Wahyundo Hariyatno*	Direktur Operasi Director of Operations	45	4	8,89%

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021



No.	Nomor Number	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	01/Ris.Radir/PPI/I/2021	4 Januari 2021 / January 4, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan 2020 2. Kebijakan PKWT 3. Pending 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Financial Statements 2020 2. PKWT Policy 3. Pending 2020
2.	02/Ris.Radir/PPI/I/2021	22 Januari 2021 / January 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Konsultan IT <p>Discussion on IT Consultant</p>
3.	04/Ris.Radir/PPI/II/2021	22 Februari 2021 / February 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Region <i>Manager</i> Cabang Pontianak 2. KPI PPI Tahun 2020 3. <i>Updated Project Live Bird</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appointment of Pontianak Branch Manager 2. PPI KPI for 2020 3. Updated Project Live Bird
4.	05/Ris.Radir/PPI/III/2021	8 Maret 2021 / March 8, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama <p>Discussion on Joint Operation Agreement</p>
5.	06/Ris.Radir/PPI/III/2021	9 Maret 2021 / March 9, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Lodan 2. Sewa Mobil Direksi 3. Pembentukan Komite Manajemen Resiko 4. Pembahasan Potensi Koreksi Audit 5. Agenda Strategis Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Lodan Development 2. Board of Directors Car Rental 3. Establishment of a Risk Management Committee 4. Discussion on potential audit corrections 5. Other Strategic Agenda
6.	07/Ris.Radir/PPI/III/2021	16 Maret 2021 / March 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Rencana Sinergi PPI dan Perindo untuk Bisnis Pabrik Pakan Ikan dan Udang 2. Struktur Organisasi 3. PIC Pembangunan Gudang Lodan 4. Biaya Promosi Divisi <i>Marketing</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal of Synergy Plan of PPI and Perindo for Fish and Shrimp Feed Factory Business 2. Organizational Structure 3. PIC for Lodan Warehouse Development 4. Marketing Division Promotion Fee
7.	09/Ris.Radir/PPI/IV/2021	7 April 2021 / April 7, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbal Dagang 2. <i>Profit Planning</i> 3. Kasus Korupsi Pegawai Ex Cabang Gorontalo 4. Aktivitas di Cairo, Mesir 5. Key Initiative PPI - BGR 6. Persiapan Ragab <i>Asset Management</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trade Rewards 2. Profit Planning 3. Corruption Case of Ex Gorontalo Branch Employees 4. Activities in Cairo, Egypt 5. Key Initiative PPI - BGR 6. Preparation of Ragab Asset Management
8.	10/Ris.Radir/PPI/IV/2021	19 April 2021 / April 19, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi Tim Percepatan Pengembangan BUMN Industri Pangan di PPI <p>Organizational Structure of the Food Industry SOE Development Acceleration Team at PPI</p>
9.	11/Ris.Radir/PPI/IV/2021	27 April 2021 / April 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite Anggaran - Analisa Kinerja Q1 dan Program Solusi 2. <i>Updated</i> Optimalisasi Aset Medan dan Semarang - Skema Pembangunan SPBU 3. Trisari Veem <ol style="list-style-type: none"> 1. Budget Committee Meeting - Q1 Performance Analysis and Solution Program 2. Updated Medan and Semarang Asset Optimization - Gas Station Development Scheme 3. Trisari Veem

No.	Nomor Number	Tanggal Date	Agenda Agenda
10.	12/Ris.Radir/PPI/IV/2021	4 Mei 2021 / May 4, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan BOD-3 dan BOD-4 2. Proses Bisnis 3. Paparan Direktur Komersial & Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of BOD-3 and BOD-4 2. Business Process 3. Commercial & Development Director's Exposure
11.	13/Ris.Radir/PPI/IV/2021	10 Mei 2021 / May 10, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim <i>Task Force Account Receivable</i> (TFAR) 2. Proses Bisnis Aset 3. Persiapan Revisi RKAP 2021 4. Toko Grosir Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Task Force Account Receivable (TFAR) Team 2. Asset Business Process 3. Preparation for Revised RKAP 2021 4. Village Grocery Store
12.	14/Ris.Radir/PPI/IV/2021	11 Mei 2021 / May 11, 2021	<p>Tindak Lanjut Surat Dekom Nomor : 08/DK.Eks/PTPPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT PPI (Persero)</p> <p>Follow-up to the Letter of the Board of Commissioners Number: 08/DK.Ex/PTPPI/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners on the Performance of PT PPI (Persero)</p>
13.	15/Ris.Radir/PPI/IV/2021	31 Mei 2021 / May 31, 2021	<p>Umum dan Tindak Lanjut Surat Dewan Komisaris nomor : 22/DK-Int/PTPPI/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI".</p> <p>Follow-up to the Recommendation Letter Number: 08/DI.Ex/PTPN/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestion Board of Commissioners on the Performance of PT PPI (Persero)</p>
14.	16/Ris.Radir/PPI/IV/2021	8 Juni 2021 / June 8, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerjasama PPI dengan Perinus Untuk Pengembangan Bisnis Perikanan 2. <i>Covare Coffee & Lounge</i> 3. Sewa Kendaraan Dinas Direksi PT PPI (Persero) 4. SDM 5. Agenda Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. PPI Cooperation Plan with Perinus for Fisheries Business Development 2. Covare Coffee & Lounge 3. Rent a Vehicle for the Board of Directors of PT PPI (Persero) 4. HR 5. Other Agenda
15.	17/Ris.Radir/PPI/IV/2021	17 Juni 2021 / June 17, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemic Covid 19 di Lingkungan Kerja PT PPI (Persero) 2. Persiapan RUPS Laporan Tahunan 2020 3. Tanggapan Kinerja RKAP 2021 4. <i>Weekly Meeting</i> Pembahasan Proges Penggabungan PPI-BGR 5. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Pandemic Covid 19 in the Work Environment of PT PPI (Persero) 2. Preparation of the 2020 Annual GMS Report 3. Response to 2021 RKAP Performance 4. Weekly Meeting to Discuss the Progress of the Merger of PPI-BGR 5. Others
16.	18/Ris.Radir/PPI/IV/2021	22 Juni 2021 / June 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Bisnis – Departemen Manajemen Vendor 2. Skema kerjasama Perinus 3. Pencapaian Bulan Mei 2021 4. SDM 5. Merger PPI – BGR 6. Anak Perusahaan 7. Tim <i>Task Force Account Receivable</i> 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Process – Vendor Management Department 2. Perinus cooperation scheme 3. May 2021 Achievements 4. HR 5. Merger of PPI – BGR



No.	Nomor Number	Tanggal Date	Agenda Agenda
			<ul style="list-style-type: none"> 6. Subsidiaries 7. Task Force Account Receivable Team 8. Others
17.	19/Ris.Radir/PPI/VI/2021	25 Juni 2021 / June 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Operasi dan Pembayaran 2. Rencana Pergantian Jabatan VP 3. Aset 4. PMO <i>Live Bird</i> dan Toko Grosir Desa 5. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Operation and Payment Procedure 2. VP Shift Plan 3. Asset 4. Live Bird PMO and Village Grocery Store 5. Others
18.	20/Ris.Radir/PPI/VI/2021	29 Juni 2021 / June 29, 2021	<p>Pembahasan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Permasalahan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern</p> <p>Discussion of the Audit Results Report of Specific Objectives on Issues in the Independent Auditor's Report on Compliance with Legislation and Internal Control</p>
19.	21/Ris.Radir/PPI/VI/2021	2 Juli 2021 / July 2, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Proses Rekrutmen VP HSE 2. Usulan Direktur PPI Industri 3. Usulan Mutasi <ul style="list-style-type: none"> 1. HSE VP Recruitment Process 2. Proposal of the Director of PPI Industri 3. Mutation Proposal
20.	22/Ris.Radir/PPI/VI/2021	6 Juli 2021 / July 6, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja 2. Merger 3. Konsultan Merger 4. <i>Review</i> Peraturan Direksi tentang Perubahan Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan. 5. Struktur Organisasi 6. SDM 7. Rencana Akuisisi Saham PT Tri Sari Veem <ul style="list-style-type: none"> 1. Work meeting 2. Merger 3. Merger Consultant 4. Review of the Board of Directors' Regulations concerning Changes in Provisions and Procedures for the Procurement of Non-Commercial Goods and Services. 5. Organizational Structure 6. HR 7. Plan to Acquire Shares of PT Tri Sari Veem
21.	23/Ris.Radir/PPI/VI/2021	15 Juli 2021 / July 15, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. <i>Update</i> dari Direktorat Komersial & Pengembangan 3. Pemaparan Laporan ytd Juni 2021 dan Presentasi oleh <i>Leader Pokja 18</i> <ul style="list-style-type: none"> 1. HR 2. Update from Directorate of Commercial & Development 3. Presentation of the Report on June 2021 and Presentation by Pokja Leader 18
22.	24/Ris.Radir/PPI/VI/2021	19 Juli 2021 / July 19, 2021	<p>Pembahasan Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Permasalahan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</p> <p>Discussion of the Audit Report of Specific Objectives on Issues in the Independent Auditor's Report on Compliance with Laws and Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</p>
23.	25/Ris.Radir/PPI/VI/2021	24 Juli 2021 / July 24, 2021	<p>Pembahasan Struktur Organisasi Pra-Merger</p> <p>Discussion on Pre-Merger Organizational Structure</p>

No.	Nomor Number	Tanggal Date	Agenda Agenda
24.	26/Ris.Radir/PPI/VI/2021	28 Juli 2021 / July 28, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Persiapan <i>Corrective Action</i> Semester II/2021 2. Issue Perizinan Merger PPI – BGR 3. Perinus 4. PPI Industri 5. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Preparation for Corrective Action Semester II/2021 2. PPI – BGR Merger Licensing Issue 3. Perines 4. Industrial PPI 5. Others
25.	27/Ris.Radir/PPI/VI/2021	30 Juli 2021 / July 30, 2021	Penetapan STO STO Determination
26.	28/Ris.Radir/PPI/VIII/2021	4 Agustus 2021 / August 4, 2021	<p>Update Audit Tujuan Tertentu atas Permasalahan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).</p> <p>Update on Specific Purpose Audit on Issues in the Independent Auditor's Report on Compliance with Laws and Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).</p>
27.	29/Ris.Radir/PPI/VIII/2021	24 Agustus 2021 / August 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan: <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Operasi • Manajemen Rantai Pasok • Manajemen Aset • Teknologi Informasi • Operasi Logistik & Pergudangan HSE 2. <i>Update Merger</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation of the: <ul style="list-style-type: none"> • Operations Directorate of Supply Chain Management • Asset Management • HSE Information Technology • Logistics & Warehousing Operations 2. Merger Update
28.	30/Ris.Radir/PPI/VIII/2021	31 Agustus 2021 / August 31, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Follow Up</i> Hasil Rapat TSV dan Pengalihan Bisnis BGR ke TSV 2. Program Strategis Komersial dan Operasi Untuk Kejar Target RKAP 3. Cabang Rugi 4. Progress TFAR 5. Proyeksi Keuangan ytd Agustus 2021 <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow Up on TSV Meeting Results and Transfer of BGR Business to TSV 2. Strategic Commercial and Operational Programs to Pursue RKAP Target 3. Branch Loss 4. TFAR Progress 5. Financial Projection for August 2021
29.	31/Ris.Radir/PPI/IX/2021	7 September 21 / September 7, 2021	Kasus Pegawai Sdr. Edwin Employee case (Edwin)
30.	32/Ris.Radir/PPI/IX/2021	9 September 2021 / September 9, 2021	Pemberian Jasprod Tahun 2020 Bagi Karyawan/ti PT PPI The 2020 Jaspro Award for PT PPI Employees
31.	33/Ris.Radir/PPI/IX/2021	23 September 2021 / September 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Pegawai Sdr. Edwin 2. Dubai Expo 3. Rencana <i>Logistic Project</i> Congo PT TSG Utama Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. Employee Case (Edwin) 2. Dubai Expo 3. PT TSG Utama Indonesia's Congo Project Logistic Plan
32.	34/Ris.Radir/PPI/IX/2021	30 September 2021 / September 30, 2021	Pembahasan <i>Live Bird</i> Discussion on Live Bird
33.	35/Ris.Radir/PPI/IX/2021	6 Oktober 2021 / October 6, 2021	<p>Pemberian Insentif Tahun Buku 2020 Bagi Pekerja Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) Non Tenaga Dasar PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).</p> <p>Provision of Incentives for Fiscal Year 2020 for Non-Basic Outsourcing Workers of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).</p>



No.	Nomor Number	Tanggal Date	Agenda Agenda
34.	36/Ris.Radir/PPI/IX/2021	15 Oktober 2021 / October 15, 2021	1. Kerjasama Aset tentang JOTRC Kota Tua 2. Kerjasama ERP IT 1. Asset Cooperation on the Old Town JOTRC 2. ERP IT collaboration
35.	37/Ris.Radir/PPI/IX/2021	25 Oktober 2021 / October 25, 2021	Updated PMO
36.	38/Ris.Radir/PPI/XI/2021	3 Desember 2021 / December 3, 2021	Pembahasan Struktur Organisasi <i>After Merger</i> Discussion on After Merger Organizational Structure
37.	39/Ris.Radir/PPI/XI/2021	4 Desember 2021 / December 4, 2021	Updated PMO
38.	40/Ris.Radir/PPI/XI/2021	6 Desember 2021 / December 6, 2021	Pembahasan Penetapan BOD-1 dan BOD-2 Discussion on Determination of BOD-1 and BOD-2
39.	41/Ris.Radir/PPI/XI/2021	14 Desember 2021 / December 14, 2021	Laporan Kinerja Program Strategis RKAP RKAP Strategic Program Performance Report

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Direksi Baru

PPI memiliki kebijakan orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai organisasi, aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, serta panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penanggung jawab program orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Dengan adanya kebijakan ini, PPI berharap setiap anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*. Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Direksi baru PPI, meliputi:

a) Program Pengenalan

Dalam rangka membentuk suatu tim kerja yang solid, maka Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat lebih saling mengenal.

b) Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* perseroan di bidang perdagangan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan PPI.

Sepanjang tahun 2021, PPI telah mengadakan program orientasi bagi Direksi baru dengan uraian sebagai berikut:

Orientation/Introduction Program for New Members of the Board of Directors

PPI has an orientation/introduction policy for new members of the Board of Directors so that those concerned get a more comprehensive understanding and knowledge of the organization, business activities, future plans of the Company, as well as work guidelines for the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Corporate Secretary acts as the person in charge of the orientation/introduction program for new members of the Board of Directors.

With this policy, PPI expects each new member of the Board of Directors to be able to carry out their duties and responsibilities as well as possible as stated in the Board Manual. Orientation/Introduction Program for new members of PPI's Board of Directors include:

a) Orientation Program

In order to form a solid work team, the Introduction Program (Orientation) is very important to be implemented so all members of the Board of Directors who come from various backgrounds can get to know each other better.

b) Competency Development Program

The Competency Development Program is important so the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Company's core business in the trade sector and are always ready to anticipate them for the sustainability and progress of PPI.

Throughout 2021, PPI held an orientation program for new members of the Board of Directors with the following descriptions:

1. FGD dengan Kementerian selaku *stakeholder*
2. FGD dengan Komisaris
3. Perkenalan dengan karyawan/ti

Seluruh kegiatan orientasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat, Graha PPI, Jakarta.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2021

Uraian lengkap mengenai daftar kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Direksi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 93.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi PPI telah menjalankan serangkaian tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Manajemen yang sudah disepakati bersama pada awal tahun. Penyusunan Kontrak Manajemen Direksi mengacu pada Peraturan Menteri S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (KPI) dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, yang mana aturan tersebut berlaku surut sejak tahun buku 2021. Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2021 berdasarkan parameter KPI Direksi secara kolegal, antara lain sebagai berikut:

1. FGD with the Ministry as a stakeholder
2. FGD with the Commissioner
3. Introduction to employees

All orientation activities were held at the Head Office, Graha PPI, Jakarta.

Competency Development Program of the Board of Directors in 2021

A complete description of the list of training and competency development activities that have been attended by all members of the Board of Directors throughout 2021 has been presented in the Company Profile Chapter on page 93.

Report on Duty Implementation of the Board of Directors in 2021

Throughout 2021, the Board of Directors of PPI carried out a series of duties and responsibilities as stipulated in the Management Contract which was mutually agreed upon at the beginning of the year. The preparation of the Management Contract for the Board of Directors refers to the Ministerial Regulation S-08/S. MBU/2013 dated January 16, 2013 on Key Performance Indicators (KPI) and Annual Management Contract for the Board of Directors of SOEs, where the rules are retroactive since the fiscal year 2021. The following is a summary of the realization of the duties and responsibilities of the Board of Directors in 2021 based on KPI parameters of the Board of Directors collegially:

No	Uraian Tugas Duty Description	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	% Capaian % Achievement	Skor / Score
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						
1	EBITDA	Rp Miliar / Rp Billion	218,3	(72,04)	(33,00)	-
2	<i>Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio</i>	Kali / Time	1,9	(2,22)	(116,84)	-
3	<i>Net Income</i>	Rp Miliar / Rp Billion	194,1	101,36	52,23	3,66
4	<i>CFO (Cash Flow Operating)</i>	Rp Miliar / Rp Billion	212,0	(74,45)	(35,12)	-
B. Operasional & Sosial / Operations and Social						
5	<i>Stockpoint Terstandarisasi / Standardized Stockpoint</i>	Jumlah / Total	25,0	30,00	110,00	2,20
6	<i>Penambahan Toko Grosir Desa / Addition of Village Grocery Store</i>	Jumlah Toko / Total Shops	70,0	70,00	110,00	3,30
7	<i>Efisiensi Biaya Produksi / Production Cost Efficiency</i>	%	-2%	-18,59	92,938	-
8	<i>Akuisisi Warung Pangan / Warung Pangan Acquisition</i>	Mitra / Partner	60.000	66.185	110,00	5,50

No	Uraian Tugas Duty Description	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	% Capaian % Achievement	Skor / Score
C. Inovasi Model Bisnis / Business Model Inovation						
9	Konsolidasi Holding BUMN Pangan melalui tahapan legal Merger dan Inbreng / SOE Food Holding Consolidation through the legal stages of Merger and Investment	Waktu / Date	April 2021 atau September 2021 / April 2021 or September 2021	November 2021 / November 2021	100,00	10,00
10	Penambahan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya / Addition of Hazardous Material Registered Distributor	Jumlah / Total	5	7	110,0	5,50
11	Pengembangan food kios untuk mendukung warung pangan / Development of food kiosk to support warung pangan	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	September 2021 / September 2021	110,0	4,40
12	<i>Offtake Project Demonstration Farm</i> Dadahup kalimantan Tengah	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Desember 2021 / December 2021	100,00	3,00
D. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership						
13	Inkubasi system IT BGR & PPI yang mendukung bisnis perdagangan / Incubation of BGR and PPI IT systems supporting trading business	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	November 2021 / November 2021	110,00	5,50
14	Pengembangan Aplikasi <i>Sales Force</i> / Sales Force Application Development	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Desember 2021 / December 2021	100,00	2,00
15	<i>Project milestone completion</i> atas implementasi IT <i>masterplan</i> : Implementasi sistem Monalisa untuk penguatan <i>asset</i> klaster pangan / <i>Project milestone completion</i> above IT master plan implementation: Implementation of the Monalisa system to strengthen food cluster assets	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Desember 2021 / December 2021	100,00	3,00
16	<i>Project milestone completion</i> atas digitalisasi <i>core business</i> BUMN Klaster Pangan : Implementasi sistem pemetaan <i>supply demand</i> untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan bisnis <i>Cluster</i> Pangan dari hulu hingga hilir / <i>Project milestone completion</i> for digitizing the core business of SOE Food Cluster: Implementation of supply demand mapping system to integrate all Food Cluster business activities from upstream to downstream	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Desember 2021 / December 2021	100,00	2,00
E. Peningkatan Investasi / Investment Increase						
17	Pelaksanaan kerja sama 2(dua) titik aset dengan skema B.O.T / Implementation of the cooperation of 2 (two) asset points with the B.O.T . scheme	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Proposal	20,00	0,60
18	Pelaksanaan optimalisasi 3 (tiga) titik aset / Optimization of 3 (three) asset points	3	Titik / Point	Proposal	50,00	1,00

No	Uraian Tugas Duty Description	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	% Capaian % Achievement	Skor / Score
19	<i>Project milestone completion</i> atas implementasi kerjasama akuisisi dengan mitra strategis untuk pengelolaan <i>cold storage</i> di Kelapa Gading / <i>Project milestone completion</i> for the implementation of acquisition cooperation with strategic partners for cold storage management in Kelapa Gading	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Kontrak Kerjasama / Work Agreement	75,00	1,50
20	<i>Project milestone completion</i> atas implementasi program optimalisasi asset: Pembangunan <i>cold storage</i> DKI / <i>Project milestone completion</i> on the implementation of asset optimization program: DKI cold storage development	Waktu / Date	Desember 2021 / December 2021	Desember 2021 / December 2021	100,00	2,00
F. Pengembangan Talenta / Talent Development						
21	% <i>Milenial Top Talent</i> / Top Talent Millennial	%	5	60,87	100,00	7,0
22	% Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> / Female in Nominated Talent	%	10	28,57	110,00	8,80
TOTAL BOBOT KPI / KPI SCORE						70,96

Keputusan Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan strategis dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan dan optimalisasi kinerja perseroan pada seluruh aspek bisnis. Seluruh keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Tahun 2021, antara lain:

Decisions of the Board of Directors

Throughout 2021, the Board of Directors made various strategic decisions to support the effectiveness of the management and optimization of the Company's performance in all business aspects. All of these decisions are contained in the Decree of the Board of Directors for 2021, including:

No	Surat Keputusan / Decree	Perihal / Matters
1.	01/DU/SKD/PPI/II/2021	Pembentukan Tim Aset Aktiva Tetap Establishment of Fixed Assets Team
2.	02/DU/SKD/PPI/III/2021	Pembentukan Tim Konten Portal Publik Kementerian BUMN / Establishment of the Ministry of SOE Public Portal Content Team
3.	03/DU/SKD/PPI/III/2021	Perubahan Kedua Pembentukan Pokja <i> Holding Pangan Dan/Atau Merger PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Second Amendment to the Establishment of the Food Holding Working Group and/or the Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)</i>
4.	05/DU/SKD/PPI/IV/2021	Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 / 2021 Holiday Allowance
5.	06/DU/SKD/PPI/IV/2021	Perubahan Pertama Pembentukan Tim Pelaksanaan Imbal PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / First Change to Establishment of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Reward Implementation Team
6.	07/DU/SKD/PPI/VI/2021	PMO Kerjasama Pengembangan Bisnis Perikanan antara PPI dan Perinus / PMO Fishery Business Development Cooperation between PPI and Perinus
7.	08/DU/SKD/PPI/VI/2021	Tim <i>Task Force Account Receivable</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / <i>Task Force Account Receivable Team</i> of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
8.	09/DU/SKD/PPI/VII/2021	Mutasi Pegawai / Employee Mutation
9.	10/DU/SKD/PPI/VII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



No	Surat Keputusan / Decree	Perihal / Matters
10.	11/DU/SKD/PPI/VII/2021	Pengangkatan Pegawai Tetap / Permanent Employee Appointment
11.	12/DU/SKD/PPI/VII/2021	Pengenaan Tarif Sewa Gudang <i>Stock Point</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Imposition of Stock Point Warehouse Rental Rates of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
12.	13/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Determination of the Organizational Structure of the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
13.	14/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Penetapan Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Appointment of Position within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
14.	15/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
15.	16/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Pelaksanaan Pemindahan Anggaran Opex dan Capex / Implementation of Opex and Capex Budget Transfer
16.	17/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Pensiun Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Retirement of Employees at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
17.	18/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
18.	19/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Komite Disiplin PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Disciplinary Committee of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
19.	20/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
20.	21/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Penugasan Rangkap Jabatan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) <i>Vice President</i> Departemen Pengembangan Bisnis / Assignment of Concurrent Positions as Acting Vice President of the Business Development Department
21.	22/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Pengunduran Diri di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Resignation within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
22.	23/DU/SKD/PPI/VIII/2021	Pensiun Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Retirement of Employees at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
23.	24/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pembentukan Tim Seleksi Pengadaan Jasa Konsultan Persiapan Penggabungan PT PPI dengan PT BGR / Establishment of Selection Team for Procurement of Consultant Services Preparation for Merger of PT PPI with PT BGR
24.	27/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pembentukan Tim <i>Task Force Account Receivable</i> / Establishment of Receivable Accounts Task Force Team
25.	28/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pensiun Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Retirement at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
26.	29/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pengangkatan Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Appointment within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
27.	30/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pensiun Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Retirement at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Company (Persero)
28.	31/DU/SKD/PPI/IX/2021	Pembentukan Tim <i>Social Media Rangers</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Establishment of the Social Media Rangers Team of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
29.	32/DU/SKD/PPI/X/2021	Promosi Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Position Promotion PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
30.	33/DU/SKD/PPI/X/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
31.	34/DU/SKD/PPI/X/2021	Penetapan Jabatan / Position Determination
32.	35/DU/SKD/PPI/X/2021	Board Manual PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

No	Surat Keputusan / Decree	Perihal / Matters
33.	36/DU/SKD/PPI/X/2021	Perubahan Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor : 19/DU/SKD/PPI/V/2020 tentang Penunjukan Pengelola Alih Daya Pekerjaan Dan/Atau Tenaga Kerja / Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 19/DU/SKD/PPI/V/2020 concerning Appointment of Managers of Outsourcing of Work and/or Manpower
34.	37/DU/SKD/PPI/X/2021	Pemberian Intensif Tahun Buku 2020 Bagi Pekerja Alih Daya Non Tenaga Dasar PT PPI / Intensive Provision for Fiscal Year 2020 for PT PPI's Non-Basic Outsourcing Workers
35.	38/DU/SKD/PPI/X/2021	Pemberian Insentif retensi Pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Provision of Employee Retention Incentives for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
36.	39/DU/SKD/PPI/X/2021	Berakhirnya Hubungan Kerja Pekerja yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Dan/Atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN / Termination of Employment Relations of Workers who are Appointed as Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners of SOE Companies and Subsidiaries
37.	40/DU/SKD/PPI/XI/2021	Pensiun Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/ Employee Retirement at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
38.	41/DU/SKD/PPI/XI/2021	Pemberian Uang Pisah Bagi Pegawai Yang Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri / Provision of Separate Money for Employees Resigning of Their Own Will
39.	41A/DU/SKD/PPI/XI/2021	Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan / Establishment of the Committee for the Procurement of Non-Commodity Goods and Services
40.	42/DU/SKD/PPI/XII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
41.	41A/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penempatan Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Placement in PT Indonesian Trading Company (Persero)
42.	41A/DU/SKD/PPI/XII/2021	Promosi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Promotion at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
43.	41A/DU/SKD/PPI/XII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
44.	46/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penerimaan Karyawan Eks PT Bhandha Ghara Reksa pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia / Recruitment of Ex-PT Bhandha Ghara Reksa Employees at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
45.	47/DU/SKD/PPI/XII/2021	Status Hubungan Kerja Pekerja yang Menjadi Anggota Direksi/Dewan Komisaris Perusahaan BUMN Atau Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Status of Work Relations of Employees who are Members of the Board of Directors/Board of Commissioners of a State Owned Enterprise or Members of the Board of Directors/Members of the Board of Commissioners of a Subsidiary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
46.	48/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penugasan Karyawan PT PPI ke Anak Perusahaan Yaitu PT BGR Logistik / Assignment of PT PPI Employees to a Subsidiary, namely PT BGR Logistik
47.	49/DU/SKD/PPI/XII/2021	Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PPI Nomor 16/DU/SKD/PPI/V/2020 Tentang Pembentukan tim Evaluasi Calon Direksi dan Calon Komisaris Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Amendment to the Resolution of the Board of Directors of PT PPI Number 16/DU/SKD/PPI/V/2020 Regarding Establishment of the Evaluation Team for Candidates for the Board of Directors and Candidates for Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Subsidiary
48.	51/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Determination of the Organizational Structure of the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
49.	52/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penetapan Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Position Appointment within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Trading Company (Persero)
50.	53/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penetapan Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Position Appointment within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
51.	54/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penetapan Jabatan di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Position Appointment within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



No	Surat Keputusan / Decree	Perihal / Matters
52.	55/DU/SKD/PPI/XII/2021	Mutasi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Transfer within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
53.	56/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penetapan Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Appointment at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
54.	57/DU/SKD/PPI/XII/2021	Promosi Pegawai di Lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Promotion at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
55.	58/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penugasan Rangkap Jabatan Sebagai PLT Kepala Sekretariat Perusahaan / Assignment of Concurrent Positions as Acting Head of Corporate Secretariat
56.	59/DU/SKD/PPI/XII/2021	Penugasan Pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai Direksi PT BGR Logistik Indonesia Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Employee Assignment of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) as Directors of PT BGR Logistik Indonesia, the Subsidiary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memastikan penerapan GCG PPI telah berjalan efektif dan berkelanjutan pada setiap tingkatan organisasi.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris PPI dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. *Level Performance*: Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta menyampaikan masukan/rekomendasi kepada RUPS.
2. *Level Conformance*: Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat yang diberikan telah dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan telah dipatuhi dengan baik.

Dasar Hukum

Keberadaan dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah regulasi normatif yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

The Board of Commissioners is the main organ of the Company which is collectively responsible for carrying out the supervisory function of the general and/or specific management of the company in accordance with the provisions of the Articles of Association and laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners is also tasked with providing advice or recommendations to the Board of Directors regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as ensuring that the implementation of PPI's GCG has been effective and sustainable at every level of the organization.

The supervisory function of PPI's Board of Commissioners is carried out in 2 (two) levels, namely:

1. *Performance Level*: The Board of Commissioners provides direction and guidance to the Board of Directors and submits inputs/recommendations to the GMS.
2. *Conformance Level*: The Board of Commissioners carries out advanced monitoring activities to ensure that the advice given has been carried out and the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been properly complied with.

Legal Basis

The existence and procedures for the appointment or dismissal of PPI's Board of Commissioners refer to a number of applicable normative regulations, including:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;

2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait pemisahan tugas dan wewenang secara jelas, maka Dewan Komisaris senantiasa menjadikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Secara umum, isi pokok *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Komisaris Independen

Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners

In order to enforce the GCG principles, especially regarding the clear separation of duties and authorities, the Board of Commissioners always uses the Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules as a reference in carrying out its duties. The Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules have been regulated in the Board Manual which is stipulated based on the Decree of the Board of Directors Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning First Amendment to the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy on Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In general, the main contents of the Board Manual as guidelines and work procedures for the Board of Commissioners regulate the following matters:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Requirements of the Board of Commissioners
3. Composition and Membership
4. Term of office
5. Orientation and Competency Development Program
6. Independent Commissioner



7. Etika Jabatan Dewan Komisaris
8. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
9. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

7. Ethics of the Board of Commissioners
8. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
9. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
10. Meeting of the Board of Commissioners
11. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
12. Supporting Organs of the Board of Commissioners
13. Accountability of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal, antara lain:

Duties and Responsibilities

As stated in the *Board Manual* of the Board of Commissioners, the following is a collegial description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
<p>1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.</p>	<p>1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;</p>
<p>2. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Complying with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.</p>	<p>2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi; Researching and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors;</p>
<p>3. Memantau dan memastikan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perusahaan. Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably in the Company.</p>	<p>3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP;</p>
<p>4. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan Ensuring that the Board of Directors has established an effective internal control system to secure the Company's assets.</p>	<p>4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company;</p>

Tugas Duties	Tanggung Jawab Responsibilities
<p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. </p>	<p>5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance;</p>
<p>Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.</p>	
<p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.</p>	<p>5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance;</p>
<p>6. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya. Supervising the policies on the management of subsidiaries/joint ventures that have been determined by the Board of Directors, including providing input on these policies and their implementation.</p>	<p>6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta; Researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report including providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested;</p>
<p>7. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS. Conducting an assessment by providing written responses related to the appointment process of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures to be further submitted to the GMS.</p>	<p>7. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Preparing the annual work plan and budget for the Board of Commissioners and including it in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);</p>
<p>8. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Ensuring that the Board of Directors has disclosed important company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.</p>	<p>8. Membentuk Komite Audit; Establishing an Audit Committee;</p>
<p>9. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations</p>	<p>9. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut; Proposing the determination of the External Auditor to the GMS based on the proposal from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the proposed amount of honorarium/ remuneration for the External Auditor;</p>
	<p>10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Making the minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping a copy thereof;</p>



Tugas | Duties

Tanggung Jawab | Responsibilities

11. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada PPI maupun perusahaan lain; | Making a Special Register which contains information regarding the share ownership of Members of the Board of Commissioners and their families in PPI and other companies;

12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; | Providing a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS;

13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. | Carrying out other obligations to carry out the function of supervision and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perseroan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas dan transparan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian masing-masing. Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris, yaitu:

Separation of Duties of the Board of Commissioners

In order for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to run more effectively and efficiently, the Company performs a clear and transparent division of duties and responsibilities to each member of the Board of Commissioners by taking into account the background of their respective expertise. The following is a description of the duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama / President Commissioner	Koordinator atas seluruh bidang pengawasan. Coordinator for all areas of supervision.
Hamli	Komisaris / Commissioner	Koordinator Bidang Teknik, Umum dan Pengembangan dan Anggota Pengawasan 3 (tiga) bidang lainnya, serta Ketua Komite Audit. Coordinator for Engineering, General Affairs and Development and Supervisory Members for 3 (three) other fields, as well as Chairman of the Audit Committee.
Setiawan Wangsaatmaja*	Komisaris / Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Committee
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris / Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

Hak dan Kewenangan

Secara garis besar, Dewan Komisaris PPI mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan, melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Menetapkan pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan komite-komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
5. Dewan Komisaris melalui keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
6. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rights and Authorities

In general, PPI's Board of Commissioners carries out the following duties and responsibilities:

1. Entering yards, buildings and offices used by the Company, viewing books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and other securities as well as examining the Company's assets.
2. If deemed necessary, the Board of Commissioners at the Company's expense for a limited period of time may request the assistance of experts to carry out examinations in accordance with their duties and authorities.
3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company.
4. Determining the separation of work and committee membership among the members of the Board of Commissioners and for the smooth functioning of the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners and committees appointed by the Board of Commissioners can be assisted at the expense of the Company.
5. The Board of Commissioners, through decisions taken in accordance with the procedures for making decisions by the Board of Commissioners, has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to the Company's Articles of Association, or there are indications of committing a loss to the Company or neglecting their obligations, or there is an urgent reason for the Company.
6. If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have a member of the Board of Directors, then the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
7. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive honorarium and allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the provisions stipulated in the Company's regulations and applicable laws and regulations.



Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

Per 31 Desember 2021, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PPI berjumlah 5 (lima) orang dimana 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen, atau setara 40% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Sepanjang 2021, komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris mengalami beberapa kali perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

1 Januari 2021 – 19 Maret 2021 | January 1, 2021 – March 19, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Didi Sumedi	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-379/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-379/MBU/11/2020 dated November 23, 2020.	23 November 2020 – 19 Maret 2021 November 23, 2020 – March 19, 2021
Hamli	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	2 April 2020 – sekarang / April 2, 2020 – present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	2 April 2020 – sekarang / April 2, 2020 – present

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of members of the Board of Commissioners is 5 (five) years from the date determined by the GMS appointing them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, but this provision does not reduce the right of the GMS to be able to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before the their term of office ends. For members of the Board of Commissioners whose term of office has ended, they can be reappointed by the GMS for the next 1 (one) term of office.

As of December 31, 2021, the number and composition of PPI's Board of Commissioners is 5 (five) people, of which 2 (two) are Independent Commissioners, or equivalent to 40% of the total members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of PPI's Board of Commissioners has complied with the prevailing laws and regulations. The position of each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner is equal.

Throughout 2021, the composition and term of office of the Board of Commissioners has changed several times in the following chronology:

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
			(Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	
Panel Baru	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-226/MBU/07/2020 tanggal 6 Juli 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-226/MBU/07/2020 dated July 6, 2020.	6 Juli 2020 – 2 Desember 2021 July 6, 2020 – December 2, 2021
Edy Cahyono	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-200/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-200/MBU/09/2019 dated September 13, 2019.	13 September 2019 – 2 Desember 2021 September 13, 2019 – December 2, 2021

19 Maret 2021 – 2 Desember 2021 | March 19, 2021 – December 2, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises with the number SK-93/MBU/03/2021 dated March 19, 2021 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	19 Maret 2021 - Sekarang March 19, 2021 – present
Hamli	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	April 2020 – Sekarang April 2020 – present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	April 2020 – Sekarang April 2020 – present



Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Panel Barus	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-226/MBU/07/2020 tanggal 6 Juli 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-226/MBU/07/2020 dated July 6, 2020	6 Juli 2021 – 2 Desember 2021 July 6, 2021 – December 2, 2021
Edy Cahyono	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-200/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-200/MBU/09/2019 dated 13 September 2019	13 September 2019 – 2 Desember 2021 September 13, 2019 – December 2, 2021

2 Desember 2021 - Sekarang | December 2, 2021 - present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises with the number SK-93/MBU/03/2021 dated March 19, 2021 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	19 Maret 2021 – Sekarang March 19, 2021 – present
Hamli	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	2 April 2020 – Sekarang April 2, 2020 – present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.	2 April 2020 – Sekarang April 2, 2020 – present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementer	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises with the number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	2 Desember 2021 – sekarang December 2, 2021 – present

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan dan kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar PPI . Kriteria Dewan Komisaris PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PPI; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris PPI mengacu pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 14 hingga ayat 20.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

All members of PPI's Board of Commissioners have met the requirements and qualifications of individuals as members of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Article of Association. The criteria for PPI's Board of Commissioners, among others include:

1. Capable of carrying out legal actions.
2. Within 5 (five) years prior to the appointment never:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
 - c. Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
3. Has a commitment to complying with the laws and regulations;
4. Has knowledge and/or expertise in the fields required by PPI; and
5. Meets other requirements as stipulated in the Limited Liability Company Law, capital market regulations and other applicable laws.

Mechanism of Appointment, Dismissal, and Resignation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the shareholders through the GMS. The procedure for the appointment, dismissal, and resignation of PPI's Board of Commissioners refers to Article 13 of PPI's Articles of Association paragraphs 14 to 20.



Kebijakan Rangkap Jabatan

Merujuk pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 32, anggota Dewan Komisaris PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini: t

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

PPI melarang setiap Insan perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perseroan yang berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial.

Dewan Komisaris diamanatkan untuk menjaga profesionalisme dan independensinya sehingga wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan saat melaksanakan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Mengacu pada kebijakan *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

- a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
- b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- c) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan

Concurrent Position Policy

Referring to Article 13 of PPI's Articles of Association paragraph 32, members of PPI's Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates; and
3. Other positions that may cause a conflict of interest.

Information on concurrent position of all members of the Board of Commissioners of PPI is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners sub-chapter, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

PPI prohibits every employee of the Company from being in a situation that creates a conflict of interest, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company defines a conflict of interest as a conflict of personal economic interest with the economic interest of the Company which has an impact on objectivity and commercial considerations.

The Board of Commissioners is mandated to maintain its professionalism and independence so that it is obliged to manage conflicts of interest when carrying out its supervisory function.

Therefore, the Board of Commissioners should always avoid activities that may trigger a conflict of interest either now or in the future. Referring to the Board Manual policy, members of the Board of Commissioners may not hold other positions as:

- a) Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises.
- b) Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Head/ Deputy Regional Head.
- c) Other positions that may cause a conflict of interest.

PPI requires Members of the Board of

Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan PPI yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris

Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang dapat mempengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris tahun 2021.

Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by PPI, namely regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to hold concurrent positions in accordance with applicable laws and regulations in an effort to avoid potential conflicts of interest.

Independency of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners performs a supervisory function independently or is free from pressure, influence and/or conflicts of interest with other parties. This sincerity is stated in the independence statement sheet of the Board of Commissioners which is updated regularly. Members of the Board of Commissioners are obliged to report if there is a change in status that may affect their independence.

Throughout 2021, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners as stated on the independence statement of the Board of Commissioners for 2021.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris | Declaration of Independence of the Board of Commissioners

Aspek Independensi Aspect of Independency	Herman Heru Suprobo*	Hamli	Setiawan Wangsaatmaja*	Muhammad Kapitra Ampera
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓	✓

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021



KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan terbaik perusahaan.

Mengacu pada keputusan Menteri BUMN SK-102/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 dan SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021, komposisi Komisaris Independen PPI per 31 Desember 2021 berjumlah 1 (satu) orang, yakni Bapak Muhammad Kapitra Ampera. Dengan demikian, PPI telah memenuhi ketentuan UU PT yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen PPI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi perseorangan sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PPI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PPI pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PPI;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama PPI; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PPI.

Profil Komisaris Independen

Profil lengkap Bapak Muhammad Kapitra Ampera selaku Komisaris Independen PPI dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or majority shareholder which may affect his/her ability to act independently in the best interest of the Company.

Referring to the decisions of the Minister of SOEs SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 and SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021, the composition of PPIs Independent Commissioner as of December 31, 2021 consists of one person, namely Mr. Muhammad Kapitra Ampera. Thus, PPI has complied with the provisions of the Limited Liability Company Law which requires that each company must place at least one Independent Commissioner or at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Criteria for Determining Independent Commissioners

All members of PPI's Independent Commissioners have met the requirements and individual qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PPI within the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PPI in the following period;
2. Does not own shares either directly or indirectly in PPI;
3. Has no affiliation with PPI, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the main shareholders of PPI; and
4. Has no business relationship either directly or indirectly related to PPI's business activities.

Profile of Independent Commissioner

The complete profile of Mr. Muhammad Kapitra Ampera as PPI's Independent Commissioner is presented in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen berkewajiban melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan), serta Rapat Dewan Komisaris bersama komite-komite.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Mengacu pada Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar PPI, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan mengikuti rapat, maka rapat tetap dapat berlangsung dan Ketua Rapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling lama atau anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam hal usia.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan mekanisme tersebut disebut keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (Dua Belas) kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Statement of Independence of Independent Commissioners

The Independent Commissioner is obliged to report if there is a change in status that affects his independence. The Secretary of the Board of Commissioners is in charge of ensuring whether this practice has been implemented in accordance with GCG principles.

Meeting of the Board of Commissioners

Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings of the Board of Commissioners, Meetings of the Board of Commissioners inviting the Board of Directors (Joint Meeting), and Meetings of the Board of Commissioners with the committees.

Meeting Policy of the Board of Commissioners

Referring to Article 16 Paragraph (7) of PPI's Articles of Association, the Board of Commissioners Meeting must be held at least once every month and its implementation is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend or is unable to attend the meeting, the meeting can still take place and the Chairman of the Meeting is replaced by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and/or the longest serving member of the Board of Commissioners or the oldest member of the Board of Commissioners in terms of age.

The Board of Commissioners can also make valid decisions without holding a meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners have given their approval on the proposal submitted in writing and signed the agreement. Decisions made by this mechanism are called circular decisions. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting.

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 12 internal meetings of the Board of Commissioners with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	9	9	100%
Hamli	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	1	1	100%
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	12	12	100%

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
8 Januari 2021 / January 8, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Permohonan Tanggapan atas Digitalisasi <i>Core Bisnis</i> (Implementasi ERP) PT PPI (Persero); Pembahasan Permohonan Tanggapan atas Rencana Strategis Teknologi Informasi terintegrasi Bisnis Perdagangan dan Logistik 2020-2024 PT PPI (Persero); Pembahasan Permohonan Persetujuan Program PPI <i>Academy</i>; Pembahasan Permohonan Persetujuan KPI Direksi Individual Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Request for Response to the Digitalization of the Core Business (ERP Implementation) of PT PPI (Persero); Discussion on the Request for Response to the Strategic Plan of Integrated Information Technology for the Trade and Logistics Business 2020-2024 of PT PPI (Persero); Discussion on the Application for Approval of the PPI Academy Program; Discussion on Application for Approval of KPIs for Individual Directors in 2020
14 Januari 2021 / January 14, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan pemberitaan terkait PT PPI (Persero) di Republik Media Online terkait dengan tata niaga sodium sianida dan Jawapos terkait dengan peredaran beras Vietnam; Agenda Strategis Lainnya <ol style="list-style-type: none"> Discussion on news related to PT PPI (Persero) in Republik Media Online related to the trade system of sodium cyanide and Jawapos related to the circulation of Vietnamese rice; Other Strategic Agenda
3 Februari 2021 / February 3, 2021	<p>Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dengan <i>output</i> surat Dewan Komisaris berupa 10 poin yang perlu mendapatkan perhatian Direksi. Discussion on the Company's Performance Evaluation Report with the output of the Board of Commissioners' letter in the form of 10 points that need the attention of the Board of Directors.</p>
21 Mei 2021 / May 21, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Management Bulan April 2021 Laporan Kunjungan Kerja Dekom ke Sumbar; Lain – lain <ol style="list-style-type: none"> Management Report April 2021 Report on the Board of Commissioners' Working Visit to West Sumatra; Other
3 Juni 2021 / June 3, 2021	<p>Laporan dan Pejelasan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko terkait hasil pembahasan kajian Persetujuan Pelampauan <i>Capex</i>. Report and Explanation of the Audit Committee and the Risk Management Committee regarding the results of the discussion of the Capex Exceeding Approval review.</p>
8 Juni 2021 / June 8, 2021	<p>Pembahasan rencana pembelian saham PT TSV Discussion on the plan to purchase shares of PT TSV</p>
22 Juli 2021 / July 22, 2021	<p>Pembahasan rencana revisi RKAP 2021 sebagai tindak lanjut surat Wakil Menteri BUMN I Nomor : S-72/Wk1.MBU/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 perihal Presentasi kepada Wakil Menteri BUMN I mengenai dampak Varian Delta Covid-19 pada klaster/BUMN dan Pengaruhnya terhadap perubahan RKAP tahun 2021.</p>

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
	Discussion on the 2021 RKAP revision plan as a follow-up to the letter of the Deputy Minister of SOE I Number: S-72/Wk1.MBU/07/2021 dated July 7, 2021 regarding Presentation to the Deputy Minister of SOEs I regarding impact of the Covid-19 Delta Variant on the cluster/SOEs and its Effect on the Amendments to the 2021 RKAP.
13 Agustus 2021 / August 13,2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait Surat Dewan Komisaris perihal Penurunan Kinerja Perusahaan; 2. Pembahasan Hasil Valuasi PT TSV <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Letter of the Board of Commissioners regarding Decline in the Company's Performance; 2. Discussion on PT TSV Valuation Results
2 September 2021 / September 2, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Penggantian KAP; 2. Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Kantor Cabang PT PPI (Persero) <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the replacement of KAP; 2. Report of the Working Visit of the Board of Commissioners to PT PPI (Persero) Branch Offices
24 November 2021 / November 24, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Manajemen Bulan Oktober 2021; 2. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Management Performance in October 2021; 2. Others
20 Desember 2021 / December 20, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Manajemen Bulan Oktober 2021; 2. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Management Performance in October 2021; 2. Others
28 Desember 2021 / December 28, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Revisi RKAP Penggabungan 2021; 2. Penataan Organ Dewan Komisaris (Penunjukan Ketua Komite); 3. Penjelasan Penunjukan KAP 2021 <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the 2021 Merger RKAP Revision Report; 2. Organization of the Board of Commissioners composition (appointment of the Committee Chairman); 3. Explanation of the Appointment of KAP 2021

Rapat Gabungan

Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi yang dilakukan secara berkala. Rapat gabungan diselenggarakan sebagai bentuk koordinasi guna membahas isu dan hal-hal strategis terkait pengelolaan perseoran, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi. Di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi umumnya membahas laporan kinerja PPI, mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan Dewan komisaris, serta mendiskusikan masalah atau isu terkini yang sedang dihadapi PPI.

Kebijakan Rapat Gabungan

Pelaksanaan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat gabungan dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Joint Meeting

The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors on a regular basis. Joint meetings are held as a form of coordination to discuss strategic issues and matters related to the management of the Company, as well as a form of implementing the direct supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors. In the joint meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors generally discuss PPI's performance reports, make strategic decisions that require the approval or consideration of the Board of Commissioners, as well as discuss current problems or issues being faced by PPI.

Joint Meeting Policy

The joint meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend, the joint meeting is chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. The decision-making mechanism in joint meetings is carried out by means of deliberation for consensus.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat gabungan bersama Direksi. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di dalam rapat gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 9 (nine) joint meetings with the Board of Directors. The agenda and level of attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the joint meeting are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100%
Hamli	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Setiawan Wangsaatmaja*	Komisaris Commissioner	0	0	0,00%
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama President Director	8	8	100%
Wien Irwanto*	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs	3	3	100%
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	8	8	100%
Tri Wahyundo Hariyatno*	Direktur Operasi Director of Operations	0	0	0,00%

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
4 Januari 2021 / January 4, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan 2020 Pembahasan KPI 2020 Pending 2020 <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the 2020 Financial Statements Discussion on KPI 2020 Pending 2020
25 Maret 2021 / March 25, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Struktur Tata Organisasi Nomenklatur Baru Program Prioritas RKAP 2021 Exit Meeting Audit Eksternal 2020 Strategi Tata Kelola Aset (Properti) Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> New Nomenclature Organizational Structure 2021 RKAP Priority Program External Audit Exit Meeting 2020 Asset (Property) Governance Strategy Others

Tanggal Rapat Meeting Date	Pembahasan Rapat Subject of Meeting
9 April 2021 / April 9, 2021	Rencana Pelepasan Aset PT PPI (Persero) di Semarang dan Medan (Undangan Rapat Nomor : 15/DK.Int.PPI/IV/2021) PT PPI (Persero) Assets Release Plan in Semarang and Medan (Meeting Invitation Number: 15/DK.Int.PPI/IV/2021)
5 Mei 2021 / May 5, 2021	Rencana Pembelian Saham PT Tri Sari Veem Plan to Purchase Shares of PT Tri Sari Veem
31 Mei 2021 / May 31, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Management Bulan April 2021 Progres Rencana Pembelian Saham PT TSV Tanggapan Direksi atas Surat Dewan Komisaris Nomor: 22/DK-Int/PTPPI/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dan Ditindaklanjuti oleh Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) <ol style="list-style-type: none"> Management Report for April 2021 Progress of PT TSV's Share Purchase Plan Response of the Board of Directors to the Letter of the Board of Commissioners Number: 22/DK-Int/PTPPI/V/2021 dated May 17, 2021 concerning Matters that Must be Observed and Followed Up by the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
2 Juni 2021 / June 2, 2021	Pembahasan Persetujuan Pelampauan Anggaran Capex / Discussion on Approval for Exceeding the Capex Budget
16 Agustus 2021 / August 16, 2021	Akuisisi Saham TSV Update Rencana Merger PPI - BGR / TSV Share Acquisition Update on PPI – BGR Merger Plan
9 September 2021 / September 9, 2021	Pembahasan Rancangan Penggabungan Perusahaan / Discussion on Company Merger Plan
15 September 2021 / September 15, 2021	Pembahasan Direktorat Operasi / Discussion on Directorate of Operations

Rapat Dewan Komisaris dengan Komite-Komite

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan bersama Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko dengan uraian sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting with Committees

In 2021, the Board of Commissioners also held 12 (twelve) joint meetings with the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Committee with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Komite Audit Audit Committee				
Hamli	Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee	12	12	100%
Helman Arif	Anggota / Member	12	12	100%
Reinhard Harianja	Anggota / Member	12	12	100%
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee				
Herman Heru Suprobo	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%
Hamli		12	12	100%
M. Kapitra Ampera		12	12	100%
Setiawan Wangsaatmaja		12	12	100%

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Pertemuan Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee				
Setiawan Wangsaatmaja		12	12	100%
Dilza Vierson		12	12	100%
Hertanta		12	12	100%

Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2021

Sepanjang 2021, Dewan Komisaris telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan arahan kepada Direksi sehubungan dengan kinerja Direktorat Operasi, Direktorat Komersil, Direktorat Teknik dan Pengembangan, Direktorat Keuangan, SDM, dan Umum, serta kinerja Cabang dan Anak Perusahaan, kinerja penugasan dan aspek strategis lainnya.

Uraian lengkap mengenai saran dan rekomendasi tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021.

Program Orientasi/Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengenal seluruh aktivitas bisnis PPI dari hulu ke hilir. Untuk itu, perseroan menyediakan Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Komisaris baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik, proses bisnis, serta kondisi-kondisi yang terjadi di PPI.

Dengan begitu, PPI berharap setiap anggota Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimanahkan di dalam *Board Manual*. Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, meliputi:

a) Program Pengenalan

Mempertimbangkan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham dan stakeholders, maka sangat dimungkinkan diantara Anggota Dewan Komisaris tersebut belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Dengan demikian, perseroan menilai keberadaan Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan.

Recommendations and Directions of the Board of Commissioners at the 2021 Joint Meeting

Throughout 2021, the Board of Commissioners submitted a number of recommendations and directions to the Board of Directors regarding the performance of the Operations Directorate, Commercial Directorate, Technical and Development Directorate, Finance, HR, and General Directorate, as well as Branch and Subsidiary performance, assignment performance and other strategic aspects.

A complete description of the suggestions and recommendations has been stated in the 2021 Board of Commissioners Supervisory Report.

Orientation/Introduction Program for New Commissioners

As the main organ that carries out the supervisory function of the management of the company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is required to know all of PPI's business activities from upstream to downstream. To that end, the Company provides an Orientation/Introduction Program for new members of the Board of Commissioners so that they can gain a deeper and comprehensive understanding of the characteristics, business processes, and conditions that occur in PPI.

Thus, PPI hopes that each new member of the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities as well as possible as mandated in the Board Manual. Orientation Program for new members of the Board of Commissioners include:

a) Introductory Program

Considering the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders and stakeholders, it is very possible that the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. Thus, the Company considers the existence of the Introduction Program (Orientation) very important to be implemented.

b) Program Peningkatan Kapabilitas

Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2021, PPI telah mengadakan program orientasi bagi Komisaris baru dengan uraian sebagai berikut:

- Program pengenalan tanggal 2 Desember 2021 untuk Bapak Herman Heru Suprobo sebagai Komisaris Utama, Bapak Hamli dan Bapak Setiawan Wangsaatmaja sebagai Komisaris, serta Bapak Muhammad Kapitra Ampera sebagai Komisaris Independen.
- Acara pisah sambut Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI pada tanggal 16 Desember 2021.

Seluruh kegiatan orientasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat, Graha PPI, Jakarta.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021

Dewan Komisaris telah menyampaikan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021 kepada Menteri BUMN selaku RUPS dengan tembusan kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" Tahun Buku 2020. Berikut ini adalah ringkasan realisasi program kerja, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2021 berdasarkan parameter KPI Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

b) Competency Development Program

The Competency Development Program is one of the important programs so that members of the Board of Commissioners can always update information about the latest developments of the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Throughout 2021, PPI held an orientation program for new Commissioners with the following description:

- Introduction program on December 2, 2021 for Mr. Herman Heru Suprobo as President Commissioner, Mr. Hamli and Mr. Setiawan Wangsaatmaja as Commissioners, and Mr. Muhammad Kapitra Ampera as Independent Commissioner.
- Welcoming ceremony for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PPI on December 16, 2021.

All orientation activities were held at the Head Office, Graha PPI, Jakarta.

Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2021

The Board of Commissioners has submitted the 2021 Board of Commissioners Work Program to the Minister of SOEs as the GMS with a copy to the Board of Directors through the Letter of the Board of Commissioners Number: Number: 06/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 23, 2021 regarding Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" for the Fiscal Year 2020. The following is a summary of the realization of the work program, as well as the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in 2021 based on the KPI parameters of the Board of Commissioners:

No.	Uraian Tugas Duty Description	Target	Realisasi Realization
1	Responsivitas terhadap usulan/permintaan persetujuan/ rekomendasi/tanggapan Dewan Komisaris Responsiveness to the proposal/request for approval/recommendation/response of the Board of Commissioners	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized
2	Pengawasan implementasi <i>Blue Print</i> /Rencanan Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Supervision of the implementation of the Company's Blue Print/Long Term Plan (RJPP)	100% Minimal 1 kali Minimum once	Sudah Dilakukan Has Been Realized

No.	Uraian Tugas Duty Description	Target	Realisasi Realization
3	Pengawasan implementasi RKAP Supervision of RKAP implementation	100% Minimal 12 kali Minimum 12 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
4	Pengawasan sistem pengendalian internal Supervision of Internal Control System	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
5	Pengawasan manajemen risiko Supervision of Risk Management	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
6	Pengawasan sistem teknologi informasi Supervision of information technology system	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
7	Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi) Supervision of HR policies and implementation (including training and remuneration)	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
8	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Supervision of accounting policies and preparation of financial statements	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
9	Pengawasan terhadap seleksi Kantor Akuntan Publik Supervision of the selection of Public Accounting Firms	100% Minimal 1 kali Minimum once	Sudah Dilakukan Has Been Realized
10	Pengawasan terhadap kebijakan pengadaan Supervision of procurement policies	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
11	Pengawasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan Supervision of quality and service policies	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
12	Pengawasan terhadap peraturan perundangan-undangan dan perjanjian pihak ketiga Supervision of laws and regulations and third party agreements	100% Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
13	Tindak lanjut hasil <i>assessment</i> GCG Follow up on the results of the GCG assessment	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized
14	Peningkatan <i>knowledge</i> Dewan Komisaris Increase knowledge of the Board of Commissioners	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized

Selain menjalankan tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris juga melaksanakan Kegiatan Rutin dan Non-Rutin pada tahun ini, di antaranya:

1. Kegiatan Rutin Dewan Komisaris
 - a. Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Dewan Komisaris
 - b. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi
2. Kegiatan Non-Rutin Dewan Komisaris
 - a. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri
 - b. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris
 - c. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)
 - d. Program suksesi kandidat calon Direksi PPI

In addition to carrying out the tasks above, the Board of Commissioners also carried out Routine and Non-Routine Activities this year, including:

1. Routine Activities of the Board of Commissioners
 - a. Internal Meeting of the Board of Commissioners with the Organs of the Board of Commissioners
 - b. Meeting of the Board of Commissioners that includes the Board of Directors
2. Non-routine Activities of the Board of Commissioners
 - a. Doing business trips in the country
 - b. Participating in education and training activities for the Board of Commissioners
 - c. Carrying out Focus Group Discussion (FGD) activities
 - d. Succession program for candidates for PPI's Board of Directors

Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PPI mengemban 2 (dua) tugas pokok, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan dan/atau laporan tertulis atas laporan manajemen yang disusun pada basis triwulanan/ semesteran serta memberikan usulan kepada Menteri BUMN yang sudah disampaikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Dewan Komisaris No. 01/DK.Eks/PPI/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA PKBL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" Tahun 2021;
2. Surat Dewan Komisaris No. 02/DK.Eks/PPI/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 hal Evaluasi Pencapaian Kinerja Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PT PPI");
3. Surat Dewan Komisaris No. 03/DK.Eks/PPI/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 hal Laporan Inefisiensi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" halaman 29;
4. Surat Dewan Komisaris No. 04/DK.Eks/PPI/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 hal Rencana Pemberhentian Sementara Sebagian Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PT PPI");
5. Surat Dewan Komisaris No. 05/DK.Eks/PPI/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Updating Talent Pool PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
6. Surat Dewan Komisaris No. 06/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) /"PT PPI" Tahun Buku 2020;
7. Surat Dewan Komisaris No. 07/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 hal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI Tahun Buku 2021;
8. Surat Dewan Komisaris No. 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" Tahun Buku 2020 (Audited);

Decrees of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PPI carries out 2 (two) main tasks, namely carrying out the supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners submits responses and/or written reports on management reports compiled on a quarterly/semester basis and provides proposals to the Minister of SOEs that have been submitted through the Decree of the Board of Commissioners of 2020, including the following:

1. Letter of the Board of Commissioners No. 01/DK.Ex/PPI/I/2021 dated January 28, 2021 regarding Responses of the Board of Commissioners to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Work Plan and Budget of the Partnership & Community Development Program (RKA PKBL) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI" in 2021;
2. Letter of the Board of Commissioners No. 02/DK.Ex/PPI/II/2021 dated February 8, 2021 regarding Evaluation of Performance Achievement of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ("PT PPI");
3. Letter of the Board of Commissioners No. 03/DK.Ex/PPI/II/2021 dated February 19, 2021 regarding Inefficiency Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI"
4. Letter of the Board of Commissioners No. 04/DK.Ex/PPI/II/2021 dated February 19, 2021 regarding Plan to Temporarily Dismiss Part of the Directors of PT Perusahaan Trading Indonesia ("PT PPI");
5. Letter of the Board of Commissioners No. 05/DK.Ex/PPI/III/2021 dated March 18, 2021 regarding Updating Talent Pool of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
6. Letter of the Board of Commissioners No. 06/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 23, 2021 regarding Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / "PT PPI" for the Fiscal Year 2020;
7. Letter of the Board of Commissioners No. 07/DK.Eks/PPI/IV/2021 dated April 23, 2021 regarding Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm for the General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PPI for the Fiscal Year 2021;
8. Letter of the Board of Commissioners No. 08/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners on the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT



9. Surat Dewan Komisaris No. 11/DK.Eks/PTPPI/VIII/2021 tanggal 25 Mei 2021 hal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun 2021;
10. Surat Dewan Komisaris No. 13/DK.Eks/PTPPI/IX/2021 tanggal 15 September 2021 hal Mohon Arahan atas Rencana Penggantian KAP untuk Audit Umum Laporan Keuangan PT PPI (Persero) Tahun Buku 2021;
11. Surat Dewan Komisaris No. 15/DK.Eks/PTPPI/IX/2021 tanggal 15 September 2021 hal Evaluasi Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2021;

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan atas permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris berikut ini:

1. Surat Dewan Komisaris No. 2/DK.Int/PTPPI/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 hal Teguran dan Tanggapan Dekom Penyampaian *Key Performance Indicator* (KPI) PT PPI (Persero);
2. Surat Dewan Komisaris No. 7/DK.Int/PTPPI/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 hal Persetujuan Penggantian dan Penunjukan Pejabat Kepala Satuan Pengawas Internal;
3. Surat Dewan Komisaris No. 8/DK.Int/PTPPI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Tindak Lanjut Presentasi *Key Performance Indicator* ("KPI") PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
4. Surat Dewan Komisaris No. 11/DK.Int/PTPPI/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian *Key Performance Indicator* ("KPI") PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
5. Surat Dewan Komisaris No. 12/DK.Int/PTPPI/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 hal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Pelepasan Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
6. Surat Dewan Komisaris No. 13/DK.Int/PTPPI/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Struktur Organisasi Satu Tingkat di bawah Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); 30 | H a l a m a n
7. Surat Dewan Komisaris No. 22/DK.Int/PTPPI/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 hal-hal yang

PPI" for the Fiscal Year 2020 (Audited);

9. Letter of the Board of Commissioners No. 11/DK.Ex/PTPPI/VIII/2021 dated May 25, 2021 regarding Proposal for Determining the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) in 2021;
10. Letter of the Board of Commissioners No. 13/DK.Ex/PTPPI/IX/2021 dated September 15, 2021, regarding Request for the Board of Directions on the Plan to Replace KAP for the General Audit of the Financial Statements of PT PPI (Persero) for the Fiscal Year 2021;
11. Letter of the Board of Commissioners No. 15/DK.Ex/PTPPI/IX/2021 dated September 15, 2021 regarding Company Performance Evaluation for Semester I of 2021;

In addition, the Board of Commissioners has provided responses to issues of mutual concern between the Board of Directors and the Board of Commissioners through the following Decree of the Board of Commissioners:

1. Letter of the Board of Commissioners No. 2/DK.Int/PTPPI/I/2021 dated January 8, 2021 regarding Warning and Response of the Board of Commissioners for Submission of Key Performance Indicators (KPI) of PT PPI (Persero);
2. Letter of the Board of Commissioners No. 7/DK.Int/PTPPI/I/2021 dated January 29, 2021 regarding Approval of Replacement and Appointment of the Head of the Internal Supervisory Unit;
3. Letter of the Board of Commissioners No. 8/DK.Int/PTPPI/II/2021 dated February 10, 2021 regarding the Follow-up to the Presentation of Key Performance Indicators ("KPI") of PT Indonesia Trading Company (Persero)/"PT PPI";
4. Letter of the Board of Commissioners No. 11/DK.Int/PTPPI/III/2021 dated March 12, 2021 regarding Response of the Board of Commissioners to the Submission of Key Performance Indicators ("KPI") of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
5. Letter of the Board of Commissioners No. 12/DK.Int/PTPPI/III/2021 dated March 12, 2021 regarding Response of the Board of Commissioners to the Plan for the Disposal of Assets of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/"PT PPI";
6. Letter of the Board of Commissioners No. 13/DK.Int/PTPPI/III/2021 dated March 31, 2021 regarding Organizational Structure One Level under the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Letter of the Board of Commissioners No. 22/DK.Int/PTPPI/V/2021 dated May 17, 2021, matters

harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI";

8. Surat Dewan Komisaris No. 27/DK.Int/PTPPI/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 hal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Anggaran CAPEX Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI";
9. Surat Dewan Komisaris No. 29/DK.Int/PTPPI/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Permohonan Akuisisi Saham PT Tri Sari Veem;
10. Surat Dewan Komisaris No. 37/DK.Int/PTPPI/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 hal Tanggapan atas Perubahan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); k. Surat Dewan Komisaris No. 39/DK.Int/PTPPI/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 hal Penurunan Kinerja Perusahaan;
11. Surat Dewan Komisaris No. 49/DK.Int/PTPPI/IX/2021 tanggal 23 September 2021 hal Tanggapan atas Rencana Pelepasan 1 (satu) Lembar Saham Milik PT PPI pada PT TSV;
12. Surat Dewan Komisaris No. 54/DK.Int/PTPPI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Tanggapan atas Usulan Susunan Direksi dan Komisaris PT BGR Logistik Indonesia;
13. Surat Dewan Komisaris No. 55/DK.Int/PTPPI/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 hal Persetujuan atas Usulan Rancangan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite penunjang di bawah organ Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Komite Audit
- 2) Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menggunakan kriteria dan indikator penilaian yang telah disepakati bersama dengan komite-komite dalam memberikan penilaian tahunan, seperti efektivitas pelaksanaan rapat komite, peran dan dukungan komite-komite terhadap implementasi tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

that must be considered and followed up by the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI";

8. Letter of the Board of Commissioners No. 27/DK.Int/PTPPI/VI/2021 dated June 3, 2021 regarding Responses to Application for Approval for Exceeding the CAPEX Budget for the Development of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI";
9. Letter of the Board of Commissioners No. 29/DK.Int/PTPPI/VI/2021 dated June 9, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners on Application for the Acquisition of Shares of PT Tri Sari Veem;
10. Letter of the Board of Commissioners No. 37/DK.Int/PTPPI/VII/2021 dated July 30, 2021 regarding Responses to Changes in the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); k. Letter of the Board of Commissioners No. 39/DK.Int/PTPPI/VIII/2021 dated August 6, 2021 regarding Decline in Company Performance;
11. Letter of the Board of Commissioners No. 49/DK.Int/PTPPI/IX/2021 dated September 23, 2021 regarding Response to the Plan to Dispose of 1 (one) Shares Owned by PT PPI to PT TSV;
12. Letter of the Board of Commissioners No. 54/DK.Int/PTPPI/XII/2021 dated December 6, 2021 regarding Responses to the Proposed Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT BGR Logistik Indonesia;
13. Letter of the Board of Commissioners No. 55/DK.Int/PTPPI/XII/2021 dated December 10, 2021 regarding Approval of the Proposed Organizational Structure Draft of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Performance Assessment of the Committees Under the Board of Commissioners

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting committees under the organs of the Board of Commissioners, including:

- 1) Audit Committee
- 2) Risk Management Committee

The Board of Commissioners uses assessment criteria and indicators that have been mutually agreed upon with the committees in providing annual assessments, such as the effectiveness of committee meetings, the role and support of the committees for the implementation of corporate governance, as well as compliance with applicable regulations.



Mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana disebutkan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2021.

Referring to the assessment criteria as mentioned above, the Board of Commissioners considers that the committees under the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities well throughout 2021.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DIVERSITY OF COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan keberagaman komposisi dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman berkarier dari masing-masing kandidat, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompleksitas pengembangan bisnis perseroan.

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors always pays attention to the diversity of composition by considering the background of expertise, knowledge, and career experience of each candidate, as well as paying attention to organizational needs and the complexity of the Company's business development.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan pemahaman mengenai sistem manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang cakap pada bidang yang dibutuhkan PPI serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by considering the integrity, dedication, and understanding of the company's management system, having good knowledge and/or expertise in the fields needed by PPI and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the laws and regulations.

Keberagaman komposisi menjadi hal penting karena berperan besar dalam mendukung kepemimpinan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya latar belakang keberagaman tersebut diharapkan alternatif dan perspektif pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan solutif bagi perseroan.

The diversity of the composition is important because it plays a major role in supporting the management, management, division and implementation of the duties of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. With this diversity background, decision-making alternatives and perspectives are expected to consider broader aspects so that appropriate and solution decisions can be made for the Company.

Uraian lebih lengkap mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPI berdasarkan latar belakang pendidikan dan karier profesional dapat dilihat pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

A more complete description of the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI based on educational background and professional career is presented in the profiles of each of the Board of Commissioners and Board of Directors which have been reviewed in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat ringkasan mengenai derajat keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi PPI yang menjabat hingga 31 Desember 2021, antara lain sebagai berikut:

In the following table, a summary of the degree of diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI who had served until December 31, 2021, includes the following:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender		Umur (tahun) Age (Years)			Latar Belakang Pen- didikan / Educational Background			Riwayat Karier Profe- sional / Work History		
		Pria/ Male	Wanita / Female	<30	30-50	>50	Sarja- na / Bach- elor's Degree	Magis- ter/ Mas- ter's Degree	Dok- toral / Doc- torate Degree	BUMN / SOEs	Swas- ta / Private	Peme- rintah / Govern- ment
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama / President Commissioner	✓				✓		✓			✓	✓
Hamli	Komisaris / Commissioner	✓				✓		✓				✓
Setiawan Wangsaatmaja*	Komisaris / Commissioner	✓				✓			✓			✓
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris/ Commissioner	✓				✓			✓	✓		✓
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama / President Director		✓			✓				✓		
Wien Irwanto*	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum / Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs	✓			✓			✓				✓
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan / Director of Commercial & Development	✓			✓			✓				✓
Tri Wahyundo Hariyatno*	Direktur Operasi / Director of Operations	✓			✓			✓		✓	✓	

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihat kepada Direksi. Dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021, Dewan Komisaris secara umum telah menetapkan rencana kegiatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas kinerja Direksi.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial berdasarkan evaluasi atas kinerja perusahaan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RKAP diantaranya sebagaimana tergambar dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI" Tahun Buku 2020 (Audited).

Penilaian kinerja Direksi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, analisis Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta melalui kunjungan langsung Dewan Komisaris ke cabang. Disamping itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko juga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek terkait kegiatan usaha perseroan. Hal tersebut tercermin di dalam laporan-laporan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dalam bentuk evaluasi atas pencapaian target-target KPI Dewan Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham.

Pihak Penilai

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Directors

Performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners as part of its duties and responsibilities in carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In the 2021 Board of Commissioners' Work Program, the Board of Commissioners has generally determined program plan to evaluate and provide an assessment of the performance of the Board of Directors.

In its implementation, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors collegially based on an evaluation of the Company's performance and the achievement of the targets set in the RKAP including as illustrated in the Letter of the Board of Commissioners Number: 08/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners on the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)"/"PT PPI" for the Fiscal Year 2020(Audited).

Indirect evaluation of the performance of the Board of Directors is also carried out by the Board of Commissioners through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, analysis of the Board of Commissioners on reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and through direct visits by the Board of Commissioners to branches. In addition, the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Risk Management Committee also conducts an assessment of various aspects related to the Company's business activities. This is reflected in the reports of the Audit Committee and the Risk Management Committee submitted to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners

In its implementation, the Board of Commissioners conducts measurements and assessments of the performance of the Board of Commissioners collegially in the form of evaluation of the achievement of the KPI targets of the Board of Commissioners for the period of 1 (one) fiscal year as stated in the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners which is submitted to the Minister of SOEs as the shareholder.

Assessor

The evaluation of the Board of Commissioners and

PPI dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pemberian skema kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menentukan keputusan pengangkatan kembali ataupun pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2021 yang telah dilakukan oleh PT Citra Solusi Manajemen, aspek Dewan Komisaris PPI memperoleh skor sebesar 33.593 dari bobot skor maksimal 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 95.98% yang berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan **"Sangat Baik"**.

Sementara itu, aspek Direksi mendapatkan skor 31.695 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 90.56% yang berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan **"Baik"**.

Aspek Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement	
		2021	2020
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35	33,593	33,133
Direksi / Board of Directors	35	31,695	30,528

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh pihak penilai. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor penilaian GCG pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021.

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Penilaian GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh penilai serta akan memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam rencana pelaksanaan tugas tahunan.

Board of Directors of PPI is carried out by the shareholders through the GMS mechanism.

Assessment Results

The results of the performance appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors are used as a basis for consideration in terms of providing compensation schemes for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as for making the decision to reappoint or dismiss the relevant members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Based on the results of the 2021 GCG assessment carried out by PT Citra Solusi Manajemen, PPI's Board of Commissioners aspect obtained a score of 33,593 out of a maximum score of 35,000 or equivalent to an achievement percentage of 95.98% which means that in general the implementation of GCG for the Board of Commissioners Aspect has been running smoothly or **"Very Good"**.

Meanwhile, the Board of Directors aspect got a score of 31,695 out of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 90.56% which means that in general the implementation of GCG for the Board of Directors Aspect has been running with **"good"** predicate.

In the table above, it can be concluded that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully committed to continuously improving the quality of GCG implementation by following up on any recommendations for improvement that have been given by the appraiser. This is reflected in the increase in the GCG assessment score on the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2021.

Follow-up on the Recommendation of GCG Assessment Aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Fiscal Year 2021

The Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to following up on all recommendations for improvement given by the appraiser and will incorporate these recommendations into the annual task implementation plan.



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS namun dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum. Pada pelaksanaannya, rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditinjau secara mendalam dan dibawa ke dalam RUPS agar mendapat persetujuan pemegang saham.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut ini adalah sejumlah indikator utama yang menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan remunerasi Direksi, yaitu:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, antara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;

Policies and Procedures for Determining the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Determining the remuneration scheme for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI is the authority of the shareholders through the GMS mechanism, but with due observance of generally accepted guidelines and procedures. In practice, recommendations regarding the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are proposed by the Board of Commissioners for further in-depth review and brought to the GMS for shareholder approval.

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Directors

Referring to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the following are a number of main indicators that become the basis for consideration in determining the remuneration of the Board of Directors:

1. Business scale factor
2. Business complexity factor
3. Inflation rate
4. Company's financial condition and capability
5. Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

In addition to referring to the above regulations, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors also considers the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the company makes a profit in the relevant fiscal year;
2. Remuneration is given with reference to the development of the trading industry market;
3. Remuneration is provided through the results of measuring the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI);

- 5) Prestasi kerja individu;
- 6) Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya; dan
- 7) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

5. Individual work performance;
6. Fairness with other peer companies; and
7. Consideration of PPI's long-term goals and strategies.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adapun struktur remunerasi yang dibagikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PPI, antara lain sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs), the remuneration structure distributed to the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI are as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris / Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi / Remuneration Structure of the Board of Directors
<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama • The salary of the President Commissioner is 45% of the President Director • The salary of the Commissioner is 90% of the President Commissioner 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama • Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama • The salary of the President Director is as the main reference • The salary of the Director is 90% of the President Director
Tunjangan / Allowance Rp9.720.000	Tunjangan / Allowance Rp27.500.000
Fasilitas / Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance	Fasilitas / Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance
Tantiem Dewan Komisaris / Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.	Tantiem Direksi / Tantiem of the Board of Directors Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, PPI telah membagikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun buku 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Remuneration Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Throughout 2021, PPI provided remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance of the 2020 fiscal year with the following description:

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2021 | Remuneration for the Board of Commissioners in 2021

Nama / Name	Jabatan / Position	Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) / Monthly Remuneration (in 1 Year)	Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2020 (Bersih) / Tantiem for Fiscal Year 2020 (Net)	Remunerasi Total Tahun 2021 / Total Remuneration in 2021	
		Honorarium	Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance			
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama / President Commissioner	508.645.161	101.729.032	64.800.000	0	675.174.194
Hamli	Komisaris / Commissioner	583.200.000	116.640.000	58.320.000	11.724.780	769.884.780
Setiawan Wangsaatmaja*	Komisaris / Commissioner	47.032.258	9.406.452	0	0	56.438.710
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris / Commissioner	583.200.000	116.640.000	58.320.000	32.351.055	790.511.055

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

Remunerasi Direksi Tahun 2021 | Remuneration for the Board of Directors in 2021

Nama / Name	Jabatan / Position	Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) / Monthly Remuneration (in 1 Year)	Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance	Tantiem Tahun Buku 2020 (Bersih) / Tantiem for Fiscal Year 2020 (Net)	Remunerasi Total Tahun 2021 / Total Remuneration in 2021	
		Honorarium	Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance			
Nina Sulistyowati*	Direktur Utama / President Director	1.134.193.548	259.919.355	147.500.000	0	1.541.612.903
Wien Irwanto*	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum / Director of Finance, Risk Management, HR and General Affairs	612.000.000	165.000.000	0	0	777.000.000
Andry Tanudjaja*	Direktur Komersial & Pengembangan / Director of Commercial & Development	964.064.516	259.919.355	129.500.000	0	1.353.483.871
Tri Wahyundo Hariyatno*	Direktur Operasi / Director of Operations	98.709.677	26.612.903	0	0	125.322.581

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021

Jumlah Remunerasi / Total Remuneration	Jumlah Dewan Komisaris / Total Remuneration for the Board of Commissioners	Jumlah Direksi / Total Remuneration for the Board of Directors
Di atas Rp2 miliar / More than Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar / More than Rp1billion- Rp2 billion	-	3
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar / More than Rp500 million – Rp1billion	3	1
Rp500 juta ke bawah / Less than Rp500 million	-	-

Bonus Kerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut:

- Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
- Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - Laba Setelah Pajak;
 - Pencapaian KPI;
 - BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
 - Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.
 - Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
- Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
 - Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama; dan
 - Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

Incentive

Provision of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Regulation of Minister of SOE No. No. PER-12/MBU/11/2020 as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020. The conditions are as follows:

- Tantiem/Incentives can be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners if:
 - Realization of the lowest soundness level score of 70;
 - Minimum KPI achievement of 80% (eighty percent);
 - The opinion issued by the auditor is at least Qualified (WDP);
 - The condition of the Company is not losing more than the previous year for the Company in a loss condition, or the company is not at a loss than before in a profit condition. The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.
- Calculation of Tantiem/Incentives uses internal guidelines set by the Minister of SOEs with the following provisions:
 - The determination of Tantiem takes into account:
 - Profit After Tax;
 - Achievement of KPIs;
 - SOEs that make aggressive long-term investments;
 - SOEs that carry out government assignments; and/or
 - Other factors that can be accounted for in a professional manner.
 - Determination of Performance Incentives takes into account the improvement of PPI's performance and financial capability.
- The composition of the amount of Tantiem/Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the position factors as follows:
 - Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director;
 - President Commissioner: 45% of the President Director; and
 - Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/pengendali.

Disclosing affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders as one of the criteria used to measure the independence of the Board of Commissioners and Board of Directors is presented in the table below, which includes:

1. Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation between members of the Board of Directors and the Majority and/or controlling Shareholders;
4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Majority and/or controlling Shareholders.

In following table, it can be seen that all members of PPI's Board of Commissioners and Board of Directors do not have family and financial relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and majority/controlling shareholders.

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Herman Heru Suprobo*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hamli		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Setiawan Wangsaatmaja*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhammad Kapitra Ampera		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nina Sulistyowati*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wien Irwanto*		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Andry Tanudjaja*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tri Wahyundo Hariyatno*		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*Herman Heru Suprobo menjabat sejak 19 Maret 2021

*Setiawan Wangsaatmaja menjabat sejak 2 Desember 2021

*Nina Sulistyowati, dan Andry Tanudjaja menjabat sejak 18 Maret 2021

*Wien Irwanto menjabat sejak 1 Juli 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno menjabat sejak 3 Desember 2021

*Herman Heru Suprobo has served since March 19, 2021

*Setiawan Wangsaatmaja has served since December 2, 2021

*Nina Sulistyowati, and Andry Tanudjaja have served since March 18, 2021

*Wien Irwanto has served since July 1, 2021

*Tri Wahyundo Hariyatno has served since December 3, 2021

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

INFORMATION ABOUT DIRECT AND INDIRECT MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pengungkapan lebih lanjut mengenai komposisi dan informasi Pemegang Saham PPI sudah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

Further disclosure on the composition and information of PPI's Shareholders has been presented in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS | SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretaris Dewan Komisaris adalah pihak perseorangan yang berasal dari luar perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam kesehariannya, Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat dan berperan membantu jalannya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan jalannya pengurusan PPI oleh Direksi dan segenap jajarannya serta melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris.

The Secretary of the Board of Commissioners is an individual external party who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners regularly assists the Board of Commissioners in providing advice and plays a role in assisting the running of the supervisory function related to the management of PPI by the Board of Directors and all staff as well as carrying out administrative and secretarial tasks related to the activities of the Board of Commissioners.



Dasar Hukum

Keberadaan dan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku berikut ini, yaitu:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
3. Anggaran Dasar PPI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, Sekretaris Dewan Komisaris PPI mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
5. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
6. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
7. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.
8. Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non-rutin Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris

Legal Basis

The existence and appointment of the Secretary to PPI Board of Commissioners refers to the following applicable laws and regulations, namely:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. PP No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs;
3. Articles of Association of PPI.

Duties and Responsibilities

As stated in the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, the Secretary of the Board of Commissioners of PPI carries out a number of main duties and responsibilities as follows:

1. Providing information for the needs of the Board of Commissioners in making decisions.
2. Preparing the necessary materials related to the Board of Directors' routine reports in managing the Company, such as: RKAP, Annual Report, Quarterly Reports, Internal Audit Reports, and other required reports.
3. Preparing the necessary materials or materials related to matters that must obtain a decision from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities carried out by the Board of Directors and all staff.
4. Preparing and coordinating the meeting agenda with the parties present at the meeting.
5. Preparing and sending meeting invitations to those who will attend the meeting.
6. Confirming the time, place, attendance, and other matters deemed necessary for the smooth running of the meeting.
7. Organizing Board of Commissioners meetings, both with other members of the Board of Commissioners and with the Board of Directors and staff or other parties.
8. Making minutes of meetings on the implementation of routine and non-routine meetings of the Board of Commissioners.
9. Submitting minutes of meetings to interested parties.
10. Preparing considerations, opinions, suggestions and other decisions from the Board of Commissioners for Shareholders,

untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.

11. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitennya.
13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.
14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan atau lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya.
 - b. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris, baik internal maupun rapat bersama Direksi.
 - c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris.
 - e. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/ dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Board of Directors and parties related to the management of the Company.

11. Following up on every decision of the Board of Commissioners in the following ways:
 - a. Recording every decision made in decision-making forums and those in charge.
 - b. Monitoring and checking the progress of the implementation of the results of the meeting/consideration of opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners.
 - c. Making efforts to encourage the implementation of follow-up on meeting decisions, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant person in charge.
12. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, for the purposes of the Board of Commissioners and its committees.
13. Implementing and coordinating correspondence and archiving activities.
14. Implementing and coordinating the security of data and documents that are within the control or scope of work of the Board of Commissioners, in the following ways:
 - a. Conducting and coordinating the administration of the results of meetings within the Board of Commissioners, with the Board of Directors and other parties.
 - b. Conducting and coordinating the administration of the minutes of the Board of Commissioners meetings, both internally and jointly with the Board of Directors.
 - c. Carrying out and coordinating the preparation of the schedule for the activities of the Board of Commissioners in carrying out the functions and equipment needed to carry out these activities.
 - d. Leading, directing and coordinating the implementation of existing systems and procedures within the work environment of the Board of Commissioners.
 - e. Performing and coordinating the administration of materials/documents/ reports provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners.



Hak dan Kewenangan

Berdasarkan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Dewan Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
5. Memasuki pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perusahaan.
6. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan.
9. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat-pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/pihak-pihak di luar Perusahaan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
10. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Rights and Authorities

Based on the approval and assignment from the Board of Commissioners, the authorities delegated to the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Establishing systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Commissioners.
2. Viewing the notes, minutes of the Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of providing information required by the Board of Commissioners.
3. Requesting data/information/explanation needed by the Board of Commissioners from relevant parties inside and outside the Company for the purpose of carrying out the duties of the Board of Commissioners.
4. Reminding and asking for an explanation from the work unit/related parties for the delay in providing materials/reports/documents required by the Board of Commissioners.
5. Entering the yards and buildings used by the Company.
6. Representing the Board of Commissioners in dealing with parties outside the Company and/or within the Company in accordance with the assigned assignments and policies determined by the Board of Commissioners.
7. Proposing a plan/work program for the Board of Commissioners in relation to the secretarial functions of the Board of Commissioners in the Company.
8. Proposing the agenda of the Board of Commissioners meetings with parties inside or outside the Company.
9. In accordance with the commands of the Board of Commissioners, inviting the Board of Directors/other Company officials (with the knowledge of the Board of Directors), Committees of the Board of Commissioners/parties outside the Company to attend the meeting held by the Board of Commissioners.
10. Attending meetings with parties inside or outside the Company in accordance with the policies previously determined by the Board of Commissioners.
11. Using the secretarial facilities of the Board of Commissioners to carry out their duties.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Periode jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam masa waktu tertentu namun akan berakhir apabila Dewan Komisaris memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan/ atau yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Term of Office of Secretary of the Board of Commissioners

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is not set for a certain period of time but will end if the Board of Commissioners dismisses the Secretary of the Board of Commissioners and/or the person concerned resigns as Secretary of the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

 <p>Fahresha Muchtar Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of The Board of Commissioners</p>	
Periode Jabatan Term of Office	Juli 2018 - Mei 2021 July 2018 - May 2021
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 37 years old Domisili Domicile : DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Decree of the Board of Commissioners Number: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 dated July 20, 2018 regarding Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok (2007) • Magister Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok (2016) • Bachelor of Law from the Faculty of Law, University of Indonesia, Depok (2007) • Master of Law from the Faculty of Law, University of Indonesia, Depok (2016)
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Hukum (20 Mei 2014 – 8 Juni 2020) • Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II (22 Oktober 2015 – 8 Juni 2020) • Sekretaris Dewan Komisaris PT TWC BP dan RB (Agustus 2016 – Juli 2018) • Pengendali Sub-Fungsi (9 Juni 2020 – sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI (20 Juli 2018 – Mei 2021) • Legal Analysis (May 20, 2014 – June 8, 2020) • Head of Legal Aid Sub Division II (October 22, 2015 – June 8, 2020) • Secretary of the Board of Commissioners of PT TWC BP and RB (August 2016 – July 2018) • Sub-Function Controller (June 9, 2020 – present) • Secretary of the Board of Commissioners of PT PPI (July 20, 2018 – May 2021)



Arie Wijaya

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of The Board Of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	Mei 2021 – Sekarang May 2021 - present
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 40 years old Domisili Domicile : DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Based on Decree of the Board of Commissioners Number KEP-07/DK/PTPPI/V/2021 dated May 1, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	D3 - Sekolah Tinggi Akutansi Negara (2005)
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan (Mei - Oktober 2014) • Analis Akutabilitas Kinerja (Oktober 2014 - Oktober 2015) • Analis Keuangan (Oktober 2015 - Januari 2019) • Kepala Subbidang Sinergi BUMN (Januari 2019 - Juni 2020) • Pengendali Subfungsi (Juni 2020 - Desember 2020) • Subkordinator (Desember 2020 - Sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI (.... - sekarang) • Financial Administration (May - October 2014) • Performance Accountability Analyst (October 2014 - October 2015) • Financial Analyst (October 2015 - January 2019) • Head of SOE Synergy Sub-Sector (January 2019 - June 2020) • Sub-function Controller (June 2020 - December 2020) • Sub-Coordinator (December 2020 - present) • Secretary of the Board of Commissioners of PT PPI (.... - present)

Realisasi Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2021

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris agar senantiasa berjalan optimal, maka sepanjang tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan baik dan efektif, di antaranya, mengadakan rapat-rapat guna meninjau perkembangan kinerja PPI serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan.

Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi penasehatan, yakni dalam hal penyusunan surat-surat rekomendasi Dewan Komisaris baik yang ditujukan kepada Direksi maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Surat-surat Dewan Komisaris senantiasa meminta pendapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Realization of the Work Program of the Secretary of the Board of Commissioners in 2021

In order to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to always runs optimally, throughout 2021, the Secretary of the Board of Commissioners carried out his supervisory duties properly and effectively, by holding meetings to review the development of PPI's performance and other problems faced by the Company.

In addition, the Secretary to the Board of Commissioners also assists the Board of Commissioners in carrying out its advisory function, namely in the preparation of letters of recommendation for the Board of Commissioners, both addressed to the Board of Directors and the Minister of SOEs as Shareholders. The Board of Commissioners' letters always ask for the opinion of the Audit Committee and the Risk Management Committee.

KOMITE AUDIT | AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan. Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dasar Hukum

Dasar pembentukan Komite Audit PPI mengacu pada regulasi normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
- Anggaran Dasar PT PPI;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
- Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Piagam Komite Audit

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Audit. Namun demikian, seluruh anggota Komite Audit PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh

The Audit Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners which is tasked with assisting the implementation of supervisory duties and responsibilities, particularly related to the financial reporting process, internal control system, audit process, GCG implementation and monitoring compliance with applicable laws and regulations in the Company. Structurally, the Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners and has an equal position with other committees under the Board of Commissioners. However, in carrying out its duties, the Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit (IAU).

Legal Basis

The basis for establishing PPI's Audit Committee refers to normative regulations and applicable laws and regulations, including:

- Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
- Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
- Articles of Association of PT PPI;
- Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Reports of SOE Companies;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs.

Audit Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, PPI does not yet have an Audit Committee Charter. However, all members of PPI's Audit Committee continue to carry out their duties and responsibilities with integrity



integritas dan penuh itikad baik.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit PPI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Hak dan Kewenangan

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perusahaan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perusahaan bilamana diperlukan.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan fungsi audit eksternal.
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

and in good faith.

Duties and Responsibilities

PPI's Audit Committee is tasked with and is responsible for:

- 1) Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties;
- 2) Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
- 3) Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
- 4) Ensuring that there is an adequate evaluation procedure for all information issued by the Company; and
- 5) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Audit Committee is authorized to:

1. Access Company documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and necessary company resources.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Obtain the required information from the Company's internal auditors and external auditors.
4. Conduct special examinations on the results of the Company's internal and external audits if necessary.
5. Involve independent parties other than members of the Audit Committee to assist in carrying out their duties (if necessary).
6. Propose to the Board of Commissioners about the Public Accounting Firm that will be selected to carry out the external audit function.
7. Perform other authorities given by the Board of Commissioners based on the assignment letter from the Board of Commissioners.

Qualifications and/or Criteria for Audit Committee

All members of PPI's Audit Committee have met the requirements or qualifications as members of the Audit Committee with the following general criteria:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

1. Have high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and able to communicate well.
2. Have the ability and experience in the field of supervision and/or audit of accounting, finance and understand risk management.
3. Have knowledge of PPI's business processes.
4. Have sufficient time to carry out duties.
5. Not a person in the External Auditor, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Saat ini, Komite Audit PPI terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen atau eksternal (non- Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan perseroan.

Sepanjang 2021, komposisi keanggotaan Komite Audit PPI sebagai berikut:

1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 | January 1, 2021 – December 31, 2021

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Hamli	Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee	KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020
Helman Arif	Anggota / Member	KEP-01/DK/PTPPI/II/2021
Reinhard Harianja	Anggota / Member	KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021

Membership Composition and Term of Office

The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office of members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or Chairman of the Audit Committee who concurrently serves as a member of the Board of Commissioners, the term of office is the same as that of a member of the Board of Commissioners.

Currently, PPI's Audit Committee consists of 3 (three) members consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) others are independent or external parties (non- Commissioners) who have expertise, experience and other quality backgrounds required by the Company.

Throughout 2021, the composition of PPI's Audit Committee are as follows:



Profil Keanggotaan Komite Audit

Profil Ketua Komite Audit

Profil lengkap Bapak Hamli selaku Ketua Komite Audit PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profile of Audit Committee

Profile of the Chairman of Audit Committee

The complete profile of Mr. Hamli as the Chairman of PPI's Audit Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Independence of Audit Committee Members

All members of PPI's Audit Committee are independent parties who have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/ or Controlling Shareholders or relationship with the Company, and do not have concurrent positions both inside and outside the Company in accordance with the provisions of the laws and regulations.

Aspek Independensi / Aspect of Independency	Hamli	Reinhard Harianja	Helman Arif
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite / Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

Kegiatan Rutin Komite Audit, meliputi:

1. Membahas dan memberi pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI yang tujuannya agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI, yaitu agar Komite Audit memahami pelaksanaan pekerjaan SPI yang akan dilakukan selama setahun ke depan.
2. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.
3. Melakukan kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang

Report on Duty Implementation of Audit Committee in 2021

Throughout 2021, the Audit Committee carried out the main tasks as stipulated in the Audit Committee Charter, including:

The routine activities of the Audit Committee include:

1. Discussing and providing views on the IAU Annual Work Plan and Program with the aim that the IAU Annual Work Plan and Program are in line with the supervisory direction of the Board of Commissioners, and as part of the supervisory function carried out by the Audit Committee on the duties of IAU so that the Audit Committee understands the implementation IAU work to be carried out over the next year.
2. Reviewing the Internal Audit Unit Inspection Report, which was followed up by the Audit Committee and IAU Coordination Meeting.
3. Carrying out monitoring activities on the performance of the external auditor (KAP) which

ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Manajemen, SPI dan KAP.

4. Menelaah hasil capaian kinerja Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kegiatan Non-Rutin Komite Audit, meliputi:

Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Audit Tahun 2021

Pada tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup kegiatan rutin berupa pembahasan dan pemberian pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI, yang bertujuan agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI tersebut selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI. Sepanjang tahun ini, Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.

is followed up by the Coordination Meeting of the Audit Committee with Management, IAU and KAP.

4. Reviewing the results of the Company's performance achievements which are followed up by the Internal Audit Committee Meeting and the contribution of the Audit Committee in the Internal Meeting of the Board of Commissioners or the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The non-routine activities of the Audit Committee include:

Carrying out domestic official trips in the context of official duties carried out by the Audit Committee from the position of the workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Performance Assessment and Evaluation of the Audit Committee in 2021

In 2021, the Audit Committee carried out its duties effectively in accordance with applicable regulations including routine activities in the form of discussions and providing views on the IAU Annual Work Plan and Program, which aims to ensure that the IAU Annual Work Plan and Program are in line with the supervisory directives of the Board of Commissioners, as well as part of the supervisory function carried out by the Audit Committee on the duties of IAU. Throughout this year, the Audit Committee also reviewed the Internal Audit Unit Inspection Report, which was followed up through the Coordination Meeting of the Audit Committee and IAU.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI | NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dewan Komisaris resmi membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2020. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Persero).

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, perseroan belum memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, seluruh anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

The Board of Commissioners officially established the Nomination and Remuneration Committee in 2020. This is in accordance with the direction of the Ministry of SOEs through the Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-01/DK/PTPPI/IV/2020 dated April 16, 2020 regarding Establishment of the Nomination and Remuneration Committee and Appointment of the Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT PPI (Persero).

Nomination and Remuneration Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, the Company does not yet have a Nomination and Remuneration Committee Charter. However, all members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI continue to carry out their duties and responsibilities with integrity and in good faith.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Periode menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PPI per 31 Desember 2021, yaitu:

Ketua : Herman Heru Suprobo

Anggota:

- Hamli
- M. Kapitra Ampera
- Setiawan Wangsaatmaja

Profil Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PPI merupakan anggota Dewan Komisaris sehingga profil masing-masing dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PPI, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membership Composition and Term of Office

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who concurrently serve as members of the Board of Commissioners is the same as the term of office as members of the Board of Commissioners.

The following is the composition of the membership of PPI's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2021, namely:

Chairman : Herman Heru Suprobo

Member :

- Hamli
- M. Kapitra Ampera
- Setiawan Wangsaatmaja

Nomination and Remuneration Committee Membership Profile

All members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI are members of the Board of Commissioners so their respective profiles have been presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI are independent parties who have no financial, management, share ownership and/ or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with PPI, and do not have concurrent positions both inside and outside the Company in accordance with the provisions of the legislation.

Aspek Independensi / Aspect of Independency	Herman Heru Subprobo	Hamly	M. Kapitra Ampera	Setiawan Wangsaatmaja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite / Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓	✓

Kebijakan Sukseksi Direksi

Ketentuan dan kriteria seleksi bagi calon anggota Direksi PPI termasuk pengusulan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham secara umum telah dimuat di dalam *Board Manual*. Proses nominasi tersebut dimulai dengan melakukan *assessment* terhadap pejabat satu tingkat di bawah Direksi oleh lembaga independen yang telah direkomendasikan oleh pemegang saham. Secara umum, Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap proses nominasi calon anggota Direksi PPI melalui pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan *top talent* kepada Kementerian BUMN.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI. Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di perseroan.

Dasar Hukum

Dasar pembentukan Komite Manajemen Risiko mengacu pada regulasi normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;

Board of Directors Succession Policy

The provisions and selection criteria for prospective members of PPI's Board of Directors including the nomination of candidates for members of the Board of Directors to Shareholders have generally been contained in the Board Manual. The nomination process begins with an assessment of officials one level below the Board of Directors by an independent institution that has been recommended by the shareholders. In general, the Board of Commissioners reviews the nomination process for candidates for members of PPI's Board of Directors through discussions carried out in the implementation of the Board of Commissioners Meeting. Furthermore, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners submits top talents to the Ministry of SOEs.

The Risk Management Committee is one of the committees established by and responsible directly to the Board of Commissioners, and plays a role in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to the effectiveness of the implementation of risk management principles and policies within PPI. The Risk Management Committee is authorized to have full, free and unrestricted access to any company policies related to risk management in the Company.

Legal Basis

The basis for establishing the Risk Management Committee refers to normative regulations and applicable laws and regulations, including:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Reports of SOE Companies;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning



8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko. Namun demikian, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian
3. atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan menilai kemampuan manajemen risiko perusahaan;
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;
7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor

- Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
 9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

Risk Management Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, PPI does not yet have a Risk Management Committee Charter. However, all members of PPI's Risk Management Committee continue to carry out their duties and responsibilities with full integrity and in good faith.

Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners in developing, assessing and improving the structure, mechanisms, processes and practices of good corporate governance (GCG) in a sustainable manner;
2. Assisting the Board of Commissioners in conducting the assessment
3. Responsibilities in terms of risk management governance, including the Company's legal risk;
4. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the implementation of the risk management process by the Company;
5. Assisting the Board of Commissioners in assessing the Company's risk management capabilities;
6. Assisting the Board of Commissioners in finding the relationship between the risks that have been determined by the Company;
7. Providing input to the Board of Commissioners in the context of improving and developing risk management governance, including legal risk and corporate risk management processes;
8. Assisting the Board of Commissioners in assessing key risks, including legal risks faced by the company and ensuring that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor and control these risks;
9. Assisting the Board of Commissioners in

unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;

10. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
11. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Hak dan Kewenangan

Komite Manajemen Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Manajemen Risiko dapat bekerjasama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit- Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komite Manajemen Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independent untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perusahaan (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Kualifikasi dan / atau Kriteria Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseroan sebagai anggota Komite Manajemen

monitoring the element of uncertainty from risk in the form of various environmental changes outside the Company that have an impact on the Company;

10. Assisting the Board of Commissioners in identifying the risks proposed by the Board of Directors related to investment cooperation, equity participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, disposal of company assets and other activities of the Company as material for analysis and evaluation of the Board of Commissioners in order to provide recommendations and approval of proposals the Board of Directors;
11. Preparing reports, both in writing and verbally, to the Board of Commissioners on matters related to the assignment material;

In addition to carrying out the tasks above, the Risk Management Committee also carries out special assignments given by the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Risk Management Committee has the rights and authorities as follows:

1. Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Risk Management Committee can access records or information about the Company's employees, funds, assets and other resources related to the implementation of its duties.
2. In exercising its authority, the Risk Management Committee may cooperate with partners, namely other Committees of the Board of Commissioners, related teams at the Management level, especially the function that handles Risk Management, and Company Units related to following work procedures and in accordance with applicable regulations.
3. The Risk Management Committee may involve experts and/or consultants/independent parties to assist in carrying out its duties with the written approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company (if necessary).
4. Perform other authorities given by the Board of Commissioners based on the assignment letter from the Board of Commissioners.

Qualifications and/or Criteria for Risk Management Committee

All members of the Company's Risk Management Committee have met the requirements or qualifications as a member of the Risk Management Committee with



Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Periode menjabat Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

Berikut susunan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

the following general criteria:

1. Have high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and able to communicate well.
2. Have the ability and experience in the field of supervision and/or audit of accounting, finance and understand risk management.
3. Have knowledge of PPI's business processes.
4. Have sufficient time to carry out duties.
5. Not a person in the External Auditor, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Membership Composition and Term of Office

The term of office of the Risk Management Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office for members of the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or Chairman of the Risk Management Committee who concurrently serves as a member of the Board of Commissioners, the term of office is the same as their tenure as the Board of Commissioners.

The Risk Management Committee consists of at least 3 (three) members consisting of 1 (one) member of the Board of Commissioners and 2 (two) others who are independent or external parties (non-Commissioners) who have expertise, experience and other quality backgrounds required by PPI.

The following is the composition of the Risk Management Committee:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Setiawan Wangsaatmaja	Ketua Komite Manajemen Risiko / Chairman of Risk Management Committee	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021
Dilza Vierson	Anggota / Member	KEP-02/DK/PTPPI/X/2019
Hertanta	Anggota / Member	KEP-02/DK/PTPPI/X/2019

Profil Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Profil Ketua Komite Manajemen Risiko

Profil lengkap Bapak Setiawan Mangsaatwaja selaku Ketua Komite Manajemen Risiko PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.

Aspek Independensi / Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Dilza Vierson	Hertanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi / Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi / Has no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite / Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah / Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2021

Kegiatan Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap: bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa rapat internal

Profile of Risk Management Committee

Profile of the Chairman of Risk Management Committee

The complete profile of Mr. Setiawan Mangsaatwaja as Chairman of PPI's Risk Management Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Each member of the Risk Management Committee is required to maintain professionalism and independence while carrying out their duties and responsibilities as stipulated in the Risk Management Committee Charter. To that end, each member of the Risk Management Committee has stated their independence in the integrity pact that has been mutually agreed upon.

Report on Duty Implementation of Risk Management Committee in 2021

The Routine activities of the Risk Management Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners to supervise: the supervisory areas of the Board of Commissioners, namely: *Blue Print*/RJPP implementation, RKAP implementation, the Company's internal control system, the Company's risk management, the Company's information technology system, HR policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), laws and regulations and agreements with third parties;
2. Carrying out coordination activities of the Risk Management Committee in the Implementation of its Duties and Functions in the form of internal



Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris;

3. Melaksanakan *Monitoring* Kegiatan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG berupa pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi; dan
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Perusahaan yang menekankan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2021.

Kegiatan Non-Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Me-*review* Ketentuan Internal PT PPI (Persero) seperti *Standard Procedure Operational (SOP)*, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko melalui Diklat, *Workshop* atau Seminar terkait Implementasi GCG; dan
3. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Manajemen Risiko dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi Blue Print/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan PPI agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

meetings of the Risk Management Committee and the Board of Commissioners;

3. Monitoring the Company's activities so it is in line with GCG principles in the form of providing input, advice, recommendations, or suggestions for approval from the Board of Directors; and
4. Carrying out the Company's performance evaluation activities that emphasize the implementation of the Company's Work Plan and Budget or RKAP 2021.

The Non-Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Reviewing the Internal Provisions of PT PPI (Persero) such as Standard Operational Procedures (SOP), Activity Implementation Guidelines, and others;
2. Implementing Risk Management Committee Competency Development activities through Training, Workshops or Seminars related to GCG Implementation; and
3. Conducting domestic official trips in the context of official duties carried out by the Risk Management Committee from the position of the workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Performance Assessment and Evaluation of the Risk Management Committee in 2021

Throughout 2021, the Risk Management Committee assisted the effectiveness of the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners on the implementation of the Blue Print/RJPP, the implementation of the RKAP, the Company's internal control system, the Company's risk management, the Company's information technology system, HR policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), laws and regulations and agreements with third parties, as well as monitoring all of PPI's activities so they are always in line with GCG principles.

ORGAN PENDUKUNG DI BAWAH DIREKSI

SUPPORTING ORGANS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

SEKRETARIS PERUSAHAAN | CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan adalah salah satu organ penunjang Direksi yang menjalankan fungsi vital sebagai penghubung (*liason*) antara perseroan dengan pihak eksternal terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra perusahaan, menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi normatif lainnya yang relevan dengan bidang usaha perseroan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan Sekretaris Perusahaan setingkat dengan Kepala Divisi.

Dasar Hukum

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara efektif dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2018. Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab, pengunduran diri/pemberhentian Sekretaris Perusahaan. Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan juga termuat di dalam *Board Manual* yang merupakan kompilasi berbagai prosedur baik yang mengatur hubungan internal perseroan maupun hubungan antara organ perseroan dan *stakeholders*.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban tugas pokok yang berkaitan dengan jalannya kesekretariatan perusahaan dan administrasi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, promosi dan kemitraan perusahaan. Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk:

The Corporate Secretary is one of the supporting organs of the Board of Directors that carries out a vital function as a liaison between the Company and external parties, especially in maintaining public perception of the Company's image, ensuring the fulfillment of corporate responsibilities and ensuring the Company's compliance with laws and regulations and other normative regulations relevant to the Company's line of business. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director. The position of the Corporate Secretary is at the same level as the Division Head.

Legal Basis

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.

Corporate Secretary Work Guidelines

The Corporate Secretary is obliged to carry out his duties, responsibilities and functions effectively by observing the provisions as stated in the Corporate Secretary Work Guidelines which were approved by the President Director in January 2018. The Corporate Secretary Work Guidelines regulate matters related to the structure and position of the Corporate Secretary, requirements, duties and responsibilities, resignation/dismissal of the Corporate Secretary. The Corporate Secretary Work Guidelines are also contained in the Board Manual, which is a compilation of various procedures both governing the Company's internal relations and the relationship between the Company's organs and stakeholders.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary carries out the main duties related to the running of the corporate secretariat and administration as well as other activities related to society, promotion and corporate partnerships. In general, the Corporate Secretary is tasked with:



1. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan divisinya.
 2. Membuat rencana program CSR.
 3. Menyusun rencana promosi perusahaan.
 4. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
 5. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
 6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
 7. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan tentang keterbukaan dan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
 8. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
 9. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.
 10. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan komersil dan non-komersil.
 11. Menyelenggarakan *database* dan penyimpanan dokumen perusahaan.
 12. Membantu dan berperan secara aktif untuk kelancaran kegiatan divisi komersil (persyaratan *tender*, menyediakan *market tools*).
 13. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholder*.
 14. Mengkoordinasikan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
 15. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
 16. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi.
 17. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi termasuk menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
 18. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
 19. Melakukan *update website* Perusahaan.
 20. Membina hubungan baik dengan media massa.
 21. Melaksanakan kegiatan *sponsorship* Perusahaan.
1. Making a work plan and annual budget for the division.
 2. Making a CSR program plan.
 3. Developing a company promotion plan.
 4. Creating and regularly updating Special Lists.
 5. Creating and periodically updating the Shareholder Register.
 6. Responsible for holding the GMS.
 7. Ensuring that the Company complies with the provisions on disclosure of information in the Annual Report.
 8. Organizing meetings within the Board of Directors, both routine and non-routine.
 9. Organizing secretarial activities within the Board of Directors and the Company as well as its administration.
 10. Coordinating the management of business permits for commercial and non-commercial companies.
 11. Organizing a database and storage of company documents.
 12. Assisting and playing an active role in the smooth operation of the commercial division (tender requirements, provide market tools).
 13. Building mutually beneficial cooperation networks with various stakeholders.
 14. Coordinating the process of preparing the Company's Long Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), Management Report, and Annual Report.
 15. Communicating company and/or government policies to internal and external parties.
 16. Coordinating report materials for Board of Directors Meetings.
 17. Striving for the smooth implementation of the Board of Directors agenda, including attending Board of Directors Meetings and making Minutes of Board of Directors Meetings.
 18. Carrying out secretarial activities of the Company.
 19. Updating the Company's website.
 20. Fostering good relations with the mass media.
 21. Carrying out corporate sponsorship activities.

Hak dan Kewenangan

Sekretaris Perusahaan memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh *person in charge*.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Rights and Authorities

The Corporate Secretary has the right and authority to:

1. Establish systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Directors and the Company.
2. View notes, minutes of the Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of providing information required by the Board of Directors.
3. Request a report on the progress of the implementation of the Board of Directors' decisions carried out by the person in charge.
4. Request data/information/explanation needed by the Board of Directors to relevant parties inside and outside the Company for the purposes of carrying out the duties of the Board of Directors.
5. Improve and request an explanation from the person in charge of the Company who is experiencing delays in the stages of the process of implementing the decisions of the Board of Directors.
6. Remind and ask for explanations from work units/related parties for the delay in providing materials/information/data required by the Board of Directors.
7. Represent the Board of Directors in dealing with parties outside the Company and or within the Company in accordance with the assignments given and the policies that have been determined.
8. Propose the agenda of the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company.
9. Attend the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company in accordance with pre-determined policies.
10. Use secretarial facilities to carry out their duties.



Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

Syailendra

Sekretaris Perusahaan | Secretary of The Board of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	Oktober 2016 - 14 Desember 2021 October 2016 – December 14, 2021
Data Pribadi Personal Data	<p>Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 55 years old Kelahiran Place of Birth : DKI Jakarta Domisili Domicile : DKI Jakarta</p>
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	<p>Surat Keputusan Direksi Nomor: 586/DU/SKD/PPI/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tanggal perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Decree of the Board of Directors Number: 586/DU/SKD/PPI/X/2016 dated October 24, 2016 regarding Dismissal and Appointment of the Corporate Secretary of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia</p>
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi - Jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1986) • Magister Manajemen, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta (2016) • Bachelor of Economics in Marketing Management, Krisnadwipayana University, Jakarta (1986) • Master's Degree in Management, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta (2016)
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Pjs. Manajer Divisi Bahan Kimia Berbahaya, Kantor Pusat (2008-2009) • Kepala Divisi Bahan Kimia Berbahaya, Kantor Pusat (2009 – Maret 2015) • <i>Senior Manager</i> – Divisi Ekspor Impor (Oktober 2015 – Februari 2016) • <i>Senior Manager</i> – Divisi Pengadaan (Februari 2016 – Oktober 2016) • Sekretaris Perusahaan Periode 1 (Maret 2015 – Oktober 2015) dan Periode 2 (Oktober 2016 – sekarang). • Acting Manager of Hazardous Chemicals Division, Head Office (2008-2009) • Head of Hazardous Chemicals Division, Head Office (2009 – March 2015) • Senior Manager – Export Import Division (October 2015 – February 2016) • Senior Manager – Procurement Division (February 2016 – October 2016) • Corporate Secretary Period 1 (March 2015 – October 2015) and Period 2 (October 2016 – present).

Noverita Anggraeny

Sekretaris Perusahaan | Secretary of The Board of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	14 Desember 2021 - Sekarang December 14, 2021 - Present
Data Pribadi Personal Data	<p>Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 49 years old Kelahiran Place of Birth : DKI Jakarta Domisili Domicile : Tangerang Selatan</p>
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	<p>Surat Keputusan Direksi Nomor: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021 Decree of the Board of Directors Number: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021</p>
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1998 : Universitas Trisakti Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Arsitektur • 1998 - 2000 : Universitas Gadjah Mada Program Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Pemasaran • 1992 - 1998 : Trisakti University, Faculty of Civil Engineering and Planning, in Architecture Engineering • 1998 - 2000 : Gadjah Mada University, Master's Degree in Marketing Management
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan (Desember 2021 – sekarang) • <i>Vice President</i> Departemen Manajemen Risiko (Agustus 2021 – Januari 2022) • <i>Vice President</i> Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra (April 2021 – Agustus 2021) • <i>Senior Manajer Domestic Purchasing</i> (Januari 2020 – April 2021) • Corporate Secretary (December 2021 – present) • Vice President of Risk Management Department (August 2021 – January 2022) • Vice President of Risk Management and Strategic Plan Unit (April 2021 – August 2021) • Senior Manajer of Domestic Purchasing (January 2020 – April 2021)

Keorganisasian Sekretariat Perusahaan

Sesuai struktur organisasi, Biro Kesekretariatan Perusahaan (*Corporate Secretary*) berada di bawah koordinasi Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan membawahi:

1. Humas dan Kelembagaan;
2. Sekretariat Direksi dan BOD Support; dan
3. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Departemen Kehumasan

Departemen ini dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Departemen Kehumasan mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Diseminasi informasi internal dan eksternal perusahaan
2. Meningkatkan citra positif dan penghubung komunitas antar lembaga
3. *Liasion Officer*.

Departemen Kelembagaan dan Implementasi GCG

Departemen ini dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Departemen Kelembagaan dan Implementasi GCG mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

Corporate Secretariat Organization

In accordance with the organizational structure, the Corporate Secretary Bureau is under the coordination of the President Director and is directly responsible to the President Director.

The appointment of the Corporate Secretary is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Based on the organizational structure, the Corporate Secretary is in charge of:

1. Public Relations & Institutions;
2. Secretariat Director and BOD Support; and
3. Social & Environmental Responsibility

Corporate Secretary Organization

Department of Public Relations

This department is led by a Department Head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of Public Relations carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Disseminating company internal and external information
2. Increasing the positive image and liaison inter-agency community
3. *Liaison Officer*.

Department of Institutional and GCG Implementation

This department is led by a Department Head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of Institutional and GCG Implementation carries out a number of duties and responsibilities, including:



1. Memantau penerapan GCG perusahaan
2. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kelembagaan
3. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi kelembagaan.

Departemen CSR & PKBL

Departemen ini dipimpin oleh seorang kepala Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Departemen CSR & PKBL bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas-tugas pokok dan merealisasikan sejumlah program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain:

1. Melakukan pengkoordinasian penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan;
2. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan kepada Pemegang Saham yang senantiasa dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pemutakhiran informasi yang disajikan dalam *website* perseroan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Humas yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan;
4. Menyiapkan bahan-bahan untuk proses release dan penyampaian laporan-laporan kepada *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan informasi kepada *stakeholder* sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu dan muatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya; Melakukan koordinasi dan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan RUPS/LB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
7. Membuat, memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah-risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 95.

1. Monitoring the Company's GCG implementation
2. Developing plans for programs and activities in the institutional sector
3. Organizing facilities and institutional coordination.

Department of CSR and PKBL

This department is led by a department head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of CSR & PKBL is in charge and responsible for the preparation of the Social Responsibility and Community Development Program.

Duty Implementation of the Corporate Secretary in 2021

Throughout 2021, the Corporate Secretary carried out the main tasks and realized a number of work programs that had been set at the beginning of the year, including:

1. Coordinating the preparation of the Annual Report and Quarterly Report;
2. Submitting Quarterly and Annual Management Reports to Shareholders which are always carried out in a timely manner in accordance with the provisions;
3. Updating the information presented on the Company's website which in this case is carried out by the Public Relations Section under the coordination of the Corporate Secretary;
4. Preparing materials for the process of releasing and submitting reports to stakeholders in accordance with applicable regulations;
5. Providing information to stakeholders according to its designation while taking into account the timeliness and content in accordance with applicable regulations;
6. Coordinating the implementation of the Meetings of the Board of Directors as well as the Board of Directors and Board of Commissioners and other activities; Coordinating and arranging the stages of GMS/EGMS according to a predetermined schedule; and
7. Creating, maintaining and storing Company documents such as the Shareholder Register, the Special Register, the minutes of the GMS and the minutes of the Board of Directors' Meetings.

Training and Competency Development Program of Corporate Secretary

A complete description of the list of training and competency development programs that the Corporate Secretary participated in in 2021 is presented in the Company Profile Chapter on page 95.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Penilaian terhadap kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dan dinilai dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021. Adapun rincian pencapaian KPI tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/MBU/2002 dan dikuatkan oleh Surat Menteri BUMN S-50/MBU/01/2018 untuk RKA 100% sedangkan Realisasi Minimal 80%.

Sepanjang tahun 2021, Direksi menilai fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan telah memenuhi aspek dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER—01/MBU/20111 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) tentang tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan pada BUMN.

Kegiatan Publikasi Tahun 2021

Siaran Pers

Penyebarluasan informasi Perseroan kepada publik salah satunya dilakukan melalui siaran pers. Selama tahun 2021, siaran pers yang telah dilakukan perseroan, antara lain:

Tabel Siaran Pers

No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
1.	7 Januari 2021 / January 7, 2021	PPI Tambah Daftar Pelabuhan Sebagai Mitra Utama Kepabeanaan / PPI Adds List of Ports as Main Customs Partners
2.	12 Januari 2021 / January 12, 2021	Nat-G, <i>Brand Black Garlic</i> PPI
3.	22 Januari 2021 / January 22, 2021	PT PPI Distribusikan Sodium Cyanida Ikuti Prosedur dan Prinsip GCG / PT PPI Distributes Sodium Cyanide with GCG Procedures and Principles
4.	22 Januari 2021 / January 22, 2021	PT PPI Lepas Harga Beras Khusus Sesuai di Pasaran / PT PPI Releases Special Rice Prices According to the Market
5.	16 Februari 2021 / February 16, 2021	PPI Terus Tingkatkan Penetrasi Ke Mesir / PPI Continues to Increase Penetration Into Egypt
6.	16 Februari 2021 / February 16, 2021	PPI Gandeng KPK dalam Sosialisasi E-LHKPN sebagai Komitmen Kepatuhan / PPI Collaborates with KPK in E-LHKPN Socialization as a Compliance Commitment
7.	16 Februari 2021 / February 16, 2021	PPI Dukung Kerja Sama RNI dengan BKP dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditas Pangan Strategis / PPI Supports RNI Cooperation with BKP in Stabilizing Supply and Prices of Strategic Food Commodities
8.	23 Februari 2021 / February 23, 2021	PPI Hadir Salurkan Bantuan Bencana di Sulbar dan Kalsel / PPI Comes to Distribute Disaster Aid in West Sulawesi and South Kalimantan
9.	24 Februari 2021 / February 24, 2021	PPI dan Satoria Group Perkuat Jalinan Kemitraan / PPI and Satoria Group Strengthen Partnership
10.	25 Februari 2021 / February 25, 2021	BUMN Klaster Pangan dan Satgas Pangan Polri Gelar Audiensi / SOE Food Cluster and Police Food Task Force Conduct Hearings
11.	25 Februari 2021 / February 25, 2021	PPI Ekspor Pupuk Nonsubsidi ke Timor Leste / PPI Exports Non-subsidized Fertilizer to Timor Leste

Performance Assessment of Corporate Secretary 2021

The performance of the Corporate Secretary is measured and assessed from the achievement of the Key Performance Indicators (KPI) that have been set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021. The details of the achievement of these KPIs are prepared based on the Decree of the Minister of SOE Number 100/MBU/2002 and strengthened by the letter of the Minister of SOEs S-50/MBU/01/2018 for RKA 100% while the Minimum Realization is 80%. The Board of Directors assesses that throughout 2021, the functions and duties of the Corporate Secretary fulfilled the aspects in the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER—01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance regarding the duties and responsibilities of the Corporate Secretary in SOEs.

Publication Activities in 2021

Press Release

One of the ways to disseminate information about the Company to the public is through press releases. During 2021, the Company conducted the following press releases:

Press Conference Table



No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
12.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PT PPI Distribusikan Sodium Cyanida Ikuti Prosedur dan Prinsip GCG / PT PPI Distributes Sodium Cyanide with GCG Procedures and Principles
13.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PT PPI Beri Bantuan ke Kaum Dhuafa Jabodetabek dan Lampung saat Covid / PT PPI distributes Donation to the Dhuafa of Jabodetabek and Lampung during Covid
14.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	Kementerian BUMN Apresiasi Transformasi PPI Selama Pandemi / Ministry of SOEs Appreciates PPI's Transformation During the Pandemic
15.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PT PPI Gandeng KPK dalam Sosialisasi dan Pendampingan e-LHKPN / PT PPI Collaborates with KPK in e-LHKPN Socialization and Assistance
16.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PPI akan Lanjutkan Pengembangan Produk Dharmabrand di Kluster Pangan / PPI Continues Development of Dharmabrand Products in the Food Cluster
17.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PPI Ekspor Pupuk Nonsubsidi ke Timor Leste / PPI Exports Non-subsidized Fertilizer to Timor Leste
18.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PPI Siap Ikuti Tahapan Pembentukan Holding Pangan / PPI is Ready to Follow the Stages of Food Holding Establishment
19.	26 Februari 2021 / February 26, 2021	PPI dan Satoria Grup Perkuat Kerja Sama Pemasaran / PPI and Satoria Group Strengthen Marketing Cooperation
20.	8 Maret 2021 / March 8, 2021	PPI dan Petrokimia Gresik Komitmen Terapkan Customer Centric Model / PPI and Petrokimia Gresik Are Committed to Applying Customer Centric Model
21.	12 Maret 2021 / March 12, 2021	PPI Salurkan Obat-Obatan Ke Kalsel / PPI Distributes Medicines to South Kalimantan
22.	12 Maret 2021 / March 12, 2021	PT PPI Terus Jalankan Penyerapan Ayam Hidup dari Peternak Mandiri / PT PPI Continues to Implement Live Chicken Absorption from Independent Farmers
23.	12 Maret 2021 / March 12, 2021	PPI dan Petrokimia Gresik Sepakat Genjot Serapan Pupuk Nonsubsidi / PPI and Petrokimia Gresik Agree to Boost Uptake of Non-Subsidized Fertilizer
24.	19 Maret 2021 / March 19, 2021	Pergantian Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Change in the Composition of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
25.	19 Maret 2021 / March 19, 2021	Lakukan Pertemuan, Mendag & PPI Optimis Perdagangan Indonesia Tahun Ini Akan Lebih Baik / Trade Minister & PPI Are Optimistic that Indonesian Trade This Year Will Improve
26.	22 Maret 2021 / March 22, 2021	PPI dan Wamen Kemendes PDTT Laksanakan Audiensi / PPI and Vice Minister of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of Republic of Indonesia Conduct Audience
27.	22 Maret 2021 / March 22, 2021	Direksi PPI Lakukan Audiensi Bersama Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian / PPI Board of Directors Implement Hearings with the Director General of Chemical, Pharmaceutical and Textile Industries of the Ministry of Industry
28.	23 Maret 2021 / March 23, 2021	Direksi PPI Lakukan Kunjungan Balasan Ke Menteri Perdagangan, Bahas Ekspor dan Perdagangan Indonesia / PPI Board of Directors Make Reciprocal Visits to the Minister of Trade, Discuss Export and Trade of Indonesia
29.	25 Maret 2021 / March 25, 2021	PPI, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga Lakukan Penjajakan untuk Bersinergi / PPI, Pertamina, and Pertamina Patra Niaga Explore to Synergize
30.	29 Maret 2021 / March 29, 2021	Gowes Santai ke Kota Tua, Direksi PPI Kunjungi Cabang, Beberapa Aset Perusahaan, dan Bertandang ke BGR / Cycling to Kota Tua, PPI Board of Directors Visit Branches, Some Company Assets, and BGR
31.	29 Maret 2021 / March 29, 2021	PPI Lakukan Vaksinasi untuk Karyawan Jabodetabek di Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama / PPI Conducts Vaccinations for Jabodetabek Employees at the Covid-19 Vaccination Center
32.	29 Maret 2021 / March 29, 2021	Menteri BUMN Erick Thohir Ganti Dirut PT PPI/ SOE Minister Erick Thohir Replaces PT PPI's President Director
33.	30 Maret 2021 / March 30, 2021	Erick Thohir Angkat Herman Heru Suprobo Jadi Komut PT PPI / Erick Thohir Appoints Herman Heru Suprobo as President Commissioner of PT PPI
34.	30 Maret 2021 / March 30, 2021	PT PPI Topang Kemendag Bangkitkan Perdagangan Domestik dan Ekspor / PT PPI Supports The Ministry of Trade Awakens Domestic and Export Trade

No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
35.	1 April 2021 / April 1, 2021	PPI Laksanakan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional / PPI Holds Inauguration of Structural and Functional Officials
36.	4 April 2021 / April 4, 2021	PPI Berpartisipasi dalam Supermarket Expo 2021 di Kairo Mesir / PPI Participates in Supermarket Expo 2021 in Cairo Egypt
37.	5 April 2021 / April 5, 2021	Produk Pangan dan Makanan Minuman Indonesia Warnai Cairo Supermarket Expo 2021 / Indonesian Food and Beverage Products Colour the Cairo Supermarket Expo 2021
38.	5 April 2021 / April 5, 2021	PPI Laksanakan Sosialisasi Implementasi Skema Imbal Dagang untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor dan Peran Badan Pelaksana dalam Skema Imbal Dagang B2B / PPI Conducts Socialization on the Implementation of the Trade-off Scheme for Procurement of Government Goods of Import Origin and the Role of the Implementing Organ in the B2B Trade-off Scheme
39.	13 April 2021 / April 13, 2021	Direksi PPI Berdiskusi dengan Dubes RI untuk Bulgaria Bahas Potensi Ekspor Produk Indonesia / PPI Board of Directors and Indonesian Ambassador to Bulgaria Discuss Export Potential of Indonesian Products
40.	14 April 2021 / April 14, 2021	PPI Terima Kunjungan Dubes RI untuk Uni Emirat Arab, Bahas Potensi Kerja Sama Ekspor, Impor, dan Investasi / PPI Receives a Visit from the Indonesian Ambassador to the United Arab Emirates, Discusses the Potential for Export, Import, and Investment Cooperation
41.	21 April 2021 / April 21, 2021	Dubes RI untuk UEA dan PPI Bahas Peluang Ekspor, Impor, dan Investasi / Indonesian Ambassador to the UAE and PPI Discuss Export, Import, and Investment Opportunities
42.	22 April 2021 / April 22, 2021	PPI Ikuti FGD <i> Holding Pangan / PPI Participates in Food Holding FGD</i>
43.	24 April 2021 / April 24, 2021	BUMN Klaster Pangan Luncurkan Srikandi Pangan / SOE Food Cluster Launches Srikandi Pangan
44.	24 April 2021 / April 24, 2021	PPI dan Distributor Sepakat Perangi Perdagangan Ilegal Bahan Berbahaya / PPI and Distributors Agree to Fight Illegal Trade in Hazardous Materials
45.	25 April 2021 / April 25, 2021	PPI Laksanakan Vaksinasi Tahap II di Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama / PPI Implements Phase II Vaccination at the Covid-19 Vaccination Center
46.	27 April 2021 / April 27, 2021	PPI Gelar Acara Santunan dan Tausiah Ramadan Bersama Yusuf Mansur / PPI Conducts Ramadan Compensation and Tausiah Event with Yusuf Mansur
47.	29 April 2021 / April 29, 2021	PPI Ikuti FGD tentang Rencana Model Bisnis BUMN Klaster Pangan / PPI Joins FGD on the SOE Food Cluster Business Model Plan
48.	24 Mei 2021 / May 24, 2021	Direktur PPI Roadshow ke Cabang di Jawa Dalam Rangka Penguatan Bisnis di <i> Holding Pangan / PPI Director Roadshow to Branches in Java to Strengthen Business in Food Holding</i>
49.	17 Mei 2021 / May 17, 2021	Karyawan PPI Jalani Tes Covid-19 Usai Libur Idul Fitri / PPI Employees Take Covid-19 Tests After Eid Holiday
50.	19 Mei 2021 / May 19, 2021	PT PPI Hadir Penuhi Kebutuhan Pupuk di Kota Pariaman / PT PPI Comes to Fulfill Fertilizer Needs in Pariaman City
51.	24 Mei 2021 / May 24, 2021	PPI Perkuat Bisnis BUMN Pangan Di Daerah / PPI Strengthens Food Enterprises
52.	25 Mei 2021 / May 25, 2021	Direksi PPI Lakukan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk Membangun Sinergi Pengembangan Toko Grosir Desa / PPI Board of Directors Conduct Hearings with the Governor of Central Java to Build Synergy in the Development of Village Wholesale Stores
53.	25 Mei 2021 / May 25, 2021	PPI dan N Brothers Tandatangani Nota Kesepahaman tentang Ekspor dan Impor Produk dan atau Komoditi / PPI and N Brothers Sign Memorandum of Understanding on Export and Import of Products and or Commodities
54.	25 Mei 2021 / May 25, 2021	Kemendag dan KBRI Canberra Fasilitas Kerja Sama Dagang Indonesia dan Australia / Ministry of Trade and Indonesian Embassy in Canberra Facilitate Trade Cooperation between Indonesia and Australia
55.	25 Mei 2021 / May 25, 2021	Direksi PPI Audiensi dengan Gubernur Jateng untuk Kembangkan Toko Grosir Desa / PPI Board of Directors Conduct Hearing with the Governor of Central Java to Develop Village Wholesale Stores

No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
56.	3 Juni 2021 / June 3, 2021	PT PPI Berkomitmen dalam Percepatan Proses <i> Holding </i> BUMN Kluster Pangan / PT PPI is Committed to Accelerating the Process of SOE Holding for Food Clusters
57.	3 Juni 2021 / June 3, 2021	PT PPI Siap Tingkatkan Kinerja <i> Holding </i> Pangan Pascalebaran / PT PPI is Ready to Improve Post-Eid Food Holding Performance
58.	15 Juni 2021 / June 15, 2021	PPI Gelar <i> Talkshow </i> Bareng Arya Sinulingga, Bahas Cara Tingkatkan <i> Skill </i> Komunikasi / PPI Conducts Talkshow with Arya Sinulingga, Discusses Ways to Improve Communication Skills
59.	16 Juni 2021 / June 16, 2021	PPI Ikut Kolaborasi Riset dan Pengembangan Talenta bersama BUMN Kluster Pangan dan Pupuk / PPI Participates in Talent Research and Development Collaboration with SOE Food and Fertilizer Cluster
60.	19 Juni 2021 / June 19, 2021	Usia 18 tahun, Inovasi PPI Sinergi Bisnis Perdagangan Mulai Pedesaan Hingga Tingkat Internasional / At the age of 18, PPI innovates in Trade Business Synergy From Rural to International Level
61.	19 Juni 2021 / June 19, 2021	BUMN PPI Rakayan HUT ke 18 tahun, Mendag Lutfi Berharap PPI Perlu Memperkuat Pasar Lokal dan Tembus Pasar Internasional / SOE PPI Celebrates 18th Anniversary, Trade Minister Lutfi Hopes PPI Strengthen Local Markets and Translucent International Markets
62.	21 Juni 2021 / June 21, 2021	PPI Berpartisipasi dalam Food Expo Greece 2021 Digital Version / PPI Participates in Online Food Expo Greece 2021
63.	22 Juni 2021 / June 22, 2021	Erick Thohir Berharap PT PPI Putar Roda Perdagangan Nasional / Erick Thohir Hopes PT PPI Turn the Wheel of National Trade
64.	22 Juni 2021 / June 22, 2021	Cari Peluang Ekspor, PPI Hadir di Food Expo Greece 2021 / Looking for Export Opportunities, PPI Presents at Food Expo Greece 2021
65.	1 Juli 2021 / July 1, 2021	Laksanakan RUPST Tahun buku 2020, PPI Pertahankan Kinerja Positif di masa Pandemi / Having Implemented AGMS for Fiscal Year 2020, PPI Maintains Positive Performance during the Pandemic
66.	1 Juli 2021 / July 1, 2021	Pergantian Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) / Change in the Composition of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
67.	1 Juli 2021 / July 1, 2021	Konsen di <i> Trading Capabilities Holding </i> Pangan, Insan PPI Ngobrol Bareng James Gwee tentang <i> Sales & Marketing </i> / Concentrated on Food Holding Trading Capabilities, PPI Employees Converse with James Gwee about Sales & Marketing
68.	3 Juli 2021 / July 3, 2021	Terobosan Ekspor Baru, PPI Buka Pasar Meksiko / New Export Breakthrough, PPI Opens Mexican Market
69.	8 Juli 2021 / July 8, 2021	PPI Genjot Peningkatan Peran Integrator dalam Proyek Agrosolution di Sulawesi Utara / PPI Increases the Role of Integrators in the Agrosolution Project in North Sulawesi
70.	12 Juli 2021 / July 12, 2021	PPI Laksanakan <i> Sharing Session </i> Penggabungan BUMN Perdagangan Bersama Stakeholder / PPI Conducts Sharing Session on Merging SOE Trading with Stakeholders
71.	4 Agustus 2021 / August 4, 2021	PPI Laksanakan Rapat Koordinasi Pencapaian Target RKAP 2021 / PPI Conducts Coordination Meeting to Achieve 2021 RKAP Target
72.	4 Agustus 2021 / August 4, 2021	Terobosan Ekspor Baru, PPI Buka Pasar Rusia / New Export Breakthrough, PPI Opens Russian Market
73.	4 Agustus 2021 / August 4, 2021	PPI dan KPK Berkolaborasi Gelar Bimbingan Teknis Program Antikorupsi / PPI and KPK Collaborate to Hold Anti-Corruption Program Technical Guidance
74.	12 Agustus 2021 / August 12, 2021	Gencar Buka Peluang Ekspor, PPI Bidik Pasar Jerman / Intensively Opening Export Opportunities, PPI Aims for the German Market
75.	17 Agustus 2021 / August 17, 2021	BUMN Kluster Pangan Laksanakan Upacara dan Kegiatan Peringatan Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia / SOE Food Cluster Hold Ceremony and Program to Commemorate the 76th Independence of the Republic of Indonesia
76.	23 Agustus 2021 / August 23, 2021	PPI Terus Dorong BUMN Kluster Pangan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional / PPI Continues to Encourage SOE Food Cluster to Strengthen National Food Security

No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
77.	31 Agustus 2021 / August 31, 2021	Sambut Hari Pelanggan Nasional, PPI Bagikan Hadiah Lewat Panen Rejeki Dharmabrand / Welcoming National Customer Day, PPI Distributes Prizes Through Rejeki Dharmabrand Harvest
78.	10 September 2021 / September 10, 2021	PPI Tancap Gas Ekspor Kopi ke Mesir / PPI Boosts Coffee Exports to Egypt
79.	11 September 2021 / September 11, 2021	Persiapan Merger BGR ke dalam PPI, Dirut PPI Kunjungi Fasilitas Logistik BGR di Palembang / Preparing for Merger of BGR into PPI, PPI Director Visits BGR Logistics Facility in Palembang
80.	23 September 2021 / September 23, 2021	Audiensi Pengembangan Produk Dharmabrand / Dharmabrand Product Development Audience
81.	5 Oktober 2021 / October 5, 2021	Berpartisipasi dalam Athens Coffee Festival, PPI Tawarkan Kopi Indonesia / Participating in Athens Coffee Festival, PPI Offers Indonesian Coffee
82.	8 Oktober 2021 / October 8, 2021	PPI Inisiasi Program Entaskan Stunting di NTB / PPI Initiates Stunting Eradication Program in NTB
83.	13 Oktober 2021 / October 13, 2021	Semarakkan Hari Pangan Sedunia, PPI Lakukan Panen Raya Lewat Agro Solution / Celebrating World Food Day, PPI Implements Great Harvest Through Agro Solution
84.	14 Oktober 2021 / October 14, 2021	Perkuat Rantai Pasok Pangan, PPI Kembali Jadi Distributor Eksklusif Pupuk Petrokimia Gresik / Strengthening Food Supply Chain, PPI Becomes Exclusive Distributor of Gresik Petrokimia Fertilizer
85.	21 Oktober 2021 / October 21, 2021	PPI Berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia – Digital Version 2021 / PPI Participates in Trade Expo Indonesia – Digital Version 2021
86.	22 Oktober 2021 / October 22, 2021	Dalam Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021, PPI Buka Pasar Belanda / At Digital Trade Expo Indonesia 2021, PPI Opens Dutch Market
87.	25 Oktober 2021 / October 25, 2021	PPI dan Cluster de I+D y TICs del Estado de Mexico Teken Kontrak, Imbal Dagang Siap Jalan / PPI and Cluster de I+D y TICs del Estado de Mexico Sign Contract, Countertrade Is Ready to Operate
88.	26 Oktober 2021 / October 26, 2021	PPI Lakukan Audiensi dengan Gubernur Sumbar, Dorong Sektor Pertanian / PPI Conducts Audience with the Governor of West Sumatra, Encourages the Agricultural Sector
89.	28 Oktober 2021 / October 28, 2021	PPI Rengkuh Penghargaan MENUJU INFORMATIF dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik / PPI Receives MENUJU INFORMATIF Award in the Public Information Disclosure Award
90.	28 Oktober 2021 / October 28, 2021	Kembali dalam TEI DE 2021, PPI Torehkan Penandatanganan MoU dengan Mesir / Back in TEI DE 2021, PPI Signs MoU with Egypt
91.	26 November 2021 / November 26, 2021	PT PPI Ekspor 600 Ton Kopi ke Mesir, Senilai USD 1,2 Juta / PT PPI Exports 600 Tons of Coffee to Egypt, Worth USD 1.2 Million
92.	30 November 2021 / November 30, 2021	Mengusung Konsep Integrasi Trading Logistik, PPI Serius Perluas Jasa di Industri Sumut Lewat Gelaran KIM Investment Expo 2021 / Carrying the Logistics Trading Integration Concept, PPI Seriously Expands Services in the North Sumatran Industry through the 2021 KIM Investment Expo
93.	1 Desember 2021 / December 1, 2021	TJSL PPI Serahkan Bantuan Pembangunan Musala / PPI CSR Donates for Musala Construction
94.	2 Desember 2021 / December 2, 2021	BUMN Perdagangan & Logistik Resmi Menjadi New PPI – Penandatanganan Akta Penggabungan BGR Ke Dalam PPI / SOE Trade & Logistics Officially Becomes New PPI – Signing of Deed of Merger of BGR into PPI
95.	6 Desember 2021 / December 6, 2021	Pascamerger, PPI Gelar Townhall Meeting Perdana Menuju Integrasi Trading Logistic Terdigitalisasi / Post-merger, PPI Holds First Townhall Meeting Towards Digitalized Logistics Trading Integration
96.	7 Desember 2021 / December 7, 2021	Direksi PPI Laksanakan Kunjungan Konsolidasi Ke Anak Perusahaan, BGR Logistik Indonesia / PPI Board of Directors Conducts Consolidation Visit to Subsidiary, BGR Logistik Indonesia
97.	13 Desember 2021 / December 13, 2021	PPI Gelar RUPS Penetapan Susunan Direksi & Komisaris Anak Perusahaan, BGR Logistik Indonesia / PPI Holds GMS Determining the Composition of the Board of Directors & Board of Commissioners of Subsidiary, BGR Logistik Indonesia

No	Tanggal Publikasi Publication Date	Judul Title
98.	15 Desember 2021 / December 15, 2021	Hadirkan Mardigu, PPI Helat <i>Motivational Session</i> Pascamerger / Presenting Mardigu, PPI Conducts Post-merge Motivational Session
99.	16 Desember 2021 / December 16, 2021	PPI Tanda tangani MoU Imbal Dagang dengan Turki, Gaspol Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional / PPI Signs MoU on Mutual Trade with Turkey, Accelerates National Economic Recovery
100.	16 Desember 2021 / December 16, 2021	PPI Selenggarakan <i>Talkshow</i> Refleksi Akhir Tahun "Menuju Trading Logistik yang Terdigitalisasi" / PPI Holds Year-End Reflection Talkshow "Towards a Digitalized Logistics Trading"
101.	23 Desember 2021 / December 23, 2021	PPI Laksanakan Rapat Penyusunan Proker Tahun 2022 bersama Anak Perusahaan, dengan Tema "Menuju Integrasi Trading Logistik Terdigitalisasi" / PPI Holds the 2022 Preparation Meeting with its Subsidiary, with the Theme "Towards the Integration of Digitalized Logistics Trading"
102.	23 Desember 2021 / December 23, 2021	Sebagai Ekspor <i>Gateway</i> Klaster Pangan, PPI Tuntaskan Tahun 2021 dengan Ekspor Kopi ke Mesir / As Export Gateway for Food Clusters, PPI Ends 2021 by Exporting Coffee to Egypt
103.	27 Desember 2021 / December 27, 2021	PPI Secara Berkelanjutan Laksanakan Program Pengentasan Stunting di NTB / PPI Sustainably Implements Stunting Alleviation Program in NTB

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) | INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

PPI memiliki organ Satuan Pengawas Intern (SPI) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap unit-unit kerja lainnya. SPI menjalankan fungsi pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, sistem manajemen dan tata kelola Perusahaan.

Dasar Hukum

Keberadaan, pembentukan, dan komposisi SPI di perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi normatif lainnya berikut ini:

1. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero);
3. Keputusan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang *Internal Audit Charter*.

SPI has an Internal Audit Unit (IAU) which is structurally responsible directly to the President Director and works independently of other work units. IAU performs the function of providing assurance and consulting that is independent and objective to management in order to improve the quality of risk management processes, internal control, management systems and corporate governance.

Legal Basis

The existence, establishment, and composition of IAU in the Company refers to the following statutory provisions and other normative regulations:

1. The establishment of the IAU refers to Chapter VI of the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation no. 12 of 1998 concerning Companies (Persero);
3. Decree of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in State-Owned Enterprises (SOEs); and
4. Decree of the Board of Directors Number: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 dated October 25, 2016 regarding Internal Audit Charter.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadi Satuan Pengawasan Intern yang berdedikasi, profesional dan sejalan dengan sasaran dan tujuan Perusahaan untuk terciptanya *Good Corporate Governance*.

Misi

Melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang bersifat sistematis, konsultatif dan konstruktif sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya.

Tujuan

Penetapan visi dan misi digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pelaksanaan program-program kerja Satuan Pengawasan Intern yang efektif, terukur dan berkelanjutan sehingga memberi nilai tambah bagi Perusahaan.

Piagam Satuan Pengawas Intern

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan GCG serta pengelolaan risiko maka melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, Direktur Utama mengesahkan Piagam Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berisikan hal-hal mengenai Visi & Misi, Kedudukan, Ruang Lingkup Tugas, Tanggung jawab, Kewajiban, Kode Etik dan Hubungan dengan Komite Audit dan pihak Internal/Eksternal di perseroan. Piagam SPI berfungsi sebagai pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan terstruktur sehingga dapat diperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu serta dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas dan tanggung jawab SPI, antara lain sebagai berikut:

- Menyusun strategi dan rencana kerja audit berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian strategi bisnis;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
- Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan *review* dan evaluasi terhadap

Vision. Mission and Objective

Vision

To become Internal Audit Unit that is dedicated, professional and in line with the Company's goals and objectives for the establishment of *Good Corporate Governance*.

Mission

Carrying out systematic, consultative and constructive assurance and consulting activities to provide added value for the Company to achieve its goals and objectives.

Objective

The determination of the vision and mission is used as a guideline in achieving the objectives of implementing effective, measurable and sustainable work programs for the Internal Audit Unit to provide added value for the Company.

Internal Audit Unit Charter

In order to improve the effectiveness of supervision and implementation of GCG as well as risk management, through the Decree of the Board of Directors Number: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 dated October 25, 2016, the President Director ratified the Charter of the Internal Audit Unit (IAU) which contains matters concerning Vision & Mission, Position, Scope of Duties, Responsibilities, Obligations, Code of Conduct and Relationship with the Audit Committee and Internal/External parties in the Company. The IAU Charter functions as a guide for auditors in carrying out their duties in a professional and structured manner so that audit results can be obtained in accordance with quality standards and can be accepted by various parties, both internal and external.

Duties and Responsibilities

The scope of duties and responsibilities of IAU, among others, are as follows:

- Developing strategies and audit work plans based on the results of the analysis of risks faced by the Company in achieving business strategies;
- Conducting inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, marketing, information technology and other activities in achieving the mission, goals and strategies that have been set;
- Conducting and contributing to the improvement of effective control by reviewing and evaluating internal control in all activity units within the Company;



pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perusahaan;

- Melakukan penugasan khusus lainnya sesuai penugasan dari Direktur Utama;
- Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama;
- Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah di rekomendasikan; dan
- Menyusun dan menyempurnakan standar dan panduan SPI Perusahaan.

Hak dan Kewenangan

Agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor internal dapat berjalan efektif, maka seluruh personel SPI PPI berwenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit internal secara independen;
2. Memperoleh informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perusahaan dan anak Perusahaan/Divisi/Unit Kerja serta memiliki akses tanpa batas ke semua fungsi, catatan, harta milik dan pegawai Perusahaan selama relevan dengan lingkup pemeriksaan;
3. Memperoleh informasi-informasi dari nara sumber profesional/pihak ahli berkaitan dengan proses audit Perusahaan dan Anak Perusahaan;
4. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik Perusahaan dan Anak Perusahaan;
5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama;
6. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); dan
7. Melakukan penugasan audit khusus sesuai penugasan Direktur Utama.

Ruang Lingkup Audit Internal

Penugasan SPI bertujuan untuk menilai kelayakan sistem pengendalian internal pada seluruh unit dan/atau seluruh proses bisnis melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan perseroan namun terbatas pada lingkup kantor pusat. Seluruh personil SPI menjalankan tugas sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan hanya menerima penugasan dari Direktur Utama apabila ada penugasan atau pemeriksaan khusus.

- Performing other special assignments according to the assignment from the President Director;
- Providing suggestions for improvement and objective information on activities that are audited at all levels of management to improve systems, procedures, budgets and policies;
- Preparing a report on audit results and submitting the report to the President Director;
- Monitoring, analyzing and reporting on the implementation of the recommended follow-up improvements; and
- Developing and improving the Company's IAU standards and guidelines.

Rights and Authorities

In order for the implementation of the duties and responsibilities of the internal auditors to be effective, all personnel of PPI's Internal Audit Unit are authorized to do the following:

1. Determining the strategy, scope, method and frequency of internal audit independently;
2. Obtaining information from all work units and employees within the Company and its subsidiaries/Divisions/Work Units and unlimited access to all functions, records, property and employees of the Company as long as they are relevant to the scope of the examination;
3. Obtaining information from professional sources/experts related to the audit process of the Company and its Subsidiaries;
4. Conducting a physical review of all assets belonging to the Company and its Subsidiaries;
5. Submitting the audit result report to the President Director;
6. Conducting audits in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT); and
7. Carrying out special audit assignments according to the President Director's assignment.

Scope of Internal Audit

The IAU assignment aims to assess the feasibility of the internal control system in all units and/or all business processes through assurance and consulting activities. This is done to provide adequate confidence in the achievement of the Company's objectives but is limited to the scope of the head office. All IAU personnel carry out their duties according to the Annual Audit Work Program (PKPT) and only accept assignments from the President Director if there are special assignments or inspections.

Kedudukan SPI dalam Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, SPI merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama sehingga Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun pada praktiknya, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*.

IAU Position in Organizational Structure

In organizational structure, IAU is a functional work unit that is under the direct supervision of the President Director so that the Head of IAU is directly responsible to the President Director. However, in practice, IAU also coordinates with the Audit Committee in carrying out its duties as stated in the Board Manual.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Organizational Structure of Internal Audit Unit



Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Flow of Appointment and Dismissal of the Head of IAU

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Cahyadi
Kepala SPI | Head of IAU

Periode Jabatan Term of Office	Juli 2021 - Sekarang July 2021 - Present
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Citizenship : Indonesian Usia Age : 39 years old Domisili Domicile : DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021 Decree of the Board of Directors Number: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akutansi Bachelor of Accounting
Riwayat Karier Professional Experience	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Tim Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2008 - 2020) Satuan Tugas Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2020 - 2021) Kepala SPI PT PPI (2021 - sekarang) Head of the Audit Team at the KPK Internal Supervision Directorate (2008 - 2020) Audit Task Force at the Directorate of Internal Supervision of the KPK (2020 - 2021) Head of SPI PT PPI (2021 - present)

Keanggotaan Personil SPI

Kecukupan jumlah auditor internal atau personil SPI yang profesional dan memiliki kompetensi andal sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. Penentuan jumlah dan komposisi auditor perseroan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan ideal organisasi SPI dengan menilik rencana kebutuhan tenaga auditor.

Per 31 Desember 2021, jumlah auditor internal perseroan tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Kepala SPI yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap 32 Kantor Cabang dan 5 Direktorat.

Sertifikasi Personil SPI

SPI menyusun rencana kerja pengembangan profesi secara berkelanjutan baik dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal ataupun sebagai wujud implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi auditor yang merupakan bagian dari kegiatan rutin SPI sebagaimana tertuang di dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pada akhir 2021, SPI perseroan tercatat memiliki sejumlah sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal perseroan, antara lain:

IAU Membership

Sufficient number of internal auditors or IAU personnel who are professional and have reliable competence is very much needed to assist the implementation of the functions and duties of IAU. Determination of the number and composition of the Company's auditors always considers the ideal needs of the IAU organization by considering the planned needs of auditors.

As of December 31, 2021, the number of the Company's internal auditors was 7 (seven) including the Head of IAU who is responsible for conducting inspections of 32 Branch Offices and 5 Directorates.

IAU Certification

IAU prepares a work plan for continuous professional development either in order to obtain professional certification relevant to the field of internal audit or as a form of implementation of the implementation of a capacity development program for auditors which is part of IAU's routine activities as stated in the Annual Examination Work Program (PKPT).

At the end of 2021, the Head of the Company's IAU was recorded to have a number of relevant certifications in order to support the implementation of his duties and responsibilities as the Company's internal auditor, including:

Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi / Certification
Cahyadi	Kepala SPI / Head of IAU	Fungsional Auditor, PIA, CFE, CRMO
David Nicholson	<i>Manager Assurance 2</i> Assurance Manager 2	CA
Daeng Achmad ardiansyah	<i>Manager Consulting</i> Consulting Manager	Fungsional Auditor, CRMO
Dimas Adi Oetama S.	<i>Asisten Manager Assurance 1</i> Assistant Assurance Manager 1	Fungsional Auditor Muda, Brevet A & B
Delfi Yandri	<i>Asisten Manager Consulting</i> Assistant Consulting Manager	CA, Asean CPA, Brevet A B C
Dian Auliawati Purnama	<i>Asisten Manager Assurance 2</i> Assistant Assurance Manager 2	Fungsional Auditor Pertama, Brevet A & B

Independensi SPI

Seluruh personil SPI bekerja secara profesional, independen, dan objektif, serta berperan sebagai mitra manajemen yang mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan membantu Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal menyatakan kesungguhannya untuk bekerja sesuai standar baku yang berlaku dan mematuhi kode etik profesional yang telah ditetapkan.

IAU Independency

All IAU personnel work professionally, independently and objectively, and act as management partners who are able to provide added value to the Company and assist the Board of Directors in implementing GCG principles. In carrying out their duties, internal auditors express their sincerity to work according to applicable standards and comply with the established professional code of conduct.

Kode Etik SPI

Seluruh personil SPI wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pokok-pokok Kode Etik profesi auditor internal sebagaimana telah ditetapkan perseroan, antara lain:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi Perusahaan dan Internal Audit Perusahaan.
3. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan SPI senantiasa harus mempertahankan sikap independen.
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi SPI atau Perusahaan.
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas/kewajiban secara objektif.
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional SPI.
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesional SPI, *code of conduct* Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
8. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Perusahaan.
9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra Perusahaan.
10. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas SPI kepada siapapun, kecuali melalui izin tertulis dari Direktur Utama.
11. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuaifaktayangadadantidakmenyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.

IAU Code of Conduct

All IAU personnel are required to act and behave in accordance with the main points of the internal auditor's professional code of conduct as determined by the Company, including:

1. Behave and be honest, objective, careful in carrying out their duties and responsibilities.
2. Have high integrity and loyalty to the Company's profession and the Company's Internal Audit.
3. All matters relating to the IAU assignment must always maintain an independent attitude.
4. Avoid activities or actions that are detrimental or reasonably suspected to be detrimental to the IAU profession or the Company.
5. Avoid activities that conflict with the interests of the Company or result in being unable to carry out their duties/obligations objectively.
6. Do not accept gifts in any form and from anyone, either directly or indirectly, including from the object of the assignment, clients, customers, suppliers, partners and/or parties with an interest in the Company that interfere or are reasonably suspected to interfere with IAU's professional judgment.
7. Fully comply with IAU professional standards, the Company's code of conduct and laws and regulations.
8. Maintain the morals and dignity of the Company.
9. Do not use the information obtained for personal interests or gains or other matters for any reason that can cause or is reasonably suspected to cause harm to the Company, in terms of financial and in terms of the image of the Company.
10. It is not allowed to disclose any information about IAU duties to anyone, except through written permission from the President Director.
11. Report all material assignment results by disclosing the truth according to existing facts and do not hide things that may harm the Company and or may constitute a violation of the law.

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI Tahun 2021

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berfungsi sebagai landasan dan acuan kerja bagi seluruh personal SPI dalam menjalankan kegiatan audit internal. PKPT yang disusun oleh SPI harus mendapat persetujuan Direktur Utama dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum resmi ditetapkan. Penyusunan kerangka PKPT dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau *risk-based* sehingga dalam hal ini SPI berkoordinasi aktif dengan Komite Manajemen Risiko.

Berikut ini adalah uraian realisasi PKPT SPI Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

IAU Annual Audit Work Program 2021

The Annual Audit Work Program (PKPT) serves as the basis and work reference for all IAU personnel in carrying out internal audit activities. The PKPT prepared by IAU must be approved by the President Director and submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee for consideration and advice before being officially stipulated. The preparation of the PKPT framework is carried out using a risk or risk-based approach so that in this case IAU is actively coordinating with the Risk Management Committee.

The following is a description of the realization of the 2021 IAU PKPT:

No	Objek Kegiatan / Activities	Realisasi PKPT vs Target / PKPT Realization vs Target				
		Realisasi Audit / Audit Realization			Target	%
		Regular	Remote	Total		
1. Kantor Cabang / Branch Office						
1	Pontianak	1	-	1	1	100%
2	Padang	1	-	1	1	100%
3	Surabaya	1	-	1	1	100%
4	Surakarta	1	-	1	1	100%
5	Pekanbaru	1	-	1	1	100%
6	Madiun	1	-	1	1	100%
2. Kantor Pusat / Head Office						
7	Divisi Umum General Division	-	-	-	1	0%
3. Desk Audit						
8	Balikpapan	-	1	1	1	100%
9	Pontianak	-	1	1	1	100%
10	Padang	-	1	1	1	100%
11	Bandung	-	1	1	1	100%
12	Bengkulu	-	2	2	2	100%
13	Surakarta	-	2	2	2	100%
14	Banda Aceh	-	1	1	1	100%
15	Pekanbaru	-	2	2	2	100%
16	Yogyakarta	-	1	1	1	100%
17	Cirebon	-	1	1	1	100%
18	Pangkalpinang	-	1	1	1	100%
19	Ambon	-	1	1	1	100%
20	Makassar	-	1	1	1	100%
21	Palu	-	1	1	1	100%
22	Pare-pare	-	1	1	1	100%
23	Surabaya	-	1	1	1	100%

No	Objek Kegiatan / Activities	Realisasi PKPT vs Target / PKPT Realization vs Target				
		Realisasi Audit / Audit Realization			Target	%
		Regular	Remote	Total		
24	Kendari	-	1	1	1	100%
4. Pemeriksaan Khusus / Special Check						
25	Surabaya	1	-	1	1	100%
Total		7	-	27	28	96,43%

Laporan Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2021

Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak proses audit dalam melaksanakan pemeriksaan/audit ke Unit Kerja khususnya Kantor Cabang. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI tidak dapat berjalan optimal dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksa dan juga akibat dari penerapan kebijakan pandemi COVID-19.

Walau berhadapan dengan keterbatasan, SPI tetap melaksanakan sejumlah program kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikut ini adalah realisasi program kerja SPI Perseroan Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

Report on IAU Duty Implementation in 2021

The COVID-19 pandemic that occurred this year had an impact on the limited space for the audit process in carrying out inspections/audits to Work Units, especially Branch Offices. Thus, the realization of the IAU Annual Audit Work Program (PKPT) could not run optimally due to the limited number of examiners and also as a result of the implementation of the COVID-19 pandemic policy.

Despite facing limitations, IAU continues to carry out a number of work programs while still implementing very strict health protocols. The following is the realization of the Company's IAU work program in 2021:

No	Kegiatan / Activities	Waktu / Date	Realisasi Pelaksanaan / Realization
Kegiatan Audit / Audit Program			
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Sebanyak 6 (Obyek Audit) / Progress of the Annual Audit Work Program of 6 (Audit Objects)			
1	Audit PKPT Cabang Pontianak PKPT Audit Pontianak Branch	Maret March	Terlaksana Has been implemented
2	Audit PKPT Cabang Padang PKPT Audit Padang Branch	Maret March	Terlaksana Has been implemented
3	Audit PKPT Cabang Surabaya PKPT Audit Surabaya Branch	Agustus August	Terlaksana Has been implemented
4	Audit PKPT Cabang Surakarta PKPT Audit Surakarta Branch	Agustus August	Terlaksana Has been implemented
5	Audit PKPT Cabang Pekanbaru PKPT Audit Pekanbaru Branch	November November	Terlaksana Has been implemented
6	Audit PKPT Cabang Madiun PKPT Audit Madiun Branch	November November	Terlaksana Has been implemented
7	Audit PKPT Divisi Umum PKPT Audit General Division	Desember December	Tidak Terlaksana Has not been implemented
8	Pemeriksaan Khusus Special Audit	Maret & Agustus March & August	Terlaksana Has been implemented
9	Desk Audit	Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober January, February, April, May, June, July, September, October	Terlaksana Has been implemented
Kegiatan Non-Audit / Non-Audit Program			
Pengawasan Lainnya / Other Audit			
1	Konsultasi dan Asistensi Consultation and Assistance	Setiap bulan Monthly	Setiap bulan Monthly
2	Laporan Tindak Lanjut Temuan SPI SPI Findings Follow-up Report	Triwulan Quarterly	Triwulan I, II, III dan VI 1 st , 2 nd , 3 rd , and 4 th Quarter
3	Laporan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal External Auditor Findings Follow-up Report	Triwulan Quarterly	Triwulan I, II, III dan IV 1 st , 2 nd , 3 rd , and 4 th Quarter
4	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK BPK Findings Follow-up Report	Semesteran Semester	Semester I dan II 1 st and 2 nd Semester



AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS Tahunan.

Mekanisme penunjukan KAP dimuat di dalam Board Manual serta sudah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait penunjukan calon Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dengan melibatkan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap calon Auditor Eksternal dalam proses penunjukannya.

Hal ini tercantum di dalam Memo Dinas Komite Dewan Komisaris Nomor: 10/KA/VI/2020 dan 10/KMR/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Usulan Penetapan Kembali KAP Dalam Rangka General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI (Persero) Tahun Buku 2021. Berdasarkan Memo Dinas tersebut diketahui bahwa Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang telah melakukan audit pada tahun buku sebelumnya untuk selanjutnya diusulkan kembali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penetapan KAP dan Akuntan Publik Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Appointment Mechanism of Public Accounting Firm (KAP)

The Company uses the services of a Public Accounting Firm ("KAP") as an external party that works independently to provide opinions regarding the suitability of the presentation of the Company's financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. The appointment of a Public Accountant and KAP to audit the Consolidated Financial Statements and PKBL Financial Statements is proposed by the Board of Commissioners for further submission and approval of shareholders through the Annual GMS mechanism.

The mechanism for appointing KAP is contained in the Board Manual and has been established as part of the 2021 Board of Commissioners' Work Program. In its implementation, the Board of Commissioners conducts discussions regarding the appointment of prospective External Auditors who will audit the company's financial statements by involving the Audit Committee and the Risk Management Committee. Through the Audit Committee, the Board of Commissioners evaluates candidates for External Auditor in the process of their appointment.

This is stated in the Office Memo of the Committee of the Board of Commissioners Number: 10/KA/VI/2020 and 10/KMR/VI/2020 dated June 11, 2020 regarding Proposal for Re-appointment of KAP in the Context of General Audit of the 2021 Consolidated Financial Statements of PT PPI (Persero). Based on the Service Memo, it is known that the Audit Committee has evaluated the performance of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners who had audited in the previous fiscal year to be proposed again to audit the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and PKBL Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021.

Implementation of External Audit Function

The determination of KAP and the Company's Public Accountant refers to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 article 3 paragraph 1 which states that the provision of general audit services on the financial statements of an entity is carried out by KAP for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant no later than for 3 (three) consecutive fiscal years.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komunikasi yang terjalin di antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen senantiasa berjalan efektif dan efisien. Selama proses audit berlangsung, KAP berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Oleh karena itu, auditor eksternal dan Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Pada saat menjalankan kegiatan audit, Komite Audit dan KAP melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan menyampaikan hasil auditnya saat *exit meeting*.

Lingkup Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Eksternal

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Daftar Akuntan Publik Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai daftar KAP, Akuntan Publik, serta jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

Coordination of External Auditor and Audit Committee

The communication between the Public Accounting Firm (KAP), the Audit Committee, and the Management always runs effectively and efficiently. During the audit process, KAP coordinates with the Audit Committee to request input/suggestions on areas that receive special attention from the Audit Committee. Therefore, the external auditor and the Audit Committee regularly meet to discuss several significant important issues. When carrying out audit activities, the Audit Committee and KAP conduct discussions regarding the findings obtained by the KAP and submit the audit results at the exit meeting.

Scope of Responsibilities of Management and External Auditor

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements in accordance with the principles of SAK applicable in Indonesia as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Meanwhile, the external auditor is responsible for providing an audit opinion on the financial statements that have been prepared by management based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

List of Public Accountants in the Last 5 (Five) Years

The following is complete information regarding the list of KAPs, Public Accountants, as well as services provided and fees charged to the Company in the past 5 (five) years, namely:

Tahun Buku / Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik / Name of Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik / Name of Public Accountant	Biaya (Rp) / Fee (Rp)	Jasa Audit / Audit Service	Opini Audit / Audit Opinion
2021	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Bandana, S.E., AK., CA., CPA., Asean CPA	Rp485.000.000	<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021 b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern c) Jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI (Persero) d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2021 	<p>Wajar dalam semua hal yang material</p> <p>Reasonable in all material respects</p>
				<ul style="list-style-type: none"> a) Auditing Consolidated Financial Statements of PT PPI and Subsidiaries for Fiscal Year 2021 	



Tahun Buku / Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik / Name of Public Accounting Firm	Nama Akun- tan Publik / Name of Pub- lic Accountant	Biaya (Rp) / Fee (Rp)	Jasa Audit / Audit Service	Opini Audit / Audit Opinion
2020	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("Kreston HHES")	Welly Adrianto, CPA	Rp660.000.000	<ul style="list-style-type: none"> b) Auditing Compliance with laws and regulations and internal control system c) Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI (Persero) d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2021 	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2019	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("Kreston HHES")	Welly Adrianto, CPA	Rp645.000.000	<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2020 b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern c) Jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI (Persero) d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2020 <ul style="list-style-type: none"> a) Auditing the Consolidated Financial Statements of PT PPI and its Subsidiaries for Fiscal Year 2020 b) Auditing compliance with laws and regulations and internal control system c) Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI (Persero) d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2020 	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
				<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2019 b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern c) Jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI (Persero) d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2019 <ul style="list-style-type: none"> a) Auditing the Consolidated Financial Statements of PT PPI and its Subsidiaries for Fiscal Year 2019 b) Auditing Compliance Audit with laws and regulations and internal control system c) Reviewing services on the Performance 	

Tahun Buku / Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik / Name of Public Accounting Firm	Nama Akun- tan Publik / Name of Pub- lic Accountant	Biaya (Rp) / Fee (Rp)	Jasa Audit / Audit Service	Opini Audit / Audit Opinion
				Evaluation Report of PT PPI (Persero) d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2019	
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Djoko Sutardjo	Rp610.000.000	<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2018 b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern c) Jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI (Persero) d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2018 	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2017	KAP Djoko, Sidik & Indra	Indra Soesetiawan	Rp709.967.500	<ul style="list-style-type: none"> a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2017 b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern c) Jasa <i>review</i> atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI (Persero) d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2017 	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
				<ul style="list-style-type: none"> a) Auditing Consolidated Financial Statements of PT PPI and Subsidiaries for Fiscal Year 2017 b) Auditing Compliance with laws and regulations and internal control system c) Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI (Persero) d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2017 	



Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Auditor Findings and Follow Up on Auditor Findings

Resume Laporan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal / Resume of External Auditor Findings Follow-up Report

Penyelesaian dan *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK.

Completion and Follow-up Monitoring of BPK's Findings and Recommendations

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Risalah Pembahasan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK RI tanggal 2 Juli 2021 dan Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Februari 2022:

- a. Telah sesuai rekomendasi; 35 rekomendasi
- b. Sebanyak 8 belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut.
- c. Belum ditindaklanjuti; 0 rekomendasi

Follow-up to the results of the BPK examination based on the Minutes of Discussion on the Results of the Follow-up Monitoring of the BPK RI on July 2, 2021 and the Annual Recapitulation of the Follow-up Monitoring Matrix on the Recommendations of the Examination Results as of February 2022:

- a. Has been in accordance with the recommendations; 35 recommendations
- b. A total of 8 have not met the recommendations and are in the process of being followed up.
- c. Not yet followed up; 0 recommendations

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Salah satu upaya perseroan dalam mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur perseroan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Aktivitas pengendalian internal pada lingkup perseroan secara garis besar bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja perseroan, memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Komitmen Direksi dan manajemen akan hal tersebut tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan telah mengesahkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tanggal 15 September 2017. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja perseroan dalam menjalankan tata laksana sistem pengendalian internal pada lingkup perseroan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan sistem deteksi dini perseroan.

Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta pengelolaan risiko. Bagi perseroan, hasil evaluasi pengendalian internal tersebut berguna sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang harus

Internal Control System Policy

One of the Company's efforts to support the achievement of operational effectiveness and efficiency is by implementing a comprehensive Internal Control System involving elements of the Company, such as the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. Internal control activities within the Company broadly aim to assist management in supporting the achievement of the Company's performance objectives, providing adequate assurance regarding the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, risk management, effectiveness and efficiency of operations as well as to safeguard the Company's assets at every level of the organization. The commitment of the Board of Directors and management to this matter is stated in the Corporate Governance Guidelines.

The Company has ratified the General Guidelines for the Internal Control System through the Decree of the Board of Directors Number: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 dated September 15, 2017. These guidelines are used as a reference for all work units of the Company in carrying out the internal control system management within the Company and in order to encourage implementation of the Company's responsibilities and early detection system.

The Company routinely evaluates the effectiveness of internal control at all levels, in terms of implementing policies, procedures, internal control and risk management. For the Company, the results of the evaluation of internal control are useful as a basis for determining corrective and improvement steps that must be taken to enable management to carry out



Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan PPI mengadopsi pendekatan standar internasional - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) yang dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

- 1. Efektivitas dan Efisiensi Operasi**
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perseroan dalam rangka mencapai tujuan PPI.
- 2. Keandalan Pelaporan Keuangan**
PPI menjamin ketersediaan laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan**
PPI memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh PPI.

Berlandaskan pada kerangka COSO, maka unsur-unsur pengendalian internal perseroan mencakup 5 (lima) komponen berikut ini:

- 1. Lingkungan Pengendalian**
Komponen ini menjadi landasan utama bagi komponen pengendalian yang lain karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal serta mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.
- 2. Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko**
Kegiatan ini mengawali proses pengendalian internal secara keseluruhan karena sangat menentukan bentuk *design* sistem pengendalian yang dibutuhkan serta menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak bagi perusahaan.
- 3. Aktivitas Pengendalian**
Pada lingkup aktivitas pengendalian, manajemen memastikan bahwa perseroan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian ini

Conformity of the Internal Control System with the COSO Framework

The internal control activities implemented by the Company adopt an international standard approach - COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) which is designed to achieve 3 (three) main objectives, namely:

- 1. Operational Effectiveness and Efficiency**
This activity is intended to improve the effectiveness and efficiency of the Company's resource management in order to achieve PPI's objectives.
- 2. Reliability of Financial Reporting**
PPI guarantees the availability of fair, timely and relevant reports, as the basis for making appropriate and accountable decisions.
- 3. Compliance with Legislation**
PPI ensures that all activities carried out always comply with the applicable laws and regulations, as well as in accordance with the internal procedures established by PPI.

Based on the COSO framework, the elements of the Company's internal control include the following 5 (five) components:

- 1. Control Environment**
This component is the main basis for other control components because it greatly influences the effectiveness of internal control and reflects the commitment, behavior, and awareness of the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing the internal control system.
- 2. Risk Identification, Measurement and Management**
This activity starts the overall internal control process because it really determines the form of control system design needed and determines whether a control is needed or not for the company.
- 3. Control Activities**
In the scope of control activities, management ensures that the Company has taken appropriate action to prevent the occurrence of a risk event. This control activity is stated in a written document

dituangkan dalam dokumen tertulis baik berupa kebijakan ataupun prosedur yang harus ditaati oleh seluruh insan PPI. Aktivitas pengendalian melibatkan semua tingkatan manajemen mulai level Direksi sampai dengan individu (*first line of defence*) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

PPI menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi *first line of defence*. Selain itu, komponen ini juga mendorong perseroan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal PPI secara keseluruhan.

5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian internal perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh *first line of defence* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Auditor Internal/ Eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PPI mencakup aspek Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan. Implementasi pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Selain itu, PPI juga melakukan pemeriksaan fisik aset secara ketat guna mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan.

Sementara itu, upaya pengendalian internal pada aspek Akuntansi/Keuangan dilakukan dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pemborosan. PPI juga menggunakan *software* Akuntansi yang dapat diandalkan untuk menjamin akurasi pencatatan atas transaksi yang terjadi serta menyiapkan dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

Selain menguji pengendalian pada aspek Operasional dan Akuntansi / Keuangan, PPI juga menjaga derajat

in the form of policies or procedures that must be adhered to by all Company personnel. Control activities involve all levels of management from the Board of Directors level to individuals (first line of defense) who are in charge of carrying out daily operational activities.

4. Information and Communication Systems

PPI ensures the availability of relevant, accurate, and timely information for all management lines to individuals who are in the first line of defense. In addition, this component also encourages the Company to ensure the reliability of financial reporting, as well as compliance with applicable regulations. The information and communication components are a vital part of PPI's overall internal control system.

5. Monitoring

Monitoring activity is a very important component in the Company's overall internal control system. These activities are carried out routinely by the first line of defense and their superiors, as well as separate evaluations by the Board of Directors, Board of Commissioners, or Internal/External Auditors. This is done to ensure that the internal control system is always running effectively.

Financial and Operational Control System

Internal control activities carried out by PPI cover aspects of Operations, Accounting/Finance and Compliance. Implementation of internal control in terms of operations is further elaborated into various policies in the form of Guidelines, Operational Instructions, and Work Instructions. In addition, the Company conducts a strict physical inspection of assets to secure and protect the Company's assets.

Meanwhile, internal control efforts in the Accounting/ Finance aspect are carried out by separating functions, duties, and responsibilities to prevent fraud and waste. PPI also uses reliable accounting software to ensure the accuracy of recording transactions that occur and prepares good documentation of control events and transactions.

In addition to testing controls on Operational and Accounting / Financial aspects, the Company also



kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan lini bisnisnya sebagai entitas BUMN yang bergerak di sektor perdagangan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2021 dan Tindak Lanjutnya

Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif pada setiap jenjang organisasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2021, PPI mendapati sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen antara lain:

1. Melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian pengelolaan piutang dan persediaan
2. Melakukan perbaikan terhadap kegiatan Pengamanan & Optimalisasi Aset
3. Membuat kajian & analisa atas Perangkapan Fungsi & Jabatan

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan SPI telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan di sepanjang tahun 2021.

maintains its degree of compliance with laws and regulations relevant to its line of business as an SOE entity engaged in the trading sector.

Financial and Operational Control

Finance

The implementation of internal control in the financial sector focuses on accounting and reporting of financial transactions, including commitments, authorizations, and receipts and disbursements of money.

Operational Field

Implementation of internal control in the operational field focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient manner to fulfill the mission and objectives of the Company.

Compliance with Legislation

Implementation of internal control in the field of compliance focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies and procedures.

Evaluation of the Implementation of the 2021 Internal Control System and its Follow-up

The Internal Control Unit (IAU) conducts a thorough examination of the adequacy of a reliable and effective Internal Control System at every level of the organization. Based on the evaluation carried out during 2021, PPI found a number of recommendations for improvement that must be followed up by management, including:

1. Making improvements to the control system of receivables and inventory management
2. Making improvements to the activities of Asset Security & Optimization
3. Making a study & analysis of the Traps of Functions & Positions

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors considers that the work units under the Board of Directors have carried out their functions and roles well and have achieved effective and efficient performance. The Corporate Secretary and IAU have carried out their duties well as a supporting unit for the performance of the Board of Directors and have assisted the Board of Directors in carrying out their responsibilities in managing the Company throughout 2021.

AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY DATA AND INFORMATION

Pengelolaan informasi korporasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Sekretaris Perusahaan guna mencegah terjadinya *misleading information* yang dapat berdampak negatif bagi citra perusahaan. Dalam hal ini, PPI membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan keterbukaan informasi dalam batasan yang diatur oleh perundang-undangan dan kebijakan internal perseroan.

Situs Web PPI

PPI telah menyediakan kanal informasi melalui situs web www.ptppi.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan investor. PPI mengoptimalkan pemanfaatan situs web tersebut sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal yang memuat berbagai informasi umum mengenai perseroan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Laporan Keuangan, dan informasi korporasi lainnya. Seluruh informasi tersebut disajikan secara faktual, serta ditinjau dan diperbaharui secara berkala relevansinya untuk meningkatkan kualitas distribusi informasi PPI.

Sementara untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai PPI, publik ataupun investor dapat mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi ataupun mengunjungi kantor pusat secara langsung yang beralamat di:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

GRAHA PPI
Jl. Abdul Muis No. 8
Jakarta Pusat, 10160
Tel: +6221 3862141
Fax: +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

Media Lainnya

Selain mengkomunikasikan kebijakan dan informasi penting melalui website, penyebaran informasi perseroan juga dilakukan melalui buletin PPI, *press release*, media sosial, dan papan-papan pengumuman yang terdapat di lingkungan perseroan. Selain itu, PPI juga mengadakan pertemuan (*gathering*) bersama *stakeholders* yang diselenggarakan secara berkala.

The management of corporate information of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) is carried out professionally under the supervision of the Corporate Secretary to prevent the occurrence of misleading information that can have a negative impact on the Company's image. In this case, PPI opens the widest possible access to information to the public while still taking into account the provisions of confidentiality and disclosure of information within the limits regulated by the legislation and the Company's internal policies.

PPI Website

PPI has provided an information channel through the website www.ptppi.co.id which can be easily accessed by the public and investors. PPI optimizes the use of the website as a medium of communication with external parties that contains various general information about the Company, such as Company Profile, Organizational Structure, Financial Statements, and other corporate information. All of the information is presented factually, and its relevance is reviewed and updated regularly to improve the quality of PPI's information distribution.

Meanwhile, to obtain more comprehensive information about PPI, the public or investors can submit a written request addressed to the Board of Directors or visit the head office directly at:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

GRAHA PPI
Jl. Abdul Muis No. 8
Jakarta Pusat, 10160
Tel: +6221 3862141
Fax: +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

Other Media

In addition to communicating important policies and information through the website, information dissemination of the Company is also carried out through PPI bulletins, press releases, social media, and announcement boards located within the Company. In addition, PPI also holds regular gatherings with stakeholders.



Siaran Pers Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, PPI telah melakukan sejumlah konferensi pers dan siaran pers. Uraian dan daftar siaran pers PT PPI selama tahun 2021 dapat dilihat pada sub-bab Sekretaris Perusahaan, halaman 249.

2021 Press Release

Throughout 2021, PPI held a number of press conferences and press releases. The description and list of PT PPI press releases for 2021 is presented in the Corporate Secretary sub-chapter, page 249.

PERKARA PENTING TAHUN 2021

LEGAL CASES IN 2021

Perkara Penting Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apapun, baik kasus perdata maupun pidana.

Legal Cases Encountered by the Board of Commissioners and Board Directors

Throughout 2021, PPI's Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal cases, both civil and criminal cases.

Perkara Penting Dihadapi Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, Entitas Anak PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apapun, baik kasus perdata maupun pidana.

Legal Cases Encountered by Subsidiaries

Throughout 2021, PPI's Subsidiaries were not involved in any legal cases, both civil and criminal cases.

SANKSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat sanksi administrasi dalam bentuk apapun yang dikenakan pihak regulator kepada PPI.

Until the end of 2021, there were no administrative sanctions imposed by the regulator on PPI.

PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

CORPORATE ETHICS GUIDELINES

Komitmen Pelaksanaan Kode Etik

PPI menyadari bahwa pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional dan mengacu pada prinsip-prinsip GCG merupakan syarat utama yang dibutuhkan agar dapat memenangkan kompetisi usaha baik pada skala nasional maupun global. Penerapan GCG secara disiplin di tengah masa-masa sulit sekarang ini menjadi suatu kebutuhan dan keharusan sehingga dapat tercipta landasan dan fondasi yang tangguh dan berkelanjutan.

Berangkat dari kesadaran penuh tersebut, PPI menyadari dan berkepentingan untuk menyusun suatu Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan standar perilaku bagi setiap insan PPI yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan mengarahkan tingkah laku termasuk saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga tercapai outcome yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya PPI.

Pokok-Pokok Kode Etik

Secara garis besar, pokok-pokok Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PPI memuat hal-hal berikut ini:

Commitment to Implementing the Code of Conduct

The Company realizes that professional management of the Company which refers to the principles of GCG is the main requirement to win business competitions both on a national and global scale. The implementation of GCG in a disciplined manner in the midst of today's difficult times has become a necessity so a strong and sustainable foundation can be created.

Departing from this full awareness, the Company is aware of and has an interest in compiling a Code of Conduct which has been stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 regarding First Amendment on the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy on Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

Code of Conduct is a set of commitments consisting of business ethics and standards of behavior for every Person in the Company which is structured to influence, shape, regulate and direct behavior including when interacting with stakeholders so that the expected outcome is achieved and in accordance with PPI values and culture.

Code of Conduct Main Points

In general, the main points of PPI's Ethics and Business Conduct Policy contain the matters:

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
I	Pendahuluan / Introduction	<p>Bab ini berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang 2. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan 3. Pengertian 4. Maksud Dan Tujuan 5. Daftar Istilah <p>This chapter contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Background 2. Vision, Mission and Corporate Values 3. Understanding 4. Purpose and Objective 5. Glossary



Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
II	Etika Usaha Perusahaan / Company Business Ethics	<p>Bab ini mengatur hubungan dan komitmen Perusahaan dalam berhubungan dengan stakeholders, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Dengan Pemegang Saham 2. Hubungan Dengan Pekerja 3. Hubungan Dengan Pelanggan 4. Hubungan Dengan Pesaing 5. Hubungan Dengan Penyedia Barang dan Jasa 6. Hubungan Dengan Mitra Kerja 7. Hubungan Dengan Kreditur 8. Hubungan Dengan Investor 9. Hubungan Dengan Pemerintah 10. Hubungan Dengan Masyarakat 11. Hubungan Dengan Media Massa 12. Hubungan Dengan Organisasi Profesi. <p>This chapter regulates the Company's relationship and commitment in dealing with stakeholders, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relations with Shareholders 2. Relations with Employees 3. Relations with Costumers 4. Relations with Competitors 5. Relations with Goods and Service Providers 6. Relations with Partners 7. Relations with Creditors 8. Relations with Investors 9. Relations with the Government 10. Relationswith Community 11. Relations With Mass Media 12. Relations With Professional Organizations.
III	Standar Tata Perilaku / Code of Conduct	<p>Bab Ini Menjelaskan standar perilaku terbaik bagi Insan PPI yang berlandaskan pada prinsip - prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya Budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan.</p> <p>Bab ini antara lain memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Dan Kerjasama Antar Pekerja - Hubungan Atasan Dan Bawahan 2. Integritas Dan Komitmen 3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Kerahasiaan Data dan Informasi 5. Penggunaan Komunikasi Elektronik 6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan 7. Hadiah/Cinderamata, Jamuan Bisnis/Hiburan Dan Lainnya (Gratifikasi) 8. Penyuaapan 9. Aktivitas Politik 10. Aktivitas Sosial 11. Perlindungan Dan Penggunaan Aset Perusahaan 12. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi 14. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian 15. Citra Perusahaan <p>This Chapter Describes the best standard of behavior for PPI's personnel based on the principles of GCG so as to encourage the establishment of a Corporate Culture which is expected to, either directly or indirectly, increase the value of the Company.</p> <p>This chapter includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Working Relationship <ul style="list-style-type: none"> - Relations and Cooperation among Employees - Boss and Subordinate Relationship 2. Integrity And Commitment 3. Compliance with Laws and Legislation 4. Confidentiality of Data and Information 5. Use of Electronic Communication 6. Conflict of Interest and Abuse of Position 7. Gifts/Souvenirs, Business Meals/Entertainment and Others (Gratuities)

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
		8. Bribery 9. Political Activities 10. Social Activities 11. Protection and Use of Company Assets 12. Occupational Health and Safety (OHS) 13. Data Recording, Reporting and Documentation 14. Abuse of Narcotics, Drugs, Alcohol and Gambling Company Image
IV	Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku / Implementation of Business Ethics and Code of Conduct	Bab ini mengatur Organisasi, Penegakan Pedoman Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelaporan, Penanganan Dan Sanksi Pelanggaran This chapter regulates the Organization, Code of Conduct Enforcement, Socialization and Internalization, Reporting, Handling and Sanctions for Violations
V	Penutup / Closing	Berisikan penjelasan terkait pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku dan Penjelasan Pernyataan Pegawai. This provides an explanation regarding the update/revision of business ethics and code of conduct and an explanation of employee statements.

Penerapan Code of Conduct

Penerapan *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab seluruh Insan PPI. Akan tetapi, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan perseroan. Sementara, para Kepala Divisi, Kepala Cabang, *Manager* dan pejabat setingkatnya bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct* di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pernyataan bahwa Code of Conduct Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

PPI menegaskan bahwa pokok-pokok Code of Conduct berlaku setara bagi seluruh insan PPI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Dengan adanya *Code of Conduct*, PPI berharap setiap individu semakin memiliki kesadaran tinggi untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan membawa dampak positif terhadap citra PPI.

Komitmen perseroan akan hal ini ditunjukkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *Code of Conduct* dan menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang dilakukan secara berkala atau setiap tahun. Pada tahun 2021, penandatanganan lembar pernyataan tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi pokok-pokok *Code of Conduct* menjadi tanggung jawab Tim GCG. PPI berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara efektif

Code of Conduct Implementation

The implementation of the Code of Conduct is the responsibility of all PPI's personnel. However, the Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the implementation of the Code of Conduct within the Company. Meanwhile, Division Heads, Branch Heads, Managers and equivalent officials are responsible for the implementation of the Code of Conduct in their respective work units.

Statement that the Code of Conduct applies to all levels of the organization

PPI emphasizes that the main points of the Code of Conduct apply equally to all employees of PPI, namely the Board of Commissioners, Board of Directors and employees. With the Code of Conduct, PPI expects that every individual have a high awareness to behave in accordance with good ethical values so they can support the establishment of a harmonious working relationship and have a positive impact on PPI's image.

The Company's commitment to this is demonstrated by requiring that every employee read, understand, and comply with the provisions set out in the Code of Conduct and sign the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Personnel Commitment Statement Sheet which is carried out periodically or annually. In 2021, the signing of the statement sheet has been carried out on December 21, 2021.

Socialization and Internalization

The socialization and internalization of the main points of the Code of Conduct are the responsibility of the GCG Team. PPI is committed to conducting



dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Insan Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
- b) Setiap Pejabat dan Pegawai Perseroan mendapatkan sosialisasi dan menerima satu salinan *Code of Conduct*, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Code of Conduct*;
- c) *Code of Conduct* diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh Pejabat dan Pegawai Perseroan, serta didokumentasikan oleh Tim GCG sebagai koordinator dan penanggung jawab; dan
- d) Mengevaluasi pencapaian atau pemahaman seluruh Insan Perseroan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja;
- e) Mengkaji *Code of Conduct* secara berkala dalam rangka mengembangkan *Code of Conduct* dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

Pada tahun ini, kegiatan sosialisasi *Code of Conduct* dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Desember 2021. Informasi lebih lanjut mengenai *Code of Conduct* perseroan dapat diunduh pada situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Pelaporan, Penanganan, dan Sanksi Pelanggaran

PPI mendorong seluruh karyawan ataupun pihak eksternal apabila mereka menemukan adanya tindakan ataupun dugaan terjadinya pelanggaran terhadap (yang dikembangkan oleh perseroan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses penegakan *Code of Conduct* di PPI.

Perseroan telah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapapun yang terbukti melanggar pokok-pokok *Code of Conduct*. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di perseroan.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, perseroan tidak menemukan adanya laporan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh insan perseroan.

socialization effectively and thoroughly with the following provisions:

- a) Socializing the Code of Conduct to all Company Personnel, Customers and Business Partners as well as conducting periodic refreshers;
- b) Every Officer and Employee of the Company receives socialization and receives one copy of the Code of Conduct, as well as signs a commitment statement form to comply with and implement the Code of Conduct;
- c) The Code of Conduct is updated and re-signed annually by the Officials and Employees of the Company, and documented by the GCG Team as coordinator and person in charge; and
- d) Evaluating the achievement or understanding of all the Company's personnel, both during orientation and working period;
- e) Reviewing the Code of Conduct on a regular basis to develop a Code of Conduct and if necessary it can be further elaborated in various company policies and regulations.

This year, the socialization of the Code of Conduct was carried out in conjunction with the signing of the Statement of Commitment Sheet for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Personnel dated December 21, 2021. Further information regarding the Company's Code of Conduct can be downloaded on the Company's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Whistleblowing, Handling, and Sanctions

PPI encourages all employees or external parties if they find any action or alleged violation of the Code of Conduct, they can report it through the Whistleblowing System mechanism developed by the Company as a sanctions for anyone who is proven to have violated the main points of the Code of Conduct.

The types of sanctions and the mechanism for imposing sanctions refer to the employment policies applicable in the Company.

Number of Violations in 2021

Throughout 2021, the Company did not find any reports of complaints regarding violations of the Code of Conduct committed by the Company's personnel.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

CORPORATE ETHICS GUIDELINES

Latar Belakang dan Kebijakan WBS

Sebagai warga BUMN yang sangat peduli dengan penegakkan praktik bisnis korporasi sehat, perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan seluruh karyawan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, perseroan telah merancang dan membangun sebuah mekanisme pelaporan yang dikenal dengan nama Sistem pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") yang diatur dalam sebuah kebijakan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/ VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan

Pada prinsipnya, WBS digunakan sebagai media untuk melaporkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, Code of Conduct, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kehadiran WBS di Perseroan menjadi bentuk nyata atas komitmen penuh Perseroan dalam menghadirkan iklim kerja yang kondusif dan bebas dari praktik *bad governance* bagi seluruh karyawan.

Secara umum, Kebijakan WBS perseroan mengatur hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran
2. Kebijakan Perlindungan Pelapor
3. Apresiasi Pelapor
4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
5. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
6. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
7. Administrasi Pelaporan
8. Pemantauan Tindak Lanjut
9. Penyampaian Tanggapan
10. Publikasi dan Sosialisasi

Dengan adanya WBS, PPI berharap seluruh karyawan menjadi lebih terdorong untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan atas pelanggaran tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan sepanjang pelaporan tersebut didukung dengan kecukupan bukti awal yang

WBS Background and Policy

As an SOE who is very concerned with the enforcement of sound corporate business practices, the Company is committed to continuously improving the compliance of all employees with applicable regulations and ethical standards as well as preventing violations from occurring. Therefore, the Company has designed and built a reporting mechanism known as the Whistleblowing System ("WBS") which is regulated in a policy through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 10a/DU/SKD/PPI/ VI/2018 dated June 4, 2018 regarding First Amendment to the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy for Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In principle, WBS is used as a medium to report violations of the principles of GCG, Code of Conduct, company regulations and applicable laws and regulations by PPI's personnel that may harm the Company and its stakeholders. The presence of WBS in PPI is a tangible form of PPI's full commitment in providing a conducive working climate free from bad governance practices for all employees.

In general, the Company's WBS Policy regulates the following:

1. Policy on Receiving and Resolving Violation Reports
2. Whistleblower Protection Policy
3. Whistleblower Appreciation
4. Whistleblowing Team
5. Receipt of Violation Reports
6. Process for Handling Violation Reports
7. Reporting Administration
8. Follow-up Monitoring
9. Submission of Feedback
10. Publication and Outreach

With the WBS, the Company expects that all employees be more motivated to report any violations or allegations of violations without any fear or hesitation as long as the reporting is supported by sufficient initial evidence that is strong and can be accounted for. Further information



kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan WBS PPI dapat diunduh pada situs web perseroan: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Lingkup Pelaporan WBS PPI

Sebagaimana diatur dalam Kebijakan WBS, berikut ini adalah jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain:

- Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
- *Code of Conduct*
- Prinsip-prinsip GCG
- Kecurangan
- Gratifikasi
- Peraturan Perusahaan
- Peraturan Perundang-Undangan
- Regulasi normatif lain yang relevan dengan bidang usaha PPI

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

PPI secara konsisten melakukan berbagai upaya agar sosialisasi Kebijakan WBS dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan *stakeholders* eksternal. Internalisasi Kebijakan WBS bagi karyawan dilakukan dengan membagikan buku saku mengenai Kebijakan WBS kepada seluruh Unit Kerja. Sementara itu, sosialisasi kebijakan WBS bagi *stakeholder* eksternal dilakukan dengan mencantumkan kebijakan WBS di dalam situs perseroan serta mengoptimalkan fungsi media sosial perseroan sebagai *tools* untuk meningkatkan *awareness* para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

- a) Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.
- b) Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- c) Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (*stakeholders*) baik secara lisan maupun tertulis.
- d) Perseroan dalam hal ini melalui Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (*stakeholders*) mengajukan pelaporan pelanggaran.
- e) Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - Disampaikan melalui: **PO BOX 1195**
 - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar

regarding the Company's WBS Policy can be downloaded on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Scope of the Company's WBS System

As stipulated in the WBS Policy, the following are the types of alleged violations that can be reported through WBS, including:

- Corruption, Collusion, Nepotism (KKN)
- Code of conduct
- GCG principles
- Cheating
- Gratuities
- Company regulations
- Legislation
- Other normative regulations relevant to PPI's line of business

Socialization on Whistleblowing System

PPI consistently makes various efforts so that the socialization of the WBS Policy can be well received and understood by all employees and external stakeholders. Internalization of WBS Policy for employees is carried out by distributing pocket books on WBS Policy to all Work Units. Meanwhile, socialization of WBS policies for external stakeholders is carried out by including WBS policies on the Company's website and optimizing the function of the Company's social media as tools to increase stakeholder awareness.

Whistleblowing Mechanism

- a) Reports of alleged violations by employees are reported to the Board of Directors.
- b) Reports of alleged violations by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are reported to the Board of Commissioners.
- c) The Company accepts every violation report submitted by external parties (*stakeholders*) either orally or in writing.
- d) The Company, in this case through the GCG Team, provides an explanation of the policies and procedures for the settlement of reporting violations when external parties (*stakeholders*) submit reports of violations.
- e) Reporting of alleged violations by the Worker as referred to in letter a) above can be carried out using the following mechanisms:
 - Via: **PO BOX 1195**
 - Via an official letter addressed to the Board of Directors by means of direct delivery or

langsung atau melalui pos ke alamat:
**Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
 up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
 Graha PPI
 Jl. Abdul Muis No. 8
 Jakarta 10160**

- f) Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
- Disampaikan melalui: **PO BOX 1195**
 - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
**Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
 Graha PPI
 Jl. Abdul Muis No. 8
 Jakarta 10160**
- g) Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- h) Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelanggaran yang akan disampaikan.

Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- a) Tim GCG melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Selanjutnya, Tim GCG akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- b) Apabila hasil verifikasi sebagaimana huruf a) di atas menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak memiliki kecukupan bukti maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
- c) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
- d) Sementara itu, pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja akan ditindaklanjuti

by post to the address:
**Board of Directors of PT Perusahaan
 Perdagangan Indonesia up. Good Corporate
 Governance (GCG) Team
 Graha PPI
 Jl. Abdul Muis No. 8
 Jakarta 10160**

- f) Reporting of alleged violations by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board Commissioners as referred to in letter b above can be carried out by the following mechanisms:
- Via: **PO BOX 1195**
 - Via an official letter addressed to the Board of Directors by means of direct delivery or by post to the address:
**Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia up. Good Corporate Governance (GCG) Team
 Graha PPI
 Jl. Abdul Muis No. 8
 Jakarta 10160**
- g) Written violation reports should be accompanied by photocopies of identity and supporting evidence such as documents related to the actions/transactions carried out and/or violation reports to be submitted.
- h) Written violation reports without identity (anonymous) must be accompanied by supporting evidence such as documents related to the actions/transactions carried out and/or the violations to be submitted.

Handling Violation Reports

- a) The GCG team verifies the incoming reports. Furthermore, the GCG Team will decide whether or not an investigation into the violation reporting is necessary within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.
- b) If the verification result as referred to in letter a) shows that the submitted report is proven to be incorrect and does not have sufficient evidence, the report will not be processed further.
- c) If the verification results indicate a violation accompanied by sufficient evidence, the report can be processed to the investigation stage.
- d) Meanwhile, reports of violations involving employees will be followed up and investigated



- diinvestigasi oleh Tim GCG melalui jalur Direksi.
- e) Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Tim Pengelola Pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.
 - f) Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g) Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
 - h) Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.
 - i) Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.

- by the GCG Team through the Board of Directors.
- e) Regarding reporting of violations involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners that require investigation, will be followed up and investigated by the Whistleblowing Team through the Board of Commissioners.
 - f) Offenders who have been proven based on the results of the investigation, will be processed in accordance with the applicable regulations.
 - g) If there is a reporting violation at the Branch Office level, the role of the Branch Office is only limited to carrying out the verification process, while the next process is followed up by the GCG Team.
 - h) If the results of the investigation prove that there is a violation that leads to a criminal act, then the applicable legal process to law enforcement agencies can be followed up.
 - i) The scheme of the whistleblowing process is as attached.

Perlindungan Bagi Pelapor

PPI berkomitmen akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
2. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
3. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau PPI. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga Pelapor.
4. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak

Whistleblower Protection

PPI is committed to maintaining the confidentiality of the Whistleblower's identity and providing protection guarantees to Whistleblowers who have good intentions and their families. Whistleblower protection includes:

1. Guaranteed reporting channel facilities (telephone, facsimile, letter, email) or an independent, free and confidential Ombudsman.
2. Guaranteed protection of the confidentiality of the identity of the whistleblower and the contents of the report. This protection is provided if the Whistleblower provides identity and information that can be used to contact the Whistleblower. Although it is allowed, the submission of anonymous reporting is not recommended. Anonymous reporting makes it difficult for communication to follow up on reporting.
3. Guarantee of protection against countermeasures from the reported party or PPI. Protection from pressure, postponement of promotion, dismissal, lawsuits, property, to physical actions and other adverse treatment. This protection is not only for the whistleblower but can also be extended to members of the whistleblower's family.
4. Guarantee of confidentiality of communication/information channel with the Whistleblower. Information on follow-up implementation, in the form of when and how and to which institution

lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

- 1) Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja:
 - a) Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b) Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
 - c) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja PPI.
- 2) Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - a) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b) Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.
 - c) Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
 - d) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk

the follow-up is submitted. This information is conveyed confidentially to the whistleblower who is fully identified.

Whistleblowing Team

- 1) The authorities of the Board of Directors and the Whistleblowing Team are as follows:
 - a) The Board of Directors is responsible for the implementation of the Whistleblowing Policy as stipulated in this Decree.
 - b) The Board of Directors determines the GCG Team as the Whistleblowing Team. This team is also known as Whistleblowing Team for the Board of Directors.
 - c) Whistleblowing Team for the Board of Directors is tasked with following up on reports of violations allegedly committed by PPI's employees.
- 2) The authorities of the Board of Commissioners and Whistleblowing Team for Reporting Violations Allegedly Committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are as follows:
 - a) The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Management Policy for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, as stipulated in this Decree.
 - b) The Board of Commissioners establishes a Management Team for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties as needed in accordance with their competence and expertise based on the decisions of the Board of Commissioners. This team is also known as the Whistleblowing Team for Board of Commissioners.
 - c) The Chairman of the Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is the Chairman of the Audit Committee.
 - d) The Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is tasked with following



menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris

up on reports of violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Jenis Sanksi yang Diberikan

Apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PPI, maupun secara umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Types of Sanction

If the Reported Party is proven to have committed a violation, the sanctions imposed will refer to the provisions in force in PPI, as well as in general in accordance with the applicable laws and regulations.

Jumlah Pelaporan dan Hasil Penanganan Pengaduan WBS Tahun 2021

Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System* sehingga tidak terdapat proses penanganan atau tindak lanjut.

Number of Reports and Results of WBS Complaint Handling in 2021

During 2021, there were no reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System media so there was no handling or follow-up process.

Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2021

PPI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap implementasi WBS untuk memastikan bahwa fungsi WBS senantiasa berjalan dengan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta terbebas dari tindak kecurangan atau hal-hal lain yang berpotensi merugikan Perseroan di kemudian hari. PPI juga terus memperkuat kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyosialisasikan pilar-pilar WBS kepada seluruh karyawan.

WBS Implementation Evaluation in 2021

PPI consistently evaluates the implementation of WBS to ensure that the WBS function always runs well to create a safe and comfortable work environment and is free from fraud or other things that have the potential to harm PPI in the future. The Company also continues to strengthen cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in disseminating the WBS pillars to all employees.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ANTI-CORRUPTION AND GRATUITY CONTROL POLICY

Dalam mengelola bisnisnya, PPI berkomitmen akan terus berupaya memberantas segala bentuk tindakan yang mengarah pada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan menjunjung tinggi hadirnya praktik bisnis sehat yang mengedepankan nilai-nilai persaingan yang fair, sportivitas dan profesionalisme, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, perseroan telah menyusun kebijakan mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Kebijakan tersebut memuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan pedoman utama bagi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di PPI dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 10 Juli 2020. Keberadaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di perseroan dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi antara karyawan dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan usaha meliputi penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta unit pengelola dan mekanisme pelaporan.

Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PPI berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan KPK No. 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 06 tahun 2015;
4. Surat KPK No. B.143/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
5. Surat Edaran No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang bersih melalui implementasi pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern; Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal

In managing its business, PPI is committed to continuing to strive to eradicate all forms of actions that lead to the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) by upholding the presence of sound business practices that promote the values of fair competition, sportsmanship and professionalism, and pay attention to the principles of GCG. To achieve this, the Company has developed a policy regarding Guidelines for Gratuity Control which is stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/ PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. The policy contains the commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of the main guidelines for the implementation of Gratification control in PPI and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on July 10, 2020. The Gratuity Control Guidelines in the Company are intended to regulate matters related to the control of gratuities between employees and third parties related to business activities include receiving, giving, and requesting gratuities as well as management units and reporting mechanisms.

Legal Basis

The preparation of PPI's Gratuity Control Guidelines refers to the following laws and regulations:

1. Law no. 28 of 2009 concerning Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
3. KPK Regulation No. 02 of 2014 concerning Guidelines for Reporting and Determination of Gratification Status as amended by KPK Regulation No. 06 of 2015;
4. KPK Letter No. B.143/01-13/03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitations of Gratuity;
5. Circular No. SE-2/MBU/07/2019 dated 29 July 2019 concerning Clean Management of State-Owned Enterprises through the implementation of preventing Corruption, Collusion, Nepotism, and handling conflicts of interest as well as strengthening internal supervision; Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/



- 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); dan
6. Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

- PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero); and
6. Statement of Commitment to Implementing Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PPI telah memuat ketentuan-ketentuan diantaranya yaitu:

1. Ruang Lingkup Gratifikasi
2. Kategori Gratifikasi (Penolakan Gratifikasi, Penerimaan Gratifikasi, Pemberian Gratifikasi, Permintaan Gratifikasi, dan Alternatif Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi)
3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
4. Implementasi
5. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan
6. Sanksi atas Pelanggaran
7. Perlindungan Pelaporan
8. Ketentuan Tambahan

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

PPI telah mengatur batasan pemberian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diterima oleh insan PPI sehubungan dengan kegiatan penugasan dan jabatannya. Uraian lengkap mengenai kriteria dan ketentuan tersebut sudah diungkapkan secara jelas di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Disamping itu, perseroan juga sudah memiliki Kebijakan ISO Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Setiap tahun, PPI mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan PPI, diantaranya dengan memuat imbauan mengenai larangan gratifikasi dalam bentuk *pull up banner* dan poster yang dipasang di lingkungan PPI. Selain itu, PPI juga membagikan buku saku tentang Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah kepada seluruh karyawan sebagai salah satu upaya internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi pada lingkup PPI.

Gratuity Control Guidelines

PPI's Gratuity Control Policy contains provisions including:

1. Scope of Gratuity
2. Category of Gratuity (Rejection of Gratuity, Acceptance of Gratification, Granting of Gratuity, Request for Gratuity, and Alternative Utilization of Acceptance of Gratuity)
3. Management of Gratuity Control
4. Implementation
5. Reporting Mechanisms and Procedures
6. Sanctions for Violations
7. Reporting Protection
8. Additional Terms

Gratuity Control Management

The Company has regulated the limits of grants that are allowed and not allowed to be received by the Company's personnel in connection with their assignment activities and positions. A complete description of the criteria and provisions has been clearly disclosed in the Gratuity Control Guidelines which can be accessed through PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

In addition, the Company also has the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Policy.

Gratification Policy Socialization

Every year, PPI communicates and socializes the gratification control policy to all of the Company's personnel by posting an appeal regarding the prohibition of gratification in the form of pull up banners and posters posted within PPI. In addition, PPI also distributes a pocket book on the Policy for Accepting and Giving Gifts to all employees as one of the efforts to internalize gratification control guidelines within PPI.

KEBIJAKAN KICKBACKS DAN ANTI-PENYUAPAN

KICKBACKS AND ANTI-BRIBERY POLICY

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, PPI senantiasa menerapkan etika bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Sebagai bentuk kesungguhan atas komitmen tersebut, perseroan menyusun Kebijakan Anti- Penyuapan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 29/ DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.

Penyusunan Kebijakan Anti-Penyuapan berpedoman pada perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksistensi Kebijakan Anti-Penyuapan menjadi salah satu bentuk upaya dan mitigasi yang dilakukan perseroan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. PPI berharap seluruh karyawan dengan kesadaran penuh dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalamnya.

In order to achieve the Company's vision, mission, and goals, the Company always implements business ethics based on GCG principles. As a form of seriousness on this commitment, the Company developed an Anti-Bribery Policy which has been approved by the Decree of the Board of Directors No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 6, 2020.

The preparation of the Anti-Bribery Policy refers to the following the following laws and regulations:

1. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and
3. Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The existence of the Anti-Bribery Policy is one of the efforts and mitigations carried out by the Company to prevent unexpected actions. PPI hopes that all employees with full awareness can heed the provisions contained therein.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

PPI tidak pernah memberikan dana atau hibah untuk kepentingan kegiatan politik atau kepada partai politik.

PPI has never provided funds or grants for the benefit of political activities or to political parties.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORTS

Sebagai entitas BUMN, PPI mewajibkan pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

As an SOE entity, PPI requires structural officers up to two levels below the Board of Directors to submit a report on their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN consists of:



1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. PER. KPK No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

1. Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).
2. Law no. 19 of 2019 concerning Corruption Eradication Commission;
3. PER. KPK No. 02 of 2020 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth.

Wajib Lapo LHKPN

PPI secara khusus telah memiliki Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/POB/ PPI/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 28/DU/SKD/POB/PPI/VII/2019 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Mengacu pada pedoman tersebut, perseroan menetapkan pejabat perseroan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, di antaranya:

- Direksi;
- Dewan Komisaris;
- Kepala Divisi
- *Branch Manager*
- Direksi Anak Perusahaan; dan
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PT PPI.

Per 31 Desember 2021, dari total sebanyak 90 orang pejabat PPI yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, diketahui terdapat 84 orang pejabat yang telah melakukan pelaporan sedangkan 6 orang pejabat lainnya belum melakukan pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendorong ketepatan waktu dalam penyampaian laporan LHKPN, Direksi telah memberikan imbauan kepada pejabat terkait yang belum memenuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor:001/ LHKPN/PPI/I/2021 tentang Kewajiban Pengisian E-LHKPN.

State Officials Wealth Report

PPI specifically has the Guidelines for Reporting State Officials Wealth (LHKPN) which is stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 dated January 31, 2020 concerning First Amendment to the Resolution of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: 28/DU/SKD/POB/PPI/ VII/2019 concerning Standard Operating Procedures (SOPs), Procedures for Submission of State Officials Wealth Report (LHKPN) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Referring to these guidelines, the Company stipulates Company officials who are required to submit LHKPN to the KPK, including:

- Board of Directors;
- Board of Commissioners;
- Head of Division
- Branch Manager
- Board of Directors of Subsidiaries; and
- Board of Commissioners of a Subsidiary who does not simultaneously serve as the Board of Directors of PT PPI.

As of December 31, 2021, out of a total of 90 PPI officials who are required to submit LHKPN to the KPK, it is known that there are 84 officials who have reported while other 6 officials have not. In this regard and to encourage timeliness in submitting the LHKPN report, the Board of Directors has given an appeal to relevant officials who have not complied with the LHKPN reporting requirements as stated in the Official Memorandum Number: 001/LHKPN/PPI/I/2021 concerning Obligation to Fill in the E-LHKPN.

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

Penyelenggaraan kegiatan operasional bisnis PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. PPI memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup perusahaan, antara lain yang berkaitan dengan:

1. Pencemaran lingkungan
2. Pelanggaran hukum
3. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Mengenai Pencemaran Lingkungan

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan terkait aktivitas PPI yang diduga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagai warga korporasi BUMN yang menjunjung tinggi penerapan GCG, PPI selalu mematuhi perundangundangan yang berlaku termasuk dalam hal perpajakan sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan PPI tidak pernah memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. Selama tahun 2021, PPI telah memberikan kontribusi kepada kas negara melalui pembayaran pajak dengan nilai sebesar Rp123.797 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi Perpajakan Tahun 2021 & 2020

Uraian / Description	2021	2020
Kontribusi Pajak / Tax Contribution		
PPh Pasal 4 (2) / Income Tax Article 4 (2)	794	907
PPh Pasal 15 / Income Tax Article 15	-	-
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	2.302	6.314
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	8.666	7.366
PPh Pasal 22 Import / Income Tax Article 22 Import	4.662	1.642
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.038	1.182
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	6.099	327
PPN / VAT	67.379	57.265
PPN - WAPU / VAT-WAPU	32.857	57.523
Jumlah Kontribusi Pajak / Total Tax Contribution	123.797	132.525

The Company's business operations always comply with the applicable rules and regulations. PPI ensures that there has never been a bad corporate governance practice within the Company, including those related to:

1. Environmental pollution
2. Violation of law
3. Non-compliance with tax obligations
4. Violation of employee rights
5. Incompatibility of financial reporting with applicable regulations.

Report on Environmental Pollution

Throughout 2021, there were no reports related to the Company's activities that were suspected of causing environmental pollution.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligations

As an SOE corporate that upholds the implementation of GCG, the Company always complies with applicable laws and regulations, including in terms of taxation, so until this Annual Report is published, the Company has never had a case related to taxation. During 2021, PPI contributed to the state treasury through tax payments with a value of Rp123.797 billion, decreasing from the previous year.

Tax Contribution in 2021 & 2020

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah



Kontribusi Pajak Lainnya / Other Tax Contribution

Uraian / Description	2021	2020
Pajak Bumi & Bangunan / Property Tax	1.910	3.028
Pajak Kendaraan / Vehicle Tax	756	572
Bea Masuk / Customs	18.807	64.594
Jumlah Kontribusi Pajak Lainnya / Total Other Tax Contribution	21.473	68.195
JUMLAH / TOTAL	145.270	200.720

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa dan pembahasan kinerja di dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PPI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin dan Sumargo. Laporan Keuangan konsolidasian perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All presentation of information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2021 which have been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners and December 31, 2020 which have been audited by KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin and Sumargo. The Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulations. The applicable regulations include Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

KEBIJAKAN KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PERUSAHAAN

POLICY ON COMPANY INFORMATION CLASSIFICATION AND MANAGEMENT

PPI memiliki Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang dimaksudkan untuk mengatur pengklasifikasian informasi dan mengatur mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan PPI dan kebutuhan Pemegang Saham serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PPI.

Pengelolaan informasi PPI dilakukan secara profesional dan prudent oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab

PPI has a Policy on Classification and Management of Company Information which is intended to regulate the classification of information and regulate the mechanism of disclosure of information internally and externally in accordance with the interests of PPI and the needs of Shareholders and other parties related to PPI.

The management of PPI information is carried out professionally and prudently by the Corporate Secretary and Public Relations Division, which is directly

langsung kepada Direktur Utama. Namun demikian, seluruh Pejabat PPI tetap bertanggung jawab terhadap keamanan informasi PPI yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan atas informasi perseroan di unit kerja masing-masing.

Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi berguna sebagai pedoman dan panduan yang jelas bagi Insan PPI dalam mengklasifikasikan dan memperlakukan informasi perusahaan serta memberikan aturan mengenai mekanisme dalam pengungkapan informasi baik secara internal maupun eksternal sehingga tidak merugikan PPI dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian lengkap mengenai Pedoman Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

responsible to the President Director. However, all of PPI's Officers are still responsible for the security of PPI information which includes the arrangement, implementation and management of Company information in their respective work units.

The Policy on Information Classification and Management is useful as a clear guideline and guide for PPI's personnel in classifying and treating company information as well as providing rules regarding the mechanism for disclosing information both internally and externally so as not to harm PPI while still taking into account the applicable laws and regulations.

A complete description of the Guidelines for Policy on Information Classification and Management can be accessed on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT GOVERNANCE

Kebijakan

PPI memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan Surat Peraturan Direksi nomor 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan. Dalam SOP tersebut dijelaskan hal-hal mengenai ketentuan, prosedur dan proses pengadaan.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang

PPI senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel dalam proses pengadaan.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Tahun 2021

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa perseoran selama tahun buku 2021 telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Perseroan tidak ditemukan adanya temuan terkait aspek pengadaan barang dan jasa oleh auditor internal dan eksternal yang signifikan..

Policy

The Company has policies related to the procurement of goods and services as determined based on the Decree of the Board of Directors Number: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 dated July 29, 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Company Operations based on the Company's Operating Standards (SOP) and the Board of Directors Regulation Number 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for the Procurement of Merchandise. The SOP describes matters regarding the provisions, procedures and procurement processes.

Goods Procurement Principles

PPI always refers to the principles of efficient, effective, competitive, transparent, fair, equal and accountable in the procurement process.

Implementation of Procurement Process in 2021

In general, the procurement process for the Company's goods and services during the fiscal year 2021 has been running in accordance with the provisions. The Company did not find any significant findings related to aspects of procurement of goods and services by internal and external auditors.



KOMITMEN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

COMMITMENT TO FULFILLING THE RIGHTS OF CREDITORS

Perseroan memiliki kebijakan terkait hubungan dengan kreditur sebagaimana telah dijelaskan di dalam:

1. Pedoman GCG, pada bagian Pedoman bagi Stakeholder, aspek Kreditur; dan
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada bagian Etika Usaha Perusahaan, aspek Hubungan dengan Kreditur.

Dalam kebijakan tersebut antara lain dijelaskan bahwa perseroan memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. PPI melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukannya serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal dalam upaya menjaga kepercayaan kreditur.

The Company has a policy related to the relationship with creditors as described in:

1. GCG Guidelines, in the Guidelines for Stakeholders, Creditor aspects; and
2. Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct in the Company's Business Ethics section, aspects of Relationships with Creditors.

In this policy, it is explained that PPI fulfills the rights of creditors according to the agreement. The Company manages loan funds effectively in accordance with their designation and strives for an optimal rate of return to maintain creditor trust.

KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK

SUPPLIER SELECTION POLICY

PPI memiliki kebijakan dan pedoman yang digunakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan dengan pemasok, antara lain diatur dalam:

- 1) Peraturan Direksi Nomor: 036/DU/SKD//PPI/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan; dan
- 2) Surat Keputusan Direksi Nomor: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Merchandise

Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PPI, mulai dari analisa kebutuhan, proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pelaksanaan hubungan dengan pemasok/rekanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seleksi pemasok/rekanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan yang terukur dan jelas.
- 2) PPI memberikan informasi yang sama

PPI has policies and guidelines that are used as guidelines for establishing relationships with suppliers, which include:

- 1) Regulation of the Board of Directors Number: 036/DU/SKD//PPI/IV/2016 dated April 13, 2016 concerning Changes in Provisions and Procedures for the Procurement of Non-Commercial Goods and Services; and
- 2) Decree of the Board of Directors Number: 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Merchandise

The procurement of goods and services is carried out in accordance with the provisions and procedures applicable in PPI, starting from the analysis of needs, processes and stages of the procurement of goods/services to payment in accordance with the requirements in the agreement. In practice, the implementation of relationships with suppliers/partners can be explained as follows:

- 1) Selection of suppliers/partners is carried out in accordance with applicable regulations with measurable and clear requirements.
- 2) The Company provides the same information

kepada setiap rekanan terkait peluang atau rencana pengadaan, persyaratan, tata cara serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka sampai dengan penetapan calon pemenang penyedia barang dan/atau jasa. Akses informasi peluang pengadaan barang/jasa dimuat dalam *website* perseroan.

- 3) PPI memberikan peluang yang sama bagi calon pemasok sepanjang aturan dan ketentuan yang telah ditentukan diikuti oleh calon pemasok. Pemilihan calon pemasok dilakukan PPI berdasarkan proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

PPI melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemasok/ rekanan (*vendor performance*) untuk melihat keterlibatan pemasok/rekanan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas dan kebutuhan perseroan serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perseroan untuk menggunakan kembali rekanan/pemasok yang bersangkutan.

to each partner regarding opportunities or procurement plans, requirements, procedures and implements the process of procurement of goods and services openly until the determination of the winning candidate for the provider of goods and/or services. Access to information on opportunities for procurement of goods/services is published on the Company's website.

- 3) The Company provides equal opportunities for prospective suppliers as long as the rules and conditions that have been determined are followed by the prospective suppliers. The selection of prospective suppliers is carried out by the Company based on the process or stages that have been determined in the Goods and Services Procurement Procedure.

PPI conducts assessments and evaluations of suppliers/partners (*vendor performance*) to see the engagement of suppliers/partners in providing support to the activities and needs of the Company and to be used as consideration for the Company to reuse the partners/suppliers concerned.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

7



KOMITMEN PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

COMMITMENT TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IMPLEMENTATION

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial berlandaskan *Triple Bottom Line* yang mengaitkan *Profit, People, dan Planet*. PPI tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu, diharapkan eksistensi PPI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Peran nyata PPI dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan wujud dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepedulian PPI terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2021, perseroan telah melaksanakan berbagai aktivitas yang mendukung kegiatan operasi PPI dengan memperkuat basis hubungan masyarakat di sekitar area bisnis PPI.

Sebagai Perusahaan BUMN, PPI menjalankan fungsi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial secara transparan melalui perilaku dalam menjalankan aktivitas PPI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang berkelanjutan, PPI bersama Kantor Pusat turut mengambil peran dalam aktivitas sosial dalam lingkup pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kepada masyarakat.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) is committed to community development and environmental preservation through social responsibility based on the Triple Bottom Line linking Profit, People, and Planet. PPI is not only profit-oriented, but the existence of PPI is also expected to provide benefits to the community and the environment.

PPI's role in community development and environmental preservation is a manifestation of compliance with laws and regulations and evidence of PPI's concern for improving the quality of life of the community. Throughout 2021, PPI carried out various activities supporting PPI's operations by strengthening the community relations base around PPI's business areas.

As a state-owned enterprise, PPI carries out its function in implementing corporate social responsibility activities in a transparent manner. As a form of sustainable social responsibility, PPI and the Head Office take part in social activities in the scope of community education, health, and infrastructure.

REALISASI BIAYA CSR 2021

CSR COST REALIZATION IN 2021

Hingga akhir 2021, PPI telah mengeluarkan Rp1.572.022.497,- yang digunakan untuk kegiatan CSR.

Until the end of 2021, PPI distributed Rp1.572,022,497 for CSR activities.



TUJUAN KEGIATAN CSR 2021

OBJECTIVES OF CSR ACTIVITIES IN 2021

Tujuan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam lingkup PPI antara lain:

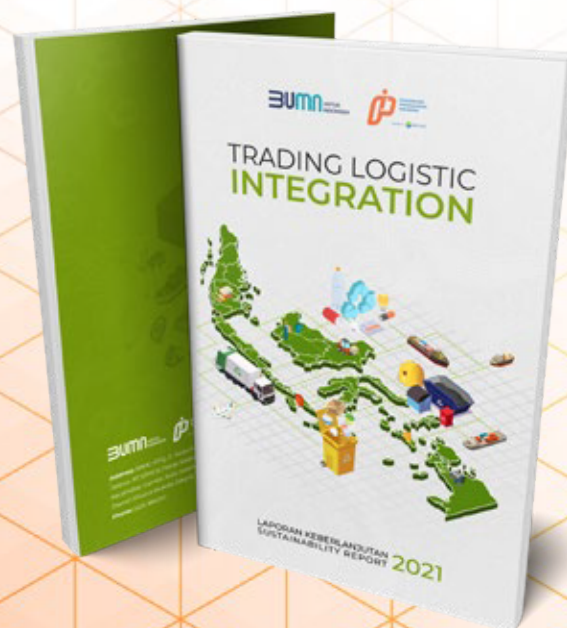
1. Menciptakan ekosistem yang harmonis dengan para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*), sehingga eksistensi PPI dapat terjaga;
2. Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar;
3. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup karyawan dan masyarakat sekitar;
4. Membantu menciptakan citra positif dan membangun kepercayaan diri dari para Pemangku Kepentingan.

The objectives of implementing Corporate Social Responsibility activities in PPI are as follows:

1. To create a harmonious ecosystem with stakeholders, so the existence of PPI can be maintained;
2. To contribute to the development of the environment and surrounding community;
3. To improve the quality and standard of living of employees and the surrounding community;
4. To help in creating positive image and building the confidence of the Stakeholders.

Informasi Lengkap Mengenai Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan disajikan dalam Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang ditampilkan terpisah dari Laporan Tahunan (Annual Report) 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Complete information regarding Sustainable Social Responsibility is presented in the 2021 Sustainability Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, which is presented separately from the 2021 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED FINANCIAL REPORT



**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero)
dan Entitas Anak/*and Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2021, 2020 (Disajikan Kembali, Tidak
Diaudit) dan 2019 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
dan untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan
2020 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)

*Consolidated Financial Statements
31 December 2021, 2020 (Restated, Unaudited)
and 2019 (Restated, Unaudited)
and for the period ended 31 December 2021 and
2020 (Restated, Unaudited)*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditors' Report thereon

Daftar Isi/ Table of Contents

	Halaman/ Page
Surat Pernyataan Direksi / <i>Directors Statement</i>	
Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditors' Report</i>	
Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Financial Statements</i>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / <i>Statements of Consolidated Financial Position</i>	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Changes in Equity</i>	5 - 6
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Cash Flows</i>	7
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	8 - 133

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/ Name | : | Nina Sulistyowati |
| Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Jl Abdul Muis No. 8 – 10 Jakarta 10160, Indonesia |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Kota Harapan Indah Cluster Asia Tropis blok AT 10 No 10 RT 02 RW 023, Tarumajaya Bekasi |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ Name | : | Wien Irwanto |
| Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : | Jl Abdul Muis No. 8 – 10 Jakarta 10160, Indonesia |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Jl Duta Bintaro BI/9 RT/RW : 005/013 Pakujaya Serpong Utara Tangerang Selatan |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : | Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/ <i>Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General</i> |

Menyatakan bahwa:

Stated that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan entitas anak; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and subsidiaries;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; | b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and subsidiaries internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 25 April 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/
Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General


Nina Sulistyowati


Wien Irwanto f.



No. : 00877/2.1133/AU.1/05/1655-1/1/IV/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak

Laporan atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero) and its Subsidiaries*

Report on the financial statement

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and its Subsidiaries, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Government Auditing Standards (SPKN) issued by The Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of The PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and its Subsidiaries as of 31 December 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 14 atas laporan keuangan. Nilai buku aset tetap sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 terlampir sebesar Rp2.124.488.087.146. Nilai buku tersebut termasuk Rp112.409.349.750 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan Rp19.939.511.817 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. Kami juga membawa perhatian ke catatan 19 atas laporan Keuangan. Nilai buku aset lain-lain (aset tetap yang tidak dimanfaatkan) sebagai tercatat pada catatan 19 sebesar Rp419.925.316.185. Nilai buku tersebut termasuk sebesar Rp4.689.719.750 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau bukti kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan sebesar Rp5.572.000.000 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal lain

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1e atas laporan keuangan, di tahun 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero). Sebagai perusahaan penerima penggabungan usaha, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 seolah-olah penggabungan usaha telah terjadi sejak awal periode penyajian.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 14 to the financial statement. Book value of fixed assets as presented in the accompanying statement of financial position as of 31 December 2021 amounting to Rp2,124,488,087,146. The book value includes Rp112,409,349,750 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp19,939,511,817 of land and buildings whose Right to Use certificates had expired. We also draw attention to Note 19 to the financial statement. Book value of Other Assets (Unused fixed asset) as presented in Note 19 amounting to Rp419,925,316,185. The book value includes Rp4,689,719,750 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp5,572,000,000 of land and buildings whose Right to Use certificates had expired. Management has taken measures and will continue its effort to ensure that it secures the physical possession and the ownership certificates of the assets concerned. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matter

As described in Note 1e to the financial statements, in 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) merged with PT Bhandha Ghara Reksa (Persero). As the surviving entity, PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) has restated its consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 as if the merger had taken place since the beginning of the periods presented.

Hal lain (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit atau direview. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun asurans lainnya atas laporan keuangan tersebut.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. PHHARP-AL/103/YS/MA/2022 dan No. PHHARP-AL/104/YS/MA/2022 tanggal 25 April 2022.

Other matter (continued)

The consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020, which are presented as the corresponding figures to the financial statements as of and for the year ended 31 December 2021 were neither audited nor reviewed. Hence, we do not express an opinion or other assurance on those financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The reports on compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management separately in our reports No. PHHARP-AL/103/YS/MA/2022 and No. PHHARP-AL/104/YS/MA/2022 dated 25 April 2022, respectively.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP.1655
Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 855/KM.1/2017



00877

25 April/ *April* 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Desember 2021,
2020 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit) dan
2019 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Consolidated Statements of Financial Position
As of 31 December 2021,
2020 (Restated, Unaudited) and
2019 (Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020*	31 Des/ Dec 2019*	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan Setara Kas	3g, 5	173.058.934.548	230.249.772.006	95.979.326.584	Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka	6	21.828.113.040	1.400.000.000	17.567.199.050	Time Deposits
Piutang Usaha	3h, 7	341.339.677.431	337.607.690.728	406.451.219.495	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	8	62.737.954.385	59.749.207.980	59.903.673.793	Other Receivables
Persediaan	3i, 9	74.515.950.367	114.683.551.270	117.339.134.298	Inventories
Uang Muka	10	53.030.974.710	27.127.680.140	19.513.785.024	Advances
Pajak Dibayar Dimuka	26a	30.668.162.431	54.197.098.431	62.203.316.285	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	3j, 11	36.341.700.162	31.605.563.857	38.474.243.868	Prepaid Expenses
Biaya Operasi dalam Proses	12	29.749.940.504	65.471.661.830	68.246.820.268	Operation Costs in Process
Jumlah Aset Lancar		823.271.407.578	922.092.226.242	885.678.718.665	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	10.422.281.574	10.623.917.699	10.451.636.125	Investments in Associates
Aset Tetap	3k, 14	2.124.488.087.146	2.369.500.473.540	2.301.807.080.732	Fixed Assets
Aset Tidak Berwujud	15	19.523.768.601	10.921.190.888	6.301.890.241	Intangible assets
Properti Investasi	3l, 16	935.866.893.505	341.738.620.240	340.036.730.240	Investment Properties
Aset Hak Guna	17	477.325.453	693.235.656	-	Right of Use Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar lainnya	18	287.000.000	287.000.000	9.430.000.000	Other Non-current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	26c	37.473.684.259	57.130.540.987	65.178.217.088	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	19, 42	459.212.433.427	475.804.376.388	461.606.818.896	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.587.751.473.965	3.266.699.355.398	3.194.812.373.322	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		4.411.022.881.543	4.188.791.581.640	4.080.491.091.987	TOTAL ASSETS

*Disajikan Kembali, Tidak Diaudit (lihat catatan 1e)

*Restated, Unaudited (see note 1e)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021,
2020 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit) dan
2019 (Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries
Consolidated Statements of Financial Position** (continued)

As of 31 December 2021,
2020 (Restated, Unaudited) and
2019 (Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Des/ Dec 2021	31 Des / Dec 2020*	31 Des / Dec 2019*	
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang Usaha	20	209.946.581.814	237.952.882.008	100.612.320.179	Trade Payable
Utang Pajak	26b	16.458.421.151	13.561.093.597	9.894.093.721	Tax Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	21	57.877.800.922	13.368.656.846	30.697.331.876	Other Current Financial Liabilities
Liabilitas Sewa	22	65.287.499	1.362.494.285	1.744.905.701	Lease Liabilities
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	59.444.566.924	130.294.548.558	108.096.314.868	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	3u, 24	102.807.301.152	78.072.319.559	68.597.409.639	Unearned Revenues
Utang Bank – Jangka Pendek	25	143.366.049.385	22.850.409.618	167.461.323.948	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	3s, 27	26.136.879.641	18.022.248.548	39.512.651.560	Current Portion of Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		616.102.888.488	515.484.653.019	526.616.351.492	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang	27	925.217.534.310	938.090.459.727	907.076.866.652	Long Term Payables
Utang Sewa	28	1.274.143.419	2.014.831.587	1.915.440.107	Lease Payables
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	29	80.990.668.555	50.149.435.007	53.030.863.580	Post-Employment Benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.007.482.346.284	990.254.726.321	962.023.170.339	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		1.623.585.234.772	1.505.739.379.340	1.488.639.521.831	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham	3z, 30	942.745.000.000	942.745.000.000	942.745.000.000	Share Capital
Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali		(231.042.410.552)	(114.116.097.080)	(190.980.300.853)	Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Saldo laba					Retained Earnings
Telah ditentukan Penggunaannya					Appropriated
Cadangan Umum	31	111.890.435.294	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	32	1.531.912.169	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan Penggunaannya	33	1.962.307.061.200	1.735.670.579.848	1.723.103.925.940	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas		2.787.431.998.111	2.677.721.830.231	2.588.290.972.550	Total equity attributable to owner of the Entity
Kepentingan nonpengendali	34	5.648.660	5.330.372.069	3.560.597.606	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.787.437.646.771	2.683.052.202.300	2.591.851.570.156	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.411.022.881.543	4.188.791.581.640	4.080.491.091.987	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*Disajikan Kembali, Tidak Diaudit (lihat catatan 1e)

*Restated, Unaudited (see note 1e)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan kembali, Tidak
diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
**Consolidated Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income**
For the years ended
31 December 2021 and 2020 (Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan / Notes	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020*	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Usaha	3t, 35	1.938.824.894.813	3.972.598.307.022	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	36	(1.672.571.418.839)	(3.456.562.931.608)	Cost of Revenues
LABA KOTOR		266.253.475.974	516.035.375.414	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	37	(16.206.222.672)	(16.750.358.826)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	38	(378.893.388.556)	(330.709.029.287)	General and Administration Expenses
Beban Usaha		(395.099.611.228)	(347.459.388.113)	Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA		(128.846.135.254)	168.575.987.301	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA				NON OPERATING INCOME EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	39	8.744.130.692	7.469.635.677	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	39	(57.838.742.589)	(21.795.822.752)	Non-Operating Expense
Beban Non-Usaha – Bersih		(49.094.611.897)	(14.326.187.075)	Non-Operating Expense – Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(177.940.747.151)	154.249.800.226	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Penghasilan (Beban) Pajak:				Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	26c	(15.237.375.000)	(15.114.396.716)	Final Tax
Pajak Kini	26c	(2.029.918.715)	(18.725.588.570)	Current Tax
Pajak Tangguhan	26c	49.913.036.113	(11.640.533.214)	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak		32.645.742.398	(45.480.518.500)	Total Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		(145.295.004.753)	108.769.281.726	NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT PERIOD
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	29	(25.645.982.358)	(15.999.275.307)	Remeasurement of Employee Benefits
Perubahan nilai wajar aset Keuangan	16	341.872.768.000	172.281.574	Changes in fair value of financial Assets
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi		(69.569.892.841)	2.697.149.404	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan		246.656.892.801	(13.129.844.329)	Other Comprehensive Loss For Current Period
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		101.361.888.048	95.639.437.397	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT PERIOD

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian** (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan kembali, Tidak
diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
**Consolidated Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income** (continued)
For the years ended
31 December 2021 and 2020 (Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan / Notes	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020*	
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada:				Net Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		(145.290.435.842)	106.620.453.676	Owners of The Entity
Kepentingan Non-pengendali		(4.568.911)	2.148.828.050	Non-controlling Interest
		(145.295.004.753)	108.769.281.726	
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		101.366.456.959	93.736.345.298	Owners of The Entity
Kepentingan Non pengendali		(4.568.911)	1.903.092.099	Non-controlling Interest
		101.361.888.048	95.639.437.397	

* Disajikan Kembali, Tidak Diaudit (lihat catatan 1e)

*Restated, Unaudited (see note 1e)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan kembali, Tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Consolidated Statements of Changes in Equity
For the years ended 31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Description Shares Capital	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependangali/ Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah/ Total	Description
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
				Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Specific Reserve				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		942.745.000.000	(190.980.300.853)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.723.103.925.940	3.560.597.606	2.591.851.570.156	Balance as of 31 December 2019
Total penghasilan komprehensif periode Berjalan		-	-	-	-	93.736.345.298	1.903.092.099	95.639.437.397	Total comprehensive income for current period
Efek penerapan PSAK 71		-	-	-	-	(4.305.487.617)	(33.317.636)	(4.338.805.253)	Effects of implementation PSAK 71
Pembayaran dividen		-	-	-	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)	Dividend payment
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependangali		-	76.864.203.773	-	-	(76.864.203.773)	-	-	Difference from restructuring transactions of entities under common control
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		942.745.000.000	(114.116.097.080)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.735.670.579.848	5.330.372.069	2.683.052.202.300	Balance as of 31 December 2020

* Disajikan kembali, Tidak diaudit (lihat catatan 1e)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

* Restated, Unaudited (see note 1e)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan kembali, Tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries
Consolidated Statements of Changes in Equity (continued)
For the years ended 31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	Catatan / Notes	Modal Saham/ Description Shares Capital	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earnings			Kepentingan Non Pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah/ Total	Jumlah/ Total	Description
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Specific Reserve				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		942.745.000.000	(114.116.097.080)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.735.670.579.848	2.677.721.830.231	5.330.372.069	2.683.052.202.300	Balance as of 31 December 2020
Total penghasilan komprehensif periode berjalan		-	-	-	-	101.366.456.959	101.366.456.959	(4.568.911)	101.361.888.048	Total comprehensive income for period
Penyesuaian investasi anak	42	-	-	-	-	-	-	(5.320.154.498)	(5.320.154.498)	Changes of investment in subsidiaries
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1e	-	(116.926.313.472)	-	-	125.270.024.393	8.343.710.921	-	8.343.710.921	Difference from restructuring transactions of entities under common control
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.962.307.061.200	2.787.431.998.111	5.648.660	2.787.437.646.771	Balance as of 31 December 2021

* Disajikan Kembali, Tidak Diaudit (lihat catatan 1e)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*Restated, Unaudited (see note 1e)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan Kembali, Tidak
Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Its Subsidiaries**
Consolidated Statements of Cash Flows
For the years ended
31 December 2021 and 2020 (Restated, Unaudited)
(Expressed in Rupiah)

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1.901.014.936.498	4.051.071.211.522	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.948.737.248.791)	(3.629.711.252.160)	<i>Cash payment to vendors and employees</i>
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya	(18.249.677.474)	(965.600.194)	<i>Cash payment to operational expenses and others</i>
Pembayaran pajak	(8.476.775.066)	(42.877.445.750)	<i>Tax payment</i>
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	(74.448.764.833)	377.516.913.418	<i>Net cash provided from/ (used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(59.869.002.949)	(101.431.161.842)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Penarikan (penempatan) deposito	(20.428.113.040)	16.167.199.050	<i>Withdrawal (placement) deposit</i>
Penambahan aset lain-lain	(2.516.049.786)	(15.440.177.520)	<i>Acquisition of other assets</i>
Penambahan aset tidak berwujud	(13.648.357.331)	(7.071.583.481)	<i>Acquisition of intangible assets</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(96.461.523.106)	(107.775.723.793)	<i>Net cash used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS IN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek	120.515.639.767	(144.610.914.330)	<i>Receipts (payments) of other current financial liabilities</i>
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka panjang	(4.758.294.332)	9.523.190.063	<i>Receipts (payments) of long term payables</i>
Pembayaran dividen	-	(100.000.000)	<i>Dividend payment</i>
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(2.037.894.954)	(283.019.936)	<i>Payment of lease payables</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	113.719.450.481	(135.470.744.203)	<i>Net cash used in financing activities</i>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(57.190.837.458)	134.270.445.422	<i>Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent</i>
Kas dan setara kas – saldo awal 1 Januari 2021 dan 2020	230.249.772.006	95.979.326.584	<i>Cash and cash equivalent – Beginning 1 January 2021 dan 2020</i>
KAS DAN SETARA KAS – SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020	173.058.934.548	230.249.772.006	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS – ENDING BALANCE 31 DECEMBER 2021 AND 2020</i>

* Disajikan Kembali, Tidak Diaudit (lihat catatan 1e)

*Restated, Unaudited (see note 1e)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. U M U M

1. G E N E R A L

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (“Entitas”) atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero), yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor, dan distribusi. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Grup Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Grup Terbatas serta Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang penggabungan PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero) kedalam PT Cipta Niaga (Persero) yang berganti nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Penggabungan PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Dharma Niaga (Persero) ke dalam PT Cipta Niaga (Persero) disepakati melalui rancangan penggabungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing perusahaan tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2003 yang dikukuhkan dengan akta notaris Betsail Untajana, SH No.4 tanggal 9 Juni 2003. Sedangkan penggabungan ketiga perusahaan tersebut disahkan dengan akta Risalah Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain mengesahkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), perubahan anggaran dasar serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No.C-14008 HT.04- TH.2003 tanggal 19 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75 Tambahan No. 8784 tanggal 19 Juni 2003.

a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (“Entity”) or Indonesia Trading Company (ITC) is the merger of three State-Owned Enterprises (BUMN), PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) and PT Cipta Niaga (Persero), which is engaged in export trade, import and distribution. The merger was conducted under Act No. 1 of 1995 concerning Limited Companies and Government Regulation No.27 of 1998 Article 34 concerning Merger, Consolidation and Takeover of Limited Company and Government Regulation No.22 Year 2003 dated March 31, 2003 regarding merger of PT Dharma Niaga (Persero) and PT Pantja Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) which was renamed PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

The merger of PT Pantja Niaga (Persero) and PT Dharma Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) is agreed through the draft merger in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the respective company held on 4 February 2003 certified by notarial deed Betsail Untajana, SH No.4 dated 9 June 2003. While the merger of the three companies was approved by deed of Extraordinary Shareholders Meeting of Notary Public Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No.3 dated 9 June 2003 which among others legalized the change of company’s name to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), amendment of articles of association and increase of authorized capital, issued and paid up capital. The amendment of the articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No.C-14008 HT.04-TH.2003 dated 19 June 2003 and published in State Gazette No.75 Additional No. 8784 dated 19 June 2003.

1. U M U M (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2021, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Kantor pusat Entitas berlokasi di Graha PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Bidang Usaha

Tujuan Entitas adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Entitas untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan Terbatas dengan menerapkan prinsip-prinsip Entitas. Untuk mencapai hal tersebut di atas, kegiatan usaha utama Entitas yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan dan juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan umum, industry, bahan bahan konstruksi, alat-alat Kesehatan, treatment air limbah, pergudangan, penyedia akomodasi, penyedia makanan minuman, real estate, sewa guna dan laboratorium, jasa perdagangan, perdagangan besar farmasi, minyak dan gas serta produk turunannya.

I. G E N E R A L (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

On 2 December 2021, Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) which is notarized under Deed No.3 dated 2 December 2021 by Aulia Taufani, S.H., Ministry of Stated Own Enterprises agreed to restructure BUMN through the merger of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

The Entity's head office is located at Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Scope of Business

The Entity's Articles of Association, the intent and purpose of the Entity is to conduct business generally in the field of trading, as well as optimize the utilization of resources owned by the Entity to produce high quality goods and/or services with strong competitiveness to generate profit/ by applying the principles of Limited Liability Entity. To achieve the above, the Entity's main business activities are international trade and domestic trade covering export, import, inter island, local trade, distribution, representative and agency as well as procurement of agricultural, forestry, plantation, fishery, mining industry, construction materials, medical devices wastewater treatment, warehousing, accommodation providers, food and beverage providers, real estate, leasing and laboratories, trade services, big pharmaceutical trade, oil and gas and its derivative products.

1. U M U M (lanjutan)

b. Bidang Usaha (lanjutan)

Disamping kegiatan usaha utama tersebut Entitas dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yaitu sewa gedung, sewa gudang, sewa kantor, sewa ruko, sewa lahan, transportasi, properti, pariwisata dan melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Entitas dan peraturan perundang-undangan.

Entitas menjalankan kegiatan usahanya melalui Kantor Pusat di Jakarta dan:

- (1) Kantor Cabang Regional (10 Kantor Cabang Regional);
- (2) Kantor Cabang, (22 Kantor Cabang);
- (3) Kantor Sub Cabang, (2 Kantor Sub Cabang);
- (4) Kantor Depo.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Komisaris Utama	Herman Heru Suprobo	Didi Sumedi	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Muhammad Kapitra Ampera	Muhammad Kapitra Ampera	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Hamli	Panel Barus	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Setiawan Wangsaatmaja	Hamli	<i>Commissioner</i>
Dewan Direksi			
Direktur Utama	Nina Sulistyowati	Fasika Khaerul Zaman	<i>President Director</i>
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	Wien Irwanto	Kindy Rinaldy Syahrir	<i>Director of Finance, Risk Management, HR & General Affairs</i>
Direktur Komersial & Pengembangan	Andry Tanudjaja	Prasetyo Indrohartono	<i>Director of Commercial & Development</i>
Direktur Operasi	Tri Wahyundo Hariyatno	-	<i>Director of Operation</i>
Direktur Perdagangan Dalam Negeri	-	Anton Mart Irianto	<i>Director of Domestic Trade</i>
Direktur Perdagangan Internasional	-	Eko Budianto	<i>Director of International Trade</i>

I. G E N E R A L (continued)

b. Scope of Business (continued)

In addition to the principal business activities, the Entity may conduct business activities in the framework of optimizing the utilization of its own resources, namely building rental, warehouse lease, office rent, rental shop, land rental, transportation, property, tourism and carry out government assignments in accordance with the principles of Entity management and legislation.

The Entity carried out its business activities through Head Office in Jakarta and:

- (1) Regional Branch Offices, (10 Regional Branch Offices);*
- (2) Branch Offices, (22 Branch Offices);*
- (3) Sub-Branch Office, (2 Sub-Branch Offices);*
- (4) Depo Office.*

c. The composition of the Board of Commissioners and Directors

The composition of the Entity's Boards of Commissioners and Directors as of 31 December 2021 and 31 December 2020 are:

1. U M U M (lanjutan)

I. G E N E R A L (continued)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

d. Consolidated Subsidiaries

Kepemilikan saham Entitas pada entitas anak sebagai berikut:

The Entitas's share ownership in consolidated subsidiaries is as follows:

Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis Usaha/ <i>Type of Business</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage Ownership</i>		Dimulainya Kegiatan Komersial/ <i>Commencement of Commercial Activities</i>	Jumlah Aset sebelum Eliminasi/ <i>Total Assets before Elimination (Rp)</i>	
			2021	2020		2021	2020
PT PPI Industri	Palembang	Manufaktur dan Perdagangan/ Manufacturing and Trading	99,90%	99,90%	18 Sep 1986	22.969.245.903	9.479.759.127
PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai <i>formerly known as</i> PT Trisari Veem)	Jakarta Utara	Jasa pengurusan transportasi/ <i>Transportation service</i>	99,96%	60,00%	19 Nov 1963	131.159.531.470	19.913.725.610

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) sebelumnya dikenal sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul Hadi, SH No. 33 tanggal 18 September 1986.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri) formerly known as PT Dharma Niaga Putera Steel was established based on notarial deed of Syamsul Hadi, SH No.33 dated 18 September 1986.

Anggaran dasar telah mengalami perubahan sesuai dengan akta No 06 tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Diana Idola Hotmarito, S.H., M.Kn. mengenai perubahan susunan dewan direksi dan komisaris, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, pemindahan saham, dan perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PT PPI Industri.

The articles of association was amended in accordance with deed No. 06 dated 30 October 2019 of Notary Diana Idola Hotmarito, S.H., M.Kn. regarding changes in the composition of the board of directors and commissioners, change of purpose and objectives and business activities, transfer of shares, and change of name PT Dharma Niaga. Putera Steel to PT PPI Industri.

Berdasarkan akta notaris perubahan terakhir Kurnia Ariyani, S.H., No. 30 tanggal 27 Agustus 2020 di Tangerang, mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri disingkat PT PPI Industri. Perubahan anggaran dasar dimaksud telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU- AH.01.03-0371005 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Based on the latest notarial deed amendment of Kurnia Ariyani, S.H. No. 30 dated 27 August 2020, Notary in Tangerang, regarding Circular Decisions of the Shareholders of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri, abbreviated as PT PPI Industri. The amendment to the articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights in decree No. AHU-AH.01.03-0371005 of 2020 dated 27 August 2020.

1. U M U M (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT BGR Logistic Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem)

PT Trisari Veem didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963.

Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S,H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No 22 tanggal 13 Oktober 2021 di Tangerang, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

e. Penggabungan Usaha

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-119/MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan, Pemerintah Indonesia berencana menggabungkan sembilan BUMN di Indonesia ke dalam Holding Pangan. BUMN yang akan digabung ke dalam Holding Pangan tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Rekza (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Garam (Garam).

I. G E N E R A L (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT BGR Logistic Indonesia (formerly known as PT Trisari Veem)

PT Trisari Veem was established based on notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No.49 dated 19 November 1963.

Based on Notarial Deed of Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated 13 October 2021 the Entity increased its ownership in PT TSV by acquiring 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk counting of 1,000 shares with a value of Rp 1,000,000 per share, therefore the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. Based on the calculation of the valuation carried out by the Public Appraisal Service Office of Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 30 November 2020.

Based on notarial deed of Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated 13 October 2021 in Tangerang PT Trisari Veem was renamed PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

e. Merger

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No: SK-119/MBU/04/2020 Forming Accelerate Team to Develop Food Industry "Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan", the Government of Indonesia plans to merge nine SOEs in Indonesia into a Holding Pangan. SOEs that will be merged into Food Holding are as follows: PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhanda Ghara Rekza (BGR), PT Indonesian Trading Company (PPI) and PT Garam (Garam).

1. U M U M (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 menetapkan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan segala hak dan kewajiban serta kekayaan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) beralih karena hukum kepada Entitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021, nilai kekayaan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) yang digabung ke dalam modal saham Entitas sebesar Rp786.545.000.000.

100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp842.745.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara berikut: Sebesar Rp156.200.000.000 merupakan setoran lama sesuai dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 Juni 2003, Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notaris di Tangerang, dan sebesar Rp786.545.000.000 berasal dari Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

i) Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Atas penggabungan usaha tersebut di atas Entitas menerapkan PSAK 38: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan mengakui selisih restrukturisasi entitas sepengendali dengan perhitungan sebagai berikut:

	2 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Nilai buku aset bersih BGR	555.502.589.448	672.428.902.920	<i>Net assets of BGR</i>
Nilai valuasi saham BGR	786.545.000.000	786.545.000.000	<i>Share valuation value of BGR</i>
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(231.042.410.552)	(114.116.097.080)	<i>Difference from restructuring transactions of entities under common control</i>

1. G E N E R A L (continued)

e. Merger (continued)

Subsequently, Government Regulation No. 97 Year 2021 dated 15 September 2021 stipulated that PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) was declared dissolved without liquidation and by law all rights and obligations as well as assets of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) were transferred to the Entity.

Based on Decree of Minister of Finance of the Republic Indonesia No. 460/KMK.06/2021 dated 9 November 2021 the value of the net assets of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) which is merged into the share capital of the Entity amounting to Rp786,545,000,000.

100% of the nominal value of each issued shares above, or a total of Rp842,745,000,000 has been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholder) through the following of: a total of Rp156,200,000,000 represents the old placement in accordance with the Notarial Deed No. 3 dated 9 June 2003 of Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notary in Tangerang, and total of Rp786,545,000,000 originating from the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

i) Difference in Restructuring of Entities Under Common Control

For the above merger, the Entity applied SFAS 38: "Business Combination of Entities under Common Control" and recognized the difference in restructuring of entities under common control with the following calculation:

1. U M U M (lanjutan)

I. G E N E R A L (continued)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

e. Merger (continued)

ii) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

ii) Consolidated Statements of Financial Position

Ringkasan laporan keuangan Entitas dengan dan tanpa penggabungan usaha, adalah sebagai berikut:

The summary of the Entity's financial statements with and without merger are as follows:

	31 Des/ Dec 2021		31 Des / Dec 2020		
	Dengan penggabungan usaha/ With merger	Tanpa penggabungan usaha/ Without merger	Dengan penggabungan usaha/ With merger	Tanpa penggabungan usaha/ Without merger	
ASET					ASSETS
Aset Lancar	823.271.407.578	462.969.391.013	922.092.226.242	389.281.676.657	Current Assets
Aset Tidak Lancar	3.587.751.473.965	3.065.336.571.181	3.266.699.355.398	2.788.430.987.615	Non-Current Assets
JUMLAH ASET	4.411.022.881.543	3.528.305.962.194	4.188.791.581.640	3.177.712.664.272	TOTAL ASSETS
LIABILITAS					LIABILITIES
Jumlah Liabilitas					Current Liabilities
Jangka Pendek	616.102.888.488	352.845.839.527	515.484.653.019	222.446.811.044	Liabilities
Jumlah Liabilitas					Total Non-Current Liabilities
Jangka Panjang	1.007.482.346.284	933.069.607.686	990.254.726.321	944.642.553.848	Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.623.585.234.772	1.285.915.447.213	1.505.739.379.340	1.167.089.364.892	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham	942.745.000.000	567.745.000.000	942.745.000.000	156.200.000.000	Share Capital
Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(231.042.410.552)	-	(114.116.097.080)	-	Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Saldo laba					Retained Earnings
Telah ditentukan Penggunaannya					Appropriated
Cadangan Umum	111.890.435.294	(107.539.799.006)	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	1.531.912.169	1.531.912.169	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan Penggunaannya	1.962.307.061.200	1.780.647.753.158	1.735.670.579.848	1.735.670.579.848	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas	2.787.431.998.111	2.242.384.866.321	2.677.721.830.231	2.005.292.927.311	Total equity attributable to owner of th Entity
Kepentingan nonpengendali	5.648.660	5.648.660	5.330.372.069	5.330.372.069	Non-controlling Interests
Jumlah Ekuitas	2.787.437.646.771	2.242.390.514.981	2.683.052.202.300	2.010.623.299.380	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.411.022.881.543	3.528.305.962.194	4.188.791.581.640	3.177.712.664.272	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

1. U M U M (lanjutan)

I. G E N E R A L (continued)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

e. Merger (continued)

ii) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprensif Lain Konsolidasian

ii) Consolidated Statements of Income and
Other Comprehensive Income

	31 Des/ Dec 2021		31 Des / Dec 2020		
	Dengan penggabungan usaha/ <i>With</i> <i>merger</i>	Tanpa penggabungan usaha/ <i>Without</i> <i>merger</i>	Dengan penggabungan usaha/ <i>With</i> <i>merger</i>	Tanpa penggabungan usaha/ <i>Without</i> <i>merger</i>	
PENDAPATAN					REVENUES
Pendapatan Usaha	1.938.824.894.813	1.404.613.488.930	3.972.598.307.022	2.865.138.387.372	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(1.672.571.418.839)	(1.219.117.562.278)	(3.456.562.931.608)	(2.623.444.852.138)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	266.253.475.974	185.495.926.652	516.035.375.414	241.693.535.234	GROSS PROFIT
Beban Usaha	(395.099.611.228)	(190.468.067.826)	(347.459.388.113)	(181.432.956.743)	Operating Expenses
			168.575.987.301		OPERATING PROFIT
LABA USAHA	(128.846.135.254)	(4.972.141.174)		60.260.578.491	Non-Operating Expense –Net
Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih	(49.094.611.897)	(41.798.782.959)	(14.326.187.075)	(7.352.007.798)	
LABA (RUGI)					ROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
SEBELUM PAJAK	(177.940.747.151)	(46.770.924.133)	154.249.800.226	52.908.570.693	
Penghasilan (Beban) Pajak:					Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	(15.237.375.000)	(2.644.839.419)	(24.051.653.326)	(8.937.256.610)	Final Tax
Pajak Kini	(2.029.918.715)	(2.029.918.715)	(9.788.331.960)	-	Current Tax
Pajak Tangguhan	49.913.036.113	15.686.530.701	(11.640.533.214)	(10.963.324.611)	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	32.645.742.398	11.011.772.567	(45.480.518.500)	(19.900.581.221)	Total Tax Benefit (Expense)
					NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT PERIOD
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(145.295.004.753)	(35.759.151.566)	108.769.281.726	33.007.989.472	
Penghasilan Komprensif					Other Comprehensive Other Comprehensive Loss For Current Period
Laba (Rugi) Komprensif Lain Periode Berjalan	246.656.892.801	264.502.810.746	(13.129.844.329)	(14.232.755.848)	
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	101.361.888.048	228.743.659.180	95.639.437.397	18.775.233.624	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT PERIOD
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada:					Net Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(145.290.435.842)	(35.754.582.655)	106.620.453.676	30.859.161.422	Owners of The Company
Kepentingan Non- pengendali	(4.568.911)	(4.568.911)	2.148.828.050	2.148.828.050	Non-controlling Interest
	(145.295.004.753)	(35.759.151.566)	108.769.281.726	33.007.989.472	
Laba (Rugi) Komprensif yang Dapat Diatribusikan kepada:					Comprehensive Income (Loss) Attributable to
Pemilik Entitas Induk	101.366.456.959	228.748.228.091	93.736.345.298	16.872.141.525	Owners of The Company
Kepentingan Non pengendali	(4.568.911)	(4.568.911)	1.903.092.099	1.903.092.099	Non-controlling Interest
	101.361.888.048	228.743.659.180	95.639.437.397	18.775.233.624	

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Entitas dan Entitas Anak (Group) telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tahun 2021 yang dianggap relevan, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Group dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amendemen PSAK 73 “Sewa”

b. Standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

Standar-standar dibawah ini harus diterapkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 “Sewa”
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap”
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar amendemen dan penyesuaian tersebut serta pengaruhnya pada laporan Keuangan Entitas.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (IFAS)

a. Standards effective in the current year

The Entity and its subsidiaries (the Group) has adopted the following accounting standards in 2021 which are considered relevant, but did not result in substantial changes to the Group accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements:

- *Annual Improvement SFAS 1 “Presentation of Financial Statements”*
- *Amendment to SFAS 73 “Lease”*

b. Standards issued not yet adopted

The following standards must be applied for financial years concerning on or after 1 January 2022 and 1 January 2023.

- *Amendment to SFAS 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts”*
- *Annual Improvement to SFAS 71 “Financial Instrument”*
- *Annual Improvement to SFAS 73 “Lease”*
- *Amendment to SFAS 1 “Presentation of Financial Statements”*
- *Amendment SFAS 16 “Fixed Assets”*
- *Amendment to SFAS 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error”*
- *Amendment to SFAS 46 “Income Taxes”*

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these amendments and improvement standard on the financial statements of the Entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 25 April 2022. Prinsip akuntansi yang penting telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kelangsungan usaha dan dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar biaya perolehan, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas anak diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas anak beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup. Angka-angka dalam Laporan Keuangan konsolidasian ini disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan informasi yang dapat dibandingkan terkait dengan periode sebelumnya.

Grup telah melakukan kuasi-reorganisasi dan membukukan pengaruhnya pada tanggal 30 September 2012. (Catatan 44).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) in Indonesia and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants. The Group consolidated financial statements have been prepared by the Board of Directors and authorized for issuance on 25 April 2022. The significant accounting principles is applied consistently in preparing the consolidated financial statements for the eleven months ended 31 December 2021 and 2020 are:

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared on going concern basis and on an accrual basis, except for the statement of cash flows. The consolidated financial statements are also prepared at cost, unless specifically stated in the respective accounting policies of the respective accounts.

The statements of cash flows are prepared using the direct method and present changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. Transactions included in the consolidated financial statements of each of the Entity’s subsidiaries are measured by the principal economic currencies in which the subsidiaries operate (“functional currency”). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the functional currency of the Entity. The figures in these consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements provide comparable information in relation to prior period.

The Group has implemented quasi-reorganization and recorded its effect on 30 September 2012. (Note 44).

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian

1. Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Entitas.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian. Entitas mengendalikan entitas lain ketika Entitas terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Entitas. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Entitas kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup menetapkan setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi atas dasar akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali dilaporkan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation

1. Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of subsidiaries in which the Entity has the ability to directly or indirectly exercise control.

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Entity has control. The Entity controls another entity when the Entity is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Entity. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any noncontrolling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non- controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

1. Entitas Anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis dicapai secara bertahap, tanggal akuisisi nilai tercatat dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin memiliki aset ma perubahan nilai kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang ditetapkan ma dalam pendapatan komprehensif lain ditetapkan ma atas dasar yang sama seperti yang disyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepaskan secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas yang dikonsolidasian yang belum di realisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh grup.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

1. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of each non-controlling interest in the acquiree and the fair value at the acquisition date of the equity interest previously held by the acquirer in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If the amount of the consideration transferred, the recognized non-controlling interest recognized, and the previously held interest of the acquirer is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a discounted purchase, the difference is recognized in the consolidated statements of income.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized change in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was already recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Consolidated transactions, balances and gains between entities that have not been realized have been eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If required, reported values by subsidiary has been changed to conform to the accounting policies adopted by the group.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

**2. Perubahan kepemilikan tanpa
kehilangan pengendalian**

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

3. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian, setiap kepentingan yang tersisa dalam entitas diukur kembali ke nilai wajarnya pada tanggal ketika pengendalian hilang, dengan perubahan jumlah tercatat yang diakui dalam laba rugi. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk tujuan akuntansi selanjutnya untuk kepentingan yang dipertahankan sebagai entitas asosiasi, ventura bersama, atau aset keuangan. Selain itu, setiap jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Entitas telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

**2. Changes in ownership interests in
subsidiaries without change of control**

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

3. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Entity had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi di entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi di entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi bagi akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Entitas atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognised the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. Investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih entitas asosiasi” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi konsolidasian.

5. Penggabungan Usaha

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates (continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to “share of profit/(loss) of an associate” in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an Impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from up stream and downstream transactions between the Group and associated are recognised in the Entity’s financial statements only to the extent of unrelated investor’s interests in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the consolidated statement of income.

5. Merger

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

c. Aset Keuangan

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan bergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalakan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

c. Financial Assets

Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the Entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset Keuangan (lanjutan)

• Instrumen Utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain- lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Assets (continued)

• Debt Instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is instrument in profit or loss when the asset is instrument or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*
- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognized in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Aset Keuangan (lanjutan)

• Instrumen Utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/ (kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

• Instrumen Ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya sebagai hak Entitas untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/ (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial Assets (continued)

• Debt Instrument (continued)

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.*

• Equity Instrument

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be received in profit or loss as other income when the Entity's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognized in other gain/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

d. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian, Grup menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan, bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung, yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ("ECL") tersebut untuk piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

ECL adalah estimasi kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). ECL didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Impairment of Financial Asset Value

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss ("ECL") for trade receivables, other receivables, and contract assets without a significant financing component.

ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

d. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat bruto dari aset keuangan dihapuskan (sebagian atau seluruhnya) sepanjang tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan kegiatan penegakan hukum untuk memenuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang telah jatuh tempo.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

• **Aset Dicatat Sebesar Harga Perolehan
Diamortisasi**

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Impairment of Financial Asset Value
(continued)**

The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery. This is generally the case when the Group determines that the debtor does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group procedures for recovery of amounts due.

For investments in equity instruments classified as available-for-sale, a significant and prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an indicator that the asset is impaired.

• **Assets are carried at amortized cost**

For loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not yet been incurred) discounted using the asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate determined in the contract. For practical reasons, the Group can measure impairment based on the fair value of the instrument using observable market prices.

If, in a subsequent period, the amount of impairment decreases and the decrease can be objectively linked to an event that occurred after the impairment was recognized (for example an increase in the debtor's credit rating), the recovery of the previously recognized amount of impairment is recognized in the consolidated statements of income.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

d. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual**

Jika terdapat bukti objektif dari penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini, dikurangi rugi penurunan nilai aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi – dihapus dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika, di periode selanjutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi, rugi penurunan nilai tersebut dibalik melalui laporan laba rugi konsolidasian.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan keuangan konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Impairment of Financial Asset Value
(continued)**

- **Assets are classified as available for sale**

If there is objective evidence of impairment of an available-for-sale financial asset, the cumulative loss is measured as the difference between cost and current fair value, less impairment loss on the asset previously recognized in profit or loss – removed from equity and recognized in the statement of profit and loss. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale has increased and the increase can be objectively linked to an event that occurs after an impairment loss is recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the consolidated statement of income.

e. Transactions and Balances in Foreign Currencies

The books of accounts of the Group are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. As at the date of the consolidated financial statements, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia middle rate prevailing at the date of the consolidated financial statements.

Foreign currency gains or losses arising from transactions denominated in foreign currencies and the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year statement of profit or loss.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang
Asing (lanjutan)**

Mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah
Bank Indonesia:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
USD	14.278	14.105	USD
SGD	10.533	10.590	SGD
YUAN	2.238	2.179	YUAN

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup Melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi”.

Suatu pihak dianggap berelasi Entitas jika:
Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas jika orang tersebut:

- a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama; atau atas Entitas
- b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas; atau
- c) Anggota personel manajemen kunci Entitas atau perusahaan induk.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan yang tidak dibatasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Transactions and Balances in Foreign
Currencies (continued)**

Foreign currencies are translated at Bank
Indonesia middle rate:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
USD	14.278	14.105	USD
SGD	10.533	10.590	SGD
YUAN	2.238	2.179	YUAN

f. Transactions with Related Parties

In its business activities, the Group has transactions with related parties in accordance with SFAS 7 concerning “Related Parties Disclosures”.

A party considered related to the Entity if:
The person or the immediate family member has a relationship with the Entity if the person:

- a) Has joint control or control over the Entity;
- b) Has significant influence over the Entity; or
- c) Member of the key management personnel of the Entity or the parent company.

All transactions with related parties, conducted at normal prices, terms and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the consolidated financial statements.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all-time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not restricted.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

h. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

i. Persediaan

Persediaan dibukukan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode FIFO. Barang dalam perjalanan dinyatakan sebesar FOB Shipping Point. Barang dalam proses dinyatakan sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pemrosesan.

Persediaan yang rusak dikelompokkan kedalam persediaan barang rusak (aset lain-lain), yang merupakan barang-barang yang menurut kondisi fisiknya tidak sesuai lagi dengan isi dan bentuk aslinya dan barang-barang yang masa pemakaiannya sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pabrik (kadaluwarsa). Atas persediaan barang yang rusak disisihkan seluruhnya.

j. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode manfaat yang diharapkan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan di muka untuk barang atau jasa.

Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Trade Receivables

Trade receivables represent receivables arising from the sale of goods and services to the customers in their normal course of business.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, net of allowance for impairment which is established based on objective evidence that a receivable balance is impaired.

i. Inventories

Inventories are recorded at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using FIFO method. The goods in transit are stated at FOB Shipping Point. Processed goods are expressed at the costs incurred in the processing phase.

Damaged inventories are grouped into inventory of damaged goods (other assets), which are goods which, according to their physical condition, are no longer in accordance with the original contents and forms and goods whose use has exceeded the period specified by the manufacturer (expired). Full provision is made on the damaged goods.

j. Prepaid Expense and Advances

Prepaid expense is amortized on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances is part of contractually due that is paid in advance for goods or services.

Advances are recorded as asset on the consolidated statement of financial position.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

k. Aset Tetap

k. Fixed Assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. The cost also includes an initial estimate of the cost of disassembly.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are depreciated using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets, as follows:

Jenis Aset Tetap	Tarif per Tahun/ Rate per Year	Types of Fixed Assets
Bangunan	2,5% - 5%	Building
Alat-alat berat	12,5%	Heavy equipments
Inventaris kantor	12,5% - 25%	Office plant & equipment
Peralatan lainnya	12,5% - 25%	Other equipment
Kendaraan bermotor	12,5% - 25%	Vehicle

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is recognized as an expense at the time of collection. Expenditures that extend the useful life of an asset or that provide an economic benefit in the form of capacity building, production quality, or performance are capitalized and depreciated in accordance with the useful life of the assets.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun terjadinya.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the consolidated financial statements and the resulting gains or losses are recognized in the consolidated statements of income.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset akan diturunkan sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat diperoleh kembali diakui sebagai rugi dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

If the carrying amount of a property, plant and equipment is greater than the recoverable amount, then the carrying amount of the asset will be reduced by the recoverable amount. The difference between the carrying amount and the recoverable amount is recognized as loss and charged to consolidated statements income for current period.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

k. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset tertentu dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi aset tersebut secara substansial telah selesai dan siap digunakan.

l. Properti Investasi

Properti investasi, diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke Grup; dan
- Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan, Grup memilih menggunakan model nilai wajar untuk mengukur seluruh properti investasinya.

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat diukur secara andal tetapi memperkirakan nilai wajar properti tersebut dapat diukur secara andal saat pembangunan selesai, maka properti investasi dalam proses pembangunan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau sampai pembangunannya selesai (mana yang lebih awal).

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan) tidak dapat diukur secara andal atas dasar keberlanjutan, maka entitas mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Fixed Assets (continued)

Borrowing cost that can be directly attributed by acquisition, construction or production of a particular asset are capitalized as part of the cost of the asset. Capitalization of borrowing costs is terminated when activities to acquire, build or produce the asset are substantially complete and ready for use.

l. Investment Property

Investment property, is recognized as an asset if:

- *It is probable that future economic benefits related to investment property will flow to the Group; and*
- *The acquisition cost of investment property can be measured reliably.*

Investment property is initially measured at cost. Transaction fees are included in the initial measurement.

After the recognition, the Group elects to use the fair value model to measure the entire investment property.

If the Group determines that the fair value of investment property in the development process cannot be reliably measured but estimates that the fair value of the property can be measured reliably when the construction is completed, the investment property in the development process is measured at cost until its fair value can be measured reliably or until the construction is complete (whichever is earlier).

If the Group determines that the fair value of investment property (other than investment property in the development process) cannot be measured reliably on the basis of sustainability, then the entity measures the investment property using a cost model.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

PSAK 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Grup mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Grup membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak terpulihkan.

Aset non keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah dipulihkan adalah lebih tinggi dari harga jual bersih aset dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat terendah yang menghasilkan arus kas terpisah (Unit Penghasil Kas). Aset non keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk kemungkinan adanya pemulihan untuk setiap aset yang telah diturunkan nilai nya pada setiap tanggal pelaporan.

m. Impairment of Non Financial Assets

SFAS 48 prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the Group to recognize an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Assets that have an infinite useful life are not amortized and are tested for impairment annually. Amortized assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Non financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the assets's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non – financial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

n. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada tanggal 19 September 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan PSAK 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

Berdasarkan PSAK 70, Aset Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), sementara liabilitas terkait diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual sehubungan dengan pembelian aset Pengampunan Pajak. Uang tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba Rugi pada periode saat SKPP diterima.

Selisih antara nilai yang diakui sebagai aset dan liabilitas dicatat pada ekuitas sebagai Tambahan Modal Disetor, dan tidak boleh direklasifikasi sebagai saldo laba atau komponen laba atau rugi tahun berjalan.

Grup diperbolehkan untuk mengukur Kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP.

Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Grup memutuskan untuk mengikuti aturan Pengampunan Pajak dan menerapkan persyaratan pengungkapan PSAK 70 untuk laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2016.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Asset and Liabilities Tax Amnesty

On September 19, 2016, Indonesian Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) issuing SFAS 70: "Asset Accounting and Tax Amnesty".

Based on SFAS 70, the Tax Amnesty assets are measured on the basis of the value reported in the Tax Amnesty Certificate (SKPP), while the related liability is measured based on the cash value or cash equivalent used to settle the contractual obligations with respect to the purchase of the Tax Amnesty assets. Tax settlement amount (the amount of tax payable in accordance with the Tax Amnesty rules) is charged to the income statement in the period in which the SKPP is received.

The difference between the value recognized as an asset and liability Tax amnesty is recorded in equity as Additional Paid-in Capital, and It should not be reclassified as retained earnings or components of the current year's profit or loss.

The Group is allowed to re-measure the assets and liabilities of Tax Amnesty based on fair value in accordance with the provisions of the SFAS at SKPP date.

The difference between the value after the remeasurement and the initial listing value is recognized as an adjustment to the Additional Paid-in Capital.

The Group decided to follow the Tax Amnesty rules and applied the disclosure requirements of SFAS 70 for the consolidated financial statements in 2016.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

o. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Liabilitas keuangan lain Grup terdiri dari utang usaha, pinjaman bank, liabilitas keuangan lancar lainnya, biaya yang masih harus dibayar, dana investasi dan Ex BPPN, liabilitas jangka Panjang lain dan utang sewa.

p. Hak Atas Tanah

Beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah Ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories:

- *Liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) subclassifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

Other financial liabilities of the Group comprise of the trade payable, bank loan, other current financial liabilities, accrued expense, Investment fund and Ex BPPN, other non current liabilities and lease payables.

p. Landrights

All costs incurred in connection with the acquisition of landrights are recognized as part of the landright's acquisition cost. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of the land. Extension or renewal cost of legal right over land is recognized as intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**q. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi**

Provisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui sebagai liabilitas, jika ketiga syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- 1) Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- 2) Kemungkinan besar (probable) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis; dan
- 3) Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Penggunaan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan dalam hal penentuan provisi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan konsolidasian tersebut, meskipun sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar saldo akun lainnya dalam laporan posisi keuangan. Namun, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, meskipun hal ini jarang terjadi maka liabilitas ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai liabilitas kontinjensi.

Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, adalah:

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi lebih pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**q. Provision, Contingent Liabilities and
Contingent Assets**

Provision

Provision is a liability whose time and amount are uncertain. Provisions are recognized as liabilities, if the following three conditions are met:

- 1) *The Group has current obligations (both legal and constructive) as a result of past events;*
- 2) *It is probable that the settlement of such obligations results in an outflow of resources containing economic benefits; and*
- 3) *Reliable estimates of the amount of these liabilities can be made.*

The use of the best estimate of expenditures required to settle current liabilities at the end of the reporting period in the case of provisioning provision is a fundamental part of the preparation of the consolidated financial statements and does not reduce the reliability of the consolidated financial statements, although it contains higher uncertainty than most other account balances in statements of financial position. However, when reliable estimates cannot be made, although this is rare then these liabilities are disclosed in the notes to the financial statements as contingent liabilities.

Contingent Liabilities

Contingent liabilities disclosed in the notes to the financial statements are as follows:

1. *The potential obligations arising from past events and their existence become more certain with the occurrence or absence of one or more future events not entirely within the entity's control; or*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (lanjutan)

Liabilitas Kontinjensi (lanjutan)

Liabilitas kontinjensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, adalah: (lanjutan)

2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a) Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban; atau
 - b) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Namun, bilamana arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis kemungkinan kecil terjadi, maka tidak diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir tahun, untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar (*highly probable*).

Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan besar (*highly probable*) arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh entitas, dimana aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets (continued)

Contingent Liabilities (continued)

Contingent liabilities disclosed in the notes to the financial statements are as follows: (continued)

2. Current obligations arising as a result of past events, but not recognized because:
 - a. There is no possibility of an entity issuing resources containing economic benefits to settle the obligation; or
 - b. The amount of these liabilities cannot be measured reliability.

However, when cash flows of resources containing economic benefits are unlikely to occur, they are not treated as contingent liabilities. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its statement of financial position (balance sheet) at the end of the year, to determine whether the level of probability of an outflow of resources containing economic benefits is increasing to be highly probable.

Contingent Assets

Contingent assets are disclosed in the notes to the consolidated financial statements if there is a high probability of inflow of economic benefits to the entity, in which the contingent asset is a potential asset arising from past events and its existence is confirmed by the occurrence or absence of one or more events at a future that is not entirely within the entity's control. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its consolidated statement of financial position at the end of the year to ensure that its development has been properly reflected in the consolidated financial statements.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

r. Pajak Penghasilan

Grup telah menerapkan PSAK 46: Pajak Penghasilan dan Amandemen PSAK 46 tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terhutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi konsolidasian, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui diluar laba atau rugi konsolidasian.

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan 'metode liabilitas'. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Income Tax

The Group has implemented to SFAS 46: Income Tax and Amendments to SFAS 46 concerning Recognition of Deferred Tax Assets on Unrealized Losses, which establishes the accounting treatment for income tax in calculating the consequences of current and future taxes on recovery (settlement) of carrying amounts of assets (liabilities) are recognized in the consolidated statement of financial position and other transactions and events of the current period recognized in the consolidated financial statements.

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized as an expense or income in consolidated statement of income, except to the extent that income tax resulting from transactions or events that are recognized outside statement of profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside consolidated profit or loss.

All temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their tax bases are recognized as deferred tax using the 'balance sheet method'. Deferred tax is measured at the tax rates that apply currently or substantively enacted at the statement of financial position (balance sheet). Deferred tax is charged or credited in the statement of profit or loss, unless the deferred tax is charged or credited directly to equity.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, sedangkan aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal masih dapat dipakai. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final, tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

Pajak Penghasilan Final

Peraturan pajak di Indonesia menetapkan bahwa penghasilan kena pajak tertentu dikenakan pajak final. Pajak final yang diterapkan pada nilai kotor transaksi diterapkan bahkan aset para pihak yang melakukan transaksi mengakui kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 sebagaimana disebutkan di atas, pajak final tidak lagi diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Grup telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak final yang timbul dari pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti investasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Income Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all deductible temporary differences to the extent possible can be utilized to reduce taxable income in future periods, whereas deferred tax assets from future tax benefits and tax losses to the extent that it is probable that the future taxable profit will be available against which the future tax benefits and tax losses can still be used. Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment (SKP) is received or, if appealed against or appeal, when the decision on the objection or appeal is determined.

In accordance with the tax laws, income subject to final income tax, no longer reported as taxable income and all expenses relating to income subject to final income tax cannot be deducted.

Final Income Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying in the transaction is recognizing losses.

Referring to revised SFAS No 46 as mention above, final tax is no longer governed by SFAS No 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from rental income generated from investment properties as of part of current tax.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pajak pasal 4 (2) tentang pajak final, pendapatan dari sewa tanah dikenakan pajak final 10%.

Penghasilan (beban) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat (i) pajak kini (current tax) dan (ii) pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam laporan laba – rugi komprehensif. Akun ini disajikan dengan merinci unsur-unsur beban pajak kini dan penghasilan (beban) pajak.

Beban pajak kini merupakan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan pada satu tahun fiskal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan memperhitungkan (a) penghasilan neto komersial, (b) penghasilan yang dikenakan PPh. Final dan yang tidak termasuk obyek pajak, (c) penyesuaian fiskal positif dan negatif, dan (d) pengurangan penghasilan neto.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari hasil perhitungan pendapatan (beban). tangguhan disajikan secara neto di posisi keuangan konsolidasian (neraca).

s. Liabilitas Imbalan paska Kerja

Grup memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

r. Income Tax (continued)

Based on Tax Regulation article 4(2) about final tax, income from land rental is subject to final tax of 10%.

Other income (expense) of income tax is the aggregate amount of (i) Current tax (current tax) and (ii) Deferred tax (deferred tax) are considered in the profit – or loss. This account is presented by detailing the elements of current tax expense and deferred income (expense) tax.

Current tax expense is the calculation of corporate income tax liability in a fiscal year in accordance with taxation laws in force in Indonesia, taking into account (a) the commercial net income, (b) income subject to income tax final and that does not include tax object, (c) positive and negative fiscal adjustment, and (d) reduction of net income.

Deferred tax assets and liabilities arising from the calculation of income (expenses) at is present in net amount in the consolidated statement of financial position.

s. Post-Employment Benefits Liabilities

The Group has defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

s. Liabilitas Imbalan paska Kerja (lanjutan)

Grup menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengelolaan pesangon karyawan grup dilakukan oleh BRI Life. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuarial adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, bonus, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan liabilitas imbalan kerja terkait dengan program imbalan paska kerja dilakukan oleh aktuarial independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Liabilitas neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi berkaitan dengan program imbalan pasti dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan paska kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**s. Post-Employment Benefits Liabilities
(continued)**

The Group calculates and records estimated for all of its local permanent employees. Employee retirement benefits has been organized by BRI Life. The valuation method used by the actuary is the projected unit credit method, which reflects employee services at the time of the appraisal.

(i) Short-term employee benefits liabilities

The short-term employee benefits consist of salary and related remuneration, bonuses, incentives, and other short-term employee benefits which are recognized as expense and are not discounted when the employee has provided services to Group.

(ii) Post-employment benefits and other long-term employee benefits

The calculation of post employment obligation related to post-employment benefits program is carried out by an independent actuary using the projected unit credit method.

The net liability for employee benefits is recognized in the consolidated statements of financial position related to defined benefit plans, and are carried at the present value of estimated employee benefit in the future related to the services in the present and the past, less the fair value of plan assets. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated cash outflows in future using interest rates of government bonds, which are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have a term to maturity nearest to the period of related post-employment benefit obligations. Government bonds are used because there is no active market for high quality corporate bonds.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

s. Liabilitas Imbalan paska Kerja (lanjutan)

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto), diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) neto dengan tingkat diskonto. Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Post-Employment Benefits Liabilities
(continued)**

Plan assets are assets held by the pension plan. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period. Remeasurement, consisting of actuarial gains and losses, the impact of limitation of assets, excluding the amounts in net interest on the net benefit obligation and the yield of the plan assets (excluding amounts in net interest on the net benefit liability), are recognized in equity through other comprehensive income in the period incurred. Remeasurement is not classified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on an earlier date between:

- *when the amendments or curtailment program occurs; and*
- *when the Group's restructuring or termination cost are recognized.*

Net interest is calculated by multiplying the net liability (asset) by the discount rate. Gain or loss of curtailment is recognized when there is a commitment to reduce the number of employees significantly covered by a program or when there are changes in regulation in a benefit plan, in which the material part of the services provided by the employee in the future no longer give employee benefits, or lower employee benefits.

Profit or loss of settlement is recognized whenever there is a transaction which abolished all legal or constructive obligations on part or all of the benefits in a benefit program.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Pengakuan Pendapatan

Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah sebagian Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri sebagian dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri ebagian diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

t. Revenue Recognition

The Group has implemented SFAS 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps:

- 1. Identify contracts with customers.*
- 2. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promised in a contract to transfer different goods or services to the customer.*
- 3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.*
- 4. Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Group telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian: (lanjutan)

5. Mengakui pendapatan bagi kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu bagi pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui sebagai kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup menjual barang impor dan lokal, menyewakan properti, memberikan jasa kepabean dan logistik, ekspor dan lainnya.

Untuk barang umum, pendapatan diakui pada suatu waktu atau setelah dikirimkan ke pelanggannya, dan pelanggan memperoleh kendali atas aset yang dijanjikan dan kewajiban pelaksanaan Grup. Indikator kontrol dialihkan ke pelanggan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Grup memiliki hak sekarang untuk pembayaran aset;
- Pelanggan memiliki hak legal atas aset;
- Grup telah mengalihkan kepemilikan fisik aset;
- Pelanggan memiliki risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan aset; dan
- Pelanggan telah menerima aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

t. Revenue Recognition (continued)

The Group has implemented SFAS 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps: (continued)

5. Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is, when the customer gains control of the goods or services).

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of transaction prices is different for each contract. Contract assets are recognized after the consideration paid by the customer is less than the balance of the fulfillment obligation. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the fulfillment obligation.

The Group sells imported and local goods, provide rental spaces, rendering custom and freight as well as logistic services, exports and others.

For general goods, revenue is recognized at point in time or upon delivery to its customer, and the customer obtains control of a promised asset and the Group's performance obligation. Indicators of control is transferred to customer include but not limited to the following:

- The Group has a present right to payment of the asset;
- The Customer has legal title to the asset;
- The Group has transferred physical of the asset;
- The Customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset; and
- The Customer has received the asset.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)	3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
<p>t. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)</p> <p>Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan.</p> <p>Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.</p>	<p>t. Revenue Recognition (continued)</p> <p><i>Service income is recognized when the service is provided.</i></p> <p><i>Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.</i></p>
<p>u. Pendapatan Diterima Dimuka</p> <p>Sewa dan biaya layanan yang diterima di muka dari penyewa dikreditkan ke “Pendapatan Diterima Dimuka” dalam laporan posisi Keuangan konsolidasian dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.</p>	<p>u. Unearned Income</p> <p><i>Space rental and service charge received in advance from tenant are credited to “Unearned Income” in the consolidated statements of financial position and recognized as income on a straight-line basis over the lease term.</i></p>
<p>v. Sewa</p> <p>Pemberi sewa mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.</p> <p>Pemberi sewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau sistematis lainnya. Lessor menerapkan dasar sistematis lain jika basis tersebut lebih mewakili pola di mana manfaat dari penggunaan aset yang mendasarinya berkurang.</p> <p>Pemberi sewa mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang terjadi dalam memperoleh pendapatan sewa sebagai beban.</p>	<p>v. Leases</p> <p><i>A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.</i></p> <p><i>A lessor shall recognize lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the underlying asset is diminished.</i></p> <p><i>A lessor shall recognize costs, including depreciation, incurred in earning the lease income as an expense.</i></p>

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

v. Sewa (lanjutan)

Pemberi sewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam memperoleh sewa operasi ke nilai tercatat aset yang mendasarinya dan mengakui biaya tersebut sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kebijakan penyusutan untuk aset dasar yang dapat didepresiasi yang dikenakan sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal lessor untuk aset serupa. Lessor menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16.

Pemberi sewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset yang mendasari sewa operasi mengalami penurunan nilai dan mencatat setiap kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Leases (continued)

A lessor shall add initial direct costs incurred in obtaining an operating lease to the carrying amount of the underlying asset and recognize those costs as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.

The depreciation policy for depreciable underlying assets subject to operating leases shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets. A lessor shall calculate depreciation in accordance with SFAS 16.

A lessor shall apply SFAS 48 to determine whether an underlying asset subject to an operating lease is impaired and to account for any impairment loss identified.

Determining whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement itself and assessing whether fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets or assets, and whether the agreement conveys the right to use the assets.

The Group leases various fixed assets. Lease contracts are usually drawn up for a fixed period of 1 to 3 years but may have extension options.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

v. Sewa (lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak guna didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa ebagian yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu.
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran sebagian untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

v. Leases (continued)

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognized as use rights of use assets and related liabilities on the date on which the leased assets are available for use by the Group. Each lease payment is allocated between a liability and finance cost. Finance costs are charged to profit or loss over the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period. Rights of use assets are depreciated over the shorter period between the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method.

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including fixed payments in substance), less lease incentive receivables.*
- *variable lease payments which are based on an index or rate, initially measured using an index or rate at the start date.*
- *the amount expected to be paid by the lessee based on a guaranteed residual value.*
- *the exercise price of the purchase option if the lessee is confident enough to exercise the option, and*
- *payment of penalties for termination of the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

v. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman tambahan penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variable berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Leases (continued)

Lease payments that must be made under certain extension options are also included in the measurement of the liability.

Lease payments are discounted using the implicit interest rate in the lease. If the rate cannot be immediately determined, which is generally the case with leases in the Group, the incremental loan interest rate of the lessee is used, namely the rate that must be paid by the lessee to borrow the funds needed to acquire an asset with a value equal to the right of use assets in similar economic environment with similar terms and conditions.

To determine the incremental interest rate, the Group

:

- Where possible, use the most recent third party financing received by individual lessees as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.*
- Uses a build-up approach starting with a risk-free interest rate adjusted for credit risk, and*
- Make specific adjustments to leases, such as term, country, currency and security.*

The Group is faced with the potential for future increases in variable lease payments based on index or tariff, which are not included in the lease liability until enacted. When the adjustment of lease payments based on index or interest rates comes into effect, the lease liability is revalued and adjusted according to the right of use assets.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

v. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara grup menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, grup memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

v. Leases (continued)

Lease payments are allocated between principal and finance costs. Finance costs are charged to the income statement over the lease term so as to produce a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period.

Right of use assets are measured at cost, which consists of the following:

- *The initial measured amount of the lease liability*
- *Lease payments made on or before the commencement date less rental incentives received*
- *Initial direct costs, and*
- *Restoration costs.*

Rights of use assets are generally depreciated over the shorter of the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method. If the group is confident enough to exercise the purchase option, the rights of use assets are depreciated over the useful life of the underlying asset. While the group reassesses its land and buildings in the property, buildings and equipment, the group chooses not to do so for the use rights buildings owned by the Group.

Payments related to short-term leases and leases of low value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

v. Sewa (lanjutan)

Opsi Ekstensi dan Terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan Nilai Residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

w. Restrukturisasi Utang Bermasalah

Perlakuan akuntansi atas restrukturisasi hutang bermasalah sebagai berikut:

- Pelunasan hutang melalui pengalihan aset berupa tanah dan bangunan, aset lain, dan piutang kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh liabilitas; Grup dapat mengakui keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi liabilitas tersebut.
- Keuntungan dihitung dari selisih lebih antara (a) nilai tercatat hutang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga yang terutang dan premi, diskonto, beban keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan (b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditor.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Leases (continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases throughout the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of contract management. The majority of extension and termination options that are owned can only be exercised by the Entity and not by the respective lessors.

Residual Value Guarantee

To optimize rental costs during the contract period, the Group sometimes provides a residual value guarantee in connection with the equipment lease.

Lease income from leasing operations wherein the Group acts as the lessor is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

w. Restructuring

The accounting treatment for the debt restructuring are as follows:

- Debt repayment through the transfer of assets in the form of land and buildings, other assets, and receivables to creditors to settle all liabilities; The Group may recognize gains arising from the restructuring of such liabilities.
- Profit is calculated from the excess of (a) the carrying amount of the settled debt (the amount of the nominal minus or plus the interest payable and the unamortized premium, discount, expense, or cost of issuance), with (b) the fair value of the assets transferred to creditor.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Restrukturisasi Utang Bermasalah (lanjutan)

- Restrukturisasi hutang bermasalah dapat berupa penyelesaian sebagian hutang dengan pengalihan aset debitur atau pemberian saham (atau keduanya) kepada kreditor dan modifikasi persyaratan hutang yang masih tersisa.

x. Kuasi Reorganisasi

Berdasarkan PSAK 51 (2003) “Akuntansi Kuasi Reorganisasi”, kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Grup untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya pada nilai wajar tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Dengan melakukan prosedur ini, dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali sehingga entitas diharapkan dapat melanjutkan usahanya seperti baru, dengan laporan posisi keuangan (neraca) yang menunjukkan posisi keuangan yang lebih baik tanpa defisit dari masa lampau.

Saldo akumulasi kerugian, sesuai dengan PSAK tersebut, dieliminasi terhadap akun-akun ekuitas dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Cadangan umum
- Cadangan khusus;
- Selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk didalamnya selisih revaluasi aset tetap);
- Tambahan setoran modal dan sejenisnya;
- Modal saham.

Penentuan nilai wajar aset dan liabilitas Grup dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Restructuring (continued)

- *Troubled debt restructuring may be a partial settlement of debt with the transfer of the debtor’s assets or the grant of shares (or both) to the creditor and modification of the remaining debt terms.*

x. Quasi Reorganization

In accordance with SFAS 51 (2003) “Quasi-Reorganization Accounting”, quasi-reorganization is an accounting procedure governing the Group to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all its assets and liabilities at fair value without legal reorganization. By performing this procedure, it may result in an increase or decrease in net assets compared to the carrying amount prior to the revaluation so that the entity is expected to continue its business as new, with a statement of financial position (balance sheet) showing a better financial position without deficits from the past.

The accumulated balance of losses, in accordance with the SFAS, is eliminated against equity accounts in the following order of priority:

- *General Reserves;*
- *Special reserves;*
- *Difference in valuation of assets and liabilities (including property, plant and equipment revaluation)*
- *Additional deposits of capital and the like;*
- *Capital stock.*

The determination of the fair value of the Group’s assets and liabilities in the quasi-reorganization exercise is based on market value. If market value is unavailable or does not represent actual fair value, fair value estimates are made taking into account the price of similar assets, or with the discounted cashflow model.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

y. Restrukturisasi Utang Bermasalah

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 44, grup melakukan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 September 2012 mengikuti persyaratan dari PSAK di atas.

Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51 (2013): Akuntansi Kuasi-Reorganisasi, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013, grup telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian 52sset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba. (Catatan 44).

z. Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan dengan penerbitan saham biasa diakui sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pengaruh pajak.

aa. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi adalah Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan strategis.

Suatu segmen operasi merupakan suatu komponen di dalam entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

y. Restructuring

As described in Note 44, the group executing quasi- reorganization on September 30, 2012 following the terms of the above SFAS.

In accordance with PPSAK 10 regarding Revocation of SFAS 51 (2013): Quasi-Reorganization Accounting which is effective on January 1, 2013, the group has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in the course of quasi reorganization to retained earnings. (Note 44).

z. Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

aa. Segment Operation

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision- maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as Board of Directors that makes strategic decisions.

An operating segment is a component of an entity:

1. *that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
2. *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and;*
3. *for which discrete financial information is available.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**e. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING POLICIES (continued)**

ab. Peristiwa sebelum tanggal pelaporan

ab. Subsequent event

Peristiwa pasca akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa yang memerlukan) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian jika jumlahnya material. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

Post year-end events that provide additional information about the Group position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Hasil bagi mungkin berbeda dari taksiran ini. Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi diakui pada periode saat estimasi tersebut direvisi dan pada periode mendatang yang terpengaruh.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with SFAS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

Estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam 12 bulan ke depan dibahas di bawah ini.

The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN**

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat penilaian berikut, selain dari yang termasuk estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang lingkungan ekonomi utama tempat setiap entitas beroperasi. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya, antara lain, mata uang yang terutama memengaruhi pendapatan, biaya, dan aktivitas pendanaan, serta mata uang yang biasanya digunakan untuk penerimaan dari kegiatan operasi. Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan yang mendasari yang relevan bagi grup, mata uang fungsional telah ditentukan menjadi Rupiah Indonesia (Rp), karena hal ini mencerminkan fakta bahwa bagian besar bisnis operasional Grup dipengaruhi dalam mata uang Rupiah.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION**

a. Judgement

In the process of applying the accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Functional Currency

The functional currency of the Entity is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. The Entity considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained. Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the grup, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group operational businesses are influenced in Rupiah currency.

**Allowance for Impairment Losses on
Receivables**

The implementation of SFAS 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to provision for loss impairment of receivables. The Entity applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas Dalam hal ini, selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi memerlukan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. Dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, cadangan kerugian penurunan nilai piutang dengan yang diakui masing-masing sebesar Rp381.571.179.732 dan Rp361.444.571.930 (catatan 7) dan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain masing-masing Rp158.799.489.724 dan Rp155.058.886.281 (catatan 8).

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Based on factors that affect collectability, In order to do this, for special provisions to receivables for individual by significantly, the Group also recognizes a collective impairment for debtors' credit risk which grouped based on the same credit characteristics, and although not specifically identified as requiring special provisions, for it have a bigger failed pay risk for have receivables than sharing receivables which is given at the first time by the debtor.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognized a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

As of 31 December 2021 and 2020, allowance for impairment losses recognized amounting to Rp381,571,179,732 and Rp361,444,571,930 respectively (note 7) and allowance for impairment losses on other receivable amounting to Rp158,799,489,724 and Rp155,058,886,281 respectively (note 8).

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN** (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Nilai Realisasi Bersih Persediaan

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) dari persediaan, Grup mempertimbangkan persediaan usang, kerusakan, kerusakan fisik, perubahan tingkat harga, perubahan permintaan konsumen, atau penyebab lain untuk mengidentifikasi persediaan yang akan dituliskan ke NRV. Grup menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dianggap memadai untuk mencerminkan penurunan pasar dalam nilai persediaan.

Pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan atas penjualan barang dan jasa selama tahun berjalan. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan produk jika pelanggan merasa tidak puas. Berdasarkan pengalaman masa lampau atas penjualan yang serupa, Grup yakin bahwa tingkat ketidakpuasan tidak akan lebih dari 0,029%. Oleh karena itu, Grup tidak mengakui pendapatan dikurangi dengan provisi atas estimasi retur.

Penentuan umur sewa

Dalam menentukan umur sewa, manajemen mempertimbangkan fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengambil opsi perpanjangan, atau tidak mengambil opsi pembatalan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION** (continued)

a. Judgement (continued)

Net Realizable Value of Inventories

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Group considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, changes in price levels, changes in consumer demands, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Group adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories.

Revenue recognition

The Group has recognized revenue for sales of goods and services during the year. The buyer has the right to return the goods if its customers are dissatisfied. Based on past experience with similar sales, the Group believes that the dissatisfaction rate will not exceed 0.029%. The Group has, therefore, does not recognized revenue on this transaction with a corresponding provision against revenue for estimated returns.

Determining lease term

In determining the lease term, management considers facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN** (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan umur sewa (lanjutan)

Untuk sewa bangunan dan peralatan, faktor-faktor berikut biasanya paling relevan:

- jika ada denda signifikan untuk membatalkan (atau untuk memperpanjang), Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada leasehold improvement yang diperkirakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Grup mempertimbangkan factor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

Mayoritas opsi perpanjangan untuk sewa kantor dan kendaraan tidak dimasukkan ke dalam liabilitas sewa, karena Grup dapat mengganti asset tanpa biaya signifikan atau halangan bisnis

Umur sewa dinilai Kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION** (continued)

a. Judgement (continued)

Determining lease term (continued)

For leases of properties and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

Most extension options in offices and vehicles leases have not been included in the lease liability, because the Group could replace the assets without significant cost or business disruption.

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN** (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Tetap

PSAK mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan terhadap aset tetap ketika peristiwa atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan dari estimasi membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan dihasilkan dari penggunaan berkelanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Sementara diyakini bahwa asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai wajar yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam asumsi ini dapat secara material mempengaruhi penilaian jumlah terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memiliki dampak material yang merugikan pada hasil operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada aset tetap Grup masing-masing sebesar nihil. (Catatan 14)

b. Asumsi dan Estimasi

Asumsi penting mengenai masa depan dan sumber utama lainnya dalam ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan dijabarkan di bawah ini.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION** (continued)

a. Judgement (continued)

Impairment of fixed assets

SFAS requires that an impairment review be performed on fixed assets when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Determining the net recoverable amount of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. While it is believed that the assumptions used in the estimation of fair values reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the valuation of recoverable amounts and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the result of operations.

On 31 December 2021 and 2020, allowance for impairment losses recognized on the Group's fixed assets are amounting to nil respectively. (Note 14)

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

**Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen
Keuangan**

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian. Manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

**Estimasi Masa Manfaat atas aset tetap dan aset
tidak berwujud**

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud berdasarkan pada ekspektasi dari penggunaan aset seperti yang dituangkan di dalam rencana dan strategi bisnis serta juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pelaku pasar yang diharapkan di masa yang akan datang. Estimasi mengenai masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud didasarkan pada penilaian kolektif grup terhadap praktik industri. Evaluasi teknik internal dan pengalaman pada aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya akibat pemakaian dan kerusakan fisik. Teknis atau usang dan adanya keterbatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aset tersebut.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

**Determining Fair Value of Financial
Instruments**

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

**Estimating Useful Lives of fixed assets and
intangible assets**

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets and intangible assets is based on the group collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat atas aset tetap dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Hal ini dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat terpengaruh secara material oleh perubahan atas perkiraan yang timbul yang diakibatkan dalam factor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode dipengaruhi oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud pada Grup akan meningkatkan biaya operasi yang dicatat dan menurunkan nilai dari aset tidak lancar. Perpanjangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud pada Grup akan menurunkan biaya operasi yang dicatat dan meningkatkan nilai dari aset tidak lancar.

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan paska kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan paska kerja. Tingkat diskonto merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan estimasi nilai kini atas arus kas keluar di masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai. Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji. Grup mengumpulkan semua data historis yang berhubungan dengan perubahan dasar gaji dan mengoreksinya di dalam rencana bisnis di masa yang akan datang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating useful lives of fixed assets and intangible assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the group's fixed assets and intangible assets increases the recorded operating expenses and decreases non-current assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets decreases the recorded operating expenses and increases non-current assets.

Estimation of Pension and Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on factors that are determined on an actuarial basis using several assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja
(lanjutan)

Asumsi utama liabilitas imbalan paska kerja
ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Informasi tambahan telah dipaparkan di
Catatan 29.

Realisasi Aset Pajak Tangguhan dan estimasi
pajak penghasilan

Dalam menentukan provisi atas pajak
penghasilan badan, manajemen diwajibkan
untuk membuat pertimbangan yang signifikan.
Transaksi dan perhitungan tertentu dalam
penentuan pajak yang pada akhirnya tidak pasti
sepanjang kegiatan usaha normal. Grup
mengakui liabilitas atas pajak penghasilan
badan berdasarkan estimasi apakah akan
terdapat tambahan pajak penghasilan. Jika hasil
pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah
dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan
liabilitas pajak kini dan tangguhan pada
periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

Grup menelaah aset pajak tangguhan pada
setiap tanggal pelaporan dengan mengurangi
nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan
bahwa laba kena pajak memadai untuk
mengkompensasi sebagian atau seluruh aset
pajak tangguhan. Perusahaan dan Entitas Anak
juga menelaah pengakuan aset pajak
tangguhan untuk menyesuaikan pemulihan
dari perbedaan temporer berdasarkan level
dan waktu dalam estimasi pendapatan pajak di
periode pelaporan yang akan datang.

Estimasi didasarkan pada pengalaman Grup di
masa lampau dan harapan di masa yang akan
datang terhadap pendapatan dan pengeluaran,
seperti strategi perencanaan pajak di masa yang
akan datang. Tetapi tidak ada kepastian bahwa
grup dapat menghasilkan pendapatan kena
pajak yang memadai untuk digunakan sebagai
bagian atau seluruhnya dari aset pajak
tangguhan.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

*Estimation of Pension and Employee
Benefits (continued)*

*Other key assumptions for pension
obligations are based in part on current
market conditions. Additional information is
disclosed in Note 29.*

*Realization of Deferred Tax Assets and
Estimation of income tax*

*Determining provision for corporate income
tax requires significant judgment by
management. There are certain transactions
and computation for which the ultimate tax
determination is uncertain during the
ordinary course of business. The group
recognizes liabilities for expected corporate
income tax issues based on estimates of
whether additional corporate income tax
will be due. Where the final tax outcome of
these matters is different from the amount
that are initially recorded, such differences
will have an impact on the current and
deferred tax assets and liabilities in the
period in which such determination is made.*

*The Group conducted a review of the
carrying amount of deferred tax assets at
every reporting period and reduce the value
of such assets by as much as possible cannot
be realized, where the availability of taxable
income allow to use all or part of the
deferred tax assets. Group' review on the
recognition of deferred tax assets for
deductible temporary difference can be
deductible based on the level and timing
from the estimated taxable income for the
next reporting period.*

*The estimation is based on the achievement
of the Group in the past and future
expectation toward income and expenses, as
well as with the tax planning strategies in
the future. But there is no certainty that the
group can generate sufficient taxable
income to allow to use part or all of these
deferred tax assets.*

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Provisi dan Kontijensi

Provisions and Contingencies

Grup, dalam menjalankan bisnis biasa, menetapkan ketentuan yang sesuai untuk kewajiban hukum atau kewajiban konstruktifnya saat ini, jika ada, sesuai dengan kebijakannya tentang ketentuan dan kontinjensi. Dalam mengenali dan mengukur provisi, manajemen memperhitungkan risiko dan ketidakpastian.

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari:

The account consist of:

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
Kas	1.213.707.636	2.636.849.152	Cash on hand
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	95.313.230.985	75.241.093.975	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	26.111.882.622	56.456.718.737	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	11.902.825.633	16.153.002.635	Bank Rakyat Indonesia
BPD Jabar Banten	729.646.840	-	BPD Jabar Banten
Bank Tabungan Negara	446.971.228	207.011.339	Bank Tabungan Negara
BPD Sulselbar	72.138.128	4.428.048	BPD Sulselbar
BPD Jatim	17.770.084	60.687.657	BPD Jatim
BPD NTT	15.197.971	9.261.789	BPD NTT
BPD Lampung	450.000	309.925.257	BPD Lampung
USD			USD
Bank Mandiri	4.789.403.770	1.741.937.312	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	2.663.729.238	27.118.227.441	Bank Negara Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Bank Central Asia	90.749.312	363.650.351	Bank Central Asia
Bank Mandiri Syariah	41.231.101	7.557.532	Bank Mandiri Syariah
Subjumlah	142.195.226.912	177.673.502.073	Subtotal

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	14.450.000.000	4.250.000.000	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	15.200.000.000	45.689.420.781	Bank Negara Indonesia
Subjumlah	29.650.000.000	49.939.420.781	Subtotal
Jumlah	173.058.934.548	230.249.772.006	Total
Rupiah	3,50% - 5,50%		Rupiah
USD	0,00% - 0,10%		USD
Jatuh tempo deposito berjangka	1 - 3 bulan/month		Term of time deposits

6. DEPOSITO BERJANGKA

6. TIME DEPOSITS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
Pihak berelasi:			Related parties:
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	3.000.000.000	1.200.000.000	Bank Mandiri
USD			USD
Bank Negara Indonesia	18.828.113.040	200.000.000	Bank Negara Indonesia
Jumlah	21.828.113.040	1.400.000.000	Total

Deposito berjangka digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman bank jangka pendek.

Time deposits are place as collaterals for short term bank loans.

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
Pihak berelasi:			Related parties:
Ditjen Migas ¹⁾	88.669.740.008	88.669.740.008	Ditjen Migas ¹⁾
PT Petromia Gresik	27.349.524.104	31.317.722.589	PT Petromia Gresik
PT Pupuk Kaltim	21.826.453.988	19.801.403.266	PT Pupuk Kaltim
PT Timah Tbk	15.175.387.749	6.699.114.941	PT Timah Tbk
PT Sang Hyang Seri	12.403.033.197	12.573.033.197	PT Sang Hyang Seri
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	14.152.128.253	5.958.195.312	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Rumah Sakit umum Daerah JOTRC	7.335.053.036	4.099.767.793	Regional public hospital JOTRC
PT Pupuk Iskandar Muda	6.144.712.527	8.301.098.347	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Len Industri (Persero)	5.521.697.016	2.063.505.516	PT Len Industri (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.927.186.360	4.913.493.340	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pupuk Kujang	3.722.288.912	7.822.453.148	PT Pupuk Kujang
PT Pembangkit Jawa Bali	3.650.580.000	7.380.000	PT Pembangkit Jawa Bali
PT Perkebunan Nusantara	3.122.080.224	-	PT Perkebunan Nusantara
Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.868.250.000	2.551.106.250	Perusahaan Listrik Negara Persero
Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	2.681.781.692	15.146.268.875	Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
PT Barata Indonesia	1.964.427.060	2.085.302.710	PT Barata Indonesia
Kementerian Sosial RI	1.796.476.537	1.796.476.537	Kementerian Sosial RI
PT Wijaya Karya Beton	1.747.839.908	2.238.031.151	PT Wijaya Karya Beton
PT Pembangunan Perumahan	1.116.762.698	5.047.470.669	PT Pembangunan Perumahan
Pembangunan Perumahan Presisi	1.061.795.605	2.769.361.691	Pembangunan Perumahan Presisi
PT Adhi Karya	966.901.177	5.393.398.190	PT Adhi Karya
Yayasan Bumn Hadir Untuk Negeri	853.244.000	5.918.087.144	Yayasan Bumn Hadir Untuk Negeri
PT Famindo Meta Komunika	-	2.750.012.000	PT Famindo Meta Komunika
Lainnya (dibawah Rp2Milyar)	39.393.788.699	18.539.243.943	Others (below Rp2billion)
Sub Jumlah	274.182.148.618	256.461.666.617	Subtotal

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Telepoin Nusantara ⁱⁱ⁾	75.546.921.225	75.546.921.225	PT Telepoin Nusantara ⁱⁱ⁾
PT Agro Chemindo Niagatama	28.697.388.316	28.697.388.316	PT Agro Chemindo Niagatama
PT Aneka Pupuk Compon	9.881.740.553	9.881.740.553	PT Aneka Pupuk Compon
PT KHI PIPE Industries	8.173.439.453	9.399.177.705	PT KHI PIPE Industries
PT Bukaka Teknik Utama	6.282.650.000	6.282.650.000	PT Bukaka Teknik Utama
PT Sinar Jaya Makmur	6.198.792.458	-	PT Sinar Jaya Makmur
PT Pab. Pipa Indonesia	6.157.556.628	6.157.556.628	PT Pab. Pipa Indonesia
PT Wika Rekayasa Konstruksi	5.485.682.326	5.292.292.948	PT Wika Rekayasa Konstruksi
PT Inti Kemilau Alam	5.270.500.000	-	PT Inti Kemilau Alam
PT ZTE Indonesia	4.303.976.705	4.370.961.335	PT ZTE Indonesia
PT Falcon Cargo	4.256.500.000	4.256.500.000	PT Falcon Cargo
PT Inti Alam Kimia	4.365.672.900	-	PT Inti Alam Kimia
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3.711.135.966	1.492.532.556	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PT Synnex Metrodata Indonesia	3.506.395.111	3.934.472.195	PT Synnex Metrodata Indonesia
Haggat Import Company	3.519.698.508	-	Haggat Import Company
PT Sari Gunung Polowijo	3.473.554.672	3.673.554.672	PT Sari Gunung Polowijo
PT Cemindo Gemilang	3.471.804.797	4.692.270.477	PT Cemindo Gemilang
PT Agri Indoma	3.348.065.034	-	PT Agri Indoma
PT Anugerah Pharmindo Lestari	3.242.977.416	-	PT Anugerah Pharmindo Lestari
PT Koperasi Ternak Terpadu	3.142.795.400	3.142.795.400	PT Koperasi Ternak Terpadu
Eastindo Uta ma Ind Corp	2.765.538.106	2.765.538.106	Eastindo Utama Ind Corp
Corteva Agriscience Seeds Indonesia	2.538.900.753	-	Corteva Agriscience Seeds Indonesia
PT Anugrah Sinar Samudra	2.559.500.000	2.559.500.000	PT Anugrah Sinar Samudra
CV Rifaby Gustham	2.525.500.000	2.525.500.000	CV Rifaby Gustham
PT Surya Lintas Gemilang	2.386.225.000	2.386.225.000	PT Surya Lintas Gemilang
PT Tanah Selaras Mandiri	2.344.450.000	2.344.450.000	PT Tanah Selaras Mandiri
PT Cipta Andika Teladan	2.343.105.520	2.443.280.000	PT Cipta Andika Teladan
CV Putra Kutaraja	2.336.191.500	2.336.191.500	CV Putra Kutaraja
PT Wilmar Chemical Indonesia	2.243.712.282	-	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Virgo Sari	2.131.731.860	2.131.731.860	PT Virgo Sari
PT Semen Jawa	2.064.919.241	2.064.919.241	PT Semen Jawa
PT Unilever Indonesia Tbk	2.062.100.233	1.202.220.206	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bintang Daud Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bintang Daud Indonesia
Tk Lancar Jaya	1.696.132.450	1.696.132.450	Tk Lancar Jaya
PT Unilever	-	4.695.161.998	PT Unilever
PT Banyumas Agro Indonesia	-	1.754.508.000	PT Banyumas Agro Indonesia
Tb Robin	-	1.714.147.309	Tb Robin
Kop. Dharma Sejahtera	-	1.433.840.560	Kop. Dharma Sejahtera
PT Sarottama Dharma Kalpariksa	-	1.295.000.000	PT Sarottama Dharma Kalpariksa
RS. SANSANI (Pekanbaru)	-	1.023.257.981	RS. SANSANI (Pekanbaru)
PT Inti Alam Kimia	4.365.672.900	-	PT Inti Alam Kimia
Debitur lainnya ⁱⁱⁱ⁾	108.339.023.374	108.339.023.374	Other debtors ⁱⁱⁱ⁾
Lainnya (saldo di bawah Rp 1 milyar)	111.988.757.858	129.059.154.446	Others (balance below Rp1 billion)
Sub Jumlah	448.728.708.545	442.590.596.041	Subtotal
Penyisihan Penurunan Nilai	(381.571.179.732)	(361.444.571.930)	Allowance for impairment in value
Jumlah	341.339.677.431	337.607.690.728	Total

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

i) Piutang Ditjen Migas

Pada tanggal 5 Februari 2015 Entitas melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian ESDM dan Dirjen Anggaran hasil dari pembahasan penyelesaian tagihan tersebut Entitas mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 tertanggal 20 Pebruari 2015. Pada tanggal 12 April 2017 Entitas mendapatkan undangan pertemuan dengan Kementerian ESDM dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan gedung Migas Center dengan pimpinan rapat Kabag. Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian ESDM, dimana pada saat ini Kementerian ESDM sedang mengupayakan penyelesaian permasalahan minyak dan Migas Center dengan PT Petro Build Indonesia secara menyeluruh termasuk kewajiban kepada PT PPI.

Piutang Ditjen Migas telah disisihkan secara penuh.

ii) Piutang PT Telepoint Nusantara

Saldo piutang PT Telepoint Nusantara sebesar Rp75.546.921.225 (termasuk denda). Piutang ini timbul dari kontrak kerjasama impor CT-2 dan handset-nya sesuai Surat Perjanjian No.24.DNT/K/95 tanggal 29 September 1995 dan No.228.A/DTK tanggal 10 Mei 1996 dimana eks PT Dharma Niaga (Persero) membuka L/C dan PT Telepoint Nusantara memasarkannya dengan liabilitas melunasi L/C pada saat jatuh tempo, tetapi dalam realisasinya penjualan CT-2 dan handset-nya telah mengalami kegagalan yang berakibat PT Telepoint Nusantara tidak dapat melunasi L/C yang telah jatuh tempo tersebut.

Sejak tahun 2015, tidak terdapat penerimaan dari PT Telepoint Nusantara.

Piutang PT Telepoint Nusantara lainnya telah disisihkan secara penuh.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

i) Trade Receivable from Ditjen Migas

On 5 February 2015, the Entity conducted a meeting facilitated by the Ministry of SOEs with the Ministry of ESDM and the Director General of Budget resulted from the discussion of the settlement of the claims, The Entity sent a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 dated 20 February 2015. On 12 April 2017, The Entity received an invitation to meet with the Ministry of Energy and Mineral Resources in an effort to solve the problem of building the Oil and Gas Center building with the leadership of Kabag. Advocacy and Legal Information, Legal Bureau, Ministry of Energy and Mineral Resources, where the Ministry of Energy and Mineral Resources is currently solving the problem of Oil and Gas Center building with PT Petro Build Indonesia as a whole including obligations to PT PPI.

Account receivables oil and gas Department had been fully provisioned.

ii) Receivables from PT Telepoint Nusantara

The balance receivables of PT Telepoint Nusantara amounting to Rp75,546,921,225 (including penalties). This receivable arises from the contract of cooperation of import of CT-2 and its handset by Letter of Agreement No.24.DNT/K/95 dated 29 September 1995 and No.228.A/DTK dated 10 May 1996 where former PT Dharma Niaga (Persero) opened L/C and PT Telepoint Nusantara marketed it with the obligation to pay off L/C at maturity, but in realization the sales of CT-2 and handset has failed which resulted in PT Telepoint Nusantara unable to repay the L/C that has matured.

Since 2015, there had been no receivables collected from PT Telepoint Nusantara.

Account receivables PT Telepoint Nusantara had been fully provisioned.

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

iii) Debitur Lainnya

iii) Other Debtors

Merupakan piutang usaha yang berasal dari penggabungan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

Represents trade receivables originating from the merger of the 3 (three) State-Owned Enterprises (SOE) the details as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Debitur eks. PT Dharma Niaga	55.257.769.425	55.257.769.425	Debtor ex. PT Dharma Niaga
Debitur eks. PT Cipta Niaga	20.838.760.575	20.838.760.575	Debtor ex. PT Cipta Niaga
Debitur eks. PT Pantja Niaga	4.455.753.714	4.455.753.714	Debtor ex. PT Pantja Niaga
Lainnya	27.786.739.660	27.786.739.660	Others
Jumlah	108.339.023.374	108.339.023.374	Total

Debitur lainnya telah disisihkan secara penuh.

Other debtors had been fully provisioned.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the provision for impairment is adequate.

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	Movements of Allowance for Impairment Losses
Saldo Awal	361.444.571.930	347.006.410.285	Beginning balance
Dampak Penerapan PSAK 71	-	5.562.570.838	Adjustment in relation of adoption of SFAS 71
Penyisihan tahun berjalan	22.601.482.811	11.317.335.192	Current year provision
Pemulihan	(2.474.875.009)	(2.441.744.385)	Recovery
Saldo Akhir	381.571.179.732	361.444.571.930	Ending balance

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
SPKPBM Minol	117.709.880.717	117.709.880.717	SPKPBM Minol
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	58.280.615.659	54.568.819.954	Perum Pembangunan Perumahan Nasional
PT Ficorp	20.556.276.100	20.556.276.100	PT Ficorp
Piutang pegawai	8.966.365.210	5.065.504.633	Employee receivable
Piutang klaim	3.398.739.654	3.594.819.816	Claims receivable
PT Sarotama Kalpariksa	2.988.056.370	2.988.056.370	PT Sarotama Kalpariksa
PT Agrochemindo Niagatama	2.868.699.532	2.868.699.532	PT Agrochemindo Niagatama
Koperasi Produksi Ternak Terpadu Indonesia	-	620.619.289	Koperasi Produksi Ternak Terpadu Indonesia
UD Ashia	-	274.815.000	UD Ashia
Mandasari	-	157.902.500	Mandasari
Lain-lain	6.768.810.867	6.402.700.350	Others
Jumlah	221.537.444.109	214.808.094.261	Total
Penyisihan:			Allowance:
Saldo awal	(155.058.886.281)	(152.470.674.884)	Beginning provision
Penyisihan tahun berjalan	(3.740.603.443)	(2.588.211.397)	Current year provision
Saldo akhir	(158.799.489.724)	(155.058.886.281)	Ending balance
Jumlah Bersih	62.737.954.385	59.749.207.980	Net Amount

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Piutang distributor atas SPKPBM Minol

Distributors' receivables for SPKPBM Minol

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020	
PT Indovinos	56.491.277.066	56.491.277.066	<i>PT Indovinos</i>
PT Muliatama Mitra Sentosa	23.521.553.670	23.521.553.670	<i>PT Muliatama Mitra Sentosa</i>
PT Geka Nara Sutra	9.241.686.791	9.241.686.791	<i>PT Geka Nara Sutra</i>
PT Bimasena Cipta Caraka	7.631.344.405	7.631.344.405	<i>PT Bimasena Cipta Caraka</i>
PT Citra Surya Gemilang	7.387.340.939	7.387.340.939	<i>PT Citra Surya Gemilang</i>
PT Danisa Texindo	5.544.742.235	5.544.742.235	<i>PT Danisa Texindo</i>
PT Megaguna Semesta	3.268.483.338	3.268.483.338	<i>PT Megaguna Semesta</i>
PT Esham Dima	2.566.539.045	2.566.539.045	<i>PT Esham Dima</i>
PT Duta Permata Synergy	2.056.913.228	2.056.913.228	<i>PT Duta Permata Synergy</i>
Jumlah	117.709.880.717	117.709.880.717	Total

Merupakan tagihan kepada para distributor yang timbul dari terbitnya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Cukai Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pendistribusian Minuman Beralkohol antara Grup dengan para distributor yang terkait dengan importasi Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) tahun 2006.

Represent receivables from distributors arising from the issuance of the Letter of Import Duty shortage Notification (SPKPBM), Excise of Administration Fines and Taxes in the Framework of Imports and in accordance with the Distribution Agreement of Alcoholic Drinks between the Company and the distributors related to the import of Beverages Containing Ethyl Alcohol (MMEA) in 2006.

Piutang distributor atas SPKPBM Minol telah disisihkan secara penuh.

Account receivables from distributor SPKPBM Minol had been fully provisioned.

Piutang pegawai

Employee receivables

Piutang pegawai merupakan pinjaman pegawai untuk biaya perawatan dan pinjaman lainnya yang pengembaliannya dilakukan dengan pemotongan atas gaji yang bersangkutan, atas piutang pegawai.

Employee receivables represent employee loans for maintenance and other borrowings whose repayments are made by deductions on the respective wages, on employees' accounts receivable.

Piutang klaim

Claims receivable

Piutang klaim merupakan klaim kepada pihak ketiga dan perorangan atas produk Grup, setoran inkaso, retur barang dan lain sebagainya, serta klaim biaya promosi kepada pemasok.

Claims receivable represent claims to third parties and individuals on Group products, collection deposits, return of goods, etc., and claims supplier for promotion expenses.

Ongkos angkut dan inklaring

Freight and inclaring

Ongkos angkut dan inklaring merupakan tagihan atas ongkos angkutan dan inklaring komoditi kepada pelanggan.

Freight and inclaring charges are billed on freight and inclaring of commodities to customers.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang lain-lain cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the balance of provision for impairment of other receivables is adequate to cover the losses on uncollectible other receivable.

9. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

	31 Des/ Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Barang dalam gudang :			Goods in warehouse:
Produk kimia berbahaya	20.022.618.074	45.728.969.686	Hazardous chemical products
Produk pupuk dan pestisida	35.183.380.736	44.132.176.608	Fertilizer and pesticide products
Produk Unilever	6.356.160.316	7.195.701.710	Unilever product
Produk farmasi dan alat kesehatan	10.030.067.902	6.950.135.071	Pharmaceutical products and medical devices
Produk konsumsi dan bahan pokok	1.401.778.369	5.380.987.754	Consumption and basic commodities products
Produk bahan bangunan lainnya	501.789.565	3.763.000.113	Other building material products
Produk/jasa lainnya	213.778.840	1.323.851.421	Other products/services
Sub Jumlah	73.709.573.802	114.474.822.363	Subtotal
Perlengkapan:			Supplies:
Alat tulis kantor	205.869.305	208.728.907	Office stationery
Suku cadang kendaraan	600.507.260	-	Spare part
Sub Jumlah	806.376.565	208.728.907	Subtotal
Jumlah	74.515.950.367	114.683.551.270	Total

Pada tahun 2021 dan 2020 persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasindo dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp227.757.885.786 terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusakan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

In 2021 and 2020 the inventories were insured to PT Asuransi Jasindo with total insured amounting to Rp227,757,885,786 against the risk of losses that might occur as a result of fire, loss, natural disasters, riots and other risks. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Persediaan usang dan rusak dipindahkan dari persediaan ke persediaan barang rusak (Catatan 19).

Outdated and damaged inventory is transferred from inventory to inventory of damaged goods (Note 19).

10. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Uang muka pembelian	41.343.473.433	14.438.111.797	Advances
Jaminan dan uang muka kerjasama	-	612.562.707	Collateral and advance Cooperation
Uang muka operasional	2.199.212.614	10.349.776.308	Operating advance
Uang muka lain-lain	9.488.288.663	1.727.229.328	Other advances
Jumlah	53.030.974.710	27.127.680.140	Total

10. ADVANCES

The account consist of:

10. UANG MUKA (lanjutan)

10. ADVANCES (continued)

- | | |
|--|---|
| <p>1) Uang muka pembelian merupakan pembayaran dimuka atas pengadaan produk-produk konsumsi dan bahan pokok, bahan kimia, bahan bakar, pupuk, pestisida, bahan bangunan, farmasi dan alkes.</p> <p>2) Jaminan dan uang muka kerjasama adalah saldo uang muka kerja untuk kegiatan operasional PT BGR Logistik Indonesia.</p> <p>3) Uang muka operasional merupakan uang muka pembayaran dimuka atas pengadaan jasa.</p> <p>4) Uang muka lain lain merupakan uang muka operasional yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2021.</p> | <p>1) Advance purchase is an upfront payment in advance for the procurement of Consumption and Basic Commodities, chemical, fuel, fertilizer, pesticides, other building material, pharmaceutical and medical products.</p> <p>2) Collaterals and advances for cooperation are the balance of advances of PT BGR Logistic Indonesia's operation activities.</p> <p>3) Operating advance is in advance payment for the procurement service.</p> <p>4) Other advances represent operational advances that have not been accounted for until as of 31 December 2021.</p> |
|--|---|

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Operasional	33.746.333.487	22.207.197.076	<i>Operational</i>
Umum dan administrasi	1.620.319.159	7.921.501.323	<i>General & administration</i>
Asuransi	588.690.817	757.778.288	<i>Insurance</i>
Sewa gudang/ kantor/rumah	381.796.156	211.128.248	<i>Warehouse/office/home rentals</i>
Lainnya	4.560.543	507.958.922	<i>Others</i>
Jumlah	36.341.700.162	31.605.563.857	<i>Total</i>

12. BIAYA OPERASI DALAM PROSES

12. OPERATING COSTS IN PROCESS

Akun ini terdiri dari :

The account are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Jasa pergudangan	17.928.824.485	29.666.770.448	Warehousing services
Jass logistic	11.821.116.019	32.536.829.126	Logistic services
Waste integrated system	-	3.268.062.256	Waste integrated system
Jumlah	29.749.940.504	65.471.661.830	Total

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Akun ini terdiri dari :

The account are as follows:

	% Kepemilikan/ Ownership	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	221.636.125	20.000.000
Akumulasi penurunan nilai/Accumulated impairment			
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	(221.636.125)	(20.000.000)
Sub jumlah / Subtotal		-	-
Penyertaan saham/Investment in			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Manajemen CBT Nusantara	-	250.000.000	250.000.000
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	160.000.000	160.000.000
BV Netherland Unipro	1,70	45.936.640	45.936.640
PT Tropicana Utama Furniture	10,00	38.251.125	38.251.125
Unipro Amsterdam	2,84	32.125.754	32.125.754
PT Djengger Tour	3,38	3.385.000	3.385.000
Unipro Singapore	2,84	1.605.450	1.605.450
Multi Niaga, Amsterdam	-	18	18
Obligasi RI tahun 1959/ Bonds RI in 1959	-	33	33
Sub jumlah / Subtotal	34,74	10.531.304.020	10.531.304.020

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI *13. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*
(lanjutan)

	% Kepemilikan/ <i>Ownership</i>	31 Des/ Dec 2021	31 Des/ Dec 2020
Akumulasi penurunan nilai / <i>Accumulated impairment</i>			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	119.535.628	119.535.628
PT Manajemen CBT Nusantara	-	52.745.946	52.745.946
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	-	(160.000.000)	-
BV Nederland Unipro	1,70	(45.936.640)	(45.936.640)
PT Tropicana Utama Furniture	-	(38.251.125)	-
Unipro Amsterdam	2,84	(32.125.754)	(32.125.754)
PT Djengger Tour	-	(3.385.000)	-
Unipro Singapore	2,84	(1.605.450)	(1.605.450)
Multi Niaga, Amsterdam	-	(18)	(18)
Obligasi RI tahun 1959/ <i>Bonds RI in 1959</i>	-	(33)	(33)
Sub jumlah / Subtotal	17,38	(109.022.446)	92.613.679
Nilai Tercatat / Carrying Value		10.422.281.574	10.623.917.699

Entitas memiliki keyakinan bahwa, tidak ada kewajiban dalam bentuk constructive obligation di masa datang terkait kepemilikan tersebut.

Penyertaan pada Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, dan BV Nederland Unipro nilainya disisihkan secara permanen karena perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi. Pada tanggal 30 November 2006 B.V. Handelmaatschappij "Unipro" telah melakukan penjualan aset gedung kantor di Paulus Potterstraat 26, 1071 DA Amsterdam dengan nilai sebesar EUR2,500,000.00. Atas hasil penjualan tersebut setelah dikurangi cadangan estimasi pajak terutang dan cadangan untuk biaya-biaya yang akan dibayar, rencananya akan diberikan kepada para pemegang saham termasuk Entitas. Entitas melalui surat Direktur Keuangan No.350/DirKew/Eks/PPI/VIII/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009 kepada Managing Director Unipro BV Amsterdam perihal pembagian dana penjualan aset Unipro BV Amsterdam agar mentransfer dana tersebut dalam mata uang US Dollar. Pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dengan No Surat S-204/MBU/03.2017 perihal persetujuan Pendirian Anak Grup Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara dan surat dari Entitas No FI/DU/Int/PPI/V/2017 Perihal Pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara, telah di setor sebesar Rp10.000.000.000 sebagai penyertaan saham PT PPI ke PT BUMDes sebesar 10 % dari komposisi modal dasar PT Mitra BUMDes Nusantara.

The Entity believes that there is no obligation in the form of future constructive obligations related to such ownership.

Investment in Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, and BV Nederland Unipro were impaired permanently as confirmed, these companies are longer in operation. On 30 November 2006 B.V. Handelmaatschappij "Unipro" has sold the assets of the office building at Paulus Potterstraat 26, 1071 DA Amsterdam with a value of EUR.2,500,000.00. On the proceeds of the sale after deducting the estimated tax reserves and reserves for the costs to be paid, the plan will be granted to shareholders including the Entity. The Entity through the Letter of Director of Finance No.350/DirKew/Eks/PPI/VIII/ 2009 dated 19 August 2009 to Managing Director Unipro BV Amsterdam regarding the distribution of asset sale funds of Unipro BV Amsterdam to transfer the fund in US Dollar. On 24 March 2017 pursuant to a letter from the Ministry of State- Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. Letters S-204/MBU/03.2017 concerning the approval of the Establishment of Subsidiary of Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara and letter from Entity No FI/DU/Int/PPI/V/2017 concerning the Establishment of PT Mitra BUMDes Nusantara, has been paid as much as Rp10,000,000,000 as PT PPI's shares to PT BUMDes amounting to 10% of the composition of the authorized capital of PT Mitra BUMDes Nusantara.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

31 Des/ Dec 2021						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Decrease</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						<i>Acquisition cost:</i>
Tanah	1.914.384.802.396	438.800.000	-	(217.461.450.000)	1.697.362.152.396	<i>Land</i>
Bangunan	361.163.294.197	3.247.210.037	-	(48.432.526.602)	315.977.977.632	<i>Buildings</i>
Kendaraan	212.786.319.127	915.977.664	(245.000.000)	10.775.120.138	224.232.416.929	<i>Vehicle</i>
Inventaris kantor	95.045.043.651	30.318.125.222	-	(24.439.366.512)	100.923.802.361	<i>Office Equipment</i>
Emplasement & pagar	52.939.751.153	5.841.593.248	-	-	58.781.344.401	<i>Emplacement & fence</i>
Peralatan lainnya	5.620.598.443	501.355.099	-	7.202.260.870	13.324.214.412	<i>Other Equipment</i>
Aset sewa pembiayaan						<i>Lease Asset</i>
Kendaraan	8.334.381.332	2.440.738.806	-	(10.775.120.138)	-	<i>Vehicle</i>
Aset dalam pelaksanaan						<i>Assets in Progress</i>
Bangunan	83.411.176.446	16.165.202.873	-	-	99.576.379.319	<i>Building</i>
Jumlah harga perolehan	2.733.685.366.745	59.869.002.949	(245.000.000)	(283.131.082.244)	2.510.178.287.450	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						<i>Accumulated depreciation and impairment value:</i>
Bangunan	104.035.382.171	10.193.438.241	-	(17.369.094.602)	96.859.725.810	<i>Buildings</i>
Kendaraan	140.245.853.808	15.465.123.257	(245.000.000)	4.429.090.030	159.895.067.095	<i>Vehicle</i>
Inventaris Kantor	73.449.536.500	8.907.724.038	-	(8.637.641.402)	73.719.619.136	<i>Office Equipment</i>
Peralatan lainnya	4.121.038.233	257.803.056	-	6.780.217.379	11.159.058.668	<i>Other Equipment</i>
Emplasement & pagar	39.966.404.784	4.090.324.811	-	-	44.056.729.595	<i>Emplacement & fence</i>
Aset sewa pembiayaan kendaraan	2.366.677.709	2.062.412.321	-	(4.429.090.030)	-	<i>Lease asset Vehicle</i>
Jumlah akumulasi penyusutan	364.184.893.205	40.976.825.724	(245.000.000)	(19.226.518.625)	385.690.200.304	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	2.369.500.473.540				2.124.488.087.146	Book Value

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

31 Des/ Dec 2020						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Decrease</i>	Reklasifikasi / <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost:
Tanah	1.912.046.539.395	-	-	2.338.263.001	1.914.384.802.396	Land
Bangunan	360.744.376.382	1.670.366.339	-	(1.251.448.524)	361.163.294.197	Buildings
Kendaraan	207.554.029.631	3.937.425.860	-	1.294.863.636	212.786.319.127	Vehicle
Inventaris kantor	85.035.592.631	10.009.451.020	-	-	95.045.043.651	Office Equipment
Peralatan lainnya	4.078.690.443	1.541.908.000	-	-	5.620.598.443	Other Equipment
Emplacement & pagar	52.685.742.885	254.008.268	-	-	52.939.751.153	Emplacement & fence
Aset sewa pembiayaan						Lease asset
Kendaraan	8.633.754.059	995.490.909	-	(1.294.863.636)	8.334.381.332	Vehicle
Aset dalam pelaksanaan						Assets in Progress
Bangunan	388.665.000	83.022.511.446	-	-	83.411.176.446	Building
Jumlah harga perolehan	2.631.167.390.426	101.431.161.842	-	1.086.814.477	2.733.685.366.745	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						Accumulated depreciation and impairment value:
Bangunan	93.510.652.014	10.291.402.031	-	233.328.125	104.035.382.170	Buildings
Kendaraan	128.686.169.701	10.741.064.941	-	818.619.166	140.245.853.808	Vehicle
Inventaris kantor	65.258.287.266	8.190.398.704	-	850.531	73.449.536.501	Office Equipment
Peralatan lainnya	3.951.057.580	169.980.653	-	-	4.121.038.233	Other Equipment
Emplacement & pagar	35.394.224.624	4.572.180.160	-	-	39.966.404.784	Emplacement & fence
Aset sewa pembiayaan						Lease asset
Kendaraan	2.559.918.509	626.228.898	-	(819.469.698)	2.366.677.709	Vehicle
Jumlah akumulasi penyusutan	329.360.309.694	34.591.255.387	-	233.328.124	364.184.893.205	Total accumulated Depreciation
Nilai Buku	2.301.807.080.732				2.369.500.473.540	Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2021, bangunan dan kendaraan diasuransikan kepada PT Binagriya, PT Ramayana, PT Tripe, Asuransi Buana Indah Independent dan PT Jasindo dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp743.409.300. Entitas berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

On 31 December 2021, buildings and vehicles were insured to PT Binagriya, PT Ramayana, PT Tripe, Asuransi Buana Indah Independent and PT Jasindo with a total liability of Rp743,409,300. The Entity believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Pada tahun 2021, aset tetap tanah dan bangunan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp217.461.450.000 dan Rp48.432.526.602 direklasifikasi ke properti investasi (catatan 16).

In 2021, fixed assets land and building with acquisition cost of Rp217.461.450.000 and Rp.48.432.526.602 respectively, were reclassified investment property (note 16).

15. ASET TIDAK BERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Software	31.641.627.382	21.293.270.051	Software
Akumulasi Penyusutan – Software	(15.417.858.781)	(10.372.079.163)	Accumulative depreciation- Software
Goodwill	3.300.000.000	-	Goodwill
Jumlah	19.523.768.601	10.921.190.888	Total

16. PROPERTI INVESTASI

16. INVESTMENT PROPERTIES

2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					At cost
Tanah	146.106.999.240	217.869.613.265	-	363.976.612.505	Land
Bangunan	12.487.715.312	31.063.432.000	-	43.551.147.312	Building
	158.594.714.552	248.933.045.265	-	407.527.759.817	
Perubahan nilai wajar					Changes in fair value
Tanah	177.792.881.000	357.733.510.000	-	535.526.391.000	Land
Bangunan	5.351.024.688	(12.538.282.000)	-	(7.187.257.312)	Building
	183.143.905.688	345.195.228.000	-	528.339.133.688	
Jumlah	341.738.620.240	594.128.273.265	-	935.866.893.505	Total

2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					At cost
Tanah	146.106.999.240	-	-	146.106.999.240	Land
Bangunan	12.487.715.312	-	-	12.487.715.312	Building
	158.594.714.552	-	-	158.594.714.552	
Perubahan nilai wajar					Changes in fair value
Tanah	175.643.091.000	2.149.790.000	-	177.792.881.000	Land
Bangunan	5.798.924.688	(447.900.000)	-	5.351.024.688	Building
	181.442.015.688	1.701.890.000	-	183.143.905.688	
Jumlah	340.036.730.240	1.701.890.000	-	341.738.620.240	Total

Penambahan aset properti investasi di tahun 2021 merupakan reklasifikasi dari aset tetap. Atas penambahan ini, Group mengakui perubahan nilai wajar sebesar Rp341.872.768.000 dibukukan di Penghasilan Komprehensif Lain. Perubahan nilai wajar atas properti investasi yang telah ada sebelumnya sebesar Rp 3.322.460.000 dibukukan sebagai bagian dari Pendapatan (Beban) Non-Usaha.

Addition of property investment in 2021 represents reclassification from fixed assets. Relating to this addition, the Group recognises changes in fair value amounting to Rp341,872,768,000 which is recorded as Other Comprehensive Income. Changes in fair value of existing property investment amounting to Rp 3,322,460,000 recorded as part of Non-Operating Income (Expense).

16. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 didasarkan pada laporan penilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira dan Rekan.

Properti investasi termasuk tanah yang berlokasi di Kelapa Gading, DKI Jakarta yang dicatat berdasarkan harga perolehan masing-masing sebesar Rp35.249.943.505 dan Rp34.841.780.240 pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020. Tanah tersebut merupakan obyek kerjasama optimalisasi aset lahan strategis dengan PERUMNAS yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

16. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Fair value of the investment property as of 31 December 2021 and 31 December 2020 based on appraisal valuation prepared by Dasa'at Yudistira and Partner an independent appraisal registered.

Investment property includes land located in Kelapa Gading, DKI Jakarta which is recorded at acquisition cost of Rp35,249,943,505 and Rp34,841,780,240 respectively as of 31 December 2021 and 2020. The land represents object of Cooperation in the optimizing strategic land assets with PERUMNAS which is still in development stage.

17. ASET HAK GUNA

Akun ini terdiri dari :

17. RIGHT OF USE ASSETS

The account consist of:

31 Des/Dec 2021							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dampak PSAK 73/ <i>Impact of SFAS 73</i>	yang d disesuaikan/ <i>Adjusted beginning</i>	Saldo awal Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurang/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Bangunan	1.974.067.975	-	-	291.506.171		2.265.574.146	<i>Building</i>
Jumlah	1.974.067.975	-	-	291.506.171		2.265.574.146	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan	1.280.832.319	-	-	507.416.374		1.788.248.693	<i>Building</i>
Jumlah	1.280.832.319	-	-	507.416.374		1.788.248.693	Total
Nilai buku Bersih	693.235.656					477.325.453	Net book Value

17. ASET HAK GUNA (lanjutan)

17. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

31 Des/Dec 2020							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dampak PSAK 73/ <i>Impact of SFAS 73</i>	yang d disesuaikan / <i>Adjusted beginning</i>	Saldo awal Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurang/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balances</i>	
Harga Perolehan							<i>Acquisition Cost</i>
Bangunan	-	1.523.333.336	-	450.734.639	-	1.974.067.975	<i>Building</i>
Jumlah	-	1.523.333.336	-	450.734.639	-	1.974.067.975	Total
Akumulasi Penyusutan							<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan	-	-	-	1.280.832.319	-	1.280.832.319	<i>Building</i>
Jumlah	-	-	-	1.280.832.319	-	1.280.832.319	Total
Nilai buku Bersih	-					693.235.656	<i>Net book Value</i>

18. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp287.000.000 dan Rp287.000.000 merupakan deposito dijamin Bank BNI.

The account as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp287,000,000 and Rp287,000,000 respectively represent to pledge deposit pledged at Bank BNI.

19. ASET LAIN-LAIN

19. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Aset tetap yang tidak dimanfaatkan	419.925.316.185	431.960.849.919	<i>Unused fixed assets</i>
Beban tangguhkan	3.556.179.535	9.892.700.869	<i>Deferred Expenses</i>
Biaya pengembangan dan pemeliharaan	11.723.201.501	11.554.229.889	<i>Development and maintenance expenses</i>
Aset lainnya	11.445.895.980	11.210.437.388	<i>Other asset</i>
Biaya development IT (ERP)	5.410.342.300	5.410.342.300	<i>IT development cost (ERP)</i>
Uang jaminan	1.590.476.027	1.577.146.787	<i>Deposits</i>
Lain-lain	5.561.021.899	4.198.669.236	<i>Others</i>
Jumlah	459.212.433.427	475.804.376.388	Total

19. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

19. OTHER ASSETS (continued)

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan

Unused assets

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan merupakan reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Unused fixed assets are reclassification of property, plant and equipment which are not used in business, with details as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Tanah	418.624.529.706	418.624.529.706	Land
Bangunan	27.844.326.157	27.844.326.157	Building
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(26.543.539.678)	(14.508.005.944)	Accumulated depreciation Building
Jumlah	419.925.316.185	431.960.849.919	Total

Beban tanggungan

Deferred expenses

Beban tanggungan merupakan beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan perpanjangan hak atas tanah dan biaya lainnya. Beban perpanjangan hak atas tanah diamortisasi selama 20 tahun sampai 2038 dan biaya lainnya disisihkan sesuai masa manfaatnya, dengan rincian sebagai berikut:

Deferred expenses represent expenses incurred in connection with the extension of land rights and other costs. Land rights extension expenses are amortized over 20 years until 2038 and other costs are set aside for their useful life, with details are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Beban tanggungan	20.844.325.907	20.160.955.048	Deferred expenses
Amortisasi	(17.288.146.372)	(10.268.254.179)	Amortization
Jumlah	3.556.179.535	9.892.700.869	Total

Biaya development IT (ERP)

IT development cost (ERP)

Biaya development IT (ERP) merupakan biaya pengembangan system ERP.

The cost of developing IT (ERP) is the cost of developing an ERP system.

Lain-lain

Others

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Persediaan barang rusak	21.181.380.876	20.545.387.992	Inventory of damaged goods
Cadangan persediaan barang rusak	(21.181.380.876)	(20.545.387.992)	Reserves inventory damaged
Pos dalam penyelesaian	34.133.150.235	34.545.030.399	Posts in progress
Akumulasi amortisasi pos dalam Penyelesaian	(32.944.788.724)	(32.870.903.716)	Accumulated amortization post in progress
Lainnya	4.372.660.388	2.524.542.553	Others
Jumlah	5.561.021.899	4.198.669.236	Total

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

20. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Petrosida Gresik	6.949.946.117	11.448.857.786	PT Petrosida Gresik
PT Timah	5.463.130.680	5.046.293.434	PT Timah
PT Pelabuhan Indonesia I	1.499.930.865	1.649.962.609	PT Pelabuhan Indonesia I
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	419.425.913	2.100.948.303	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
PT Biofarma	293.492.478	1.495.190.526	PT Biofarma
PT Perusahaan Listrik Negara	-	7.599.073.040	PT Perusahaan Listrik Negara
PT Pertamina	-	3.030.327.750	PT Pertamina
PT Semen Padang	-	1.076.662.768	PT Semen Padang
Rp 1 Milyar)	4.259.115.087	23.795.513.700	Rp 1 billion)
Sub Jumlah	18.885.041.140	57.242.829.916	Subtotal
Pihak ketiga:			Third parties:
OCI (Hongkong) Ltd	38.650.784.760	17.708.832.000	OCI (Hongkong) Ltd
PT Prima Karya Sarana	10.979.602.542	8.240.612.667	PT Prima Karya Sarana
PT Nindya Karya	10.765.141.982	21.293.018.687	PT Nindya Karya
PT Satorio Aneka Industri	10.533.599.061	3.397.813.627	PT Satorio Aneka Industri
PT Unilever Indonesia	7.636.374.107	5.186.593.140	PT Unilever Indonesia
PT Emjebe Pharma	6.600.652.157	2.513.129.706	PT Emjebe Pharma
PT Sigma cipta caraka	5.196.757.111	-	PT Sigma cipta caraka
PT Karya Putra Dumai Mandiri	4.108.528.600	-	PT Karya Putra Dumai Mandiri
Pt. Inovasi Global Solusindo	3.333.098.054	-	Pt. Inovasi Global Solusindo
PT. Multi Bangun Abadi	3.317.686.940	-	PT. Multi Bangun Abadi
PT Angkasa Biru Laut	2.975.614.242	2.750.900.614	PT Angkasa Biru Laut
PT Tiga A	2.972.299.835	1.847.515.638	PT Tiga A
PT Varia Usaha Lintas Segara	2.840.000.000	1.925.000.000	PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Widatra Bhakti	2.798.485.683	2.207.738.755	PT Widatra Bhakti
PT. Jasa Prima Logistik Bulog	2.278.004.100	-	PT. Jasa Prima Logistik Bulog
PT Wahyu Putra Jaya	2.122.908.702	-	PT Wahyu Putra Jaya
PT Sigma Metrasys Solution	2.035.610.940	5.371.083.292	PT Sigma Metrasys Solution
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar)	71.916.391.858	108.267.813.966	Others (balance below Rp 2 billion)
Sub Jumlah	191.061.540.674	180.710.052.092	Subtotal
Jumlah	209.946.581.814	237.952.882.008	Total

**21. LIABILITAS KEUANGAN
PENDEK LAINNYA**

Akun ini terdiri dari :

**21. OTHER CURRENT
LIABILITIES**

The account are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Deposit Pelanggan	7.715.477.020	4.431.175.140	Customers Deposits
PT Telkom	2.890.982.418	2.890.982.418	PT Telkom
PT Mitra Steel Indonesia	1.620.753.444	1.620.753.444	PT Mitra Steel Indonesia
Lainnya	45.650.588.040	4.425.745.844	Others
Jumlah	57.877.800.922	13.368.656.846	Total

**21. LIABILITAS KEUANGAN
PENDEK LAINNYA (lanjutan)**

Deposit Pelanggan

Deposit Pelanggan merupakan uang jaminan/deposit yang diterima dari pelanggan atas transaksi penjualan bahan kimia berbahaya.

PT Mitra Steel Indonesia

Entitas anak PT Tri Sari Veem memiliki transaksi kepada PT Mitra Steel Indonesia (Mr. Hoo-Semarang) yang merupakan utang atas pembelian bahan baku produksi dan belum diketahui adanya surat penagihan dari PT Mitra Steel Indonesia (Mr. Hoo Semarang).

Proyek terminal semen terapung Tj. Wangi

Utang Proyek Terminal Semen Terapung Tanjungwangi sebesar Rp2.449.144.769 merupakan pencairan dari PPh pasal 22 Impor eks kegiatan usaha Proyek Terminal Semen Terapung Tanjungwangi tahun 1996, 1997 dan 1998 dimana administrasi perpajakannya melalui eks PT Cipta Niaga (Persero) (berubah menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) yang kemudian oleh eks PT Cipta Niaga (Persero) direstitusi melalui mekanisme Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan tahun yang bersangkutan. Penyelesaiannya atas proyek tersebut menunggu ketetapan dari Pemerintah.

22. LIABILITAS SEWA

Liabilitas sewa merupakan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp65.287.499 dan Rp1.362.494.285 dan merupakan utang sewa pembiayaan atas perolehan kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan rata-rata 36 bulan dengan tingkat bunga berkisar 5,84% - 14,05%.

23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Beban kantor	18.030.207.194	42.926.444.644	Office expenses
Beban pegawai	774.922.311	2.203.828.571	Employee expenses
Beban operasi	36.558.782.772	62.647.239.878	Operating expenses
Beban lainnya	4.080.654.647	22.517.035.465	Others expenses
Jumlah	59.444.566.924	130.294.548.558	Total

**21. OTHER CURRENT
LIABILITIES (continued)**

Customer Deposits

Customer Deposits represent payments received from the customer for the sale of dangerous chemicals.

PT Mitra Steel Indonesia

A subsidiary, PT Tri Sari Veem has a transaction to PT Mitra Steel Indonesia (Mr. Hoo-Semarang) represent debt on the purchase of raw materials production and not yet known the collection letter from PT Mitra Steel Indonesia (Mr. Hoo Semarang).

Floating Tj. Wangi Cement terminal project

The Debt of the Floating Cement Terminal Project Tanjungwangi amounting to Rp2,449,144,769 represents the withdrawal from the Income Tax article 22. The former business of the Tanjungwangi Floating Cement Terminal Project in 1996, 1997 and 1998 where the tax administration through the former PT Cipta Niaga (Persero) (changed to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) which then by former PT Cipta Niaga (Persero) is refunded through the mechanism of Tax Assessment Overpaid Income Tax waiting for of the year concerned. The completion of the project awaits the determination of the Government.

22. LEASE LIABILITIES

Lease liabilities as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp65,287,499 and Rp1,362,494,285 respectively represent finance leases payable for the acquisition of vehicles with an average financing period of 36 months with an interest rate of 5.84% - 14.05% .

23. ACCRUED EXPENSES

The account are as follows:

24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

24. UNEARNED REVENUES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pendapatan sewa	6.379.867.789	11.848.079.722	Rental income
Uang muka penjualan produk	49.811.257.215	13.310.820.152	Contract liability
Jasa pergudangan	46.209.770.778	51.732.772.577	Warehouse services
Jasa logistik	10.522.500	1.180.647.108	Logistic services
Lainnya	395.882.870	-	Others
Jumlah	102.807.301.152	78.072.319.559	Total

25. UTANG BANK – JANGKA PENDEK

25. SHORT TERM – BANK LOAN

Akun ini terdiri dari

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
KMK No B.5794/KC-V/ADK/05/2017	64.200.000.000	22.850.409.618	KMK No B.5794/KC-V/ADK/05/2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
HBK.G12/SPPK.003/2021	62.473.223.144	-	HBK.G12/SPPK.003/2021
HBK.G12/SPPK.17/2020	16.692.826.241	-	HBK.G12/SPPK.17/2020
Jumlah	143.366.049.385	22.850.409.618	Total

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B. B.5794/KC-V/ADK/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, Grup (ex-PT BGR) memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (atau KMK) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Based on Loan Agreement number B. B.5794/KC-V/ADK/05/2017 dated 4 May 2017, the Group (ex-PT BGR) obtains Working Capital Loan Facility (KMK) from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Pagu kredit	Rp50.000.000.000	Credit limit
Tingkat bunga	9.75%	Interest rate
Jangka waktu	12 bulan/ month	Tenor
Jatuh tempo	4 Mei/ May 2018	Due date

Jaminan:

- Piutang dagang sebesar Rp 50.000.000.000.
- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Boulevard BGR, DKI Jakarta senilai Rp 55.000.000.000.

Collateral:

- Trade receivable amounting to Rp 50,000,000,000.
- A land plot with Building Rights Title (SHGB) including building thereon located in Jl. Boulevard BGR, DKI Jakarta valued at Rp 55,000,000,000.

25. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017
(lanjutan)

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017
(continued)

Perjanjian ini diubah setiap tahun, perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. B.43/KW-V/ADK/SPPK/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan No. B.57/KW-V/ADK/SPPK/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, persyaratan fasilitas kredit diubah menjadi sebagai berikut:

This agreement is amended every year, the most recent change is based on Loan Agreement B.43/KW-V/ADK/SPPK/06/2021 dated 2 June 2021 and No. B.57/KW-V/ADK/SPPK/07/2021 tanggal 23 July 2021 the term and conditions the credit facility were amended as follows:

Pagu kredit	Rp70.000.000.000	Credit limit
Tingkat bunga	bulan ke 1 – 6/month 1st – 6th: 8,5% bunga tetap/fixed rate bulan ke 7 – 12/month 7th – 12th: bunga mengambang mengikuti suku bunga BRI yang berlaku/ <i>Floating rate as per the BRI's interest rate</i>	Interest rate
Jangka waktu	12 bulan/ Months	Tenor
Jatuh tempo	31 Mei/ May 2022	Due date

Jaminan

- Piutang dagang sebesar Rp 50.000.000.000.
- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Boulevard BGR, DKI Jakarta senilai Rp 55.000.000.000.

Collateral

- Trade receivable amounting to Rp 50,000,000,000.
- A land plot with Building Rights Title (SHGB) including building thereon located in Jl. Boulevard BGR, DKI Jakarta valued at Rp 55,000,000,000.

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. HBK.GI2/SPPK.17/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Grup (ex-PT BGR) memperoleh fasilitas Kredit Investasi (atau KI) dari Bank Mandiri.

Based on the Credit Agreement No. HBK.GI2/SPPK.17/2020 dated 10 August 2020, the Group (ex-PT BGR) obtained an Investment Credit (or KI) facility from Bank Mandiri.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Pagu kredit	Rp75.000.000.000	Credit limit
Tingkat bunga	8.25%	Interest rate
Jangka waktu	48 bulan/ month	Tenor
Jatuh tempo	23 Desember/ December 2021	Due date

Jaminan

- Sebidang tanah seluas 190.239 m² dengan SHGB No. 732 berikut bangunan dan gudang seluas 42.665 m² di atasnya di Medan senilai Rp 50.408.531.253.

Collateral

- A plot of land with an area of 190,239 sqm with SHGB No. 732 along with a building and warehouse area of 42,665 sqm in Medan amounting to sqm Rp 50,408,531,253.

25. UTANG BANK JANGKA P ENDEK (lanjutan)

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (lanjutan)

Jaminan (lanjutan)

- Sebidang tanah seluas 36.420 m² dengan SHGB No. 444 dan No. 477 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Bandar Lampung senilai Rp42.467.203.505.
- Sebidang tanah seluas 11.907m² dengan SHGB No. 21 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Banjar Baru, Kalimantan Selatan senilai Rp36.358.950.000.
- Sebidang tanah seluas 10.350 m² dengan SHGB No. 2 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Tabanan, Bali senilai Rp26.588.167.000.
- Kantor dan pergudangan seluas 8.775 m² dengan SHGB No. 98 dan 54 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Badung, Bali senilai Rp102.206.401.000.
- Piutang dagang sebesar Rp90.000.000.000.

Perjanjian ini diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No. HBK.GI2/SPPK.003/2021 tanggal 27 April 2021, persyaratan fasilitas kredit diubah menjadi sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp75.000.000.000
Tingkat bunga	7,75%%
Jangka waktu	48 bulan/ month
Jatuh tempo	2 Mei/May 2022

Jaminan

- Sebidang tanah seluas 190.239 m² dengan SHGB No. 732 berikut bangunan dan gudang seluas 42.665 m² di atasnya di Medan senilai Rp 50.408.531.253.
- Sebidang tanah seluas 36.420 m² dengan SHGB No. 444 dan No. 477 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Bandar Lampung senilai Rp42.467.203.505.
- Sebidang tanah seluas 11.907m² dengan SHGB No. 21 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Banjar Baru, Kalimantan Selatan senilai Rp36.358.950.000.

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (continued)

Collateral (continued)

- A plot of land with an area of 36,420 sqm with SHGB No. 444 and No. 477 along with the building and warehouse thereon in Bandar Lampung worth Rp42,467,203,505.
- A plot of land with an area of 11,907 sqm with SHGB No. 21 along with the building and warehouse thereon in Banjar Baru, South Kalimantan worth Rp36,358,950,000.
- A plot of land with an area of 10,350 sqm with SHGB No. 2 along with the building and warehouse thereon in Tabanan, Bali, valued at Rp26,588,167,000.
- Office and warehousing with an area of 8,775 sqm with SHGB No. 98 and 54 along with buildings and warehouses above them in Badung, Bali worth Rp102,206,401,000.
- Trade receivables amounting to Rp90,000,000,000,000.

This agreement is amended every year, the most recent change is based on Loan Agreement No. HBK.GI2/SPPK.003/2021 dated 27 April 2021 the term and conditions the credit facility were amended as follows:

Credit limit	Rp75.000.000.000
Interest rate	7,75%%
Tenor	48 bulan/ month
Due date	2 Mei/May 2022

Collateral

- A plot of land with an area of 190,239 sqm with SHGB No. 732 along with a building and warehouse area of 42,665 in Medan amounting to sqm Rp 50,408,531,253.
- A plot of land with an area of 36,420 sqm with SHGB No. 444 and No. 477 along with the building and warehouse thereon in Bandar Lampung worth Rp42,467,203,505.
- A plot of land with an area of 11,907 sqm with SHGB No. 21 along with the building and warehouse thereon in Banjar Baru, South Kalimantan worth Rp36,358,950,000.

25. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

c. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (lanjutan)

c. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (continued)

Jaminan (lanjutan)

Collateral (continued)

- Sebidang tanah seluas 10.350 m² dengan SHGB No. 2 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Tabanan, Bali senilai Rp26.588.167.000.
- Kantor dan pergudangan seluas 8.775 m² dengan SHGB No. 98 dan 54 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Badung, Bali senilai Rp102.206.401.000.
- Piutang dagang sebesar Rp90.000.000.000.

- A plot of land with an area of 10,350 sqm with SHGB No. 2 along with the building and warehouse thereon in Tabanan, Bali, valued at Rp26,588,167,000.
- Office and warehousing with an area of 8,775 sqm with SHGB No. 98 and 54 along with buildings and warehouses above them in Badung, Bali worth Rp102,206,401,000.
- Trade receivables amounting to Rp90,000,000,000.

d. HBK.GI2/SPPK.003/2021

HBK.GI2/SPPK.003/2021

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. HBK.GI2/SPPK.003/2021 tanggal 27 April 2021, Grup (ex-PT BGR) memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja (atau KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the Credit Agreement No.HBK.GI2/SPPK.003/2021 dated 27 April 2021, the Group (ex-PT BGR) obtained an Investment Credit (or KI) facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Pagu kredit	Rp75.000.000.000	Credit limit
Tingkat bunga	7.25%	Interest rate
Jangka waktu	12 bulan/ month	Tenor
Jatuh tempo	2 Mei/ May 2022	Due date

Jaminan

Collateral

- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Medan senilai Rp50.408.531.253.
- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Srengsem, Lampung senilai Rp42.467.203.505.
- Piutang dagang sebesar Rp90.000.000.000.

- A plot of SHGB land along with the building on it, located in Rengas Pulau Village, Medan, valued at Rp50,408,531,253.
- A plot of SHGB land along with the building on it which is located in Srengsem Village, Lampung, valued at Rp42,467,203,505.
- Trade receivables amounting to Rp90,000,000,000.

26. PERPAJAKAN

26. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

Akun ini terdiri dari:

The account are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Entitas			Entity
PPh pasal 15	-	4.353.033.099	Income Tax article 15
PPh pasal 21	99.867.450	-	Income Tax article 21
PPh pasal 23	795.629.391	-	Income Tax article 23
PPh pasal 28A	29.211.260.458	43.877.334.041	Income tax article 28A
PPN Wapu	257.559.931	-	VAT Wapu
PPN – Masukan	-	5.966.731.291	VAT in
Subjumlah	30.364.317.230	54.197.098.431	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN	303.845.201	-	VAT
Subjumlah	303.845.201	-	Subtotal
Jumlah	30.668.162.431	54.197.098.431	Total

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Entitas			The Entity
PPN Keluaran	9.632.544.232	1.520.171.475	VAT Out
PPN Masukan (WAPU)	257.559.931	2.645.309.757	VAT In (WAPU)
PPh 15	-	11.244.000	Income Tax Art. 15
PPh pasal 21	1.214.296.592	1.675.201.496	Income Tax Art. 21
PPh pasal 22	-	536.496.884	Income Tax Art. 29
PPh pasal 23	1.224.287.899	433.840.346	Income Tax Art. 23
PPh pasal 29	-	5.215.163.954	Income Tax Art. 22
PPh pasal 25	381.169.927	104.774.337	Income Tax Art. 25
PPh pasal 4(2)	291.007.188	954.107.924	Income Tax Art. 4(2)
Sub Jumlah	13.000.865.769	13.096.310.173	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN Keluaran	1.619.674.621	207.484.466	VAT out
PPh 15	604.800	-	Income Tax Art. 15
PPh pasal 21	278.417.390	2.404.847	Income Tax Art. 21
PPh pasal 22	4.636	4.636	Income Tax Art. 22
PPh pasal 23	6.766.704	-	Income Tax Art. 23
PPh pasal 29	1.513.613.721	254.889.475	Income Tax Art. 29
PPh pasal 4(2)	38.473.510	-	Income Tax Art. 4(2)
Sub Jumlah	3.457.555.382	464.783.424	Subtotal
Jumlah	16.458.421.151	13.561.093.597	Total

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Taxes

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Entitas			The Entity
Pajak final	(14.387.748.685)	(15.114.396.716)	Final tax
Beban pajak kini	-	(16.993.377.720)	Current income tax expense
Penyesuaian tahun lalu	-	(998.978.850)	Adjustment for prior year income tax expense
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Final	(849.626.315)	-	Final tax
Beban pajak kini	(2.029.918.715)	(733.232.000)	Current income tax expense
Jumlah pajak kini	(17.267.293.715)	(33.839.985.286)	Total current tax
Pajak tangguhan	49.913.036.113	(11.640.533.214)	Deferred tax
Jumlah	32.645.742.398	(45.480.518.500)	Total

i) Pajak Kini

i) Current Tax

Rekonsiliasi antara laba rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laba komersial dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income before income loss tax between commercial income with taxable income for the years ended 31 December 2021 and 2020 is as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Laba (rugi) sebelum pajak laporan laba rugi konsolidasi	(177.940.747.151)	154.249.800.226	Profit (loss) before tax consolidated statement of profit loss
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Dividen	-	150.000.000	Dividend
Dikurangi:			Less:
Laba (rugi) sebelum pajak anak Perseroan	9.843.904.345	7.121.715.781	Profit (loss) before income subsidiary
Laba komersil sebelum pajak penghasilan – Entitas	(187.784.651.496)	147.278.084.445	Commercial income before income tax – the Entity
Beda Waktu			Timing Difference
Penyisihan persediaan	545.057.833	2.407.506.107	Provision for inventories
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain – bersih	20.939.052.404	11.540.663.619	Allowance for account receivables and other receivable – net
Penyusutan aset lain-lain	9.068.314.412	5.153.554.614	Depreciation of other assets
Penyusutan aset tetap	11.066.870.045	(7.051.433.140)	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan paska kerja	5.509.877.285	(18.696.359.000)	Post-employment benefits obligations
Penurunan nilai aset yang tidak dimanfaatkan	10.450.000.000	-	Impairment of unused assets
Lainnya	201.636.125	5.743.602.611	Others
Jumlah Beda Waktu	57.780.808.104	(902.465.189)	Total Timing Difference

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

i) Pajak Kini (lanjutan)

i) Current Tax (continued)

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Beda Tetap:			Permanent Difference
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	10.157.368.657	27.010.057.595	Non deductible expense
Beban atas pendapatan final	30.818.149.572	95.283.555.011	Expense of final revenue
Pendapatan bunga – final	(2.553.725.185)	(2.797.926.331)	Interest income – final
Pendapatan lain – lain	(56.414.532)	(81.811.566)	Other Income
Pendapatan sewa – final	(70.006.815.009)	(177.783.485.613)	Rental income – final
Surplus properti investasi	(3.322.460.000)	1.701.890.000	Investment Property Surplus
Jumlah Beda Tetap	(34.963.896.497)	(56.667.720.904)	Total Permanent Difference
Laba (rugi) Fiskal Entitas	(164.967.739.889)	89.707.898.352	The Entity's taxable profit (loss)
Kompensasi rugi fiskal	-	(12.465.272.000)	Fiscal loss compensation
Sisa laba fiskal	(164.967.739.889)	77.242.626.352	Remaining taxable income
Taksiran Pajak Kini Entitas (22 %)	-	16.993.377.720	Estimated Final Tax of the Entity
Pajak Kini Entitas Anak	2.029.918.715	733.232.000	Current tax of Subsidiaries
Taksiran Pajak Kini	2.029.918.715	17.726.609.720	Total Current Tax
SKPLB tahun 2018	-	998.978.850	SKPLB year 2018
Beban pajak	2.029.918.715	18.725.588.570	Tax expense
Dikurangi kredit pajak dibayar dimuka			Less tax credit:
PPh Pasal 22	(795.629.391)	(1.681.695.517)	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	-	(18.453.069.543)	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	-	(2.298.898.718)	Income Tax Article 25
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	1.234.289.324	(3.708.075.208)	Under (Over) Payment of Corporate Income Tax

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan Desember 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes To The Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan

ii) Deferred Tax Assets

2021

	Saldo Awal 31 Des 2020 / Total Beginning Balance 31 Dec 2020	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya / Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2021/ Ending Balance 31 Dec 2021	
Entitas								The Entity
Estimasi kerugian fiskal	(3.116.317.751)	-	36.292.902.775	-	-	-	33.176.585.024	Estimated fiscal loss
Penyisihan Persediaan	4.501.090.123	-	139.918.433	-	-	-	4.641.008.556	Provision for Inventories
Penyisihan Piutang Usaha	78.328.457.365	-	5.168.943.369	-	-	-	83.497.400.734	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan Piutang lain-lain	33.185.850.662	-	177.959.390	-	-	-	33.363.810.052	Allowance for impairment of others Receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(32.727.223.404)	-	4.733.711.410	-	-	-	(27.993.511.994)	Allowance for Fixed Assets
Penyisihan aset lain-lain	1.712.830.120	-	1.995.029.171	-	-	-	3.707.859.291	Allowance for other receivables
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	-	-	48.759.948	-	-	-	48.759.948	Allowance for impairment of investment
Manfaat Karyawan	10.458.263.005	-	1.377.729.463	5.768.995.961	-	-	17.604.988.429	Employee Benefits
Bonus dan Tantiem	6.648.619.667	-	-	-	-	-	6.648.619.667	Bonus and tantiem
Efek perubahan tarif pajak	957.109.987	-	-	-	-	-	957.109.987	Effects of changing tax rates
Pendapatan komprehensif lainnya	(638.724.062)	-	-	-	-	-	(638.724.062)	Comprehensive income
Penilaian kembali atas properti investasi	-	-	-	(75.212.008.960)	-	-	(75.212.008.960)	Revaluation of property investment
Penilaian kembali atas property investasi (penyajian kembali)	(43.045.664.512)	-	-	-	-	-	(43.045.664.512)	Revaluation of property investment (restate)
Sub jumlah	56.264.291.200	-	49.934.953.959	(69.443.012.999)	-	-	36.756.232.160	Subtotal

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan Desember 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes To The Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	31 Des/ Dec 2021							
	Saldo Awal 31 Des 2020 / Beginning Balance 31 Dec 2020	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya / Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2021/ Ending Balance 31 Dec 2021	
Entitas anak								Subsidiaries
Penyusutan dan amortisasi	-	-	32.706.481	-	-	-	32.706.481	Depreciation and amortization
Manfaat karyawan	409.056.236	-	(69.271.743)	(126.879.842)	-	-	212.904.651	Employee benefit
Sewa dengan hak opsi	81.850.282	-	(3.627.452)	-	-	-	78.222.830	Leasing with options
Penyisihan Piutang usaha	375.343.269	-	18.274.868	-	-	-	393.618.137	Allowance for Accounts Receivable
Sub jumlah	866.249.787	-	(21.917.844)	(126.879.842)	-	-	717.452.099	Subtotal
Jumlah aset pajak tangguhan	57.130.540.987	-	49.913.036.113	(69.569.892.841)	-	-	37.473.684.259	Total deferred tax assets

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan Desember 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes To The Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

31 Des/ Dec 2020

	Saldo Awal 31 Des 2019 / Beginning Balance 31 Dec 2019	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya/ Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2020/ Ending Balance 31 Dec 2020	
Entitas								The Entity
Rugi fiskal	3.116.317.751	-	(6.232.635.502)	-	-	-	(3.116.317.751)	Fiscal loss
Amortisasi beban ditangguhkan	(3.276.588.791)	-	-	-	-	3.276.588.791	-	Amortization Deferred change
Penyisihan persediaan	4.512.998.612	-	529.651.344	-	(541.559.833)	-	4.501.090.123	Provision for inventory
Penyisihan piutang usaha	84.744.488.942	1.200.272.379	1.811.191.282	-	(9.427.495.238)	-	78.328.457.365	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan piutang lain- lain	37.273.019.284	-	385.593.692	-	(4.472.762.314)	-	33.185.850.662	Allowance for impairment of Other Receivables
Penyisihan aset lain-lain	1.360.300.337	-	352.529.783	-	-	-	1.712.830.120	Allowance for impairment of other assets
Akumulasi penyusutan	(35.533.991.076)	-	769.598.834	-	4.162.751.286	(2.125.582.448)	(32.727.223.404)	Acumulation depreciation
Bonus dan tantitem	3.418.534.276	-	(4.391.870.630)	-	(200.823.760)	-	(1.174.160.114)	Allowance and tantitem
Manfaat karyawan	12.553.309.614	-	3.230.085.391	-	-	-	15.783.395.005	Employee Benefits
Efek perubahan tarif pajak	-	-	-	-	957.109.987	-	957.109.987	Effect of changes tax rate
Penghasilan Komprehensif	(638.724.062)	-	-	2.497.647.781	-	-	1.858.923.719	Other comprehensive income
Penilaian kembali atas property investasi (penyajian kembali)	(43.045.664.512)	-	-	-	-	-	(43.045.664.512)	Revaluation of property investment (restate)
Jumlah	64.484.000.375	1.200.272.379	(3.545.855.806)	2.497.647.781	(9.522.779.872)	1.151.006.343	56.264.291.200	Total

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan Desember 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes To The Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	31 Des/ Dec 2020							
	Saldo Awal 31 Des. 2019 / Beginning Balance 31 Dec. 2019	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation SFAS 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya / Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2020/ Ending Balance 31 Dec 2020	
Entitas anak								Subsidiaries
Penyusutan dan amortisasi	(4.754.167)	-	4.183.667	-	570.500	-	-	Depreciation
Manfaat karyawan	225.447.508	-	31.617.299	199.501.623	(47.510.194)	-	409.056.236	Effect of changes tax rate
Penyisihan piutang usaha	329.271.665	23.493.205	62.090.999	-	(39.512.600)	-	375.343.269	Allowance for impairment of Receivables
Sewa dengan hak opsi	144.251.707	-	(45.091.220)	-	(17.310.205)	-	81.850.282	Lease with option right
Jumlah	694.216.713	23.493.205	52.800.745	199.501.623	(103.762.499)	-	866.249.787	Total
Jumlah aset pajak tangguhan	65.178.217.088	1.223.765.584	(3.493.055.061)	2.697.149.404	(9.626.542.371)	1.151.006.343	57.130.540.987	Total Deferred Tax Asset

27. UTANG JANGKA PANJANG

27. LONG TERM PAYABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Utang Jangka Panjang			Long Term Payables
a. Eks BPPN			a. Eks BPPN
Tranche A	29.044.533.811	29.044.533.811	Tranche A
Tranche B - Term Loan	22.000.000.000	22.000.000.000	Tranche B - Term Loan
Tranche C - Obligasi	531.745.389.205	531.745.389.205	Tranche C - Bonds
Tunggakan Bunga - Tranche B	26.848.189.448	26.848.189.448	Interest in Arrears - Tranche B
Sub jumlah	609.638.112.464	609.638.112.464	Subtotal
b. Bappenas			b. Bappenas
Bappenas (kedelai)	23.687.544.118	23.687.544.118	Bappenas (soybeans)
Sub jumlah	23.687.544.118	23.687.544.118	Subtotal
c. Rekening Dana Investasi			c. Investment Fund Account
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	192.225.431.670	192.225.431.670	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	64.870.304.676	64.870.304.676	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	16.763.338.868	16.652.927.395	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
Sub jumlah	273.859.075.214	273.748.663.741	Subtotal
d. Kredit Investasi			d. Investment Loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020	44.169.682.155	49.038.387.952	PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020
Sub jumlah	44.169.682.155	49.038.387.952	Subtotal
Jumlah Utang	951.354.413.951	956.112.708.275	Total Payables
Bagian Utang Jangka Panjang yang Jatuh tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long Term Payables
Rekening Dana Investasi			Investment Fund Account
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	8.092.745.964	4.046.372.982	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	2.731.381.265	1.365.690.633	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	701.175.885	350.587.945	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
Kredit Investasi			Investment Loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020	14.611.576.527	12.259.596.988	PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020
Sub jumlah	26.136.879.641	18.022.248.548	Subtotal
Jumlah Utang Jangka Panjang	925.217.534.310	938.090.459.727	Total Long Term Payables

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES (continued)

a. Utang Eks BPPN

Utang kepada eks BPPN merupakan hasil Restrukturisasi utang (Kredit BDN, Bank Exim dan Bank Tamara) berdasarkan Perjanjian Pokok Restrukturisasi Utang, Perjanjian Pembayaran Tunai dan Pinjaman Berjangka serta perjanjian Obligasi sesuai dengan akta No. 14/L/2002, 15/L/2002, dan 16/L/2002 tanggal 17 Oktober 2002 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH, isi pokok perjanjian adalah Restrukturisasi utang ini adalah saldo utang yang disepakati bersama per 31 Maret 2002 (tanggal pengalihan) adalah sebesar Rp436.546.439.765 dan USD 16.282.652 dengan kurs USD 1 = Rp9.264,00 atau setara dengan Rp150.842.492.760, sehingga jumlah utang seluruhnya adalah sebesar Rp587.388.932.525.

Jumlah utang kepada Eks BPPN tersebut direstrukturisasi dengan pola restrukturisasi menjadi 3 (tiga) tranche sebagai berikut:

1. Tranche A: Pembayaran Tunai sebesar Rp45.000.000.000
Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan sumber pelunasannya berasal dari hasil penjualan aset non produktif milik perusahaan.
2. Tranche B: Pinjaman Berjangka sebesar Rp22.000.000.000
Jangka waktu pinjaman 9 tahun dengan grace period 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian, tingkat bunga adalah suku bunga rata-rata dari tingkat deposito berjangka 3 bulan Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB dan Citibank ditambah 3% (tiga persen).

a. Ex. BPPN Debts

The debt to the ex BPPN is a debt arising from the debt restructuring (BDN Credit, Exim Bank and Tamara Bank) as outlined in the Principal Agreement on Debt Restructuring No. 14/L/2002, No. 15/L/2002 and No. 16/L/2002 dated 17 October 2002, made before Notary Lenny Janis Ishak, SH the principal content of the agreement was that the balance of the debt mutually agreed as of 31 March 2002 (date of transfer) was Rp436,546,439,765 and USD 16,282,653 at an exchange rate of USD 1 = Rp 9,264 or equivalent to Rp150,842,492,760 so that the total amount of debt is Rp587,388,932,525.

The amount of debt to the ex BPPN was restructured with a restructuring pattern into 3 (three) tranches as follows:

1. *Tranche A: Cash Payment of Rp45,000,000,000
The maximum loan period is 1 year from the signing of the agreement and the source of the repayment comes from the sale of the company's non-productive assets.*
2. *Tranche B: Term Loan of Rp22,000,000,000
The loan term is 9 years with a grace period of 1 year from the signing of the agreement, the interest rate is the average interest rate of the 3-month time deposit rates of Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB and Citibank plus 3% (three percent).*

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

a. Ex. BPPN Debts (continued)

Jumlah hutang kepada Eks BPPN tersebut direstrukturisasi dengan pola restrukturisasi menjadi 3 (tiga) tranche sebagai berikut: (lanjutan)

The amount of debt to the ex BPPN was restructured with a restructuring pattern into 3 (three) tranches as follows: (continued)

3. Tranche C: Obligasi Straight Bond sebesar Rp520.388.932.525. Jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga yang berlaku adalah zero coupon dan yield to maturity menggunakan rate Sertifikat Bank Indonesia triwulanan atau sebesar 13,12%. Jumlah Sertifikat Obligasi yang diterbitkan adalah 1.040 lembar Sertifikat Obligasi atas nama dengan nilai nominal masing-masing Rp500.000.000 dan satu lembar sertifikat obligasi atas nama dengan nominal Rp388.932.525.

3. *Tranche C: Straight Bond, amounting to Rp520,388,932,525. The tenor is 10 years, the applicable interest rate is zero coupon and the yield to maturity uses the quarterly Bank Indonesia Certificate rate or 13.12%. The total number of Bond Certificates issued was 1,040 Bond Certificates in the name with nominal value of Rp500,000,000 each and one bond certificate in the names with a nominal value of Rp388,932,525.*

Sejak perjanjian ditandatangani sampai saat ini, Sertifikat Obligasi tersebut belum pernah diterbitkan.

Since the agreement was signed until now, the Bond Certificate has never been issued.

Dalam perjalanannya atas utang kepada eks BPPN tersebut, PT Dharma Niaga (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pokok restrukturisasi hutang tersebut, sehingga kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada Entitas.

On the way over the debt to the ex BPPN, PT Dharma Niaga (Persero) was unable to fulfill the obligations in the principal debt restructuring agreement, so these obligations were transferred to Entity.

Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 9 Februari 2010 mengenai pembahasan Penyelesaian Piutang Negara pada Perusahaan yang dihadiri oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Biro Hukum Departemen Keuangan, Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA)/eks BPPN dan Entitas, bahwa atas utang Entitas kepada Negara yang dikelola oleh PPA telah diserahkan pengelolaannya kepada DJKN dengan berita acara serah terima No: BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009. Berdasarkan BAST tersebut nilai utang Entitas adalah sebagai berikut:

Based on the Minutes of Meeting dated 9 February 2010 regarding the discussion of Settlement of State Receivables to Companies attended by the Directorate of Investment Management Systems, the Director General of State Assets (DJKN), the Legal Bureau of the Ministry of Finance, the Ministry of BUMN, PT Asset Management Company (PPA) / ex BPPN and Entity, that the management of Entity's debt to the State managed by PPA has been handed over to the DJKN with an official report of the handover No: BAST-002/PPA/0209 dated 27 February 2009. Based on the BAST, the value of Entity's debt are as follows:

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

a. Ex. BPPN Debts (continued)

No	Pinjaman / Loan	Pokok / Principal	Bunga / Interest	Denda / Penalty	Total / Total
1	Tranche A	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000
2	Tranche B	22.000.000.000	4.981.928.648	-	26.981.928.648
3	Tranche C	520.388.932.525	93.415.047.591	1.221.727.259	615.025.707.374
Jumlah / Total		587.388.932.525	98.396.976.238	1.221.727.259	687.007.636.022

Pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dilakukan pencairan deposito jaminan (Eks Bank Tamara) sebesar USD5.470.458 atau setara dengan Rp77.346.808.913 dan digunakan sebagai pembayaran sebagian utang (Eks BPPN) Entitas kepada Negara.

On 11 October 2019, the guarantee deposit (Ex Bank Tamara) amounting to USD5,470,458 equivalent to Rp77,346,808,913 were withdrawn and used as a partial payment of Entity's debt (Ex BPPN) to the State.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Entitas menerima surat No. S-1032/KN.5/2019 dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang menyatakan bahwa pembayaran sebagian utang (Eks BPPN) dari Entitas telah diterima dan dicatat sebagai pengurang bunga (non pokok), sehingga, saldo utang Eks BPPN per tanggal cut off date 24 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

On 29 October 2019 the Entity received letter No. S-1032/KN.5/2019 from Director of State Wealth Management and Information System stating that payment part of the debt (Ex BPPN) from Entity PPI (Persero) had been received and recorded as deduction of interest (non principal), as a result, the ex BPPN debt balance as of the cut off date of 24 August 2020 is as follows:

a. Kewajiban Pokok	Rp587.388.932.525	a. Principal loan
b. Kewajiban Lainnya		b. Other loan
- Bunga	Rp21.050.167.324	Interest -
- Denda	Rp1.221.727.259	Penalty -
JUMLAH	Rp609.660.827.108	TOTAL

Berdasarkan surat dari Kementerian BUMN No. S-10/D4.MBU/2/01/2020 Hal Permintaan Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN untuk Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Januari 2020, maka Entitas mengajukan surat kepada PLt. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN No. 11/DU/Eks/PPI/I/2020 Perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka Restrukturisasi Keuangan Entitas tanggal 16 Januari 2020. Selanjutnya sesuai arahan dari Kementerian BUMN, usulan tersebut diperbaharui dengan surat yang ditujukan kepada Menteri BUMN No. 126/DU/Eks/PPI/V/2020 Perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka Restrukturisasi Keuangan Entitas tanggal 28 Mei 2020.

Based on a letter from the Ministry of BUMN No. S-10/D4.MBU/2/01/2020 Regarding Request for Proposal for Additional State Capital Participation in BUMN for Fiscal Year 2021 dated 14 January 2020, Entity submitted a letter to PLt. Deputy for Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Business Sector, Ministry of BUMN No. 11/DU/Ex/PPI/I/2020 Regarding Proposed Non-Cash State Capital Participation in the context of Entity Financial Restructuring on 16 January 2020. Furthermore, according to the direction of the Ministry BUMN, the proposal was updated with a letter addressed to the Minister of BUMN No. 126/DU/Ex/PPI/V/2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Equity Participation in the context of Entity Financial Restructuring on 28 May 2020

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri BUMN melalui surat No. SR-464/MBU/07/2020 Hal Usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA.2021, mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan PMN Non Tunai dari APBN TA. 2021 kepada BUMN termasuk Entitas atas Piutang Negara yang berasal dari Utang Eks BPPN dan Utang Rekening Dana Investasi (RDI).

Berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri BUMN tersebut dan arahan secara kolektif dari Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Entitas pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. 190/DU/Eks/PPI/ VIII/2020 Perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam Rangka Restrukturisasi Keuangan Entitas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Selain penyampaian surat di atas, Entitas juga telah melengkapi persyaratan administrasi untuk restrukturisasi aset kredit menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara berupa Proposal Permohonan dilampiri Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (LDD), Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Keuangan (FDD) dan Aspek Operasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan tanggal 19 September 2016.

Pada tanggal 22 Juli 2021, berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-301/MK.6/2021 menyatakan sebagai berikut:

1. Menyetujui permohonan konversi utang non pokok eks BPPN sebesar Rp22.271,89 juta menjadi utang pokok, sehingga jumlah utang pokok dari semula Rp587.388,93 juta menjadi sebesar Rp609.660,83 juta.

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Ex. BPPN Debts (continued)

On 2 July 2020, the Minister of SOE through letter No. SR-464/MBU/07/2020 Proposal for Additional Non-Cash PMN Funds and the Abolition of Receivables from BUMN for the APBN TA. 2021 to BUMN including Entity for State Receivables originating from ex BPPN Debt and Investment Fund Account (RDI).

Based on the recommendation letter from the Minister of SOE and collective direction from the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOE, Entity on 5 August 2020 submitted a proposal to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with letter No. 190/DU/Ex/ PPI/VIII/2020 Concerning Proposed Non-Cash State Capital Participation in the Context of Entity Financial Restructuring with copies to the Director General of Treasury, Director General of State Assets and Head of the Fiscal Policy Agency. In addition to the submission of the letter above, Entity has also completed the administrative requirements for restructuring credit assets into additional State Capital Participation in the form of Application Proposals attached with Legal Aspect Due Diligence Results Report (LDD), Financial Aspect Due Diligence Result Report (FDD) and Operational Aspects in accordance with the Regulation of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 138/PMK.06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Ministry of Finance No. 71/PMK.06/2015 concerning Management of Ex-Managed Assets of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) by the Ministry of Finance on 19 September 2016.

On 22 July 2021, based on the letter Minister of Finance of the Republic of Indonesia No S-301/MK.6/2021 stated as follows:

1. *Approved the request for the conversion of non-principal debt ex BPPN of Rp22,271.89 million into principal debt, so that the amount of principal debt from Rp587,388.93 million was originally Rp609,660.83 million.*

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

2. Menyetujui permohonan konversi utang pokok Eks BPPN setelah ditambahkan sebesar Rp609.660,83 juta menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka memperkuat struktur permodalan sehingga Entitas diharapkan akan memiliki pengaruh untuk mendapatkan pembiayaan dan untuk mendukung program restrukturisasi yang sedang dilaksanakan oleh Entitas.

b. Bappenas

Utang Bappenas berasal dari pemanfaatan sebagian dana Non- Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 sebesar JPY.3.000.000.000 (tiga milyar Yen Jepang) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimpor kedelai yang disalurkan oleh distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2005, Grup tidak melakukan angsuran lagi.

c. Utang Rekening Dana Investasi

i) Rekening Dana Investasi No.AMA-188/RDI- 371/DSMI/2017

Rekening Dana Investasi merupakan pinjaman dari Pemerintah Indonesia berupa fasilitas Kredit Modal Kerja untuk pembelian pupuk impor sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman antara eks PT Dharma Niaga (Persero) dengan Pemerintah Indonesia c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.RDI- 371/013/1999 tanggal 11 Agustus 1999 dengan jumlah USD18.740.170 jangka waktu sejak Agustus 1999 sampai dengan Desember 1999. Namun sejak bulan Februari 2002 PT Dharma Niaga (Persero) tidak lagi membayar baik angsuran pokok maupun tunggakan bunganya. Pada tanggal 30 Januari 2015, dilakukan adendum dan pernyataan kembali Perjanjian Pinjaman No. RDI-371/DP3/1999 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Dharma Niaga kepada Entitas dengan RDI-400/DSMI/2015, 30 Januari 2015.

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Ex BPPN Debts (continued)

2. Approve the request for the conversion of Ex-BPPN's main debt after adding Rp609,660.83 million to additional State Capital Participation (PMN) in order to strengthen the capital structure so that the Entity is expected to have leverage to obtain financing and to support the restructuring program being implemented by the Entity.

b. Bappenas

Bappenas' debt originated from the utilization of part of the Non-Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 fund of JPY.3,000,000,000 (three billion Japanese Yen) from the Government of Japan to the Government of Indonesia to import soybeans for distribution by distributors appointed by the Government of Indonesia as a distributor. Since 2005, the Group has not made any further installments.

c. Investment Fund Debt Account

i) Investment Fund Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017

The Investment Fund Account is a loan from the Government of Indonesia in the form of Working Capital Credit facility for the purchase of imported fertilizer in accordance with the Letter of Loan Agreement between former PT Dharma Niaga (Persero) and the Government of Indonesia c.q. Director General of Financial Institutions No.RDI-371/013/1999 dated 11 August 1999 with the amount of USD18,740,170 the period from August 1999 to December 1999. Since February 2002, the PT Dharma Niaga (Persero) has ceased to pay both principal and interest in arrears. On 30 January 2015, an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI-371/DP3/1999 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Dharma Niaga's debt to Entity with RDI-400/DSMI/2015 dated 30 January 2015.

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES (continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

i) Rekening Dana Investasi No.AMA-188/RDI- 371/DSMI/2017 (lanjutan)

i) Investment Fund Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 (continued)

Pada tanggal 10 November 2017, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-371/DP3/1999 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Dharma Niaga kepada Entitas dengan AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 tanggal 10 November 2017.

On 10 November 2017, it was made an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI- 371/DP3/1999 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Dharma Niaga's debt to Entity with AMA-188/RDI 371/DSMI/2017 dated 10 November 2017.

Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Perjanjian Pinjaman RDI pada Entitas No.70/PB.4.1.3/PT PPI/0507 tanggal 21 Mei 2007 telah diadakan pertemuan cut off date dan rekonsiliasi perhitungan liabilitas pokok dan liabilitas lainnya atas pinjaman yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman RDI No. RDI-371/013/1999 tanggal 11 Agustus 1999.

In accordance with the Official Report of Reconciliation in the Frame of Settlement of State Receivables Sourced from RDI Loan Agreement with PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. 70/PB.4.1.3/PT PPI/0507 dated 21 May 2007, there has been a cut off date and reconciliation meeting calculation of principal liabilities and other liabilities on loans originating from the RDI Loan Agreement No. RDI-371/013/1999 dated 11 August 1999.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo utang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi PT.PPI No BA: BA-141/WPB.12/KP.1004/2017 tanggal 11 Januari 2017, dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Perjanjian pinjaman Entitas No. RDI- 400/DSMI/2015 pada periode tanggal 31 Desember 2016, telah dilakukan rekonsiliasi ulang yang bertempat di KPPN. Pada saat rekonsiliasi ulang tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan di masing-masing pihak.

Based on the Minutes of Reconciliation with State Treasury Service Office of PT.PPI No BA: BA-141/WPB.12/KP.1004/2017 dated 11 January 2017, in the framework of the Settlement of State Receivables Sourced from PT.PPI Agreement No. RDI- 400/DSMI/2015 in the period of 31 December 2016, rereconciliation has been conducted at KPPN. At the time of reconciliation there was no difference in each party.

Hak Tagih Pemerintah/ Posisi Pinjaman Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp188.156.343.648 dan Rp192.202.716.630 dengan rincian posisi pinjaman sebagai berikut:

Where the Government's Charge/Lending Position as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp188,156,343,648 and Rp192,202,716,630 respectively with details as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pinjaman Pokok	104.291.852.082	106.534.687.612	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non-pokok	83.864.491.566	85.668.029.018	<i>Non-principal Loan</i>
Subjumlah	188.156.343.648	192.202.716.630	<i>Subtotal</i>

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI/- 299/DSMI/2017

ii) Investment Fund Account No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.RDI-299/DP3/1996 tanggal 20 Mei 1996, Pemerintah RI memberikan pinjaman kepada PT Cipta Niaga untuk pembiayaan pengoperasian Terminal Semen Terapung Tanjung Wangi.

Based on a loan agreement No. RDI-299/DP3/1996 on 20 May 1996, the Government of Indonesia provided loan to PT Cipta Niaga for financing the operation of the Tanjung Wangi Floating Cement Terminal.

Pada tanggal 30 Januari 2015, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-371/DP3/1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Cipta Niaga kepada Entitas dengan RDI-400/DSMI/2015 tanggal 30 Januari 2015.

On 30 January 2015, it was made an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI- 371/DP3/1999 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Dharma Niaga's debt to Entity with RDI-400/DSMI/2015 dated 30 January 2015.

Pada tanggal 30 Januari 2015, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-299/DP3/1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Dharma Niaga kepada Entitas dengan RDI-399/DSMI/2015 tanggal 30 Januari 2015.

On 30 Januari 2015, an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI-299/DP3/1999 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Dharma Niaga's debt to Entity with RDI-399/DSMI/2015 dated 30 Januari 2015.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-699/MK.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada Entitas yang menyatakan bahwa :

In 2017, there is a letter from the Minister of Finance with No. S-699/MK.05/2017 concerning Approval of the Settlement of State Receivables to Entity dated 31 August 2017 stating that:

Pinjaman Pokok	25.531.700.000	Principal Loan
Pinjaman Non-pokok	42.752.831.650	Non-principal Loan
Jumlah	68.284.531.050	Total

Pembayaran menggunakan cara balloon payment dengan persentase angsuran per tahun:

Payment using the balloon payment method with the percentage of installments per year:

Tahun/Year	2017 – 2019	2020 – 2022	2023 – 2025	2026 – 2027	2028 – 2029	2030 – 2031	2032 – 2033	2034 – 2036
Angsuran	1%	2	4%	5%	6%	7%	8%	9%

b. Perubahan tingkat suku bunga menjadi 0%.

b. Change of interest rate to 0%

c. Perubahan mata uang pinjaman yang semula USD menjadi rupiah, berdasarkan kurs BI.

c. Changed currency from USD to IDR, based on BI exchange rate.

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI/- 299/DSMI/2017 (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2017, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-299/DP3/1996 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Cipta Niaga kepada Entitas dengan AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 tanggal 10 November 2017.

Hak Tagih Pemerintah/ Posisi Pinjaman Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp63.504.614.042 dan Rp64.870.304.674 dengan rincian posisi pinjaman sebagai berikut:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pinjaman Pokok	23.744.480.604	24.255.114.604	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non Pokok	39.760.133.438	40.615.190.070	<i>Non-principal Loan</i>
Jumlah	63.504.614.042	64.870.304.674	Total

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

Pada tahun 1986, PT Pantja Niaga memperoleh pinjaman dari Pemerintah c.q. Menteri Keuangan berupa kredit modal kerja khusus untuk membiayai pengadaan stock penyangga kertas koran dalam negeri. Pinjaman tersebut diberikan melalui skema pinjaman Rekening Dana Investasi No.RDI.006/DDI/1986.

Pada tanggal 30 Januari 2015, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-006/DDI/1980 tanggal 2 Agustus 1980 sebagaimana terakhir diubah dengan amandemen perjanjian No. AMA-04/DDI/1986 tanggal 25 Januari 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Pantja Niaga kepada Entitas dengan No. RDI-398/DSMI/2015 tanggal 30 Januari 2015.

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

ii) Investment Fund Account No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017 (continued)

On 10 November 2017, it was made an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI-299/DP3/1996 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Cipta Niaga's debt to Entity with the letter AMA-187/RDI-371/DSMI/2017 dated 10 November 2017.

Where the Government's Charge/Lending Position as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp63,504,614,042 and Rp64,870,304,674 respectively with details as follows:

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

In 1986, PT Pantja Niaga obtained a loan from the Government c.q. Minister of Finance in the form of special working capital loans to finance the procurement of domestic paper stock buffer. The loan is provided through the Investment Fund Account scheme No.RDI.006/DDI/1986.

On 30 January 2015, it was made an amendment and resubmission of the Loan Agreement No.RDI-006/DDI/1980 dated 2 August 1980, as amended by amendment of agreement AMA-04/DDI/1986 dated 25 January 1986 between the Government of the Republic of Indonesia and Entity in the framework of transferring all of PT Pantja Niaga's liabilities to Entity with the letter number RDI-398/DSMI/2015 No. dated 30 January 2015.

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (lanjutan)

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (continued)

Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Entitas No. BA: BA-139/WPB.12/KP.1004/2017 tanggal 11 Januari 2017, dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Perjanjian pinjaman PT.PPI No. No. RDI- 398/DSMI/2015 pada periode tanggal 31 Desember 2016, telah dilakukan rekonsiliasi ulang yang bertempat di KPPN. Pada saat rekonsiliasi ulang tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan di masing-masing pihak, dimana Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman sebesar Rp17.529.397.263.

In accordance with the Minutes of Reconciliation of PT.PPI No. BA: 139/WPB.12/KP.1004/2017 dated 11 January 2017, in the framework of the Settlement of State Receivables Sourced from the Loan Agreement of PT.PPI no. RDI- 398/DSMI/2015 for the period as of 31 December 2016, a reconciliation has been made at KPPN. At the time of reconciliation is not found any differences in each party, where the Government Billing/Lending Position of Rp17,529,397,263.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S- 699/MK.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada Entitas, menjelaskan bahwa terhadap hutang Rekening Dana Investasi tersebut telah dilakukan penjadwalan kembali pembayaran selama 20 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dengan rincian:

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S- 699/MK.05/2017 dated 31 August 2017 concerning Approval of Settlement of State Receivables at Entity, explaining that the accounts payable of the Inventory Fund has been rescheduled for 20 years from the date of approval are as follows:

2017		
Pinjaman Pokok	6.601.562.500	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non Pokok	10.927.834.763	<i>Non-principal Loan</i>
Jumlah	17.529.397.263	Total

Penjadwalan kembali pembayaran selama 20 tahun menggunakan cara balloon payment dengan persentase angsuran per tahun:

Rescheduling of payment for 20 years using balloon payment method with percentage of installment per year:

Tahun/Year	2017-2019	2020-2022	2023-2025	2026-2027	2028-2029	2030-2031	2032-2033	2034-2036
Angsuran	1%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	9%

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (lanjutan)

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (continued)

Berdasarkan PMK No 135/PMK.06/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Entitas oleh Menteri Keuangan pasal 4 “Pengelolaan Aset Kredit Meliputi:

Based on PMK No. 135 / PMK.06 / 2018 concerning the Second Amendment to PMK No. 71 / PMK.06 / 2015 concerning Management of Ex-Assets Management of Entity by the Minister of Finance article 4 “Management of Credit Assets Includes:

- a. Perusahaan Aset Kredit
- b. Penyerahan Pengurusan Aset Kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- c. Melakukan Restrukturisasi Aset Kredit
- d. Penjualan
- e. Penyertaan modal negara; dan
- f. Pembayaran dalam bentuk aset (asset settlement)

- a. Credit Asset company
- b. Submission of Credit Asset Management to the State Debt Affairs Committee (PUPN)
- c. Restructuring Credit Assets
- d. Sales
- e. State capital participation
- f. Payment in the form of assets (asset settlement)

Pada tanggal 10 November 2017, telah dilakukan adendum dan pernyataan kembali atas Perjanjian Pinjaman No. RDI-006/DDI/1980 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Entitas dalam rangka pengalihan seluruh kewajiban PT Pantja Niaga (Persero) kepada Entitas dengan surat No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 tanggal 10 November 2017.

On 10 November 2017, it was made an amendment and resubmission of the Loan Agreement No. RDI-299/DDI/1980 between the Government of the Republic of Indonesia and the Entity in the context of the transfer of PT Pantja Niaga’s debt to Entity with the letter number AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 dated 10 November 2017.

Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp16.302.339.452 dan Rp16.652.927.396 dengan rincian posisi pinjaman sebagai berikut:

Where the Government’s Charge/Lending Position as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounted to Rp16,302,339,452 and Rp16,652,927,396 respectively with details as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pinjaman Pokok	6.139.453.127	6.271.484.377	<i>Principal Loan</i>
Pinjaman Non Pokok	10.162.886.325	10.381.443.019	<i>Non-principal Loan</i>
Jumlah	16.302.339.452	16.652.927.396	Total

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES (continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (lanjutan)

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (continued)

Pada tanggal 8 Oktober 2020, berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No S-296/MBU/Wk1/11/2020 menyatakan sebagai berikut:

On 8 October 2020, based on the letter of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-296/MBU/Wk1/11/2020 stated the following:

1. Entitas pada awalnya berasal dari peleburan 3 BUMN, yang sebelumnya bergabung menjadi Entitas telah memiliki hutang/kewajiban kepada Pemerintah serta Entitas mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh rendahnya kinerja perusahaan yang diperburuk oleh dampak Covid-19. Akibatnya Entitas tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo atas utang yang bersumber dari perjanjian pinjaman RDI.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Menteri BUMN merekomendasikan untuk dapat dilakukan konversi atas utang pokok sebesar Rp138.504,04 juta menjadi Penyertaan Modal Negara dan penghapusan utang non pokok sebesar Rp138.104,24 juta untuk memperkuat struktur modal Entitas ke depan.

1. *The Entity originally came from the merger of 3 BUMN, which previously merged into Entity already has debts / obligations to the Government and the Entity is experiencing liquidity problems caused by low company performance exacerbated by the impact of Covid-19. As a result, the Entity is unable to pay its maturing obligations on debt originating from the RDI loan agreement.*
2. *Based on the aforementioned matters, The Minister on State Owned Enterprise recommended the conversion of principal debt amounting to Rp138,504.04 million be converted into State Equity Participation and cancellation of non-principal debt amounting to Rp138,104.24 million to strengthen the capital structure of the Entity going forward.*

28. UTANG SEWA

28. LEASE PAYABLES

Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.274.143.419 dan Rp2.014.831.587 merupakan utang sewa kendaraan jangka panjang.

Balance as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting Rp1,274,143,419 and Rp2,014,831,587 respectively represent long term lease payables vehicle.

29. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

**29. POST EMPLOYMENT BENEFITS
 OBLIGATIONS**

Akun ini terdiri dari :	<i>The account consist of:</i>		
	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Kewajiban pension	134.817.783	89.015.661	<i>Pension obligations</i>
Kewajiban paska kerja lainnya	52.450.216.344	50.060.419.346	<i>Other post employment benefit obligations</i>
Kewajiban pensiun dini	28.405.634.428	-	<i>Early retirement obligations</i>
Jumlah kewajiban imbalan paska kerja	80.990.668.555	50.149.435.007	<i>Total post employment benefit obligations</i>

Liabilitas Imbalan Paska-Kerja menurut perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut: *Post-Employment Benefit Liabilities based on actuary calculations are as follows:*

(i) Kewajiban pension

(i) Pensions obligations

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of financial position are determined as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	10.416.062.907	10.911.378.950	<i>Present value of the defined benefit obligations</i>
Nilai wajar aset program	(10.281.245.124)	(10.822.363.289)	<i>Fair value of plan asset</i>
Status pendanaan	134.817.783	89.015.661	<i>Funding status</i>
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	<i>Unrecognized past service cost</i>
Keuntungan/kerugian aktuarial Yang belum diakui	-	-	<i>Unrecognized actuarial Gain / losses</i>
Liabilitas (aset) yang diakui di Laporan posisi keuangan	134.817.783	89.015.661	<i>Liability (asset) recognized in The statement of financial Position</i>

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the income statement are as follows :

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Biaya jasa kini	3.664.897.916	3.969.268.192	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	491.012.053	1.135.359.839	<i>Interest cost</i>
Hasil diharapkan dari Aset program	(562.762.891)	(910.336.695)	<i>Expected return On plan assets</i>
Kerugian aktuarial yang diakui	-	-	<i>Net actuarial losses recognized in year</i>
Amortisasi biaya jasa lalu	-	-	<i>Amortization of past service cost</i>
Jumlah beban Imbalan karyawan	3.593.147.078	4.194.291.336	<i>Total of employee benefit cost</i>
Dampak kurtailmen	1.790.173.196	2.918.257.359	<i>Effect of curtailment</i>
Rugi/ laba imbalan karyawan	5.383.320.274	7.112.548.695	<i>Expense/ income to be Recognized for the period</i>

29. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA 29. **POST EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATIONS**
(lanjutan) (continued)

(i) **Kewajiban pensiun** (lanjutan)

(i) **Pensions obligations** (continued)

Mutasi saldo liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

Movement in the liability recognized in the statement of financial position:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Liabilitas pada awal tahun	89.015.661	87.582.303	<i>Beginning balance liabilities</i>
Beban manfaat karyawan tahun berjalan	5.383.320.274	7.112.548.695	<i>Employee benefit cost for the year</i>
Pendapatan komprehensif lainnya aset program	(102.839.628)	(1.571.454.617)	<i>Other comprehensive income Expected return on plan assets</i>
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(5.234.678.524)	(5.539.660.720)	<i>Employee benefit paid for the year</i>
Liabilitas pada Akhir Tahun	134.817.783	89.015.661	<i>Liabilities Ending Balance</i>

Asumsi yang digunakan oleh Aktuaria tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Assumptions used by Actuary year 2021 and 2020 are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Tingkat diskonto	5,20%	5.40%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	<i>Expectation increase rate</i>
Tingkat pengunduran diri	2,50%	3.50%	<i>Resignation rate</i>
Usia pensiun normal	56 tahun	55-56 tahun/ year	<i>Discount rate</i>

(ii) **Kewajiban paska kerja lainnya**

(ii) **Other post employment benefit obligations**

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of financial position are determined as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	76.657.272.181	53.828.782.986	<i>Present value of the defined benefit obligation</i>
Nilai wajar aset program	(25.175.049.716)	(5.627.710.170)	<i>Fair value of plan asset</i>
Status pendanaan	51.482.222.465	48.201.072.816	<i>Funding status</i>
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	<i>Unrecognized past service cost</i>
Keuntungan/kerugian actuarial yang belum diakui	-	-	<i>Unrecognized actuarial gain / losses</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	51.482.222.465	48.201.072.816	<i>Liability recognized in the statement of financial position</i>
Entitas Anak	967.993.879	1.859.346.530	<i>Subsidiaries</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	52.450.216.344	50.060.419.346	<i>Liability recognized in the statement of financial position</i>

29. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan) **29. POST EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATIONS** (continued)

(ii) **Kewajiban paska kerja lainnya** (lanjutan)

(ii) **Other post employment benefit obligations** (continued)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the income statement are as follows :

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Biaya jasa kini	7.662.703.280	4.884.678.163	Current service cost
Biaya bunga	3.516.055.756	3.300.740.395	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Hasil diharapkan dari aset program	(608.064.036)	-	Expected return on plan assets
Kerugian actuarial yang diakui	-	-	Net actuarial losses recognized in year
Biaya jasa lalu	(312.494.483)	-	Past service cost
Amortisasi biaya jasa lalu	-	-	Amortization of past service cost
Jumlah rugi/ laba	10.258.200.517	8.185.418.558	Expense/income to be recognized
Dampak kurtailmen	3.542.774.772	4.148.927.706	Effect of curtailment
Rugi/ laba imbalan karyawan	13.800.975.289	12.334.346.264	Expense/ income to be recognized for the period

Mutasi saldo liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

Movement in the liability recognized in the statement of financial position:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Liabilitas pada awal tahun	48.201.072.816	52.041.491.246	Liability at beginning of year
Beban manfaat karyawan tahun berjalan	13.800.975.289	12.334.346.264	Employee benefit cost for the year
Beban/ pendapatan komprehensif lainnya	26.325.548.542	16.428.828.546	Expenses/ Other comprehensive Income
Kontribusi perusahaan	(16.205.228.915)	(5.627.710.170)	Fair value of plan asset
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(20.640.145.267)	(26.975.883.070)	Employee benefit paid for the year
Entitas anak			Subsidiaries
Beban imbalan kerja	967.993.879	1.859.346.530	Employee benefit cost
Jumlah	52.450.216.344	50.060.419.346	Total

Asumsi yang digunakan oleh Aktuaria tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Assumptions used by Actuary year 2021 and 2020 are as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Tingkat diskonto	7,40%	6,43% - 7,10%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Expectation increase rate
Tingkat pengunduran diri	2,50%	6,43% - 7,10%	Resignation rate
Usia pensiun normal	55 tahun	55-56 tahun/ year	Discount rate

30. MODAL SAHAM

Modal dasar Entitas berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No. 3 tanggal 19 Juni 2003 terbagi atas 575.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham berjumlah Rp575.000.000.000, yang terdiri dari:

- 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.
- 574.999 saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 2 Desember 2021, melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Modal dasar ditetapkan sebesar Rp 1.175.877.000.000 terbagi atas 1.175.877 saham yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, 1.175.876 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp1.175.876.000.000.

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 942.745 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 942.745.000.000 yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 1.000.000, 942.744 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp942.745.000.000.

30. SHARES CAPITAL

The Entity's authorized capital based on Notarial Deed Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No.3 dated 19 June 2003 is divided into 575,000 shares with a total of Rp575,000,000,000 consisting of:

- *1 A series Dwiwarna shares, with a nominal value of Rp1,000,000.*
- *574,999 B series shares, each with a nominal value of Rp1,000,000*

On 2 December 2021, through Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) which is notarized under Deed No.3 dated 2 December 2021 by Aulia Taufani, S.H., Ministry of Stated Own Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprise through the merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

The authorized capital is stipulated at Rp1,175,877,000,000 divided into 1,175,877 shares consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000, 1,175,876 B series shares each with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp1,175,876,000,000.

Of the authorized capital, 942,745 shares have been issued and subscribed by the Republic of Indonesia with a total nominal value of Rp 942,745,000,000 consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp 1,000,000, 942,744 B series shares each with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp942,745,000,000.

Pemegang saham/ Shareholder	Lembar saham/ Shares	Nilai perlembar saham/ Value per share	Nilai nominal/ Nominal value
Saham Seri A/ <i>A Series Shares</i>	1	1.000.000	1.000.000
Saham Seri B/ <i>B Series Shares</i>	942.744	1.000.000	942.744.000.000
	942.745		942.745.000.000

31. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2019 yang diaktakan No. 12 tanggal 15 Mei 2019 oleh Notaris Tris Nur Patrini Notaris di Bogor, menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 sebagai cadangan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Cadangan umum Entitas masing-masing sebesar Rp 111.890.435.294.

32. CADANGAN KHUSUS

Utang dividen yang hingga sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan belum diselesaikan sebesar Rp1.531.912.169 dan oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Grup Terbatas pasal 73 sehingga jumlah sebesar tersebut direklasifikasi ke cadangan khusus.

33. SALDO LABA - BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Saldo laba ditahan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.962.307.061.200 dan Rp1.735.670.579.848.

Entitas telah melaksanakan kuasi reorganisasi pada 30 September 2012. Sesuai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, bahwa akuntansi kuasi reorganisasi (PSAK 51) dinyatakan tidak berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, yang diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa, saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi direklasifikasi secara langsung ke saldo laba.

31. GENERAL RESERVES

Based on the General Meeting of Shareholders on 15 May 2019, which was documented under act No. 12 dated 15 May 2019 by Notary Tris Nur Patrini Notary in Bogor, determined the use of the consolidated net income for the 2018 Fiscal Year as general reserves.

As of 31 December 2021 and 2020, the Entity's general reserves amounting to Rp111,890,435,294 respectively.

32. SPECIFIC RESERVES

Debt of dividends up to the date of this report has not yet been finalized amounting to Rp1,531,912,169 and therefore in accordance with Law No. 40 of 2007 on Corporate Limited article 73 the said amount is reclassified to special reserves.

33. RETAINED EARNINGS - UNAPPROPRIATED

Retained earnings as of as of 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp1,962,307,061,200 and Rp1,735,670,579,848 respectively.

The Entity has implemented quasi reorganization on 30 September 2012. In accordance with Revocation of SFAS 51: Accounting for Quasi Reorganization, that quasi reorganization accounting (SFAS 51) is declared as ineffective effective since 1 January 2013, which is applied prospectively provided that the balance of asset and liabilities valuation in the quasi-reorganization is reclassified directly to retained earnings.

34. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	% 2021	% 2020	Nilai tercatat / <i>Carrying amount</i>		Bagian laba (rugi) / <i>Share of profit (loss)</i>	
			31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri	0,1	0,1	5.648.660	1.079.750	4.568.911	967.872
PT BLI Logistik Indonesia	0,04	0,4	-	5.329.292.319	-	1.902.124.227
Jumlah/ Total			5.648.660	5.330.372.069	4.568.911	1.903.092.099

35. PENDAPATAN USAHA

35. REVENUES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Perdagangan	1.307.600.632.450	2.791.632.607.539	Trading
Jasa Pergudangan	303.309.620.109	381.940.187.363	Warehousing Services
Jasa Logistik	265.825.538.241	697.232.979.923	Logistic Sevices
Jasa WIS	41.846.383.970	85.462.423.092	Waste Integrated System
Jasa Penyewaan Properti	20.242.720.043	16.330.109.105	Rented Property
Jumlah	1.938.824.894.813	3.972.598.307.022	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Impor	487.886.700.779	1.700.311.822.311	Import
Lokal	777.557.814.319	1.089.504.687.158	Local
Ekspor	6.401.694.588	1.816.098.070	Export
Warung pangan	6.811.991.641	-	E commerces
Lainnya	28.942.431.123	-	Others
Sub jumlah	1.307.600.632.450	2.791.632.607.539	Subtotal

b. Jasa Pergudangan

b. Warehousing Services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Gudang sendiri	112.692.372.587	143.320.333.522	Entity's warehouse
Gudang sewa	138.456.834.214	180.587.336.670	Rented warehouse
Collateral management Services	5.351.674.383	5.797.094.197	Collateral management services
Gudang manajemen	30.900.104.417	32.723.916.840	Management warehouse
Gudang terbuka	5.711.961.867	15.991.977.208	Open storages warehouse
Record management center	10.196.672.641	3.519.528.926	Record management center
Sub jumlah	303.309.620.109	381.940.187.363	Subtotal

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

35. REVENUES (continued)

c. Jasa Logistik

c. Logistic Services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Jasa kepabeanan dan angkutan	22.393.850.313	13.577.986.741	Customs and freight services
Jasa logistik darat	81.388.102.496	84.594.949.187	Land logistic services
Jasa logistik laut	42.034.023.209	44.620.516.380	Sea logistic services
Logistik terpadu	120.009.562.223	554.439.527.615	Integrated logistic
Subjumlah	265.825.538.241	697.232.979.923	Subtotal

d. Jasa Waste integrated system (WIS)

d. Waste integrated system (WIS) Services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Waste integrated system	41.846.383.970	85.462.423.092	Waste integrated system

e. Jasa penyewaan property

e. Rented property

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Jasa penyewaan property	20.242.720.043	16.330.109.105	Property rented

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN

36. COST OF REVENUES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Perdagangan	1.166.784.623.373	2.546.683.585.813	Trading
Jasa Pergudangan	235.057.813.890	252.114.193.446	Warehousing Services
Jasa Logistik	231.834.653.127	577.418.177.329	Logistic Services
Jasa WIS dan jasa lainnya	38.698.320.776	80.346.975.020	Waste Integrated System
Jasa Penyewaan Properti	196.007.673	-	Building Rental
Jumlah	1.672.571.418.839	3.456.562.931.608	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Impor	420.028.713.232	1.553.321.861.878	Import
Lokal	703.932.246.963	991.735.207.695	Local
Ekspor	6.175.478.160	1.626.516.240	Export
Warung pangan	7.736.087.118	-	E-commerce
Lainnya	28.912.097.900	-	Others
Subjumlah	1.166.784.623.373	2.546.683.585.813	Subtotal

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

36. COST OF REVENUES (continued)

b. Jasa Pergudangan

b. Warehouses services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Gudang sewa	144.888.211.194	160.015.175.072	Rented warehouses
Gudang sendiri	51.315.305.176	52.275.682.794	Entity's warehouses
Gudang manajemen	30.425.251.631	29.680.449.920	Management warehouses
Gudang terbuka	4.350.899.366	6.192.051.407	Open Storage warehouses
Collateral Management services	3.490.237.694	3.263.481.180	Collateral Management Services
Record Management Center	587.908.829	687.353.073	Record Management Center
Subjumlah	235.057.813.890	252.114.193.446	Subtotal

c. Jasa logistik

c. Logistic services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Jasa kepabeanan dan angkutan	-	33.473.001.551	Customs and freight services
Logistik terpadu	109.326.204.441	440.333.484.196	Coordinated logistics
Logistik darat	74.867.392.412	63.027.833.184	Land logistics
Logistik laut	47.641.056.274	40.583.858.398	Sea logistics
Subjumlah	231.834.653.127	577.418.177.329	Subtotal

d. Jasa WIS

d. Waste integrated system

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Waste integrated system	38.698.320.776	80.346.975.020	Waste integrated system

e. Jasa penyewaan properti

e. Building rental services

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Penyewaan gedung / gudang	196.007.673	-	Building rental

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

37. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

Akun ini merupakan beban penjualan dan distribusi lokal untuk sebelas bulan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.206.222.672 dan Rp16.750.358.826.

37. DISTRIBUTION AND SELLING EXPENSES

This account represents local sales and distribution expenses for eleven months ended 31 December 2021 and 31 December 2020 amounting to Rp16,206,222,672 and Rp16,750,358,826.

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

38. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pegawai	167.930.274.147	160.747.227.435	<i>Employee salaries</i>
Perlengkapan dan utilitas	38.022.472.157	25.882.899.441	<i>Equipment and utilities</i>
Penyusutan	40.976.825.724	30.893.292.589	<i>Depreciation</i>
Manfaat karyawan	51.456.376.588	6.617.365.159	<i>Employee benefits</i>
Biaya professional	10.794.405.321	6.302.912.733	<i>Professional fee</i>
Transportasi	6.596.052.577	6.816.064.581	<i>Transportation</i>
Perjalanan dinas	5.428.078.261	3.283.135.535	<i>Travel expense</i>
Amortisasi	6.838.171.057	1.523.599.298	<i>Amortization</i>
Umum dan administrasi lainnya	50.850.732.724	88.642.532.516	<i>General and other administration</i>
Jumlah	378.893.388.556	330.709.029.287	<i>Total</i>

39. PENDAPATAN/(BEBAN) NON USAHA

39. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Pendapatan Non Usaha:			Non Operating Income:
Kenaikan nilai wajar properti investasi	3.322.460.000	1.701.890.000	<i>Investment property fair value increase</i>
Pendapatan bunga	2.915.367.723	3.216.003.107	<i>Interest income</i>
Pemulihan piutang ragu-ragu	2.474.875.009	2.441.744.385	<i>Recovery bad debt exp</i>
Lainnya	31.427.960	109.998.185	<i>Others</i>
Sub Jumlah	8.744.130.692	7.469.635.677	Subtotal
Beban Non Usaha:			Non Operating Expenses:
Biaya penyisihan piutang dan piutang lain	(30.736.096.827)	(5.090.075.112)	<i>Allowance for receivables and other receivables</i>
Beban penurunan nilai aset tidak dimanfaatkan	(10.450.000.000)	-	<i>Impairment of unused assets</i>
Beban bunga dan provisi bank	(9.361.959.801)	(10.284.333.591)	<i>Interest expenses and bank provision</i>
Bunga pajak	(1.541.789.919)	(3.023.055.531)	<i>Tax interest</i>
Lainnya	(5.748.895.042)	(3.398.358.518)	<i>Others</i>
Sub Jumlah	(57.838.742.589)	(21.795.822.752)	Subtotal
Jumlah	(49.094.611.897)	(14.326.187.075)	Total

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

In its business activities, the Group entered into transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing of these transactions is the same as for transactions made with third parties. The following are significant agreements/transactions with related parties:

a. Hubungan sebagai Pemegang Saham

a. Relationship as Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia

Government of the Republic of Indonesia

Perusahaan mempunyai liabilitas dana pinjaman rekening dana investasi kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan liabilitas kepada pada eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Group has an obligation to settle the investment fund account to the Directorate of Investment Management System of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and liabilities to the former Indonesian Bank Restructuring Agency to the Directorate General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

**b. Hubungan Kepemilikan dan atau
Kepengurusan**

Transaksi dengan seluruh BUMN dan lainnya yang mempunyai hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi, yaitu:

- i. Grup mengadakan transaksi bisnis kepada Perusahaan milik negara yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.
- ii. Grup mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Jumlah penempatan Grup pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka masing-masing berjumlah Rp29.650.000.000 dan Rp49.939.420.781 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing mencerminkan 0,67% dan 1,18% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pendapatan bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.915.367.723 dan Rp1.548.425.940, mencerminkan 33,46% dan 33,30% dari jumlah pendapatan lain-lain pada masing-masing periode.
- iii. Grup mengasuransikan aset tetap, persediaan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang merupakan Perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp341 juta dan Rp1.501 juta mencerminkan 0,09 % dan 0,77% dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode.

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

**b. Relationship of Ownership and/or
Management**

Transactions with all BUMN and others with ownership and or management relationships are treated as transactions with related parties, namely:

- i. The Group entered into a business transaction to a State-owned Company that is treated as a transaction with a third party.
- ii. The Group has current accounts and time deposits with several state-owned banks. The Group's placements with state-owned banks in the form of current accounts and time deposits amounting to Rp29,650,000,000 and Rp49,939,420,781 as of 31 December 2021 and 2020, respectively representing 0,67% and 1,88 % of total assets as of 31 December 2021 and 2020. Interest income recognized for the eleven months ended 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp2,915,367,723 and Rp1,548,425,940 respectively, representing 33,46% and 33,30% of total other income in each period.
- iii. The Grup insured property, plant and equipment, inventory at PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) which is a state-owned insurance company. The insurance premiums for the years ended 31 December 2021 and 2020 amounting to Rp341 million and Rp1,501 million, respectively, representing 0,09% and 0.73% of the total operating expenses for each period.

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Hubungan Kepemilikan dan atau
Kepengurusan

b. Relationship of Ownership and/or
Management

iv. Grup menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi purna bhakti Direksi dan Komisaris pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merupakan Perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan Rp3.263 juta, mencerminkan nihil dan 1.66% dari jumlah beban usaha pada masing- masing periode.

iv. The Company organizes workforce social security for its employees at BPJS Employment and post-service insurance Directors and Commissioners at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which is a state-owned insurance company. The insurance premiums for the years ended 31 December 2021 and 2020 amounting to nil and Rp3,263 million respectively nil and 1.66% of the total operating expenses in each period.

c. Hubungan Manajemen Kunci Perusahaan

c. Key Corporate Management Relationships

Manajemen kunci mencakup komisaris dan direksi. Kompensasi yang diberikan pada manajemen kunci dalam hubungan dengan pemberian jasa sebagai berikut:

Key management includes commissioners and directors. The compensation given to key management in relation to the provision of services is as follows:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Dewan Komisaris:			Board of Commissioner:
Gaji dan imbalan jangka pendek	3.821.896.568	5.394.708.097	Salaries and rewards short-term
Direksi:			Directors:
Gaji dan imbalan jangka pendek	7.260.438.609	10.789.416.193	Salaries and rewards short-term
Pesangon pemutusan kontrak kerja	1.718.707.500	1.798.236.032	Termination benefits employment contract

d. Ikhtisar

d. Overview

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Penjualan			Sales
Pupuk dan Pestisida			Fertilizer and Pesticides
Badan Usaha Milik Desa	5.094.647.265	3.339.082.957	Village-Owned Enterprise
Dinas pertanian dan Peternakan	2.669.587.271	-	Department of Agriculture and Livestock
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	2.250.907.636	-	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
PT Dahana	1.317.854.548	165.454.545	PT Dahana
PT Petrosida Gresik	1.640.920.001	63.272.727	PT Petrosida Gresik
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	149.000.000	-	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	15.340.909	-	Research and Assessment of Agricultural Technology
PT Pertani (Persero)	-	3.647.727	PT Pertani (Persero)
Jumlah	13.138.257.630	3.571.457.956	Total

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Penjualan (lanjutan)			Sales (continued)
Bahan Kimia Berbahaya			Hazardous Chemicals
PT Pertani (Persero)	-	804.218.182	PT Pertani (Persero)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	60.381.819	60.872.729	Regional Water Company
Jumlah	60.381.819	865.090.911	Total
Produk Farmasi			Pharmaceutical Products
RSUD Cideres	26.875.813.842	17.947.100.204	RSUD Cideres
Dinas Kesehatan	3.351.615.809	5.041.479.990	Department of Health
PT Kimia Farma Tbk	248.006.451	182.607.387	PT Kimia Farma Tbk
PT Rajawali Nusindo Indonesia	716.768.114	-	PT Rajawali Nusindo Indonesia
PT Pertamina (Persero)	164.451.683	-	PT Pertamina (Persero)
Dinas pertanian dan Peternakan	58.209.091	-	Department of Agriculture and Livestock
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	61.818.100	-	The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia
Jumlah	31.476.683.090	23.171.187.581	Total
Produk Konsumsi			Consumer Products
Kementerian Sosial Republik Indonesia	646.956.400	-	Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	266.995.545	-	Department of Food Crops and Horticulture
Dinas Sosial	218.911.556	-	Dinas Sosial
Dinas Pangan	194.640.000	4.339.525.000	Dinas Pangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.950.227	-	Department of Industry and Commerce
Perum Bulog	11.454.545	1.984.422.273	Perum Bulog
Kepolisian Resor (POLRES)	3.518.181	-	Departmental Police
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.954.547	2.387.277	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Reksa Multi Usaha	-	453.708.622	PT Reksa Multi Usaha
Jumlah	1.379.381.001	6.780.043.172	Total
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik			Rent, Warehousing and Logistics Products
PT Petrokimia Gresik	178.667.945.182	211.562.362.557	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	74.731.905.367	109.538.107.410	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	32.843.001.160	23.026.868.436	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25.939.826.588	2.648.708.460	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda	20.156.980.995	24.349.543.997	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Rajawali Nusindo	17.079.583.082	-	PT Rajawali Nusindo
PT Pembangkitan Jawa Bali	14.032.510.500	6.709.091	PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Wijaya Karya Beton	10.229.040.892	14.124.418.018	PT Wijaya Karya Beton
PT Timah, Tbk	7.557.828.052	18.822.189.225	PT Timah, Tbk
Saldo dipindahkan	381.238.621.818	404.078.907.194	Balance carried

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries
Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Penjualan (lanjutan)			Sales (continued)
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik (lanjutan)			Rent, Warehousing and Logistics Products (continued)
Saldo pindahan	381.238.621.818	404.078.907.194	Balance brought forward
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	7.487.240.462	-	National Agency for Disaster Countermeasure
PT Pupuk Kujang	5.422.101.336	8.107.301.315	PT Pupuk Kujang
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	10.142.458.575	PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
PT Perkebunan Nusantara VIII	5.286.250.916	5.624.338.265	PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Semen Padang	4.074.321.080	-	PT Semen Padang
Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	3.884.950.278	2.223.638.180	Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Len Industri (Persero)	3.646.195.504	1.685.171.950	PT Len Industri (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi	3.788.434.516	-	PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
Kementerian Sosial	-	323.211.126.829	Kementerian Sosial
PT Perum Pembangunan Nasional	-	3.374.359.732	PT Perum Pembangunan Nasional
Yayasan Bumn Untuk Indonesia	-	8.456.294.889	Yayasan Bumn Untuk Indonesia
PT Pembangunan Perumahan Presisi	-	2.292.127.855	PT Pembangunan Perumahan Presisi
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	10.142.458.575	PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
Lainnya	7.862.291.384	21.313.065.478	Others
Jumlah	422.690.407.294	800.651.248.837	Total
Jumlah Penjualan Pihak Berelasi (a)	468.745.708.114	835.039.028.457	Related Parties Sales Total (a)
Penjualan (b)	1.938.824.894.814	3.972.598.307.022	Sales (b)
Presentase (a): (b)	24,18%	21,02%	Percentage (a): (b)
Pembelian			Purchase
Pupuk dan Pestisida			Fertilizer and Pesticides
PT Petro Kimia Gresik	252.108.336.626	290.447.328.471	PT Petro Kimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	120.317.046.563	148.265.813.099	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	44.114.823.328	16.701.233.380	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Indonesia Pangan	22.937.302.831	-	PT Pupuk Indonesia Pangan
PT Petrosida Gresik	7.461.907.403	12.948.368.370	PT Petrosida Gresik
PT Pupuk Kujang	10.589.042.510	9.146.574.767	PT Pupuk Kujang
PT Pupuk Iskandar Muda	16.185.014.671	3.202.192.499	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Mega Eltra	3.198.549.474	-	PT Mega Eltra
PT Pertani	1.485.227.273	-	PT Pertani
Jumlah	478.397.250.679	480.711.510.586	Total

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Produk Pertanian			Agriculture Products
PT Pertani	11.997.500	2.363.636.371	PT Pertani
Jumlah	11.997.500	2.363.636.371	Total
Produk Konsumer			Consumer Products
Perum Bulog	108.450.120	2.333.261.901	Perum Bulog
PT Rajawali Nusindo	35.886.908	-	PT Rajawali Nusindo
PT Garam	2.350.920	-	PT Garam
PT Pertani	33.630.000	-	PT Pertani
Jumlah	180.317.948	2.333.261.901	Total
Farmasi			Pharmacy
PT Biofarma (Persero)	86.011.317	1.563.662.441	PT Biofarma (Persero)
PT Indofarma Global Medica	737.129.416	691.632.836	PT Indofarma Global Medica
PT Kimia Farma	681.406.838	1.751.767.336	PT Kimia Farma
PT Kimia Farma Trading & Distribution	1.271.710.710	-	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Pyridam Farma	614.315.253	-	PT Pyridam Farma
Jumlah	3.390.573.534	4.007.062.613	Total
Produk Bahan Bangunan			Building Material Products
PT Semen Padang	8.175.749.820	8.469.353.126	PT Semen Padang
Jumlah	8.175.749.820	8.469.353.126	Total
Stasiun Pompa Bensin umum			General Petrol Pump Station
PT Pertamina (Persero)	18.583.250.116	40.636.269.200	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	18.583.250.116	40.636.269.200	Total
Jumlah Pembelian Pihak Berelasi (a)	508.739.139.597	538.521.093.797	Total Purchases Related Parties (a)
Pembelian (b)	811.045.788.186	2.598.293.404.397	Purchases (b)
Presentase (a): (b)	62,73%	20,73%	Percentage (a): (b)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Kembali, Tidak Diaudit)
(Dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended
31 December 2021 and 2020
(Restated, Unaudited)
(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Saldo aset dan liabilitas per 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020 dengan pihak
berelasi sebagai berikut:

The balances of assets and liabilities as of 31
December 2021 and 31 Desember 2020 with
related parties are:

	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	173.058.934.548	230.249.772.006	Cash and cash equivalents
Deposito di jaminkan	21.828.113.040	1.400.000.000	Guaranteed deposit
Piutang usaha	341.339.677.431	337.607.690.728	Trade receivables
Investasi pada Entitas Asosiasi	10.422.281.574	10.623.917.699	Investments in Associates
Aset keuangan tidak lancar lainnya	287.000.000	287.000.000	Other non current financial Asset
Jumlah	546.936.006.593	580.168.380.433	Total
	31 Des/Dec 2021	31 Des/Dec 2020	
Liabilitas jangka pendek			Short-term liabilities
Utang usaha	209.946.581.814	237.952.882.008	237.952.882.008
Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	26.136.879.641	18.022.248.548	Current portion of long term liabilities
Liabilitas jangka Panjang	925.217.534.310	938.090.459.727	Long-term liabilities
Jumlah	1.161.300.995.765	1.194.065.590.283	Total

41. INFORMASI SEGMENT

41. SEGMENT INFORMATION

Saldo aset dan liabilitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan pihak berelasi sebagai berikut:

The balances of assets and liabilities as of 31 December 2021 and 31 December 2020 with related parties are:

31 Des/ Dec 2021						
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/ Warehouse	Logistik/ Logistics	WIS / WIS	Penyewaan property/ Building rental services	Jumlah/ Total
Hasil Segmen/ Segment Result						
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	1.307.600.632.450	303.309.620.109	265.825.538.241	20.242.720.043	41.846.383.970	1.938.824.894.813
Harga Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	1.166.784.623.373	235.057.813.890	231.834.653.127	196.007.673	38.698.320.776	1.672.571.418.839
Jumlah Pendapatan/ Net Revenue	140.816.009.077	68.251.806.219	33.990.885.114	20.046.712.370	3.148.063.194	266.253.475.974
Beban/ expenses						
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	9.886.313.870	2.882.758.443	1.896.759.450	1.407.425.845	132.965.064	16.206.222.672
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	141.347.574.228	154.209.872.715	75.646.381.338	576.745.958	7.112.814.317	378.893.388.556
Jumlah Beban/ Total Expense	151.233.888.097	157.092.631.158	77.543.140.788	1.984.171.803	7.245.779.381	395.099.611.228
Hasil Segmen/ Segment result	(10.417.879.021)	(88.840.824.939)	(43.552.255.675)	18.062.540.567	(4.097.716.187)	(128.846.135.254)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	(25.965.134.499)	(12.584.984.761)	(6.267.596.344)	(3.696.423.343)	(580.472.950)	(49.094.611.897)
Laba (Rugi)/Profit (Loss)	(36.383.013.520)	(101.425.809.700)	(49.819.852.018)	14.366.117.224	(4.678.189.137)	(177.940.747.151)

31 Des/ Dec 2020						
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/ Warehouse	Logistik/ Logistics	Penyewaan property/ Building rental services	WIS / WIS	Jumlah/ Total
Hasil Segmen/ Segment Result						
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	2.791.632.607.539	381.940.187.363	697.232.979.923	16.330.109.105	85.462.423.092	3.972.598.307.022
Harga Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	2.546.683.585.813	252.114.193.446	577.418.177.329	-	80.346.975.020	3.456.562.931.608
Jumlah Pendapatan/ Net Revenue	244.949.021.726	129.825.993.917	119.814.802.594	16.330.109.105	5.115.448.072	516.035.375.414
Beban/ expenses						
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	10.957.914.805	2.297.640.371	2.120.463.854	1.094.979.161	279.360.635	16.750.358.826
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	171.506.827.371	76.417.473.087	68.339.790.955	11.433.910.548	3.011.027.326	330.709.029.287
Jumlah Beban/ Total Expense	182.464.742.176	78.715.113.458	70.460.254.809	12.528.889.709	3.290.387.962	347.459.388.114
Hasil Segmen/ Segment result	62.484.279.550	51.110.880.459	49.354.547.785	3.801.219.396	1.825.060.110	168.575.987.300
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	(6.800.280.904)	(3.604.232.509)	(3.326.301.564)	(453.356.900)	(142.015.197)	(14.326.187.074)
Laba (Rugi)/Profit (Loss)	55.683.998.646	47.506.647.950	46.028.246.221	3.347.862.496	1.683.044.913	154.249.800.226

42. PENYESUAIAN INVESTASI ANAK

42. CHANGES OF INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

Pada tanggal 13 Oktober 2021, Entitas mengakuisisi 40 % kepemilikan saham PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang ada di PT Trisari Veem. Jumlah tercatat dari kepentingan non pengendali PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk pada tanggal akuisisi adalah sebesar Rp5.320.510.818. Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non pengendali atas akuisisi saham adalah sebesar Rp1.000.000.000. Selisih yang dibayarkan pada ekuitas induk perusahaan adalah sebesar Rp 4.320.510.818.

On October 13, 2021, the Entity acquired 40% ownership of PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk in PT Trisari Veem. The carrying amount of the non-controlling interest of PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk on the acquisition date is Rp5,320,510,818. The fee paid to non-controlling interests for the acquisition of shares is Rp1,000,000,000. The difference paid to the parent company's equity amounted to Rp 4,320,510,818.

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan Manajemen Risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta dalam memantau dan mengandalkan penerapan penanganan risiko. Tujuan Manajemen Risiko adalah untuk meningkatkan jaminan pencapaian target Grup.

Secara ringkas, risiko yang dihadapi Grup dan langkah-langkah mitigasinya sebagai berikut:

a) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai ketidak mampuan Grup untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Grup tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan default.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

	31 Des/ Dec 2021		31 Des/ Dec 2020	
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short Term Bank Loan</i>	143.366.049.385	-	22.850.409.618	-
Utang usaha/ <i>Trade payables</i>	209.946.581.814	-	237.952.882.008	-
Biaya yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expense</i>	59.444.566.924	-	130.294.548.558	-
Liabilitas jangka pendek lainnya/ <i>Other current financial liabilities</i>	57.877.800.922	-	13.368.656.846	-
Utang jangka panjang/ Long-term payable	26.136.879.641	925.217.534.310	18.022.248.548	938.090.459.727
Utang sewa pembiayaan/ <i>Lease payables</i>	65.287.499	1.274.143.419	1.362.494.285	2.014.831.587
Jumlah/Total	496.837.166.185	926.491.677.729	423.851.239.863	940.105.291.314

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risk Management Policy is a structured and systematic guide in identifying, measuring, mapping and developing risk management alternatives, as well as in monitoring and relying on the application of risk management. The purpose of Risk Management is to increase assurance of achieving the Grup's target.

In summary, the risks faced by the Grup and its mitigation measures are:

a) Liquidity Risk

Liquidity Risk is defined as the Grup's inability to meet its financial liabilities which subsequently resulted in the Grup not being able to take advantage of investment opportunities or not fulfill short-term financial liabilities that ultimately result in default.

In managing liquidity risk, the Grup monitors and maintains the level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Grup's operations and to overcome the impact of fluctuations in cash flows.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b) Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi Grup adalah risiko ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berhutang (debitur) untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada penilaian Grup, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai pembayaran atas gagal bayar tersebut.

b) Credit Risk

The credit risk faced by the Grup is the risk of the inability of debtors to comply their obligations in accordance with mutually agreed terms.

Based on the Group's valuation, a special allowance may be made if the receivables are considered uncollectible. To mitigate credit risk, the Grup will terminate the distribution of all products to the customer in the event of a delay and/or default and will use the advance/customer guarantee as payment for the default.

	31 Des/ Dec 2021		31 Des/ Dec 2020	
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>	173.058.934.548	-	230.249.772.006	-
Deposito dijaminkan/ <i>Guarantee Deposit</i>	21.828.113.040	-	1.400.000.000	-
Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>				
Pihak ketiga/ <i>Third party</i>	448.728.708.545	-	442.590.596.041	-
Pihak berelasi/ <i>Related Parties</i>	274.182.148.618	-	256.461.666.617	-
Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	62.737.954.385	-	59.749.207.980	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya/ <i>Other non current financial asset</i>	-	287.000.000	-	287.000.000
Jumlah/Total	980.535.859.136	287.000.000	990.451.242.644	287.000.000

Grup memiliki jenis aset keuangan berikut yang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian:

- Piutang usaha
- Piutang lain lain
- Deposito dijaminkan

Sementara kas dan setara kas serta piutang lain-lain dari pihak berelasi juga sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71, kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak.

The Grup has following types of financial assets that are subject to the expected credit loss model:

- Trade receivables
- Other receivables
- Guaranteed deposit

While cash and cash equivalents and other receivables from related parties are also subject to impairment requirements of PSAK 71, the identified impairment loss was immaterial.

The Grup applies the PSAK 71 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contract assets.

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Grup harus menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing secara pelaporan terutama berasal dari:

- Transaksi impor komoditi dalam mata uang asing, ketidakseimbangan dalam hal waktu pembelian dan penjualan akan mempengaruhi harga jual.
- Penyesuaian aset deposito jaminan eks BPPN dalam USD dengan kurs periode laporan.

Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan adalah secara natural (tanpa lindung nilai) yaitu:

- Grup melakukan pembelian komoditi impor dalam mata uang asing, dimana saat transaksi penjualan komoditi tersebut dilakukan, penetapan harga selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.
- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

d) Risiko Komoditas

Dampak risiko komoditas yang dihadapi Grup terutama sehubungan dengan pembelian atau pengadaan barang dagangan yang berkelanjutan, ketersediaan komoditas secara langsung dipengaruhi oleh tingkat produksi, tingkat permintaan dan penawaran pasar serta angkutan barang. Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko tersebut dengan menjaga tingkat persediaan secara optimal untuk meyakinkan penjualan dan distribusi yang berkelanjutan kepada para pelanggan.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c) Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is defined as a decrease in asset/income or increase in value of liabilities/expenses caused by fluctuations in foreign currency exchange rates. Group should face foreign exchange risk exposure by reporting mainly from:

- *Transactions on imports of commodities in foreign currency, an imbalance in terms of time of purchase and sale will affect the selling price.*
- *Adjustment of ex-BPPN deposit asset in USD at the rate of reporting period.*

Policies relating to exchange rate risk currently being executed are natural (without hedging), namely:

- *The Group purchases imported commodities in foreign currency, whereby when the sale of the commodity is executed, the pricing shall always take into account the rates favorable to the Group.*
- *The Group manage risk by trying to harmonize receipts and payments for each type of currency.*

d) Commodity Risk

The impact of commodity risks faced by the Group is primarily related to the purchase or procurement of sustainable merchandise, the availability of commodities directly affected by the level of production, the level of demand and supply of the market and the transportation of goods. The Group policy to minimize such risks by maintaining optimal inventory levels to ensure sustainable sales and distribution to customers.

44. KUASI REORGANISASI

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan oleh melemahnya secara drastis nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa faktor makro ekonomi lainnya seperti meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta turunnya tingkat kepercayaan investor memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada waktu itu. Posisi akumulasi saldo negatif per tanggal 30 September 2012 (sebelum kuasi reorganisasi) Entitas masih mencatat defisit sebesar Rp581.917.351.573. Meskipun saldo defisit Grup masih berjumlah signifikan, Grup telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp127.485.626.056 sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Direksi berkeyakinan bahwa Grup memiliki prospek usaha yang baik di masa depan dan mempunyai potensi pendapatan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya sebagaimana tercakup dalam rencana usaha jangka panjang Grup. Sehubungan dengan itu, Grup melakukan kuasi-reorganisasi untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 51 (revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi- Reorganisasi ("PSAK 51") dengan menggunakan neraca tanggal 30 September 2012.

Langkah kuasi-reorganisasi tersebut di atas merupakan awal dari serangkaian langkah yang akan ditempuh Grup dalam mengupayakan kesinambungan usaha maupun pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Grup berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi akan memberikan dampak positif dan prospek yang baik terhadap Grup di masa mendatang, antara lain:

- Memulai awal baru dengan neraca yang menunjukkan posisi keuangan dan struktur modal yang lebih baik tanpa dibebani defisit masa lampau;
- Meningkatkan kemampuan dalam perolehan pendanaan dalam rangka pengembangan usaha;

44. QUASI REORGANIZATION

The economic crisis that occurred in mid 1997 caused by the drastic weakening of the Rupiah value against foreign currencies and other macroeconomic factors such as rising lending rates, tight liquidity, and lower investor confidence had a negative impact on the Indonesian economy at the time that. Position of negative balance accumulated as of 30 September 2012 (before quasi-reorganization) The Entity still recorded a deficit of Rp581,917,351,573. Although the Group deficit balance is still significant, the Group has recorded a net profit of Rp127,485,626,056 from 2006 to 2011. The Board of Directors believes that the Group has good business prospects in the future and has potential revenues to be earned in the future comes with its strengths and resources as covered by the Group's long-term business plan. Accordingly, the Group has quasi-reorganized to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all of its assets and liabilities, in accordance with SFAS 51 (revised 2003) on Quasi-Reorganization Accounting ("SFAS 51") using a balance sheet dated 30 September 2012.

The above-mentioned quasi-reorganization step is the beginning of a series of steps that the Group will take in pursuing business continuity as well as sustainable long-term growth. The Group believes that quasi-reorganization will have a positive impact and good prospects for the the Group in the future, including:

- *Beginning early with a balance sheet showing better financial position and capital structure without being burdened with past deficits;*
- *Improve the ability to obtain funding in the framework of business development;*

44. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

Kuasi-reorganisasi yang telah dilaksanakan Grup pada tanggal 30 September 2012 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PSAK No.51 (Revisi 2003) "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi" yang menghasilkan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset sebesar Rp1.853.363.433.290 yang terdiri dari aset tetap sebesar Rp1.443.622.410.205 dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sebesar Rp409.741.023.083.

Manajemen Grup membukukan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset bersih.

Dengan kuasi-reorganisasi tersebut, Grup mengeliminasi saldo akumulasi kerugian per tanggal 30 September 2012 sebesar Rp581.917.351.573, untuk komponen ekuitas sebagai berikut:

Akumulasi kerugian Rp581.917.351.573 Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset Rp1.853/363.433.290 Cadangan umum Rp19.296.469.106.

Penentuan dari nilai wajar aset Grup didasarkan pada penilaian pada tanggal 30 September 2012 yang dilakukan oleh penilai independen dalam laporan KJPP Husni, Joediono dan Rekan No.238-HJR/PPILR/IV/2013 dan No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No.295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No.268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No.030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No.M.P.P.13.11.0135 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk aset tanah dan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk aset bukan tanah.

44. QUASI REORGANIZATION (continued)

The quasi-reorganization of the Group as of 30 September 2012 in accordance with the prevailing regulations and SFAS No.51 (Revised 2003) "Accounting for Quasi-Reorganization" which resulted in an increase in the revaluation of the fair value of assets amounting to Rp1,853,363,433,290 consisting of assets amounting to Rp1,443,622,410,205 and noncurrent assets which will be abandoned amounting to Rp409,741,023,083.

The Group management recorded an increase in net assets valuation.

With the quasi-reorganization, the Group eliminates the accumulated losses balance as of 30 September 2012 amounting to Rp581,917,351,573, for the following equity components:

Accumulated losses Rp581,917,351,573 Increase in revaluation of asset fair value Rp1,853,363,433,290 General reverses Rp19,296,469,106.

The determination of the fair value of the Group assets is based on the valuation as of 30 September 2012 conducted by an independent appraiser in KJPP Husni, Joediono and Associates under its reports No.238-HJR/PPILR/IV/2013 and No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No.295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No.268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No.030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No.MPP13.11.0135 using a market data comparison approach to land assets and the method of replacement cost depreciates for non-land assets.

44. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

44. QUASI REORGANIZATION (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup sebelum dan setelah kuasi reorganisasi per tanggal 30 September 2012 sebagai berikut:

The consolidated financial position of the Grup and Subsidiaries before and after quasi-reorganization as of 30 September 2012 is as follows:

	Sebelum Kuasi / Before the Quasi	Penyesuaian / Adjustment	Setelah Kuasi / After the Quasi	
Aset lancar	849.677.694.787	-	849.677.694.787	<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	408.462.437.325	1.853.363.433.290	2.261.825.870.615	<i>Non-current assets</i>
Total aset	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total assets
Liabilitas lancar	1.089.094.456.779	-	1.089.094.456.779	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas tidak lancar	574.642.483.059	-	574.642.483.059	<i>Non-current liabilities</i>
Modal saham	156.200.000.000	-	156.200.000.000	<i>Capital stock</i>
Penyertaan modal pemerintah	86.248.756	-	86.248.756	<i>Government equity participation</i>
Cadangan umum	19.269.469.106	(19.269.469.106)	-	<i>General reserves</i>
Selisih penilaian aset dan liabilitas	-	1.290.715.550.823	1.290.715.550.823	<i>Difference in valuation of assets and liabilities</i>
Saldo laba (rugi) Kepentingan nonpengendali	(581.917.351.573)	581.917.351.573	-	<i>Retained earnings (loss)</i>
	764.825.985	-	764.825.985	<i>Non-controlling interests</i>
Total liabilitas & ekuitas	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total liabilities & Equity

Pada laporan keuangan tahun buku 2012 dan seterusnya (selama 10 tahun) dibuat catatan dalam akun saldo laba (posisi keuangan) sebagai berikut Saldo rugi sebesar Rp581.917.351.573 telah dieliminasi dengan cadangan umum dan selisih penilaian aset dan liabilitas Rp1.853.363.433.290, pada saat kuasi-reorganisasi Entitas pada tanggal 30 September 2012. Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, Entitas telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba.

In the financial statements for fiscal year 2012 and beyond (for 10 years), the notes are recorded in the retained earnings (financial position) account as follows: Loss balance amounting to Rp581,917,351,573 has been eliminated with general reserves and asset valuation differences and liabilities of Rp1,853,363,433,290, upon the quasireorganization of the Entity as of 30 September 2012. Based on PPSAK 10 regarding Revocation of SFAS 51: Quasi-Reorganization Accounting, the Entity has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in the course of quasi reorganization to retained earnings.

45. KONTIJENSI

a) Kasus Daging

PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur :

- Bahwa untuk rincian dana yang belum terbayarkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersisa 10% dari kontrak No. 787/KNT/Pengadaan LN-Trs-Hk/PPI/X/2018.
- Bahwa laporan polisi No. LPB/8/K/I/2019/PMJ/RESJU Polres Metro Jakarta Utara telah memasuki tahap dimana terlapor sudah dijadikan tersangka. Namun, berkas laporan Polisi No. LPB/8/K/I/2019/PMJ/RESJU akan ditarik dan ditangani oleh Polda Metro Jaya.
- Pada tanggal 27 Oktober 2020, proses hukum sedang memasuki tahap P-21 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

PT Ficorp :

- Bahwa seluruh saksi sebagian besar telah dimintai serta didengar keterangannya. Namun, masih terdapat 3 Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang masih akan dimintai keterangan untuk menaikan Status Pihak-pihak yang terlibat.
- Bahwa biaya operasional belum dicairkan sesuai dengan Kontrak No. 932/KNT/PengadaanLN-TrsHk/PPI/XI/2018.
- Bahwa biaya jasa hukum masih tersisa pada Kontrak No.932/KNT/Pengadaan LN-Trs-Hk/PPI/XI/2018. Masih tersisa 10% dari nilai kontrak.

b) Gugatan Frits Laurens Macawalang, dkk.

Merupakan perkara hukum terkait dengan kepemilikan aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Raya Manado Bitung (Jalan Wolter Mongosidi).

45. CONTIGENCY

a) Meat case

PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur:

- *Where as for the details of the funds that have not been paid by the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the remaining 10% of contract No. 787/KNT/Procurement of LN-Trs-Hk/PPI/X/2018.*
- *That police report No. LPB/8/K/I/2019/PMJ/RESJU at North Jakarta Metro Police have entered the stage where the reported has been named a suspect. However, the Police report file No. LPB/8/K/I/2019/PMJ/RESJU will be withdrawn and handled by Polda Metro Jaya.*
- *On 27 October 2020, the legal process is entering the P-21 stage at the DKI Jakarta High Prosecutor's Office.*

PT Ficorp:

- *That all of the witnesses had been questioned for the most part and their testimony heard. However, there are still 3 branches of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) which will still be asked for information to raise the Status of the Parties involved.*
- *That the operational costs have not been disbursed in accordance with Contract No. 932 / KNT / Procurement of LK-Trs-Hk / PPI / XI / 2018.*
- *That the legal service fee is still remaining in Contract No.932/KNT/Procurement of LN-Trs-Hk/PPI/XI/2018. There is still 10% left of the contract value.*

b) Frits Laurens Macawalang's Lawsuit

This is a legal case related to ownership of assets in the form of land located in the Manado Bitung Highway (Wolter Mongosidi Road).

45. KONTIJENSI (lanjutan)

**b) Gugatan Frits Laurens Macawalang, dkk.
(lanjutan)**

Berdasarkan putusan No. 25/Pdt.G/2017/PN Bit tanggal 28 November 2018 terkait perkara antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan Frits Laurens Macawalang, dkk sebagai penggugat, mengabulkan gugatan atas perkara ini dengan putusan Frits Laurens Macawalang, dkk sebagai ahli waris atas objek sengketa.

Berdasarkan putusan No. 64/PDT/2018/PT MND tanggal 4 Oktober 2018 terkait perkara antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai penggugat dengan Frits Laurens Macawalang, dkk, sebagai tergugat, menerima permohonan banding dari pembanding semula (tergugat). Berdasarkan surat relaas pemberitahuan putusan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020, mengabulkan permohonan kasasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No: 64/PDT/2018/PT.MND, tanggal 3 Juli 2018 yang menguatkan putusan No. 25/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 16 November 2017.

**c) Gugatan perdata PT Wisanggeni Mitra
Sejahtera**

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak atas pekerjaan pembangunan *cold storage* dengan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera telah menggugat perdata PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) yang telah bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Jakarta Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan gugatan nilai kerugian sebesar Rp 11.868.720.000 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah). PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) mengajukan gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) senilai Rp 9.798.546.000 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dan empat puluh enam ribu Rupiah).

45. CONTIGENCY (continued)

**b) Frits Laurens Macawalang et al Lawsuit
(continued)**

Based on decision No. 25 / Pdt.G / 2017 / PN Bit dated 28 November 2018 related to the case between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and Frits Laurens Macawalang. As plaintiffs, granted a claim for this case with Frits Laurens Macawalang's decision that, as the heirs above object of dispute.

Based on the decision No. 64 / PDT / 2018 / PT MND dated 4 October 2018 related to the case between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) as the plaintiff with Frits Laurens Macawalang, et al., As the defendant, received the appeal from the original comparator (defendant). Based on the letter of willingness to announce the cassation decision on 19 August 2020, granted the cassation request of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and canceled the Manado High Court's decision No: 64/PDT/2018/PT.MND, dated 3 July 2018 which strengthened the decision No. 25/Pdt.G/2017/PN.Bit dated 16 November 2017.

**c) Civil lawsuit of PT Wisanggeni Mitra
Sejahtera**

Currently, the Group is facing a lawsuit on the contract regarding cold storage construction work with PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera have filled a civil lawsuit against PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) which has been merged to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Government of Republic of Indonesia Cq Mayor of North Jakarta, Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) with total compensation amounting to Rp 11,868,720,000 (eleven billion eight hundred sixty-eight million seven hundred and twenty thousand Rupiah). The Bhandha Ghara Reksa (Persero) filled a lawsuit for Reconvension (Counterclaim) amounting to Rp 9,798,546,000 (Nine billion seven hundred ninety-eight million five hundred and forty-six thousand Rupiah).

45. KONTIJENSI (lanjutan)

**c. Gugatan perdata PT Wisanggeni Mitra
Sejahtera (lanjutan)**

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 546/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 8 Oktober 2018 gugatan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera tersebut ditolak. Pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 19 Oktober 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses-proses hukum tersebut di atas belum diketahui.

**d) Gugatan perdata Agrocorp International
Pte Ltd**

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak tripartit atas pekerjaan *Collateral Management Services* dengan para pihak yaitu: Agrocorp International Pte Ltd dan LH Asia. PT Coffindo dan Entitas. Agrocorp International Pte Ltd telah mengugat perdata PT Coffindo dan Entitas di *Singapore International Arbitration Center* (SIAC). SIAC telah memutuskan bahwa PT Coffindo harus membayar ganti rugi sebesar USD 4.566.697 kepada Agrocorp International Pte Ltd. Jika PT Coffindo gagal melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, maka akan menjadi beban Entitas. Entitas juga harus membayar kerugian Agrocorp International Pte Ltd sebesar USD 98.464. Selain itu, Entitas dan PT Coffindo secara bersama-sama harus menanggung biaya perkara sebesar USD 75.036. Permohonan Agrocorp International Pte Ltd untuk melakukan eksekusi keputusan SIAC di atas, telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2019. Karena putusan tersebut belum bersifat final dan mengikat (*inkracht*), Entitas telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan eksekusi atas putusan arbitrase asing tersebut No. 146/PDT.BTH/2019/PN.Jkt.Pst.sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses ini belum diketahui.

45. CONTIGENCY (continued)

**c. Civil lawsuit of PT Wisanggeni Mitra
Sejahtera (continued)**

Based on decision of the District Court of West Jakarta No 546/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT dated 8 October 2018 the lawsuit PT Wisanggeni Mitra Sejahtera was rejected. On 15 October 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal on the court decision. Based on decision of the High Court DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI upheld the decision of the District Court of West Jakarta. On 19 October 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Up to the date of this report, the result of the above legal processes is not known yet.

**d) Civil lawsuit of Agrocorp International
Pte Ltd**

*Currently, the Group is facing a lawsuit on the tri-partite contract regarding Collateral Management Services whose parties are Agrocorp International Pte Ltd and LH Asia. PT Coffindo and the Entity. Agrocorp International Pte Ltd and LH Asia have filed a civil lawsuit against PT Coffindo and the Entity at Singapore International Arbitration Center (SIAC). SIAC had ruled that PT Coffindo should pay indemnity amounting to USD 4,566,697 to Agrocorp International Pte Ltd. If PT Coffindo failed to make indemnity payment, it should be borne by the Entity. The Entity should also pay indemnity to Agrocorp International Pte Ltd amounting to USD 98,464. In addition, the Entity together with PT Coffindo should pay the court fee amounting to USD 75,036. Request by Agrocorp International Pte Ltd to execute the SIAC's ruling had been granted by the District Court of Central Jakarta on 28 January 2019. As the court's decision is not final and binding yet (*inkracht*), the Entity making a legal effort by lodging a request to revoke the execution approval on the foreign arbitration centre's ruling No. 146/PDT.BTH/2019/PN.Jkt.Pst. Up to the date of this report, the result of this process is not known yet.*

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

The table below is the carrying amount and fair value of financial assets and financial liabilities in the statement of financial position as of 31 December 2021 and 2020.

	2021		2020	
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value
Aset Keuangan/Financial Assets				
Pinjaman dan piutang: / Loans and receivables:				
Kas dan bank/Cash and Cash Equivalent	173.058.934.548	173.058.934.548	230.249.772.006	230.249.772.006
Daposiso dijaminan/Guarantee Deposit	21.828.113.040	21.828.113.040	1.400.000.000	1.400.000.000
Piutang usaha/Trade receivables	341.339.677.431	341.339.677.431	337.607.690.728	337.607.690.728
Piutang lain-lain/Other receivables	62.737.954.385	62.737.954.385	59.749.207.980	59.749.207.980
Aset keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current financial assets	287.000.000	287.000.000	287.000.000	287.000.000
Jumlah/Total	599.251.679.404	599.251.679.404	629.293.670.714	629.293.670.714
Liabilitas keuangan lain-lain: / Other financial liabilities:				
Utang usaha/Trade payable	209.946.581.814	209.946.581.814	237.952.882.008	237.952.882.008
Utang Bank/Bank Loan	143.366.049.385	143.366.049.385	22.850.409.618	22.850.409.618
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/Other current financial liabilities	57.877.800.924	57.877.800.924	13.368.656.846	13.368.656.846
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Current Portion of Long-Term Liabilities	26.136.879.636	26.136.879.636	18.022.248.548	18.022.248.548
Utang Jangka Panjang/ Long Term Payables	925.217.534.307	925.217.534.307	938.090.459.727	938.090.459.727
Utang leasing/Leases Liabilities	1.274.143.419	1.274.143.419	2.014.858.587	2.014.858.587
Jumlah/Total	1.363.818.989.485	1.363.818.989.485	1.232.299.515.334	1.232.299.515.334

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan deposito dijaminan adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair value of the underlying financial assets (generally less than one year), such as cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, and guarantee deposit is carried at carrying amount due to the approximate value of the warehouse.

Nilai wajar bank dibatasi penggunaannya mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala untuk merefleksikan suku bunga pasar.

The fair value of the bank is limited to its carrying value close to the carrying amount because the interest rate changes are periodically assessed to reflect the market interest rate.

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank, utang usaha, utang sewa utang lain-lain dan akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya karena sifatnya yang jangka pendek.

Nilai wajar utang bank jangka panjang diperkirakan mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala untuk merefleksikan suku bunga pasar.

47. ESTIMASI NILAI WAJAR

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan harus diestimasi untuk pengakuan dan pengukuran atau untuk tujuan pengungkapan.

PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan "mensyaratkan pengungkapan pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkat hierarki pengukuran nilai wajar berikut:

1. Harga kuotaasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (level 1). Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan harga pasar kuotaasian pada tanggal pelaporan. Harga pasar yang dikutip digunakan dalam harga penawaran saat ini, sedangkan liabilitas keuangan menggunakan harga permintaan.
2. Input selain harga quoted termasuk dalam level 1 yang dapat diamati untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (berasal dari harga) (level 2), dan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Penilaian ini memaksimalkan penggunaan jika data pasar yang dapat diobservasi di mana itu adalah nilai yang tersedia dan bergantung sesedikit mungkin pada perkiraan. Jika semua input signifikan mensyaratkan nilai wajar suatu instrumen dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam level 2.
3. Input untuk aset dan kewajiban yang sedikit berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (level 3) Jika satu atau lebih input signifikan tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen termasuk dalam level 3.

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

Financial Liabilities

The carrying amount of financial liabilities, such as bank debt, trade payable, lease liabilities, other debts and accruals are close to the estimated value of the fair value due to its short-term nature.

The fair value of investment fund ex-BPPN account is estimated to be close to the carrying amount because the interest rate changes are periodically assessed to reflect the market interest rate.

47. FAIR VALUE ESTIMATION

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

1. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1).
The fair value of financial instrument traded in active market based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used in the current bid price, while financial liabilities use ask price.
2. Inputs other than quoted price included within level 1 that are observable for the assets or the liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and the fair value of financial instruments that are not traded in active market is determined using valuation techniques. These valuations maximize the use of observable market data where it is value available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs requires to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.
3. Inputs for the assets and liability that are little based on observable market data (unobservable inputs) (level 3)
If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

47. ESTIMASI NILAI WAJAR (lanjutan)

Teknik penilaian khusus yang digunakan untuk menilai instrumen keuangan meliputi:

- (a) Penggunaan kuotasi harga pasar atau penawaran dealer untuk instrumen serupa, dan
- (b) Teknik lain, seperti analisis arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tersisa.

Aset dan liabilitas keuangan Entitas yang diukur dan diakui menggunakan pengukuran nilai wajar level 2.

48. KONDISI EKONOMI

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan, operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi Entitas yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran virus Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Entitas.

Grup berkeyakinan bahwa pandemi COVID -19 saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis Grup, namun terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai dampak kondisi saat ini terhadap bisnis Grup di masa yang akan datang.

47. FAIR VALUE ESTIMATION (continued)

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- (a) The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments, and*
- (b) Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

The Entity's financial assets and liabilities that are measured and recognized using the fair value measurement of level 2.

48. ECONOMIC CONDITION

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Covid-19 virus, has resulted to adverse effects including adverse in economic growth, decline in capital market, increase in credit risks, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operation, which may continue and result on unfavourable financial and operation of the Entity. The ability of Indonesia to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy, is largely dependent on the effectiveness of policies and actions responses issued by the Government of Republic of Indonesia on the eradicate the spread of the Covid-19 virus, as well as the fiscal and other measures that are being taken by the Government authorities. The effectiveness of the policy including actions and events are beyond the Entity's control.

The Group's management believes that the pandemic COVID-19 at this time has an insignificant impact on the Group's business performance, however there is significant uncertainty about the impact of the current condition on the Group's business in the future.

49. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 555/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No.7 tanggal 7 Januari 2022, penyertaan modal Negara Republik Indonesia di Enitas sebanyak 942.744 lembar saham seri B dialihkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia.

49. SUBSEQUENT EVENT

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 555/KMK.06/2021 concerning the Stipulation of the Increase of the the Republic of Indonesia Equity Participation in the Share Capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia as notarized in Notarial Deed No.7 dated 7 January 2022, the State's equity participation in the Entity of 942,744 B series shares is transferred to PT Rajawali Nusantara Indonesia

